PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH LAUT







2025

LKJIP

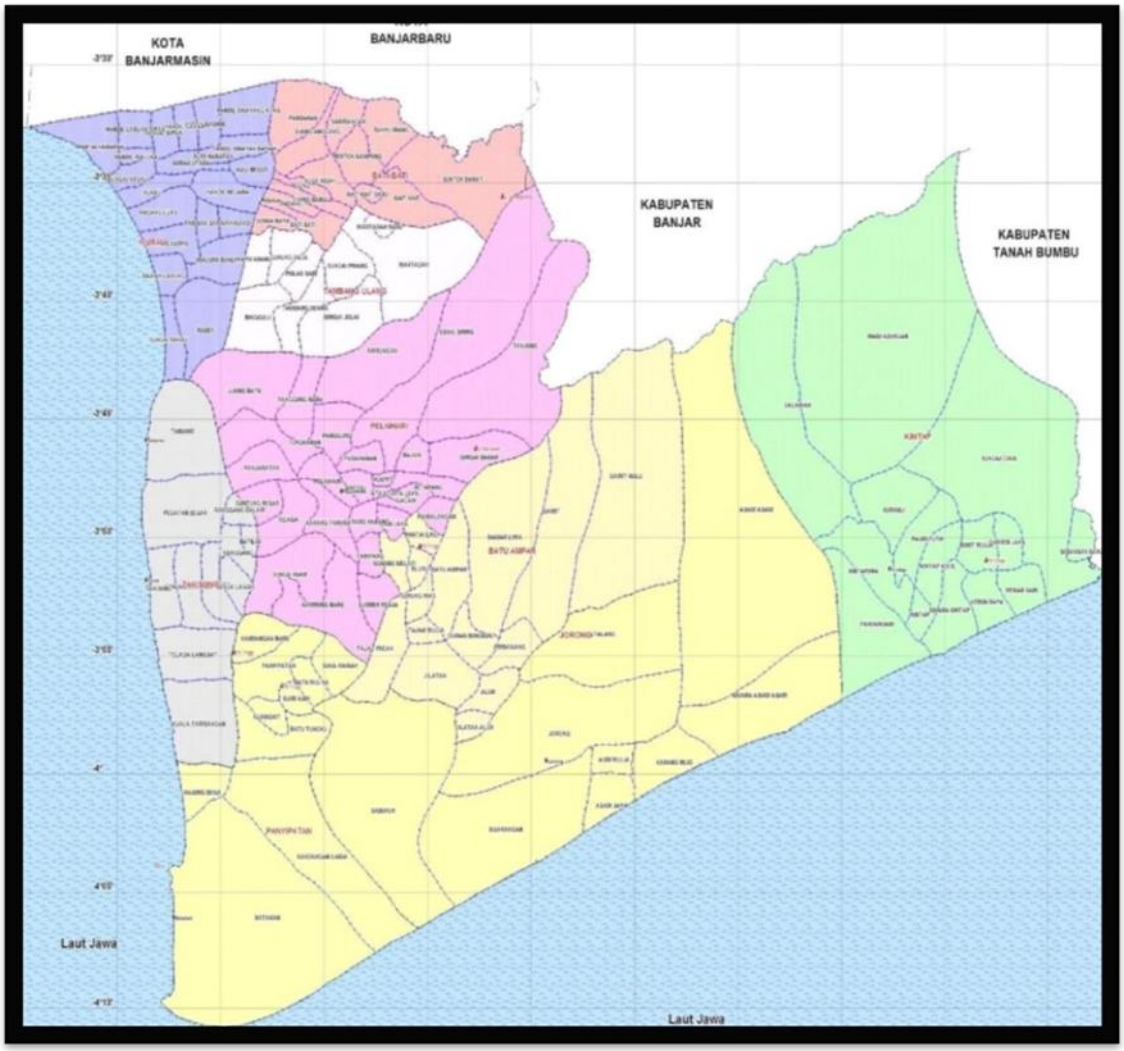
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



H. RAHMAT
Bupati Tanah Laut

H. M. ZAZULI, S.H
Wakil Bupati Tanah Laut

PETA KABUPATEN TANAH LAUT



LAMBANG DAERAH

MAKNA LAMBANG DAERAH

1. Lambang berbentuk perisai mengandung pengertian kekuatan mempertahankan daerah ini dari serangan musuh yang ingin mengganggu ketentraman.
2. Warna coklat dan biru pada bagian atas lambang dengan tulisan Tanah Laut melambangkan cakupan wilayah Kabupaten Tanah Laut meliputi wilayah daratan dan lautan.
3. Warna hijau dan kuning pada tubuh lambang, melambangkan Kabupaten Tanah Laut memiliki kesuburan alam dan kekayaan bahan tambang.
4. Garis miring hitam yang membelah pinang pada pertengahan lambang menunjukan arah angin, yaitu tenggara dan barat laut yang memiliki pengertian bahwa Tanah Laut mengalami dua musim yakni, musim kemarau dan musim hujan, disamping merupakan garis pertautan abadi antara hasil tambang dengan kesuburan alamnya.
5. Belanga yang berada ditengah lambang adalah pedaringan atau tempat beras, yang melambangkan kekayaan alam Tanah Laut yang disimpan di dalam belanga untuk lebih dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya, kemakmuran rakyat.
6. Bintang bersudut lima berada di atas belanga melambangkan Pancasila,

disamping juga melambangkan jumlah kecamatan pada awal pembentukan Kabupaten Tanah laut yang berjumlah lima Kecamatan.

7. Setangkai padi dan seikat purun di dalam lengkungan belanga melambangkan kemakmuran dan persatuan daerah Tanah Laut, yang juga merupakan salah satu hasil daerah yang berbentuk anyaman.
8. Perahu layar dan laut melambangkan bahwa Tanah Laut merupakan daerah nelayan yang kaya dengan hasil laut selain itu lambang ini juga memiliki pengertian ketabahan dalam menghadapi rintangan.

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
I N S P E K T O R A T
Jln. A.Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari
Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814 Telepon (0512) 22384
Laman https://inspektorat.tanahlautkab.go.id, Pos-el inspektorattala@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2026

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pelaihari, 10 Maret 2026

Inspektur

Andi Mashabi, AP., M.M
Pembina Tingkat I / IV/b
NIP. 197606231995111001

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai wujud pemenuhan kewajiban Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada masyarakat yang semakin mengharapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik *(Good Governance)*, dengan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029. Laporan kinerja dibuat setiap akhir periode pelaksanaan program dan kegiatan, yang sekaligus juga menjadi media yang berisi informasi dan data serta gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan seluruh perencanaan program/kegiatan dan kebijakan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Laporan Kinerja ini juga menguraikan keberhasilan - keberhasilan serta hal–hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk perbaikan pada masa mendatang serta menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcomes)*.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanah Laut ini disusun semoga dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan guna perbaikan dan penyempurnaan kinerja yang akan datang.

Pelaihari, Mei 2026

Bupati Tanah Laut,

H. RAHMAT TRIANTO

IKHTISAR EKSEKUTIF



Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 merupakan wujud Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta pelaksanaan Penetapan/Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2025. Laporan Kinerja ini merupakan laporan pertama RPJMD 2025 – 2029. Selain media pertanggungjawaban kinerja kepada publik/pemberi mandat, Laporan Kinerja ini juga merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

Sebagai perwujudan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan urusan wajib maupun pilihan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan ukuran keberhasilannya berupa 12 sasaran yang diukur dengan indikator kinerja sasaran sebanyak 23 indikator, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja tahun 2025 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis di atas.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 dapat dikatakan ***Sangat Baik/Sangat Berhasil.*** Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran target terhadap pencapaian sasaran yang didukung dengan program / kegiatan dan berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 2025 dan Penetapan Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 2025. Hasil

pengukuran secara mandiri (*self assessment*) menginformasikan secara ringkas tingkat capaian kinerja atas 19 (sembilan belas) indikator telah berhasil memenuhi dan melampui target yang ditetapkan, 3 indikator belum memenuhi target, dan 1 (satu) indikator tidak dilaksanakan penilaian.

Berdasarkan penilaian Skala Nilai Predikat Kinerja diperoleh rata-rata nilai capaiannya adalah 101,67% dengan predikat sangat tinggi (capaian lebih dari 91%), yang terdiri atas 20 (sembilan belas) indikator dengan predikat Sangat Tinggi (capaian lebih dari 91%), 2 (dua) indikator dengan predikat "tinggi" (capaian 76% sampai dengan 90%).

Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 tersebut belum sepenuhnya memenuhi harapan. Namun pada tahun 2026 dan seterusnya akan terus di tingkatkan akselerasinya dengan melakukan upaya yang lebih keras, cerdas dan terarah melalui percepatan pembangunan manusia dari aspek pendidikan, kesehatan dan kemampuan ekonomi, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029.

Penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*), mendorong perbaikan instansi pemerintah yang akuntabel, beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, serta menghasilkan umpan balik bagi pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yang bermuara pada peningkatan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Pelaihari, Mei 2026

Bupati Tanah Laut,

H. RAHMAT TRIANTO

DAFTAR ISI

MAKNA LAMBANG DAERAH i
KATA PENGANTAR iii
IKHTISAR EKSEKUTIF iv
DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Gambaran Umum Kabupaten Tanah Laut 2
C. Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah 5
D. Aparatur Sipil Negara 8
E. Isu Strategis 10

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 29
B. Indikator Kinerja Utama 40

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja 54
B. Akuntabilitas Keuangan 546

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 566
B. Strategi Peningkatan Kinerja 566

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. IKU Kabupaten Tanah Laut
2. Pernyataan Hasil Reviu Tahun 2025
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
4. Daftar Penghargaan Tahun 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, kepala daerah bertanggungjawab melaporkan hasil penyelengaraan pemerintahan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang telah disusun.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja yang disusun oleh setiap Instansi Pemerintah.

Bupati menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara periodik setiap akhir tahun anggaran sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu Laporan Kinerja disusun sebagai media pertanggungjawaban Bupati kepada masyarakat serta pihak lain yang berkepentingan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Tujuan pelaporan kinerja yaitu memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan *(disclosure)* secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Gambaran Umum Kabupaten Tanah Laut

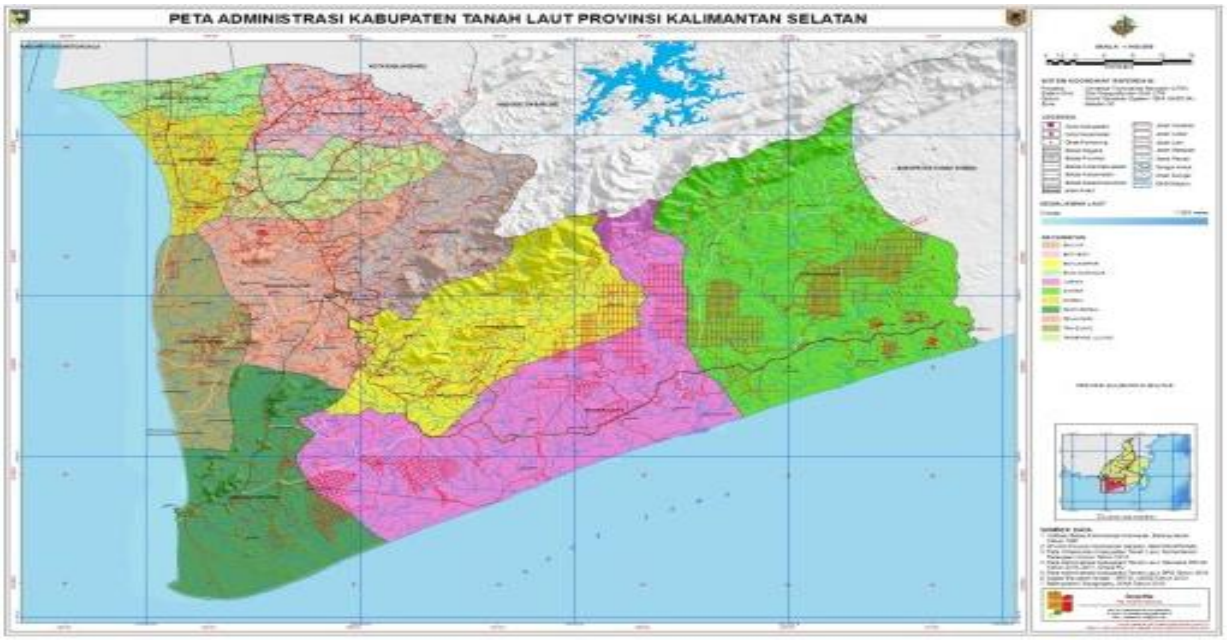
Kabupaten Tanah Laut merupakan kabupaten yang terletak paling selatan dari Provinsi Kalimantan Selatan dengan ibukota Pelaihari. Secara geografis, letak wilayah Kabupaten Tanah Laut berada di bagian selatan Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan posisi 114°30‘20” sampai 115°23‘31“ Bujur Timur dan 3°30’33” sampai 4°11‘38” Lintang Selatan. Sedangkan secara administrasi, wilayah Kabupaten Tanah Laut memiliki luas wilayah daratan mencapai 3.631,35 km² atau 9,17% dari luas wilayah Kalsel. Kabupaten Tanah Laut terdiri dari 11 (sebelas) wilayah Kecamatan yang terbagi dalam 130 Desa dan 5 Kelurahan.

Luas tersebut belum termasuk luas zona perairan laut, sepanjang 3 mil dari garis pantai pada saat pasang tertinggi sepanjang 200 km. Bila luas daratan Kabupaten Tanah Laut ditambah dengan luas zona perairan lautnya, maka luas total luas wilayah menjadi 449.730 Ha atau 4.497,3 km². Adapun batas administrasi dapat diuraikan sebagai berikut: Utara Kota Banjarbaru,

Selatan Laut Jawa, Timur Kabupaten Tanah Bumbu dan sebelah barat Laut Jawa.

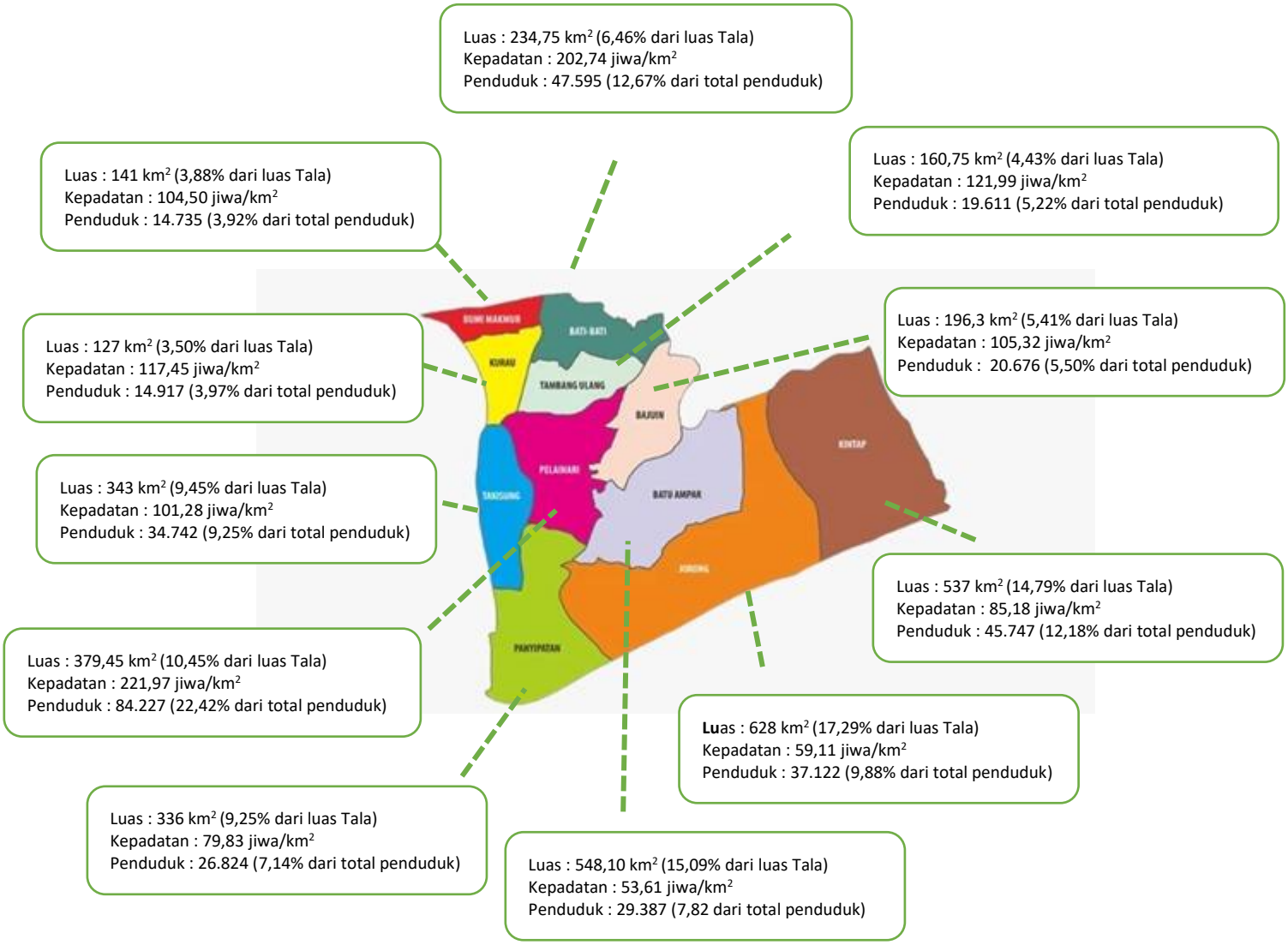
Gambar 1.1

Wilayah Administratif Kabupaten Tanah Laut, 2025



Sumber : RTRW kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036

Ruang lingkup wilayah administrasi wilayah Kabupaten Tanah Laut meliputi 11 Kecamatan, yaitu Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Bumi Makmur, Kecamatan Kurau, Kecamatan Tambang Ulang, Kecamatan Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Takisung, Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Jorong, dan Kecamatan Kintap. Daerah yang paling luas adalah Kecamatan Jorong dengan luas 628,00 km^2, kemudian Kecamatan Batu Ampar seluas 548,10 km^2 dan Kecamatan Kintap dengan luas 537,00 km^2, sedangkan kecamatan yang luas daerahnya paling kecil adalah Kecamatan Kurau dengan luas hanya 127,00 km^2.



Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2025, Disdukcapil

Dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut, secara keseluruhan terdapat 135 desa dan kelurahan, untuk wilayah yang memiliki jumlah Desa dan Kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Pelaihari (15 desa dan 5 Kelurahan), Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Kintap dengan jumlah masing-masing 14 Desa, sedangkan Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan terkecil adalah Kecamatan Tambang Ulang dan Kecamatan Bajuin dengan jumlah masing-masing 9 desa.

Kabupaten Tanah Laut termasuk daerah beriklim tropis basah karena tidak terdapat perbedaan musim yang jelas. Hujan turun merata sepanjang tahun dengan bulan-bulan relatif basah antara Bulan November - April dengan curah hujan rata-rata 322,5 dan bulan-bulan relative kering antara bulan Mei - Oktober dengan curah hujan rata-rata 79,16. Berdasarkan data curah hujan rata-rata bulanan dan perhitungan evapotranspilasi bulanan, maka Kabupaten Tanah Laut setiap bulannya tidak mengalami kekurangan air. Tanaman tahunan tidak memerlukan adanya air irigasi pada bulan-bulan yang *water balance*-nya kurang dari 100 mm akan mengalami kekurangan air.

Curah hujan sebagai faktor fisik bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh waktu. Curah hujan dimasukkan sebagai faktor fisik karena besar kecilnya curah hujan akan mempengaruhi faktor fisik yang lain, seperti menyebabkan terjadinya erosi, adanya genangan air pada daerah-daerah tertentu. Dengan pengaruh kedua faktor fisik tersebut sekaligus akan mempengaruhi tindakan budidaya baik terhadap teknik pengolahan tanah maupun pemilihan jenis komoditi yang akan dibudidayakan dalam bidang pertanian.

Jika dilihat dari jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut ,rasio jenis kelamin pada tahun 2025 sebesar 103,21 yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih besar daripada jumlah penduduk perempuan atau dari 100 perempuan terdapat sekitar 103 penduduk laki-laki. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah kecamatan Pelaihari dimana sekitar 22 persen penduduk Kabupaten Tanah Laut tinggal di kecamatan ini. Kecamatan ini juga merupakan kecamatan paling padat penduduk dengan kepadatan sekitar 221,97 jiwa per km2. Kecamatan Bumi Makmur merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu sebesar 14.735 jiwa.

1. Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai daerah otonom, Kabupaten Tanah Laut mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah melalui pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Untuk melaksanakan urusan tersebut, Pemerintah Kabupaten

Tanah Laut telah membentuk lembaga perangkat daerah berdasarkan pertimbangan berbagai aspek, yang meliputi : kewenangan yang dimiliki daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur dan pengembangan pola kerja sama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

1) Susunan Perangkat Daerah

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih tetap menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sampai dengan ditetapkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pemerintahan Umum dan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Urusan Penanggulangan Bencana.

Adapun nomenklatur perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penunjang urusan pemerintahan dapat dilihat pada Tabel berkut.

Tabel 1.1

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut

NO	NAMA SKPD	NOMOR PERDA	TIPOLOGI PERANGKAT DAERAH
1	SEKRETARIAT DAERAH	No. 14 Tahun 2022	Tipe A
2	SEKRETARIAT DPRD	No. 14 Tahun 2022	Tipe B
3	INSPEKTORAT KABUPATEN	No. 14 Tahun 2022	Tipe A
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	No. 14 Tahun 2022	Tipe A

5	DINAS KESEHATAN	No. 14 Tahun 2022	Tipe A
6	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN.	No. 14 Tahun 2022	Tipe A
7	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	No. 14 Tahun 2022	Tipe A
8	DINAS SOSIAL	No. 14 Tahun 2022	Tipe A
9	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	No. 14 Tahun 2022	Tipe A
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	No. 14 Tahun 2022	Tipe A
11	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	No. 14 Tahun 2022	Tipe A
12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	No. 14 Tahun 2022	Tipe A
13	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	No. 14 Tahun 2022	Tipe A
14	DINAS PARIWISATA	No. 14 Tahun 2022	Tipe A
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	No. 14 Tahun 2022	Tipe B
16	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.	No. 14 Tahun 2022	Tipe B
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	No. 14 Tahun 2022	Tipe A
18	DINAS PERHUBUNGAN	No. 14 Tahun 2022	Tipe C
19	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN.	No. 14 Tahun 2022	Tipe A
20	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	No. 14 Tahun 2022	Tipe A
21	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	No. 14 Tahun 2022	Tipe B
22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	No. 14 Tahun 2022	Tipe A
23	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	No. 14 Tahun 2022	Tipe B

24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	No. 14 Tahun 2022	Tipe A
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	No. 14 Tahun 2022	Tipe A
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	No. 14 Tahun 2022	Tipe A
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	No. 14 Tahun 2022	Tipe B
28	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	No. 10 Tahun 2013	-
29	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	No. 10 Tahun 2013	Tipe B
30	KECAMATAN PELAIHARI	No. 14 Tahun 2022	Tipe A
31	KECAMATAN KINTAP	No. 14 Tahun 2022	Tipe A
32	KECAMATAN JORONG	No. 14 Tahun 2022	Tipe A
33	KECAMATAN BARU AMPAR	No. 14 Tahun 2022	Tipe A
34	KECAMATAN PANYIPATAN	No. 14 Tahun 2022	Tipe A
35	KECAMATAN TAKISUNG	No. 14 Tahun 2022	Tipe A
36	KECAMATAN TAMBANG ULANG	No. 14 Tahun 2022	Tipe A
37	KECAMATAN BATI-BATI	No. 14 Tahun 2022	Tipe A
38	KECAMATAN BUMI MAKMUR	No. 14 Tahun 2022	Tipe A
39	KECAMATAN KURAU	No. 14 Tahun 2022	Tipe A
40	KECAMATAN BAJUIN	No. 14 Tahun 2022	Tipe A

Sumber Data : Diolah

2) Aparatur Sipil Negara

Dalam rangka melaksanakan Pemerintahan Daerah, salah satu unsur terpenting adalah Aparatur Sipil Negara. Jumlah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Data Simpeg Tahun 2025 adalah 6152 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 2286 orang dan perempuan sebanyak 3866 orang.

Tabel 1.2

Jumlah Aparatur Sipil Negara

Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)
1	SD/Sederajat	24	2	26
2	SLTP/Sederajat	26	7	33
3	SLTA/sederajat	300	167	467
4	Diploma I, II, III, IV	407	692	1099
5	Dokter Spesialis	17	8	25
6	Strata I	1,259	2,785	4044
7	Strata II	250	204	454
8	Strata III	3	1	4
Jumlah		**2286**	**3866**	**6152**

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tabel 1.3

Jumlah Aparatur Sipil Negara

Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan Golongan Tahun 2025

No	Golongan/Ruang	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)
1	Golongan I	16	1	17
2	Golongan II	216	206	422
3	Golongan III	957	1,803	2760
4	Golongan IV	435	499	934
Jumlah		**1624**	**2509**	**4133**

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

C. Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa yang akan datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis.

Isu strategis Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Kondisi Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Pendidikan:

   Partisipasi dan Akses Sekolah

   Dari segi pendidikan, Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD berada di angka 98,48%, yang menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah dasar sudah mengenyam pendidikan. Namun, APM untuk tingkat SMP hanya 73,10% dan SMA sebesar 64,61%, yang mengindikasikan masih banyak anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

   Faktor ekonomi dan akses terhadap sekolah masih menjadi kendala utama. Di beberapa kecamatan, jumlah sekolah menengah masih sangat terbatas. Pelaihari memiliki jumlah sekolah menengah terbanyak (15 unit), sementara kecamatan lainnya hanya memiliki 1-5 sekolah menengah. Hal ini menyebabkan anak-anak harus menempuh perjalanan yang jauh untuk bisa melanjutkan sekolah, yang pada akhirnya meningkatkan angka putus sekolah. Kesehatan Masyarakat: Penyakit dan Akses Layanan

   Masalah kesehatan yang paling dominan di Kabupaten Tanah Laut adalah tingginya kasus hipertensi primer, dengan 14.423 kasus pada tahun 2024. Penyakit lainnya yang juga menjadi perhatian meliputi dispepsia (13.058 kasus), diabetes mellitus (9.234 kasus), dan infeksi saluran pernapasan (7.595 kasus). Tingginya angka penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dalam

menerapkan pola hidup sehat.

Selain itu, kasus Diare dan Gastroenteritis akibat infeksi juga cukup tinggi, terutama di kalangan anak-anak. Kondisi ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam kualitas air minum dan sanitasi yang masih perlu diperbaiki.

Di sisi lain, jumlah fasilitas kesehatan masih terbatas, terutama untuk layanan tingkat lanjut. Kabupaten Tanah Laut hanya memiliki 3 rumah sakit, dengan 2 di antaranya berada di Pelaihari dan 1 di Kintap. Ini menunjukkan bahwa masyarakat di kecamatan lain masih harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Sementara itu, jumlah

Puskesmas dengan layanan rawat inap hanya 3 unit, yang berarti masih banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan perawatan intensif di daerah mereka.

Kematian ibu saat persalinan juga masih menjadi isu, dengan 6 kasus kematian ibu pada tahun 2024. Penyebab utama kematian ibu meliputi pendarahan, eklampsia, dan penyebab lainnya yang memerlukan intervensi lebih serius dalam hal peningkatan akses terhadap tenaga medis dan fasilitas kesehatan.

Kesehatan Anak: Gizi Buruk, Stunting dan Imunisasi

Kasus gizi buruk dan bayi berat lahir rendah (BBLR) di Kabupaten Tanah Laut masih cukup tinggi. Pada tahun 2024, terdapat 64 kasus gizi buruk dan 340 bayi lahir dengan berat badan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa asupan gizi selama masa kehamilan dan masa pertumbuhan anak masih belum optimal.

Prevalensi stunting di Kabupaten Tanah Laut mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dalam kurun waktu 2013 hingga 2023. Dalam beberapa tahun terakhir, yakni 10,52% pada 2021, 26,60% pada 2022, dan mencapai

41,70% pada tahun 2023.

Tingkat pencapaian program imunisasi juga masih belum mencapai target maksimal. Cakupan imunisasi DPT-HB3 hanya mencapai 61,26%, sedangkan imunisasi campak berada di angka 81,79%. Kurangnya cakupan imunisasi ini dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular di kalangan anak-anak.

Penduduk Usia Tua dan Dependecy Ratio

Pada tahun 2024, rasio ketergantungan di Kabupaten Tanah Laut mengalami penurunan menjadi 43,95%, dengan angka ketergantungan laki- laki sebesar 44,52% dan perempuan 43,36%. Selama periode 2020–2023, angka ketergantungan laki-laki selalu lebih rendah dibandingkan perempuan, namun tren ini berubah pada 2023–2024, di mana angka ketergantungan laki- laki menjadi lebih tinggi. Perubahan ini mencerminkan dinamika demografi yang dapat memengaruhi kebijakan ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial. Selain itu, dengan jumlah penduduk usia tua yang mencapai 20.574 jiwa, diperlukan strategi yang berkelanjutan dalam menghadapi tantangan peningkatan populasi lansia, termasuk penyediaan layanan kesehatan, perlindungan sosial, serta penguatan program ekonomi bagi kelompok usia produktif untuk menjaga keseimbangan ketergantungan penduduk.

Masih Tingginya Perkawinan Usia Anak

Di Kabupaten Tanah Laut, kasus perkawinan usia anak masih cukup tinggi, dipicu oleh faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan, serta norma sosial yang membatasi peran dan pilihan hidup anak perempuan.

Terbatasnya Akses Ekonomi Perempuan

Perempuan di Tanah Laut, khususnya di wilayah pedesaan dan pesisir, masih menghadapi kesenjangan akses terhadap sumber daya ekonomi, pelatihan kewirausahaan, dan dukungan pembiayaan usaha, yang membatasi

kontribusinya terhadap ekonomi keluarga dan daerah.

Rendahnya TPAK Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan relatif rendah, disebabkan oleh minimnya peluang kerja yang ramah gender, beban domestik yang tinggi, serta belum optimalnya dukungan kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif.

Keterwakilan Politik Perempuan Masih Rendah

Perempuan Kabupaten Tanah Laut masih menghadapi hambatan struktural dan kultural dalam berpartisipasi di bidang politik dan pengambilan keputusan, terlihat dari rendahnya persentase perempuan di DPRD dan posisi strategis pemerintahan.

Kerentanan Perempuan terhadap Kekerasan dan Diskriminasi

Kelompok perempuan, termasuk penyintas kekerasan, perempuan penyandang disabilitas, dan perempuan kepala keluarga, masih menghadapi keterbatasan layanan perlindungan, pemulihan, serta minimnya jaminan keadilan yang berpihak pada korban.

Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut masih menjadi tantangan besar meskipun menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2023, persentase penduduk miskin mencapai 3,73%, turun dari 3,86% di tahun sebelumnya. Garis kemiskinan berada di angka Rp620.532 per kapita per bulan, mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, penurunan angka kemiskinan ini tidak serta-merta mencerminkan perbaikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, terutama di daerah pedesaan yang masih mengalami keterbatasan akses terhadap fasilitas dasar.

Ketimpangan ekonomi juga terlihat dari masih adanya kelompok masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar, baik pangan maupun non-

pangan. Selain itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan bahwa sebagian masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan masih mengalami kesulitan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.

Bencana Alam dan Kerentanan Wilayah

Kabupaten Tanah Laut merupakan daerah yang cukup rentan terhadap bencana, terutama banjir dan angin puting beliung. Pada tahun 2024, terdapat 12 desa terdampak banjir, dengan 3.623 warga yang mengungsi. Banjir ini menyebabkan 36 rumah mengalami kerusakan berat, 9 rusak sedang, dan 45 mengalami kerusakan ringan. Sementara itu, kejadian angin puting beliung berdampak pada 230 warga, terutama di Panyipatan, Takisung, dan Kurau.

Meskipun demikian, jumlah fasilitas penanggulangan bencana seperti tempat evakuasi dan sistem peringatan dini masih sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan masyarakat rentan terhadap dampak lebih besar setiap kali terjadi bencana.

Keamanan dan Sosial

Kasus kriminalitas di Kabupaten Tanah Laut masih menjadi perhatian, meskipun belum sepenuhnya teratasi. Risiko penduduk terkena kejahatan per 100.000 orang mencapai 27,72 pada tahun 2024, menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam hal keamanan masyarakat.

Selain itu, angka perceraian di Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan signifikan, dari 506 kasus pada 2023 menjadi 649 kasus pada 2024. Penyebab perceraian bervariasi, mulai dari faktor ekonomi hingga masalah sosial seperti perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) di Kabupaten Tanah Laut juga menjadi salah satu isu strategis yang memerlukan perhatian serius, mengingat dampaknya yang luas terhadap

kesehatan, sosial, dan keamanan masyarakat. Peredaran dan penyalahgunaan NAPZA tidak hanya berisiko merusak generasi muda, tetapi juga berpotensi meningkatkan angka kriminalitas serta gangguan ketertiban umum. Oleh karena itu, upaya penanggulangan perlu dilakukan secara komprehensif melalui peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang tegas, serta program pencegahan berbasis edukasi dan rehabilitasi.

2. Potensi Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
   Produksi Tanaman Pangan

   Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu daerah dengan lahan pertanian yang cukup luas di Kalimantan Selatan. Tanaman pangan utama yang menjadi andalan adalah jagung, dengan luas panen mencapai 16.408 hektar dan produksi tertinggi dari Kecamatan Panyipatan sebesar 26.415 ton. Meski demikian, beberapa permasalahan masih membayangi keberlanjutan sektor ini, terutama dalam ketersediaan pupuk subsidi, akses terhadap pasar yang stabil, dan dampak perubahan iklim yang menyebabkan ketidakpastian hasil panen.Komoditas cabai rawit, yang menjadi salah satu sayuran dengan produksi terbesar di Kabupaten Tanah Laut, mengalami fluktuasi produksi yang cukup signifikan. Pada tahun 2023, produksi mencapai 24.990 kuintal, tetapi mengalami penurunan di tahun berikutnya menjadi 17.396,50 kuintal. Turunnya produksi cabai rawit kemungkinan besar dipengaruhi oleh serangan hama, perubahan pola tanam, serta ketidakstabilan harga di tingkat petani yang membuat banyak petani beralih ke tanaman lain yang lebih menguntungkan.

   Selain cabai, hortikultura lainnya seperti tomat juga mengalami tren yang berfluktuasi. Pada tahun 2023, produksi tomat tercatat sebesar 8.468,40 kuintal, tetapi turun drastis menjadi 4.439,00 kuintal pada tahun 2024. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap penurunan ini adalah minimnya inovasi dalam metode pertanian, kurangnya pemanfaatan varietas unggul, serta kurangnya pendampingan dari dinas terkait dalam hal peningkatan kapasitas petani. Selain itu, Pada Tahun 2024, Indeks Ketahanan Kabupaten

Tanah Laut mencapai 80,59 yang masuk prioritas 6 atau sangat tahan menunjukkan bahwa daerah ini memiliki tingkat ketahanan yang cukup baik dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Perkebunan

Perkebunan menjadi sektor yang berperan penting dalam ekonomi Kabupaten Tanah Laut, dengan komoditas utama seperti kelapa sawit dan karet. Pada tahun 2023, luas perkebunan kelapa sawit mencapai 12.692 hektar, dengan hasil produksi sebesar 73.230,40 ton. Sementara itu, perkebunan karet mencakup 14.852 hektar dengan produksi 19.700,14 ton.

Namun, industri perkebunan di Tanah Laut menghadapi tantangan berat dalam hal harga komoditas yang fluktuatif. Harga karet dan kelapa sawit sangat bergantung pada permintaan global, yang sering kali membuat petani mengalami kerugian saat harga turun. Selain itu, masalah konflik lahan antara perusahaan perkebunan dan masyarakat setempat juga masih terjadi, terutama terkait kepemilikan lahan dan hak pengelolaan hutan yang sering kali tumpang tindih dengan konsesi perusahaan besar. Dari sisi keberlanjutan, konversi lahan hutan menjadi perkebunan menjadi salah satu masalah yang cukup mengkhawatirkan. Banyak petani yang membuka lahan dengan cara tebang bakar, yang berkontribusi pada peningkatan lahan kritis serta menyebabkan degradasi ekosistem di beberapa wilayah.

Pengurangan Kawasan Hutan dan Lahan Kritis Kabupaten Tanah Laut memiliki luas kawasan hutan mencapai 125.644,11 hektar, yang terdiri dari: Hutan Lindung: 13.688,39 hektar Hutan Produksi: 70.157,61 hektar Hutan Konservasi: 27.338,06 hektar Kawasan Tubuh Air: 435,74 hektar Namun, tekanan terhadap hutan di Tanah Laut semakin meningkat akibat konversi lahan untuk pertanian dan perkebunan. Akibatnya, beberapa wilayah mengalami deforestasi yang cukup tinggi, terutama di kawasan hutan produksi yang mengalami eksploitasi berlebihan. Hal ini menyebabkan meningkatnya lahan kritis, yang ditandai dengan hilangnya tutupan vegetasi alami, berkurangnya daya dukung tanah, serta meningkatnya risiko bencana seperti banjir dan tanah longsor. Dari sisi regulasi, meskipun terdapat aturan

yang mengatur kawasan hutan, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa permasalahan utama yang muncul adalah penggunaan lahan ilegal, kurangnya pengawasan terhadap praktik logging, dan lemahnya koordinasi antarinstansi dalam pengelolaan hutan.

Peternakan

Populasi Sapi Potong Meningkat, Namun Penyakit Ternak Cukup Tinggi Sektor peternakan di Tanah Laut didominasi oleh sapi potong, yang mengalami pertumbuhan populasi 7,22% pada tahun 2023, mencapai 88.420 ekor. Peningkatan ini mencerminkan potensi besar sektor peternakan dalam menopang ekonomi daerah. Namun, di balik peningkatan ini, terdapat sejumlah tantangan besar yang harus diatasi. Salah satu tantangan utama adalah penyakit ternak yang masih cukup tinggi, terutama akibat kurangnya vaksinasi dan keterbatasan tenaga medis hewan di beberapa kecamatan. Penyakit seperti demam tiga hari dan penyakit mulut dan kuku masih menjadi ancaman bagi populasi ternak.Selain itu, peternak di Tanah Laut masih menghadapi kendala dalam akses pakan berkualitas. Saat ini, sebagian besar pakan ternak masih bergantung pada pasokan dari luar daerah, yang menyebabkan fluktuasi harga dan menurunkan efisiensi usaha peternakan. Pengembangan pakan alternatif berbasis lokal menjadi solusi yang perlu segera diwujudkan untuk mengurangi ketergantungan ini.

Populasi Unggas Mengalami Penurunan

Berbeda dengan sapi potong, populasi unggas justru mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Populasi ayam pedaging di Kabupaten Tanah Laut mencapai 45.352.112 ekor, dengan produksi terbanyak di Kecamatan Bati-Bati. Namun, penurunan produksi unggas terjadi akibat harga pakan yang meningkat, wabah penyakit unggas, serta persaingan dengan produk unggas dari daerah lain.Untuk meningkatkan daya saing sektor unggas, diperlukan kebijakan yang lebih mendukung peternak dalam hal insentif harga pakan, akses pasar yang lebih luas, serta peningkatan manajemen biosekuriti untuk mencegah penyebaran penyakit unggas.

Perikanan Kaya Potensi, Tetapi Belum Optimal

Kabupaten Tanah Laut memiliki garis pantai yang cukup panjang, memberikan potensi besar bagi sektor perikanan. Namun, industri perikanan tangkap masih menghadapi berbagai tantangan, terutama akibat penurunan stok ikan di perairan akibat eksploitasi berlebihan. Produksi ikan dari perairan laut mencapai 61.790 ton pada tahun 2023, sementara dari perairan umum hanya 4.361 ton.Masalah lain yang cukup mengkhawatirkan adalah persaingan antara nelayan tradisional dengan kapal besar yang sering kali melakukan penangkapan ikan dalam jumlah besar tanpa memperhatikan keberlanjutan ekosistem laut. Hal ini mengakibatkan nelayan kecil semakin sulit memperoleh hasil tangkapan yang cukup.Meskipun potensi perikanan budi daya cukup besar, realisasinya masih jauh dari optimal. Salah satu kendala utama adalah minimnya infrastruktur dan teknologi dalam budidaya ikan. Petani ikan masih mengalami kesulitan dalam memperoleh benih berkualitas, pakan yang terjangkau, serta fasilitas pengolahan hasil perikanan. Selain itu, masalah pencemaran air akibat limbah industri dan pertanian mulai berdampak pada produktivitas sektor perikanan budi daya. Jika tidak segera ditangani, pencemaran ini dapat semakin menurunkan hasil produksi ikan di daerah ini.

3. Industri dan Pertambangan

Dominasi Sektor Makanan dan Minimnya Diversifikasi

Sektor industri di Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu pilar utama perekonomian daerah, dengan total 5.545 perusahaan yang tersebar di berbagai bidang usaha. Namun, ada satu fenomena yang cukup menonjol, yaitu dominasi industri makanan, yang mencapai 3.121 perusahaan (56,27% dari total industri).

Dampak dari kondisi ini adalah kurangnya diversifikasi ekonomi, di mana sektor industri lain tidak berkembang secara signifikan. Ketergantungan tinggi terhadap industri makanan dapat menjadi kelemahan saat terjadi gangguan pada sektor ini, seperti fluktuasi harga bahan baku atau perubahan kebijakan perdagangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mendorong

pertumbuhan industri manufaktur berbasis teknologi dan inovasi agar ekonomi daerah lebih tangguh.

Selain itu, industri manufaktur di Tanah Laut masih didominasi oleh industri kecil dan mikro, dengan tenaga kerja yang relatif sedikit dibandingkan industri menengah dan besar. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan akses terhadap teknologi modern, kurangnya tenaga kerja terampil, serta minimnya investasi dari sektor swasta.Eksploitasi Sumber Daya Tanpa Pengolahan LanjutanInformasi mengenai pertambangan dalam data yang tersedia cukup terbatas, tetapi dari pola pertumbuhan industri yang terkait dengan pengolahan batu bara dan minyak bumi, terlihat bahwa sektor ini masih berfokus pada eksploitasi sumber daya alam tanpa adanya nilai tambah yang signifikan.Konsekuensi dari pola ini adalah ketergantungan tinggi terhadap sektor ekstraktif, di mana bahan mentah dijual tanpa melalui proses manufaktur yang dapat meningkatkan nilai ekonominya. Hal ini menyebabkan daerah tidak mendapatkan manfaat optimal dari hasil sumber daya alamnya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendorong investasi dalam industri pengolahan berbasis sumber daya alam, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan daerah.

4. Distribusi Listrik dan Air

Ketimpangan Akses dan Tingginya Kehilangan Daya

Elektrifikasi di Kabupaten Tanah Laut menjadi isu strategis dalam upaya pemerataan akses energi bagi seluruh masyarakat. Meskipun rasio elektrifikasi terus meningkat, masih terdapat tantangan dalam penyediaan listrik ke daerah terpencil, terutama di wilayah pesisir dan pedesaan. Kendala seperti infrastruktur yang terbatas, jarak antar pemukiman yang berjauhan, serta biaya pembangunan jaringan listrik yang tinggi menjadi faktor utama yang perlu diatasi.Sumber utama listrik di Kabupaten Tanah Laut berasal dari PLN Wilayah VI Banjarmasin, dengan jumlah pelanggan listrik mencapai 93.598 pelanggan pada tahun 2024. Namun, ada beberapa masalah utama yang perlu menjadi perhatian:

Ketimpangan akses listrik antar wilayah: Beberapa kecamatan seperti Jorong dan Kintap masih bergantung pada pasokan dari PLN Tanah Bumbu, bukan dari jaringan PLN Tanah Laut sendiri. Ini menunjukkan belum meratanya distribusi listrik di seluruh daerah.Tingginya penyusutan atau kehilangan daya listrik: Pada tahun 2024, jumlah daya yang hilang mencapai 19,13 juta kWh, yang berarti ada inefisiensi dalam sistem distribusi. Hal ini dapat menyebabkan kenaikan biaya listrik bagi konsumen dan industri.Upaya yang perlu dilakukan adalah penguatan infrastruktur listrik di wilayah-wilayah yang belum terjangkau secara optimal, serta meningkatkan efisiensi distribusi untuk menekan angka kehilangan daya.

Ketersediaan Air Bersih Belum Merata di Seluruh Wilayah

Dalam hal penyediaan air bersih, PT. Air Minum Berkah Banua melayani 115.955 pelanggan, dengan total air yang disalurkan sebesar 2,15 juta meter kubik pada tahun 2024. Namun, ada permasalahan yang cukup krusial.Ketimpangan akses air bersih antar kecamatan: Beberapa kecamatan seperti Panyipatan dan Tambang Ulang tidak tercatat memiliki layanan distribusi air bersih yang memadai. Ini menunjukkan adanya kebutuhan peningkatan infrastruktur dan distribusi air. Kapasitas pasokan air masih terbatas, terutama bagi industri dan usaha besar yang membutuhkan suplai stabil untuk operasionalnya. Pemerintah daerah perlu mengembangkan investasi dalam sistem distribusi air yang lebih luas serta meningkatkan kapasitas produksi air bersih agar mampu memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat dengan lebih baik.

5. Struktur Tenaga Kerja

Ketimpangan antara Industri Formal dan Non-Formal

Terdapat lonjakan signifikan dalam jumlah industri formal di Kabupaten Tanah Laut, dari 167 perusahaan pada tahun 2023 menjadi 372 perusahaan pada tahun 2024. Hal ini berdampak pada peningkatan tenaga kerja dari 4.222 orang menjadi 7.965 orang.Namun, industri non-formal masih mendominasi dengan 5.681 unit usaha dan 9.557 tenaga kerja. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang beroperasi tanpa

perlindungan hukum, akses ke modal, dan fasilitas pendukung usaha lainnya. Untuk mengatasi hal ini, perlu ada fasilitasi bagi industri non-formal agar dapat berkembang menjadi industri formal, misalnya melalui kemudahan perizinan, bantuan akses modal, serta program pelatihan tenaga kerja.

6. Pariwisata

Ketimpangan Fasilitas dan Akses Akomodasi

Kabupaten Tanah Laut memiliki potensi pariwisata yang besar, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangannya. Salah satu masalah utama adalah ketimpangan distribusi akomodasi, di mana sebagian besar hotel terkonsentrasi di Kecamatan Pelaihari, sementara kecamatan lain yang memiliki destinasi wisata menarik, seperti Panyipatan dan Takisung, masih minim fasilitas penginapan. Hal ini mengurangi kenyamanan wisatawan dan membatasi lama kunjungan mereka. Selain itu, kunjungan wisatawan masih terkonsentrasi pada destinasi tertentu, seperti Pantai Batakan dan Bukit Timah, sementara objek wisata lain seperti Air Terjun Bajuin dan Pantai Swarangan memiliki jumlah pengunjung yang jauh lebih sedikit. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya peningkatan promosi dan pengembangan infrastruktur di destinasi yang kurang populer.

Kurangnya sarana pendukung pariwisata juga menjadi kendala, terutama dalam ketersediaan rumah makan dan restoran. Beberapa kecamatan seperti Panyipatan, Kurau, Bumi Makmur, dan Bati-Bati bahkan tidak memiliki rumah makan sama sekali, sehingga mengurangi kenyamanan wisatawan. Selain itu, fasilitas seperti tempat parkir, toilet umum, serta pusat informasi wisata masih minim di beberapa objek wisata. Tantangan lain adalah minimnya wisatawan mancanegara, dengan hanya enam wisatawan asing yang tercatat berkunjung ke Tanah Laut pada 2024. Hal ini disebabkan kurangnya promosi di tingkat internasional, keterbatasan fasilitas yang memenuhi standar global, serta aksesibilitas yang belum optimal.

Minimnya Minat

Pariwisata Kabupaten Tanah Laut juga mengalami fluktuasi kunjungan wisatawan yang cukup besar setiap bulannya. Kunjungan wisatawan

cenderung meningkat saat musim liburan dan menurun pada bulan-bulan biasa. Ketergantungan pada musim liburan ini menunjukkan perlunya strategi pemasaran yang lebih merata sepanjang tahun agar pariwisata tetap stabil. Aksesibilitas ke beberapa destinasi wisata juga masih menjadi tantangan, terutama karena jarak yang cukup jauh dari pusat kota Pelaihari serta kurangnya transportasi umum. Beberapa destinasi seperti Pantai Kintap dan Pantai Cemara berjarak 90 km dari pusat kota, sehingga perlu perbaikan infrastruktur dan layanan transportasi agar lebih mudah diakses oleh wisatawan.

Selain itu, keberagaman jenis wisata masih terbatas, dengan mayoritas destinasi berupa wisata alam seperti pantai dan gunung. Wisata buatan dan edukasi masih belum berkembang optimal, padahal keberagaman ini penting untuk menarik lebih banyak segmen wisatawan, termasuk wisata keluarga dan wisatawan yang mencari pengalaman edukatif. Potensi wisata bahari juga belum dimanfaatkan secara maksimal, meskipun Kabupaten Tanah Laut memiliki garis pantai yang panjang. Beberapa pantai masih kurang dikelola dengan baik dan minim atraksi tambahan seperti olahraga air atau ekowisata pesisir.

Hal terakhir yang tidak kalah mendesak adalah pengelolaan lingkungan yang kurang optimal, terutama di kawasan pantai yang mengalami abrasi dan pencemaran sampah. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini bisa merusak daya tarik wisata dalam jangka panjang.

7. Infrastruktur, Transportasi, dan Komunikasi

Jaringan Jalan: Kerusakan Masih Jadi Tantangan Utama

Kabupaten Tanah Laut memiliki jaringan jalan yang cukup panjang dengan sebagian besar berada di bawah kewenangan pemerintah daerah. Namun, kondisi jalan masih menjadi permasalahan serius, dengan lebih dari 30% mengalami kerusakan dalam kategori rusak hingga rusak berat. Keadaan ini mempengaruhi kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi barang, terutama di wilayah yang memiliki aktivitas ekonomi tinggi.

Sebagian besar jalan telah beraspal, tetapi masih ada ruas yang berupa jalan

tanah atau kerikil yang rentan terhadap kerusakan akibat cuaca ekstrem dan beban kendaraan berat. Kecamatan Pelaihari memiliki panjang jalan terpanjang dibandingkan kecamatan lainnya, yang mencerminkan posisinya sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi.

Lonjakan Kendaraan Pribadi, Transportasi Umum Masih Minim

Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Tanah Laut terus meningkat setiap tahun, didominasi oleh sepeda motor yang menjadi moda transportasi utama bagi masyarakat. Selain itu, jumlah kendaraan roda empat seperti mobil penumpang dan truk juga bertambah, menandakan peningkatan mobilitas barang dan jasa. Namun, jumlah angkutan umum seperti bus masih sangat minim, sehingga masyarakat cenderung lebih bergantung pada kendaraan pribadi. Ketidakseimbangan ini dapat memperburuk kondisi lalu lintas dan meningkatkan konsumsi bahan bakar, yang berkontribusi terhadap emisi karbon.

Distribusi kendaraan tidak merata di seluruh kecamatan. Kecamatan Pelaihari sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi memiliki jumlah kendaraan paling banyak, diikuti oleh Kintap dan Jorong. Sementara itu, beberapa kecamatan lainnya memiliki jumlah kendaraan yang lebih sedikit, yang dapat menunjukkan keterbatasan akses transportasi atau rendahnya aktivitas ekonomi.

Transportasi Publik Terbatas, Angkutan Barang Tidak Merata

Minimnya transportasi umum menjadi salah satu permasalahan utama di Kabupaten Tanah Laut. Jumlah bus yang beroperasi masih sangat terbatas, sehingga masyarakat tidak memiliki banyak pilihan transportasi selain kendaraan pribadi. Kondisi ini berdampak pada peningkatan kepadatan lalu lintas, terutama di jalur utama yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi.

Selain transportasi penumpang, distribusi kendaraan logistik juga menunjukkan ketidakseimbangan. Kecamatan yang memiliki aktivitas ekonomi tinggi seperti Kintap dan Jorong cenderung memiliki lebih banyak truk dibandingkan daerah lain. Hal ini menunjukkan bahwa akses transportasi

barang lebih berkembang di wilayah tertentu, sementara daerah lainnya masih mengalami keterbatasan dalam infrastruktur logistik.

Dengan jumlah kendaraan yang terus bertambah, perawatan jalan menjadi tantangan tersendiri. Jika tidak diimbangi dengan pemeliharaan yang memadai, kerusakan jalan akan semakin parah dan dapat menghambat mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, perbaikan jalan dan peningkatan fasilitas transportasi umum perlu menjadi prioritas dalam pembangunan infrastruktur daerah.

Akses Telekomunikasi Belum Merata, Banyak Wilayah Blankspot

Sektor komunikasi di Kabupaten Tanah Laut mengalami perkembangan, tetapi masih menghadapi beberapa kendala, terutama dalam pemerataan akses telekomunikasi. Sejumlah kecamatan masih belum memiliki layanan pos yang memadai, yang dapat menyulitkan masyarakat dalam hal surat-menyurat dan pengiriman barang.

Selain itu, akses internet masih menjadi permasalahan di beberapa wilayah.Terdapat banyak titik blankspot atau area tanpa sinyal internet yang tersebar di beberapa kecamatan. Daerah dengan jumlah blankspot tertinggi antara lain Pelaihari, Batu Ampar, dan Takisung. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan digital yang perlu diperbaiki untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses yang setara terhadap layanan internet. Meskipun jumlah pelanggan internet rumah tangga terus meningkat, persentasenya masih relatif kecil dibandingkan jumlah penduduk di Kabupaten Tanah Laut. Hal ini menandakan bahwa masih banyak rumah tangga yang belum memiliki akses internet yang stabil, yang dapat menghambat perkembangan ekonomi digital dan akses terhadap informasi. Dalam hal infrastruktur telekomunikasi, jumlah menara BTS masih terbatas di beberapa kecamatan. Hal ini menyebabkan gangguan sinyal dan keterbatasan akses komunikasi digital di beberapa daerah. Perlu adanya ekspansi jaringan telekomunikasi serta peningkatan kapasitas layanan agar masyarakat di seluruh wilayah dapat menikmati akses komunikasi yang lebih baik.

8. Adaptasi Manajemen Pemerintahan dan Kualitas Layanan Publik

   Pelayanan publik berkualitas menjadi fokus utama masalah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, banyak tuntutan masyarakat dalam menyelenggaran layanan publik harus cepat, prima dan responsif. Masih banyak tugas untuk diselesaikan masalah layanan pemerintah. contoh masih adanya proses pelayanan perizinan yang belum sesuai dengan SOP Pelayanan, contohnya juga seperti pelayanan dasar pembuatan pengantar administrasi penduduk, pertanahan, koordinasi dan sebagainya. Penanganan persoalan polemik di masyarakat desa pun adalah bagian pelayanan publik pemerintahan desa. Maka secara umum bahwa segala pembuatan dokumen berharga bagi masyarakat desa tentu harus melalui pemerintahan desa terlebih dahulu sebagai dasar syarat legalitas. Mendekatkan pelayanan publik desa menjadi isu yang harus di tangkap oleh pemerintah, karena menjadi perhatian kepala daerah.

   Selain itu untuk menghadapi di era society 5.0, Pemerintahan di dunia, termasuk Indonesia dihadapkan pada era perkembangan teknologi yang canggih (artificial intelligence). Pemerintah Kabupaten Tanah Laut harus mengantisipasi era keterbukaan yang semakin luas, yang berujung pada kemampuan untuk bersaing dalam rangka meningkatkan kapasitas daya saingnya. Untuk mendukung era keterbukaan yang semakin meluas harus di dukung melalui pendekatan paradigma mengubah orientasi cara bekerja dengan apa yang disebut sebagai network government dan collaborative governance. Pemerintah sudah tidak dapat bekerja dan menyelesaikan masalah-masalah publik sendirian. Pemerintah berkomitmen dalam menangkap isu peluang tersebut dengan beradaptasi dengan inovasi layanan publik yang semakin dituntut untuk menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien. Manajemen pemerintahan di tuntut untuk dinamis dan adaptif dalam menyikapi perubahan. Birokrasi harus respon terhadap kebijakan yang terus berubah, selain itu pemerintah dihadapkan dengan pengelolaan APBD yang berdampak langsung kepada masyarakat.

9. Gerbang Logistik

Sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Laut memiliki potensi strategis dalam mendukung peran daerah sebagai gerbang logistik bagi Ibu Kota Nusantara (IKN) dan gerbang logistik Kalimantan. Namun, hingga saat ini, infrastruktur logistik dan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Tanah Laut masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan perannya dalam rantai pasok nasional dan internasional. Tantangan utama meliputi keterbatasan akses transportasi darat, laut, dan pelabuhan, belum berkembangnya pusat distribusi barang yang modern, serta kurangnya sinergi dengan kawasan industri dan perdagangan.

Untuk mendukung visi Kalimantan Selatan sebagai bagian dari Gerbang Logistik Nusantara, Kabupaten Tanah Laut perlu mempercepat pembangunan infrastruktur logistik, meningkatkan efisiensi rantai pasok, serta memperkuat kerja sama dengan IKN dan pasar global guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pada saat ini, Kabupaten Tanah Laut telah memiliki Pelabuhan Pelaihari yang berlokasi di Kecamatan Jorong. Pelabuhan ini berperan sebagai pintu masuk logistik dari luar pulau Kalimantan yang akan mendukung Kalimantan Selatan sebagai Gerbang Logistik Nusantara.

10. Hilirisasi Industri, Pertanian, dan Energi

Kabupaten Tanah Laut memiliki potensi besar dalam pengembangan industri hilir berbasis sumber daya alam, seperti pertanian, perikanan, dan kehutanan. Namun, hingga saat ini, hilirisasi industri dan sektor non-ekstraktif belum berkembang secara optimal sebagai sektor unggulan di masa depan. Kurangnya infrastruktur pendukung, rendahnya investasi industri pengolahan, serta keterbatasan tenaga kerja terampil menjadi tantangan utama dalam mendorong nilai tambah produk lokal. Selain itu, belum adanya ekosistem industri yang kondusif, termasuk insentif fiskal dan akses pasar yang luas, menghambat pertumbuhan sektor ini. Untuk mendukung Kalimantan Selatan sebagai bagian dari superhub ekonomi Nusantara, Kabupaten Tanah Laut perlu mempercepat hilirisasi industri melalui penguatan investasi, pembangunan kawasan industri terpadu, peningkatan kapasitas SDM, serta

pengembangan industri berbasis potensi unggulan daerah yang berorientasi ekspor dan berkelanjutan.Selain itu, Kabupaten Tanah Laut memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan perikanan untuk mendukung swasembada pangan, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam hilirisasi produk dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Kurangnya modernisasi pertanian, akses terbatas terhadap teknologi digital, serta ketergantungan pada pupuk dan bahan bakar bersubsidi menghambat peningkatan produktivitas. Selain itu, minimnya pengembangan pangan lokal dan pangan akuatik serta keterbatasan infrastruktur irigasi dan peralatan pertanian memperlambat transformasi sektor ini.

Di sisi lain, upaya menuju swasembada energi melalui ekonomi hijau masih terkendala oleh kurangnya investasi dalam energi terbarukan dan belum optimalnya pemanfaatan sumber daya energi lokal. Pengembangan energi berbasis bioenergi, tenaga surya, dan hidro masih perlu ditingkatkan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

Oleh karena itu, diperlukan strategi terpadu untuk mendorong hilirisasi swasembada pangan dan energi melalui pembangunan kawasan Food Estate, modernisasi dan digitalisasi pertanian, penguatan akses subsidi dan bahan baku pertanian, serta pengembangan energi hijau yang ramah lingkungan. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan energi yang berkelanjutan di Kabupaten Tanah Laut.

11. Panjang Garis Pantai Kabupaten Tanah Laut Mencapai 200 km Panjang Garis Pantai Kabupaten Tanah Laut sangat panjang

hingga mencapai 200 km. Pemanfaatan Potensi Perikanan Secara Berkelanjutan dapat dilakukan karena panjang garis pantai Kabupaten Tanah Laut mencapai 200 km, yang memberikan peluang besar dalam sektor perikanan tangkap, budidaya, serta industri pengolahan hasil perikanan. Namun, optimalisasi sektor ini masih menghadapi tantangan seperti modernisasi alat tangkap yang ramah lingkungan, pengembangan budidaya pesisir untuk komoditas unggulan (rumput laut, kerapu, udang vaname), serta

peningkatan infrastruktur pengolahan dan pemasaran agar produk perikanan memiliki daya saing tinggi di pasar domestik maupun ekspor. Oleh karena itu, strategi yang berkelanjutan diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan di Kabupaten Tanah Laut.

Namun, panjang garis pantai Kabupaten Tanah Laut mencapai 200 km dapat menjadi ancaman terjadinya banjir Pesisir dan Abrasi karena, sehingga rentan terhadap banjir rob akibat pasang laut, gelombang tinggi, dan badai. Selain itu, abrasi terus menggerus garis pantai, mengancam permukiman dan infrastruktur pesisir akibat minimnya perlindungan alami seperti hutan mangrove. Selain itu, Kerentanan Terhadap Banjir dan Kekeringan juga dapat terjadi karena banyak sungai bermuara ke laut, dan saat pasang tinggi, aliran sungai terhambat, memperparah banjir di daerah hilir. Di sisi lain, musim kemarau menyebabkan kekeringan yang berdampak pada pertanian, ketersediaan air bersih, serta meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPD)

RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis SKPD untuk tahun 2025 sampai dengan 2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran serta target selama periode tersebut.

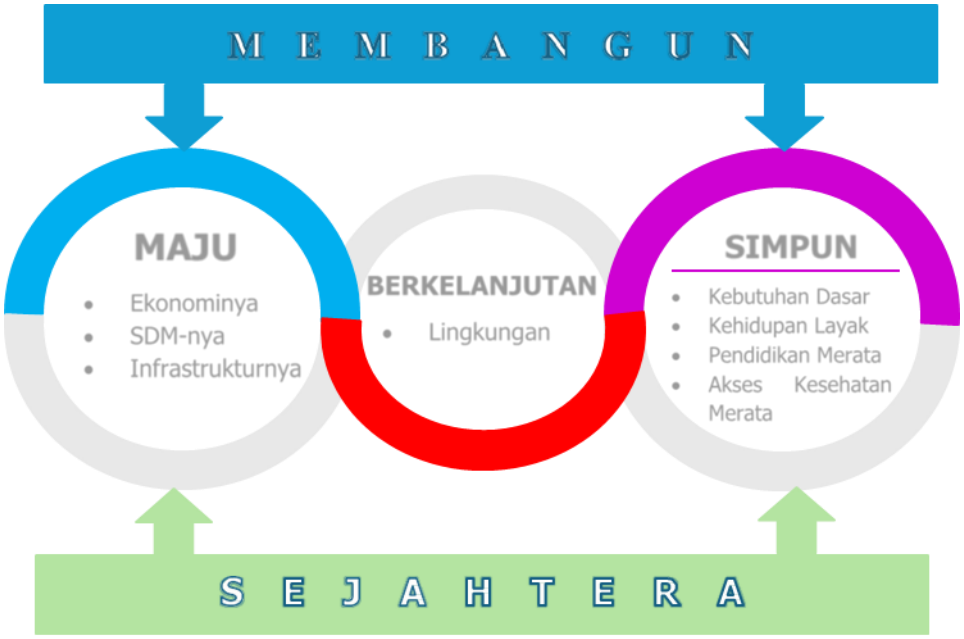
Adapun visi dan misi diuraikan sebagai berikut:

1. Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Visi pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut untuk periode RPJMD 2025-2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

"BERSAMA MEMBANGUN TANAH LAUT SIMPUN, MAJU, DAN BERKELANJUTAN"

Memahami substansi Visi merupakan bagian dari upaya membangun value yang harus melekat dalam merencanakan pembangunan Kab. Tanah Laut kedepan. Value Visi inilah yang akan menghantarkan kita dalam menyusun misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih tepat. Beberapa value yang terkandung dalam Visi diatas dapat digambarkan sebagai berikut:



*Note : SIMPUN berasal dari **Bahasa Banjar** yang memiliki arti "**rapi atau tertata dengan baik** atau bisa juga diartikan sebagai "**selesai**"*

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Dengan memperhatikan proses transformasi Misi Kepala Daerah terpilih kepada Misi Pembangunan Daerah, maka Misi Pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

a. Membangun SDM Yang Unggul Dan Berdaya Saing Dengan Nilai-nilai Agama
b. Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas
c. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif Dan Dinamis

3. Tujuan dan Sasaran

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan tujuan yang merupakan hasil yang diharapkan dan wajib dijadikan pegangan dalam pelaksanaan tugas seluruh aparat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Setiap tujuan dan sasaran

yang ditetapkan mencermikan prioritas pembangunan daerah yang akan mencapai acuan atau tolak ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan kinerja pemerintah, yang antara lain terdiri dari :

a. Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing.

Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut.

1) Meningkatnya Kualitas Pendidikan
2) Meningkatnya Derajat Kesehatan
3) Meningkatnya Kesetaraan Gender
4) Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda

MISI 1	**Membangun SDM yang Unggul dan Berdaya Saing Nilai-nilai Agama**				
TUJUAN	**Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing**				
INDIKATOR TUJUAN	**Indeks Pembangunan Manusia**				
SASARAN	**Meningkatnya Kualitas Pendidikan**	**Meningkatnya Derajat Kesehatan**	**Meningkatnya Kesetaraan Gender**	**Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda**	
INDIKATOR SASARAN	**Rata-Rata Lama Sekolah** / **Harapan Lama Sekolah** / **Nilai Raport Pendidikan**	**Usia Harapan Hidup**	**Indeks Ketimpangan Gender**	**Indeks Pembangunan Pemuda**	
PROGRAM UNGGULAN (JANJI BUPATI)	• Satu Desa Satu Lulusan Pendidikan Tinggi • Beasiswa Pendidikan jalur prestasi dan / Atau tidak mampu bagi pelajar SD, SMP, SMA Pendidikan Umum dan Agama • Peningkatan insentif bagi guru Agama • Sarjana Pemuda Pelopor				

Rumusan dari tujuan diatas menerjemahkan bahwa Kabupaten Tanah Laut berkomitmen untuk menciptakan SDM yang cerdas sehat, setara dan kompetitif. SDM menjadi fondasi utama pembangunan daerah berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan diatas dirumuskan sasaran pertama, Meningkatnya Kualitas Pendidikan. Kedua, Meningkatnya Derajat Kesehatan, Ketiga Meningkatnya Kesetaraan Gender serta yang keempat Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda.

b. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, maka sasaran pembangunan

ditetapkan sebagai berikut.

1) Meningkatnya Produktiftas Dan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah
2) Menurunnya kemiskinan dan pengangguran
3) Meningkatnya kontribusi investasi terhadap perekonomian daerah



MISI 2	**Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas**		
TUJUAN	**Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif**		
INDIKATOR TUJUAN	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**		**Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)**
SASARAN	**Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah**	**Meningkatnya kontribusi investasi terhadap perekonomian daerah**	**Menurunnya Kemiskinan dan pengangguran**
INDIKATOR SASARAN	**Rasio PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan**	**Proporsi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB**	**Tingkat Pengangguran Terbuka**
	Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan		**Angka Kemiskinan**
	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan, Minum		
	Rasio PDRB Sektor Perdagangan		
PROGRAM UNGGULAN (JANJI BUPATI)	• Bantuan pengembangan ekonomi masyarakat produktif • Pelatihan Tenaga Kerja Siap Kerja bagi masyarakat umum dan berbasis komunitas seperti karang taruna dan Kelompok Disabilitas • Pengembangan Produk Unggulan Kabupaten Tanah Laut • Peningkatan perekonomian desa melalui pertanian (Cetak Sawah) • Program padat karya masyarakat di setiap kecamatan • Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat • Hibah Kegiatan Sosial dan Kemasyarakatan Sebesar 1 Miliar Perkecamatan		

Rumusan dari tujuan diatas menerjemahkan bahwa Kabupaten Tanah Laut berkomitmen untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif yang berdampak pada penurunan kemiskinan dengan menciptakan pembangunan yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan diatas dirumuskan sasaran pertama, Meningkatnya Produktiftas Dan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah. Kedua, Menurunnya kemiskinan dan pengangguran, serta Ketiga Meningkatnya kontribusi investasi terhadap perekonomian daerah.

c. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan.

Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan, maka tujuan dan sasaran

pembangunan ditetapkan sebagai berikut.

1) Meningkatnya Pemerataan infrastruktur
2) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
3) Menurunnya risiko bencana

MISI 2	**Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas**		
TUJUAN	**Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan**		
INDIKATOR TUJUAN	**Indeks Kepuasan Layanan Infrastuktur (IKLI)**	**Penurunan Intensitas Emisi GRK**	
SASARAN	**Meningkatnya Pemerataan Infrastuktur**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	**Menurunnya Risiko Bencana**
INDIKATOR SASARAN	**Indeks Infrastruktur Daerah** **Rasio Konektivitas**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**Indeks Risiko Bencana**
PROGRAM UNGGULAN (JANJI BUPATI)	• Pembangunan dan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) • pembangunan jalan usaha tani • Revitalisasi pasar modern dan Rehab pasar kecamatan • Penyediaan Fasilitas Air Minum dan sanitasi layak lingkungan masyarakat • SDA on call • Pembangunan TPS-3R, bank sampah, dan Rehabilitasi TPS • Program Tanah laut Lestari		

Rumusan dari tujuan diatas menerjemahkan bahwa Kabupaten Tanah Laut berkomitmen untuk meningkatkan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan dalam membangun potensi unggulan sebagai konektifitas perputaran perekonomian. Untuk mewujudkan tujuan diatas dirumuskan sasaran pertama, Meningkatnya Pemerataan infrastruktur. Kedua, Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, serta Ketiga Menurunnya risiko bencana.

d. Meningkatkan Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani.

Meningkatkan Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut.

1) Meningkatnya Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel
2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital

MISI 3	**Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis**						
TUJUAN	**Meningkatkan Pemerintahan yang adaftif dan melayani**						
INDIKATOR TUJUAN	**Indeks Reformasi Birokrasi**						
SASARAN	**Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel**			**Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis digital**			
INDIKATOR SASARAN	**AKIP Kabupaten**	**Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Nilai SPI**	**Indeks Pelayanan Publik**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**	**Indeks Pemerintah Digital**
PROGRAM UNGGULAN (JANJI BUPATI)	• **Penyediaan Akses Internet Gratis di Ruang Publik** • **Penyediaan Akses Internet di daerah Blank Spot** • **Jaminan Asuransi Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan perangkat Desa** • **Jaminan Asuransi Ketenagakerjaan Bagi Ketua RW/RT** • **Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa**						

Rumusan dari tujuan di atas menerjemahkan pelayanan publik yang berorientasi untuk kepuasaan masyarakat untuk kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, organisasi pemerintahan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat melalui percepatan implementasi reformasi birokrasi yang optimal. Untuk mewujudkan tujuan di atas dirumuskan sasaran pertama, Meningkatnya Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel, dan Kedua, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital.

Tabel 2.1
Matrik Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Tanah Laut

VISI		“BERSAMA MEMBANGUN TANAH LAUT SIMPUN, MAJU, DAN BERKELANJUTAN”																			
MISI		SASARAN STRATEGIS																			
		TUJUAN		URAIAN		INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL	2025			2026			2027			2028			2029		
								TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%)
1	Membangun SDM yang Unggul dan Berdaya Saing Dengan Nilai-nilai Agama	1	Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	7,94	7,98	8,09	101,76 %	8			8,1			8,2			8,3		
						Harapan Lama Sekolah	12,43	12,45	12,70	102,00 %	12,5			12,6			12,7			12,8		
						Nilai Raport Pendidikan	74,36	74,46	24,46	100,13 %	74,66			74,86			75			75,2		
				2	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Usia Harapan Hidup	74,64	75	74,88	99,84 %	75,25			75,5			75,75			76		
				3	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Ketimpangan Gender	0,473	0,47	0,411	114,35 %	0,45			0,43			0,41			0,39		
				4	Meningkatnya Kualitas	Indeks Pembangunan	NA	55	Tidak dilakukan	Tidak dilakukan	56			56,5			57,5			58,5		

VISI		“BERSAMA MEMBANGUN TANAH LAUT SIMPUN, MAJU, DAN BERKELANJUTAN”																		
MISI		SASARAN STRATEGIS																		
		TUJUAN		URAIAN		INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL	2025			2026			2027			2028			2029		
								TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%)
					Pembangunan Pemuda	Pemuda			penilaian	penilaian												
2	Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas	1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	1	Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah	Rasio PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	16,45	16,47	16,53	100,36 %	16,5			16,6			16,7			16,75		
						Rasio PDRB Sektor Industri Olahan	10,95	10,97	11,46	104,46 %	11			11,2			11,3			11,35		
						asio PDRB Akomodasi dan Makan Minum (Pariwisata)	1,49	1,5	1,64	109,33 %	1,6			1,7			1,8			1,9		
						Rasio PDRB Sektor Perdagangan	10,72	10,75	11,21	104,27 %	10,76			10,77			10,78			10,79		

VISI	"BERSAMA MEMBANGUN TANAH LAUT SIMPUN, MAJU, DAN BERKELANJUTAN"																			
MISI	SASARAN STRATEGIS																			
	TUJUAN		URAIAN		INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL	2025			2026			2027			2028			2029		
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%)
			2	Meningkatnya kontribusi investasi terhadap perekonomian daerah	proporsi PMTB terhadap PDRB	19,21	19,3	19,15	99,22 %	19,35			19,4			19,45			19,5		
			3	Menurunnya Kemiskinan dan pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,43	3,25	3,30	98,48 %	3,21			3,17			3,11			3,04		
					Angka Kemiskinan	3,74	3	3	100%	2,96			2,7			2,5			2,36		
		2	Meningkatkan kualitas infrastruktur berkelanjutan	1	Meningkatnya Pemerataan infrastuktur	Indeks Infrastruktur Daerah	49,55	54,21	45,83	84,54 %	55			57			59			60		
						Rasio Konektivitas	0,71	0,71	0,71	100%	0,75			0,8			0,85			0,87		
				2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,57	70,16	76,35	108,82 %	70,25			70,34			70,44			70,53		

VISI		“BERSAMA MEMBANGUN TANAH LAUT SIMPUN, MAJU, DAN BERKELANJUTAN”																			
MISI		SASARAN STRATEGIS																			
		TUJUAN		URAIAN		INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL	2025			2026			2027			2028			2029		
								TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%)
				3	Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	145,09	144	131,76	109,28 %	140			135			130			125		
3	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis	1	Meningkatkan Pemerintahan yang adaftif dan melayani	1	Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Nilai AKIP Kabupaten	70,16	72	72,06	100,83 %	75			77			79			80		
						Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	79,645	79,7	89,104	111,80 %	80			80,5			81			81,5		
						SPI	78,97	79	80,87	102,36 %	79			79,01			79,01			79,02		
				2	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis digital	Indeks Pelayanan Publik	4,23	4,4	3,71	84,31 %	4,45			4,5			4,55			4,6		
						IKM	88,41	88,6	89,31	100,80 %	89			89,3			90			90,3		
						Indeks SPBE	3,12	3,12	3,12	100%	-			-			-			-		
						Indeks Pemerintah Digital	NA	NA	-	-	1,7			1,7			2			2		

4. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

Dokumen rencana kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 100.3.3.2/1132-KUM/2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN RUMUS
1	Meningkatnya kualitas pendidikan	1	Rata-rata lama sekolah (tahun)	$\frac{\text{Jumlah Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke atas}}{\text{Jumlah penduduk usia 25 Tahun ke atas}}$

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN RUMUS
		2	Harapan lama sekolah (tahun)	$HSL_a^t = \text{FK x} \sum_{i=a}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan : HSL_a^t = Harapan Lama Sekolah Pada Umur a di tahun t E_i^t = Jumlah Penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t p_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t i = Usia (a,a+1,.....,n) FK = Faktor Koreksi Pesantren
		3	Nilai raport pendidikan (nilai)	Hasil Penilaian dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
2	Meningkatnya derajat kesehatan	1	Usia Harapan Hidup (tahun)	Rata-rata harapan hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku dilingkungan masyarakatnya
3	Meningkatnya kesetaraan gender	1	Indeks Ketimpangan Gender (nilai)	$\mathbf{IKG} = 1 - \sqrt[3]{(K_{RH} \times K_{PE} \times K_{PA})}$
4	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda	1	Indeks Pembangunan Pemuda	Skor domain pendidikan + Skor domain kesehatan dan kesejahteraan + Skor domain lapangan dan kesempatan kerja + Skor domain partisipasi dan kepemimpinan + Skor domain gender dan diskriminasi / 5
5	Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah	1	Rasio PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	$\frac{PDRB\ Sektor\ Pertanian\ dan\ Perikanan}{Total\ PDRB\ Daerah}\ x\ 100\%$
		2	Rasio PDRB Sektor Industri Olahan	$\frac{PDRB\ Sektor\ Industri\ Pengolahan}{Total\ PDRB\ Daerah}\ x\ 100\%$
		3	Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum (Pariwisata)	$\frac{PDRB\ Sektor\ Penyediaan\ Akomodasi\ dan\ Makan\ Minum}{Total\ PDRB\ Daerah}\ x\ 100\%$
		4	Rasio PDRB Sektor Perdagangan	$\frac{PDRB\ Sektor\ Perdagangan}{Total\ PDRB\ Daerah}\ x\ 100\%$

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN RUMUS
6	Meningkatnya kontribusi investasi terhadap perekonomian daerah	1	proporsi PMTB terhadap PDRB	$\frac{Pembentukan\ Modal\ Tetap\ Bruto\ (PMTB)}{Produk\ Domestik\ Regional\ Bruto\ (PDRB)}\ x\ 100\%$
7	Menurunnya Kemiskinan dan pengangguran	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$
		2	Angka Kemiskinan	$\frac{Jumlah\ Penduduk\ Miskin}{Total\ Penduduk}\ x\ 100\%$
8	Meningkatnya Pemerataan infrastuktur	1	Indeks Infrastruktur Daerah	$\frac{Indeks\ Infrastruktur\ DPUPRP + Indeks\ Infrastruktur\ DPRKPLH}{2}$
		2	Rasio Konektivitas	(IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)
9	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)
10	Menurunnya risiko bencana	1	Indeks Risiko Bencana	Risk = $\sqrt[3]{}$ (Hazard x Vulnerability x (1-Capacity))
11	Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	1	Nilai AKIP Kabupaten	Jumlah dari nilai 4 komponen SAKIP yaitu Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
12	Menurunnya beban pengeluaran masyarakat miskin	1	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan
		2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	IPKD diukur nelalui 6 (enam) dimensi meliputi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, dan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD
		3	SPI	SPI = 0,305 X_1 + 0,328 X_2 + 0,367 X_3 - 0,20

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN RUMUS
13	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis digital	1	Indeks Pelayanan Publik	Jumlah dari (Nilai aspek n x Bobot aspek n)
		2	IKM	$\frac{Total\ Nilai\ Persepsi\ Per\ Unsur}{Total\ Unsur\ Yang\ Terisi}\ x\ Nilai\ Penimbang$
		3	Indeks SPBE	Hasil evaluasi penilaian Menpan RB
		4	Indeks Pemerintah Digital	Hasil evaluasi penilaian Menpan RB

1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

No.	Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran RPJMD)		Indikator Kinerja Utama	Target	SKPD Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,98	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,45	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		3	Nilai Raport Pendidikan (nilai)	74,46	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan	1	Usia Harapan Hidup (Tahun)	75	Dinas Kesehatan
3	Meningkatnya Kesetaraan Gender	1	Indeks Ketimpangan Gender (nilai)	0,47	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
4	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda	1	Indeks Pembangunan Pemuda (nilai)	55	Dinas Pemuda dan Olahraga
5	Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah	1	Rasio PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan (%)	16,47	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		2	Rasio PDRB Sektor Industri Olahan (%)	10,97	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		3	Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum (Pariwisata) (%)	1,5	Dinas Pariwisata
		4	Rasio PDRB Sektor Perdagangan (%)	10,75	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
6	Meningkatnya kontribusi investasi terhadap perekonomian daerah	1	Proporsi PMTB terhadap PDRB (%)	19,3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7	Menurunnya Kemiskinan dan pengangguran	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,25	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		2	Angka Kemiskinan (%)	3	Dinas Sosial
8	Meningkatnya Pemerataan infrastuktur	1	Indeks Infrastruktur Daerah (Nilai)	54,21	Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang dan Pertanahan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		2	Rasio Konektivitas (Nilai)	0,71	Dinas Perhubungan

9	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Nilai)	70,16	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
10	Menurunnya risiko bencana	1	Indeks Risiko Bencana (Nilai)	144	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11	Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel Menurunnya resiko bencana	1	AKIP Kabupaten (Nilai)	72	Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Nilai)	79,7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		3	SPI (Nilai)	79	Inspektorat
12	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis digital	1	Indeks Pelayanan Publik (Nilai)	4,4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	IKM (Nilai)	88,6	Seluruh Kecamatan, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		3	Indeks SPBE (Nilai)	3,12	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Untuk mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja yang terdiri dari 12 sasaran di atas, Pemerintah kabupaten Tanah Laut didukung dengan dengan APBD sebesar Rp. 2.862.912.928.226,68. Rincian program dan anggaran untuk mendukung masing masing sasaran terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan		184,391,854,337.98
		Program Pengelolaan Pendidikan	181,412,792,193.82
		Program Pengembangan Kurikulum	235,880,331.60
		Program Pembinaan Perpustakaan	2,743,181,812.56

2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		149,614,352,538.80
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	140,113,262,203.80
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	561,038,000.00
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	8,940,052,335.00
3	Meningkatan Kesetaraan Gender		1,335,155,438.57
		Program Perlindungan Perempuan	202,153,906.00
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1,133,001,532.57
4	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda		115,312,062,447.56
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	964,000,000.00
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	4,283,176,301.73
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	110,064,886,145.83
5	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah		64.518.125.483,23
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1,849,515,354.94
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	22,003,062.00
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	127,932,758.15
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	92,010,423.77

		Program Pengawasaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	651,477,816.52
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1,678,388,396.39
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1,149,514,272.95
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	752,108,076.00
		Program Pengelolaan Pemasaran Hasil Perikanan	108.012.198,32
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	10,608,500,470.95
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	11,204,873.00
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	33,968,616.00
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	638,848,255.14
		Pogram Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	601,267,718.00
		Program Penyuluhan Pertanian	1,739,122,228.48
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1,235,788,693.76
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	163,746,936.49
		Program Pemasaran Pariwisata	4,651,547,803.07
		Program Perizinan Usaha Pertanian	2,851,596,949.30
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	5,498,667,708.11

		Program Pengunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	467,581,814.48
		Program Pengembangan Ekspor	144,370,676.00
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	22,821,443,973.91
		Program Pengendalian dan Penanggulang Bencana Pertanian	848,372,553.54
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	2,005,330,817.38
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	585,169,813.00
		Program Standarilisasi dan Perlindungan Konsumen	89,353,796.45
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	26,300,588.56
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	784,453,945.73
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2,280,524,892.84
6	Meningkatkan Kontribusi Investasi Terhadap Perkonomian Daerah		3,191,380,448.97
		Program Pelayanan Penanaman Modal	86,250,815.16
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2,902,990,013.14
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	10,408,980.00
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	18,359,637.90
		Program Promosi Penanaman Modal	40,628,526.53

		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	132,742,476.24
7	Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran		18,801,748,055.26
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	3,898,431,712.14
		Program Penempatan Tenaga Kerja	306,404,169.09
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	237,360,004.55
		Program Pemberdayaan Sosial	219,968,424.96
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	573,039,772.42
		Program Penanganan Bencana	5,051,470,252.76
		Program Rehabilitas Sosial	2,281,029,580.94
		Program Hubungan Industrial	5,073,303,698.33
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1,160,740,440.07
8	Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur		554,499,926,168.22
		Program Penyelenggaraan Jalan	209,655,870,218.70
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	85,886,420,934.71
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	34,526,680,831.04
		Program Peningkatan Prasarana , Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	53,093,177,751.40

		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	23,572,645,028.58
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	118,000,000.00
		Program Pengelolaan Pelayaran	438,980,694.72
		Program Penataan Bangunan Gedung	101,957,249,024.96
		Program Pengembangan Perumahan	1,369,120,422.15
		Program Kawasan Permukiman	9,585,270,000.00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	29,319,031,261.96
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	4,977,480,000.00
9	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		31,528,506,149.73
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	167,250,264.67
		Program Penangan/Pengaduan Lingkungan	76,572,276.11
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	5,583,741,378.15
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	4,838,321,070.48
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	217,047,044.02
		Program Pengelolaan Persampahan	20,589,351,545.46

		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	56,222,570.84
10	Menurunnya risiko bencana		1,332,447,057.67
		Program Penanggulangan Bencana	1,332,447,057.67
11	Meningkatkan Pemerintah yang bersih dan akuntabel		410.832.019.593,77
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,170,418,671.59
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	363,052,874.00
		Program Penyelengaraan Pengawasan	4,328,619,165.61
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	4,102,899,512.30
		Program Pengelolaan Arsip	117,576,959.68
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	391.682.427,12
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1,548,698,016.50
		Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	55,564,039,692.43
		Program kepegawaian Daerah	5,347,739,759.85
		Program Perekonomian dan Pembangunan	2,539,607,457.04
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	319.091.935.329,16
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3,839,922,885.30

		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	60,243,895.00
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	12,365,582,948.19
12	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital		66.944.622.784,30
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	255,201,753.31
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	8,047,439,788.07
		Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik	68,417,888.00
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	13,274,158,000.17
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	33,916,461.88
		Program Penyelenggaran Statistik Sektoral	149,520,853.19
		Program Pendaftaran Penduduk	257,900,346.00
		Program Pencatatan Sipil	62,356,910.00
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	22,401,562,445.59
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1,933,021,221.80
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	5,186,717,896.53
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	7,553,054,941.75
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	180.345.112,55

		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1,218,005,624.00
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	6,323,003,541.46

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2025 Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2025 ini merupakan laporan kinerja tahun pertama RPJMD 2025-2029 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, output, dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini pembandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*),dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan- tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 terdapat 12 sasaran dengan 23 indikator, dengan hasil pengukuran rata-rata capaian IKU telah memenuhi kriteria **Sangat Tinggi** atau dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 101,67%.

A. AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama bahwa IKU disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalam rangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 100.3.3.2/1132-KUM/2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Indikator Sasaran Strategis Tujuan 1

Tujuan 1 **Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing**								
NO	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA**		**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**	**PREDIKAT KINERJA**	**KET**
1	2	3		4	5	**6**	**7**	**8**
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,98	8,09	101.76%	Sangat Tinggi	Tercapai (melebihi target)
		2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,45	12,70	102.00%	Sangat Tinggi	Tercapai (melebihi target)
		3	Nilai Raport Pendidikan (nilai)	74,46	74,46	100.13%	Sangat Tinggi	Tercapai (melebihi target)
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan	1	Usia Harapan Hidup (Tahun)	75	74,88	99.84%	Sangat Tinggi	Belum tercapai (kurang dari target)
3.	Meningkatnya Kesetaraan Gender	1	Indeks Ketimpangan Gender (nilai)	0,47	0,411	114,35%	Sangat Tinggi	Belum rilis oleh BPS RI
4.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda	1	Indeks Pembangunan Pemuda (nilai)	55	Tidak dilakukan penilaian	Tidak dilakukan penilaian	-	Tidak dilakukan penilaian

Tabel 3.2

Indikator Sasaran Strategis Tujuan 2

Tujuan 2 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif								
NO	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA**		**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**	**PREDIKAT KINERJA**	**KET**
1	2	3		4	5	**6**	**7**	**8**
5	Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah	1	Rasio PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan (%)	16,47	16,53	100,36%	Sangat Tinggi	Tercapai (melebihi target)
		2	Rasio PDRB Sektor Industri Olahan (%)	10,97	11,46	104,46%	Sangat Tinggi	Tercapai (melebihi target)
		3	Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum (Pariwisata) (%)	1,5	1,64	109,33%	Sangat Tinggi	Tercapai (melebihi target)
		4	Rasio PDRB Sektor Perdagangan (%)	10,75	11,21	104,27%	Sangat Tinggi	Tercapai (melebihi target)
6	Meningkatnya kontribusi investasi terhadap perekonomian daerah	1	proporsi PMTB terhadap PDRB (%)	19,3	19,15	99,22%	Sangat Tinggi	Belum tercapai (kurang dari target)
7	Menurunnya Kemiskinan dan pengangguran	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,25	3,30	98.48%	Sangat Tinggi	Belum tercapai (kurang dari target)
		2	Angka Kemiskinan (%)	3	3	100%	Sangat Tinggi	Tercapai (sama dengan target)

Tabel 3.3

Indikator Sasaran Strategis Tujuan 3

Tujuan 3 Meningkatkan kualitas infrastruktur berkelanjutan								
NO	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA**		**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**	**PREDIKAT KINERJA**	**KET**
1	2	3		4	5	**6**	**7**	**8**
8	Meningkatnya Pemerataan infrastuktur	1	Indeks Infrastruktur Daerah (Nilai)	54,21	45,83	84,54%	Tinggi	Belum tercapai (kurang dari target)
		2	Rasio Konektivitas (Nilai)	0,71	0,71	100%	Sangat Tinggi	Tercapai (sama dengan

								target)
9	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Nilai)	70,16	76,35	108.82%	Sangat Tinggi	Tercapai (melebihi target)
10	Menurunnya risiko bencana	1	Indeks Risiko Bencana (Nilai)	144	131,76	109.28%	Sangat Tinggi	Tercapai (melebihi target)

Tabel 3.4

Indikator Sasaran Strategis Tujuan 4

Tujuan 4 **Meningkatkan Pemerintahan yang adaftif dan melayani**								
NO	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA**		**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**	**PREDIKAT KINERJA**	**KET**
1	2	3		4	5	**6**	**7**	**8**
11	Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	1	AKIP Kabupaten (Nilai)	72	72,06	100.83%	Sangat Tinggi	Tercapai (melebihi target)
		2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Nilai)	79,7	89,104	111.80%	Sangat Tinggi	Tercapai (melebihi target)
		3	SPI (Nilai)	79	80,87	102.36%	Sangat Tinggi	Tercapai (melebihi target)
12	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis digital	1	Indeks Pelayanan Publik (Nilai)	4,4	3,71	84.31%	Tinggi	Belum tercapai (kurang dari target)
		2	IKM (Nilai)	88,6	89,31	100.80%	Sangat Tinggi	Tercapai (melebihi target)
		3	Indeks SPBE (Nilai)	3,12	3,12	100%	Sangat Tinggi	Tercapai (sama dengan target)

2. ANALISA CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Capaian kinerja disajikan sesuai dengan keselarasan antara RPJMD dengan penjabaran dalam perencanaan tahunan berupa dokumen rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Keselarasan mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan target kinerja dalam tahun 2025. Sesuai dengan dokumen RPJMD 2025-2029, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan 4 (empat) tujuan. Masing-masing tujuan tersebut lebih konkrit dijabarkan lagi

menjadi 12 sasaran, dan untuk mengukur pencapaian sasaran digunakan indikator kinerja sebanyak 23 buah.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi lima kategori sebagai sebagai berikut :

Tabel 3.5

Pengelompokkan Capaian Kinerja

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
I	91% kurang dari sama dengan 100%	Sangat Tinggi
II	76% kurang dari sama dengan 90%	Tinggi
III	66% kurang dari sama dengan 75%	Sedang
IV	51% kurang dari sama dengan 65%	Rendah
V	kurang dari sama dengan 50%	Sangat Rendah

Ada dua jenis rumus pengukuran capaian kinerja yang dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.6

Rumus Pengukuran Capaian Kinerja

KONDISI	URAIAN	RUMUS
Asumsi I (kondisi umum)	*Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya* *jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah*	**Realisasi** **---------- X 100%** **Target**

	Contoh: jumlah produksi partisipasi murni.	padi, angka	
Asumsi II (kondisi tidak umum)	*Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah,*		**Target** **---------- X 100%** **Realisasi**
	Atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik,		**Target** **---------- X 100%** **Realisasi**
	Contoh: angka kemiskinan, angka kematian		

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran sesuai dengan Tujuan adalah sebagai berikut :

TUJUAN 1

Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing Dengan Nilai-Nilai Agama

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan tujuan ke I yaitu Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing Dengan Nilai-Nilai Agama.
Untuk mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan 1 indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Tabel 3.1.1
Tujuan dan indikator tujuan I

No	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2025
1	Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing Dengan Nilai-Nilai Agama	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	73,8

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan 4 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan
3. Meningkatnya Kesetaraan Gender
4. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas diukur melalui 3 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1.2
Capaian Kinerja Terhadap Target 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			TAHUN 2025		
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7.90	7.92	7,94	7,98	8,09	101,76%

2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.32	12.41	12,43	12,45	12,70	102%
3	Nilai Raport Pendidikan	Nilai	56.66	60.17	74.36	74,46	74.46	100%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2025								101.25%

Tabel 3.1.3
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2025 THD TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7,98	8,09	101,76%	8,3	97,46%
2	Harapan lama sekolah	Tahun	12,45	12,70	102%	12,8	99,21%
3	Nilai Raport Pendidikan	Nilai	74,46	74,46	100%	75,2	99,01%

a. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

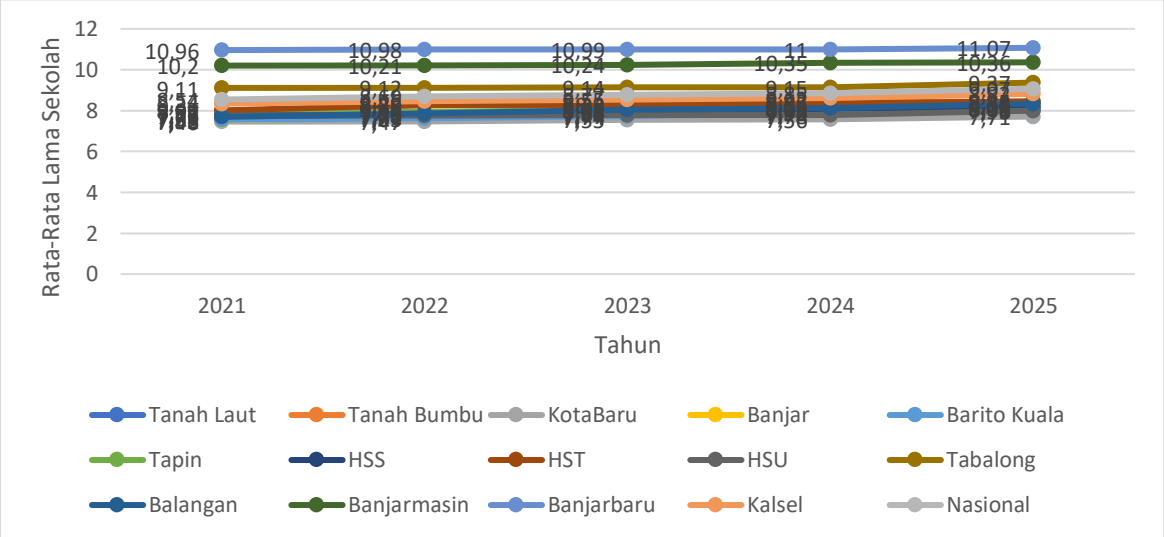
Rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Tanah Laut berusia 25 tahun ke atas meningkat dari 7,92 tahun di tahun 2023 menjadi 7,94 tahun di tahun 2024 dengan capaian 98,63% dari target 8,05. Angka 7,94 tahun ini menggambarkan rata-rata jumlah atau lamanya tahun pendidikan yang telah dijalani oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas, atau dengan kata lain rata-rata penduduk di Kabupaten Tanah Laut yang berusia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas 2 SMP/Sederajat. Angka tersebut juga masih berada dibawah angka provinsi sebesar 8,62 atau terpaut 0,53 tahun dibanding angka Provinsi Kalimantan Selatan dan 0,76 tahun dibawah nasional dengan angka 8,85 tahun.

Hal tersebut menunjukkan bahwa penuntasan wajib belajar tingkat dasar dan menengah masih belum selesai, sehingga perlu ada upaya yang lebih intens lagi dari berbagai pihak sehingga minimal wajib belajar 13 tahun dapat tercapai. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi peningkatan pendidikan diantaranya adalah tersedianya SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang cukup memadai. Dengan adanya faktor tersebut diharapkan

program pemerintah tentang wajib belajar akan dapat direalisasikan sepenuhnya.

Sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang pelayanan pendidikan di Kabupaten Tanah Laut sudah cukup memadai secara kuantitas. Berdasarkan data Sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada semester genap tahun ajaran 2024/2025 terdapat 324 PAUD negeri maupun swasta, dengan jumlah guru 1.033 orang, jumlah peserta didik 12.114 peserta didik. Pada jenjang Sekolah Dasar terdapat 249 SD baik negeri maupun swasta, dengan jumlah guru sebanyak 2.439 orang, dan jumlah peserta didik 32.615 peserta didik (belum termasuk peserta didik MI). Pada tingkat SMP terdapat 60 sekolah dan guru sebanyak 887 orang dan jumlah peserta didik 9.479 peserta didik (belum termasuk siswa MTs). Pada tingkat SMA, jumlah sekolah dan guru sebanyak 19 SMA dan 10 SMK sekolah masing masing memiliki 404 orang dan 267 guru dengan jumlah peserta didik 6.189 peserta didik dan 3293 peserta didik. Data ini belum termasuk sekolah yang berada dibawah Kementrian Agama. Tentunya jika ditambah akan semakin memperbesar angka-angka di atas.

Grafik 3.1.1
ARLS se-Regional Kalimantan Selatan, Provinsi dan Nasional
Tahun 2021 – 2025



Sumber: BPS Kabupaten Tanah Laut

Tabel 3.1.4
ARLS se-Regional Kalimantan Selatan, Provinsi dan Nasional
Tahun 2021 – 2025

Kab/Kota	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Banjarbaru	10.96	10.98	10.99	11	11.07
Banjarmasin	10.2	10.21	10.24	10.35	10.36
Tabalong	9.11	9.12	9.14	9.15	9.37
Nasional	8.54	8.69	8.77	8.85	9.07
Kalsel	8.34	8.46	8.55	8.62	8.82
HST	8.01	8.28	8.29	8.35	8.45
Tanah Bumbu	7.97	8.25	8.3	8.43	8.44
Tapin	7.77	7.95	8.05	8.15	8.38
Balangan	7.69	7.85	8.03	8.13	8.34
HSS	7.76	7.79	7.86	8.09	8.18
Banjar	7.52	7.71	7.94	7.95	8.15
Tanah Laut	7.89	7.9	7.92	7.94	8.09
HSU	7.75	7.76	7.77	7.78	8
Barito Kuala	7.55	7.63	7.74	7.92	7.99
KotaBaru	7.46	7.47	7.55	7.56	7.71

Meskipun angka rata-rata lama sekolah telah mencapai target yang telah ditetapkan, masih banyak penduduk di wilayah Tanah Laut yang berada di bawah garis kemiskinan, angka putus sekolah juga mempengaruhi meski angka putus sekolah di wilayah Tanah Laut tergolong rendah dengan realisasi jenjang SD 0,09 % dan jenjang SMP 0,05 % dan yang selanjutnya yang paling mempengaruhi adalah kecenderungan orang tua di Tanah laut menyekolahkan anak mereka ke pesantren yang tidak menyelenggarakan pendidikan umum karna peserta didik yang berada pada pesantren tersebut tidak akan terdata pada Aplikasi DAPODIK KEMENDIKBUD.

Grafik 3.1.2
ARLS Kab. Tanah Laut 2021 – 2025



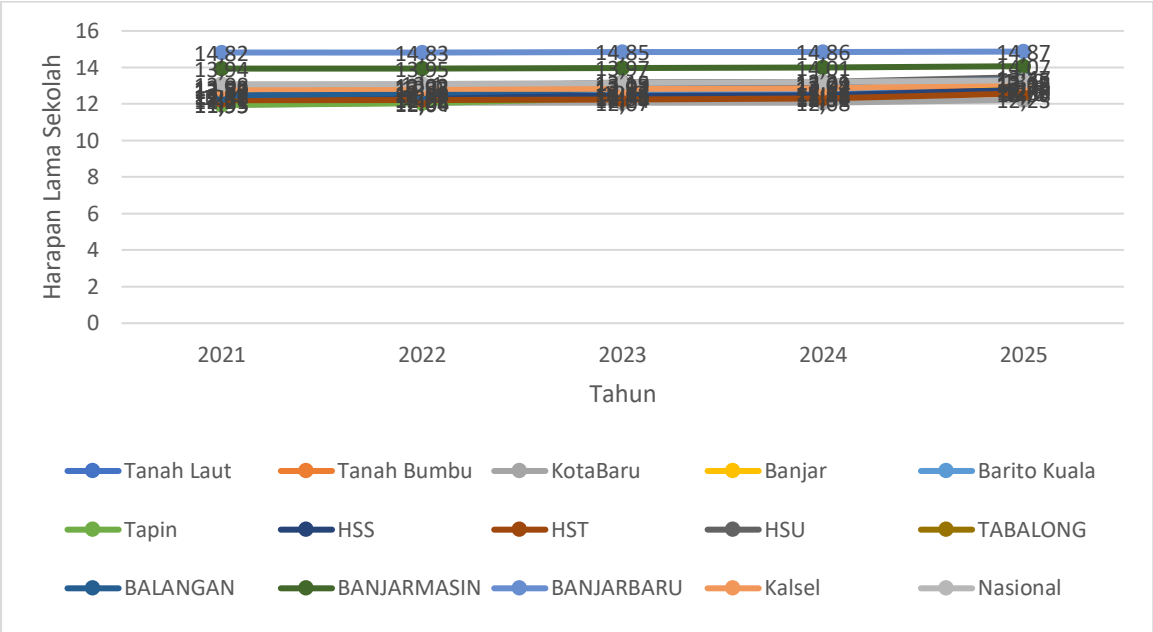
Sumber: BPS Kabupaten Tanah Laut

Dilihat dari grafik di atas, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tanah Laut menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, artinya masyarakat semakin sadar dan memahami pentingnya arti sekolah bagi masa depan. Pada tahun 2025, angka rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan paling besar sejak tahun 2021, dengan 0,15 point dari tahun 2024.

b. Harapan Lama Sekolah

Pada tingkat nasional, HLS Indonesia pada tahun 2025 adalah sebesar 13,30 tahun. Angka ini menggambarkan angka perkiraan lama tahun bersekolah yang akan dijalani oleh penduduk berusia 7 tahun ke atas di Indonesia hingga mengenyam pendidikan setara dengan perguruan tinggi. Pada tahun 2025, harapan lama sekolah Kabupaten Tanah Laut sebesar 12,70 tahun. Angka tersebut memiliki peningkatan yang jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 12,43 tahun pada 2024 sebesar 0,27 point. Dari realisasi tersebut, capaian terhadap target tahun 2025 yaitu 12,45 tahun telah mencapai 102%. Peningkatan angka harapan lama sekolah menunjukkan bahwa kondisi pembangunan sistem pendidikan di Kabupaten Tanah Laut semakin meningkat. Akan tetapi, angka tersebut juga masih berada di bawah angka provinsi yang sebesar 13,12 tahun atau terpaut 0,42 tahun dari angka Provinsi Kalimantan Selatan.

Grafik 3.1.3
HLS se-Regional Kalimantan Selatan, Provinsi dan Nasional
Tahun 2021 – 2025



Sumber: BPS Kabupaten Tanah Laut

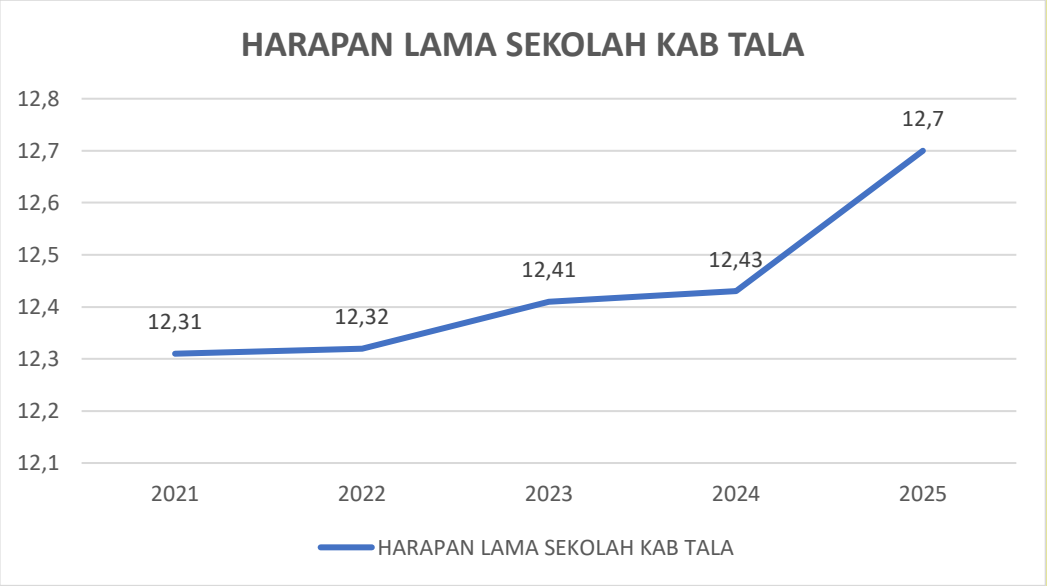
Tabel 3.1.5
HLS se-Regional Kalimantan Selatan, Provinsi dan Nasional
Tahun 2021 – 2025

Kab/Kota	Tahun			
	2022	2023	2024	2025
Banjarbaru	14.82	14.83	14.85	14.86
Banjarmasin	13.94	13.95	13.97	14.01
HSU	12.92	12.93	13.19	13.21
Nasional	13.08	13.1	13.15	13.21
Balangan	12.47	12.61	12.82	13.09
Banjar	12.73	13.02	13.03	13.04
Tabalong	12.89	12.9	12.91	12.92
Kalsel	12.81	12.82	12.82	12.87
Tanah Bumbu	12.48	12.49	12.6	12.61
Barito Kuala	12.4	12.54	12.55	12.56
HSS	12.38	12.4	12.46	12.48
Tanah Laut	12.31	12.32	12.41	12.43
Tapin	11.95	12.04	12.33	12.34
HST	12.21	12.22	12.24	12.31
Kotabaru	11.95	12.06	12.07	12.08

Dari grafik dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 untuk **harapan lama sekolah Kabupaten Tanah Laut dengan angka 12,70 tahun**. Jika dibandingkan **dengan Provinsi Kalimantan Selatan** dengan angka 13,12 tahun maka lebih rendah 0,42 tahun dan lebih rendah 0,60 tahun jika di bandingkan dengan angka harapan sekolah **Indonesia** dengan angka 13,30 tahun.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Grafik 3.1.4
HLS Kab. Tanah Laut 2021 – 2025



Sumber: BPS Kabupaten Tanah Laut

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat maka semakin baik pula kualitas sumber daya manusianya. Bagi suatu daerah, pendidikan merupakan sektor yang fundamental karena pendidikan mampu memberikan manfaat positif bagi pembangunan meskipun manfaatnya baru dapat dirasakan beberapa tahun ke depan.

c. Nilai Raport Pendidikan

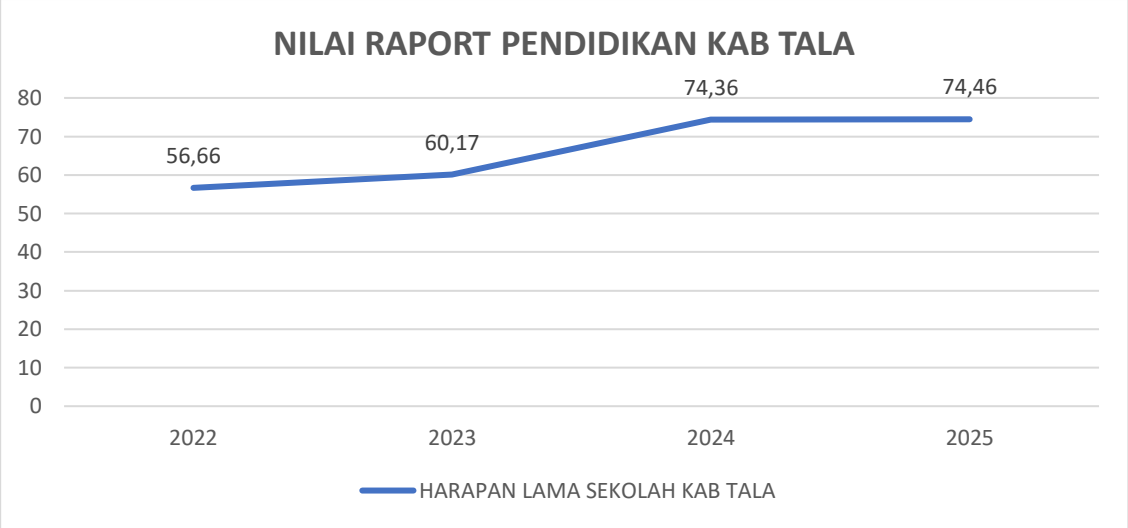
Nilai Raport Pendidikan adalah skor komposit yang menggambarkan tingkat mutu penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan atau daerah

dalam periode tertentu, yang diukur berdasarkan indikator-indikator utama hasil belajar, proses pembelajaran, pemerataan layanan, dan tata kelola pendidikan, sebagaimana tercantum dalam Rapor Pendidikan.

Pada tahun 2025, Nilai Raport Pendidikan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 adalah 74,46 dengan kategori Tuntas Pratama. Terdapat peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 0,10 point dengan realisasi 74,36. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD (75,2), realisasi tahun 2025 telah mencapai 99,01%.

Grafik 3.1.5

Nilai Raport Pendidikan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022-2025

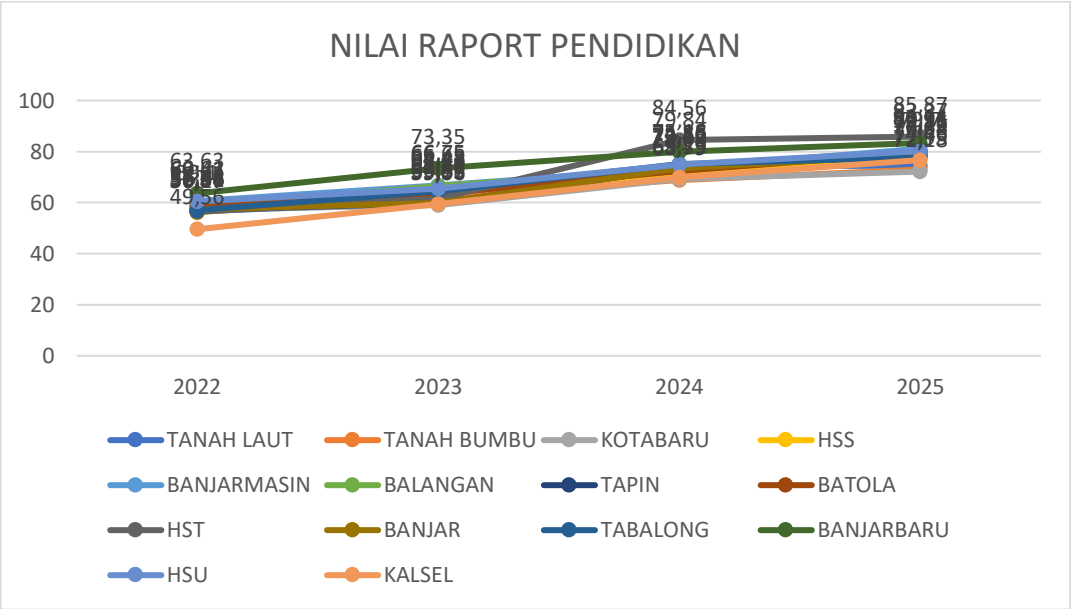


Sumber : Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Nilai raport pendidikan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 adalah 74,46 dengan kategori Tuntas Pratama. Jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, masih lebih rendah sebesar 2,22 point. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Tanah Bumbu, Nilai Raport Pendidikan Kabupaten Tanah Laut masih lebih tinggi sebesar 1,95 point dengan angka 72,95.

Grafik 3.1.6

Nilai Raport Pendidikan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022-2025



Sumber : Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Tabel 3.1.6

Nilai Raport Pendidikan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022-2025

Kab/Kota	Tahun			
	2022	2023	2024	2025
HST	56.36	61.61	84.56	85.87
Banjarbaru	63.63	73.35	79.84	83.37
Banjarmasin	60.61	66.75	73.46	81.14
HSU	60.43	65.48	74.86	80.21
Tapin	57	59.87	73.39	79.95
Batola	59.1	63.32	72.33	79.7
Balangan	58.23	66.65	73.12	79.51
Banjar	57.42	59.89	73.52	78.76
HSS	56.17	64.48	71	78.12
Tabalong	57.03	64.42	75.18	77.73
Kalsel	49.56	59.53	69.79	76.68
Tanah Laut	56.66	60.17	74.36	74.46
Tanah Bumbu	56.51	62.42	68.79	72.95
Kotabaru	57.18	59.06	69.33	72.18

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, adalah sebagai berikut.

a. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi SPM

1. Pembangunan dan revitalisasi gedung sekolah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pendidikan guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan sejak usia dini melalui penyediaan fasilitas yang memadai dan sesuai dengan standar.

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan meliputi pembangunan pagar pada 13 satuan PAUD dan pembangunan paving blok pada 7 satuan PAUD guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan sekolah. Selain itu, pembangunan ruang belajar pada 8 satuan PAUD juga dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan ruang pembelajaran yang representatif. Untuk mendukung kesehatan dan kebersihan lingkungan, pembangunan sarana air bersih dan sanitasi dilaksanakan pada 2 satuan PAUD. Selanjutnya, pembangunan tempat bermain pada 4 satuan PAUD turut dilaksanakan sebagai sarana untuk mendukung perkembangan motorik, sosial, dan emosional anak melalui kegiatan bermain yang aman dan edukatif.

Di samping itu, rehabilitasi bangunan juga dilaksanakan pada 8 satuan PAUD untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi fisik bangunan yang mengalami kerusakan agar kembali layak digunakan. Melalui pembangunan dan rehabilitasi tersebut, diharapkan kualitas layanan pendidikan PAUD semakin meningkat dan mampu mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Pada jenjang Sekolah Dasar, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut juga melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan guna mendukung kelancaran proses pembelajaran. Kegiatan pembangunan meliputi pembangunan halaman sekolah pada 11 satuan pendidikan, pembangunan laboratorium pada 4 satuan pendidikan, pembangunan mushala pada 1 satuan pendidikan,

serta pembangunan pagar sekolah pada 15 satuan pendidikan untuk meningkatkan keamanan lingkungan sekolah. Selain itu, pembangunan perpustakaan pada 4 satuan pendidikan dan pembangunan ruang guru, ruang kepala sekolah, serta ruang tata usaha pada 13 satuan pendidikan turut dilaksanakan guna mendukung kegiatan administrasi dan pembelajaran.

Selanjutnya, pembangunan ruang kelas baru sebanyak 11 ruang kelas dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan ruang belajar yang memadai. Pembangunan ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) pada 5 satuan pendidikan, pembangunan rumah dinas pada 1 satuan pendidikan, serta pembangunan sarana air bersih dan sanitasi pada 4 satuan pendidikan juga dilaksanakan untuk mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang sehat dan layak.

Selain pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana juga dilaksanakan, meliputi rehabilitasi ruang guru, ruang kepala sekolah, dan ruang tata usaha pada 2 satuan pendidikan, rehabilitasi 96 ruang kelas, rehabilitasi halaman sekolah pada 3 satuan pendidikan, serta rehabilitasi perpustakaan pada 3 satuan pendidikan. Rehabilitasi rumah dinas pada 4 satuan pendidikan dan rehabilitasi sarana air bersih dan sanitasi pada 3 satuan pendidikan juga dilaksanakan untuk memastikan seluruh fasilitas pendidikan dalam kondisi layak dan berfungsi dengan baik. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan Sekolah Dasar secara berkelanjutan.

Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama, pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan juga dilaksanakan sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan. Kegiatan pembangunan meliputi pembangunan fasilitas parkir pada 11 satuan pendidikan, pembangunan 1 ruang kelas baru, pembangunan laboratorium IPA pada 1 satuan pendidikan, dan pembangunan laboratorium komputer pada 2 satuan pendidikan untuk mendukung pembelajaran berbasis praktik dan teknologi.

Selain itu, pembangunan fasilitas penunjang lainnya juga dilaksanakan, antara lain pemasangan paving pada 4 satuan pendidikan,

pembangunan lapangan upacara pada 1 satuan pendidikan, pembangunan ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) pada 5 satuan pendidikan, pembangunan kantin sekolah pada 6 satuan pendidikan, serta pembangunan ruang guru, ruang kepala sekolah, dan ruang tata usaha pada 3 satuan pendidikan. Pembangunan rumah dinas pada 1 satuan pendidikan dan pembangunan pagar keliling pada 3 satuan pendidikan juga dilaksanakan untuk mendukung operasional dan keamanan sekolah. Selanjutnya, pembangunan tempat ibadah pada 1 satuan pendidikan, lapangan olahraga pada 2 satuan pendidikan, dan perpustakaan pada 1 satuan pendidikan dilaksanakan untuk mendukung penguatan karakter dan peningkatan literasi peserta didik.

Di samping kegiatan pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana juga dilaksanakan, meliputi rehabilitasi ruang kelas pada 25 satuan pendidikan, rehabilitasi laboratorium bahasa pada 5 satuan pendidikan, rehabilitasi laboratorium IPA pada 2 satuan pendidikan, serta rehabilitasi paving halaman pada 2 satuan pendidikan. Selain itu, rehabilitasi ruang guru, ruang kepala sekolah, dan ruang tata usaha pada 3 satuan pendidikan, rehabilitasi rumah dinas pada 5 satuan pendidikan, rehabilitasi tempat ibadah pada 1 satuan pendidikan, serta rehabilitasi perpustakaan pada 3 satuan pendidikan juga dilaksanakan untuk memastikan seluruh fasilitas pendidikan dalam kondisi layak dan berfungsi dengan baik.

Melalui pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pada jenjang PAUD, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, diharapkan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Tanah Laut dapat terus meningkat. Ketersediaan fasilitas yang memadai akan mendukung proses pembelajaran yang efektif, meningkatkan kenyamanan dan keselamatan warga sekolah, serta berkontribusi dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Berikut dokumentasi kegiatan Pembangunan dan revitalisasi Gedung Sekolah sebagai berikut :







2. Penyediaan infrastruktur digital berupa ChromeBook dan SmartBoard

Dalam rangka mendukung transformasi digital pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis teknologi, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melaksanakan pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi pada satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Pengadaan ini merupakan bagian dari upaya modernisasi sarana pembelajaran guna mendukung implementasi kurikulum nasional serta meningkatkan kompetensi literasi digital peserta didik dan tenaga pendidik.

Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), telah dilaksanakan pengadaan Chromebook sebanyak 201 unit yang didistribusikan ke satuan pendidikan sebagai sarana pendukung pembelajaran berbasis digital. Ketersediaan perangkat ini membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran secara lebih interaktif, memanfaatkan berbagai sumber belajar digital, serta mendukung pelaksanaan asesmen berbasis teknologi. Selain itu, untuk memperkuat pembelajaran interaktif di kelas, juga dilaksanakan pengadaan Smartboard sebanyak 16 unit pada satuan pendidikan SD. Smartboard memungkinkan guru menyampaikan materi secara visual dan dinamis, sehingga dapat meningkatkan minat belajar, pemahaman peserta didik, serta menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menarik dan efektif sejak jenjang pendidikan dasar.

Selanjutnya, pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), dilaksanakan pengadaan Chromebook sebanyak 30 unit yang digunakan untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi, pelaksanaan asesmen berbasis komputer, serta menunjang kegiatan pembelajaran yang inovatif dan efisien. Dengan tersedianya perangkat tersebut, diharapkan peserta didik dapat meningkatkan kemampuan literasi digital, mengakses berbagai sumber belajar secara mandiri, serta mempersiapkan diri dalam menghadapi perkembangan teknologi di era digital.

Melalui pengadaan Chromebook dan Smartboard pada jenjang SD dan SMP tersebut, diharapkan satuan pendidikan dapat melaksanakan proses pembelajaran yang lebih modern, adaptif, dan berkualitas, sehingga mampu meningkatkan mutu pendidikan serta mendukung pengembangan kompetensi peserta didik secara optimal.

Berikut dokumentasi kegiatan Penyediaan infrastruktur digital berupa ChromeBook dan SmartBoard sebagai berikut :





3. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara berkelanjutan melaksanakan berbagai kegiatan strategis yang meliputi koordinasi, perencanaan, supervisi, evaluasi, bimbingan teknis, pelatihan, serta sosialisasi berbagai program pendidikan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya sistematis untuk memperkuat kompetensi sumber daya manusia pendidikan, baik pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan kesetaraan, pendidikan nonformal, Sekolah Dasar, maupun Sekolah Menengah Pertama di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Sepanjang tahun pelaksanaan program, telah dilaksanakan sebanyak 24 kegiatan yang melibatkan total 2.401 peserta yang terdiri dari pendidik, tenaga kependidikan, pengelola satuan pendidikan, serta pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan tersebut mencakup bimbingan teknis peningkatan kapasitas, bimbingan teknis inklusi PAUD, pelatihan peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik, serta pengembangan konten digital pendidikan PAUD yang diikuti oleh 105 peserta. Selain itu, kegiatan koordinasi, supervisi, dan evaluasi juga dilaksanakan untuk memastikan kualitas implementasi program pendidikan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Upaya peningkatan kapasitas juga diperkuat melalui berbagai kegiatan sosialisasi program strategis, seperti sosialisasi Dapodik yang diikuti

oleh 206 peserta, sosialisasi advokasi PAUD dengan jumlah peserta mencapai 400 orang, serta sosialisasi kegiatan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7 KAIH) yang diikuti oleh 800 peserta. Tingginya partisipasi pada kegiatan tersebut menunjukkan komitmen dan antusiasme yang kuat dari para pendidik dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan kompetensi serta kualitas layanan pendidikan. Selain itu, berbagai kegiatan lain seperti sosialisasi kualitas layanan PAUD, PAUD Holistik Integratif, pembelajaran mendalam (deep learning), sekolah sehat, serta transisi PAUD ke SD turut dilaksanakan untuk memperkuat pemahaman dan implementasi kebijakan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran. Bimbingan teknis terkait Tes Kemampuan Akademik (TKA) pendidikan kesetaraan dan nonformal juga dilaksanakan guna meningkatkan kesiapan satuan pendidikan dalam mendukung sistem evaluasi pendidikan yang berkualitas.

Pada jenjang Sekolah Dasar, berbagai kegiatan strategis telah dilaksanakan yang mencakup bimbingan teknis, penguatan kurikulum, serta peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah sebagai bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme pendidik dan efektivitas pengelolaan satuan pendidikan. Pada aspek pengelolaan satuan pendidikan, telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diikuti oleh 246 peserta yang terdiri dari bendahara BOS dari unsur pendidik maupun tenaga kependidikan dan dilaksanakan di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut. Selain itu, dilaksanakan pula Bimbingan Teknis Perencanaan Berbasis Data yang diikuti oleh 246 peserta dari unsur pendidik dan tenaga kependidikan yang bertempat di Ruang Belajar SKB, dengan tujuan meningkatkan kemampuan satuan pendidikan dalam menyusun perencanaan berbasis data yang akurat, efektif, dan terukur.

Upaya peningkatan kompetensi kepala sekolah juga dilakukan melalui Bimbingan Teknis Deep Learning yang diikuti oleh 248 kepala sekolah, yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman terhadap konsep

pembelajaran mendalam sebagai pendekatan yang berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan reflektif peserta didik. Selanjutnya, peningkatan kompetensi guru dilaksanakan melalui Bimbingan Teknis Pembuatan Konten Digital yang diikuti oleh 86 guru serta Bimbingan Teknis Penguatan Pendidikan Karakter yang diikuti oleh 102 guru, yang keduanya dilaksanakan di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung transformasi pembelajaran berbasis teknologi serta memperkuat pembentukan karakter peserta didik.

Sejalan dengan upaya tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut juga melaksanakan berbagai kegiatan bimbingan teknis guna meningkatkan kapasitas pendidik, tenaga kependidikan, kepala sekolah, serta peserta didik. Pada aspek pengelolaan keuangan satuan pendidikan, telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Dana BOS yang diikuti oleh 58 peserta yang terdiri dari bendahara BOS dari unsur pendidik maupun tenaga kependidikan, yang dilaksanakan di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut. Selain itu, dilaksanakan pula Bimbingan Teknis Perencanaan Berbasis Data yang diikuti oleh 60 kepala sekolah dan dilaksanakan di Ruang Belajar SKB, dengan tujuan meningkatkan kemampuan kepala sekolah dalam menyusun perencanaan pendidikan yang berbasis data dan berorientasi pada peningkatan mutu satuan pendidikan.

Upaya peningkatan kompetensi kepala sekolah juga diperkuat melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis Deep Learning yang diikuti oleh 120 kepala sekolah dan dilaksanakan di Hotel Roditha Banjarbaru. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kepala sekolah dalam mengimplementasikan pembelajaran mendalam secara efektif di satuan pendidikan. Selain itu, peningkatan kompetensi guru juga dilaksanakan melalui Bimbingan Teknis Pengembangan Konten Digital yang diikuti oleh 120 guru dan dilaksanakan di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut serta Aula SKB Pelaihari. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam

memanfaatkan teknologi digital sebagai media pembelajaran yang inovatif dan interaktif.

Tidak hanya berfokus pada peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut juga melaksanakan Bimbingan Teknis Wawasan Kebangsaan yang diikuti oleh 60 peserta didik dan dilaksanakan di UPTD SMP Negeri 2 Pelaihari. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat karakter peserta didik, menanamkan nilai-nilai kebangsaan, serta membentuk generasi muda yang memiliki sikap nasionalisme, disiplin, dan tanggung jawab.

Secara keseluruhan, pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan secara komprehensif dan berkelanjutan. Melalui peningkatan kompetensi, penguatan kurikulum, pemanfaatan teknologi pembelajaran, serta penguatan karakter peserta didik, diharapkan mutu pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan di Kabupaten Tanah Laut dapat terus meningkat dan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing.

Berikut dokumentasi kegiatan Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenjang sebagai berikut :







4. Pemberian beasiswa bagi peserta didik

Dalam rangka mendukung keberlangsungan pendidikan serta meningkatkan motivasi belajar peserta didik, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melaksanakan program pemberian beasiswa bagi peserta didik Sekolah Dasar Negeri di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Program ini diberikan kepada sebanyak 1.410 siswa sebagai bentuk dukungan

pemerintah daerah dalam membantu peserta didik, khususnya yang membutuhkan bantuan biaya pendidikan.

Pemberian beasiswa ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi orang tua atau wali peserta didik, serta memastikan peserta didik tetap dapat mengikuti proses pendidikan secara optimal tanpa terkendala faktor ekonomi. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat meningkatkan semangat belajar, mendorong prestasi peserta didik, serta mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar. Melalui program ini, peserta didik diharapkan memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan potensi diri, meningkatkan prestasi akademik, serta berkontribusi dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Sejalan dengan upaya tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (SMP) juga melaksanakan program pemberian beasiswa bagi peserta didik yang bersekolah di SMP Negeri di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Program ini merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah dalam meningkatkan akses dan keberlangsungan pendidikan pada jenjang SMP, khususnya bagi peserta didik yang membutuhkan dukungan pembiayaan pendidikan agar tetap dapat mengikuti proses pembelajaran secara optimal.

Pada tahun pelaksanaan, program pemberian beasiswa pada jenjang SMP telah diberikan kepada sebanyak 268 siswa yang tersebar pada SMP Negeri. Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan semangat belajar peserta didik, mengurangi potensi angka putus sekolah, serta memperluas pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian, program pemberian beasiswa ini menjadi salah satu wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Berikut dokumentasi kegiatan Pemberian beasiswa bagi peserta didik sebagai berikut :





5. Pemberian perlengkapan peserta didik

Dalam rangka mendukung kelancaran proses pembelajaran serta meningkatkan kesiapan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pendidikan, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melaksanakan program pemberian bantuan perlengkapan peserta didik. Program ini merupakan salah satu bentuk perhatian dan dukungan pemerintah daerah dalam

memenuhi kebutuhan dasar peserta didik, khususnya bagi mereka yang membutuhkan dukungan untuk menunjang kegiatan belajar di sekolah.

Program pemberian bantuan perlengkapan peserta didik telah diberikan kepada sebanyak 2.044 siswa yang bersekolah di Sekolah Dasar Negeri di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Bantuan ini bertujuan untuk membantu peserta didik agar memiliki perlengkapan sekolah yang memadai sehingga dapat mengikuti proses pembelajaran secara optimal tanpa terkendala oleh keterbatasan sarana penunjang pendidikan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut juga melaksanakan program pemberian bantuan perlengkapan peserta didik bagi siswa yang bersekolah di SMP Negeri di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Pada tahun pelaksanaan, bantuan ini telah diberikan kepada sebanyak 116 siswa. Program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah peserta didik serta mendukung kelancaran proses pembelajaran pada jenjang SMP.

Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan semangat belajar peserta didik, mendukung pemerataan akses pendidikan, serta mengurangi kendala yang dihadapi peserta didik dalam memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah. Selain itu, program ini juga menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan serta mewujudkan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkeadilan.





6. Peningkatan kualitas kurikulum pendidikan

Dalam rangka meningkatkan kualitas kurikulum pendidikan serta memperkuat mutu pembelajaran, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melaksanakan berbagai kegiatan bimbingan teknis yang berfokus pada pengembangan dan penyempurnaan kurikulum di satuan pendidikan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Bidang Sekolah Dasar dan Bidang Sekolah Menengah Pertama sebagai upaya meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun dan mengimplementasikan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan karakteristik daerah.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal dan penyusunan silabus muatan lokal yang melibatkan sebanyak 246 sekolah dengan peserta dari unsur guru. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Belajar SKB dan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun kurikulum dan silabus muatan lokal yang sesuai dengan karakteristik daerah, kebutuhan peserta didik, serta potensi lingkungan setempat. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan guru mampu mengembangkan kurikulum yang kontekstual dan relevan guna mendukung peningkatan kualitas pembelajaran.

Sejalan dengan upaya tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut juga melaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal dan penyusunan silabus muatan lokal dengan mengundang sebanyak 60 sekolah dan diikuti oleh peserta dari unsur guru. Kegiatan ini

dilaksanakan di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas guru dalam menyusun dokumen kurikulum muatan lokal yang sistematis, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik pada jenjang SMP.

Melalui pelaksanaan bimbingan teknis ini, diharapkan para guru pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama memiliki kemampuan yang lebih baik dalam merancang dan mengimplementasikan kurikulum muatan lokal secara efektif. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Tanah Laut secara berkelanjutan.

Berikut dokumentasi kegiatan Peningkatan kualitas kurikulum pendidikan pada semua jenjang sebagai berikut :







7. Penguatan literasi dan numerasi

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melaksanakan Bimbingan Teknis Kurikulum Nasional yang diikuti oleh sebanyak 101 guru dan dilaksanakan di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini membahas penguatan literasi dan numerasi sebagai kompetensi dasar yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran serta mendukung implementasi

kurikulum nasional secara efektif di satuan pendidikan. Melalui kegiatan ini, diharapkan para guru memiliki pemahaman dan keterampilan yang lebih baik dalam mengintegrasikan literasi dan numerasi ke dalam proses pembelajaran.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut juga melaksanakan Bimbingan Teknis Strategi Implementasi Kurikulum Nasional yang diikuti oleh sebanyak 120 peserta yang terdiri dari kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut dan membahas strategi penguatan literasi dan numerasi sebagai bagian penting dalam implementasi kurikulum nasional di satuan pendidikan.

Melalui pelaksanaan bimbingan teknis ini, diharapkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru memiliki pemahaman yang komprehensif serta kemampuan yang memadai dalam mengimplementasikan kurikulum nasional secara optimal. Dengan demikian, penguatan literasi dan numerasi dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan guna mendukung peningkatan mutu pembelajaran dan kualitas pendidikan di Kabupaten Tanah Laut.

Berikut dokumentasi kegiatan Penguatan literasi dan numerasi sebagai berikut :







8. Pengembangan potensi dan karakter peserta didik

Dalam rangka mendukung pengembangan potensi, minat, bakat, serta pembentukan karakter peserta didik, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melaksanakan berbagai kegiatan kompetisi akademik, olahraga, dan seni di tingkat kabupaten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi peserta didik dalam mengekspresikan kemampuan, meningkatkan kepercayaan diri, serta

menumbuhkan semangat berprestasi dan sportivitas sejak dini di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat kabupaten yang diselenggarakan secara daring dengan jumlah pendaftar hampir 300 siswa. Kegiatan ini menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan akademik peserta didik, khususnya dalam bidang sains, serta mendorong terciptanya budaya belajar yang kompetitif dan inovatif. Selain itu, dilaksanakan pula Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) yang diselenggarakan di Pelaihari dengan jumlah peserta sebanyak 110 siswa yang mengikuti 5 cabang olahraga. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani, menanamkan nilai sportivitas, serta membentuk karakter disiplin dan kerja sama.

Selanjutnya, Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS3N) tingkat kabupaten juga dilaksanakan secara daring dengan jumlah pendaftar hampir 300 siswa. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kreativitas, mengekspresikan bakat seni, serta memperkuat karakter percaya diri dan apresiasi terhadap seni dan budaya. Melalui pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut, diharapkan peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar tidak hanya berkembang dari sisi akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, kreatif, dan berdaya saing.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut juga melaksanakan berbagai kegiatan kompetisi sebagai upaya pengembangan potensi peserta didik. Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat kabupaten pada jenjang SMP dilaksanakan secara daring dengan jumlah pendaftar hampir 150 siswa. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan akademik peserta didik serta mendorong peningkatan kualitas pembelajaran di bidang sains.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut juga melaksanakan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) yang diselenggarakan di Pelaihari sesuai dengan tempat pelaksanaan lomba, dengan jumlah peserta sebanyak 130 siswa yang mengikuti 5 cabang olahraga.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani, membentuk karakter disiplin, serta menanamkan nilai sportivitas dan kerja sama di kalangan peserta didik. Selanjutnya, Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS3N) tingkat kabupaten pada jenjang SMP juga dilaksanakan secara luring dengan jumlah pendaftar hampir 300 siswa. Kegiatan ini menjadi wadah bagi peserta didik untuk menyalurkan bakat dan kreativitas di bidang seni serta meningkatkan rasa percaya diri dan apresiasi terhadap seni dan budaya.

Melalui pelaksanaan berbagai kegiatan kompetisi pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, diharapkan peserta didik dapat berkembang secara optimal, baik dari segi akademik, olahraga, maupun seni. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu membentuk karakter peserta didik yang kreatif, disiplin, berprestasi, dan berdaya saing sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh di Kabupaten Tanah Laut.







Faktor Penghambat

1. Akses dan keberlanjutan pendidikan formal belum merata, terutama pada wilayah tertentu dan kelompok rentan.
2. Angka putus sekolah dan transisi antarjenjang yang belum optimal akibat faktor ekonomi, sosial-budaya, serta keterbatasan dukungan keluarga.

3. Banyaknya peserta didik yang melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren yang belum seluruhnya terintegrasi dalam sistem pendataan pendidikan formal, sehingga tidak tercatat dalam Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
4. Kualitas proses pembelajaran yang belum merata, ditandai dengan keterbatasan kompetensi pendidik, sarana prasarana, dan pemanfaatan asesmen pembelajaran.
5. Pemanfaatan data dan hasil evaluasi pendidikan (Rapor Pendidikan) yang belum optimal sebagai dasar perbaikan mutu pembelajaran dan tata kelola satuan pendidikan.

Rencana Aksi

1. Perluasan akses dan keberlanjutan pendidikan melalui penguatan program wajib belajar, pencegahan putus sekolah, dan fasilitasi transisi antarjenjang.
2. Penguatan pendataan pendidikan melalui sinkronisasi dan validasi data peserta didik, termasuk pendataan peserta didik yang melanjutkan ke pondok pesantren melalui koordinasi lintas sektor agar capaian pendidikan dapat tercermin secara lebih akurat.
3. Peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan kompetensi pendidik, pemenuhan sarana prasarana, serta pemanfaatan asesmen dan hasil Rapor Pendidikan sebagai dasar perbaikan mutu.
4. Penguatan pemantauan dan evaluasi kinerja pendidikan berbasis data secara berkala guna memastikan peningkatan RLS, HLS, dan Nilai Rapor Pendidikan secara terukur dan berkelanjutan.

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 3.489 ASN termasuk tenaga pendidik dan kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta di dukung oleh 3 Program dengan Pagu Rp. 184.391.854.337,98 dan terealisasi Rp. 157.148.605.792,50 atau sebesar 85,23%.

Tabel 3.1.7
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Pengelolaan Pendidikan	181.412.792.193,82	**156.531.205.658,50**
2	Program Pengembangan Kurikulum	235.880.331,60	**201.319.700,00**
3	Program Pembinaan Perpustakaan	2.743.181.812,56	**416.080.434,00**
	JUMLAH	**184.391.854.337,98**	**157.148.605.792,50**

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Efisiensi kinerja diukur menggunakan rumus berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi
PAKi : Pagu anggaran keluaran i
RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
CKi : Capaian keluaran i

1. Rata-Rata Lama Sekolah

$$\text{Efisiensi} = \frac{(184.391.854.337,98 \times 101,76\%) - 157.148.605.792,50}{(184.391.854.337,98 \times 101,76\%)} \text{ X } 100\%$$

Efisiensi = 16,25%

Tabel 3.1.8
Efisiensi Indikator 1

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
101,76%	85,23%	16,25%

2. Harapan Lama Sekolah

$$\text{Efisiensi} = \frac{(184.391.854.337,98 \times 102\%) - 157.148.605.792,50}{(184.391.854.337,98 \times 102\%)} \times 100\%$$

Efisiensi = 16,45%

Tabel 3.1.9
Efisiensi Indikator 2

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
102%	85,23%	16,45%

3. Nilai Raport Pendidikan

$$\text{Efisiensi} = \frac{(184.391.854.337,98 \times 100\%) - 157.148.605.792,50}{(184.391.854.337,98 \times 100\%)} \times 100\%$$

Efisiensi = 14,77%

Tabel 3.1.10
Efisiensi Indikator 3

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100%	85,23%	14,77%

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Derajat Kesehatan

Meningkatnya Derajat Kesehatan diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.2.1
Capaian Kinerja Terhadap Target 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			TAHUN 2025		
			TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,21	74,46	74,50	75	74,88	99,84%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2025								99,84%

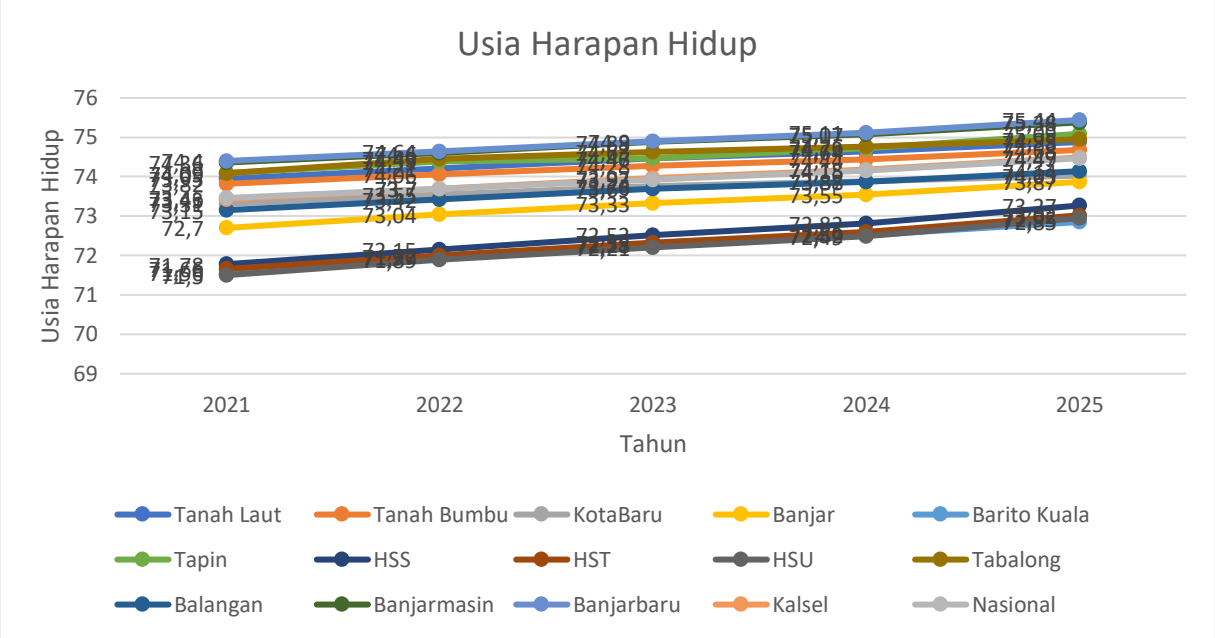
Tabel 3.2.2
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2025 THD TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	75	74,88	99,84%	75,2	99,57%

Usia Harapan Hidup Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan yaitu pada angka 74,64 di tahun 2024 menjadi 74,88 di tahun 2025 atau terdapat peningkatan sebesar 0,24 tahun. Realisasi tersebut berdasarkan target tahun 2025 sebesar 99,84 %. Angka tersebut menggambarkan bahwa perkiraan rata-rata usia yang akan dijalani oleh seorang bayi yang dilahirkan hidup di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 diharapkan mencapai umur 74,88 tahun hingga akhir hayatnya, dengan asumsi pola kematian menurut umur pada saat kelahiran (kohor) sama sepanjang usia bayi. Peningkatan umur harapan hidup pada tahun 2025 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Tahan Laut semakin meningkat. Angka tersebut juga masih berada di atas angka Provinsi Kalimantan

Selatan dan Nasional. Dibandingkan dengan angka provinsi sebesar 74,49 terpaut 0,39 di bawah angka Kabupaten Tanah Laut, sedangkan dibandingkan dengan angka nasional sebesar 74,47 terpaut 0,41.

Grafik 3.2.1
Usia Harapan Hidup se-Regional Kalimantan Selatan, Provinsi dan Nasional
Tahun 2021 – 2025



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel 3.2.3
Usia Harapan Hidup se-Regional Kalimantan Selatan, Provinsi dan Nasional
Tahun 2021 – 2025

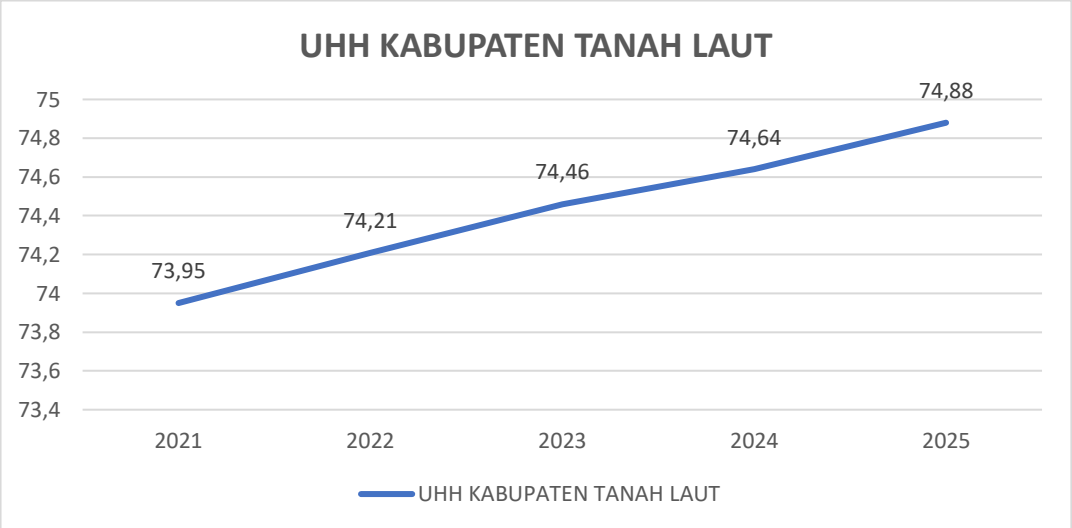
Kab/Kota	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Tanah Laut	73.95	74.21	74.46	74.64	74.88
Tanah Bumbu	73.82	74.06	74.28	74.44	74.68
KotaBaru	73.31	73.55	73.76	73.88	74.03
Banjar	72.7	73.04	73.33	73.55	73.87
Barito Kuala	71.56	71.97	72.28	72.52	72.85
Tapin	74.09	74.39	74.47	74.72	75.09
HSS	71.78	72.15	72.52	72.82	73.27
HST	71.66	72	72.33	72.6	73.02
HSU	71.5	71.89	72.21	72.49	72.95
Tabalong	74.09	74.45	74.63	74.76	74.95

Kab/Kota	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Balangan	73.15	73.42	73.69	73.87	74.14
Banjarmasin	74.36	74.6	74.88	75.07	75.38
Banjarbaru	74.4	74.64	74.9	75.11	75.44
Kalsel	73.43	73.7	73.97	74.18	74.49
Nasional	73.46	73.7	73.93	74.15	74.47

Kualitas sumber daya manusia suatu daerah dapat dilihat secara fisik maupun non fisik. Kualitas fisik penduduk dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk, di mana salah satu indikator utama untuk mengukur derajat kesehatan penduduk secara makro adalah dengan melihat Usia Harapan Hidup (UHH) saat lahir atau yang sebelumnya biasa disebut Angka Harapan Hidup.

Trend peningkatan usia harapan hidup Kabupaten Tanah Laut dari tahun 2021-2025 dapat dilihat dari grafik berikut:

Grafik 3.2.2
Usia Harapan Hidup Kabupaten Tanah Laut 2021-2025



Sumber: BPS Kabupaten tanah Laut

Perubahan Data Usia Harapan Hidup sebagai salah satu komponen perhitungan IPM :

- Mulai tahun 2023, BPS melakukan *updating* sumber data UHH hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 dengan hasil Long Form Sensus Penduduk Tahun 2020 yang lebih terkini dan berdasarkan jumlah sampel yang lebih besar.
- Hal ini dilakukan karena telah tersedia data hasil Sensus Penduduk yang lebih update dan lebih menggambarkan kondisi terkini dibandingkan data sebelumnya.
- Hal ini mengakibatkan adanya perubahan angka UHH menjadi 2 yaitu UHH series lama (sumber data Sensus Penduduk 2010) dan UHH series baru (sumber data Long Form Sensus Penduduk 2020)
- Untuk sumber data HLS, RLS dan Pengeluaran Perkapita masih tetap bersumber dari hasil Susenas Maret tahun berjalan (tidak ada perubahan angka)

Tabel 3.2.4
Series Data Umur Harapan Hidup (UHH)

Sumber Data	Disagregasi	2021	2022	2023	2024	2025
Hasil Sensus Penduduk 2010 (Metode Lama)	Kabupaten Tanah Laut	69,59	69,86	70,11	70,31	Tidak dirilis lagi
	Provinsi Kalsel	68,83	69,13	69,42	69,65	Tidak dirilis lagi
	Indonesia	71,57	71,85	72,13	72,39	Tidak dirilis lagi
Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 (Metode Baru)	Kabupaten Tanah Laut	73,95	74,21	74,46	74,64	74,88
	Provinsi Kalsel	73,43	73,70	73,97	74,18	74,49
	Indonesia	73,46	73,70	73,93	74,15	74,47

Usia Harapan Hidup ditentukan oleh besarnya angka jumlah kematian bayi, jika kematian bayi jumlahnya besar, usia harapan hidup akan rendah. Oleh karenanya daerah yang Usia Harapan Hidupnya tinggi pada umumnya tingkat kesehatan ibu dan bayinya tinggi yang menggambarkan peningkatan status kesehatan masyarakatnya yang diukur dengan indikator sesuai tebel dibawah.

Tabel 3.2.5
Data kematian ibu dan bayi serta prevelensi gizi stunting
Kabupaten Tanah Laut

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
1	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	267	51	158	118,7	63,6
2	Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup	11,3	12,3	10	12,7	11,2
3	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup	Indikator Baru (mulai 2025)				12,9
3	Prevalensi Gizi stunting (%)	31% (SSGI)	26,6%(SSGI)	41,7%(SKI)	22,5%(SSGI)	Belum rilis

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut

Data diatas menunjukkan capaian AKI per tahun mengalami penurunan pada tahun 2025, jumlah kematian ibu mencapai 8 (delapan) kematian di tahun 2020, 17 (tujuh belas) kematian pada tahun 2021, 3 (tiga) Tahun 2022, 9 (Sembilan) kematian di tahun 2023, 6 (enam) kasus kematian pada tahun 2024 dan 3 (tiga) kasus kematian pada Tahun 2025. AKI Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 yaitu 63,6 per 100.000 kelahiran hidup lebih rendah apabila dibandingkan dengan target RPJMN Tahun 2025 yaitu 122 per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2025 terjadi penurunan yaitu 11,2 per 1000 Kelahiran Hidup dan masih lebih

rendah dari target RPJMN tahun 2025 yaitu 12,62 per 1000 Kelahiran Hidup.

Angka Kematian Balita (AKB) Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2025 terjadi penurunan yaitu 12,9 per 1000 Kelahiran Hidup dan masih lebih rendah dari target RPJMN tahun 2025 yaitu 15 per 1000 Kelahiran Hidup.

Usia harapan hidup erat kaitannya dengan angka kematian bayi. Angka kematian bayi merupakan jumlah kematian pada usia di bawah satu tahun. Menurut BPS (2016) secara teori menurunnya angka kematian bayi dapat meningkatkan angka harapan hidup di suatu wilayah. Hal ini dikarenakan bayi sangat rentan terhadap penyakit dan pengaruh dari lingkungan lainnya seperti lingkungan sosial, ekonomi dan lingkungan fisik.

Prevalensi stunting mengalami penuruan berdasarkan SSGI 2024 yaitu 22,5 % dibandingkan tahun SKI 2023 yaitu 41,7 %. Sedangkan berdasarkan data Sigizi, prevalensi stunting mengalami trend kenaikan yaitu 4.90 % pada tahun 2023 menjadi 5,55 % di 2024 dan 6,6 % di Tahun 2025 hal ini karena pada tahun 2025 cakupan penimbangan bayi dan balita di Kabupaten Tanah Laut sudah mencapai 100%. Prevalensi ini dibawah target nasioinal yaitu 18,8 % di Tahun 2024.

Banyak faktor yang mempengaruhi Angka Harapan Hidup, berikut ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup. Hal yang mempengaruhi kelangsungan hidup lebih lama / Penyebab panjangnya umur manusia, tergantung dari bebrapa faktor (Prof. Dr. Ir. Ali Khomsan, ahli gizi Institut Pertanian Bogor) yaitu:

1) Pola makan
2) Penyakit bawaan dari lahir/penyakit degenaratif
3) Lingkungan tempat tinggal
4) Stress/tekanan

Faktor-faktor kesehatan yang mempengaruhi dan berhubungan dengan umur harapan hidup terdiri atas:

1) Gizi
2) Merokok
3) Manepause

4) Osteoporosis/tulang keropos

Angka harapan hidup Kabupaten Tanah Laut dapat tercapai melebihi target dikarenakan:

1) Keberhasilan program kesehatan dan pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat pada peningkatan pelayanan kesehatan yang bisa diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dimana untuk pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 diperoleh pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 85,97 dimana dapat diartikan bahwa kepuasan masyarakat pada kisaran Baik.
2) Kesehatan juga bisa diukur dari Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dimana Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 capaian AKI adalah 63,6 per 100.000 Kelahiran Hidup sudah baik karena angka kematian ibu lebih rendah dari target RPJMN yaitu 122 per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Tanah Laut mencapai 11,2 per 1000 Kelahiran Hidup lebih rendah dari target RPJMN yaitu 12,62 per 1000 Kelahiran Hidup.
3) Keberadaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Tanah Laut sampai tahun 2025 ini dapat dikatakan telah memadai. seluruh jenis fasilitas kesehatan dasar telah tersedia di Kabupaten Tanah Laut dari rumah sakit sampai dengan polindes. saat ini pemerintah Kabupaten Tanah Laut sudah memiliki 3 buah rumah sakit daerah yaitu Rumah Sakit Hadji Boejasin Pelaihari, Rumah Sakit KH. Mansyur Kintap dan RSUD H. Darlan Ismali Bumi Makmur. Selain itu kita juga mendapat dukungan dari beberapa rumah sakit swasta yaitu Rumah Sakit Borneo Citra Medika dan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Ibunda, Klinik Utama Ammariz, Klinik-Klinik Perusahaan serta beberapa Klinik Pratama lainnya yang kesemuanya berada di wilayah kabupaten Tanah Laut.
4) Layanan kesehatan pada puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Tanah Laut tersebar merata di seluruh kecamatan sebanyak 22 buah, dengan 3 buah adalah puskesmas rawat inap yaitu puskesmas Tajau

pecah, Panyipatan dan Kurau serta. Sampai tahun 2025 ini hasil penilaian akreditasi puskesmas dan rumah sakit adalah:

a. Penilaian Reakreditasi yang dilaksanakan pada tahun 2023 pada 11 Puskesmas dengan hasil 9 puskesmas mendapat predikat Paripurna yakni Puskesmas Angsau, Tirta Jaya, Jorong, Tajau Pecah, Takisung, Sungai Riam, Panyipatan, Kait-Kait, Tambang Ulang; dan 2 Puskesmas mendapat predikat Utama yakni Puskesmas Batakan dan Tanjung Habulu. Penilaian akreditasi pada tahun 2024 yang dilaksanakan pada 11 Puskesmas terdiri dari Survei Reakreditasi pada 8 Puskemas yakni Puskesmas Sungai Cuka, Kintap, Asam-Asam, Pelaihari, Padang Luas, Kurau, Bumi Makmur, Bati-Bati ; dan survei perdana akreditasi pada 3 Puskesmas yakni Puskesmas Durian Bungkuk, Bentok Kampung, dan Panggung. Dari 11 Puskesmas yang diakreditasi tahun 2024, semuanya mendapatkan sertifikat akreditasi dengan predikat Paripurna.

b. Penilaian akreditasi pada RSUD KH Mansyur Kintap dilaksanakan pada tahun 2023 dan Penilaian re akreditasi pada RSUD H Boejasin dilaksanakan pada tahun 2023 mendapatkan sertifikat akreditasi dengan predikat Paripurna serta Penilaian perdana akreditasi pada RSUD H Darlan Ismail Bumi Makmur dilaksanakan pada tahun 2025 ini mendapatkan sertifikat akreditasi dengan predikat Utama.

c. Pada Tahun 2025 ini juga dilaksanakan penilaian akreditasi pada UPT Labkesda kabupaten Tanah Laut untuk sertifikat masih dalam proses.

5) Sehingga secara keseluruhan hasil akreditasi Puskesmas dan RSUD pada tahun 2023, 2024 dan 2025 yakni sebanyak 20 Puskesmas mendapatkan predikat Paripurna dan sisanya sebanyak 2 Puskesmas mendapatkan predikat Utama yakni Puskesmas Tanjung Habulu dan Puskesmas Batakan serta 2 RSUD mendapatkan predikat Paripurna dan 1 RSUD mendapatkan predikat Utama. Adapun pembiayaan survei sepenuhnya menggunakan Anggaran Pembiayaan dari DPA Dinkes Tahun 2023, 2024

dan 2025.

6) Peningkatan manajemen puskesmas dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) kepada semua puskesmas, 22 puskesmas telah di BLUD .
7) Penempatan Bidan Desa di semua desa dan kelurahan (135 desa dan 5 Kelurahan) yang merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanah Laut, disamping itu juga Dinas Kesehatan berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan ibu hamil terutama yang berisiko tinggi dengan mendatangkan dokter spesialis kebidanan secara berkala di Puskesmas yang ditunjuk. Upaya tersebut dilakukan untuk mendekatkan akses penduduk terhadap pelayanan kesehatan serta menurunkan Angka Kematian Ibu dan Anak.
8) Pelaksanaan program *Universal Health Coverage (UHC)* dengan cakupan sebagai berikut:

Tabel 3.2.6
Terkait Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk menurut Jenis Jaminan Kabupaten/ Kota Tahun 2025

No	Jenis Kepesertaan	Peserta Jaminan Kesehatan	
		Jumlah	Persentasi
1	**PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)**		
	PBI APBN	72,504	19.46
	PBI APBD	149,895	40.23
	Sub Jumlah PBI	**222,399**	**59.69**
2	**NON PBI**		
	Pekerja Penerima Upah (PPU)	103,829	27.87
	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/Mandiri	37,791	10.14
	Bukan Pekerja (BP)	4,704	1.26
	Sub Jumlah NON PBI	146,324	39.27
	Jumlah (Kab / Kota)	368,723	98.96
	Jlh Penduduk 1 Desember Tahun 2025	**372,583**	

9) Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dipengaruhi oleh faktor

lokasi, yaitu mudahnya untuk dijangkau atau tidak. Keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 tersebar di 11 Kecamatan yaitu 3 (tiga) Rumah sakit Umum Daerah, 22 (dua puluh dua) Puskesmas, 1 (satu) Instalasi Gudang Farmasi, 1 (satu) Laboratorium Kesehatan Masyarakat, 63 (enam puluh tiga) Puskesmas Pembantu, 135 (seratus tiga puluh lima) Poskesdes/Polindes, 21 (Dua Puluh Satu) Ambulan dan 281 (dua ratus delapan puluh satu) Posyandu.

10) Memberikan bentuk pelayanan kesehatan yang tidak hanya terbatas pada fasilitas pelayanan saja akan tetapi juga meliputi tenaga kesehatan. Keberadaan tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan, informasi dan motivasi kepada masyarakat untuk mendatangi fasilitas kesehatan. Dinas Kesehatan memiliki Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Tahun 2025 terdiri dari ;

1. Dokter Spesialis sebanyak 36 (Tiga Puluh Enam) orang yang terdiri dari 28 orang dokter spesialis di RSUD H. Boejasin Pelaihari dan 8 orang Dokter Spesialis di RSUD K.H Mansyur Kintap.
2. Dokter Umum sebanyak 95 (Sembilan Puluh Lima) orang terdiri dari 38 orang di RSUD H. Boejasin Pelaihari, 12 orang di RSUD K.H Masyur Kintap, 1 orang di RSUD H Darlan Ismail dan 44 orang di 22 UPT Puskesmas.
3. Dokter Gigi sebanyak 35 (Tiga Puluh Lima) orang, terdiri dari 6 orang di RSUD H. Boejasin Pelaihari, 1 orang di RSUD KH. Mansyur Kintap, 1 orang di RSUD H Darlan Ismail dan 27 orang tersebar di 22 UPT Puskemas.
4. Dokter Sub Spesiallis sebanyak 3 orang di RSUD H. Boejasin Pelaihari.
5. Tenaga Kesehatan Masyarakat sebanyak 44 orang terdiri dari 6 orang di RSUD H. Beojasin Pelaihari, 6 orang di RSUD. K.H. Mansyur Kintap, 2 orang di RSUD H Darlan Ismail dan 30 orang tersebar di 22 UPT Puskesmas.
6. Tenaga Kesehatan Lingkungan sebanyak 51 orang yang terdiri dari

6 Orang di RSUD H. Boejasin Pelaihari, 2 orang di RSUD.K.H. Mansyur Kintap dan sisanya tersebar di UPT puskemas masing masing.

7. Tenaga Nutrisionis sebanyak 64 orang terdiri dari 19 orang di RSUD H. Boejasin Pelaihari, 4 orang di RSUD K.H. Mansyur Kintap, dan sisanya tersebar di UPT Puskesmas masing masing.
8. Perawat sebanyak 443 orang terdiri dari 184 di RSUD H. Boejasin pelaihari, 40 orang di KH Mansyur Kintap, 8 orang di RSUD H Darlan Ismail dan sisanya tersebar di Puskemas masing – masing.
9. Bidan sebanyak 391 orang terdiri dari 74 di RSUD H. Boejasin Pelaihari, 40 Orang di RSUD K.H. Mansyur Kintap, 7 orang di RSUD H Darlan Ismail dan sisanya tersebar di UPT Puskesmas masing-masing.
10. Tenaga Ahli Laboratorium Medik sebanyak 70 orang terdiri dari 20 Orang di RSUD H. Boejasin pelaihari, 11 orang di RSUD K.H Mansyur Kintap, dan sisanya tersebar di UPT Puskesmas masing-masing.
11. Tenaga Radiografer sebanyak 15 Orang terdiri dari 11 orang di RSUD H. Boejasin Pelaihari, 4 Orang di KH. Masyur Kintap.
12. Tenaga Keterapian Fisik sebanyak 6 orang terdiri dari 5 orang di RSUD. H. Boejasin Pelaihari dan 1 orang di RSUD KH Mansyur Kintap.
13. Tenaga Keteknisian Medis terdiri atas 2 kategori, yaitu Refraksionis optisien dan Terapis gigi & Mulut, dimana tenaga Refraksionis Optisien terdiri dari 4 orang di RSUD H Boejasin Pelaihari serta Terapis Gigi dan Mulut sebanyak 40 orang terdiri dari 8 orang di RSUD H. Boejasin Pelaihari, 3 orang di RSUD KH Mansyur dan 29 orang tersebar di UPT Puskesmas Masing Masing.

11) Meningkatnya perilaku masyarakat terhadap hidup bersih dan sehat. Tidak hanya mengenai kesehatan yang menunjang angka harapan hidup pada suatu wilayah, perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat turut

mempunyai pengaruh dan peranan yang besar terhadap derajat kesehatan masyarakat karena sehat atau tidaknya lingkungan, kesehatan individu, keluarga dan masyarakat tergantung pada perilaku manusia itu sendiri. Untuk mengubah perilaku masyarakat tidaklah mudah namun sangat diperlukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, untuk pencapaian perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di Kabupaten Tanah Laut di Tahun 2025 adalah 61,75% (dari 5.367 jumlah rumah tangga yang dilakukan Survey PHBS terdapat 3.314 rumah tangga yang ber PHBS) capaian ini belum mencapai target pada tahun 2025 sebesar 70%, tetapi angka ini meningkat dari tahun 2024 yang capaiannya sebesar 60%. Dari capaian PHBS tahun 2025 diketahui rumah tangga yang berPHBS yaitu sebanyak 61,75%, berarti masih ada 38,25% masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang belum berperilaku hidup bersih dan sehat salah satu indikator yang membuat capaian PHBS tidak tercapai adalah masih banyak masyarakat yang merokok dalam rumah yaitu sebesar 37%. Untuk meningkatkan capaian rumah tangga ber PHBS dilakukan upaya-upaya promotif dan prefentif yaitu melaksanakan kampenye GERMAS dengan beberapa tema prioritas. Untuk memperkecil terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan sebagai akibat dari lingkungan yang kurang sehat, telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan diantaranya adalah pelaksanaan kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) melalui 5 Pilar STBM yaitu pendekatan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan, dimana masyarakat diajak untuk melihat permasalahan lingkungan dan perilaku yang tidak sehat dan memecahkan sendiri permasalahannya yang difasilitasi oleh tenaga kesehatan. 5 pilar STBM yaitu:

a. Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS),
b. Mencuci Tangan Pakai Sabun Dengan Air mengalir (CTPS),
c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAM RT),
d. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga,

e. Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga

12) Secara kumulatif desa yang sudah melaksanakan STBM sampai dengan tahun 2025 sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) desa/kelurahan atau mencapai 100% desa/kelurahan. Untuk capaian pilar pertama yaitu Stop Buang Besar Sembarangan (BABS) sampai tahun 2025 sebanyak 114 (84%) desa/kelurahan, dan sudah memenuhi target renstra Dinas kesehatan di tahun 2025 . Capaian tersebut lebih tinggi 5% dari capaian tahun 2025 yaitu 107 (79%) desa kelurahan ODF. Lebih tinggi 65% dari tahun 2023 yaitu 26 (19%) desa kelurahan. Hal ini menunjukan peningkatan yang signifikan terhadap perilaku masyarakat dalam stop buang air besar sembarangan.

13) Pelaksanaan Layanan Kegawatdaruratan melalui PSC 119 TALA. Sesuai amanat perundang-undangan melalui Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2013, Pemkab Tanah Laut memberikan instruksi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut untuk membentuk Layanan Publik yang berorientasi pada kesiapsiagaan dan tata kelola kasus kegawatdaruratan di lingkup Kabupaten Tanah Laut akhirnya terbentuklah Layanan *Public Safety Center* 119 Tanah Laut atau PSC 119 TALA bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional 12 November 2019. Saat ini sistem tata kelola PSC 119 TALA sepenuhnya berada dibawah manajemen UPT RSUD Hadji Boejasin dan dibawah binaan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut. Layanan *On Call* PSC 119 TALA kini dapat diakses melalui layanan kegawatdaruratan terintegrasi RAZA LAKAS 112 melalui *Call Center* RAZA LAKAS 112 dimana layanan ini merupakan layanan yang mengintegrasikan beberapa layanan kegawatdaruratan yang berada di lingkup kabupaten Tanah Laut sehingga memungkinkan masyarakat mendapatkan pertolongan cepat dalam situasi gawat darurat seperti kasus kegawatan medis, kecelakaan, kebakaran, kebencanaan dan lainnya ke berbagai instansi diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Satpol PP dan Damkar, serta BPBD tanpa biaya (gratis). Layanan kegawatdaruratan terintegrasi RAZA

LAKAS 112 ini diresmikan langsung oleh Bupati Tanah Laut pada Maret 2025.

Faktor Penghambat :

Berikut beberapa faktor penghambat yang menyebabkan indikator kinerja "Usia Harapan Hidup" tidak tercapai sesuai target, diantaranya :

1) Tingginya mobilitas penduduk terutama ibu hamil sehingga berpengaruh pada kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil dan ibu bersalin sesuai standar
2) Kurangnya tenaga medis (dokter) untuk menolong persalinan. Sesuai Permenkes No. 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, Dan Pelayanan Kesehatan Seksual. Persalinan ditolong oleh 3 (tiga) orang yaitu 1 orang dokter dan 2 orang bidan atau 1 orang dokter, 1 orang bidan dan 1 orang perawat
3) Partisipasi masyarakat pada kegiatan Posyandu masih kurang (rata-rata 40 s/d 50 %)
4) Tingginya angka pernikahan anak
5) Hambatan pencapaian Stop Buang Besar Sembarangan (BABS) sampai tahun 2025 sebanyak 113 (84%) Desa/Kelurahan, yang sudah di nyatakan desa ODF (*Open Defecation Free*) yaitu
    1. Belum optimalnya Forum Kabupaten Kota Sehat tingkat Kecamatan dan Desa
    2. Perilaku masyarakat yang masih buang air besar sembarangan di sungai
    3. Biaya yang tidak dimiliki oleh sebagian warga untuk membangun jamban sehat

Rencana Aksi :

1) Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor (Camat / Lurah / Kepala Desa / ketua RT) untuk pelaporan warga pendatang terutama ibu hamil

pendatang

2) Mengusulkan penambahan tenaga dokter dan bidan
3) Meningkatkan peran serta masyarakat pada kegiatan Posyandu melalui himbauan dan berinovasi
4) Meningkatkan kerjasama lintas sector dalam menurunkan angka pernikahan anak dan konseling kesehatan kepada pengantin
5) Mengoptimalkan forum kabupaten sehat tingkat kecamatan dan desa dalam mengupayakan pemecahan masalah tidak tercapainya ODF di Desa / Kelurahan masing-masing
6) Meningkatkan upaya promosi kesehatan tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
7) Menginventarisir solusi untuk biaya pembuatan jamban melalui dana swadaya, dana desa / ADD, dana CSR dan dana lain sesuai ketentuan
8) Meningkatkan Umur harapan Hidup tidak hanya bidang kesehatan, dan sangat diperlukan kerjasama di berbagai bidang seperti bidang pendidikan, Sosial, Ekonomi dan lain lain.
9) Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan kesehatan kepada masyarakat.

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 865 ASN pada Dinas Kesehatan termasuk Tenaga Kesehatan serta di dukung oleh 3 Program dengan Pagu Rp. 149.614.352.538,80 dan terealisasi Rp. 129.285.430.859,46 atau sebesar 86,41%.

Tabel 3.2.7
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	140.113.262.203,80	**122.599.511.047,46**
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	8.940.052.335,00	**6.209.204.362,00**
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	561.038.000,00	**476.715.450,00**
Jumlah		**149.614.352.538,80**	**129.285.430.859,46**

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Efisiensi kinerja diukur menggunakan rumus berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:
E : Efisiensi
PAKi : Pagu anggaran keluaran i
RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
CKi : Capaian keluaran i

$$\text{Efisiensi} = \frac{(149.614.352.538,80 \times 99,84\%) - 129.285.430.859,46}{(149.614.352.538,80 \times 99,84\%)} \times 100\%$$

Efisiensi = 13,45%

Tabel 3.2.8
Efisiensi Sasaran Strategis 2

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
99,84%	86,41%	13,45%

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Kesetaraan Gender

Meningkatnya Kesetaraan Gender diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.3.1
Capaian Kinerja Terhadap Target 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			TAHUN 2025		
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,481	0,421	0,473	0,47	0,411	114,35%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2025								114,35%

Tabel 3.3.2
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2025 THD TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,47	0,411	114,35%	0,39	94,89%

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan manusia.

Secara umum, IKG menggambarkan kerugian pembangunan yang terjadi akibat ketidaksetaraan gender. Semakin tinggi nilai IKG, maka semakin besar ketimpangan gender; sebaliknya, semakin rendah nilainya menunjukkan kondisi yang semakin setara.

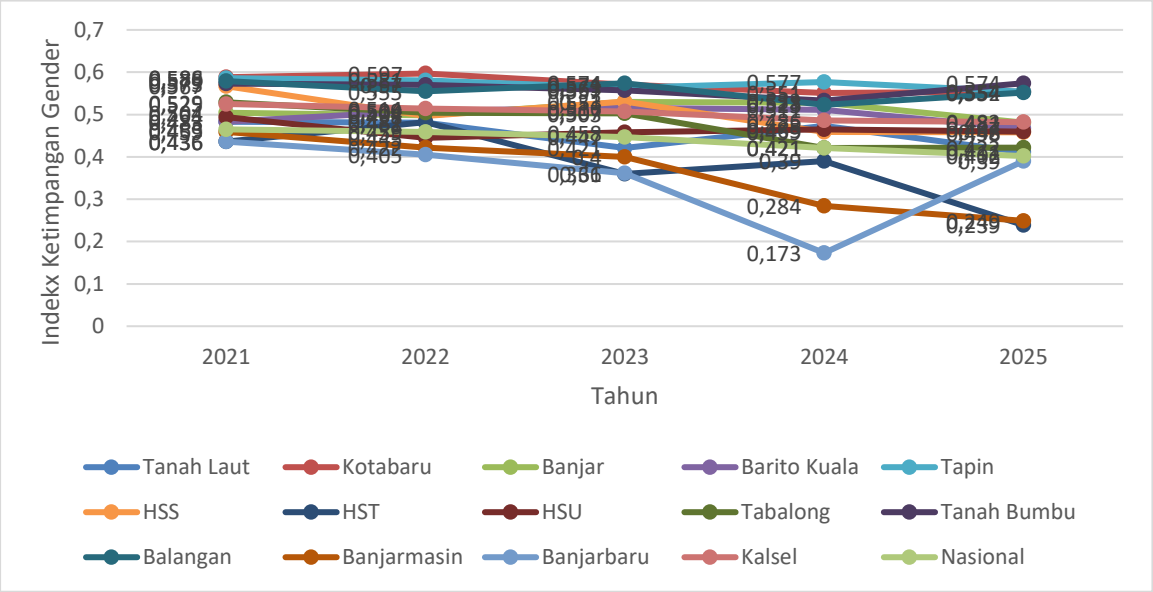
IKG biasanya diukur melalui beberapa dimensi utama, yaitu:

- Kesehatan reproduksi, seperti angka kematian ibu dan tingkat kelahiran remaja.
- Pemberdayaan, yang mencakup keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif serta tingkat pendidikan menengah dan tinggi.

- Partisipasi pasar tenaga kerja, yang menggambarkan keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam kegiatan ekonomi.

Realisasi indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tahun 2025 adalah 0,411. Sedangkan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 adalah 0,473. Realisasi tersebut mengalami peningkatan kinerja sebanyak 0,062 point jika dibandingkan dengan tahun 2024. Berikut perbandingan indeks ketimpangan gender Kabupaten Tanah Laut dengan kabupaten/kota lain, provinsi dan nasional tahun 2021-2025.

Grafik 3.3.1
Indeks Ketimpangan Gender se-Regional Kalimantan Selatan, Provinsi dan Nasional Tahun 2021 – 2025



Sumber : BPS Kalimantan Selatan

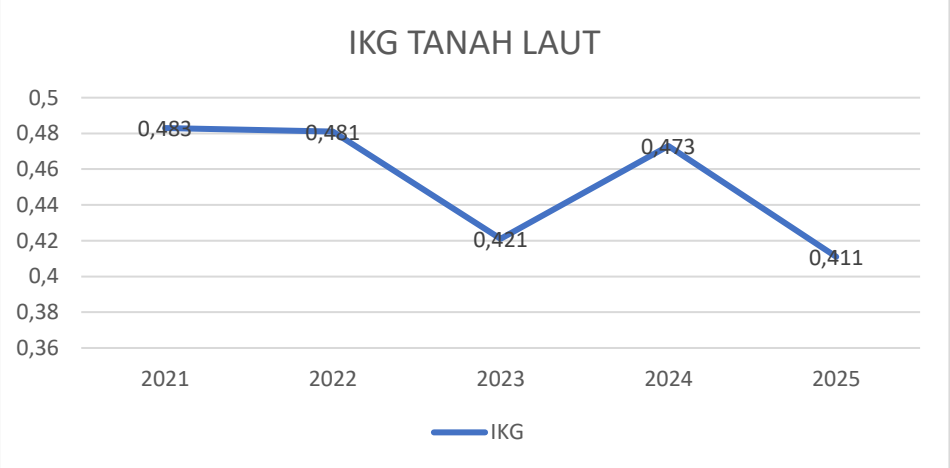
Tabel 3.3.3
Indeks Ketimpangan Gender se-Regional Kalimantan Selatan, Provinsi dan Nasional Tahun 2021 – 2024

Kab/Kota	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
HST	0,436	0,482	0,36	0,39	0,239
Banjarmasin	0,459	0,422	0,4	0,284	0,249
Banjarbaru	0,436	0,405	0,361	0,173	0,39
Nasional	0,465	0,459	0,447	0,421	0,402

Kab/Kota	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Tanah Laut	0,483	0,481	0,421	0,473	0,411
Tabalong	0,529	0,504	0,503	0,421	0,422
HSS	0,567	0,497	0,531	0,459	0,458
HSU	0,494	0,445	0,458	0,465	0,46
Barito Kuala	0,483	0,509	0,516	0,511	0,467
Banjar	0,504	0,498	0,53	0,528	0,481
Kalsel	0,525	0,514	0,507	0,486	0,482
Balangan	0,579	0,555	0,574	0,523	0,552
Kotabaru	0,588	0,597	0,571	0,551	0,554
Tapin	0,586	0,581	0,563	0,577	0,554
Tanah Bumbu	0,573	0,57	0,557	0,533	0,574

Dari grafik dapat dilihat bahwa pada tahun 2025, Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 pada skor 0,411, lebih tinggi 0,071 point jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan dengan angka 0,482. Berikut grafik perkembangan indeks ketimpangan gender Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2021-2025.

Grafik 3.3.2
Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Tanah Laut 2021-2025



Sumber : BPS Kabupaten Tanah Laut

Upaya menurunkan ketimpangan gender di Indonesia memerlukan pendekatan yang terarah dan berbasis bukti. Ketimpangan yang masih terjadi di ketiga dimensi pengukurn Indeks Ketimpangan Gender menuntut hadirnya

kebijakan publik yang bersifat afirmatif, yaitu intervensi khusus dan bersifat sementara yang ditujukan untuk memberikan perlakuan lebih kepada kelompok yang tertinggal, dalam hal ini perempuan, agar dapat mencapai kondisi yang setara dalam pembangunan.

1) Dimensi Kesehatan reproduksi

   Dimensi kesehatan reproduksi mencerminkan kualitas layanan kesehatan serta kondisi kesejahteraan perempuan, yang antara lain ditunjukkan melalui angka kematian ibu dan tingkat kelahiran remaja. Indikator ini menjadi penting karena berhubungan langsung dengan keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan generasi.

   Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan pelayanan kesehatan kepada ibu melahirkan seluruhnya terlayani di fasilitas kesehatan. Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 adalah 63,6 per 100.000 Kelahiran Hidup, capaian Angka Kematian Ibu tersebut lebih rendah dari target RPJMN yaitu 122 per 100.000 kelahiran hidup.

2) Dimensi Pemberdayaan

   Dimensi pemberdayaan menunjukkan sejauh mana perempuan memiliki akses dan peran dalam pengambilan keputusan serta pengembangan kapasitas diri. Hal ini tercermin dari tingkat keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif serta capaian pendidikan menengah dan tinggi. Semakin tinggi partisipasi perempuan pada dimensi ini, semakin kecil kesenjangan gender dalam aspek sosial dan politik.

   Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Kabupaten Tanah Laut menunjukkan perkembangan yang positif. Dari total 35 anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut, terdapat 12 orang anggota perempuan. Kondisi ini mencerminkan adanya partisipasi perempuan yang relatif signifikan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat daerah. Persentase keterwakilan tersebut menunjukkan bahwa perempuan telah memiliki ruang yang cukup dalam struktur legislatif.

3) Dimensi Partisipasi Pasar Tenaga Kerja

   Dimensi partisipasi pasar tenaga kerja menggambarkan keterlibatan

perempuan dan laki-laki dalam aktivitas ekonomi. Perbedaan tingkat partisipasi kerja antara gender menjadi indikator penting untuk menilai kesetaraan kesempatan ekonomi. Ketimpangan pada dimensi ini menunjukkan masih adanya hambatan struktural maupun kultural yang memengaruhi akses perempuan terhadap pekerjaan dan sumber penghasilan.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan kepada perempuan dalam rangka peningkatan perekonomian, dengan rincian sebagai berikut.

- Pembinaan Home Industri Perempuan

  Pelaksanaan pembinaan kepada 23 Home Industri Perempuan secara langsung selama tahun 2025 merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan. Kegiatan pembinaan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha perempuan, baik dari aspek manajerial, produksi, maupun pemasaran, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha.

- Pelatihan Pengolah Makanan dan Cara Pengemasan Produk

  Pelaksanaan Pelatihan Pengolahan Makanan dan Cara Pengemasan Produk yang dilaksanakan sebanyak satu kali selama tahun 2025 merupakan upaya peningkatan kapasitas pelaku usaha, khususnya perempuan, dalam menghasilkan produk pangan yang berkualitas dan bernilai tambah. Pelatihan ini difokuskan pada peningkatan keterampilan teknis pengolahan makanan serta pemahaman terhadap standar pengemasan yang aman, menarik, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

  Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu meningkatkan kualitas produk, memperpanjang daya simpan, serta memperkuat daya saing produk di pasar.

- Pelatihan Tata Rias Wajah (Make UP)

Pelatihan Tata Rias Wajah (Make Up) yang dilaksanakan sebanyak 11 kali di seluruh kecamatan merupakan upaya konkret dalam meningkatkan keterampilan dan kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya perempuan. Pelaksanaan pelatihan yang menjangkau seluruh wilayah kecamatan menunjukkan pemerataan akses peningkatan kapasitas serta komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pemberdayaan perempuan secara inklusif.

Melalui pelatihan ini, peserta dibekali keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan sebagai peluang usaha mandiri maupun sebagai penunjang peningkatan pendapatan keluarga. Kegiatan ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kompetensi individu, tetapi juga mendorong partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja, sehingga berperan dalam mengurangi ketimpangan gender dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui DP3AP2KB diantaranya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM dalam penerapan PUG/PPRG.
2. Penguatan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk perguruan tinggi, pusat studi wanita/gender dan organisasi masyarakat.
3. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG kepada Pokja PUG.
4. Peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi, termasuk melalui dukungan terhadap UMKM, kewirausahaan perempuan, dan akses terhadap permodalan.
5. Pelaksanaan reviu dan harmonisasi seluruh peraturan daerah agar berspektif gender.
6. Penguatan system penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah.
7. Pendekatan pembangunan yang mengkoordinir tentang pentingnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.

8. Mengupayakan perbaikan terhadap posisi perempuan dalam kependudukan di masyarakat melalui peningkatan pemahaman pentingnya peran perempuan dalam proses pembangunan.
9. Melakukan analisis gender dalam proses perencanaan dan penganggaran untuk memastikan ada keadilan dalam hal akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.

Beberapa faktor pendorong pencapaian Indeks Ketimpangan Gender yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, yaitu :

1. Bimbingan Teknis PUG/PPRG di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025





Keterangan : Foto Kegiatan Bimbingan Teknis PUG/PPRG di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 7-8

Mei 2025

2. **Sosialisasi Desa yang Berperspektif Gender dengan tema “Sosialisasi dan Pembentukan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Desa Damar Lima”**



Keterangan : Foto Kegiatan Sosialisasi Desa yang Berperspektif Gender dengan tema “Sosialisasi dan Pembentukan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Desa Damar Lima”

3. **Pelaksanaan Lomba Inovasi Gender Champion PUG Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025”**



Keterangan : Foto Kegiatan Pelaksanaan Lomba Inovasi Gender Champion PUG Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025”

4. **Sosialisasi PUG di Perguruan Tinggi**





Keterangan : Foto Kegiatan Sosialisasi PUG di Perguruan Tinggi yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2025

5. Monitoring dan Evaluasi POKJA PUG Kabupaten Tanah Laut



Keterangan : Monitoring dan Evaluasi POKJA PUG Kabupaten Tanah Laut yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2025

6. **Fasilitasi Kegiatan Forum KIE Program dan Advokasi Kebijakan dengan tema "KIE PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN INTEGRASI LAYANAN PERLINDUNGAN (PUSPAGA-UPTD PPA) DALAM AKSELERASI POSYANDU 6 BIDANG SPM"**



Keterangan : Foto Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Forum KIE Program dan Advokasi Kebijakan dengan tema "KIE PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN INTEGRASI LAYANAN PERLINDUNGAN (PUSPAGA-UPTD PPA) DALAM AKSELERASI POSYANDU 6 BIDANG SPM" yang dilaksanakan pada tangggal 17 November 2025

Faktor Penghambat :

1. Masih rendahnya keterlibatan lintas sektoral dalam pengarustamaan gender (PUG).
2. Kelembagaan PUG belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
3. Masih belum meratanya pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan mengenai pentingnya pengintegrasian persepektif gender disemua bidang dan tahap pembangunan.
4. Belum optimalnya pengarusutamaan gender (PUG) dalam perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan terhadap penurunan ketimpangan gender.
5. Masih adanya kesenjangan partisipasi angkatan kerja, di mana perempuan menghadapi kendala dalam akses terhadap lapangan pekerjaan, kesempatan berusaha, serta perlindungan kerja.

Rencana Aksi :

1. Peningkatan partisipasi lintas sektoral dengan bekerjasama secara langsung dalam berbagai kegiatan pengarustamaan gender.
2. Peningkatan efektivitas kelembagaan PUG dengan pengikutsertaan secara langsung dalam berbagai kegiatan pengarustamaan gender.
3. Perlunya penyelarasan waktu dan kegiatan yang berkaitan dengan organisasi wanita.
4. Pelaksanaan peningkatan pemahaman PUG dalam perencanaan dan penganggaran kepada seluruh Perangkat Daerah.
5. Pengoptimalan partisipasi perempuan berupa pelatihan keterampilan dan pendampingan kepada home industri perempuan.

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya Kesetaraan Gender di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 30 ASN pada DP3AP2KB dan di dukung oleh 2 Program dengan Pagu Rp. 1.335.155.438,57 dan

terealisasi Rp. 996.478.574,00 atau sebesar 74,63%.

Tabel 3.3.4
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Perlindungan Perempuan	202.153.906,00	**86.526.040,00**
2	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1.133.001.532,57	**909.952.534,00**
Jumlah		**1.335.155.438,57**	**996.478.574,00**

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Efisiensi kinerja diukur menggunakan rumus berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi
PAKi : Pagu anggaran keluaran i
RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
CKi : Capaian keluaran i

$$\text{Efisiensi} = \frac{(1.335.155.438,57 \times 114,35\%) - 996.478.574,00}{(1.335.155.438,57 \times 114,35\%)} \text{ X } 100\%$$

Efisiensi = 34,73%

Tabel 3.3.5
Efisiensi Sasaran Strategis 3

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
114,35%	74,63%	34,73%

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda

Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda informasi diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.4.1
Capaian Kinerja Terhadap Target 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			TAHUN 2025		
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	-	-	-	55	Tidak dilakukan penilaian	-
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2025								-

Tabel 3.4.2
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2025THD TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	55	Tidak dilakukan penilaian	-	58,5	Tidak dilakukan penilaian

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan indikator kinerja pembangunan kepemudaan yang bersifat komposit dan digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup, kapasitas, dan peran pemuda usia 16–30 tahun. IPP menggambarkan capaian pemenuhan hak-hak pemuda serta efektivitas intervensi kebijakan dan program pembangunan kepemudaan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait.

IPP disusun berdasarkan pengukuran terhadap beberapa domain utama pembangunan pemuda, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, ketenagakerjaan dan kesempatan kerja, partisipasi serta kepemimpinan, dan kesetaraan gender serta nondiskriminasi. Setiap domain diukur melalui indikator-indikator terpilih yang mencerminkan kondisi objektif pemuda dan telah dinormalisasi sesuai dengan metodologi yang ditetapkan oleh instansi pembina.

Nilai IPP dinyatakan dalam bentuk indeks dengan rentang nilai 0–100. Semakin tinggi nilai IPP menunjukkan semakin optimalnya kinerja pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan potensi pemuda secara berkelanjutan. Sebaliknya, nilai IPP yang rendah atau mengalami perlambatan peningkatan mencerminkan masih adanya permasalahan struktural maupun programatik yang memerlukan penguatan kebijakan dan sinergi lintas sektor.

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dilakukan penilaian pada level nasional dan provinsi, untuk level Kabupaten belum dilakukan pengukuran sehingga IPP Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 belum tersedia. Nantinya akan dilaksanakan pengukuran atas Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2026. Untuk IPP Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan dari Tahun 2021-2024 sebagai berikut:

Tabel 3.4.3

Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2024

No	Tahun	IPP Nasional	IPP Provinsi
1	2021	53,33	49,33
2	2022	55,33	58,81
3	2023	56,33	50,33
4	2024	56,33	54,67

Secara umum IPP terbagi menjadi tiga lapisan pembangunan pemuda yang dibagi lagi ke dalam lima domain dan 15 indikator penyusunnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Lapisan Pembangunan Individu

   Pembangunan individu merupakan bagian penting dari proses pembangunan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan individu dalam menjalani kehidupan. Dalam Indeks Pembangunan Pemuda, lapisan pembangunan individu mencakup domain pendidikan dan domain kesehatan, dan kesejahteraan, yang merupakan dua pilar utama dalam memenuhi kebutuhan dasar pemuda. Pendidikan berperan sebagai fondasi dalam membangun kapasitas intelektual dan keterampilan individu. Dengan akses yang memadai terhadap pendidikan yang berkualitas,

pemuda dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menganalisis, memahami, dan mengaplikasikan pengetahuan dalam berbagai bidang kehidupan. Melalui pendidikan, pemuda juga dapat mengembangkan keterampilan sosial, kepemimpinan, dan berpikir kritis yang penting untuk meraih kesuksesan dalam dunia kerja dan kehidupan sosial. Domain pendidikan memiliki 3 (tiga) indikator, yaitu rata-rata lama sekolah (RLS), angka partisipasi kasar (APK) Sekolah Menengah, dan angka partisipasi kasar (APK) Perguruan Tinggi. Kesehatan juga menjadi aspek penting dalam pembangunan individu. Kesehatan yang baik memungkinkan pemuda untuk menjalani kehidupan yang produktif dan bermakna. Dukungan terhadap akses kesehatan yang merata dan terjangkau membantu pemuda untuk menjaga keseimbangan fisik dan mental mereka. Selain itu, lingkungan publik yang aman juga berkontribusi pada kesejahteraan individu dengan menciptakan kondisi yang mendukung untuk mencapai tujuan hidup tanpa gangguan dari lingkungan sekitar. Adapun domain Kesehatan dan kesejahteraan mencangkup pada 4 (empat) indikator, yaitu angka kesakitan pemuda, persentase pemuda korban kejahatan, persentase pemuda merokok, dan persentase remaja perempuan yang sedang hamil

2. Lapisan Pembangunan Penghidupan dan Kesejahteraan

Pembangunan penghidupan dan kesejahteraan pemuda menjadi aspek penting dalam memperkuat pondasi masa depan suatu bangsa. Perlu dipahami bahwa pemuda merupakan aset berharga bagi pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Kualitas penghidupan dan kesejahteraan pemuda dilihat dari meningkatnya akses terhadap lapangan kerja dan kesempatan kerja. Lapangan kerja yang memadai tidak hanya mencakup pada jumlah lapangan kerja yang ada, namun mencakup kualitas pekerjaan serta upah yang layak. Selain itu, penyerapan tenaga kerja yang merata menjadi aspek penting dimana kesempatan kerja dapat tersedia untuk berbagai lapisan pemuda dari berbagai latar belakang. Pengembangan kewirausahaan menjadi salah satu aspek penting dari strategi pembangunan lapangan kerja bagi pemuda. Hal ini dapat menciptakan peluang lapangan kerja baru, serta memperkuat daya saing ekonomi suatu negara. Lapisan pembangunan penghidupan dan kesejahteraan berisi satu domain yaitu domain Lapangan dan Kesempatan Kerja. Ada dua indikator yang diambil dari data Survei Tenaga Kerja Nasional atau Sakernas untuk melihat domain ini, yaitu persentase pemuda wirausaha kerah putih

dan tingkat pengangguran terbuka pemuda. Pengangguran terbuka terjadi apabila pemuda yang memiliki kemampuan untuk bekerja tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi atau preferensinya. Dalam hal ini, wirausaha kerah putih dapat mengambil peran untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka dengan menciptakan lapangan kerja baru.

3. Lapisan Partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan

Pemuda merupakan agen perubahan yang potensial dalam masyarakat. Partisipasi pemuda mencakup berbagai aktivitas, seperti kegiatan sosial, politik, hingga ekonomi. Ketika pemuda dapat berpartisipasi secara aktif, mereka dapat membawa energi positif, gagasan serta perspektif baru yang diperlukan untuk menghadapi tantangan perkembangan zaman. Sebagai lapisan terluar dalam kerangka kerja Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), terdapat dua domain yaitu partisipasi dan kepemimpinan serta gender dan diskriminasi.

Tingkat partisipasi pemuda dalam berbagai bidang kegiatan dapat menjadi satu tolok ukur pembangunan. Partisipasi pemuda mencerminkan rasa tanggung jawab sosial dan kesadaran akan isu-isu masyarakat. Keterlibatan pemuda dalam suatu organisasi, seperti organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok sukarela dapat memberikan kesempatan bagi pemuda untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan, kolaborasi, dan komunikasi. Domain partisipasi dan kepemimpinan memiliki tiga indikator, yaitu persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi, dan persentase pemuda yang memberikan saran atau pendapat dalam rapat.

Kesenjangan gender dapat menghambat perkembangan kualitas pemuda secara keseluruhan. Oleh karena itu, pentingnya melibatkan secara adil dan setara terhadap setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin. Diskriminasi dapat menghambat partisipasi pemuda, terutama bagi mereka yang menghadapi stereotip atau hambatan berbasis gender. Kesetaraan gender harus mencakup berbagai aspek, seperti tingkat pendidikan, partisipasi ekonomi, kesehatan serta kesejahteraan. Dalam domain gender dan diskriminasi memiliki tiga indikator, yaitu angka perkawinan usia anak, persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh

pendidikan tingkat SMA ke atas dan persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan dan pemberian modal usaha bagi wirausaha pemula

   Pelaksanaan pelatihan wirausaha muda yang diikuti oleh 25 peserta pada bulan Juni 2025, serta pemberian bantuan wirausaha muda kepada 5 orang pemuda tingkat Kabupaten Tanah Laut dan 6 orang pemuda dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada bulan Maret 2025, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing pemuda di bidang kewirausahaan. Kegiatan pelatihan berperan sebagai fondasi peningkatan kompetensi, sementara bantuan usaha menjadi stimulus nyata dalam mendorong implementasi hasil pelatihan ke dalam praktik usaha yang berkelanjutan.

   Berikut 12 orang pemuda yang mendapatkan bantuan wirausaha dan bentuk wirausahanya :

Tabel 3. 4.4

Pemuda Yang Mendapatkan Bantuan Wirausaha Dan Bentuk Wirausahanya

No	Nama	Jenis Usaha
1	Candra Gunawan	Agribisnis
2	Ahmad Rizkian	Kuliner
3	Nuryanda Wahyu Fajar	Jasa (Bengkel)
4	Ardani	Jasa (Menjahit)
5	M.Hafidz	Jasa (Percetakan)
6	Ulan Sari	Fashion
7	Hendri	Perkebunan
8	Rizky Wulan Mawardani	Ternak
9	Lioni Yuliana	Jasa
10	Rahmah	Agribisnis
11	Sayid Hasan	Kuliner
12	Rusda Afifa	Kuliner

Dari perspektif capaian kinerja, rangkaian kegiatan tersebut berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pemuda yang memiliki potensi berprestasi, khususnya pada bidang kewirausahaan. Pemuda yang memperoleh pelatihan dan bantuan memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan usaha secara mandiri, mengikuti seleksi program lanjutan, serta berkompetisi pada tingkat yang lebih tinggi, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Hal ini selaras dengan indikator wirausaha muda/pemuda berprestasi, di mana keberhasilan tidak hanya diukur dari jumlah peserta, tetapi dari kemampuan pemuda untuk menghasilkan capaian nyata dan diakui secara lebih luas.

Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan jumlah pemuda yang telah mengikuti pelatihan, jumlah penerima bantuan masih relatif terbatas. Kondisi ini menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat mekanisme seleksi, pendampingan pasca pelatihan, serta perluasan akses dukungan usaha. Dengan optimalisasi tahapan pembinaan secara berkelanjutan, diharapkan proporsi pemuda yang mampu berkembang menjadi wirausaha berprestasi dan berkontribusi terhadap peningkatan nilai indikator kinerja pada periode berikutnya dapat terus meningkat.

2. Menyediakan tenaga pendamping SP3 (Sarjana Pemuda Pelopor Perdesaan)

Penyediaan tenaga pendamping SP3 sebanyak 20 orang dan Koordinator Wilayah (Korwil) sebanyak 4 orang merupakan upaya strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan kepemudaan yang berorientasi pada pengembangan potensi desa. Pendampingan tersebut difokuskan pada penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) kepemudaan serta optimalisasi Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki desa, sehingga pemuda desa memiliki kapasitas dan peran yang lebih aktif dalam pembangunan berbasis potensi lokal.

keberadaan SP3 dan Korwil berkontribusi pada meningkatnya efektivitas pelaksanaan program kepemudaan di tingkat desa, khususnya dalam hal pendampingan, pembinaan, dan fasilitasi kegiatan pemuda. Pendampingan yang terstruktur mendorong pemuda desa untuk lebih siap mengikuti program pengembangan kapasitas, kegiatan kewirausahaan, serta kompetisi atau

program lanjutan di tingkat yang lebih tinggi. Hal ini berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pemuda yang berpotensi menjadi pemuda berprestasi, baik melalui inovasi, pengelolaan usaha berbasis potensi desa, maupun partisipasi aktif dalam kegiatan kepemudaan.

Berbagai dampak positif / keberhasilan dari pendampingan SP3 dan Korwil diantaranya yaitu:

1. Peningkatan Kapasitas SDM

   Sarjana pemuda pelopor mengalami peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan dalam pengelolaan usaha, pemberdayaan masyarakat, serta perencanaan kegiatan pembangunan desa.

2. Terlaksananya Program dan Kegiatan di Desa

   Program yang dirancang oleh sarjana pemuda pelopordapat berjalan sesuai rencana, baik di bidang kewirausahaan, sosial, ekonomi kreatif, maupun pemberdayaan masyarakat desa.

3. Meningkatnya Kemandirian dan Inovasi

   Peserta mampu mengembangkan ide inovatif berbasis potensi lokal, sepert pengolahan produk unggulan desa, UMKM, atau kegiatan ekonomi produktif lainnya.

4. Penguatan Jejaring dan Kolaborasi

   Terjalinnya kerja sama antara sarjana pemuda pelopor dengan pemerintah desa,BUMDes, kelompok masyarakat, dan stakeholder terkait.

5. Tersusunnya Laporan dan Administrasi Kegiatan

   Administrasi pelaksanaan kegiatan menjadi lebih tertib, mulai dari perencanaan,pelaksanaan, hingga pelaporan hasil kegiatan.

6. Peningkatan Dampak Sosial di Masyarakat
   Masyarakat mulai merasakan manfaat langsung, seperti peningkatan pendapatan, keterampilan, dan partisipasi dalam pembangunan desa.

Namun demikian, efektivitas pendampingan masih sangat bergantung pada intensitas pembinaan dan sinergi antara pendamping, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan kompetensi pendamping, serta pemantauan berkelanjutan agar output pendampingan dapat bertransformasi menjadi outcome yang terukur, khususnya dalam meningkatkan jumlah dan persentase pemuda yang mampu menunjukkan prestasi dan kemandirian di bidang kewirausahaan dan pengembangan potensi desa.



3. Fasilitasi Kemitraan Berusaha bagi Wirausaha Muda







Fasilitasi Kemitraan Berusaha bagi Wirausaha Muda merupakan upaya strategis yang kegiatannya dilaksanakan dalam rangka mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda melalui penguatan jejaring kemitraan dengan dunia usaha, lembaga keuangan, serta pemangku kepentingan terkait. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, keberlanjutan usaha wirausaha muda agar mampu berdaya saing serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi menjadi bentuk apresiasi sekaligus motivasi untuk meningkatkan semangat kompetisi yang sehat di kalangan pemuda. Penghargaan tersebut tidak hanya memberikan pengakuan atas capaian individu, tetapi juga mendorong pemuda lain untuk meningkatkan

kapasitas diri dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan kepemudaan di tingkat daerah hingga nasional. Hal ini berdampak positif terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas pemuda yang mampu memenuhi kriteria pemuda berprestasi sesuai indikator kinerja. Pemberian penghargaan diberikan kepada pemuda yang berprestasi dan berperan aktif dalam mendorong kemajuan di bidang Kepemudaan Tingkat Provinsi maupun Nasional, dan dilaksanakan pada bulan Oktober tepatnya pada peringatan hari Sumpah Pemuda ke – 98 Tahun.

Sementara itu, penyusunan Rencana Aksi Daerah Kepemudaan berperan sebagai instrumen strategis dalam menjamin keberlanjutan dan keterpaduan program kepemudaan. RAD menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan yang terarah, terukur, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah. Dengan adanya RAD, pembinaan pemuda tidak bersifat sporadis, tetapi terencana dan berorientasi pada pencapaian outcome, sehingga secara bertahap dapat meningkatkan jumlah pemuda yang kompeten dan berprestasi serta memperbaiki capaian indikator kinerja kepemudaan pada periode selanjutnya.

4. Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Pembinaan organisasi kepemudaan yang meliputi KNPI, Pramuka, HIPMI, dan organisasi kepemudaan lainnya dilaksanakan sebagai upaya strategis untuk memperkuat peran kelembagaan pemuda dalam pembangunan daerah. Pembinaan tersebut dilakukan melalui pembinaan organisasi dan peningkatan kapasitas SDM, yang diarahkan untuk meningkatkan kompetensi pengurus dan anggota dalam aspek kepemimpinan, manajemen organisasi, serta pelaksanaan program kepemudaan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Selain pembinaan SDM, Dinas Kepemudaan dan Olahraga juga memberikan bantuan hibah kepada organisasi kepemudaan sebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan program dan kegiatan organisasi. Bantuan hibah tersebut berperan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan kepemudaan, memperluas jangkauan pembinaan pemuda, serta mendorong organisasi untuk lebih aktif berpartisipasi dalam berbagai ajang kegiatan dan kompetisi di tingkat daerah hingga nasional. Hal ini berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pemuda yang memiliki potensi untuk meraih prestasi.

Selanjutnya, penyediaan fasilitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan kepemudaan menjadi faktor pendukung penting dalam pencapaian kinerja. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai memungkinkan organisasi kepemudaan menyelenggarakan kegiatan secara optimal, berkelanjutan, dan inklusif. Secara keseluruhan, sinergi antara pembinaan SDM, dukungan hibah, serta penyediaan sarana prasarana berdampak positif terhadap peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan dan pemuda secara individu, yang pada akhirnya mendukung peningkatan capaian indikator pemuda kompeten dan pemuda berprestasi pada periode pelaporan.

Faktor Pendorong/Keberhasilan

1. SDM yang Kompeten dan Berkomitmen

   Kemampuan dan Komitmen pegawai serta fasilitator di bidang kepemudaan sangat berpengaruhterhadap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, sehingga target program dapat dicapai lebih efektif dan efisien.
2. Partisipasi Aktif Pemuda dan Organisasi Kepemudaan
   - Antusiasme dan dukungan yang tinggi dari pemuda serta organisasi pemuda/OKP dalam mengikuti program membuat capaian kinerja lebih optimal..
   -Keterlibatan mereka dalam kegiatan pemberdayaan, pelatihan, atau even kepemudaan menjadi modal utama pencapaian target bidang ini.
3. Komitmen Pemerintah Daerah.

   Komitmen Kepala Daerah dan dukungan kebijakan pemerintah daerah terhadap program kepemudaan menjadi pendorong keberhasilan karena memperkuat landasan perencanaan, alokasi anggaran, dan koordinasi dengan OPD terkait.
4. Koordinasi dan Sinergi Lintas Sektor

   Koordinasi yang baik antara Dinas dengan OPD lain (mis. Bappeda, Dinas Pendidikan, Bakesbangpol) serta organisasi masyarakat membantu integrasi program kepemudaan dan mendorong tercapainya indikator kinerja yang ditetapkan.
5. Ketersediaan Anggaran yang tepat Sasaran

Alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan program kepemudaan — seperti pelatihan, pembinaan organisasi pemuda, kegiatan advokasi atau pengembangan kapasitas — membantu realisasi kegiatan sesuai target.

6. Program Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas

   Pelaksanaan pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, keterampilan sosial dan lainnya meningkatkan kompetensi pemuda sehingga mereka lebih siap berkontribusi pada pembangunan daerah.

7. Tersedianya Database dan Informasi Kepemudaan

   Pengembangan basis data pemuda dan informasi program kepemudaan membantu perencanaan yang lebih terarah serta evaluasi kinerja program secara periodik.

Faktor Penghambat/Kegagalan

1. Keterbatasan Anggaran Program Kepemudaan

   Alokasi anggaran yang tersedia belum sepenuhnya mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan program dan kegiatan kepemudaan, sehingga beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan secara optimal atau cakupannya masih terbatas.

2. Partisipasi Pemuda yang belum Merata

   Tingkat partisipasi pemuda dan organisasi kepemudaan di beberapa wilayah masih relatif rendah, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan akses informasi, sarana, dan prasarana pendukung kegiatan kepemudaan.

3. Kapasitas Organisasi Kepemudaan yang Beragam

   Sebagian organisasi kepemudaan belum memiliki kapasitas manajerial dan administrasi yang memadai, sehingga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan pemuda.

4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Pengelola Program

   Jumlah dan kompetensi SDM pengelola program kepemudaan masih terbatas dibandingkan dengan luas wilayah serta jumlah sasaran pemuda, sehingga berdampak pada intensitas pendampingan dan monitoring kegiatan.

5. Keterbatasan Data dan Basis Informasi

Keterbatasan Data dan Basis Informasi KepemudaanBelum tersedianya data kepemudaan yang mutakhir dan terintegrasi menyulitkan proses perencanaan, penetapan sasaran program, serta evaluasi capaian kinerja secara akurat.

6. Kendala Waktu dan Kondisi Teknis Pelaksanaan

   Beberapa kegiatan mengalami penyesuaian jadwal akibat faktor teknis, administratif, atau kondisi lapangan, yang berdampak pada penundaan pelaksanaan dan belum tercapainya target output secara penuh.

Rencana Aksi

1. Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran.

   Bidang Kepemudaan telah melakukan prioritisasi kegiatan dengan memfokuskan anggaran pada program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kapasitas dan partisipasi pemuda, serta mengoptimalkan efisiensi belanja untuk memastikan seluruh kegiatan strategis tetap dapat terlaksana.

2. Peningkatan Partisipasi Pemuda dan Organisasi Kepemudaan

   Dilakukan upaya peningkatan sosialisasi program kepemudaan melalui berbagai media dan koordinasi dengan organisasi kepemudaan, sekolah, serta komunitas pemuda di tingkat kecamatan guna mendorong keterlibatan pemuda secara lebih merata.

3. Penguatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan

   Bidang Kepemudaan melaksanakan pembinaan dan pendampingan terhadap organisasi kepemudaan melalui pelatihan manajemen organisasi, administrasi, dan kepemimpinan guna meningkatkan efektivitas peran organisasi dalam mendukung program pemerintah daerah.

4. Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Program

   Upaya peningkatan kapasitas aparatur dilakukan melalui pembagian tugas yang lebih efektif, koordinasi internal yang intensif, serta keikutsertaan dalam kegiatan bimbingan teknis dan koordinasi teknis yang mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan program kepemudaan.

5. Penguatan Koordinasi dan Sinergi Lintas Sektor

   Bidang Kepemudaan telah memperkuat koordinasi dengan OPD terkait, lembaga pendidikan, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung

integrasi dan sinergi program kepemudaan agar pelaksanaan kegiatan lebih efektif dan tepat sasaran.

6. Perbaikan Pengelolaan Data Kepemudaan

   Dilakukan pengumpulan dan pemutakhiran data kepemudaan secara bertahap sebagai dasar perencanaan dan evaluasi program, serta untuk mendukung penetapan sasaran kegiatan yang lebih akurat.

7. Penyesuaian Jadwal dan Metode Pelaksaan Kegiatan

   Bidang Kepemudaan melakukan penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan serta fleksibilitas metode pelaksanaan (tatap muka maupun daring) guna mengantisipasi kendala teknis dan memastikan kegiatan tetap berjalan sesuai target.

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 24 ASN pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan di dukung oleh 3 Program dengan Pagu Rp 115.312.062.447,56 dan terealisasi Rp. 106.488.928.117,00 atau sebesar 92,34%.

Tabel 3.4.5
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	964.000.000,00	**469.455.000,00**
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	4.283.176.301,73	**3.145.644.852,00**
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	110.064.886.145,83	**102.873.828.265,00**
Jumlah		**115.312.062.447,56**	**106.488.928.117,00**

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Efisiensi kinerja diukur menggunakan rumus berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

Tabel 3.4.6
Efisiensi Sasaran Strategis 4

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
-%	92,34%	-%

TUJUAN II

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan tujuan ke II yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.

Untuk mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan tiga indikator yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi, Gini Ratio, dan PDRB Perkapita.

Tabel 3.5.1
Target indikator tujuan Tahun 2025

No	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2025
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,1 - 5,2
		Gini Ratio	Nilai	0,24 - 0,249
		PDRB Perkapita	Ribu Rupiah	61000

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan 3 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah.
2. Meningkatnya Kontribusi Investasi Terhadap Perekonomian Daerah.
3. Menurunnya Kemiskinan Dan Pengangguran.

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 5

Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah

Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah diukur melalui 4 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.5.2
Capaian Kinerja Terhadap Target 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			TAHUN 2025		
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN

1	Rasio PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	%	15,56	15,37	16,45	16,47	16,53	100,36%
2	Rasio PDRB Sektor Industri Olahan	%	10,50	10,59	10,95	10,97	11,46	104,46%
3	Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum (Pariwisata)	%	1,34	1,41	1,49	1,5	1,64	109,33%
4	Rasio PDRB Sektor Perdagangan	%	10,20	10,54	10,72	10,75	11,21	104,27%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2025								104,60%

Tabel 3.5.3
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2025 THD TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Rasio PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	%	16,47	16,53	100,36%	16,75	98,68%
2	Rasio PDRB Sektor Industri Olahan	%	10,97	11,46	104,46%	11,35	100,96%
3	Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum (Pariwisata)	%	1,5	1,64	109,33%	1,9	86,31%
4	Rasio PDRB Sektor Perdagangan	%	10,75	11,21	104,27%	10,79	103,89%

a. Rasio PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan

Rasio PDRB sektor Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 sebesar 16,53. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 1,16 dari tahun 2024 dengan angka 16,45.

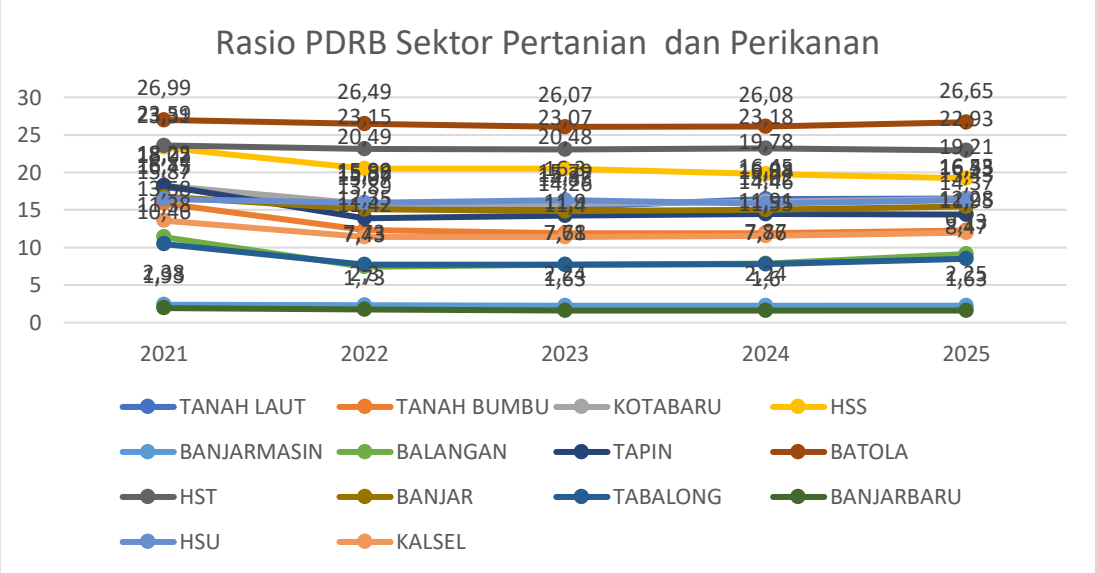
Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan salah satu kategori lapangan usaha dari 17 kategori lapangan usaha yang ada pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB menggambarkan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu

periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Angka Pertumbuhan pada Sektor Pertanian dan Perikanan didapatkan dari perubahan Nilai Tambah Bruto (NTB) kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dari satu tahun ke tahun berikutnya.

Lapangan usaha ini mencakup tiga subkategori. Pertama, subkategori Pertanian, Perternakan, Perburuan dan jasa Pertanian yang terdiri atas tanaman pangan, tanaman Holtikutura, tanaman perkebunan, perternakan, dan jasa pertanian dan perburuan. Subkategori kedua adalah kehutanan dan penebangan kayu, dan yang terakhir adalah subkategori perikanan. Lapangan usaha ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja.

Kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan salah satu kategori yang mencirikan ekonomi di Kalimantan Selatan. Pergerakan ekonominya akan sangat berpengaruh terhadap total perekonomian mayoritas Kabupaten/Kota se-Kalsel. Grafik 3.5.1 menunjukkan gambaran pertumbuhan kategori tersebut pada masing-masing kabupaten/kota

Grafik 3.5.1
Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan, Provinsi dan Nasional Tahun 2021-2025



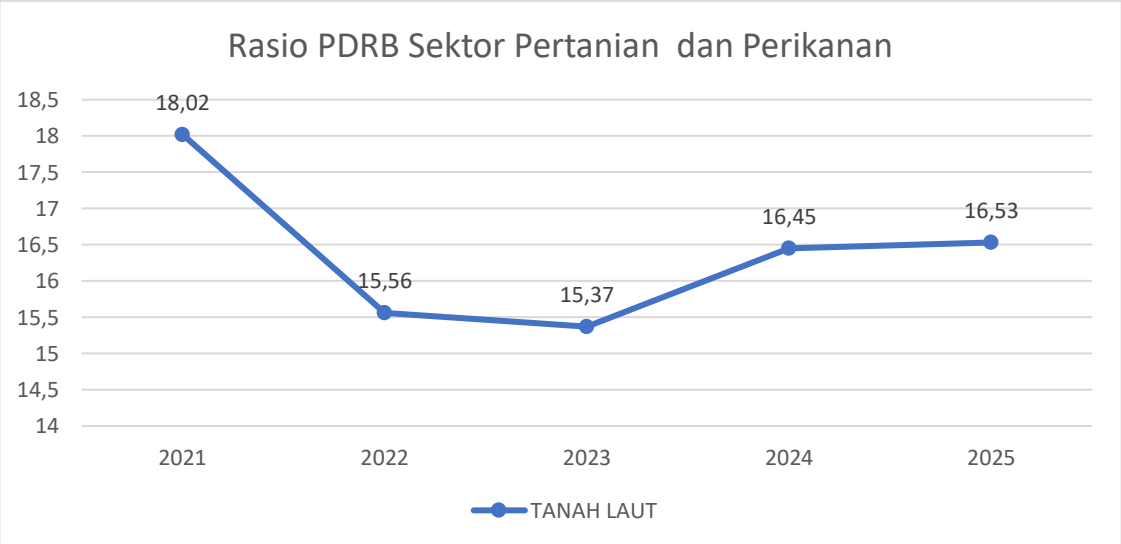
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel 3.5.4
Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan, Provinsi dan Nasional Tahun 2021-2025

Kab/Kota	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Batola	26.99	26.49	26.07	26.08
HST	23.59	23.15	23.07	23.18
HSS	23.31	20.49	20.48	19.78
Tanah Laut	18.02	15.56	15.37	16.45
Kotabaru	18.22	15.82	15.79	16.08
HSU	16.45	15.99	16.3	15.84
Banjar	16.77	15.07	14.85	15.02
Tapin	18.25	13.89	14.26	14.46
Tanah Bumbu	15.87	12.35	11.9	11.91
Kalsel	13.58	11.42	11.4	11.55
Balangan	11.38	7.43	7.68	7.87
Tabalong	10.46	7.73	7.71	7.76
Banjarmasin	2.38	2.3	2.24	2.24
Banjarbaru	1.93	1.73	1.63	1.6

Dari grafik di atas, seluruh Kabupaten/Kota se-Kalsel masih mengalami pertumbuhan yang positif pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, hanya saja terdapat beberapa kabupaten/kota yang mengalami perlambatan pertumbuhan dan beberapa yang mengalami percepatan pertumbuhan.

Grafik 3.5.2
Rasio PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut 2021-2025



Sumber : BPS Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan grafik di atas, Rasio PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut cukup fluktuatif dari tahun ke tahun. Pertumbuhan sektor ini sempat terkontraksi pada tahun 2022-2023 namun kembali tumbuh cepat pada tahun 2024, yaitu sebesar 16,45, kemudian meningkat kembali pada tahun 2025 menjadi 16,53. Adapun dari sisi distribusi atau peranannya terhadap total PDRB, sektor ini mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir sebagaimana pada Tabel 3.5.4 berikut.

Tabel 3.5.5
Peranan Lapangan Usaha PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
(Persen), 2021-2025

No	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pertanian, perternakan, Perburuan, Jasa Pertanian/*Agriculture, Livestock, Hunting and Agriculture Services*					
	a. Distribusi/*Distribution*	18,03	15,56	15,37	16,45	16,53
	b. Laju Pertumbuhan/*Growth*	1,73	2,63	2,06	7,94	5,66
	c. Laju Implisit/*Growth Rate of Implicit Price Index*	2,19	4,39	2,58	4,50	1,90

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Laut

Dari tabel di atas, distribusi atau peranan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap total PDRB dari tahun ke tahun cenderung menurun sejak tahun 2021-2023, kemudian naik Kembali pada tahun 2024-2025. Meski turun secara peranan, dari sisi pertumbuhan maupun laju implisit sektor ini masih tumbuh positif yang mengindikasikan bahwa sektor ini masih terus berkembang dari tahun ke tahun. Sektor ini juga masih menjadi sektor terbesar kedua dalam perekonomian di

Kabupaten Tanah Laut dan masih sangat berpotensi untuk ditingkatkan lagi.

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sector unggulan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Terdapat 3 Perangkat Daerah utama pelaksana inidikator ini yaitu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Tabel 3.5.6
Realisasi Produksi Komoditas Pertanian Tahun 2023 S/D 2025

No	Komoditas	Realisasi Produksi (Ton)			Kenaikan Produksi (Ton)		Penurunan Produksi (Ton)	
		2023	2024	2025	2023-2024	2024-2025	2023-2024	2024-2025
1	Padi	147.410,0	169.270,0	176.518,0	21.859,9	7.248,0	-	-
2	Jagung	123.060,0	123.739,0	124.693,0	679,0	954,0	-	-
3	Kacang Tanah	48,0	125,0	50,0	77,0	-	-	- 75,0
4	Cabe	2.786,3	2.857,0	2.541,0	70,7		-	- 316,0
5	Bawang Merah	111,5	120,0	57,7	8,5	-	-	- 62,3
6	Durian	54,0	67,0	81,30	13,0	14,3		
7	Karet	19.699,9	21.354,0	22.048,8	1.654,1	621,0	-	-
8	Kelapa Sawit	73.229,7	75.235,0	80.280,0	2.005,3	4.569,8	-	-
9	Kopi	157,0	72,06	174,0	-	101,9	- 84,94	
	Jumlah	366.556,4	392.839,1	406.443,8	26.367,5	13.509,0	(84,9)	(453,3)

Sumber Data : Distanhorbun 2025

1. Peningkatan produksi pada komoditas padi pada tahun 2025 disebabkan adanya Program Optimalisasi Lahan Rawa (Opla) seluas 2.840,28 ha , dan adanya Program Tala Bungas (Tanah Laut Lumbung Beras), yaitu berupa kegiatan dalam upaya peningkatan produksi padi/beras dengan cara Ekstensifikasi (peningkatan indeks pertamanan) dan Intensifikasi (pengunaan benih unggul dan benih lokal umur pendek), program ini diperkuat dengan Instruksi Bupati Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peningkatan Produksi Padi, sebab yang ketiga adanya Program Gernas (Gerakan Nasional) percapatan tanam, yaitu gerakan untuk mengatur jadwal tanam yang meyesuaikan dengan keadaan iklim/cuaca, sehingga tanaman padi bisa terpenuhi kebutuhan air nya dan tidak mengalami kekeringan ataupun bisa bertahan apabila terjadi banjir, dan adanya bantuan sarana produksi dari Kementrian Pertanian dan Dinas Pertanian Provinsi.

2. Pada tanaman Jagung, kenaikan produksi pada tahun 2025 dilakukan dengan cara intensifikasi, karena banyaknya alih fungsi lahan tamanan jagung ke sawit, cara intesnifikasi yaitu perubahan pengunaan benih oleh para petani jagung, dari yang sebelumnya petani mengunakan benih non unggul/lokal sekarang beralih menggunakan benih hibrida/unggul yang mempunyai tingkat produktivitas yang tinggi, dengan rata-rata produtivitas 7,7 ton/ha, dan adanya bantuan sarana produksi dari kementrian pertanian dan Dinas Pertanian Provinsi Kalomantan Selatan berupa benih, pupuk dan pestisida.
3. Tidak tercapainya target produksi kacang tanah di tahun 2025, dari target 100 ton dengan realisasi hanya 50 ton, hanya hanya 50% dari target disebakan karena menurunnya bantuan dari Pemerintah Pusat/Kementrian Pertanian karena adanya efisiensi untuk pengembangan kacang tanah.
4. Penurunan produksi cabe di tahun 2025 sebesar 316 ton dibandingkan tahun 2024, hal ini disebabkan oleh kombinasi faktor eksternal seperti cuaca ekstrem (hujan berlebih), masalah hama dan penyakit (terutama virus kuning, antrak, kutu kebul dan jamur), serta penggunaan pupuk, pestisida) yang tidak efisien, kurangnya pengetahuan, yang semuanya berdampak pada penurunan hasil panen dan fluktuasi harga, meskipun terkadang produksi berlimpah justru menurunkan harga, disamping itu pola tanam petani bergeser pada tanaman hortikultura lain (gambas dan pare).
5. Tanaman bawang merah juga mengalami penurunan produksi disbanding tahun 2024, yang disebabkan kombinasi faktor produksi yang tidak optimal (benih, lahan, tenaga kerja), serangan hama dan penyakit (seperti busuk umbi), degradasi kesuburan tanah akibat penggunaan kimia, cuaca ekstrem (banjir, hujan deras), serta masalah pasca-panen seperti susut bobot saat penyimpanan. Efisiensi penggunaan input seperti benih dan lahan seringkali belum maksimal, dan penyimpanan benih yang tidak tepat sehingga kualitas benih menjadi rendah yang menyebabkan produksi rendah dan gampang terserang OPT , sementara hama dan penyakit seperti kutu daun, ulat daun, dan layu fusarium sangat berpengaruh.

6. Kenaikan produksi durian sebesar 14,3 ton dibanding tahun 2024 disebabkan adanya bantuan sarana berupa pupuk dan pestisida produksi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan untuk peningkatan produktivitas durian.
7. Kenaikan produksi pada tanaman karet sebesar 621 ton dibanding tahun 2024 terjadi karena peningkatan luas tanam karet sebanyak 253 ha pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), dan adanya Program Tala Barasih (Tanah Laut Bokar Bersih) yaitu kegiatan pemberdayaan petani berupa pembentukan kelompok Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) pada petani Karet, yang tujuannya untuk meningkatkan produksi karet dan kesejahteraan para petani karet, dengan terbentuknya kelompok UPPB maka hasil karet mempunyai kualitas yang baik (tanpa ada campuran) sehingga nilai jualnya mengalami kenaikan, kenaikan produksi karet juga dkarena adanya bantuan sarana produksi baik dari Kementrian Pertanian, Provinsi maupun Kabupaten, berupa pupuk organik cair, benih maupun pestisida.
8. Produksi tanaman sawit yang meningkat pada tahun 2025 sebesar 4.569,8 ton, yang disebabkan adanya penambahan luas area produksi pada Tanaman Menghasilkan (TM) sawit sebanyak 325 ha pada tahun 2023 yang produksinya berpengaruh pada tahun 2025, adanya bantuan pupuk dari anggaran APBD II, dan harga jual sawit pada tahun 2025 cukup bagus sehingga menarik petani untuk menanam sawit.
9. Pada tanaman kopi terjadi kenaikan produksi sebesar 101,9 ton, hal ini disebabkan adanya bantuan sarana produksi barupa pupuk dan pestisda dari APBD Provinsi untuk peningkatan produksi kopi.

Adapun langkah-langkah yang di ambil oleh Kabupaten Tanah Laut dalam meningkatkan produksi diantaranya :

1. Peningkatan luas lahan yang ditanami.

Upaya peningkatan luas tanam dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, serta dukungan kebijakan yang mendorong partisipasi aktif petani dalam memperluas areal tanam.

Selain itu, peningkatan luas lahan yang ditanami juga didukung oleh sinergi lintas sektor, antara lain melalui ketersediaan dan penyaluran sarana produksi pertanian, pendampingan teknis kepada petani, serta penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. Melalui berbagai upaya tersebut, realisasi peningkatan luas lahan tanam dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan produksi.

Tabel 3.5.7
Data Luas Panen Tahun 2025

Data Luas Panen

Komoditas	Luas Tanam (ha)		Kenaikan (ha)
	2024	2025	
Padi	45.562	50.316	4.754
Jagung	16.398	16.417	19
Kacang Tanah	105	39	- 66
Cabe	19.950	15.000	- 4.950
Bawang Merah	8	4	- 4
Durian	105	106	1
Sawit	12.691,60	13.522	830
Karet	14.852	14.822	- 30
Kopi	145	152	7

Sumber Data : Distanhorbun 2025

Dari data perkembangan luas lahan yang ditanami tahun 2024 dan 2025 ke sembilan komoditas di Kabupaten Tanah Laut, terdapat 4/empat komoditas yang mengalami penurunan luas tanam, yaitu komoditas kacang tanah, cabe, bawang merah dan karet, sedangkan 6/enam komoditas padi, jagung, durian, sawit dan kopi mengalami kenaikan luas tanam.

Penurunan luas tanam kacang tanah, cabe, bawang merah dan karet penyebab utamanya adalah berkurangnya bantuan sarana produksi berupa benih/bibit dan pupuk dari pemerintah, baik dari Provinsi maupun Pusat, hal ini membuat petani mengalami kendala terutama permodalan dalam pengembangan ketiga komoditas tersebut, terutama pada kacang tanah, dimana petani lebih memilih tanam padi atau sayuran Ketika harus melakukan penanaman secara swadaya/mandiri, hal ini dinilai petani lebih

menguntungkan mananam sayuran berupa sawi, terong dan papaya yang nilai jualnya lebih stabil di tahun 2025 dibandingkan dengan nilai jual kacang tanah.

Sedangkan untuk cabe dan bawang merah walaupun luas tanam mengalami penurunan, pendampingan secara intensif terus dilakukan kepada petani untuk meningkatkan Produktivitas tanamanya, hal ini terbukti dari capaian target produksi cabe dan bawang merah di tahun 2025 bisa memenuhi target produksi.

2. Penyediaan bibit/benih yang akan ditanam

Penyediaan sarana pertanian berupa bibit/benih merupakan salah satu upaya untuk meningkatakan produksi tanaman, melalui pengunaan benih unggul/hibrida, karena bibit/benih unggul/hibrida mempunyai keunggulan produksi dibandingkan dengan bibit/benih lokal, karena bibit/benih unggul mempunyai produksitivitas rata-rata sebesar 4 - 4,5 ton/ha, sedangkan benih lokal produktivitasnya hanya sebesar 2,5 - 3 ton/ha.

Dari segi waktu budidaya, umur bibit/benih unggul/hibrida lebih pendek daripada benih lokal, dimana bibit/benih unggul mempunyai waktu budidaya sekitar 3 bulan, sedangkan benih lokal waktu budidayanya sekitar 4 – 6 bulan.

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, pada tahun 2025 menyediaan bibit/benih tanaman yang fokus pada komoditas padi, karena komoditas padi merupakan tanaman pokok makanan masyarakat Indonesia, dan disamping untuk mendukung program swasembada pangan yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia yang kegiatan fisiknya melalui Cetak Sawah Rakyat (CSR), dengan lokus pengembangan bibit/benih unggul/hibrida di Kecamatan sentra padi (Kurau, Bumi Makmur, Pelaihari, Takisung, Bati-Bati, Tamabang Ulang dan Panyipatan).

Dokumentasi Penyediaan Bibit/Benih Tanaman





3. Penyediaan alat mesin pertanian

Alat mesin pertanian (Alsintan) merupakan salah sarana penting yang diperlukan oleh petani, karena alsintan digunakan oleh petani dalam mengolah lahan, perawatan tanaman, pengendalian hama dan panen.

Sehingga petani sangat memerlukan alsintan dalam budidaya tanaman, baik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, karena pengunaan alsintan untuk mengurangi biaya produksi mulai dari olah tanah hingga panen.

Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan bantuan Alsintan dari Kementrian Pertanian yang jumlahnya sampai 975 unit, mulai dari alsintan pra panen (handtraktor, Traktor, Alat tanam padi, pompa air dan Rotavator) dan alat panen (combaine, alat panen jagung dan alat perontok padi).

Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut membentuk UPT Balai Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan), yang mempunyai Alsintan sebanyak mempunyai 170 unit Handtraktor, 31 unit Traktor, 32 unit Alat Tanam Padi, 135 unit Pompa Air, 26 unit Cultivator, dan 1 unit Excavator PC 45, yang semua alat

tersebut dikelola dengan sistem pinjam pakai secara gratis kepada petani/kelompok tani.

Dokumentasi Penyediaan Alsintan





4. Pembangunan jalan pertanian

Pembangunan jalan usaha tani dan jalan produksi merupakan upaya strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan konektivitas wilayah perdesaan serta mendukung penguatan sektor pertanian dan ekonomi lokal. Keberadaan infrastruktur jalan ini berperan penting dalam memperlancar mobilitas petani, mempercepat distribusi sarana produksi pertanian, serta memudahkan pengangkutan hasil panen dari lahan menuju tempat pengolahan dan pasar. Dengan akses jalan yang memadai, biaya logistik dapat ditekan, waktu tempuh menjadi lebih efisien, dan risiko kerusakan hasil produksi dapat diminimalkan.

Selain meningkatkan efisiensi usaha tani, pembangunan jalan usaha tani dan jalan produksi juga berdampak pada peningkatan produktivitas dan daya saing komoditas pertanian. Infrastruktur jalan yang baik mendorong keterhubungan antar sentra produksi, memperluas akses pasar, serta membuka peluang pengembangan usaha berbasis pertanian dan agroindustri di perdesaan. Secara sosial ekonomi, pembangunan ini turut mendukung pemerataan pembangunan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat tani, serta memperkuat ketahanan ekonomi wilayah melalui pengembangan potensi unggulan daerah secara berkelanjutan.

Tahun 2025 pembangunan jalan usaha tani (JUT) sebanyak 88 unit dan pembangunan Jalan Produksi sebanyak 8 unit, berikut contoh pembangunan jalan usaha tani yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.

No	Desa	Kecamatan	Foto
1.	Desa Batu Ampar RT.7	Batu Ampar	
2.	Desa Ranggang	Takisung	
3.	Desa Galam	Bajuin	

4.	Desa Jilatan Alur	Batu Ampar	
5.	Desa Ujung	Bati-Bati	

Berikut contoh pembangunan jalan produksi yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.

No	Desa	Kecamatan	Foto
1.	Desa Gunung Melati RT.11/02	Batu Ampar	
2.	Desa Mekar Sari	Kintap	
3.	Desa Ambungan	Pelaihari	
4.	Desa Tajau Mulya	Batu Ampar	

5.	Desa Benua Lawas RT.5	Takisung	
7.	Desa Bajuin	Bajuin	
8.	Desa Damit	Batu Ampar	
9.	Desa Martadah	Tambang Ulang	

5. Penyediaan sarana pembasmi hama dan penyakit tanaman

Dalam pelayanan kepada petani, salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah penyediaan sarana pembasmi hama dan penyakit tanaman, berupa Pestisida.

Penyediaan sarana ini diberikan atau dilaksankan Ketika terjadi serangan hama dan penyakit yang tidak bisa ditangani secara mandiri oleh petani/kelompok tani, dengan luasan minimal 4 ha serangan hama/penyakit tanaman, pada tahun 2025 menyediakan 50 kg Fungisida, 240 botol Insektisida, 150 botol Moluscusida dan 720 Rodentisida.

Dokumentasi Penyediaan sarana pembasmi hama





6. Pelaksanaan cetak sawah

Cetak sawah pada tahun 2025 merupakan program dari Kementrian Pertanian, yang dilaksankan di daerah, yang salah sastunya di Kabupaten Tanah Laut, pada tahun 2024 Kabupaten Tanah Laut mendapatkan alokasi cetak sawah kurang lebih seluas 30.000 ha, yang tersebar di 11 Kecamatan.

Pada awal 2025 Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan melakukan validasi alokasi cetak sawah dari kementrian kurang lebih seluas 30.000 ha, setelah dilaukan valiadasi lahan yang akan dilaksankan cetak sawah harus clean dan clear, artinya lahan taidak ada masalah adminstrasi (masuk Kawasan hutan) maupun sosial (lahan adat).

Setalah dilakukan validasi maka didapatkan luas lahan yang bisa dilaksanakan program cetak di Kabupaten Tanah Laut sebanyak 4.975,72 ha, dengan luas cetak sawah sebagi berikut :

KABUPATEN		Desa dan Kecamatan	Luas Kontrak cetak sawah (ha)
Tanah Laut	1	Kurau & Panyipatan, Tanah Laut	216,15
	2	Pagatan Besar, Takisung, Tanah Laut	546,80
	3	Takisung, Tanah Laut	464,80
	4	Sungai Pinang, Tambang Ulang, Tala	141,92
	5	Kintap dan Sabuhur, Tanah Laut	112,50
	6	Padang Luas, Kurau, Tanah Laut	103,50
	7	Ujung, Bati-Bati, Tanah Laut	359,90
	8	Padang & Panggung Baru, Tanah Laut	604,08
	9	Panyipatan, Panyipatan, Tanah Laut	651,00
	10	Liang Anggang & Pandahan, Tanah Laut	1.148,40
	11	Sungai Pinang, Tambang Ulang, Tanah Laut	119,00
	12	Swarangan & Asam-Asam, Jorong, Tanah Laut	100,18
	13	Birayang Atas, Bumi Makmur, Tanah Laut	407,49
Total Cetak Sawah Kabupaten Tanah Laut			**4.975,72**

7. Pelatihan penggunaan teknologi pertanian terbarukan

Pemberdayaan petani salah satu melalui peningkatan wawasan dan pengetahun dalam meningkatkan kemampuan budidaya dengan memanfaatkan bahan sekitar/bahan alami dengan mengedepankan pertanian hijau, yang artinya pertanian yang ramah lingkungan dengan pengurangan pengunaan bahan kimia.

Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melaksanakan pelatihan pengunaan teknologi terbarukan melalui Sekolah Lapang (SL) untuk penanganan hama dan penyakit tanaman atau melakukan pembuatan pupuk secara organik untuk peningkatan unsur hara tanaman dengan pengurangan pengunaan bahan kimia, yang dilaksanakan pada di Kecamatan Kurau dan Bati-Bati untuk komoditas padi.

Dokumentasi Pengunaan Teknologi Terbarukan





8. Penyaluran alat pengolahan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mempunyai peran dalam hal pengolahan produk pertanian, yaitu pengolahan bahan mentah menjadi bahan/barang setengah jadi yang siap untuk diolah menjadi bahan/barang jadi.

Sebagai contoh pada tanaman padi, peran Distanhorbun dalam pengolahan adalah mengolah Gabah Kering Panen (GKP) menjadi Gabah Kering Giling (GKG) dengan meminimalkan kehilangan hasil panen, salah cara yang digunakan Distanhorbun pada tahun 2025 adalah dengan penyerahan alat pengolahan / alat panen berupa Combaine (alat panen padi) sebanyak 2 unit.

Dengan Combaine (alat panen) kehilangan hasil pada waktu pengolahan GKP ke GKG bisa diminimalkan, dengan target kehilangan hasil maximal 1,2%/ha.

Dokumentasi Penyerahan Alat Pengolahan





9. Peningkatan kompetensi kelompok tani

Peningkatan kompetensi kelompok tani, yaitu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan anggota kelompok tani dalam mengelola usaha pertanian yang lebih efektif dan efisien.

Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melakukan peningkatan kompetensi kelompok tani dengan cara :

a. Pelatihan dan edukasi tentang teknologi pertanian modern
b. Pendampingan oleh penyuluh pertanian
c. Pertukaran pengalaman dan pengetahuan antar anggota kelompok tani
d. Pengembangan sistem manajemen usaha pertanian yang efektif

Tujuan meningkatkan kompetensi kelompok tani adalah untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan daya saing produk pertanian, serta meningkatkan pendapatan anggota kelompok tani, baik itu petani pemilik lahan, petani pengarap dan buruh tani.

Dokumentasi Peningkatan Kompetansi Kelompok Tani





10. Peningkatan kualitas sdm penyuluh pertanian

Peningkatan kemampuan dan pengetahuan petugas pertanian (PPL) juga perlu dilakukan, karena Petugas Penyuluh Lapangan merupakan ujung tombak pembangunan pertanian, melalui kegiatan yang berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan penyuluh pertanian dalam memberikan pelayanan dan pendampingan kepada petani.

Cara peningkatan kualitas SDM penyuluh pertanian di tahun 2025 yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah :

a. Pelatihan dan edukasi tentang teknologi pertanian modern
b. Pendampingan oleh ahli atau KJF Kabupaten
c. Pertukaran pengalaman dan pengetahuan dengan penyuluh lain
d. Pengembangan sistem manajemen pengetahuan yang efektif

Tujuan peningkatan kualitas SDM penyuluh pertanian adalah untuk meningkatkan kemampuan penyuluh dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada petani, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas pertanian.

Dokumentasi peningkatan kualitas SDM Penyuluh Pertanian





11. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelompok Pembudidaya Ikan

Dalam rangka pemberdayaan usaha masyarakat skala kecil dan peningkatan produksi perikanan budidaya dilakukan pada 2 (dua) Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) yaitu Pokdakan Sri Rejeki di Desa Bumi Jaya Kecamatan Pelaihari dan Pokdakan Sido Mulyo Lestari di Desa Sumber Jaya Kecamatan Kintap dengan bantuan berupa benih Ikan Patin dan Nila masing-masing sebanyak 20.000 ekor benih, pakan apung sebanyak 6.240 kg, dan keramba jaring sebanyak 30 unit









12. Peningkatan Kapasitas SDM Pembudidaya Ikan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melaksanakan peningkatan kapasitas SDM pembudidaya ikan dengan cara pembagian buku saku budidaya serta pamflet mengenai budidaya komoditas ikan tertentu secara ringkas, kemudian melakukan Sosialisasi pedoman Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan pendampingan lapangan secara intensif kepada kelompok pembudidaya/pelaku usaha budidaya bersama-sama dengan Penyuluh Perikanan sesuai dengan wilayah kerjanya. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pembudidaya ikan dilaksanakan untuk memperkuat pengetahuan, keterampilan, dan sikap pembudidaya dalam menerapkan praktik budidaya yang efektif dan berkelanjutan. Kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan lapangan mendorong pembudidaya untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan kualitas air, penggunaan pakan secara efisien, pengendalian penyakit ikan, serta penerapan teknologi budidaya. Upaya ini mendukung peningkatan produktivitas usaha budidaya dan kualitas hasil perikanan. Adapun kegiatan sosialisasi Cara Budidaya Ikan yang Baik/Benar (CBIB) dilaksanakan sebanyak 10 kali, ada yang dilaksanakan secara langsung ke kelompok dan ada juga yang langsung ke desa.

Pokdakan Budidaya Ikan Bersama (Bajuin)



Pokdakan Jala Tancap Kerja Bersama (Bati-bati)



Pokdakan Paikat (Batu Ampar)



Pokdakan Sri Rejeki (Pelaihari)



Desa Handil Birayang Atas (Bumi Makmur)



Pokdakan Maju Bersama (Jorong)



Desa Muara Kintap (Kintap)

Pokdakan Waja Sampai Kaputing (Kurau)

Pokdakan Mina Lestari (Panyipatan)



Pokdakan Sumber Rejeki (Tambang Ulang)







13. Peningkatan kapasitas kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dilakukan dengan cara Pelatihan Pengolahan Hasil

Perikanan Bagi Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (Poklahsar) Dimana diberikan pelatihan pengolahan untuk diversifikasi produk olahan selain yang telah dikuasai, antara lain olahan Tahu Bakso Ikan, Nugget Ikan, Dimsum Udang, dan Sempol Ikan. Mendorong untuk meningkatkan penghasilan bagi Kelompok Pengolah dan Pemasar jika sedang banyak bahan baku yang ada di pasaran dan harga ekonomis, setelah diolah akan meningkat nilai jual produknya. Pelatihan Dilaksanakan sebanyak 2 (dua) Kali, Pada Desa Swarangan Kecamatan Jorong (10 Juli 2025) dan Desa Tabanio Kecamatan Takisung (24 Juli 2025).





Faktor Penghambat:

1. Perubahan iklim yang memengaruhi pola tanam dan adanya risiko bencana pertanian seperti banjir, kekeringan, dan gagal panen, sehingga menurunkan stabilitas produksi.
2. Rendahnya pemahaman dan keterampilan petani dalam pengolahan produk hasil pertanian menyebabkan sebagian besar hasil dijual dalam bentuk bahan mentah dengan nilai tambah rendah.
3. Terbatasnya akses sarana, teknologi, dan informasi pasar menghambat pengembangan produk olahan pertanian yang berdaya saing.

4. Perubahan iklim yang memengaruhi kondisi perairan, cuaca ekstrem, dan musim tangkap/budidaya sehingga meningkatkan risiko gagal panen dan penurunan produksi perikanan.
5. Kerentanan usaha perikanan terhadap bencana seperti banjir, abrasi, gelombang tinggi, dan kekeringan yang berdampak pada kerusakan sarana prasarana dan menurunnya hasil produksi.
6. Rendahnya pemahaman dan keterampilan pelaku usaha perikanan dalam pengolahan hasil perikanan menyebabkan produk sebagian besar dijual dalam bentuk segar dengan nilai tambah rendah.

Rencana Aksi:

1. Penguatan adaptasi perubahan iklim melalui penyesuaian kalender tanam, penggunaan varietas tahan iklim ekstrem, dan pengelolaan risiko bencana pertanian.
2. Peningkatan kapasitas petani dalam pengolahan hasil pertanian melalui pelatihan, pendampingan, dan transfer teknologi untuk mendorong peningkatan nilai tambah produk.
3. Pengembangan sarana pascapanen, kemitraan dengan pelaku usaha, serta akses pasar untuk mendukung hilirisasi produk pertanian
4. Penguatan adaptasi perubahan iklim pada sektor perikanan melalui penyesuaian pola usaha tangkap dan budidaya, penerapan teknologi ramah iklim, serta pengelolaan risiko bencana perikanan.
5. Peningkatan kapasitas nelayan dan pembudidaya dalam pengolahan hasil perikanan melalui pelatihan, pendampingan, dan pengembangan teknologi pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah produk.
6. Pengembangan sarana pascapanen dan rantai dingin, penguatan kemitraan usaha, serta perluasan akses pasar guna mendorong hilirisasi produk perikanan

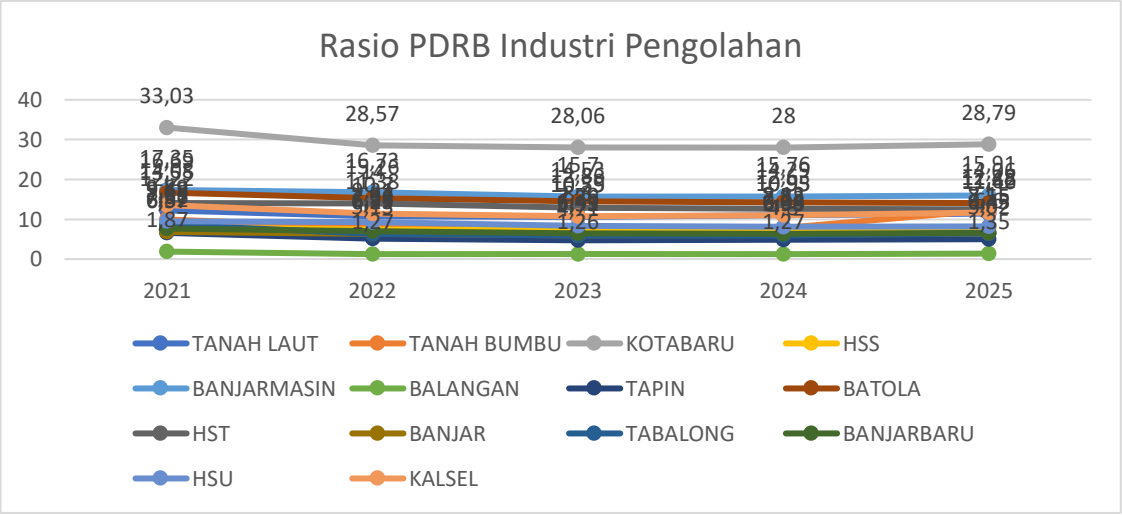
b. Rasio PDRB Sektor Industri Olahan

Sektor Industri Pengolahan merupakan salah satu kategori lapangan usaha unggulan yang ada di Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tanah Laut, dimana secara peranan merupakan lapangan usaha terbesar ketiga.

Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industry pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

Sektor Industri Pengolahan merupakan salah satu sektor unggulan untuk mayoritas Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan di mana pertumbuhan pada sektor ini akan cukup berpengaruh terhadap perekonomian suatu daerah. Grafik 3.5.3 menunjukkan gambaran pertumbuhan kategori tersebut pada masing-masing kabupaten/kota.

Grafik 3.5.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Industri Pengolahan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan, Provinsi & Nasional Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Kalimantan Selatan

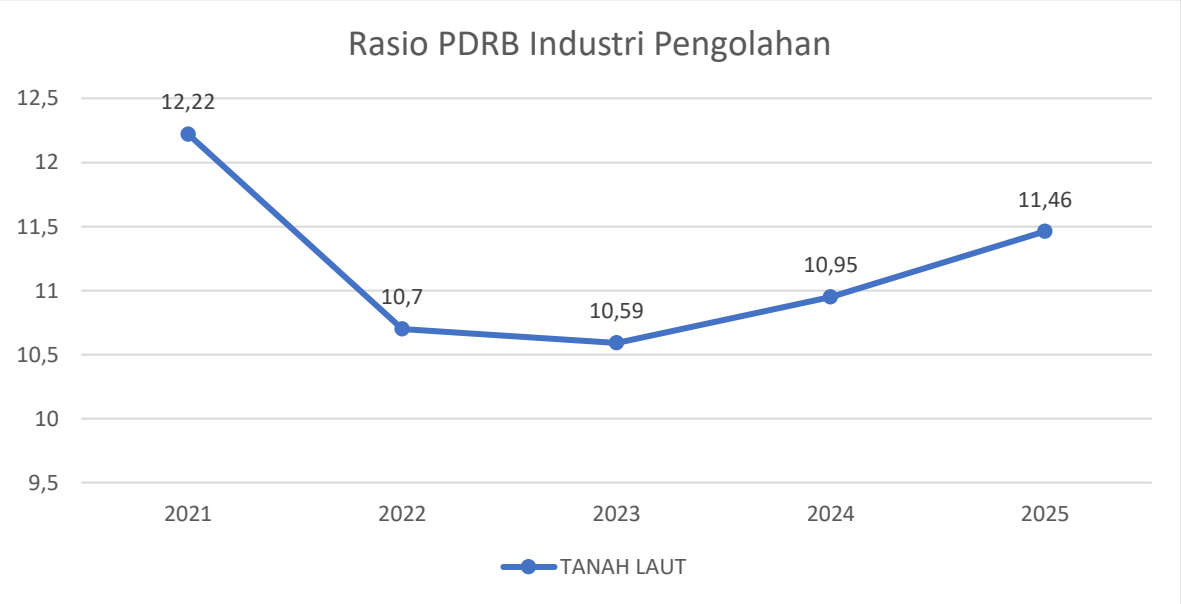
Tabel 3.5.8
Laju Pertumbuhan Ekonomi Industri Pengolahan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan, Provinsi & Nasional Tahun 2021-2025

Kab/Kota	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Kotabaru	33.03	28.57	28.06	28
Banjarmasin	17.35	16.73	15.7	15.76
Batola	16.69	15.26	14.53	14.29
HST	14.08	14	12.86	12.63
Tanah Laut	12.22	10.7	10.59	10.95
Kalsel	13.55	11.38	10.75	10.95
HSU	9.48	9.21	8.3	8.12
Tanah Bumbu	9.89	7.97	7.79	7.85
HSS	7.97	7.38	7.26	7.22
Banjarbaru	7.66	6.99	6.49	6.34
Banjar	6.82	6.27	5.95	6.09
Tabalong	8.65	6.33	5.91	5.96
Tapin	6.57	5.13	4.71	4.8
Balangan	1.87	1.27	1.26	1.27

Dari grafik di atas, seluruh Kabupaten/Kota se-Kalsel mengalami pertumbuhan yang positif pada sektor industri pengolahan, terdapat beberapa kabupaten/kota yang mengalami perlambatan pertumbuhan dan beberapa yang mengalami percepatan pertumbuhan. Kabupaten Tanah Laut sendiri mengalami percepatan pertumbuhan dengan nilai pertumbuhan 11,46 persen pada Tahun 2025, hanya terpaut 0,16 point dari Provinsi Kalimantan Selatan.

Kategori industri pengolahan dalam PDRB atas dasar tahun 2010, dibagi dalam 16 subkategori. Subkategori yang mendominasi kerja industri pengolahan di Tanah Laut adalah industri makanan dan minuman. Produksi industri makanan dan minuman rata-rata mencapai lebih dari 60 persen dari total produksi industri pengolahan keseluruhan di tanah laut. Komoditas utama dari industri makanan dan minuman tanah laut adalah *crude palm oil* (CPO).

Grafik 3.5.4
Rasio PDRB Sektor Industri Olahan Kabupaten Tanah Laut
2021-2025



Sumber: BPS Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan grafik di atas, Rasio PDRB sektor industri olahan Kabupaten Tanah Laut cukup fluktuatif dari tahun ke tahun. Pertumbuhan sektor ini sempat terkontraksi pada tahun 2022 dengan nilai 10,5 persen hingga tahun 2023 dengan nilai 10,59 namun kembali tumbuh perlahan sejak tahun 2024 dengan nilai 10,95 persen, tahun 2025 dengan nilai 11,46 persen. Di Tanah Laut sendiri, kinerja industri CPO ini didukung oleh kinerja subkategori perkebunan komoditas kelapa sawit yang terkonsentrasi di beberapa wilayah sentra produksi utama (Kecamatan Pelaihari, Batu Ampar, Jorong, dan Kintap). Selain faktor kenaikan CPO, pertumbuhan yang positif juga dipengaruhi oleh peningkatan produksi makanan dan minuman lainnya seperti pakan ternak, air minum dan lain-lain serta adanya peningkatan jumlah industri mikro dan kecil. Adapun dari sisi distribusi atau peranannya terhadap total PDRB, sektor ini mengalami juga cukup fluktuatif selama beberapa tahun terakhir sebagaimana pada Tabel 3.5.7 berikut.

Tabel 3.5.9

Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Kategori Industri Pengolahan (persen), 2021-2025

Lapangan Industri	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Industri Pengolahan					
a. Peranan	12,10	10,50	10,59	10,95	**11,46**
b. Laju Pertumbuhan	5,01	3,86	5,33	5,29	**7,82**
c. Laju Implisit	4,13	3,76	-0,33	3,43	**4,07**

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Laut

Potret dari PDRB Tanah Laut menunjukkan bahwa kategori lapangan usaha industri pengolahan memiliki pangsa terbesar ketiga setelah kategori lapangan usaha pertambangan dan pertanian. Kategori lapangan usaha industri pengolahan memiliki peranan sebesar 11,46 persen di tahun 2025 yang meningkat dari tahun sebelumnya. Selain itu, dilihat dari sisi pertumbuhan maupun laju implisit sektor ini juga masih berpeluang terus berkembang dari tahun ke tahun. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terus melakukan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan, diantaranya sebagai berikut.

a. Peningkatan Kualitas Standarisasi Industri

1) Peningkatan kualitas sumber daya industri

Pelatihan dan pemagangan bidang perindustrian yang dilaksanakan tahun 2025 ini mengalami penurunan, hal ini dikarenakan adanya beberapa kali efisiensi anggaran yang terjadi ditahun 2025. Sedangkan beberapa pelatihan dan pemagangan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pemagangan bagi IKM Pengolahan Produk Pangan Olahan Buah-Buahan Kab. Tanah Laut tanggal 10 s/d 14 Pebruari 2025 bertempat di BBSPJIA Bogor Provinsi Jawa Barat yang diikuti 5 IKM.
2. Pelatihan Desain dan Pengembangan Motif Sasirangan tanggal 24 s/d 28 Pebruari 2025 bertempat di Gedung Pusat Promosi Sentra IKM

Sasirangan Tambang Ulang dengan jumlah peserta 20 orang dengan instruktur dari IKM Fanesya Sasirangan.

3. Pelatihan Teknis Pengembangan Ecoprint tanggal 21 s.d 26 April 2025 bertempat di Gedung Pusat Promosi Sentra IKM Sasirangan Tambang Ulang dengan jumlah peserta 20 orang dengan instruktur dari IKM Arthadeva Sasirangan.
4. Pelatihan Teknis Produksi Olahan Ikan Haruan 15 s.d 19 September 2025 bertempat Aula Kantor Kecamatan Kurau dengan jumlah peserta 20 orang dengan instruktur berasal dari Yayasan Borneo Insan Kreatif.
5. Pelatihan Teknis Produksi Olahan Produk Frozen Berbahan Unggas dan Ikan tanggal 13 s.d 17 Oktober 2025 dengan jumlah peserta 20 orang bertempau di Aula Kantor Kecamatan Jorong.
6. Pelatihan Teknis Produksi Olahan Sawo tanggal 27 s/d 30 Oktober 2025 dengan jumlah peserta 20 orang bertempat di Aula Kantor Desa Batakan.

2) Fasilitasi Standarisasi Industri

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melaksanakan fasilitasi standarisasi industri bagi IKM melalui fasilitasi hak merk, fasilitasi halal, fasilitasi layanan rumah kemasan dan fasilitasi hibah.

Pada Tahun 2025 terdapat 25 IKM yang mendapat fasilitasi Sertifikasi Hak Merk. Daftar IKM yang mendapat fasilitasi sertifikasi merk dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5.10
Rekap Data IKM Yang Di Fasilitasi Sertifikasi Hak Merek Tahun 2025

NO	NAMA IKM	DESA	KECAMATAN	NAMA MEREK	KELAS	PRODUKSI
1	Dapoer Nini Kembar	Simpang Empat Sungai Baru	Jorong	Padu Paninian	29 dan 30	Aneka keripik, dan kue kering
2	AS Wood Working	Kintapura	Kintap	AS Wood Working	20	Aneka kerajinan kayu ulin
3	I-Win Cake	Pabahanan	Pelaihari	I-Win Cake	30	Bolen pisang, aneka bolu , brownies, roti sobek, dan aneka kue lainnya
4	Produksi Rumahan Siemanis	Guntung Besar	Pelaihari	Siemanis Gulmer	30	es lahang, Gula semut aren, sirup gula merah

NO	NAMA IKM	DESA	KECAMATAN	NAMA MEREK	KELAS	PRODUKSI
5	Lahang Hafizh & Hafizah	Guntung Besar	Pelaihari	Hafizahnafees	30	es lahang, dan gula merah dan aren
6	Keripik Ibu Titi	Tanjung	Bajuin	Pamikerso	29	aneka keripik singkong, keripik tempe, dan lain-lain
7	Keripik Talita Raiqa	Kunyit	Bajuin	RaiQaTalita	29	aneka keripik singkong, dan keripik pisang
8	SMKS Intan Bara Husada	Sarang Halang	Pelaihari	Fambucha	30	Teh kombucha (teh fermentasi kesehatan)
9	Telur Asin Andut	Kurau Utara	Bumi Makmur	Andut	29	Telur asin
10	Kerupuk Udang Bu Darma	Sungai Rasau	Bumi Makmur	Kerupuk Bu darma	30	Kerupuk Udang
11	Cilox Brader	Telaga	Pelaihari	Cilox Brader	30	Aneka cilok
12	Makmur Jaya Abadi	Telaga Langsat	Takisung	Yamni Honey	30	Madu Kelulut
13	Arsy Bakery	Panggung	Pelaihari	Arsy Bakery	30	Aneka Bakery
14	Arman Sasirangan	Handil Maluka	Bumi Makmur	Arman Sasirangan	24	Sasirangan
15	Tulevsky	Karang Taruna	Pelaihari	Penjahit Tulevsky	40	Jasa Menjahit Pakaian
16	Keripik Jamur Crispy'a	Karang Taruna	Pelaihari	Crispy'a	29	Keripik Jamur
17	Bumdes Tunas Murni	Nusa Indah	Bati-Bati	Tunas Murni	30	Kerupuk Ketumbar
18	Amplang Ibu Ainah	Tanjung Dewa	Panyipatan	Sanombo	30	Amplang
19	Uyah Sangrai Barokah By.adibarsyilalifah	Guntung Besar	Pelaihari	Uyah Sangrai Barokah By.adibarsyilalifah	30	Uyah Pencok atau garam berbumbu
20	Rumah Jahit Sinta	Panyipatan	Panyipatan	Rumah Jahit Sinta	40	Jasa Menjahit Pakaian
21	Aneka Keripik Mama Diva	Simpang Empat Sungai Baru	Jorong	Mama Diva	29	Aneka Keripik
22	Penjahit Ardani	Batakan	Panyipatan	Penjahit Ardani	40	Jasa Menjahit Pakaian
23	Alr sasirangan	Alur	Jorong	Alr sasirangan	24	sasirangan
24	Bumdes Ruhui Rahayu	Handil Birayang Atas	Bumi Makmur	Tiara Amira	30	Beras

NO	NAMA IKM	DESA	KECAMATAN	NAMA MEREK	KELAS	PRODUKSI
25	Jaswadi Bakery	Sarang Harang	Pelaihari	Jaswadi Bakery	29	Aneka roti dan

Pada tahun 2025, total 41 IKM yang mendapat fasilitasi Sistem Jaminan Halal, dengan rincian sebanyak 31 IKM yang difasilitasi melalui Self Delcare APBD Kabupaten Tanah Laut dan sebanyak 10 IKM difasilitasi melalui Dana APBD Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana yang terinci pada table berikut :

Tabel 3.5.11
Daftar IKM Yang Difasilitsi Sistem Jaminan Halal
Dengan bekerjasama dengan BPJPH dan Dinas Perindustrian Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2025

NO	NAMA IKM	Merk	NAMA PEMILIK	ALAMAT	PRODUK YANG DIHASILKAN	TAHUN TERBIT	TANGGAL TERBIT	NOMOR SERTIFIKAT HALAL	KETERANGAN
1	Al Fathanu	Al Fathanu	Carinah	Jl. Swadaya I Rt 13 Rw.3, Rt/Rw -, Simpang Empat Sungai Baru, Jorong	Rempeyek, Keripik Tempe	2025	03/05/2025	ID63410 0219448 10525	program SEHATI
2	Al Fathanu	Al Fathanu	Carinah	Jl. Swadaya I Rt 13 Rw.3, Rt/Rw -, Simpang Empat Sungai Baru, Jorong	Donat	2025	03/05/2025	ID63410 0218958 50425	program SEHATI
3	Mama Anisa	Mama Anisa	Asliah	Jl. Tebing Tinggi, Rt/Rw -, Takisung, Takisung	Kerupuk Udang	2025	13/04/2025	ID63410 0214040 60425	program SEHATI
4	Sie Manis	Sie Manis	Nurma Dahlia	Jl. Pandalarak, Rt/Rw -, Guntung Besar, Pelaihari	Gula semut, lahang, gula cair	2025	10/05/2025	ID63410 0221203 60525	program SEHATI
5	Sie Manis	Sie Manis	Nurma Dahlia	Jl. Pandalarak, Rt/Rw -, Guntung Besar, Pelaihari	Keripik Tempe	2025	04/05/2025	ID63410 0219699 50525	program SEHATI

NO	NAMA IKM	Merk	NAMA PEMILIK	ALAMAT	PRODUK YANG DIHASILKAN	TAHUN TERBIT	TANGGAL TERBIT	NOMOR SERTIFIKAT HALAL	KETERANGAN
6	Andut	Telur Asin Andut	Isnaniah	Jl. Limo 1 Rt.002/Rw.001-, Desa Kurau Utara, Kec. Bumi Makmur	Telur Asin	2025	06/05/2025	ID63410022025780525	program SEHATI
7	Keripik Jamur Tiram Arsy	Keripik Jamur Tiram Arsy	Cory Desa Martharini	Jl. Soekarno-Hatta Rt. 11 Rw. 05, Desa Pemuda, Kec. Pelaihari	Keripik Jamur	2025	04/07/2025	ID61410023681710725	program SEHATI
8	kacang sambal	kacang sambal	Syarifah	Ds. Kuringkit, Kec. Panyipatan	Kacang sambal	2025	25/07/2025	ID63410024773580725	program SEHATI
9	kerupuk lestari	kerupuk lestari	Hamidah	Ds. Takisung	kerupuk ikan	2025	17/07/2025	ID63410024364470725	program SEHATI
10	Kedai Vanisha	Kedai Vanisha	Khairunnisa	Panggung, Kec. Pelaihari	produk bakery	2025	12/08/2025	ID63410025822380825	program SEHATI
11	PureNira 88	PureNira 88	Eko	Takisung	Lahang pak eko	2025	14/08/2025	ID63410025922200825	Self Declare Mandiri APBD Disnakerind
12	Kerupuk Tunas Murni, Raja Rasa	Kerupuk Tunas Murni, Raja Rasa	Puguh Wibowo	Nusa Indah, Kec. Bati-Bati	Kerupuk Ketumbar	2025	14/08/2025	ID63410025922180825	Self Declare Mandiri APBD Disnakerind
13	Amplang Sanombo Ibu Ainah	Amplang Sanombo Ibu Ainah	Ainah	Ds. Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan	Amplang	2025	14/08/2025	ID63410025921580825	Self Declare Mandiri APBD Disnakerind
14	Kleti'an bu kar	Kleti'an bu kar	Karsini	Tirta Jaya, Kec. Bajuin	Rengginang, dan keripik	2025	14/08/2025	ID63410025922250825	Self Declare Mandiri APBD Disnakerind

NO	NAMA IKM	Merk	NAMA PEMILIK	ALAMAT	PRODUK YANG DIHASILKAN	TAHUN TERBIT	TANGGAL TERBIT	NOMOR SERTIFIKAT HALAL	KETERANGAN
15	Mama Kiki	Mama Kiki	Arniah	Ds. Tambak Karya, Kec. Kurau	Donat dan Roti	2025	14/08/2025	ID63410 0259221 20825	Self Declare Mandiri APBD Disnakerind
16	Asmantoga Rosella	Asmanto ga Rosella	Ripawati	Ds. Kait-Kait, Kec. Bati-Bati	Minuman Segar Jahe, dan Temulawak Instan	2025	14/08/2025	ID63410 0259221 50825	Self Declare Mandiri APBD Disnakerind
17	Slondoknya	Slondokn ya	Tri Susanti	Pabahanan, Kec. Pelaihari	Kerupuk Slondok	2025	25/09/2025	ID63410 0289093 50925	Self Declare Mandiri APBD Disnakerind
18	Pempek Noviana	Pempek Noviana	Yayan Noveri	Sungai Riam, Kec. Pelaihari	Pempek Ikan	2025	25/09/2025	ID63410 0289128 30925	Self Declare Mandiri APBD Disnakerind
19	Dodol Sawo Acil Atang	Dodol Sawo Acil Atang	Multi Hartati	Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan	Dodol Sawo	2025	25/09/2025	ID63410 0288985 20925	Self Declare Mandiri APBD Disnakerind
20	Keripik Tempe Acil Bungas	Ika Riani	Ika Riani	Desa Alur, Kec. Jorong	Keripik Tempe	2025	10/09/2025	ID63410 0284286 10925	Self Declare Mandiri APBD Disnakerind
21	Anindsyas Snack	Anindsya s Snack	Siti Aminah	Ds. Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang	Marning dan Emping Jagung	2025	04/10/2025	ID63410 0297183 21025	Self Declare Mandiri APBD Disnakerind
22	Bina Karya Bersama	Bina Karya Bersama	Hamidah	Ds. Kait-Kait, Kec. Bati-Bati	Akar pinang	2025	06/08/2025	ID63410 0254746 00825	Self Declare Mandiri APBD Disnakerind

NO	NAMA IKM	Merk	NAMA PEMILIK	ALAMAT	PRODUK YANG DIHASILKAN	TAHUN TERBIT	TANGGAL TERBIT	NOMOR SERTIFIKAT HALAL	KETERANGAN
23	Crispy'a	Crispy'a	Restu Aulia Khairunnisa	Karang Taruna, Kec. Pelaihari	Keripik Jamur	2025	11/08/2025	ID6341002575103082 5	Self Declare Mandiri APBD Disnakerind
24	Kedai Vanisha	Kedai Vanisha	Khairunnisa	Panggung, Kec. Pelaihari	produk bakery	2025	01/07/2025	ID6341002355218072 5	Self Declare Mandiri APBD Disnakerind
25	Sirup Rambai Bogam Amalia	Sirup Rambai Bogam Amalia / Bumdes Sungai Rasau	Marhamah	Desa Sungai Rasau, Kec. Bumi Makmur	Sirup Rambai	2025	15/10/2025	ID6311002098572122 4	Self Declare Mandiri APBD Disnakerind
26	Uyah Sangrai Barokah By. Adibarsyilalifah	Uyah Sangrai Barokah By. Adibarsyilalifah	Nur Shafitriya Anggraeni	Desa Batilai, Kec. Takisung	Uyah Sangrai	2025	24/09/2025	ID6341002887783092 5	Self Declare Mandiri APBD Disnakerind
27	Keripik RaiQaTalita	Keripik RaiQaTalita	Yuliyana	Desa Kunyit, Kecamatan Bajuin	keripik	2025	05/12/2025	ID6341003583983122 5	Self Declare Mandiri APBD Disnakerind
28	Keripik Pamikerso	Keripik Pamikerso	Titi Sunarti	Desa Tanjung, Kecamatan Bajuin	keripik	2025		proses pengajuan	Self Declare Mandiri APBD Disnakerind
29	I Win Cake	I Win Cake	Winda Fransisca Panca Rini	Kelurahan Pabahanan, Kecamatan Pelaihari	cake & Cookies	2025	31/12/2025	ID6341003867830122 5	Self Declare Mandiri APBD Disnakerind
30	Cemal Cemil	Cemal Cemil	Siti Khomariah	Desa Batalang, Kecamatan Jorong	keripik	2025	21/12/2025	ID6341003814119122 5	Self Declare Mandiri APBD Disnakerind
31	Rumah Aneka Snack (RAS)	Rumah Aneka Snack (RAS)	Fahrianoor Ichsan	Desa Gunung Makmur, Kecamatan Takisung	keripik	2025	13/12/2025	ID6341003684951122 5	Self Declare Mandiri APBD Disnakerind

NO	NAMA IKM	Merk	NAMA PEMILIK	ALAMAT	PRODUK YANG DIHASILKAN	TAHUN TERBIT	TANGGAL TERBIT	NOMOR SERTIFIKAT HALAL	KETERANGAN
32	Sahabat Madu	Sahabat Madu	Kuswanto	Desa Sumber Makmur, Kecamatan Takisung	madu	2025	13/12/2025	ID6341003685253122 5	Self Declare Mandiri APBD Disnakerind
33	Bambolini Uni	Bambolini Uni	Fitdah Raudatul Jannah	Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari	donat dan sejenisnya	2025	14/12/2025	ID6341003719704122 5	Self Declare Mandiri APBD Disnakerind
34	Q'Chips	Q'Chips	Nur Sullehah	Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari	keripik	2025		proses pengajuan	Self Declare Mandiri APBD Disnakerind
35	Cemilan Bunda	Cemilan Bunda	Ikka Yurinda Theresia	Kelurahan Atu-Atu, Kecamatan Pelaihari	Cireng	2025		proses pengajuan	Self Declare Mandiri APBD Disnakerind
36	Warung Rujak	Warung Rujak	Didik Winarko	Desa Sarikandi, Kecamatan Kurau	Gorengan	2025		proses pengajuan	Self Declare Mandiri APBD Disnakerind
37	Pentol Anindyas	Pentol Anindyas	Heru Suwanto	Desa Benua Tengah, Kecamatan Takisung	Pentol	2025		proses pemberkasan Dokumen Halal	Reguler, APBD Disnakerind
38	SMKS Intan Barahusada	Fambucha	Tika Ardilia Nurwidyastuti	Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari	Teh Kombucha	2025		proses pemberkasan Dokumen Halal	Reguler, APBD Disnakerind
39	Donalia	Donalia	Ghandi Aziz P.	Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari	Aneka Bakery	2025		proses pemberkasan Dokumen Halal	Reguler, APBD Disnakerind
40	D'Ncef	D'Ncef	Septia Hijria	Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari	Gorengan	2025		proses pemberkasan Dokumen Halal	Reguler, APBD Disnakerind
41	Pentol Abah Lukman	Pentol Abah Lukman	Sugiyono	Desa Kurau, Kecamatan Kurau	Pentol dan Bakso	2025		proses pemberkasan Dokumen Halal	Reguler, APBD Disnakerind

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut juga berusaha meningkatkan pelayanan di Rumah Kemasan dengan cara memfasilitasi desain label dan kemasan sebanyak 39 IKM di Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5.12
Rekap Pelayanan Pada Rumah Kemasan 2025

No.	Nama IKM Pengguna Layanan	Layanan yang diterima	No. HP (WA)	E-mail
1	Mama Salma	Desain label kemasan kue basah, kue kering, jamu, tape ketan, kembang goyang	85345102864	
2	SJ Langkar	Desain Label kemasan Pangsit Ikan tenggiri, Pentol ikan tenggiri, Takoyaki ikan tenggiri, Tahu bakso ikan tenggiri		
3	Riana Catering	Desain Label kemasan Catering	82353105233	Rianaputri685@gmail.com
4	Nuryati Farm	Desain Label kemasan Buah Anggur	85251475152	rizkypratam2403@gmail.com
5	Mama EL	Desain Label Kemasan Olahan Cumi		
6	TE-WANG	Desain Label Kemasan Keripik Tempe	85391910256	
7	Jaya Bersama Sasirangan	Desain Label Kemasan Sasirangan	82250249500	Jlah59196@gmail.com
8	Asura	Desain Label Kemasan Minuman Rambai	82251138764	
9	Lele Ruli	Desain Label kemasan Olahan Kerupuk ikan dan abon ikan lele	82250328111	
10	Tala Al Plus	Desain Label Kemasan Ubi Segar	85753164483	arul.amrullah89@gmail.com
11	ARC Madu	Desain Label Kemasan Madu Kelulut	85346541271	arsgallery94@gmail.com
12	TZD Madu	Desain Label Kemasan Madu Kelulut	85248291002	
13	Ulya Madu	Desain Label Kemasan Madu Kelulut	85332374856	
14	Acil Jasimah	Desain Label Kemasan Olahan Udang		
15	Mang Ali	Desain Label kemasan Kerupuk	82227882599	sanahja110506@gmail.com
16	Noviana	Desain Label Kemasan Pempek		
17	Batakan Berkah	Desain Label kemasan Pangsit Ikan tenggiri, Pentol ikan tenggiri, Takoyaki ikan tenggiri, Tahu bakso ikan tenggiri		
18	Amalia	Desain Label kemasan olahan Rambai	82251138764	
19	Hani Fresh Milk	Desain Label kemasan Susu segar		
20	Injon	Desain Label kemasan Kerupuk Labu		
21	TPA Darul Qur'an	Desain Logo TPA		
22	Ibu Ade	Desain Label kemasan Aneka Camilan		
23	Makde	Desain Label kemasan Temulawak Sebuk	85821375848	
24	Agung Cake and Cookies	Desain Label kemasan kue	85348262688	mulianaagustian92@gmail.com
25	Berkah Sasirangan Bajuin	Desain Label Produk Sasirangan	85348251592	nursoyono0@gmail.com
26	IKM Desa Ujung Baru	Desain Label Kemasan Cake singkong, cake labu, dodol labu, minuman jeruk serbuk, carica papaya, manisan papaya, carica kundur, manisan kundur, selai pepaya, selai kundur,kue gipang, saos pepaya		
27	Norsuhad	Konsultasi Kemasan produk IKM		
28	Ningrum	Konsultasi Kemasan produk IKM	87814147227	
29	Diah R	Konsultasi Kemasan produk IKM	85260517553	
30	Aditya Pratama	Konsultasi Kemasan produk IKM	82157200681	
31	Mohmudin	Konsultasi Kemasan produk IKM	82153024925	
32	Lasti	Konsultasi Kemasan produk IKM	81150334345	
33	Mariati	Konsultasi Kemasan produk IKM		
34	Amalia	Konsultasi Kemasan produk IKM		

No.	Nama IKM Pengguna Layanan	Layanan yang diterima	No. HP (WA)	E-mail
35	IKM Roti Gunung Makmur	Konsultasi Kemasan produk IKM		
36	Ibu Ade	Konsultasi Kemasan produk IKM	83141249612	
37	Amel	Konsultasi Kemasan produk IKM	82149858959	
38	Norma	Konsultasi Kemasan produk IKM	82151418969	
39	Berkah Uyah Sangrai	Desain label produk	83837557909	

Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah memberikan hibah kepada Koperasi Konsumen Pedagang Mandiri Sejahtera berupa Mesin Pencetak Bakso 1 unit dan Mesin Penggiling Daging 1 unit.

b. Peningkatan Pengembangan Perwilayahan Industri

Pada tahun 2025 ada peningkatan pada jumlah sentra yaitu sebanyak 1 sentra IKM yaitu sentra Sungai Rasau di Kecamatan Bumi Makmur, dimana tahun 2025 total seluruh sentra menjadi 14 sentra IKM dibandingkan dengan tahun 2024 hanya terdapat 13 sentra IKM.

Tabel 3.5.13
Sentra IKM di Kab. Tanah Laut

No	Nama Sentra	Jumlah Unit Usaha	Jenis Usaha	Kontak Person	Alamat			
					Jalan	Desa/ Kel	Kec.	Kab/ Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasirangan	7	Sasirangan dan Turunannya	Dwie Wahyuni	Desa Martadah Baru RT 02 RW 01	Martadah Baru	Tambang Ulang	Tanah Laut
2	Arang	23	Kayu Arang	Amrullah	Ranggang	Ranggang	Takisung	Tanah Laut
3	Anyaman Purun	22	Anyaman Purun	Masliah	Jl. Keramat RT 08 RW 03	Takisung	Takisung	Tanah Laut
4	Anyaman Purun	13	Anyaman Purun	Enik	Lang Anggang	Lang Anggang	Bati-Bati	Tanah Laut
5	Gula Merah	17	Gula Merah	Sayid Hasan	Kandangan Lama RT 08 RW 03	Kandangan Lama	Panyipatan	Tanah Laut
6	Gula Merah	23	Gula Merah	M. Alfin	Desa Batilai RT 04 RW 02	Batilai	Takisung	Tanah Laut
7	Madu	3	Madu	Kuswanto	ROMB. 04 RT 08 RW 04	Sumber Makmur	Takisung	Tanah Laut
8	Olahan Hasil Laut	13	Kerupuk	Rina	JL.Pelabuhan Barat RT 05 RW 02	Tanjung Dewa	Panyipatan	Tanah Laut
9	Olahan Hasil Laut	34	Kerupuk	Misna Yanti	Jl. Pariwisata RT 16 RW 04	Batakan	Panyipatan	Tanah Laut
10	Olahan Hasil Laut	8	Kerupuk	Maria Ulfah	Sungai Rasau	Sungai Rasau	Bumi Makmur	Tanah Laut
11	Pakasam	61	Pakasam	Jumaidi	Kali Besar	Kali Besar	Kurau	Tanah Laut
12	Makanan Minuman	35	Makanan dan Minuman	Imam Wahyudi	JL. Mangkubumi RT 09 RW 04	Bumi Jaya	Pelaihari	Tanah Laut
13	Makanan Minuman	7	Minuman Rimpang	Yulia Purnama Rukmi	Jl. Keramat RT 03 RW 01	Tirta Jaya	Bajuin	Tanah Laut
14	Arang	32	Kayu Arang	Nassir	Ranggang Dalam	Ranggang Dalam	Takisung	Tanah Laut

c. Peningkatan Akses Pemasaran IKM

Terdapat peningkatan jumlah IKM yang dipromosikan Tahun 2025 yaitu bertambah 46 IKM di bandingkan Tahun 2024.

Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5.14
Jumlah IKM Yang Dipromosikan

	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
IKM yang dipromosikan di Dekranasda	55	64	68
IKM yang dipromosikan di Puspro Tambang Ulang	50	59	65
IKM yang dipromosikan melalui Mobil Promosi	48	64	68
IKM yang di promosikan melalui even-even pameran yang diikuti baik dalam daerah maupun luar daerah	13	13	65
IKM yang dipromosikan melalui Pojok IKM	48	48	28
TOTAL	**214**	**248**	**294**
Jumlah IKM Formal	1174	1894	1937

Upaya-upaya dilakukan adalah dengan mengikuti Kegiatan/event promosi yang dilaksanakan baik di dalam daerah maupun luar daerah, mengikuti kegiatan Pojok IKM sebagai sarana promosi pengrajin dalam mengenalkan produknya serta menjaga pelayanan di Dekranasda dan Pusat Promosi Tambang Ulang, bahkan juga melakukan promosi ke luar Negeri yaitu ke Negara Belgia.

Dapat kami informasikan bahwa dalam Promosi Produk IKM, terdapat 2 tempat promosi yaitu Dekranasda dan Pusat Promosi Sentra IKM Tambang Ulang. Pada kedua tempat promosi ini, sistem yang dipakai adalah titip jual, dimana IKM menitipkan produknya untuk dijual dan dipromosikan.

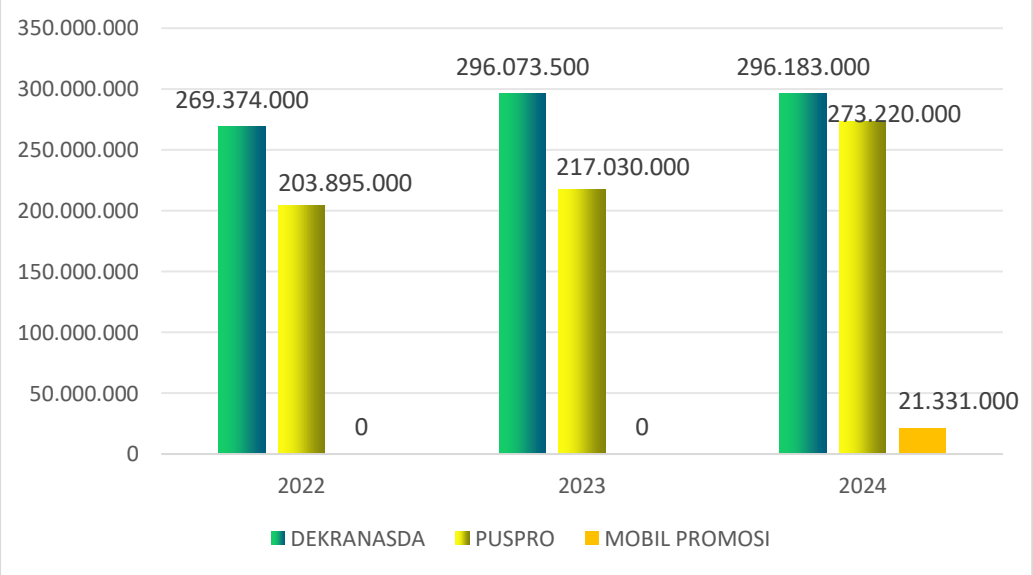
Adapun penjualan produk IKM di kedua tempat tersebut selama Tahun 2025 adalah sbb :

Tabel 3.5.15
Rekafitulasi Penjualan Produk IKM Selama Tahun 2025 Pada Dekranasda, Pusat Promosi dan Mobil Toko

NO	BULAN	PENJUALAN DEKRANASDA	PENJUALAN PUSPRO	MOBIL EXPO	JUMLAH
1	JANUARI	24.398.000	5.395.000	-	29.793.000
2	FEBRUARI	25.135.000	10.089.000	-	35.224.000
3	MARET	21.066.000	2.105.000	945.000	24.116.000
4	APRIL	21.285.000	7.309.000	-	28.594.000
5	MEI	27.780.000	11.740.000	2.605.000	42.125.000
6	JUNI	21.110.000	16.060.000	-	37.170.000
7	JULI	38.698.000	40.425.000	-	79.123.000
8	AGUSTUS	25.120.000	39.690.000	-	64.810.000
9	SEPTEMBER	20.325.000	11.286.000	2.570.000	34.181.000
10	OKTOBER	17.596.000	13.977.000	1.547.000	33.120.000
11	NOVEMBER	13.722.000	31.899.000	4.388.000	50.009.000
12	DESEMBER	17.304.000	14.555.000	1.551.000	33.410.000
	JUMLAH	273.539.000	204.530.000	13.606.000	491.675.000

Pada Tahun 2025, Rata-rata penjualan di Dekranasda Rp. 22.794.916/bulan dan di Pusat Promosi rata-rata penjualan Rp. 17.044.166/bulan dan untuk mobil promosi rata-rata penjualan Rp. 1.133.833/bulan.

Grafik 3.5.5
Jumlah Penjualan Produk IKM Tahun 2022 sd 2025 Pada Dekranasda Puspro dan Mobil Promosi



Selain dari Dekranasda dan Puspro Tambang Ulang, kami juga melakukan promosi produk melalui berbagai event pameran dan juga menggunakan mobil promosi Dekranasda. Hasil Penjualan Produk IKM Selama Tahun 2025 dari mobil Promosi adalah sebesar Rp. 13.606.000.

Berikut event yang diikuti dengan menggunakan mobil promosi Dekranasda.

Tabel 3.5.16
Event Yang Diikuti Oleh Mobil Promosi Sepanjang Tahun 2025

No	Tanggal Kegiatan	Nama Kegiatan	Tempat Kegiatan Desa	Kecamatan
1	11 Maret 2025	Mobil Expo pada Event Partisapasi Pasar Murah pada Event Ramadahn Expo Tahun 2025	Halaman Kantor Mall Pelayanan Publik	Pelaihari
2	21 Maret 2025	Mobil Expo pada Event Partisapasi Pasar Murah pada Event Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446H Tahun 2025	Halaman Mesjin Syuhada	Pelaihari
3	25 Maret 2025	Mobil Expo pada Event Partisapasi Pasar Murah pada Event Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446H Tahun 2025	Halaman Pertasi Kencana	Pelaihari
4	06 Mei 2025	Mobil Expo pada Event Partisapasi Pasar Murah dan UMKM pada Pembukaan TMMD ke 124 Kodim Tala	Desa Gunung Melati	Batu Ampar
5	04 Juni 2025	Mobil Expo pada Event Partisapasi Pasar Murah dan UMKM pada Penutupan TMMD ke 124 Kodim Tala	Desa Gunung Melati	Batu Ampar
6	10 September 2025	Mobil Expo pada Event Partisapasi Pasar Murah Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025	Halaman kantor Desa kandangan Baru	Panyipatan
7	17 September 2025	Mobil Expo pada Event Partisapasi Pasar Murah pada Kegiatan Ngobati Tahun 2025	Halaman Kantor Kecamatan Panyipatan	Panyipatan
8	10 Oktober 2025	Mobil Expo pada Event Partisapasi Pasar Murah Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025	Halaman kantor Desa Asam Jaya	Jorong
9	17 Oktober 2025	Mobil Expo pada Event Partisapasi Pasar Murah Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025	Halaman kantor Desa Pasir Putih	Jorong
10	22 Oktober 2025	Mobil Expo pada Event Partisapasi Pasar Murah Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025	Halaman kantor Desa Bingkulu	Tambang Ulang
11	22 Oktober 2025	Mobil Expo pada Event Partisapasi Pasar Murah Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025	Halaman kantor Desa Bluru	Batu Ampar
12	29 Oktober 2025	Mobil Expo pada Event Partisapasi Pasar Murah pada Kegiatan Ngobati Tahun 2025	Halaman Kantor Kecamatan Kintap	Kintap
13	10 Oktober 2025	Mobil Expo pada Event Partisapasi Pasar Murah Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025	Halaman kantor Desa Tambang Ulang	Tambang Ulang
14	20 November 2025	Mobil Expo pada Event Partisapasi Pasar Murah dalam rangka Mendukung Kegiatan Hari Jadi Ke-60 Kabupaten Tanah Laut	Halaman Kantor Kecamatan Panyipatan	Panyipatan
15	26 November 2025	Mobil Expo pada Event Partisapasi Pasar Murah dalam rangka Mendukung Kegiatan Hari Jadi Ke-60 Kabupaten Tanah Laut	Halaman Kantor Kecamatan Batu Ampar	Batu Ampar
16	27 November 2025	Mobil Expo pada Event Partisapasi Pasar Murah dalam rangka Mendukung Kegiatan Lomba Hewan Ternak	Pasar Hewan Pelaihari	Pelaihari
17	28 November 2025	Mobil Expo pada Event Partisapasi Pasar Murah dalam rangka Menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2025	Lapangan Sepak Bola SDN Bumi Jaya 1	Pelaihari
18	02-03 Desember 2025	Mengikuti Pameran Produk IKM dan UMKM pada Rapat Koordinasi Bapeda Seluruh Indonesia Tahun 2025	Hotel Rattan Inn Banjarmasin	Banjarmasin
19	11 Desember 2025	Mobil Expo pada Event Partisapasi Pasar Murah Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025	Halaman Kantor Desa Ranggang Dalam	Takisung
20	16 Desember 2025	Mobil Expo pada Event Partisapasi Pasar Murah Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025	Halaman Kantor Desa Bukit Mulia	Kintap
21	18 Desember 2025	Mobil Expo pada Event Partisapasi Pasar Murah Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025	Halaman Kantor Desa Muara Asam-asam	Jorong

22	24 Desember 2025	Mobil Expo pada Event Partisapasi Pasar Murah Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025	Halaman Dekranasada	Pelaihari

Berikut kegiatan pameran dan mini expo yang diikuti selama Tahun 2025 :

Tabel 3.5.17
Kegiatan Pameran Yang Diikuti Sepanjang Tahun 2025

No	Tanggal Kegiatan	Nama Kegiatan	Tempat Kegiatan	Kecamatan
1	04 - 08 Februari 2025	Pameran Inacraft	Jakarta International Convention Center, Jakarta	Jakarta
1	21 - 26 Juni 2025	Mengikuti Pameran dan Bazar Ekonomi Kreatif pada kegiatan MTQN XXXVI di Kabupaten Banjar	Taman Bumi Cahaya Bumi Selamat Kab. Banjar	Taman Bumi Cahaya Bumi Selamat Kab. Banjar
2	08 - 12 Juli 2025	Mengikuti Kegiatan Pameran Hut Ke-45 Dekranas Tahun 2025 BSCC Dome Balikpapan Kalimantan Timur	Kota Balikpapan Prov. Kalimantan Timur	BSCC Dome Balikpapan Kalimantan Timur
3	10 Agustus 2025	Mengikuti Kegiatan Pameran Kalsel Expo dalam rangka memeriahkan hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan yang Ke-75 dan BumDes Expo 2025	Halaman Kantor Gubernur Prov. Kalsel Banjarbaru	Halaman Kantor Gubernur Prov. Kalsel Banjarbaru
3	18 - 22 Agustus 2025	Pameran Tala Craft & Cultur Week pada Pekan Raya Kemerdekaan Tahun 2025	Halaman Pertasi Kencana	Pelaihari, Kab. Tanah Laut
4	26-29 September 2025	Mengikuti Kegiatan Pameran Bamara Fair 2025	Halaman Kantor Gubernur Prov. Kalsel Banjarbaru	Halaman Kantor Gubernur Prov. Kalsel Banjarbaru
4	01 - 05 Oktober 2025	Pameran Inacraft Vol. 4 Tahun 2025	Jakarta International Convention Center, Jakarta	Jakarta
5	29-30 November 2025	Pameran Borneo Sasirangan & Craft Festival 2025	Duta mall Banjarmasin	Banjarmasin
6	04 - 07 Desember 2025	Bali Paradise Trade Travel & Investment Expo 2025	Level 21 Mall Bali	Bali
7	13 - 05 Desember 2025	Kegiatan Indonesia Creative Week Belgium Histori Waiting Hall Atwerpen Central Station Atwerpen, Belgium	Belgia	Belgia

d. Peningkatan Data Pelaku Industri di SIINas

Pada tahun 2025 realisasi persentase kepatuhan industri terhadap SIINas adalah sebesar 34,08%. Hal ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya dimana kepatuhan industri hanya berada di 37,99%. hal ini dikarenakan jumlah pelaku usaha yang mendaftarkan/menyampaikan laporannya di SIINas masih belum banyak.

Tabel 3.5.18
Pelaku Usaha Yang Menyampaikan Laporan di SIINas

	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Pelaku usaha yang lapor data industri	33	87	91
Jumlah industri yang terdaftar di SIINas	128	229	267

Upaya-upaya dilakukan adalah dengan melaksanakan sosialisasi maupun jemput bola dan pendampingan kepada pelaku usaha mengenai pelaporan data industri mereka ke dalam SIINas, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.5.19
Pengolahan Data Melalui SIINas

No	Skala Usaha Industri	Pengawasan	Terdaftar	Persentase
1	Industri Kecil	93	193	48%
2	Industri Menengah	1	5	10%
3	Industri Besar	4	24	15%
	Jumlah	98	229	43%

Tabel 3.5.20
Nama IKM di SIINas

No.	Nama Perusahaan	Alamat Pabrik	Bidang Usaha	Skala Usaha
1	PT SUKSES WIJAYA ADIMAKMUR	JL. A YANI KM 33,5 RT. 002 RW 002, NUSA INDAH, BATI-BATI, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	PLYWOOD,VENEER	Kecil
2	PT Karimata TImur	JL. A.YANI KM 34 NO.88 RT 002 RW. 002, NUSA INDAH, BATI-BATI, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	INDUSTRI PEMBEKUAN BIOTA AIR LAINNYA,Udang Beku / Cold Storage	Menengah
3	PT Kintap Jaya Wattindo	Dusun 3 Desa Tebing Siring, RT.011, RW.002, Tebing Siring, Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	INDUSTRI PENGASAPAN KARET	Menengah
4	PT Tuju Kuda Hitam Sakti	DESA BENTOK KAMPUNG, BENTOK KAMPUNG, BATI-BATI, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI HASIL PERTANIAN,PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI,PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR LAINNYA	Kecil
5	PT Tirta Abadi Mas Indah	jl. Lambenteng RT.05 RW II, Bati-Bati, Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Air Mineral	Kecil
6	PT Ebimas Besar	Jl. A. Yani KM. 45,6, Pulau Sari, Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	PERDAGANGAN BESAR HASIL PERIKANAN,PERDAGANGAN BESAR HASIL OLAHAN PERIKANAN,PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU	Menengah

No.	Nama Perusahaan	Alamat Pabrik	Bidang Usaha	Skala Usaha
			CADANG DAN PERLENGKAPANNYA,JASA PASCA PANEN PENANGKAPAN IKAN DI LAUT,INDUSTRI PENGGARAMAN/PENGERINGAN IKAN,INDUSTRI PEMBEKUAN IKAN,INDUSTRI PENGASAPAN/PEMANGGANGAN IKAN,INDUSTRI PEMBEKUAN BIOTA AIR LAINNYA,PRODUKSI ES	
7	CV Bintang Banua Abadi	Jalan Sumber Rejeki, Nusa Indah, Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Tandon Air silinder Vertikal PE	Menengah
8	PT Tanjung Raya Bersama	Jl. Hulu Mandrih, RT 001, RW 001, Ds. Bentok Kampung, Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi	Kecil
9	PT Mandiri Perkasa Plant	Jl.A Yani KM.122, RT.016,RW.001, Simpang Empat Sungai Baru, Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Industri Mortar atau Beton Siap Pakai,Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi	Kecil
10	PT Bimo Laksana Group	Jl. Kurau RT/RW. 006/002, Pulau Sari, Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pengolahan Pabrik Asphalt Mixing Plant (AMP)	Kecil
11	CV Budi Makmur	Jl. Ambawang, RT.004, RW. 003, Desa/Kel.Sarang Halang, Kec.Pelaihari, Kab.Tanah Laut, Prov.Kalimantan Selatan, Sarang Halang, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Distributor Minyak Mentah,Distributor Minyak Goreng Kelapa Sawit,Distributor Minyak Goreng	Kecil
12	PR Dapur Mas Muflih	Komplek Wengga Pabahanan Jl. Orchid No. A 68, Pabahanan, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pengemasan Madu Cerena, Apis Dorsata dan Trigona,Produksi Susu Kurma	Kecil
13	PR MULIANA	Gg. Sabrina Komp. Langgeng Cipta Persada RT.007 RW.002, Nusa Indah, Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Produksi Kue Kering	Kecil
14	PR Fanesya Sasirangan	Ds. Banyu Irang Gang Rakat RT. 07/03, Banyu Irang, Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Kain Sasirangan	Kecil
15	PR Oemah Olahan Mbak Dyah	Jl. Kolonel Soepirman RT.07/02, Atu-atu, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Bandeng Presto	Kecil
16	PR HARYOTO	Sungai Jelai No. 65 RT.004/RW.002, Desa Sungai Jelai, Kec. Tambang Ulang, Sungai Jelai, Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Industri Makanan dan Masakan Olahan	Kecil
17	PR Almanah Sasirangan	Ds. Martadah Baru RT. 02/01, Martadah Baru, Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Kain Sasirangan dan turunannya	Kecil
18	PR Kebab Alfatih	Jl. Karangjawa No.9 Kel. Karang Taruna, Karang Taruna, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Kebab Daging Sapi	Kecil
19	PR Cemilan Bunda	Jl. Baleirejo RT. 19B, Angsau, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Aneka kue basah	Kecil
20	PR Berkah Amanah Decor	jln kihajar dewantara no 26, Angsau, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Furniture Keperluan Rumah Tangga dan Kantor	Kecil
21	PT Putra Kanca	DESA PULAU SARI, TAMBANG ULANG, KAB. TANAH LAUT, Pulau Sari, Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Jasa Konstruksi	Kecil
22	CV Anugerah Jaya	Jalan Perintis Raya No 145 RT 005 RW 002, Nusa Indah, Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pengolahan Air Minum Dalam Kemasan	Kecil
23	CV Multi Guna Teknik Tala	Jalan Rosela, Desa Ambungan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kode Pos 70815, Ambungan, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Industri Konsentrat Makanan Hewan,Industri Mesin Pertanian Dan Kehutanan,Reparasi Mesin untuk Keperluan Khusus,Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya,Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam,Reparasi Mobil,Industri Peralatan Pengontrolan dan	Kecil

No.	Nama Perusahaan	Alamat Pabrik	Bidang Usaha	Skala Usaha
			Perindustrian Listrik,Konstruksi Gedung Industri	
24	PR Winarsih	Martadah Baru, Martadah Baru, Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Kain Sasirangan Kombinasi Batik dan turunannya	Kecil
25	PR Sri Rahayu	Ds. Martadah Baru RT. 002 RW. 001, Martadah Baru, Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Kain Batik Motif Sasirangan (B@taringan),Kain Sasirangan,Kain Sasirangan Kombinasi Ringkel (Saringkel)	Kecil
26	PR Raudatul Jannah	Jl. A. Yani Gang Telaga Budi RT. 06 Kel. Angsau, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Angsau, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Risoles Frozen dan Siap Saji	Kecil
27	PR Joko Safaat Slamet	Jalan Pasar Hewan RT 7 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari, Sarang Halang, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Industri Produk Roti dan Kue	Kecil
28	PR Renaldy	Jalan Purnawirawan AMD Manunggal RT 003 RW 001, Angsau, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pengolahan Pentol dan Sempol	Kecil
29	PR Reni Mariana	Jl. Junjung Buih, Gg. Berkah RT.17, Sarang Halang, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Produk Daging Olahan DImsum, Gyoza, Risoles, Tahu Ayam	Kecil
30	PR Ainun Jariyah	Jl. Beramban Raya RT. 021/RW. 07, Pelaihari, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Industri Aneka Kue Kering	Kecil
31	PR Dwie Wahyuni	Martadah Baru RT.02 RW.01, Martadah Baru, Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Kain Sasirangan dan turunannya	Kecil
32	PR Rini Yulia Ningsih	Martadah Baru RT.10 RW.03, Martadah Baru, Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Kain Sasirangan Kombinasi Batik dan turunannya	Kecil
33	PR Siti Romlah	Martadah Baru RT.02 RW.01, Martadah Baru, Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Kain Sasirangan dan turunannya	Kecil
34	PR Khairunisa	Jl. Bina Ilmu RT. 02 RW. 01, Bajuin, Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Kain Sasirangan dan turunannya	Kecil
35	PR Srinatun	Jl. A. Yani. RT07. Dusun 03, Desa/Kelurahan Sungai Cuka, Kec. Kintap, Sungai Cuka, Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Kain Sasirangan,Produksi Kue Basah,Produksi Kue Kering,Produksi Makanan Olahan	Kecil
36	PR Hj. Siti Syarah	Jl. PDAM, Jorong, Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Kain Sasirangan dan turunannya	Kecil
37	PR Noormilasari	Jl. ILIR, Asam-Asam, Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Kain Sasirangan dan turunannya	Kecil
38	PR Ardawati	Jl. Sungai Tampang RT. 02 RW. 01, Tambang Ulang, Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Kain Sasirangan dan turunannya	Kecil
39	PR Hairiah	Jl. LIMO 1 RT. 02 RW. 01, Kurau Utara, Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Telur Asin	Kecil
40	PR Debi Arisanti	Jl. Mangga Besar RT. 09, Sarang Halang, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Kain Sasirangan dan turunannya	Kecil
41	PR Rohayat	Desa Tampang Dusun 1 RT. 01 RW. 01, Tampang, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Kain Sasirangan dan turunannya	Kecil
42	PR Jubaidah	Jl. Handil Sirang RT. 03 RW. 01, Handil Maluka, Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Produk Makanan Tambahan,Roti dan Kue,Ikan Asin	Kecil
43	PR Abdullah Hayat	Jl. Pemukiman 36, Simpang Empat Sungai Baru, Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Kain Sasirangan dan turunannya	Kecil
44	PR Rina	Jl. Pelabuhan Barat, Tanjung Dewa, Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Kerupuk	Kecil
45	PR Jumaidi	Desa Kali Besar, Kali Besar, Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Ikan Asin,Pembuatan Ikan Fermentasi (Pakasam)	Kecil

No.	Nama Perusahaan	Alamat Pabrik	Bidang Usaha	Skala Usaha
46	PR Misna Rizqiah	Ds. Sungai Bakau RT. 02 RW. 01, Sungai Bakau, Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Udang Kering	Kecil
47	PR Karmi	Desa Tambak Karya RT. 05 RW. 02, Tambak Karya, Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Kue Kering	Kecil
48	PR Suhartati	Desa Maluka Baulin RT. 05 RW. 01, Maluka Baulin, Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Kerupuk Udang	Kecil
49	PR Hamdah	Jl. Pembangunan RT. 02 RW. 01, Sungai Rasau, Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pengolahan Sirup Buah Mangrove,Rambai Tutuk,Dodol Buah Mangrove	Kecil
50	PR Marhamah	Ds. Sungai Rasau RT. 01 RW. 01, Sungai Rasau, Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Sirup Buah Mangrove	Kecil
51	PR Amelia Rizki Okmala Sari	Jl. Lumbus RT. 010 RW. 05, Gunung Makmur, Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Roti	Kecil
52	PR Ade Ratna Ningsih	Jl, Sido Rukun RT. 05 RW. 03, Bajuin, Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Rengginang	Kecil
53	PR Suhartin	Jl. Panglima Sudirman, Tirta Jaya, Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Aneka Keripik,Kue Kering,Sambal Kemasan,Kue Basah	Kecil
54	PR Siti Komsianah	Jl. Merdeka RT. 01/01, Tirta Jaya, Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Madu Mongso,Pembuatan Minuman Serbuk Rimpang,Pembuatan VCO,Keripik Tahu,Kacang Kribo dan Kacang Mete	Kecil
55	PR Mas Arif Biantoro	Jl. Matah II RT. 07/03, Karang Taruna, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Makanan Ringan Kacang Sacha Inchi,Pembuatan Minyak Kacang Sacha Inchi,Pemungutan Madu	Kecil
56	PR Widarningsih	Gang Harapan Maju RT. 05 RW. 02, Gunung Raja, Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Minuman Rimpang	Kecil
57	PR Firdaus Hari Laksana	Gunung Melati RT. 11 RW. 02, Gunung Melati, Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Kecap	Kecil
58	PR Sumani	Jl. Ibunda RT. 05 RW. 01, Tirta Jaya, Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Getuk Singkong	Kecil
59	PR Sayid Hasan	Jl. A. Yani RT. 04 RW. 02, Kandangan Lama, Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Gula Semut	Kecil
60	PR Suryono	Jl. Ki Hajar Dewantara, Angsau, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Garam Rujak	Kecil
61	PR Sri Norma Hadianti	Desa Kunyit RT. 02 RW. 01, Kunyit, Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Produk Kelapa Jelly	Kecil
62	PR Ita Purnamasari	Jl. Muara Asam Asam RT. 01 RW. 01, Muara Asam-Asam, Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Kerupuk Ikan	Kecil
63	PR Nining Eko Puji Lestari	JL.UNTUNG SUROPATI RT. 03/01 SEBAMBAN 5 BLOK D, Kebun Raya, Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Minuman Serbuk Rimpang	Kecil
64	PR Darti Sutini	Komplek Daffa Land No. 18 RT. 18 RW. 01, Atu-atu, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Minuman Rimpang Serbuk	Kecil
65	PR Nurwulan	Jl. Kebun Kopi RT. 11 RW. 04, Telaga langsat, Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Produksi Madu Lebah Cerena,Pembuatan Puding,Pembuatan Stik Sayur,Pembuatan Mie	Kecil
66	PR Saifuddin	Desa Durian Bungkuk RT 10 RW 04 Kec, Batu Ampar, Durian Bungkuk, Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Mesin Sesuai Pesanan	Kecil
67	PR Desimah	Dusun Banjar Sari RT. 10 RW. 02, Karang Rejo, Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Produk Fashion Berbahan Sasirangan,Pembuatan Busana	Kecil
68	PR Sugeng	ROMBONGAN 4, Sumber Makmur, Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Produksi Madu Kelulut/Trigona	Kecil

No.	Nama Perusahaan	Alamat Pabrik	Bidang Usaha	Skala Usaha
69	PR Fathol Jannah	Jl. A. Yani RT. 05 RW. 02, Kintap Kecil, Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Roti dan Kue	Kecil
70	PR Misna Yanti	Jl. Pariwisata RT. 16 Batakan, Batakan, Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pengolahan Kerupuk Ikan dan Udang	Kecil
71	PR Misru Minah	Jl. Pembangunan RT. 01 RW. 01, Sungai Rasau, Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Kerupuk	Kecil
72	PR Chalifah	Komp. Multi Madya B/34, Liang Anggang, Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Peyek dan Akar Pinang	Kecil
73	PR Hamdanah	JL. Raya Takisung, Desa Takisung, Takisung, Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Industri Pengolahan Amplang	Kecil
74	PR Jouny Stiawan	Jl. Balicak Subur RT. 08 RW. 03, Kandangan Lama, Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Alat Dapur Berbahan Kayu	Kecil
75	PR Agus Listyaningsih	Desa Martadah Baru RT. 09 RW. 03, Martadah Baru, Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Produk Fashion Sesuai Pesanan	Kecil
76	PR Katiman	Katunun RT. 03 RW. 03, Telaga, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pengolahan Kopi Liberika	Kecil
77	PR Wardatul Firdausi	Jl. Sejahtera RT,08 No.51, Atu-atu, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pengolahan Aneka Bakery	Kecil
78	PR Nur Sullehah	Jl. KH Dewantoro, Angsau, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Aneka Keripik	Kecil
79	PR Imam Wahyudi	Jl. Panembahan Senopati RT. 09A RW. 04, Bumi Jaya, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Nugget Jamur	Kecil
80	PR Nor Latipah, A.md	Jl. KH. Achmad Nawawi RT. 01/01, Karang Taruna, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Garam Berbumbu	Kecil
81	PR Mega Yusrina	Jl. Raya Takisung, Ranggang, Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Gula Semut	Kecil
82	PR Lasmiatun	Jl. Takisung, Ranggang, Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Bumbu Pecel	Kecil
83	PR Supian Hadi	Bingkulu RT. 02 RW. 01, Bingkulu, Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Kerajinan Lukisan Bakar	Kecil
84	PR Arif Munandar	Jl. Banjarmas RT. 07 RW. 02, Mekar Raya, Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Mebelair	Kecil
85	PR Saleha	Desa Handil Negera RT. 03 RW. 01, Handil Negara, Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Roti dan Kue	Kecil
86	PR Marsita Emaliasani	Jl. SOEPIRMAN RT. 04 RW. 02, Kunyit, Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Kain Sasirangan dan Turunannya	Kecil
87	PR Melda Rosalina	Desa Pulau Sari, Pulau Sari, Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Produk Snack Kacang,Pembuatan Produk Akar Pinang,Pembuatan Keripik	Kecil
88	PR Karsini	Jl. Atilam RT. 03 RW. 02, Kunyit, Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Rengginang	Kecil
89	PR Arniah	Ds. Tambak Karya RT. 04 RW. 02, Tambak Karya, Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Kerupuk Makaroni,Pembuatan Donat,Pembuatan Kue Basah	Kecil
90	PR Priyanti	Jl. H.M. Sarbini RT. 01 RW. 02, Batu Ampar, Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Penjahitan Pakaian	Kecil
91	PR Sulikah	Bingkulu RT. 01 RW. 01, Bingkulu, Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Stik Sayur	Kecil
92	PR Zida Amaludin	Sungai Riam RT. 12 RW. 05 Jl. Raya Batakan, Sungai Riam, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Unggas Frozen Siap Saji	Kecil
93	PR Sugiyanti	Katunun, Telaga, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Keripik Jamur	Kecil

No.	Nama Perusahaan	Alamat Pabrik	Bidang Usaha	Skala Usaha
94	PR Supatmi	Jl. A. Yani Km 3.5 No. 46 RT. 02 RW. 01, Pabahanan, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Minuman Rimpang Serbuk	Kecil
95	PR Supardi	Jl. Taruna Jaya RT. 12/04, Karang Taruna, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Keripik Jamur	Kecil
96	PR Muhammad Sabil Mubtadin	Desa Takisung RT. 11 RW. 04, Takisung, Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Kerupuk	Kecil
97	PR Yana Sripurwati	KOMPLEK MAHKOTA PANGGUNG BLOK. A RT 006B RW 002, Panggung, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	pengasapan ikan	Kecil
98	BHL Badan Hukum Selain PT Bumdesa Mandiri Sejahtera	Jl. Padalarak RT. 02 RW. 01, Guntung Besar, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Minuman Nira Aren,Pembuatan Gula Aren	Kecil
99	PR Tri Endang Supiasih	Jl. Taqwa RT. 10 RW. 04, Pabahanan, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Aneka Keripik	Kecil
100	PR Misbah	Jl. Gn. Tambuni RT. 07 RW. 02, Ranggang Dalam, Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Minuman Nira Aren	Kecil
101	PR Aminah	Jl. A. Tilam RT. 08 RW. 04, Pabahanan, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Aneka Keripik dan Kerupuk	Kecil
102	PR Bambang Eko Nurdiansyah	Gunung Melati RT.006/002, Gunung Melati, Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Produksi Aneka Keripik	Kecil
103	PR Seman Farizi	Jl. Pusaka RT.11, Kintapura, Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Kopi Bubuk,Kerajinan Kayu Ulin	Kecil
104	PR Ririn Wulandari	Jl. Harapan RT. 10/002, Tirta Jaya, Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Sambal	Kecil
105	PR Anang Eko Wahyudi	Jl. Raya Takisung RT. 010 RW. 012, Benua Lawas, Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Air Lahang	Kecil
106	PR Yayan Noveri	Perum Pesona Karang Taruna 2 Blok F8, Karang Taruna, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pempek Ikan	Kecil
107	PR Fahrianoor Ichsan	Jl. Desa RT.016, Gunung Makmur, Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Aneka Cemilan	Kecil
108	CV Mitra Resolution Group	Dusun 4 Desa Pulausari, Pulau Sari, Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Mesin Pemecah batu (Stone Cruser)	Kecil
109	PR Ahmad Yani	Jalan Rajawali Gagas Permai, Angsau, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pengemasan Minyak Goreng	Kecil
110	PT Perorangan Nurma Dahlia	JL. PANDALARAK RT. 02 RW. 01, Guntung Besar, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Manisan Kolang Kaling,Gula Semut Cair,Gula Semut Aren	Kecil
111	PR Hapsah	JL. HANDIL SIRANG RT 007 RW 002, Handil Maluka, Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Aneka Kue Tradisional	Kecil
112	PR Norhasobah	JL. A Yani Tambang Ulang Rt.02 Rw.01, Tambang Ulang, Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Keripik bawang dan keripik labu	Kecil
113	PR Yuyun Suyono	JL H.M. JAFERI ATU ATU NO 22, Atu-atu, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	BENGKEL LAS	Kecil
114	PR Nor Agni Ilmina	Takisung, Desa/Kelurahan Takisung, Takisung, Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	tas sasirangan,pakaian jadi	Kecil
115	PR Nurwati	Dusun Bumi Asih RT.04 RW.08, Bumi Asih, Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Kerajinan dan Souvenir,Percetakan Umum	Kecil
116	PR Arman	handil maluka, Handil Maluka, Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	kain sasirangan dan turunannya	Kecil
117	PT Kolaborasi Tiga Saudara	Jalan Cendrawasih, Angsau, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pengemasan Minyak Goreng	Kecil

No.	Nama Perusahaan	Alamat Pabrik	Bidang Usaha	Skala Usaha
118	PR Yurinda Elok	JL. Jendral Sudirman RT.02, Gunung Makmur, Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pengolahan Kue Basah	Kecil
119	PR Tri Handayani	Rombongan 4 RT.11 RW.05, Sumber Makmur, Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Penjahitan Pakaian Jadi	Kecil
120	PR Aliansyah	Jl.Desa RT.01 RW.01, Ranggang Dalam, Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Bakso Daging	Kecil
121	PR Padlianoor	Batilai RT.02 RW.01, Batilai, Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Kumpang Parang	Kecil
122	PR Bainah	Desa Tabanio Rt. 01, Tabanio, Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Kerupuk Ikan	Kecil
123	PR Saimun	Jl.Sentosa RT.01 RW.03, Banua lawas, Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pengolahan Pupuk Kompos	Kecil
124	PR Istiqomah	Jl. Jamal RT.02 RW.01, Telaga langsat, Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Roti Goreng	Kecil
125	PR Nurul Huda	Ranggang RT.01 RW. 01, Ranggang, Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Aneka Cake	Kecil
126	PR Rina	Jl. Teluk Pancur RT.001/RW.004, Tanjung Dewa, Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Produksi aneka kue basah	Kecil
127	PR Anita	Jl. Harapan RT.04 RW.01, Kandangan Baru, Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Kue Basah	Kecil
128	PR Salamah	Batu Tungku RT. 007 RW. 003, Batu Tungku, Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Kue Basah	Kecil
129	PR Irfai	Jl. Pendidikan RT. 002 RW. 001, Kandangan Lama, Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Gula Aren	Kecil
130	PR Wahyu Shelismilah	Dusun Bumi Asih RT. 04 RW. 08, Bumi Asih, Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Tape Ketan	Kecil
131	PR Paujan Abidin	Kandangan Lama RT. 009, Kandangan Lama, Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Fotocopy	Kecil
132	PR Siti Rohani	Dusun Banjar Sari RT. 11 RW. o2, Suka Ramah, Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Aneka Keripik	Kecil
133	PR Ela Ediana	Dusun Wonosari RT 011 RW 006, Batu Mulya, Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pengolahan Pempek,Pengolahan Aneka Keripik	Kecil
134	PR Jubaidah	Jl. Raya Kuringkit RT. 002 Dusun 1, Kuringkit, Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Pentol Daging	Kecil
135	PR Norhasanah	Sundawa RT. 007 RW. 005, Batu Mulya, Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Penjahitan Pakaian	Kecil
136	PR Happy Ika Setyawati	Dusun Banjar Sari RT. 11 RW. 02, Suka Ramah, Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Aneka Kue Basah	Kecil
137	PR Anis Widiawati	Dusun Bumi Asih RT.07 RW.08, Bumi Asih, Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Minuman Rimpang	Kecil
138	PR Kartasiah	Jl. Swadaya RT.07 RW.03, Padang Luas, Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Penjahit Pakaian	Kecil
139	PR Jaimah	Jl. Akasia RT. 003 RW. 002, Sarikandi, Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Pakaian	Kecil
140	PR Rukayah	Desa Handil Negara RT. 001 RW. 001, Handil Negara, Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Pakaian	Kecil
141	PR Soraya	JL.PAHLAWAN rt08 rw02, Kurau, Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	produksi aneka kue basah	Kecil
142	PR Awalludin Marifatulah	Tambak Sarinah RT. 004 RW. 002, Tambak Sarinah, Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Pakaian Jadi	Kecil

No.	Nama Perusahaan	Alamat Pabrik	Bidang Usaha	Skala Usaha
143	PR Khairiyah	Jalan Swadaya RT.2 RW.1, Padang Luas, Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pengolahan Ikan Asin	Kecil
144	PR Nilawati	sungai bakau rt.002 rw.001, Sungai Bakau, Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	kelapa jely	Kecil
145	PR Mariani	Desa Bawah Layung RT. 006 RW. 002, Bawah Layung, Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Aneka Gorengan	Kecil
146	PR Rusita Damayanti	Desa Padang Luas RT.003 RW.002, Padang Luas, Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pengolahan Keripik Pisang,Pengolahan Garam Rujak	Kecil
147	PR Muhammad Rasyid	Desa Tambak Karya RT. 001 RW. 001, Tambak Karya, Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Furniture dan Kusen	Kecil
148	PR Yanah	Kuringkit RT. 004 RW. 002, Kuringkit, Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Cilok Ayam	Kecil
149	PR Nurul Huda	Jl. Pahlawan RT. 10 RW. 02, Batakan, Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Kerupuk Ikan	Kecil
150	PT Penguin Rotamould Banjarmasin	Jl.Ahmad Yani KM.33, RT.003/RW.002, Liang Anggang, Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tangki Air	Kecil
151	PT Buana Manira Prakarsa	Jl. Liposo Transos, Sungai Riam, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	PERDAGANGAN BESAR LOGAM DAN BIJIH LOGAM,INDUSTRI BESI DAN BAJA DASAR (IRON AND STEEL MAKING)	Kecil
152	PR Nurhasanah	Jl. Kamaratih RT. 19 RW. 001 Desa Panggung, Panggung, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Serabi gulung	Kecil
153	PR Dwi Patfinder Rochman	Gunung Melati Rt. 11 Rw. 02, Gunung Melati, Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Produksi Kerajinan Kayu	Kecil
154	PR Sri Lestari	Jl. Desa Gunung Makmur RT.16, RW.03, Gunung Makmur, Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Produksi Aneka Keripik	Kecil
155	PR Fadhilla	Jl Sungai Tampang, Tambang Ulang, Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Produk Eneka Es krim	Kecil
156	PR Maulidatun Nisa	Pondok Indah Pelaihari III Blok. B No.07, Panggung, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Produksi Keripik Singkong	Kecil
157	PR Paulyn K.i.palandeng	Jl. P. Antasari RT.06 RW.02, Kebun Raya, Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Produksi Sasirangan	Kecil
158	PR Riyanah	Jl. A Yani Gg Antesa Angsau Pelaihari, Angsau, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Minuman Herbal Cair,Minuman Segar Rimpang,Meubeller	Kecil
159	PR Mirayanti	Jl. Raya Alur RT. 03 RW. 01, Alur, Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Kain Sasirangan dan Turunannya	Kecil
160	PR Salmiah	Gunung Raja RT.004 RW.002, Gunung Raja, Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Sasirangan,Penjualan Sasirangan	Kecil
161	PR Nurma	Jl. A. Yani Km. 46 RT. 004 RW. 002, Pulau Sari, Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Roti dan Kue	Kecil
162	PR Isnaniah	Jl. Rantau Bujur RT. 02 RW. 01, Kayu Abang, Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Pakasam Ikan	Kecil
163	PR Susi Ayuni	Jl. Rantau Bujur RT. 03 RW. 01, Kayu Abang, Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Cake	Kecil
164	PR Hariyono	Desa Martadah Baru RT. 06 RW.02, Martadah Baru, Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Tahu	Kecil

No.	Nama Perusahaan	Alamat Pabrik	Bidang Usaha	Skala Usaha
165	PR Misrawati	Jl. Mekar Sari I RT. 04 RW.02, Bingkulu, Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Telur Asin	Kecil
166	PR Salamiah	Sungai Pinang RT. 2 RW. 1, Sungai Pinang, Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Aneka Kue Basah	Kecil
167	PR Nor Hikmah	Jl. Mekar Sari II, Bingkulu, Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Kerupuk Singkong	Kecil
168	PR Naylia Nabilah	Pulau Sari RT. 002 RW. 001, Pulau Sari, Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Donat dan Roti	Kecil
169	PR Gusti Siti Auliani	Komplek Citra Indah Permai Jl. Ketumbar Blok B No. 19 RT 5 RW 2, Atu-atu, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Usaha Mikro, Kecil dan menengah	Kecil
170	PR Siti Nurbainah	Komp. Permata Jingga Jl. Merah Delima, Karang Taruna, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Brownies,Kue Putri Salju,Kue Chocochips,Bolu Original,Bolu Pisang,Kue Nastar,Bolu Basah Pandan,Kue Kastengel,Bolu Basah Vanila,Kue Semprit	Kecil
171	PR Sofia	Desa Gunung Mas RT. 07 RW. 03, Gunung Mas, Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Lupis dan Cenil	Kecil
172	PR Titik Umy Fadhilah	Tajau Mulya RT. 10 RW. 03, Tajau Mulya, Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Kerupuk Gandum	Kecil
173	PR Nur Hayati	Jl. H.M. Sarbani RT. 06 RW. 03, Damar Lima, Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Garam Berbumbu,Pembuatan Kerupuk Kembang Goyang	Kecil
174	PR Ana Fitria Ningsih	Desa Tajau Pecah RT. 11 RW. 03, Tajau Mulya, Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Pentol Daging	Kecil
175	PR Nur Laila Hayati	JL. A. YANI RT.005 RW.001, Desa/Kelurahan Panggung, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos: 70815, Panggung, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Roti dan Kue,Perdagangan roti dan kue	Kecil
176	PR Nita Narsih	Dusun Sido Mulyo, Durian Bungkuk, Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Bolu dan Cake Ulang Tahun	Kecil
177	PR Tati Veniati	Ambawang RT.03 Dusun Asrikaton, Ambawang, Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Penjahitan Pakaian	Kecil
178	PR Yulia Purnama Rukmi	Jl. Merdeka RT. 03 RW. 01, Tirta Jaya, Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Yoghurt dan Kefir,pangan,Pembuatan Minuman Serbuk Rimpang,Pembuatan VCO	Kecil
179	PR Alfin Syahrinal Adha	Komplek Citra Indah Permai Jl. Ketumbar Blok B no. 19, Atu-atu, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Brownies,Putri Keraton	Kecil
180	PR Nur Auliani	Jl. Datu Insad, Angsau, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Roti dan kue	Kecil
181	PR Muhammad Marzuki	Jl. Raya RT.06 RW.03, Handil Babirik, Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Sasirangan	Kecil
182	PR Aminah	Ds. Sungai Rasau RT.002 RW.001, Sungai Rasau, Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Produksi Terasi Udang	Kecil
183	CV jaya Berkah Rezeki	JALAN AYANI DESA JILATAN, Jilatan, Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	pabrik crusher batu gunung	Kecil
184	PR Sirajuddin	Komplek Gagas Permai Jalan Putar No.100 RT.23 RW.06, Angsau, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Kerajinan Kulit dan Tas,Makanan Khusus,Albumin Ikan Gabus,Kue Basah,Bandeng Presto	Kecil
185	PR Ramlah	Jl. A. Yani RT.05, Kintap Kecil, Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Kue Kering,Sasirangan,Telur asin	Kecil
186	PR Jamilah	Jl. Anggrek RT.003 RW.002, Asam Jaya, Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Sasirangan	Kecil

No.	Nama Perusahaan	Alamat Pabrik	Bidang Usaha	Skala Usaha
187	CV Bumi Nusantara Food	Jalan Perintis Raya, Nusa Indah, Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Penggilingan dan pengemasan beras	Kecil
188	PR Nurhasanah	Jl. Melati RT.003 RW.002, Asam Jaya, Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Kerupuk Ketumbar	Kecil
189	PR Halasan Indri Meita Napitupulu	Blok III No 1, Karang Taruna, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Kue Kering & cake	Kecil
190	PT Air Telaga Surya	Jl. Datu Insad RT.004 RW.002, Bentok Kampung, Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	ES KRISTAL,AIR MINUM DALAM KEMASAN	Kecil
191	PR Siti	Jl. Pelabuhan Barat RT.005/002, Tanjung Dewa, Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Produksi Kerupuk Udang dan Ikan	Kecil
192	PR Riky Purnamasari	Jl. Lambenteng Desa Ujung Baru RT.005/002, Ujung Baru, Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Produksi Aneka Kue Basah dan Gorengan,Produksi Kue Basah dan Gorengan	Kecil
193	PR Ananda Linda	Komp. Permata Jingga I Blok P II Jl. Yakut No. 17 Matah II, Karang Taruna, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Roti dan kue	Kecil
194	PR Rusmina	Desa Bawah Layung RT.005 RW.002, Bawah Layung, Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Produksi Kerupuk Udang	Kecil
195	PR Agus Ariadi	Desa Tambak Sarinah, Tambak Sarinah, Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Produksi Furnitur dan Teralis,Bengkel Mobil	Kecil
196	PR Didik Winarko	Jl. Rantau Bujur, Sarikandi, Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Produksi Gorengan,Produksi Keripik Usus dan Rempeyek,Produksi Makanan Lainnya	Kecil
197	PR Helda	Jl. Pelabuhan Barat RT.005/002, Tanjung Dewa, Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Produksi Kerupuk Ikan	Kecil
198	PR Siti Khomariyah	Jalan H.M. Sarbini, Batalang, Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Produksi Aneka Keripik	Kecil
199	PR Norliana	Jl. Pelabuhan RT.003 RW.001, Tanjung Dewa, Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Produksi Kerupuk Ikan	Kecil
200	PR Musmulyani	Jl. Melati RT.006 RW.003, Kintap Kecil, Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Produksi Sasirangan	Kecil
201	PT Gurihcloud Sukses Perkasa	Jl. KH. Mansyur RT.17 RW.06, Angsau, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	AKTIVITAS PENGEPAKAN MINYAK GORENG SAWIT MINYAKITA,INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA SAWIT	Kecil
202	PT Navyta Sukses Mandiri	JL.Pusara No.35 RT.03 RW.01, Pelaihari, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pengemasan Minyak Goreng Sawit,Minyak Goreng Sawit Kemasan	Kecil
203	PT Arrizalil Hasan Sejahtera	Jl. A. Yani KM 35,5, Nusa Indah, Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Air Minum Dalam Kemasan	Kecil
204	PR Siti Muthahharoh	Jl. Sebelas Maret RT 009 RW 002, Alur, Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Keripik Tempe	Kecil
205	PR Mahrita	Jl. Bagio No. 22, Alur, Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Telur Asin	Kecil
206	PR Atmawati	Jl. Cempaka Putih RT. 001 RW. 001, Batalang, Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Kue Basah	Kecil
207	PR Sri Rahayu	JL. Rajawali 2 RT.002/RW.001, Asam Jaya, Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Kue Kering	Kecil
208	PR Erniwati	Jl. Mesjid Al Abror RT 002 RW 001, Jorong, Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Kue Basah	Kecil
209	PR Siti Muslikhatun	Jl. P. Diponegoro RT.006/RW.003, Asam Jaya, Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Kue Ultah, Aneka Bolu, Aneka Kue Kering	Kecil
210	PR Haderiah	Desa Muara Asam Asam, Muara Asam-Asam, Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Kerupuk Ikan	Kecil
211	PR Rabiatul Adawiyah	Jl. Tanjung Perak RT.007/RW.003, Jorong, Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Kue Basah	Kecil

No.	Nama Perusahaan	Alamat Pabrik	Bidang Usaha	Skala Usaha
212	PR Parti	Jl. Mesjid Al Abror RT.2 RW.1, Jorong, Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Kue Kering	Kecil
213	PR Ripawati	Kait Kait Baru Rt 10 Rw 05, Kait-kait Baru, Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Jahe Merah Instan	Kecil
214	PR Munfaridah Khoiriyati	Bluru RT.07 RW.03, Bluru, Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Pembuatan Sasirangan	Kecil
215	PR Suci Setioningsih	Bingkulu RT.001/003, Bingkulu, Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Akar Pinang,Kembang Goyang,Keripik Pisang,Kacang Telor	Kecil
216	PR Hamidah	Jl. Simpang Keramat RT 008 RW 003, Takisung, Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Kerupuk Ikan dan Udang	Kecil
217	PR Restu Aulia Khairunnisa	Jl. Taruna Jaya RT.12 RW.04 Kel. Karang Taruna Kab. Tanah Laut, Karang Taruna, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Keripik Jamur	Kecil
218	PR Khairunnisa	Komp. Wengga Pabahanan Blok A Raya No.40 RT.011 RW.005, Pabahanan, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Putri Selat,Talam Durian,Lumpur Labu,Amparan Tatak,Bolu Jadul,Putri Keraton,Bolu Kelapa,Sarimoka Lakatan,Brownies Pisang,Lapis Sari India	Kecil
219	PR Winda Fransisca Panca Rini	Jl. Orchid Blok A Komplek Perumahan Wengga Pabahanan, Pabahanan, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Cum Cum,Aneka Kue Basah,Bolen,Aneka Bolu,Strudel	Kecil
220	PR Siti Aminah	Jl. Tarini RT.07 RW.02, Martadah Baru, Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Emping Jagung,Marning Jagung	Kecil
221	PR Ika Riani	Jl. Raya Alur RT.003 RW.001, Alur, Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Keripik Tempe	Kecil
222	PR Hamidah	Kait-Kait Baru RT.010/RW.005, Kait-kait Baru, Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Akar Pinang	Kecil
223	PR Syarifah Syaidah	Batu Tungku RT.001/RW.001, Batu Tungku, Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Kacang Sambal	Kecil
224	PR Multi Hartati	Jl. Pelabuhan RT 006 RW 002, Tanjung Dewa, Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Dodol Sawo	Kecil
225	PR Laila Rohana	Jl. Wisata Air Terjun Bajuin RT.007 RW.003, Ketapang, Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Aneka Gorengan	Kecil
226	PR Fima Ani Husmaul Husnayati	Kantor Desa Sungai Bakar Jalan Air Terjun RT 02 Dusun 1 Desa Sungai Bakar, Sungai Bakar, Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tape Ketan	Kecil
227	PR Siti Khadijah	Jl. Soepirman RT 001 RW 001, Kunyit, Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Gorengan dan Pastel	Kecil
228	PR Nur Kholifah	Jl. Ketapang RT.001 RW.001, Ketapang, Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Aneka Gorengan,Aneka Bolu	Kecil
229	PR Titi Sunarti	Desa Tanjung 1B, Tanjung, Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Keripik Tempe	Kecil
230	PR Sri Wijiastuti	Jl. Transmigrasi RT.006/RW.002, Sungai Bakar, Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Peyek	Kecil
231	PR Yuliyana	Jl Soepirman RT 003 RW 002, Kunyit, Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Keripik Pisang	Kecil
232	PR Ainah	Jl. Pelabuhan Timur RT.007 RW.003, Tanjung Dewa, Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Amplang Ikan	Kecil
233	BUT Bumdesa Usaha Bersama	Jalan Sumber Jaya RT 02 RW 02 Desa Sumber Jaya, Sumber Jaya, Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Suplay air minum,Suplay Air Bersih	Kecil
234	PR Jahrah	Jl. Mangga Besar Komplek Safira Land No. B2 RT 018 RW005, Pelaihari, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Industri roti, kue, dan sejenisnya	Kecil
235	CV Aierlangga Jaya Mandiri	Jalan Sangkuriang, Sumber Jaya, Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	DEPO AIR MINUM ISI ULANG	Kecil

No.	Nama Perusahaan	Alamat Pabrik	Bidang Usaha	Skala Usaha
236	PT Anugrah Oleo Utama	Desa Banyu Irang No. 70, Banyu Irang, Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Industri Fatty Acid dan Glycerine	Menengah
237	CV Anugerah Putra Jiwa	jln Lok Batu, RT 13, Karang Taruna, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	penggaalian batu hias dan batu bangunan,stone crusher,penyewaan alat konstruksi dengan operator,industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga, pajangan, dan bahan bangunan,pemasangan rangka dan atap/roof covering,Penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya	Kecil
238	PR Istiqomah	KOMP. PURI ARCHA HAMPARAN DEPAN TAMAN RTH DESA ATU ATU, Atu-atu, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Industri Produk Roti dan Kue	Kecil
239	PR Ferry	JL. A. SYAIRANI, Sarang Halang, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Industri Air Minum Isi Ulang,Air Minum isi ulang	Kecil
240	PR Noorliyana	Pelaihari, RT 09 RW 03, Pelaihari, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Produk Bakery	Kecil

Faktor Pendorong/Keberhasilan :

1. Penggunaan tehnologi dan digitalisasi yang memungkinkan IKM memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi, dan menaikkan jumlah pesanan.
2. Peningkatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan kewirausahaan, manajemen bisnis, dan keahlian teknis (skill) tenaga kerja meningkatkan produktivitas dan kualitas produk, yang membantu IKM "naik kelas".
3. Melakukan Inovasi Produk dan Diversifikasi sehingga mampu meningkatkan Kemampuan IKM untuk berinovasi, menciptakan produk baru.
4. Melakukan promosi produk-produk IKM baik didalam negeri maupun diluar negeri.
5. Memberikan fasilitasi perizinan, fasilitasi hala, fasilitasi merk dan memberi bantuan sarana dan prasarana (infrastruktur), serta fasilitas pameran/bazar membantu IKM meningkatkan kapasitas produksinya.

Faktor Penghambat/Kegagalan :

1. Banyak IKM sulit berkembang karena modal terbatas untuk ekspansi, sulit memenuhi persyaratan administratif perbankan, atau agunan yang tidak mencukupi.
2. Lemahnya Pemasaran dan Branding: Kurangnya strategi pemasaran yang matang, *branding* yang lemah, serta keterbatasan anggaran untuk *marketing* membuat produk IKM sulit bersaing, terutama dengan produk impor.

3. Kualitas SDM dan Manajemen Rendah: Kurangnya tenaga ahli, manajemen usaha yang masih sambilan, serta kemampuan pembukuan yang minim menghambat IKM untuk naik kelas.
4. Tekanan Produk Impor: Serbuan produk impor yang lebih murah dan variatif seringkali menggerus pangsa pasar IKM lokal.
5. Masih lemahnya administrasi/Legalitas IKM dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan Hibah peralatan.
6. Pemenuhan Infrastruktur air baku dan pelabuhan di Kawasan Industri.

Rencana Aksi :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi IKM melalui pelatihan-pelatihan IKM, pelatihan-pelatihan pengolahan produk-produk dengan bahan-bahan lokal.
2. Membantu memberikan fasilitasi perizinan, fasilitasi hala, fasilitasi merk dan memberi bantuan sarana dan prasarana industri.
3. Membantu melakukan promosi produk-produk IKM, baik melalui pameran, bazar atau pasar murah, promosi juga dilakukan tidak hanya didalam negeri/local tap sampai keluar negeri.
4. Menfasilitasi IKM dalam pengemasan produk-produknya melalui rumah kemasan.
5. Melakukan peningkatan sarana atau fasilitas dirumah kemasan sehingga dapat memaksimalkan pemberian pelayanan kepada IKM.
6. Melakukan pengawasan dan monitoring kepada IKM.

c. Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum (Pariwisata)

Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum (Pariwisata) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebesar 1,64 persen. Jika dibandingkan dengan target 1,5 telah tercapai sebesar 109,33 persen. Dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu 1,9 telah tercapai 86,31 persen.

Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan salah satu kategori lapangan usaha dari 17 kategori lapangan usaha yang ada pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Angka Pertumbuhan pada Sektor

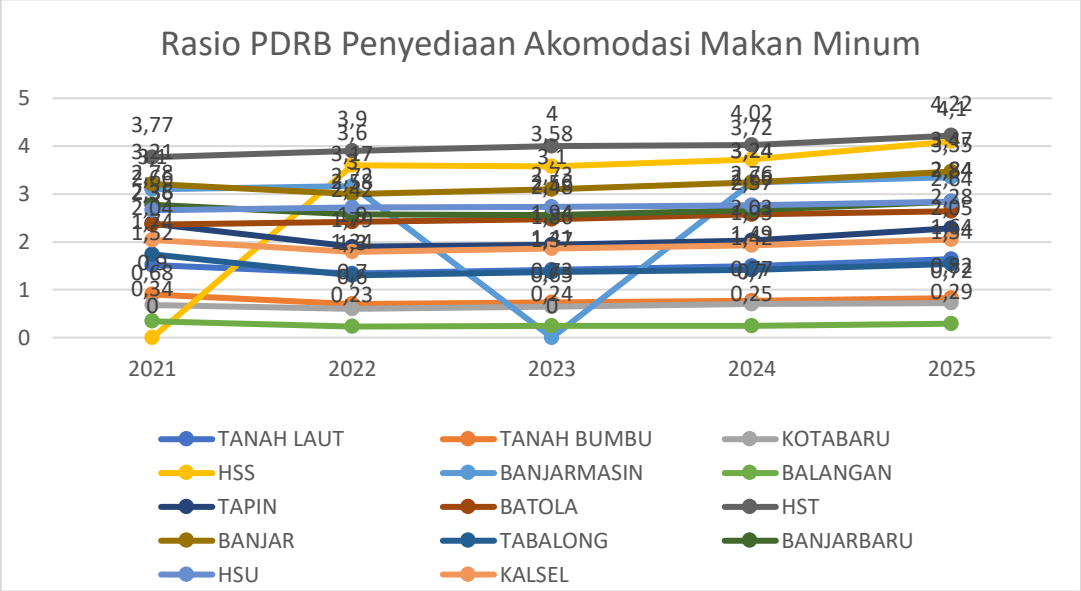
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum didapatkan dari perubahan Nilai Tambah Bruto (NTB) kategori lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dari satu tahun ke tahun berikutnya.

Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan dalam kategori ini sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.

Kategori penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan kategori yang erat kaitannya dengan sektor pariwisata. Dalam PDRB tidak ada kategori khusus yang menghitung sektor pariwisata karena outputnya yang tersebar ke banyak kategori lain, sehingga digunakan pendekatan dengan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum karena merupakan sektor yang memiliki dampak terbesar dalam pariwisata.

Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan salah satu sektor yang menjadi sumber perekonomian bagi setiap daerah Kabupaten/Kota se-Kalsel. Grafik 3.5.6 menunjukkan gambaran pertumbuhan kategori tersebut pada masing-masing kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, Provinsi dan Nasional Tahun 2021-2025.

Grafik 3.5.6
Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum (Pariwisata) tahun 2021-2025



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

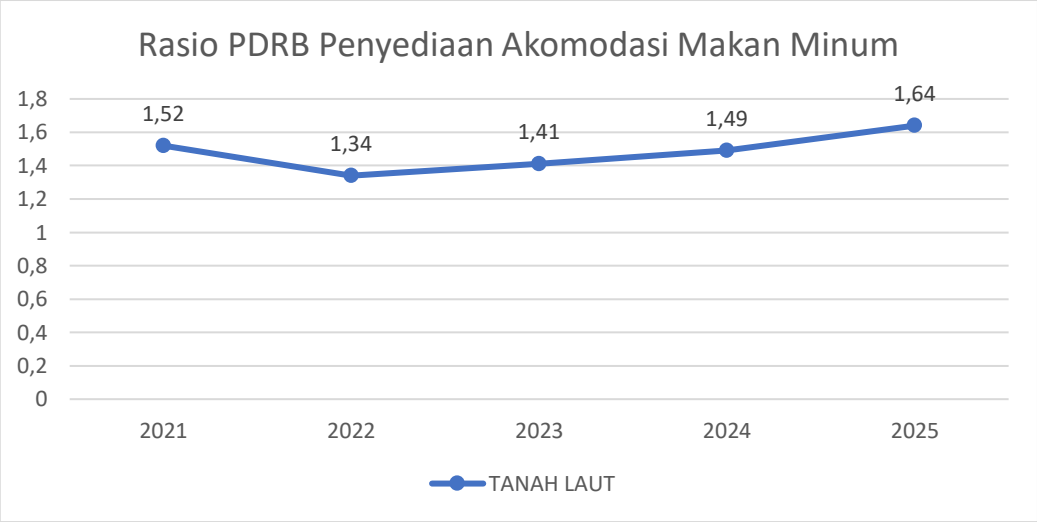
Tabel 3.5.21
Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum (Pariwisata) tahun 2021-2025

Kab/Kota	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
HST	3.77	3.9	4	4.02
HSS	3,73	3.6	3.58	3.72
Banjarmasin	3.1	3.17	3,16	3.24
Banjar	3.21	3	3.1	3.24
HSU	2.66	2.72	2.73	2.76
Banjarbaru	2.78	2.58	2.56	2.66
Batola	2.36	2.42	2.48	2.57
Tapin	2.38	1.9	1.94	2.03
Kalsel	2.04	1.79	1.86	1.93
Tanah Laut	1.52	1.34	1.41	1.49
Tabalong	1.74	1.3	1.37	1.42
Tanah Bumbu	0.9	0.7	0.73	0.77
Kotabaru	0.68	0.6	0.65	0.7
Balangan	0.34	0.23	0.24	0.25

Dari grafik di atas, seluruh Kabupaten/Kota se-Kalsel mengalami pertumbuhan yang positif pada Rasio sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, terdapat beberapa kabupaten/kota yang mengalami perlambatan

pertumbuhan dan beberapa yang mengalami percepatan pertumbuhan. Kabupaten Tanah Laut sendiri mengalami percepatan pertumbuhan dengan nilai pertumbuhan 1,64 persen pada Tahun 2025 dan berada di bawah rasio provinsi Kalimantan Selatan yang sebesar 2,05 persen.

Grafik 3.5.7
Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum (Pariwisata) Kabupaten Tanah Laut 2021-2025



Sumber : BPS Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan grafik di atas, pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum Kabupaten Tanah Laut cukup fluktuatif dari tahun ke tahun. Pertumbuhan sektor ini sempat terkontraksi pada tahun 2022 dengan nilai 1,34 persen namun kembali tumbuh perlahan sejak tahun 2023 dengan nilai 1,41 persen. Hingga pada tahun 2024 dengan nilai 1,49 persen dan tahun 2025 dengan nilai 1,64 persen. Adapun dari sisi distribusi atau peranannya terhadap total PDRB, sektor ini mengalami juga cukup fluktuatif selama beberapa tahun terakhir sebagaimana pada Tabel 3.5.19 berikut.

Tabel 3.5.22
Peranan Lapangan Usaha PDRB sektor pariwisata (akomodasi dan makan minum) ,(Persen), 2021-2025

No	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accomodation & food Service Activities*					
	a. Distribusi/*Distribution*	1,52	1,34	1,41	1,49	1,64
	b. Laju Pertumbuhan/*Growth*	2,29	6,54	8,85	7,55	12,38
	c. Laju Implisit/*Growth Rate of Implicit Price Index*	2,67	2,74	2,49	3,66	4,58

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Laut

Dari tabel di atas, distribusi atau peranan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap total PDRB dari tahun ke tahun cukup fluktuatif. Meski sempat turun secara peranan pada Tahun 2022, sektor ini mampu kembali meningkat peranannya pada tahun 2023 dan 2024. Dari sisi pertumbuhan maupun laju implisit sektor ini juga masih tumbuh positif yang mengindikasikan bahwa sektor ini masih terus berkembang dari tahun ke tahun. Meski belum menjadi sektor unggulan dalam perekonomian di Kabupaten Tanah Laut, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terus berusaha untuk meningkatkan potensi sektor ini agar bisa ditingkatkan lagi.

Berikut data jumlah pengunjung pada objek pariwisata di Kabupaten Tanah Laut tahun 2025.

NO	NAMA OBJEK WISATA	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	2024	2025
	Dikelola Pemda (Dinas Pariwisata)				
1.	Gunung Kayangan	Desa Ambungan	Pelaihari	0	0
2.	Air Terjun Bajuin	Desa Sungai Bakar	Bajuin	19,359	12,467
3.	Taman Mina Tirta	Kelurahan Angsau	Pelaihari	1,694	1,300
	- Orchid	Kelurahan Angsau	Pelaihari	920	685
	- Hutan Kota	Kelurahan Angsau	Pelaihari	866	670
4.	Pantai Takisung	Desa Takisung	Takisung	24,040	19,960
5.	Pantai Batakan Baru	Desa Batakan	Panyipatan	144,600	159,000
6.	Pantai Swarangan	Desa Swarangan	Jorong	16,900	3,700
7.	Pantai Batu Lima	Desa Kuala Tambangan	Takisung	0	0
	Dikelola Oleh Masyarakat/Desa				
8.	Pantai Kintap	Desa Muara Kintap	Kintap	1,200	11,700
9.	Pantai Cemara Satu	Desa Muara Kintap	Kintap	2,950	2,430
10.	Pantai Cemara Dua	Desa Muara Kintap	Kintap	2,650	2,100
11.	Pantai Tanjung Dewa	Desa Tanjung Dewa	Panyipatan	45,020	52,150
12.	Pantai R.Piungan	Desa Asam Jaya	Jorong	0	0
13.	Pulau Datu	Desa Tanjung Dewa	Panyipatan	25,410	7,270
14.	Kerbau Rawa	Desa Benua Raya	Bati-bati	2,765	255
15.	Mangrove Pagatan Besar	Desa Takisung	Takisung	2,110	1,430

NO	NAMA OBJEK WISATA	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	2024	2025
16.	Gunung Birah	Desa Kandangan Lama	Panyipatan	28,750	18,000
17.	Dewa Katar	Desa Telaga	Pelaihari	1,584	630
18.	Surai Bekantan Panjaratan	Desa Panjaratan	Pelaihari	1,842	733
19.	Wisata Mahuni	Desa Padang	Bati-bati	18,020	3,200
	Dikelola Oleh Pribadi				
20.	Pantai Karindangan	Desa Pagatan Besar	Takisung	19,300	7,080
21.	Pantai THR	Desa Pagatan Besar	Takisung	18,000	15,320
22.	Pantai Turki	Desa Swarangan	Jorong	13,900	33,398
23.	Pantai Asmara	Desa Muara Asam-Asam	Jorong	11,910	11,450
24.	Pantai Tabunio	Desa Tabunio	Takisung	12,740	12,000
25.	Bukit Timah	Desa Tanjung Dewa	Panyipatan	93,750	117,140
26.	Taman Permana	Desa Telaga	Pelaihari	57,300	52,550
27.	Pantai Boerneo Beach	Jorong	Jorong	41,205	37,355
TOTAL JUMLAH				**400,406**	**583,973**

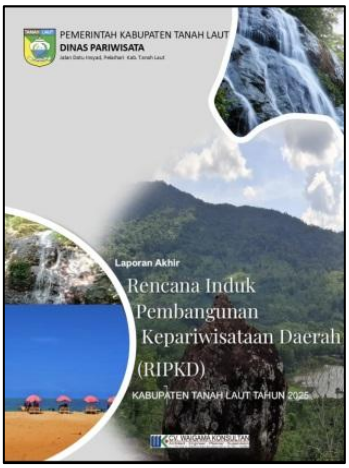
Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan sebagai berikut:

a. Peningkatan Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan

1. Perancangan dan perencanaan pengembangan daya Tarik wisata unggulan

   Kegiatan ini berupa pembuatan Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik wisata Unggulan Kabupaten/Kota yaitu :

   • Pembuatan dokumen RIPKD



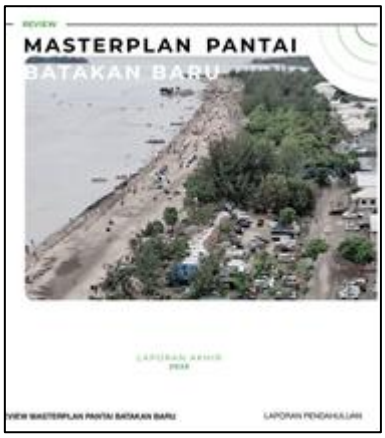
• Kajian geopak meratus pulau datu Desa Tanjung dewa



• Masterplan Gunung Kayangan



• Masterplan Batakan Baru



2. Monitoring dan evaluasi pengelolaan daya Tarik wisata

a) Objek Wisata yang dikelola Pemerintah

Jumlah Objek Wisata yang dikelola Pemerintah. Pada tahun 2025 jumlah objek wisata yang dikelola oleh pemerintah kabupaten Tanah Laut sebanyak 7 objek yang terdiri dari tiga objek penghasil

pendapatan asli daerah dan 4 objek yang tidak ada pendapatan asli daerah.

Jumlah Kunjungan Wisatawan yang di kelola Pemerintah sampai dengan Bulan September Tahun 2025 sebanyak 171.665 Orang.

Adapun objek wisata adalah sebagai berikut :

- Obyek Wisata Gunung Kayangan

  Gunung Kayangan Adalah salah satu objek wisata andalan di Kabupaten Tanah Laut. Gunung Kayangan terletak di Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari, kurang lebih 6 km dari kota Pelaihari dengan Luas 17 Ha. Dari lokasi ini bisa melihat jelas hamparan kebun sawit yang menghijau dan bisa melihat laut biru dikejauhan. Di Gunung Kayangan juga banyak terdapat monyet yang cukup jinak dan bisa diajak bermain dengan para pengunjung.

- Obyek Wisata Taman Mina Tirta

  Taman Mina Tirta terletak ditengah kota Pelaihari Dengan Luas1 Ha. Tempatnya yang bersih, nyaman, fasilitas yang lengkap dan mudah dijangkau menjadikannya favorit masyarakat Pelaihari dan sekitarnya. Di Taman ini banyak sekali kegiatan yang dilakukan, selain sekedar duduk santai dan bercengkerama bersama keluarga masyarakt juga bisa menikmati sepeda air yang terdapat disana.

- Obyek Wisata Air Terjun Bajuin

  Air terjun Bajuin terletak di kecamatan Bajuin berjarak kurang lebih 10 km dari Kota Pelaihari dengan Luas 20 Ha. Air terjun Bajuin memiliki panorama yang sangat indah dan eksotik. Udara disekitarnya juga sangat sejuk karena suasana alamnya masih sangat asli dan terjadi dan masih banyak ditemui anggrek spesies endemik meratus disekitarnya.

  Keasrian alamnya dengan panorama pegunungan dan pepohonan yang menghijau berpadu dengan indahnya air terjun.

- Obyek Wisata Pantai Takisung

Pantai Takisung terletak di Kecamatan Takisung dengan jarak tempuh sekitar 22 KM dari Kota Pelaihari dengan luas 4 Ha.

Selain pemandangan yang indah di Pantai tersebut para pengunjung juga dapat menikmati fasilitas banana boat, permainan ATV, penginapan dan aneka kuliner yang dijual oleh pedagang di lokasi tersebut. Pantai Takisung juga menjadi lokasi penyelenggaraan Festival Layang-layang yang telah menjadi event tahunan Kabupaten Tanah Laut.

- Obyek Wisata Pantai Batu Lima

  Pantai Batu Lima berada di Desa Kuala Tambangan Kecamatan Takisung sekitar 35 km dari kota Pelaihari. Kawasan pantai ini cukup luas sekitar 70 HA, dengan fasilitas Cottage yang bisa di sewa sebanyak 18 buah dan di lengkapi dengan taman bermain anak - anak serta terdapat juga Shelter untuk tempat bersantai di tepi pantai dengan pemandangan Batu sebanyak Lima Buah di bibir pantai sebagai sebuah legenda.

- Obyek Wisata Pantai Swarangan

  Pantai Swarangan terletak di Desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut. Suasana yang sangat tenang di pantai ini sangat cocok bagi anda yang ingin menikmati pantai secara private. Pantai Swarangan menawarkan pemandangan yang indah dan tidak kalah dibandingkan dengan pantai lainnya.

- Obyek Wisata Pantai Batakan Baru

  Pantai Batakan berada di Desa Batakan Kecamatan Panyipatan dengan jarak sekitar 40 km dari kota Pelaihari. Pantai yang panjang dan landau membuat para pengunjung leluasa melakukan aktifitas disana. Di Pantai Batakan jua terdapat beragam fasilitas untuk memudakan para pengunjung seperti kamar mandi, toilet, beragam permainan seperti banana boat, ATV, dll.

b) Objek Wisata yang dikelola Swasta

Obyek Wisata yang dikelola Swasta di Kabupaten Tanah Laut terdiri dari 5 Obyek Wisata Buatan, 14 Obyek Wisata Alami dan 1 Obyek Wisata Religi.

Jumlah Pengunjung Obyek Wisata yang dikelola swasta sampai dengan Bulan September sebanyak 304.035 Orang.

Adapun objek wisata adalah sebagai berikut :

- Obyek Wisata Pantai Tanjung Dewa

  Pantai Tanjung Dewa berlokasi di Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan. Pantai Tanjung Dewa atau yang lebih dikenal masyarakat sekitar dengan nama Pantai Labuan adalah salah satu pantai yang unik dan memiliki panorama yang sangat indah. Di Pantai ini juga banyak terdapat batu yang sangat cocok dijadikan untuk spot foto. Di lokasi ini juga menjadi titik penyeberangan untuk wisata religi ke Pulau Datu.

- Obyek Wisata Susur Sungai Panjaratan

  Wisata Susur Sungai Paniaratan sangat dianjurkan bagi anda yang masih ingin menikmati alam dengan sara "kelotok" atau "sampan" dan ingin melihat secara langsung bekantan di habitat aslinya. Bekantan atau dalam nama ilmiahnya Nasalis Larvatus adalah jenis monyet berhidung panjang dengan rambut berwarna coklat kemerahan dan merupakan satu dari dua spesies dalam genus tunggal monyet Nasalis. Apabila anda ingit melihat dan bercengkerama langsung dengan para bekantan datanglah pada pagi hari antara pukul 06.00 s.s 07.00 atau sore hari pukul 17.00 sd 18.00 karena bekantan ini terkenal sangat pemalu sehingga jika ingin mendapatkan momen yang pas datanglah pada waktu yang ditentukan Dan Juga Merupakan Kawasan Ekonomi Esensial dengan Luasan 25 Ha.

- Obyek Wisata Gunung Birah

  Gunung Birah terletak di Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan. Pemandangan dari puncak Gunung Birah sangat spektakuler pengunjung bisa melihat secara langsung perpaduan panorama pegunungan dan panorama pantai yang indah. Udara yang sangat sejuk dan nyaman terasa apabila kita berada di lokasi puncak Gunung Birah, dengan area yang luas menjadikan tempat ini sering dijadikan sebagai lokasi fun camping.

- Obyek Wisata Pantai Turki

  Pantai Turki terletak di Desa Swarangan Dusun Tungkaran Naik Kecamatan Jorong. Pantai ini merupakan salah satu destinasi baru yang ada di Tanah Laut. Pantai Turki cukup menjadi favorit bagi penggemar wisata bahari. Fasilitas yang lengkap seperti kamar mandi, toilet, mushola dan aneka permainan seperti banan boat, jet ski, dan sebagainya.
- Obyek Wisata Pantai Asmara

  Pantai Asmara terletak di Desa Muara Asam-Asam Kecamatan Jorong dengan jarak tempuh kurang lebih dari 50 km dari Kota Pelaihari. Pantai ini cukup menjadi primadona bagi masyarakat sekitar Tanah Laut.
- Obyek Wisata Gunung Timah

  Gunung Timah berlokasi di Kecamatan Panyipatan dan salah satu wisata baru yang menarik di Tanah Laut. Jika pengunjung naik ke atas puncaknya maka mereka bisa melihat hamparan laut di kejauhan berpadu dengan hijaunya pegunungan. Untuk sampai ke puncak pengunjung tidak perlu khawatir untuk memanjat karena telah disediakan jalan agar lebih mudah mendaki keatas.
- Obyek Wisata Pantai Kintap

  Salah satu objek wisata terkenal yang berasal dari Kalimantan Selatan adalah objek wisata Pantai Muara Kintap. Pantai Muara Kintap merupakan objek wisata baru dari Kalimantan Selatan yang berada di Kabupaten Tanah Laut. Objek wisata tersebut baru diresmikan dan dikenal oleh wisatawan pada tahun 2016.
- Obyek Wisata Pantai Cemara 1 dan 2

  Pantai Cemara terletak di Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut. Pantai ini diberi nama Pantai Cemara karena di Pantai ini banyak ditumbuhi Pohon Cemara.
- Obyek Wisata Pantai Rindang Piungan
- Obyek Wisata Pulau Datu
- Obyek Wisata Kerbau Rawa

Kerbau Rawa Bati-Bati menawarkan pemandangan savana rumput hijau sejauh mata memandang. Dengan luas 250 hektar, tempat ini dihuni kurang lebih 300 ekor kerbau milik warga. Tidak heran, di desa ini aktivitas menggembala kerbau sudah menjadi rutinitas sehari-hari. Di desa ini ada 14 peternak kerbau dan mereka memiliki jadwal tersendiri yang bergantian.

- Obyek Wisata Mangroove Pagatan Besar
- Obyek Wisata Dewa Katar
- Obyek Wisata Mahuni
- Obyek Wisata Pantai karindangan
- Obyek Wisata Taman Hijau Rindang
- Obyek Wisata Pantai Tabunio
- Obyek Wisata Taman Permana
- Obyek Wisata Pantai Borneo Beach

3. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata

Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata Pada Tahun 2025.

- Sarana dan prasarana pada objek wisata banyak yang mengalami kerusakan dan diperlukan sarana prasarana yang bisa meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata.
- Volume sampah di destinasi wisata pantai (seperti Batakan dan Takisung) saat peak season (hari libur nasional) seringkali melebihi kapasitas penanganan, sehingga mengganggu estetika.
- Belum meratanya kemampuan manajerial Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dalam mengelola desa wisata secara mandiri dan profesional. Sebagian masih sangat bergantung pada arahan dinas teknis.
- Masih adanya potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi tiket masuk karena sistem pemungutan yang belum sepenuhnya digital (e-ticketing) di semua pos retribusi.
- Pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial untuk promosi belum terintegrasi secara maksimal dalam satu ekosistem *smart tourism*. Promosi masih cenderung parsial.

Kegiatan pengadaan dan pemeliharaan ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan operasional objek wisata unggulan di Kabupaten Tanah Laut agar tetap menjadi tujuan wisata bagi masyarakat lokal maupun wisatawan dari kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan. Melalui perbaikan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana, diharapkan daya tarik destinasi wisata dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan, sehingga mampu mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.

keberlanjutan dan kualitas sarana prasarana pariwisata yang terjaga berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi di sekitar destinasi wisata serta berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata. Dengan demikian, kegiatan ini memiliki peran strategis tidak hanya dalam pemulihan pascabencana, tetapi juga dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata daerah secara berkelanjutan

beberapa kegiatan pembangunan dan rehab sarana dan prasarana di objek wisata selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1) Pembangunan gedung etalase ekraf objek wisata pantai batakan baru



2) Pembangunan Cottage objek wisata pantai Batakan Baru



3) Rehabilitasi musholla objek wisata pantai batakan baru



4) Pembangunan paving blok objek wisata pantai batakan baru



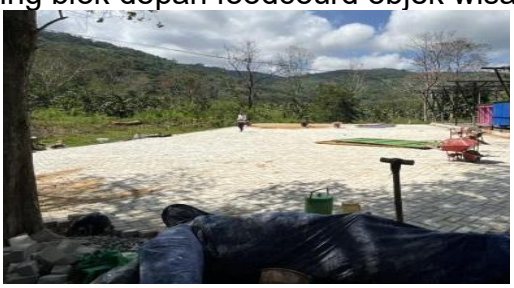
5) Pembangunan pos pengamanan terpadu objek wisata batakan baru



6) Rehabilitasi tugu palagan batakan



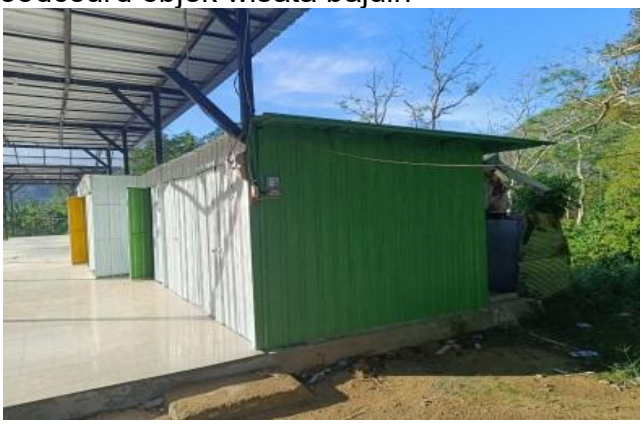
7) Pemasangan paving blok depan foodcourd objek wisata bajuin



8) Pembangunan musholla objek wisata bajuin



9) Rehabilitasi foodcourd objek wisata bajuin



10) Pembuatan spot foto/selfi objek wisata pantai takisung



11) Rehabilitasi panggung objek wisata pantai takisung



12) Pembangunan Lahan Parkir Menara Pantau Objek Wisata Gunung Kayangan



13) Pemeliharaan taman orchid



14) Rehabilitasi sangkar burung taman orchid



4. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi

   1) Event Jambore Pokdarwis di Obyek Wisata yang dilaksanakan pada tanggal 07 sd 08 Oktober 2025 di Pantai Batakan Baru. Berkumpulnya seluruh Kelompok Sadar Wisata se Kabupaten Tanah Laut yang menjadi ajang bertukar ide, berbagi pengalaman serta mempekuat sinergi antar Pokdarwis dalam upaya membangun pariwisata daerah yangn berkelanjutan, kreatif dan berbasis kearifan local.





b. Peningkatan Kunjungan Wisatawan

1. Pelaksanaan promosi wisata.

   Program Peningkatan Kunjungan Wisatawan dilaksanakan melalui strategi promosi terpadu, penguatan daya tarik destinasi, penyelenggaraan event pariwisata, serta peningkatan kualitas layanan dan fasilitas pendukung guna memberikan pengalaman berwisata yang aman, nyaman, dan berkesan. Program ini juga didukung dengan pemanfaatan media digital, kolaborasi dengan pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif, serta pengembangan paket wisata yang inovatif, sehingga mampu menarik lebih banyak wisatawan nusantara maupun

mancanegara serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

1) Pertunjukan hiburan Event besar di Obyek Wisata (live music)
Dilaksanakan di Pantai Batakan Baru Tanggal 19 Oktober 2025. Dengan adanya pertunjukan live music dapat meningkatkan daya tarik destinasi wisata sebagai bentuk Promosi pariwisata atau pertunjukan seni musik di alam terbuka dapat menarik perhatian wisatawan untuk mengunjungi Obyek Wisata Kabupaten Tanah Laut.





2) Festival Batakan Colourfun
Kegiatan Festival Batakan Colour Fun Tahun 2025 diselenggarakan di Pantai Batakan Baru Tanggal 20 sd 21 September 2025. Kegiatan ini merupakan bentuk promosi untuk meningkatkan pengunjung wisatawan, meningkatkan promosi daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sekaligus kesejahteraan masyarakat disekitar Obyek Wisata.





3) Festival Layang-layang
Kegiatan ini dilaksanakan di Pantai Batakan Baru pada tanggal 30 sd 31 Agustus Tahun 2025. Menampilkan beragam layang-layang

eksibisi dan ratusan layang-layang dandang khas Kalimantan Selatan. Tercatat 900 layang-layang ikut serta dalam festival ini, dengan peserta tidak hanya berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan, tetapi juga provinsi lain seperti Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Yogyakarta. Lebih istimewa lagi, turis mancanegara dari Prancis, Singapura, dan Malaysia turut hadir memeriahkan suasana. Event ini pun mendapat penghargaan dari rekor Muri.





2. Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata

Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata dilaksanakan sebagai upaya mendukung perencanaan, pengambilan kebijakan, serta promosi destinasi secara efektif melalui pengumpulan, pengolahan, dan pemutakhiran data kepariwisataan yang akurat dan terintegrasi. Informasi tersebut disebarluaskan melalui berbagai media, baik digital maupun non-digital, sehingga dapat diakses oleh masyarakat, pelaku usaha, dan wisatawan sebagai referensi dalam mengenal potensi destinasi, kegiatan pariwisata, serta layanan pendukung lainnya, guna meningkatkan kunjungan dan pengembangan sektor pariwisata secara berkelanjutan.

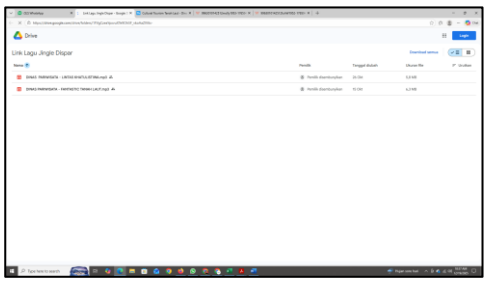
Berikut penjabaran penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata :

1) Cetak Buku Profil Pariwisata



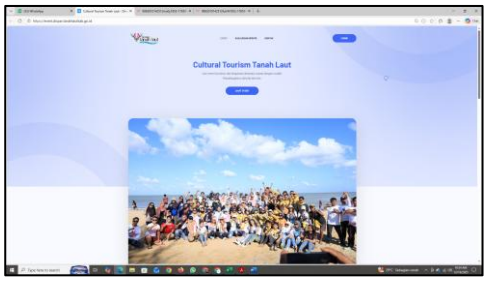
2) Pembuatan New Jingle Fantastic tanah laut

Bisa diakses pada link berikut https://drive.google.com/folderview?id=1FVgCzeaYpxvuXTe9Oh5F_vkoAaZIV6s-



3) Aplikasi Sistem Promosi Wisata

Merupakan Aplikasi Cultural Tourism Tanah Laut



3. Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri

Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik di dalam maupun luar negeri dilaksanakan melalui berbagai upaya strategis untuk meningkatkan promosi dan daya tarik destinasi, antara lain partisipasi dalam pameran dan event pariwisata, penyelenggaraan promosi terpadu, penguatan kerja sama dengan pelaku industri perjalanan, serta pemanfaatan media digital sebagai sarana publikasi yang efektif dan menjangkau pasar yang lebih luas. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan potensi destinasi, budaya, dan produk unggulan daerah kepada wisatawan nusantara dan mancanegara, sehingga mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, memperluas jaringan

pemasaran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata yang berkelanjutan.

Berikut penjabaran pelaksanaan Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri:

1) Launching COE Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026

Kegiatan ini dilaksanakan di Qmall Banjarbaru pada Tanggal 25 Oktober 2025. Kegiatan launching ini menjadi langkah awal untuk memperkenalkan kekayaan budaya, pariwisata dan agenda menarik yang akan digelar sepanjang tahun 2026.





2) Festival Budaya Pasar Terapung & Pameran Launching COE

Pameran Festival Wisata Budaya Pasar Terapung di Banjarmasin pada tanggal 8 sd 11 Agustus 2025 dan juga Pameran Wisata dalam rangka Launching COE Provinsi Kalsel di Yogyakarta tanggal 13 sd 14 November 2025.





3) Dekorasi Stand Pameran

- Pameran Festival Wisata Budaya Pasar Terapung di Banjarmasin pada tanggal 8 sd 11 Agustus 2025
- Pameran Wisata dalam rangka Launching COE Provinsi Kalsel di Yogyakarta tanggal 13 sd 14 November 2025.



- Dekor Stand Ekonomi Kreatif (Galyna Heiwa) di Batakan Baru dalam rangka Pemilihan Putpar 2025.
    - Dekor Stand Ekonomi Kreatif (The Nail Art Studio) di Batakan Baru dalam rangka Pemilihan Putpar 2025
    - Dekor Stand dalam rangka Launching COE Kabupaten Tanah Laut di Qmall Banjarbaru.



4. Pelaksanaan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri
   Pelaksanaan kerja sama dan kemitraan pariwisata di dalam dan luar negeri dilakukan sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengembangan destinasi, meningkatkan promosi, serta memperluas akses pasar pariwisata daerah melalui sinergi dengan pemerintah, pelaku industri, asosiasi, dan mitra internasional. Kerja sama ini diwujudkan dalam bentuk pertukaran informasi dan promosi, pengembangan paket wisata terpadu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi dalam penyelenggaraan event dan investasi pariwisata. Melalui kemitraan yang berkelanjutan, diharapkan tercipta ekosistem pariwisata yang lebih kompetitif, inovatif, dan mampu menarik kunjungan wisatawan secara signifikan guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Berikut pelaksanaan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri :

1) Ramadhan Expo Tahun 2025

Kegiatan di selenggarakan di sepanjang Jalan H. Boedjasin Pelaihari dilaksanakan pada Tanggal 02 Maret 2025. Kegiatan yang digelar di Kabupaten Tanah Laut ini menghadirkan 145 stand, meningkat drastis dibanding tahun sebelumnya yang hanya 83 stand.



2) Gowes Wisata wisata

Event Gowes Wisata diselenggarakan sebagai upaya mempromosikan potensi pariwisata daerah melalui kegiatan olahraga rekreasi yang sehat, ramah lingkungan, dan partisipatif. Dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 2025 bertempat di Obyek Wisata Air Terjun Bajuin dalam rangka memeriahkan hari Jadi Kabupaten Tanah Laut.



3) Pertunjukan Live music Mingguan

dilaksanakan sebagai upaya promosi pariwisata dengan menghadirkan hiburan rutin di kawasan destinasi guna menciptakan suasana yang lebih hidup dan menarik minat kunjungan wisatawan. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah bagi musisi lokal dan pelaku ekonomi kreatif untuk berkarya, serta mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar destinasi.



4) Lomba klotok/ kapal kecil

Dilaksanakan pada tanggal 30 November 2025 dalam rangka memeriahkan hari Jadi Kabupaten Tanah Laut.



5) Lomba Cipta Lagu

Dilaksanakan pada Tanggal 10 Desember 2025 dalam rangka memeriahkan hari Jadi Kabupaten Tanah Laut.



6) Pertunjukan Live music Keg Porprov

Dilaksanakan Bulan Oktober rangka memeriahkan Porprov di Kabupaten Tanah Laut.



7) Lomba Lomba Menyanyi Lagu Perjuangan

Kegiatan ini dalam rangka merayakan HUT RI ke 80 dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2025 bertempat di exs Terminal Pelaihari.





8) Lomba Foto Wisata

Dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2025 dalam rangka memeriahkan hari Jadi Kabupaten Tanah Laut.

c. Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata

1. Pelatihan SDM Pariwisata

a. Pelatihan Pembuatan Konten Bagi Pelaku Usaha Kreatif Parkraf 2025

Kegiatan ini merupakan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha kreatif pariwisata dan ekonomi kreatif (Parkraf) dalam menghadapi perkembangan pemasaran digital yang semakin kompetitif. Pelatihan difokuskan pada penguatan kemampuan peserta dalam merancang, memproduksi, dan mendistribusikan konten promosi yang menarik, informatif, dan sesuai dengan karakteristik pasar digital.

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan keterampilan pelaku usaha dalam membuat konten kreatif berbasis foto, video, dan narasi promosi, serta memanfaatkan media sosial dan platform digital sebagai

sarana pemasaran yang efektif. Dengan kemampuan tersebut, diharapkan pelaku usaha mampu memperluas jangkauan promosi, meningkatkan daya saing produk/jasa, serta mendorong pertumbuhan kunjungan dan transaksi ekonomi kreatif.





b. Pelatihan Digital Marketing bagi Pelaku Usaha Parekraf

Pelatihan Digital Marketing bagi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Tahun 2025 dilaksanakan pada Senin, 26 Mei 2025, bertempat di Algoritma Café & Resto, Jl. KH. Mansyur, Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang pelaku usaha ekonomi kreatif. Kegiatan ini bertujuan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan strategi pemasaran digital agar peserta mampu memanfaatkan teknologi secara optimal untuk memasarkan produk atau jasa secara lebih efektif dan berdaya saing.





c. Studi Kaji Tiru ke Dekranasda Banjarmasin

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 2025 yang di ikuti sebanyak 95 org terdiri dari IKM se Kabupaten Tanah Laut dan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif . Tujuan Kegiatan tersebut di antaranya untuk menggali referensi dan strategi aplikatif dari Dekranasda Kota Banjarmasin terkait pengembangan sektor kerajinan khas daerah, guna meningkatkan daya saing UMKM di daerah kami melalui inovasi produk, efektivitas promosi, dan penguatan kemitraan strategis.

2. Fasilitasi pengembangan kompetensi SDM Ekonomi Kreatif

a) Pelatihan Penggalian Potensi Ekonomi Kreatif Pedesaan

Waktu pelaksanaan Kamis, 15 Mei 2025 bertempat di Janggala Coffee House Jl. Raya Matah (Depan RS Bersalin Ainun). Jumlah peserta Pelatihan Penggalian Potensi Ekonomi Kreatif Pedesaan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebanyak 20 orang yang berasal dari Kelompok Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Tujuan Kegiatan Pelatihan Penggalian Potensi Ekonomi Kreatif Pedesaan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 ini adalah Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, Mengurangi ketergantungan pada pertanian konvensional, Membuka lapangan kerja baru, terutama bagi generasi muda, Melestarikan budaya dan tradisi lokal serta Mengurangi urbanisasi dengan menyediakan peluang usaha di desa melalui BumDesa yang ada di Kabupaten Tanah Laut.





b) Pelatihan Kuliner bagi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif

Waktu pelaksanaan Kamis, 12 Juni 2025 bertempat Sinar Hotel Pelaihari Jl. KH. Mansyur No.10, Angsau, Kec. Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Jumlah peserta Pelatihan Kuliner Bagi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Tahun 2025 sebanyak 25 orang yang berasal dari Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Sub Sektor Kuliner yang tersebar di Kabupaten Tanah Laut.





c) Kegiatan Fantastic Creative Festival

Kegiatan Fantastic Creative Festival ini akan dilaksanakan selama 2 hari yaitu Hari Jumat - Sabtu Tanggal 24 s.d. 25 Oktober 2025 bertempat di kawasan Jl. H. Boejasin Pelaihari (Pal-Palan). Fantastic Creative Festival, adalah festival yang menggabungkan berbagai unsur kreativitas seperti seni pertunjukan, pameran / bazaar karya dan inovasi, kompetisi, hingga hiburan interaktif. Tujuan di selenggarakan acara tersebut di antaranya :

- Fantastic Creative Festival merupakan sebuah wadah yang mampu menyalurkan potensi sekaligus menjadi sarana hiburan, edukasi, serta apresiasi dan inovasi dalam berkarya.
- Acara ini diharapkan mampu menjadi sarana kebersamaan, meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni, pengembangan eknomi kreatif, sekaligus memperkuat identitas budaya lokal dan kepariwisataan.
- Dengan adanya Fantastic Creative Festival ini bisa menambah pengetahuan tentang macam-macam jenis ekonomi kreatif, mempromosikan potensi pariwisata, seni, dan ekonomi kreatif, juga berfungsi untuk meningkatkan citra dan daya tarik investasi Kabupaten Tanah Laut.





3. Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata

Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta penguatan peran komunitas dalam mengelola dan mempromosikan potensi lokal. Upaya ini bertujuan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan destinasi yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan, sekaligus

meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pemanfaatan peluang usaha di sektor pariwisata.

Kegiatan ini meliputi :

- Kegiatan Gerakan Wisata (GESIT) & Goes To School

  Tujuan dari kegiatan ini adalah para siswa akan dikenalkan terhadap objek – objek wisata yang ada di Tanah Laut. Pengenalan ini meliputi pemberian pengetahuan kepada siswa tentang objek wisata, sejarah, ciri khas di ojek wisata tersebut, nilai – nilai budaya dan kearifan lokal di objek tersebut. Selain itu para siswa juga akan diperkenalkan pada beberapa pelaku ekonomi kreatif yang di sekitar objek tersebut dan dapat berinteraksi secara langsung dan melihat secara dekat bagaimana aktifitas ekonomi kreatif dalam mendukung kegiatan kepariwisataan.







- Pelatihan Rescue

  Kegiatan ini di laksanakan pada hari kamis tanggal 10 April 2025 bertempat di objek wisata Pantai Takisung. Jumlah peserta ada 50 peserta dan narasumber ada 2 orang.




- Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM di Kawasan Objek Wisata

  Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM di Kawasan Objek Wisata Tahun 2025 dilaksanakan pada 21 Agustus 2025 di Algoritma Café & Resto, Kecamatan Pelaihari, dan diikuti oleh masyarakat pengelola objek wisata, pengelola fasilitas wisata, Pokdarwis, serta perwakilan pengelola dari Kecamatan Takisung, Panyipatan, dan Bajuin.




d. Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif

1. Pembinaan pelaku usaha ekonomi kreatif

Peningkatan Kapasitas SDM Pembinaan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif merupakan upaya penguatan kemampuan sumber daya manusia melalui kegiatan pembinaan, pendampingan, dan pelatihan bagi pelaku usaha ekonomi kreatif agar lebih profesional, inovatif, dan berdaya saing.

Kegiatan ini meliputi peningkatan keterampilan manajerial, pengembangan produk, pemasaran, serta pemahaman pengelolaan usaha yang efektif. Tujuannya adalah mendorong pelaku usaha mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan, meningkatkan

kualitas produk/jasa, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

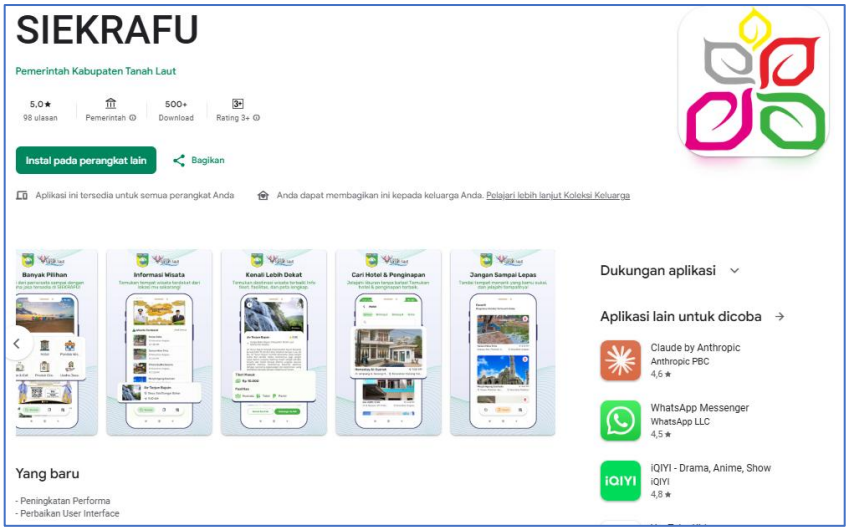


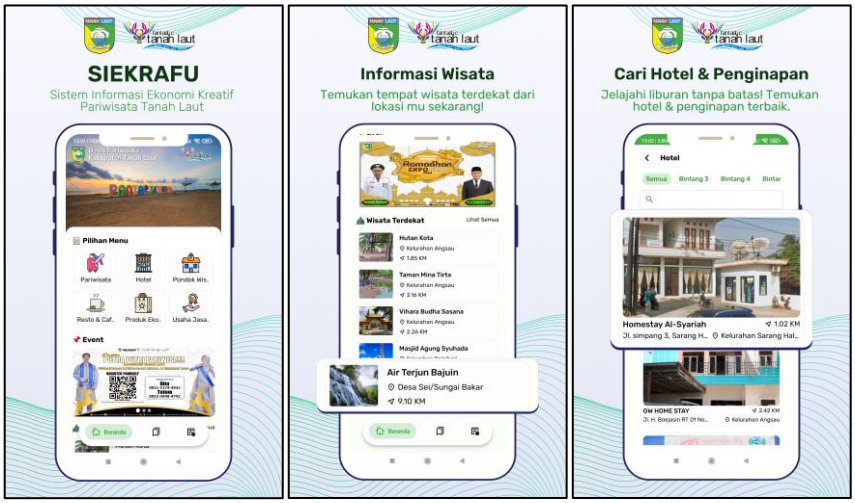
e. Peningkatan Legalitas Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif

1. Penyusunan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif

   Penyusunan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif dilakukan sebagai langkah strategis untuk merumuskan arah kebijakan, program, dan kegiatan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan. Rencana aksi ini disusun melalui identifikasi potensi, kebutuhan pelaku usaha, serta sinergi dengan pemangku kepentingan guna mendorong peningkatan kualitas produk, daya saing, perluasan pasar, dan kontribusi ekonomi kreatif terhadap perekonomian daerah, kegiatan ini meliputi :

   - Pengembangan aplikasi SIEKRAFU. Kegiatan ini merupakan pengembangan aplikasi SIEKRAFU yang sebelumnya dapat di akses di Playstore di kembangkan jadi dapat di akses di IOS (apple store).





- Sosialisasi tentang pemanfaatan HKI. Waktu pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan HKI Tahun 2025 Kamis 28 Agustus 2025 bertempat Aeris Hotel Banjarbaru Jl. Panglima Batur Jalan P. Suriansyah Ujung, Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjar Baru. Jumlah peserta Kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan HKI Tahun 2025 sebanyak 30 orang yang berasal dari Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif.

2. Fasilitasi HKI Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif

Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi pelaku usaha ekonomi kreatif dilakukan melalui kegiatan sosialisasi pemanfaatan HKI sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum terhadap karya dan produk kreatif. Kegiatan ini memberikan informasi mengenai jenis-jenis HKI, prosedur pendaftaran, manfaat perlindungan merek, hak cipta, dan desain industri,

serta strategi pemanfaatannya untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing usaha. Melalui sosialisasi ini diharapkan pelaku ekonomi kreatif mampu melindungi inovasi yang dihasilkan, mencegah terjadinya pelanggaran atau plagiarisme, serta memanfaatkan HKI sebagai aset usaha yang dapat mendukung pengembangan bisnis secara berkelanjutan.



Beberapa Permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam operasional dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Terbatasnya literasi digital pelaku usaha sehingga pemanfaatan platform daring untuk promosi dan pemasaran belum optimal serta masih bergantung pada metode konvensional.
2. Belum meratanya sertifikasi kompetensi dan standar kualitas produk, yang menyebabkan daya saing produk ekonomi kreatif masih rendah di pasar yang lebih luas.
3. Keterbatasan akses permodalan dan pembiayaan usaha, terutama bagi pelaku ekraf skala mikro, sehingga menghambat pengembangan usaha dan inovasi produk
4. Sarana dan prasarana pada objek wisata banyak yang mengalami kerusakan dan diperlukan sarana prasarana yang bisa meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata.
5. Volume sampah di destinasi wisata pantai (seperti Batakan dan Takisung) saat peak season (hari libur nasional) seringkali melebihi kapasitas penanganan, sehingga mengganggu estetika.

6. Belum meratanya kemampuan manajerial Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dalam mengelola desa wisata secara mandiri dan profesional. Sebagian masih sangat bergantung pada arahan dinas teknis.
7. Masih adanya potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi tiket masuk karena sistem pemungutan yang belum sepenuhnya digital (e-ticketing) di semua pos retribusi.
8. Pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial untuk promosi belum terintegrasi secara maksimal dalam satu ekosistem *smart tourism*. Promosi masih cenderung parsial.

Rencana Aksi :

1. Melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana pariwisata yang rusak menggunakan alokasi dana operasional yang tersedia secara efektif .
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama operasional dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) untuk penyediaan armada angkut sampah ekstra khusus pada momen libur lebaran dan tahun baru .
3. Peningkatan Kapasitas & Kemandirian POKDARWIS.
4. Peningkatan realisasi PAD dan tersedianya laporan keuangan secara Digitalisasi Sistem Retribusi Pariwisata yang *real-time* serta transparan.
5. Aktif mengikuti pameran pariwisata di tingkat provinsi maupun nasional untuk memperkenalkan potensi daerah.

6. Melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana pariwisata yang rusak menggunakan alokasi dana operasional yang tersedia secara efektif .
7. Melakukan koordinasi dan kerjasama operasional dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) untuk penyediaan armada angkut sampah ekstra khusus pada momen libur lebaran dan tahun baru .
8. Peningkatan Kapasitas & Kemandirian POKDARWIS.
9. Peningkatan realisasi PAD dan tersedianya laporan keuangan secara Digitalisasi Sistem Retribusi Pariwisata yang *real-time* serta transparan.

10. Aktif mengikuti pameran pariwisata di tingkat provinsi maupun nasional untuk memperkenalkan potensi daerah.

d. Rasio PDRB Sektor Perdagangan

Rasio PDRB Sektor Perdagangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebesar 11,21 persen. Jika dibandingkan dengan target 10,75 telah tercapai sebesar 104,27 persen. Dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu 10,79 telah tercapai 103,89 persen.

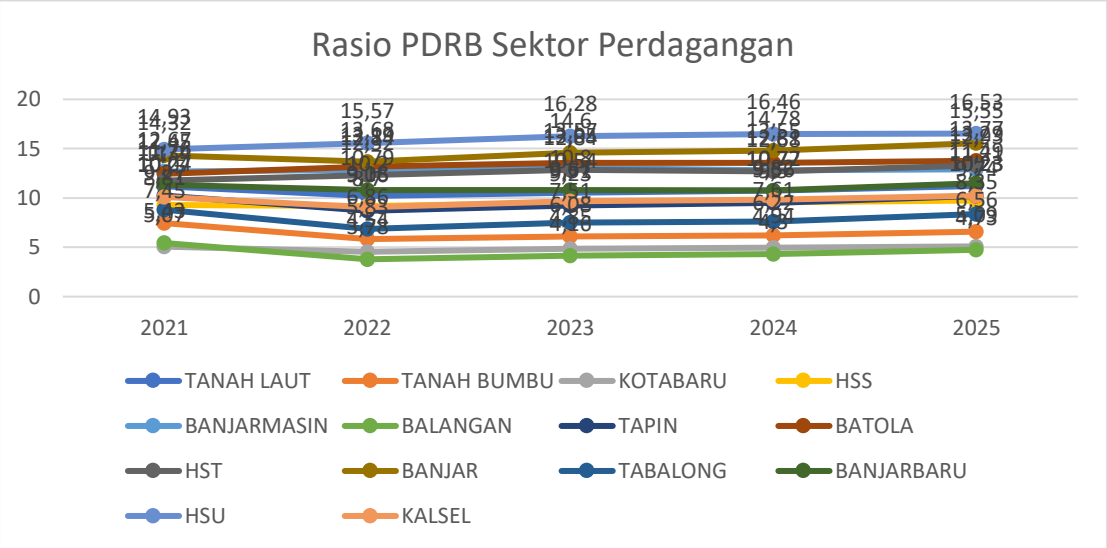
Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan salah satu kategori lapangan usaha unggulan yang ada di Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tanah Laut. Angka Pertumbuhan pada Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor didapatkan dari perubahan Nilai Tambah Bruto (NTB) kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dari satu tahun ke tahun berikutnya.

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor. Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikutkan kegiatan yang terkait dengan perdagangan, seperti penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang, pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar dan pengepakan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, penggudangan, baik dengan pendingin maupun tidak, pembersihan dan pengeringan hasil pertanian, pemotongan lembaran kayu atau logam.

Aktivitas Perdagangan Besar dan Eceran sendiri lebih banyak ditemukan di Kabupaten Tanah Laut dibandingkan aktivitas Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Perdagangan merupakan aktivitas yang penting dalam menunjang aktivitas ekonomi lainnya, terutama pertanian dan industri. Kehadiran pedagang

dapat berperan menyalurkan dari produsen hingga ke konsumen akhir dengan lebih mudah. Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor yang menjadi sumber pendapatan bagi setiap daerah Kabupaten/Kota se-Kalsel. Grafik 3.5.8 menunjukkan gambaran pertumbuhan kategori tersebut pada masing-masing kabupaten/kota

Grafik 3.5.8
Pertumbuhan Sektor Perdagangan Kabupaten/Kota se-Kalsel 2021-2025



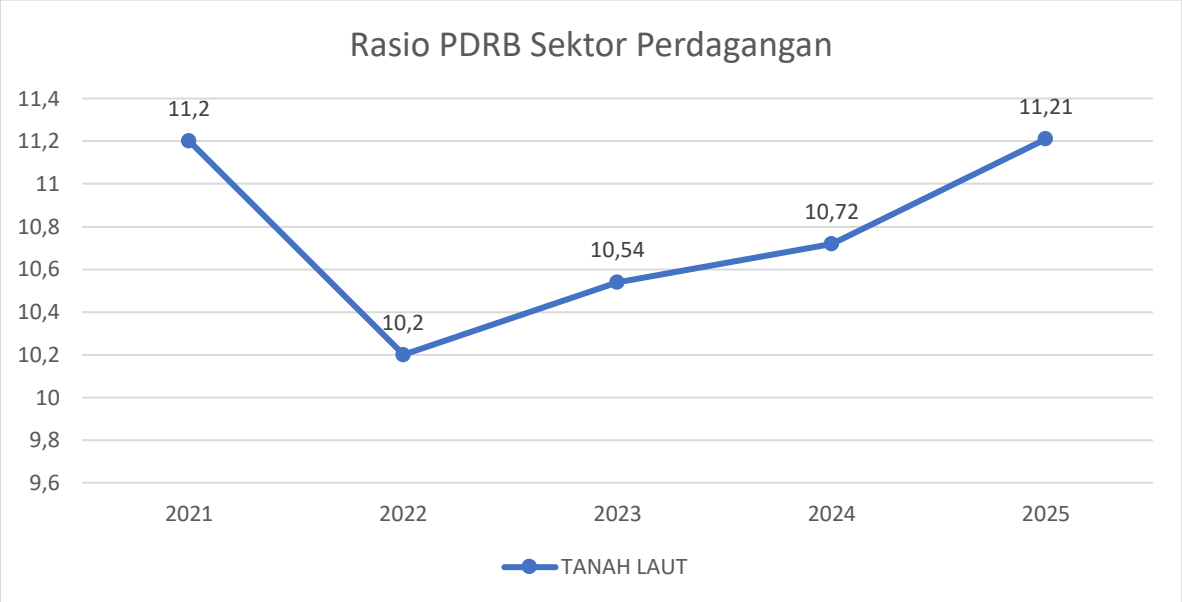
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel 3.5.23
Pertumbuhan Sektor Perdagangan Kabupaten/Kota se-Kalsel 2021-2025

Kab/Kota	Tahun			
	2022	2023	2024	2025
HSU	14.93	15.57	16.28	16.46
Banjar	14.32	13.68	14.6	14.78
Batola	12.45	13.19	13.57	13.55
Banjarmasin	12.67	12.84	13.05	12.81
HST	11.76	12.32	12.84	12.68
Banjarbaru	11.34	10.79	10.8	10.77
Tanah Laut	11.2	10.2	10.54	10.72
Kalsel	10.07	9.06	9.67	9.82
HSS	9.27	9.18	9.51	9.56
Tapin	10.24	8.7	9.23	9.5
Tabalong	8.81	6.86	7.51	7.61
Tanah Bumbu	7.45	5.83	6.08	6.22
Kotabaru	5.07	4.54	4.85	4.94
Balangan	5.43	3.78	4.16	4.3

Dari grafik di atas, seluruh Kabupaten/Kota se-Kalsel mengalami pertumbuhan yang positif pada sektor Perdagangan, terdapat beberapa kabupaten/kota yang mengalami perlambatan pertumbuhan dan beberapa yang mengalami percepatan pertumbuhan. Kabupaten Tanah Laut sendiri mengalami peningkatan dengan nilai rasio 11,21 persen pada tahun 2025 dibandingkan dengan nilai rasio 10,72 pada tahun 2024.

Grafik 3.5.9
Pertumbuhan Sektor Perdagangan Kabupaten Tanah Laut 2021-2025



Sumber : BPS Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan grafik di atas, rasio sektor perdagangan Kabupaten Tanah Laut cukup fluktuatif dari tahun ke tahun. Pertumbuhan sektor ini sempat terkontraksi pada tahun 2022 dengan nilai 10,2 persen namun kembali tumbuh cepat hingga tahun 2023 dengan nilai 10,54 persen. Terus meningkat hingga pada tahun 2024 menjadi 10,72 persen dan juga pada tahun 2025 menjadi 11,21 persen. Adapun dari sisi distribusi atau peranannya terhadap total PDRB, sektor ini mengalami juga cukup fluktuatif selama beberapa tahun terakhir sebagaimana pada Tabel 3.5.20 berikut.

Tabel 3.5.24
Peranan, Pertumbuhan dan Laju Implisit Lapangan Usaha PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Persen), 2017-2024

No	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*					
	a. Distribusi/*Distribution*	11,20	10,20	10,54	10,72	11,21
	b. Laju Pertumbuhan/*Growth*	2,48	7,20	6,37	4,39	7,39
	c. Laju Implisit/*Growth Rate of Implicit Price Index*	5,76	5,42	2,93	2,69	4,35

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Laut

Potret dari PDRB Tanah Laut menunjukkan bahwa kategori lapangan usaha perdagangan memiliki pangsa terbesar ke empat setelah kategori lapangan usaha pertambangan, pertanian, dan industri pengolahan. Kategori lapangan usaha perdagangan memiliki pangsa sebesar 11,21 persen di tahun 2025 dengan rata-rata pangsa sebesar 10,99 persen selama tahun 2019–2023. Selain itu, dari sisi pertumbuhan maupun laju implisit sektor ini juga masih tumbuh positif yang mengindikasikan bahwa sektor ini masih terus berkembang dari tahun ke tahun bahkan secara peranan terhadap PDRB, sektor ini sudah mendekati peranan sektor Industri Pengolahan.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan penguatan sektor perdagangan melalui pendekatan hulu ke hilir yang berfokus pada standarisasi, stabilitas, dan ekspansi pasar. Di sisi perlindungan konsumen, telah dilakukan normalisasi tata niaga melalui pelayanan tera dan tera ulang UTTP secara konsisten di 17 pasar rakyat guna menjamin kepastian hukum dan akurasi transaksi, yang didukung dengan pengawasan ketat terhadap Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) untuk menciptakan tertib niaga. Guna menjaga daya beli masyarakat dan menekan inflasi, pemerintah secara aktif menyelenggarakan operasi pasar dan pasar murah serta menyediakan sistem informasi harga bahan pokok yang akurat, termasuk melakukan pemantauan

ketat terhadap distribusi pupuk bersubsidi untuk menjamin kelancaran rantai pasok komoditas pertanian sebagai motor penggerak perdagangan lokal.

Dalam upaya meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah, pemerintah telah melakukan akselerasi ekspor melalui fasilitasi produk unggulan pada ajang nasional seperti *Trade Expo Indonesia 40th*, yang dibarengi dengan pembinaan kualitas produk melalui sertifikasi halal, perbaikan kemasan, dan pemenuhan legalitas usaha bagi pelaku usaha mikro. Langkah ini diperkuat dengan pembangunan serta rehabilitasi sarana prasarana pasar rakyat agar tercipta lingkungan transaksi yang representatif dan kompetitif. Secara kelembagaan, pencapaian fundamental tahun ini adalah pembentukan 135 Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan sebagai agregator ekonomi desa yang berfungsi memperpendek rantai distribusi dan memperkuat akses permodalan. Melalui integrasi antara peningkatan kualitas SDM, pendampingan pemasaran digital, dan kemitraan strategis dengan ritel modern, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa sektor perdagangan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dan berkelanjutan terhadap struktur PDRB Kabupaten Tanah Laut.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, sebagai berikut :

a. Peningkatan standarisasi dan perlindungan konsumen

1. Peningkatan kesadaran pedagang untuk menggunakan UTTP yang memenuhi standar

a) Pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan

Pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang dilakukan secara berkala pada titik-titik sentral perdagangan dengan cakupan instrumen yang luas, meliputi ukuran panjang, takaran, alat ukur dari gelas, tangki ukur, hingga berbagai jenis timbangan beserta perlengkapannya.

Pengawasan pada Tangki Ukur dan Takaran sangat krusial bagi Kabupaten Tanah Laut untuk menjamin akurasi distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan logistik cair lainnya yang menjadi urat nadi transportasi pengangkut hasil bumi. Sementara itu, tera pada Alat Ukur Panjang dan Timbangan Eceran memastikan validitas

transaksi pada perdagangan tekstil, bahan bangunan, serta kebutuhan pokok di 17 pasar rakyat.

Keberagaman instrumen UTTP yang terstandardisasi ini menjamin bahwa setiap satuan (meter, liter, maupun kilogram) yang dibayar konsumen adalah akurat, pemerintah daerah berhasil meminimalkan kerugian ekonomi tersembunyi (*invisible loss*) akibat kesalahan takar, yang secara akumulatif menjaga stabilitas daya beli masyarakat dan nilai tambah sektor perdagangan dalam PDRB.

Dengan menjamin kebenaran pengukuran, Pemerintah Daerah berhasil menciptakan kepastian hukum yang melindungi margin keuntungan petani sebagai produsen dari risiko penyusutan akibat ketidakakuratan alat ukur. Secara makro, tertib ukur ini meningkatkan indeks kepercayaan masyarakat untuk bertransaksi di pasar lokal, yang berdampak langsung pada peningkatan volume perputaran uang di sektor perdagangan.

Tabel 3.5.25

Data Alat ukur Takar Timbang yang dilakukan Tera - tera Ulang

NO	Jenis UTTP	Potensi UTTP		Jumlah	Realisasi		Jumlah
		Tera	Tera Ulang		Tera	Tera Ulang	
I	**Ukuran Panjang**						
	-Meter Listrik	0	0	0	0	0	0
	-Meter Air	0	0	0	0	0	0
	-Meter Arus	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Ukuran	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II	**Takaran**						
	-Takaran Basah	0	21	21	0	16	16
	-Takaran Kering	0	19	19	0	0	0
	-Bejana Ukur	0	0	0	0	0	0

NO	Jenis UTTP	Potensi UTTP		Jumlah	Realisasi		Jumlah
		Tera	Tera Ulang		Tera	Tera Ulang	
	-Pompa Ukur BBM	0	156	156	0	156	156
	Jumlah Takaran	**0**	**196**	**196**	**0**	**172**	**172**
III	**Alat Ukur Dari Gelas**						
	-Gelas Ukur	0	0	0	0	0	0
	-Termometer	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Alat Ukur Dari Gel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV	**Tangki Ukur**						
	-Tangki Ukur Silinder Tegak	0	3	3	0	3	3
	-Tangki Ukur Silinder Datar	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Tangki Ukur	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
V	**Timbangan**						
	-Sentisimal	0	5	5	0	2	2
	-Desimal	0	0	0	0	0	0
	-Bobot Ingsut	0	4	4	0	3	3
	-Dacin Logam	0	11	11	0	2	2
	-Elektronik	0	297	297	0	285	285
	-Pegas	0	498	498	0	492	492
	-Milisimal	0	0	0	0	0	0
	-Cepat	0	0	0	0	0	0
	-Meja Beranger	0	319	319	0	284	284
	-Neraca	0	1	1	0	0	0
	-Jembatan	0	88	88	0	78	78
Jumlah		**0**	**2245**	**2245**	**0**	**1666**	**1666**

NO	Jenis UTTP	Potensi UTTP		Jumlah	Realisasi		Jumlah
		Tera	Tera Ulang		Tera	Tera Ulang	
VI	**Perlengkapan**						
	-AT Biasa	0	736	736	0	345	345
	-AT Emas	0	0	0	0	0	0
	-AT Obat	0	0	0	0	0	0
	-AT Miligram	0	0	0	0	0	0
	-Pencap Kartu	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Perlengkapan	**0**	**736**	**736**	**0**	**0**	**0**
VII	**Pengujian BDKT**						
	Jumlah Pengujian BDKT	**2700**	**-**	**2700**	**2678**	**-**	**2678**
Jumlah		**2700**	**-**	**2700**	**2678**	**-**	**2678**

Dokumentasi Pelaksanaan Tera ulang pada SPBU di Kabupaten Tanah Laut



b) Pelaksanaan pengawasan barang dalam keadaan terbungkus

Pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) Pengawasan BDKT dilaksanakan sebagai langkah preventif untuk memastikan bahwa produk kemasan yang beredar di pasar baik produk industri besar maupun produk olahan UMKM local memenuhi ketentuan kuantitas (isi bersih) dan pelabelan sesuai standar nasional.

Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan upaya peningkatan daya saing produk lokal Tanah Laut. Dengan menjamin kesesuaian mutu dan informasi pada label, produk UMKM Tanah Laut memiliki kredibilitas yang lebih tinggi untuk menembus jaringan ritel modern dan pasar antar-daerah. Pengawasan yang berkelanjutan ini berkontribusi pada terciptanya "tertib niaga" yang meminimalisir peredaran barang ilegal atau sub-standar yang dapat merusak struktur harga dan stabilitas pasar di daerah.

Dokumentasi pengawasan barang dalam keadaan terbungkus



c) Sosialisasi tera/tera ulang dan pengawasan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menyadari bahwa kepatuhan terhadap standar metrologi tidak dapat dicapai hanya melalui tindakan represif atau pengawasan fisik semata, melainkan harus dibangun melalui kesadaran kolektif. Oleh karena itu, sosialisasi tera/tera ulang dan pengawasan ditempatkan sebagai instrumen edukasi preventif yang strategis.

1. Internalisasi Kewajiban Metrologi Legal Kegiatan ini dilakukan melalui penyampaian informasi yang komprehensif mengenai kewajiban hukum penggunaan UTTP (seperti ukuran panjang, takaran, dan timbangan) yang bertanda sah. Sosialisasi ini menekankan bahwa tera ulang bukan sekadar beban biaya retribusi, melainkan investasi bagi pelaku usaha untuk menjamin kepastian usaha.

   Sosialisasi diarahkan secara khusus kepada pedagang di pasar rakyat, pemilik SPBU (terkait tangki ukur), dan pelaku industri pengolahan hasil bumi. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan tumbuh budaya mandiri dari pelaku usaha untuk mengajukan permohonan tera tanpa harus menunggu jadwal pengawasan (jemput bola).

2. Membangun Budaya "Masyarakat Sadar Metrologi" Selain menyasar pelaku usaha, sosialisasi ini juga ditujukan kepada masyarakat umum sebagai konsumen. Tujuannya adalah menciptakan pengawasan partisipatif di mana konsumen memiliki kecerdasan untuk memeriksa keberadaan cap tanda tera sebelum melakukan transaksi.

   Pendekatan komunikatif dan berkelanjutan ini bertujuan untuk menghilangkan asimetri informasi di pasar. Ketika konsumen paham akan haknya dan pelaku usaha patuh pada kewajibannya, maka risiko sengketa dagang dapat diminimalisir.

Dampak terhadap Tertib Niaga dan PDRB Secara makro, sosialisasi yang efektif berdampak langsung pada terciptanya transaksi perdagangan yang adil dan transparan.

Kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap integritas pasar-pasar di Kabupaten Tanah Laut akan mendorong peningkatan frekuensi belanja lokal. Transparansi dalam ukuran dan takaran memastikan bahwa nilai ekonomi yang tercatat dalam PDRB sektor perdagangan benar-benar mencerminkan volume fisik barang yang diperdagangkan secara akurat, tanpa adanya manipulasi takaran yang merugikan salah satu pihak.

Dokumentasi Sosialisasi Tera - tera ulang di lingkungan Pelajar



2. Pengawasan barang beredar

Pengawasan barang beredar dilaksanakan untuk menjamin bahwa barang yang diperdagangkan di masyarakat memenuhi ketentuan mutu, keamanan, dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta melindungi hak konsumen. Kegiatan pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan barang yang beredar di pasar dan tempat usaha, termasuk aspek pelabelan, kesesuaian standar, dan ketentuan perdagangan lainnya. Melalui pengawasan yang terencana dan berkelanjutan, diharapkan tercipta tertib niaga, meningkatnya kepatuhan pelaku usaha, serta terjaminnya perlindungan konsumen dan kepercayaan masyarakat terhadap barang yang beredar di pasaran.

b. Peningkatan Stabilitas Harga Bapokting

Stabilitas harga Bapokting merupakan variabel kunci dalam mengendalikan inflasi daerah dan menjaga pertumbuhan PDRB sektor perdagangan. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melakukan intervensi melalui empat pilar utama:

1. Penyediaan informasi harga dan ketersedia bahan pokok

Penyediaan informasi harga dan ketersediaan bahan pokok merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi makro di Kabupaten Tanah Laut. Kegiatan ini berfungsi sebagai instrumen navigasi kebijakan bagi pemerintah dan instrumen proteksi bagi masyarakat.

a) Transformasi Data Menjadi Instrumen Pengendalian Inflasi

Penyediaan informasi ini dilakukan melalui pemantauan harian atau berkala terhadap komoditas strategis (seperti beras, cabai, daging sapi, dan minyak goreng) di pasar-pasar utama seperti Pasar Manuntung Berseri Pelaihari dan pasar kecamatan lainnya. Data yang dikumpulkan bukan sekadar angka statistik, melainkan basis deteksi dini (*Early Warning System*). Jika terdeteksi tren kenaikan harga di atas ambang batas, pemerintah dapat segera melakukan langkah preventif sebelum terjadi inflasi yang tidak terkendali.

Mengingat Tanah Laut adalah daerah produsen (lumbung pangan), informasi ini juga berfungsi memantau agar harga di tingkat petani tetap layak, namun harga di tingkat konsumen tetap terjangkau.

b) Penghapusan Asimetri Informasi di Pasar

Informasi yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat (melalui radio, media sosial, aplikasi, atau papan informasi pasar) bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kekuatan antara pedagang dan pembeli. Dengan mengetahui harga rata-rata kabupaten, masyarakat tidak mudah terjebak oleh praktik spekulasi harga yang dilakukan oknum pedagang. Di sisi lain, pelaku usaha mendapatkan kepastian mengenai ketersediaan stok di tingkat distributor, sehingga kelancaran distribusi barang tetap terjaga.

c) Basis Pengambilan Keputusan Strategis (Intervensi)

Data informasi harga dan stok adalah prasyarat mutlak sebelum dilaksanakannya intervensi fisik seperti Operasi Pasar atau Pasar Murah. Tanpa informasi yang akurat, intervensi pemerintah bisa menjadi salah sasaran atau tidak efektif. Data ini memberikan jawaban tentang kapan harus melakukan pasar murah, komoditas apa yang harus disubsidi, dan di mana lokasi yang paling membutuhkan pasokan tambahan. Stabilitas harga yang terjaga melalui pengelolaan informasi yang baik akan mengamankan daya beli masyarakat. Konsumsi rumah tangga yang stabil adalah motor utama penggerak PDRB sektor perdagangan di Tanah Laut.





2. Pelaksanaan operasi pasar

Pelaksanaan Pelaksanaan Operasi Pasar merupakan instrumen intervensi pemerintah yang bersifat reaktif-strategis untuk merespons fluktuasi harga yang tidak wajar di pasar. Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melaksanakan 3 kali operasi pasar. Di Kabupaten Tanah Laut, kegiatan ini berfungsi sebagai katup pengaman (*safety valve*) untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan (*supply and demand*) pada saat terjadi gejolak ekonomi atau gangguan distribusi.

a. Operasi Pasar sebagai Instrumen Penyeimbang (*Market Stabilizer*)
Kegiatan ini dilakukan dengan menyalurkan bahan pokok penting (Bapokting) langsung ke titik-titik pusat perdagangan dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah (sesuai HET atau harga distributor).

Berbeda dengan bantuan sosial yang bersifat hibah, Operasi Pasar bertujuan untuk memengaruhi psikologi harga pasar secara keseluruhan. Dengan membanjiri pasar menggunakan stok pemerintah/mitra pada harga yang wajar, para spekulan dan pedagang dipaksa secara kompetitif untuk menurunkan harga jual mereka kembali ke titik keseimbangan. Hal ini sangat krusial di Tanah Laut untuk komoditas yang bukan diproduksi lokal, seperti minyak goreng atau gula pasir, yang rantai distribusinya rentan terhadap gangguan dari luar daerah.

b. Efektivitas Menekan Laju Inflasi Daerah (Volatile Foods) Operasi Pasar adalah tindakan nyata dalam pengendalian inflasi, khususnya pada kelompok makanan yang harganya sering bergejolak. Melalui koordinasi dengan Bulog dan distributor besar, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memastikan bahwa akses terhadap kebutuhan dasar tetap tersedia meski terjadi hambatan suplai secara regional. Mengingat letak geografis Tanah Laut yang merupakan jalur distribusi utama di Kalimantan Selatan, Operasi Pasar mencegah terjadinya "kelangkaan semu" akibat penahanan stok oleh oknum distributor. Langkah ini memastikan bahwa inflasi

di Tanah Laut tetap terkendali, sehingga tidak menurunkan standar hidup masyarakat.

c. Dampak terhadap Ketahanan Daya Beli dan PDRB Secara makro, keberhasilan Operasi Pasar dalam menjinakkan lonjakan harga berdampak langsung pada terjaganya daya beli riil masyarakat.Ketika harga bahan pokok terkendali, masyarakat memiliki sisa pendapatan (*disposable income*) untuk dibelanjakan pada sektor perdagangan lainnya. Kondisi ini menjaga konsumsi rumah tangga tetap tinggi—yang merupakan komponen vital dalam perhitungan PDRB sektor perdagangan. Transaksi di pasar-pasar rakyat tetap aktif karena masyarakat tidak merasa terbebani oleh harga yang spekulatif, sehingga volume perdagangan secara akumulatif meningkat.





Dokumentasi Kegiatan operasi pasar

3. Pemantauan pupuk bersubsidi

Dalam struktur ekonomi Kabupaten Tanah Laut, sektor perdagangan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan sektor pertanian (hulu). Pemantauan pupuk bersubsidi bukan sekadar urusan teknis pertanian, melainkan strategi pengamanan rantai pasok (*supply chain*) untuk menjaga stabilitas harga pangan di pasar.

a) Pengendalian Biaya Produksi untuk Stabilitas Harga Dagang Sebagai daerah sentra jagung dan padi, harga komoditas pangan di pasar Tanah Laut sangat ditentukan oleh biaya produksi petani. Pupuk merupakan komponen biaya terbesar. Dengan memastikan distribusi

pupuk bersubsidi tepat sasaran, tepat harga (sesuai HET), dan tepat waktu, Pemerintah Daerah berhasil menjaga agar biaya produksi tetap rendah.Biaya produksi yang terkendali mencegah terjadinya *cost-push inflation* (kenaikan harga akibat naiknya biaya produksi) di sektor perdagangan. Hal ini memastikan harga komoditas di pasar tetap kompetitif, sehingga volume perdagangan keluar daerah (ekspor antar-wilayah) tetap tinggi, yang pada akhirnya mendongkrak rasio PDRB.

b) Penjaminan Kontinuitas Stok Komoditas di Pasar Pemantauan stok di tingkat distributor dan pengecer (Kios Pupuk Lengkap/KPL) bertujuan untuk memitigasi risiko kelangkaan input pertanian yang dapat menyebabkan gagal tanam atau penurunan produktivitas.Kelancaran suplai pupuk menjamin kontinuitas ketersediaan barang di pasar-pasar rakyat Tanah Laut. Tanpa suplai yang stabil, aktivitas perdagangan akan melambat (*stagnan*) akibat kelangkaan stok barang. Pemantauan yang intensif mencegah praktik penyelewengan distribusi yang dapat mengganggu alur perdagangan komoditas unggulan daerah.
c) Penguatan Peran Koperasi dan Pengecer Lokal Pemantauan ini juga melibatkan pengawasan terhadap kelembagaan penyalur di tingkat lokal.

Melalui koordinasi yang ketat, pemerintah memastikan bahwa pengecer resmi (yang seringkali adalah pelaku usaha mikro/koperasi lokal) menjalankan fungsi distribusinya secara sehat. Hal ini memperkuat struktur ekonomi kerakyatan di desa-desa, sehingga aktivitas perdagangan di level akar rumput tetap bergairah dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi kabupaten secara kolektif

Dokumentasi Pengawasan Kios Pupuk Bersubsidi





4. Pelaksanaan pasar murah

   Pelaksanaan Pasar Murah merupakan instrumen intervensi sosial-ekonomi yang dirancang untuk menjaga daya beli riil masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Dalam konteks PDRB, kegiatan ini berfungsi menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga yang merupakan motor penggerak utama sektor perdagangan di daerah.

   a) Mitigasi Dampak Inflasi terhadap Daya Beli Pasar murah dilakukan dengan menyediakan paket bahan pokok di bawah harga pasar melalui mekanisme subsidi angkut atau kerjasama langsung dengan produsen/distributor.Di Kabupaten Tanah Laut, pasar murah menjadi solusi konkret saat terjadi kenaikan harga musiman (seperti menjelang Ramadhan atau Natal). Dengan adanya selisih harga yang signifikan, masyarakat dapat mengalokasikan sisa anggarannya (*savings*) untuk kebutuhan ekonomi lainnya. Hal ini mencegah terjadinya penurunan konsumsi secara drastis yang dapat mengakibatkan perlambatan pada sektor perdagangan eceran.
   b) Stimulus Perputaran Ekonomi Lokal Meskipun harga yang ditawarkan lebih rendah, volume transaksi yang dihasilkan dalam pasar murah sangat besar.

      Kegiatan ini seringkali melibatkan pelaku UMKM dan koperasi lokal sebagai penyedia jasa atau produk pendamping. Hal ini menciptakan multiplier effect; pemerintah tidak hanya membantu konsumen mendapatkan harga murah, tetapi juga membantu produsen/pedagang lokal mencatatkan volume penjualan yang tinggi dalam waktu singkat:

Peningkatan volume transaksi di tingkat desa dan kelurahan berkontribusi pada pencatatan nilai tambah bruto sektor perdagangan. Pasar murah memastikan roda perdagangan tetap berputar hingga ke wilayah pelosok (seperti daerah pesisir atau pegunungan di Tanah Laut) yang akses distribusinya mungkin lebih sulit.

c) Pemerataan Akses Pangan dan Stabilitas Sosial Pasar murah menjamin bahwa distribusi bahan pokok tidak hanya terpusat di ibu kota kabupaten (Pelaihari), tetapi menjangkau titik-titik terjauh. Ketersediaan barang yang merata dengan harga terjangkau menciptakan stabilitas pasar yang sehat. Secara makro, stabilitas ini memberikan sinyal positif bagi iklim investasi di sektor perdagangan, karena menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mampu mengelola risiko pasar dan menjaga keamanan ketersediaan pangan bagi warganya.

Tabel 3.5.26
Rincian Jadwal dan Tempat pelaksanaan pasar murah Tahun 2025 sebagai berikut :

No	Tanggal	Tempat	Kecamatan	Pelaksana	Kegiatan
1	02 Maret 2025	Depan Mall Pelayanan Publik	Pelaihari	Diskopdag	Ramadhan EXPO 1446 H
2	11 Maret 2025	Depan Mall Pelayanan Publik	Pelaihari	Diskopdag	Ramadhan EXPO 1446 H
3	19 Maret 2025	Depan Mall Pelayanan Publik	Pelaihari	Diskopdag	Ramadhan EXPO 1446 H
4	21 Maret 2025	Masjid Syuhada Pelaihari	Pelaihari	Diskopdag	Pengendalian Inflasi Daerah
5	25 Maret 2025	Halaman Stadion Pertasi Kencana	Pelaihari	Diskopdag	Menjelang Hari Raya Idul Fitri
6	26 Maret 2025	Depan Mall Pelayanan Publik	Pelaihari	Diskopdag	Ramadhan EXPO 1446 H
7	06 Mei 2025	Desa Gunung Melati	Batu Ampar	Diskopdag	Mendukung Kegiatan Pembukaan TMMD Ke-124

No	Tanggal	Tempat	Kecamatan	Pelaksana	Kegiatan
8	04 Juni 2025	Desa Gunung Melati	Batu Ampar	Diskopdag	Mendukung Kegiatan Pembukaan TMMD Ke-124
9	16 Agustus 2025	Halaman Stadion Pertasi Kencana	Pelaihari	Diskopdag	Mendukung Kegiatan GPM
10	28 Agustus 2025	Desa Tanjung Bajuin	Bajuin	Diskopdag	Pengendalian Inflasi Daerah
11	30 Agustus 2025	Halaman Kecamatan Pelaihari	Pelaihari	Diskopdag	Mendukung Kegiatan GPM
12	03 September 2025	Desa Kait-Kait	Bati-Bati	Diskopdag	Pengendalian Inflasi Daerah
13	10 September 2025	Desa Kandangan Baru	Panyipatan	Diskopdag	Pengendalian Inflasi Daerah
14	17 September 2025	Halaman Kantor Kecamatan Panyipatan	Panyipatan	Diskopdag	Mendukung Kegiatan Ngobati
15	10 Oktober 2025	Desa Asam Jaya	Jorong	Diskopdag	Pengendalian Inflasi Daerah
16	15 Oktober 2025	Desa Kali Besar	Kurau	Diskopdag	Pengendalian Inflasi Daerah
17	17 Oktober 2025	Desa Pasir Putih	Kintap	Diskopdag	Pengendalian Inflasi Daerah
18	22 Oktober 2025	Desa Bingkulu	Tambang Ulang	Diskopdag	Pengendalian Inflasi Daerah
19	24 Oktober 2025	Desa Bluru	Batu Ampar	Diskopdag	Pengendalian Inflasi Daerah
20	29 Oktober 2025	Halaman Kantor Kecamatan Kintap	Kintap	Diskopdag	Mendukung Kegiatan Ngobati
21	05 November 2025	Desa Tambang Ulang	Tambang Ulang	Diskopdag	Pengendalian Inflasi Daerah
22	12 November 2025	Desa Muara KIntap	Kintap	Diskopdag	Pengendalian Inflasi Daerah
23	20 November 2025	Halaman Kantor Kecamatan Panyipatan	Panyipatan	Diskopdag	Mendukung Kegiatan HUT Tala Tingkat Kecamatan

No	Tanggal	Tempat	Kecamatan	Pelaksana	Kegiatan
24	22 November 2025	Halaman Kantor Kecamatan Tambang Ulang	Tambang Ulang	Diskopdag	Mendukung Kegiatan HUT Tala Tingkat Kecamatan
25	23 November 2025	Halaman Kantor Kecamatan Takisung	Takisung	Diskopdag	Mendukung Kegiatan HUT Tala Tingkat Kecamatan
26	23 November 2025	Halaman Kantor Kecamatan Jorong	Jorong	Diskopdag	Mendukung Kegiatan HUT Tala Tingkat Kecamatan
27	26 November 2025	Halaman Kantor Kecamatan Batu Ampar	Batu Ampar	Diskopdag	Mendukung Kegiatan HUT Tala Tingkat Kecamatan
28	27 November 2025	Pasar Hewan	Pelaihari	Diskopdag	Mendukung Kegiatan Kontes Kambing Se-Kalsel
29	28 November 2025	Desa Bumi Jaya	Pelaihari	Diskopdag	Menjelang Natal 2025 & Tahun Baru 2026
30	11 Desember 2025	Desa Ranggang	Takisung	Diskopdag	Pengendalian Inflasi Daerah
31	16 Desember 2025	Desa Bukit Mulia	Pelaihari	Diskopdag	Pengendalian Inflasi Daerah
32	18 Desember 2025	Desa Muara Asam-Asam	Jorong	Diskopdag	Pengendalian Inflasi Daerah
33	24 Desember 2025	Halaman Kantor Dekranasda Tanah Laut	Pelaihari	Diskopdag	Pengendalian Inflasi Daerah

Dokumentasi Kegiatan Pasar Murah





c. Peningkatan Pengembangan Ekspor Daerah

1. Fasilitasi produk dagang yang mengikuti pameran dagang

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memandang pameran dagang bukan sekadar ajang seremonial, melainkan instrumen diplomasi ekonomi dan perluasan akses pasar bagi produk unggulan daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai ekspor netto daerah yang berkontribusi langsung pada penguatan rasio PDRB sektor perdagangan.





Keikutsertaan dalam pameran dagang dilaksanakan melalui proses kurasi, seleksi, dan pendampingan produk unggulan yang memiliki potensi ekspor atau permintaan nasional tinggi. Berbeda dengan pola promosi konvensional, fasilitasi tahun 2025 difokuskan pada ajang yang mempertemukan produsen dengan pembeli skala besar (*Business to Business/B2B*). Hal ini bertujuan agar produk Tanah Laut tidak hanya terjual secara eceran, tetapi mampu menembus rantai pasok nasional melalui kontrak kerja sama jangka panjang.

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melakukan inovasi kebijakan dalam pemilihan ajang promosi dengan memprioritaskan kegiatan yang memiliki rasio biaya-manfaat (*cost-benefit*) paling optimal. Pengalihan fokus dari Pameran APKASI ke Trade Expo Indonesia (TEI) 40th di ICE-BSD Tangerang menunjukkan komitmen pemerintah pada prinsip akuntabilitas dan efisiensi anggaran. Dengan biaya sewa stan dan dekorasi yang lebih rendah dibandingkan pameran sebelumnya, TEI justru menawarkan target audiens yang lebih strategis, yakni *buyer* internasional dan investor global yang dikoordinasikan oleh Kementerian Perdagangan.

Strategi ini memungkinkan produk unggulan Tanah Laut (seperti produk olahan hasil ternak, kerajinan, dan komoditas pertanian hilir) untuk mendapatkan eksposur di panggung ekspor dengan beban

2. Pembinaan kualitas produk

Pembinaan kualitas produk dilaksanakan untuk meningkatkan mutu, daya saing, dan nilai tambah produk usaha mikro dan pelaku perdagangan agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Kegiatan ini dilakukan melalui pendampingan peningkatan standar mutu, inovasi produk, perbaikan kemasan, serta pemenuhan persyaratan sertifikasi dan perizinan yang berlaku. Melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan, diharapkan produk pelaku usaha memiliki kualitas yang konsisten, memenuhi standar pasar, serta mendorong peningkatan kepercayaan konsumen dan pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.

3. Promosi produk unggulan

Promosi produk unggulan dilaksanakan untuk meningkatkan visibilitas, daya saing, dan perluasan pasar produk unggulan daerah serta produk pelaku usaha mikro dan perdagangan. Kegiatan promosi dilakukan melalui berbagai media, baik secara langsung maupun digital, termasuk pameran, event promosi, publikasi, dan pemanfaatan platform pemasaran daring. Melalui promosi yang terencana dan berkelanjutan, diharapkan produk unggulan semakin dikenal luas, mampu menarik minat pasar, serta mendorong peningkatan penjualan dan penguatan citra produk daerah.

Dokumentasi pameran Tala Expo Hari Jadi Tanah Laut yang ke 60





d. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pasar

1. Pembangunan dan rehabilitasi sarpras pasar

Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pasar dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas layanan, kenyamanan, dan keamanan aktivitas perdagangan dipasar rakyat. Kegiatan ini mencakup perbaikan dan penyediaan fasilitas pasar, seperti bangunan kios dan los, sanitasi, drainase, aksesibilitas, serta fasilitas pendukung lainnya. Melalui pembangunan dan rehabilitasi yang terencana dan berkelanjutan, diharapkan tercipta lingkungan pasar yang tertib, bersih, dan layak, sehingga mampu meningkatkan aktivitas ekonomi, daya saing pasar rakyat, serta kesejahteraan pedagang dan masyarakat.

Dokumentasi rehabilitasi pasar Pelaihari





2. Penertiban dan kebersihan pasar

Penertiban dan kebersihan pasar dilaksanakan untuk menciptakan lingkungan pasar yang tertib, bersih, aman, dan nyaman bagi pedagang maupun pengunjung. Kegiatan ini dilakukan melalui penataan aktivitas perdagangan, pengaturan penggunaan ruang pasar, serta pengelolaan kebersihan dan sanitasi pasar secara rutin. Melalui penertiban dan peningkatan kebersihan yang berkelanjutan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pasar, kenyamanan bertransaksi, serta mendukung keberlanjutan fungsi pasar sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

Dokumentasi kegiatan kebersihan pasar







e. Peningkatan perluasan pemasaran produk usaha mikro

1. Pendampingan pemasaran terhadap usaha mikro

   Dalam struktur PDRB Kabupaten Tanah Laut, usaha mikro merupakan kontributor utama dalam penyerapan tenaga kerja dan penggerak ekonomi domestik. Pendampingan pemasaran yang terintegrasi bukan hanya upaya pemberdayaan, melainkan strategi untuk memperbesar volume transaksi perdagangan lokal dan memperkuat kemandirian ekonomi daerah.

   a) Sinergi Pemasaran *Omnichannel* (Offline dan Digital) Pendampingan ini diarahkan untuk mengikis kesenjangan teknologi yang selama ini menghambat pelaku usaha mikro di Tanah Laut.

   b) Dengan memadukan pemasaran *offline* (display produk di pusat oleh-oleh/pasar rakyat) dan pemasaran digital (e-commerce/media sosial), jangkauan pasar produk lokal Tanah Laut meluas keluar batas wilayah (nasional). Hal ini meningkatkan "Ekspor Antar-Wilayah" yang merupakan komponen positif dalam perhitungan PDRB.

   c) Optimalisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bela Pengadaan/e-Katalog) Mendorong usaha mikro masuk ke dalam ekosistem pengadaan pemerintah merupakan langkah konkret dalam menciptakan pasar yang terjamin. Melalui fasilitasi pendaftaran di e-Katalog Lokal atau aplikasi Bela Pengadaan, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berperan sebagai *off-taker* (pembeli siaga). Hal ini memastikan anggaran daerah (APBD) berputar di dalam daerah

sendiri, yang secara langsung meningkatkan Nilai Tambah Bruto (NTB) sektor perdagangan

d) .Strategi "Naik Kelas" dan Keberlanjutan Usaha Pendampingan yang berkelanjutan bertujuan untuk mengubah skala usaha dari informal menjadi formal dan memiliki daya saing tinggi. Usaha mikro yang "Naik Kelas" (mengalami peningkatan omzet dan legalitas) memberikan kontribusi yang lebih stabil terhadap PDRB. Dengan kemitraan strategis (misalnya dengan ritel modern atau perhotelan di Tanah Laut), produk usaha mikro mendapatkan kepastian distribusi. Hal ini menciptakan stabilitas pasokan dan harga di pasar, yang memperkuat ketahanan sektor perdagangan terhadap guncangan ekonomi.

7. Peningkatan Kualitas Produk Usaha Mikro

Peningkatan kualitas produk merupakan upaya hilirisasi skala mikro yang krusial bagi Kabupaten Tanah Laut. Tanpa kualitas yang terstandarisasi, produk lokal hanya akan menjadi komoditas eceran dengan nilai tambah rendah. Intervensi kebijakan ini bertujuan untuk mengubah produk mikro menjadi komoditas perdagangan yang memiliki daya saing nasional.

a) Standarisasi Mutu dan Citra Produk (Branding & Kemasan) Pendampingan pada aspek kemasan dan *branding* bukan sekadar masalah estetika, melainkan upaya peningkatan *perceived value* (nilai persepsi) suatu barang. Produk yang dikemas dengan standar profesional memungkinkan pelaku usaha mikro untuk masuk ke jaringan ritel modern dan pasar luar daerah. Hal ini meningkatkan Nilai Tambah Bruto (NTB) karena harga jual produk yang terkemas jauh lebih tinggi dibandingkan produk curah/tanpa merek, meskipun bahan bakunya sama. Peningkatan nilai jual ini secara otomatis menaikkan kontribusi nominal usaha mikro dalam perhitungan PDRB sektor perdagangan.

b) Legalitas sebagai Akses Pasar Formal (NIB, PIRT, Halal) Fasilitasi sertifikasi (NIB, PIRT, Halal) adalah langkah formalisasi ekonomi yang sangat strategis di Tanah Laut. Sertifikasi Halal dan izin edar (PIRT/BPOM) adalah "paspor" bagi produk untuk dapat diperdagangkan secara legal di pasar yang lebih luas, termasuk masuk ke dalam e-Katalog Lokal pengadaan pemerintah.

8. Inovasi Produk Berbasis Kebutuhan Pasar

Mendorong inovasi sesuai selera pasar memastikan produk tidak hanya diproduksi, tetapi juga diserap oleh pasar (*market-driven*).

Di Tanah Laut, inovasi produk olahan hasil pertanian (seperti olahan jagung atau sawit skala mikro) menjadi kunci. Inovasi menurunkan risiko penumpukan stok barang yang tidak laku, sehingga perputaran barang (*inventory turnover*) di sektor perdagangan menjadi lebih cepat dan efisien.

Agar mampu bersaing dipasar yang lebih luas, dilakukan peningkatan kualitas produk melalui:

- Pendampingan standardisasi mutu, kemasan, dan branding produk.
- Fasilitasi sertifikasi dan perizinan usaha (NIB, PIRT, Halal, dan izin edar lainnya).
- Inovasi produk sesuai dengan kebutuhan dan selera pasar.

9. Fasilitasi kerjasama kemitraan usaha mikro

Fasilitasi kerja sama kemitraan usaha mikro dilaksanakan untuk memperluas jejaring usaha, meningkatkan akses pasar, serta memperkuat keberlanjutan usaha mikro. Kegiatan ini dilakukan melalui pengembangan kemitraan dengan pelaku usaha menengah dan besar, koperasi, BUMD, perbankan, serta pemangku kepentingan lainnya dalam bentuk pemasaran, pembiayaan, dan penguatan rantai pasok. Melalui kemitraan yang saling menguntungkan, usaha mikro diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi, kualitas produk, dan daya saing, sehingga mendorong percepatan usaha mikro naik kelas secara berkelanjutan.

10. Penguatan Akses Pasar Lokal dan Regional

Pemerintah daerah mendorong perluasan pemasaran produk usaha mikro melalui optimalisasi pasar lokal dan regional, antara lain dengan:

- Pemanfaatan pasar rakyat, gerai UMKM, dan sentra promosi daerah.
- Keikutsertaan usaha mikro dalam pameran, bazar, dan event ekonomi daerah maupun antar daerah.

- Kerja sama pemasaran dengan pelaku usaha menengah, koperasi, dan BUMD sebagai offtaker produk usaha mikro.

Upaya ini bertujuan meningkatkan visibilitas produk serta memperluas jaringan pemasaran secara berkelanjutan.

f. Pembinaan usaha mikro

1. Pembinaan SDM usaha mikro

Pembinaan SDM usaha mikro dilaksanakan sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan daya saing pelaku usaha mikro agar mampu tumbuh berkelanjutan dan naik kelas. Pembinaan difokuskan pada peningkatan kompetensi manajerial, teknis produksi, pemasaran, dan literasi keuangan melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta pendampingan usaha yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan. Didukung sinergi lintas pemangku kepentingan, pembinaan SDM diharapkan mampu mendorong peningkatan produktivitas, kualitas usaha, serta akses pasar usaha mikro secara berkelanjutan.

Tabel 3.5.27
Daftar Peserta Pelatihan olahan hasil pertanian

NO	NIK	NAMA PESERTA	NAMA UMKM	Alamat	No Telepon
1	6301045006070001	DEWI ANGGRAINI	DAGANG ONLINE	Tambak Karya	083132810730
2	6301044510050002	ERNAWATI	JUALAN ONLINE	Tambak Karya	083841099487
3	6301047005070001	HALIMATUS SA'DIAH	JUALAN ONLINE	Tambak Karya	083842244014
4	6301045010050001	FITRI	DAGANG ONLINE	Tambak Karya	083836010158
5	6301046004040001	CINDY AMALIA	DAGANG ONLINE	Tambak Karya	083142029456
6	6301044209000003	POPPY SILVIANA	PERTANIAN	Tambak Karya	085349378296
7	6301044405870002	ARNIAH	WARUNG MAMA KIKI	Tambak Karya	0882019368250
8	6301045802890002	SITI RAHMAH	DAGANG	Tambak Karya	081347076545
9	6301046510920005	HEMI YATI	PERTANIAN	Tambak Karya	083191990938
10	6301044707840004	RINI SUSANA	PERTANIAN	Tambak Karya	085251680997
11	6301045005860001	IKA ISNAWATI	PERTANIAN	Tambak Karya	083863317019

NO	NIK	NAMA PESERTA	NAMA UMKM	Alamat	No Telepon
12	'6301040705970001	M. ARDIANSYAH	TAMBAK	Tambak Karya	082352701613
13	6301041309910001	JAINUDIN	PETANI ATAU PERKEBUNAN	Tambak Karya	083126076939
14	6301046008890002	HATNAH FITRIANITA	PERTANIAN	Tambak Karya	083863316985
15	6301044608030002	MEGA AULIA	DAGANG	Tambak Karya	083143994123
16	6301041704970001	ADI RIANTO	PERTANIAN	Tambak Karya	083194736761
17	6301110509890001	IDRIS	PERTANIAN	Tambak Karya	082350945627
18	6301042012020001	AHMAD RIZKI	PERTANIAN	Tambak Karya	083150425007
19	6301041012890003	JAINAL ARIFIN	PERTANIAN	Tambak Karya	081351086929
20	6301043009990002	DENNY MANDALA PUTRA	BENGKEL	Tambak Karya	081250727448
21	6301041104010001	AHMAD HIDAYAT	PERTANIAN	Tambak Karya	083155830466
22	6301042308000001	NORDIANSYAH	PERTANIAN	Tambak Karya	082249356846
23	6301041805970001	MUHAMMAD AL FADILLAH	PERTANIAN	Tambak Karya	083150979215
24	6301040102960001	CANDRA ADI PUTRA	PERTANIAN	Tambak Karya	035348230002
25	6301046009860002	SRI AGUSTINA	DAGANG	Tambak Karya	088242057038

Dokumentasi Kegiatan Pelatihan olahan hasil pertanian bagi pegiat usaha mikro desa tambak karya kec.kurau di Sinar Hotel Pelaihari:









2. Fasilitasi akses permodalan usaha mikro

   Fasilitasi akses permodalan usaha mikro dilakukan untuk memperkuat kapasitas usaha dan mendorong peningkatan skala usaha mikro agar mampu tumbuh berkelanjutan dan naik kelas. Upaya ini dilaksanakan melalui pendampingan pemenuhan persyaratan administrasi, fasilitasi akses pembiayaan ke lembaga keuangan dan koperasi, serta penguatan literasi keuangan pelaku usaha mikro. Dengan dukungan sinergi bersama perbankan dan lembaga pembiayaan, fasilitasi permodalan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan usaha mikro dalam mengembangkan usaha, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing.

3. Fasilitasi legalitas perizinan usaha mikro

   Fasilitasi legalitas perizinan usaha mikro dilaksanakan untuk meningkatkan kepastian hukum, kredibilitas, dan daya saing usaha mikro dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Kegiatan ini dilakukan melalui pendampingan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), perizinan berusaha berbasis risiko, serta fasilitasi sertifikasi pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan kepemilikan legalitas usaha yang lengkap, pelaku usaha mikro diharapkan memiliki akses yang lebih luas terhadap pembiayaan, pasar, dan program pemberdayaan, sehingga mampu mendorong percepatan usaha mikro naik kelas secara berkelanjutan.

   Pembentukan Koperasi Merah Putih dilaksanakan sebagai tindak lanjut dukungan pemerintah daerah terhadap agenda prioritas

nasional Presiden Prabowo Subianto yang menekankan penguatan ekonomi kerakyatan, kemandirian ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan pembangunan nasional. Kegiatan ini difokuskan pada pembentukan kelembagaan koperasi yang kuat, berlandaskan prinsip gotong royong dan kedaulatan ekonomi rakyat, serta mendorong peran koperasi sebagai pilar utama penggerak ekonomi lokal. Pembentukan Koperasi Merah Putih diharapkan mampu memperluas akses usaha dan pembiayaan bagi masyarakat, meningkatkan partisipasi ekonomi anggota, serta berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

g. Peningkatan dan pemberdayaan Koperasi

Pembentukan 135 Koperasi Merah Putih (130 di tingkat desa dan 5 di tingkat kelurahan) pada tahun 2025 merupakan langkah fundamental dalam memperkuat struktur ekonomi basis di Kabupaten Tanah Laut. Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga sosial, tetapi sebagai agregator ekonomi yang mendorong efisiensi rantai pasok perdagangan di tingkat akar rumput.

1. Koperasi sebagai Agregator Produk Desa (Sisi Penawaran) Dengan persebaran di hampir seluruh desa dan kelurahan, Koperasi Merah Putih berperan sebagai wadah pengumpul produk hasil pertanian dan usaha mikro lokal. Koperasi memotong rantai distribusi yang panjang. Dengan mengonsolidasikan produk dari petani dan pengrajin desa, koperasi memiliki posisi tawar (*bargaining power*) yang lebih tinggi saat berhadapan dengan pedagang besar atau masuk ke pasar perkotaan.: Efisiensi distribusi ini memastikan nilai ekonomi lebih banyak berputar dan menetap di desa, yang pada akhirnya meningkatkan Nilai Tambah Bruto (NTB) sektor perdagangan di tingkat local.
2. Peningkatan Kualitas Koperasi sebagai Indikator Profesionalisme Data menunjukkan peningkatan jumlah koperasi berkualitas sebesar 6,90% dibanding tahun 2024.

   Kenaikan ini mengindikasikan bahwa koperasi di Tanah Laut mulai bertransformasi dari sekadar kuantitas menuju kualitas manajerial yang

lebih baik (tertib administrasi, RAT rutin, dan usaha yang sehat). Koperasi yang berkualitas lebih dipercaya oleh perbankan untuk mendapatkan akses pembiayaan dan lebih mampu menjalin kemitraan formal dengan sektor ritel maupun industri. Koperasi yang sehat secara finansial mampu melakukan investasi pada sarana perdagangan seperti gudang atau armada angkut, yang mempercepat perputaran barang di daerah.

3. Koperasi sebagai Penjaga Stabilitas Harga di Perdesaan (Sisi Permintaan) Melalui unit usaha pertokoan atau waserda, Koperasi Merah Putih berfungsi sebagai penyedia kebutuhan pokok bagi anggota dan masyarakat desa dengan harga kompetitif. Dalam konteks stabilitas harga Bapokting, koperasi menjadi mitra pemerintah dalam mendistribusikan bahan pangan murah. Hal ini menjaga daya beli masyarakat perdesaan, sehingga konsumsi rumah tangga—yang merupakan komponen vital PDRB—tetap stabil meskipun terjadi fluktuasi harga di pasar induk.

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 26 ASN pada DKPP, 108 ASN pada DISTANHORBUN, 40 ASN pada DISNAKERIND dan 42 ASN pada DISNAKESWAN, serta di dukung oleh 10 Program dengan Pagu Rp. 64.518.125.483,23 dan terealisasi Rp. 56.835.498.153,00 atau sebesar 88,09%.

Tabel 3.5.28
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1.849.515.354,94	1.572.258.050,00
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	22.003.062,00	20.987.500,00
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	127.932.758,15	127.855.750,00
4	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	92.010.423,77	87.204.000,00
5	Program Pengawasaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	651.477.816,52	337.072.984,00

No	Program	Pagu	Realisasi
6	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.678.388.396,39	1.498.311.083,00
7	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.149.514.272,95	1.096.207.396,00
8	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	752.108.076,00	199.378.015,00
9	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	10.608.500.470,95	9.328.668.337,00
10	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	11.204.873,00	5.123.000,00
11	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	33.968.616,00	32.898.000,00
12	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	638.848.255,14	516.986.700,00
13	Pogram Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	601.267.718,00	577.098.000,00
14	Program Penyuluhan Pertanian	1.739.122.228,48	1.595.945.600,00
15	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.235.788.693,76	661.392.374,00
16	Program Pengawasan Keamanan Pangan	163.746.936,49	126.945.733,00
17	Program Pemasaran Pariwisata	4.651.547.803,07	4.039.167.882,00
18	Program Perizinan Usaha Pertanian	2.851.596.949,30	2.336.279.150,00
19	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	5.498.667.708,11	4.979.758.020,00
20	Program Pengunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	467.581.814,48	455.051.247,00
21	Program Pengembangan Ekspor	144.370.676,00	95.349.000,00
22	Program Pengelolaan Pemasaran Hasil Perikanan	108.012.198,32	98.006.100,00
23	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	22.821.443.973,91	21.908.164.000,00
24	Program Pengendalian dan Penanggulang Bencana Pertanian	848.372.553,54	716.829.440,00
25	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	2.005.330.817,38	1.360.406.118,00
26	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	585.169.813,00	180.140.300,00
27	Program Standarilisasi dan Perlindungan Konsumen	89.353.796,45	76.444.650,00
28	Program Penanganan Kerawanan Pangan	26.300.588,56	19.756.000,00

No	Program	Pagu	Realisasi
29	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	784.453.945,73	684.044.246,00
30	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.280.524.892,84	2.101.769.478,00
		64.518.125.483,23	56.835.498.153,00

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Efisiensi kinerja diukur menggunakan rumus berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

1. Rasio PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan

$$\text{Efisiensi} = \frac{(64.518.125.483,23 \times 100,83\%) - 56.835.498.153,00}{(64.518.125.483,23 \times 100,83\%)} \times 100\%$$

Efisiensi = 11,08%

Tabel 3.5.29
Efisiensi Indikator 1

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100,83%	88,09%	11,08%

2. Rasio PDRB Sektor Industri Olahan

$$\text{Efisiensi} = \frac{(64.518.125.483,23 \times 100,83\%) - 56.835.498.153,00}{(64.518.125.483,23 \times 100,83\%)} \times 100\%$$

Efisiensi = 3,20%

Tabel 3.5.30
Efisiensi Indikator 2

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100%	88,09%	3,20%

3. Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum (Pariwisata)

$$\text{Efisiensi} = \frac{(64.518.125.483,23 \times 100,83\%) - 56.835.498.153,00}{(64.518.125.483,23 \times 100,83\%)} \times 100\%$$

Efisiensi = 3,20%

Tabel 3.5.31
Efisiensi Indikator 3

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100%	88,09%	3,20%

4. Rasio PDRB Sektor Perdagangan

$$\text{Efisiensi} = \frac{(64.518.125.483,23 \times 100,83\%) - 56.835.498.153,00}{(64.518.125.483,23 \times 100,83\%)} \times 100\%$$

Efisiensi = 3,20%

Tabel 3.5.32
Efisiensi Indikator 4

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100%	88,09%	3,20%

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 6

Meningkatnya Kontribusi Investasi terhadap Perekonomian

Meningkatnya kontribusi investasi terhadap perekonomian diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.6.1
Capaian Kinerja Terhadap Target 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI (JUTA)			TAHUN 2025 (JUTA)		
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Proporsi PMTB terhadap PDRB	Persen	18,43	19,11	19,21	19,3	19,15	99,22%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2025								99,22%

Tabel 3.6.2
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025 (JUTA)			TARGET AKHIR RPJMD (JUTA)	CAPAIAN TAHUN 2025 THD TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Proporsi PMTB terhadap PDRB	Persen	19,3	19,15	99,22%	19,5	98,20%

a. Proporsi PMTB terhadap PDRB

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator yang menggambarkan kontribusi investasi fisik (barang modal tetap) terhadap total nilai tambah yang dihasilkan suatu wilayah dalam periode tertentu.

PMTB mencerminkan penambahan dan perbaikan aset tetap berwujud yang digunakan dalam proses produksi (seperti bangunan, mesin, peralatan, dan infrastruktur), sedangkan PDRB mencerminkan total nilai tambah seluruh kegiatan ekonomi di suatu daerah. Dengan demikian, proporsi PMTB terhadap PDRB menunjukkan tingkat intensitas investasi daerah sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Proporsi PMTB terhadap PDRB tahun 2025 Kabupaten Tanah Laut adalah 19,15%, sedangkan pada tahun 2024 tercatat sebesar 19,21%. Capaian kinerja pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan target maka sebesar 99,22% dan

mengalami penurunan sebanyak 0,6 point jika dibandingkan tahun 2024. Sebagai perbandingan, realisasi capaian pada tahun 2024 adalah 19,21%, kemudian pada tahun 2023 adalah 19,11%.

Tabel 3.6.3

Proporsi PMTB Terhadap PDRB Tahun 2021-2025

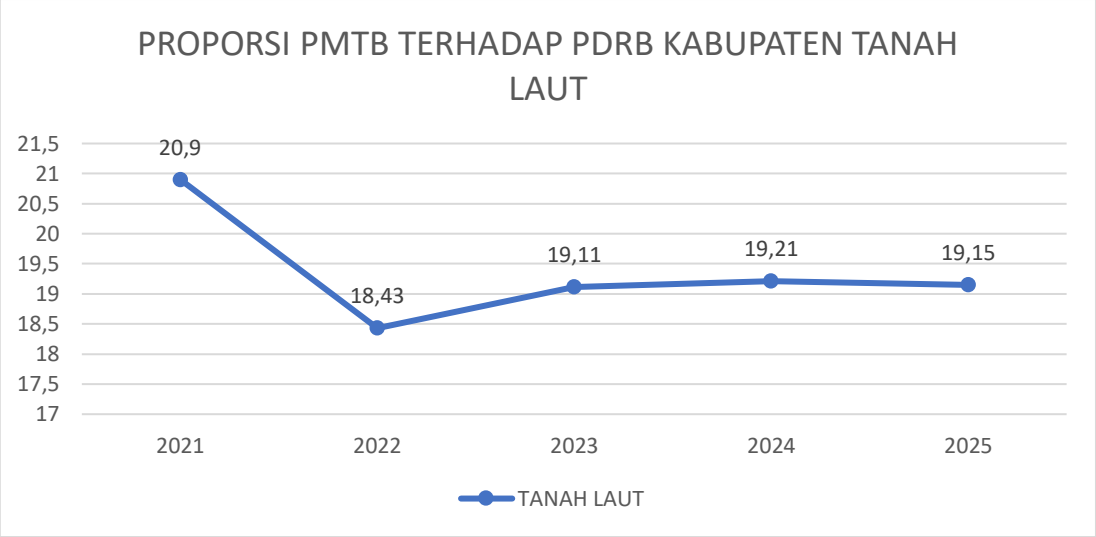
Komponen Pengeluaran	Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran (Persen)				
	Atas Dasar Harga Berlaku				
	2021	2022	2023	2024	2025
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	43.74	39.28	40.33	41.06	40.42
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.11	0.98	1.05	1.14	1.12
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9.8	8.12	8.28	8.76	8.57
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	20.9	18.43	19.11	19.21	19.15
Perubahan Inventori	0.02	-0.22	-0.29	-0.12	0.04
Net Ekspor Barang dan Jasa	24.43	33.4	31.53	29.94	30.70
PDRB	100	100	100	100	100

Proporsi PMTB terhadap PDRB diinterpretasikan sebagai tingkat kontribusi investasi fisik dalam struktur perekonomian daerah. Semakin tinggi nilai proporsi PMTB terhadap PDRB, menunjukkan bahwa perekonomian daerah ditopang oleh aktivitas investasi yang kuat, sehingga berpotensi meningkatkan kapasitas produksi, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang.

Sebaliknya, proporsi PMTB terhadap PDRB yang rendah mengindikasikan terbatasnya penambahan modal tetap, yang dapat berdampak pada stagnasi kapasitas produksi dan menurunnya daya saing ekonomi daerah. Nilai proporsi yang stabil dan proporsional mencerminkan keseimbangan antara konsumsi dan investasi dalam struktur pengeluaran ekonomi daerah.

Grafik 3.6.1

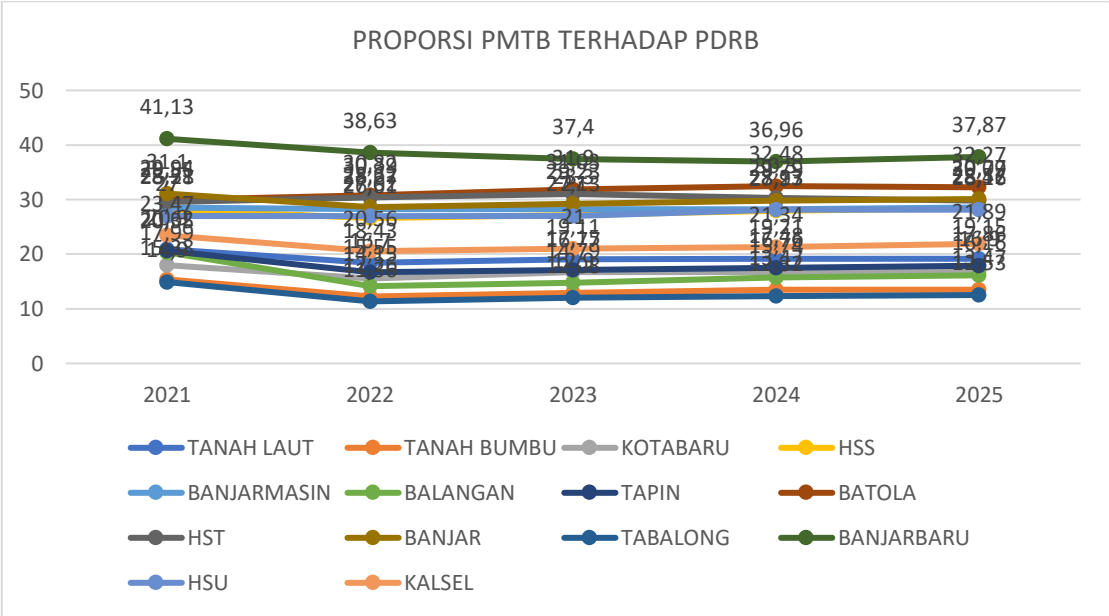
Proporsi PMTB Terhadap PDRB Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021-2025



Sumber : BPS Kabupaten Tanah Laut

Grafik 3.6.2

Proporsi PMTB Terhadap PDRB Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2025



Sumber : BPS Kabupaten Tanah Laut

Tabel 3.6.4

Proporsi PMTB Terhadap PDRB Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2025

Kab/Kota	Tahun			
	2022	2023	2024	2025
Banjarbaru	41.13	38.63	37.4	36.96
Batola	29.94	30.82	31.9	32.48
HST	29.55	30.39	31.03	30.3
Banjar	31.1	28.62	29.23	29.79
Banjarmasin	28.51	28.27	28.3	28.23
HSU	27	27.02	27	28.13
HSS	28.28	26.61	27.13	27.97
Tanah Laut	20.9	18.43	19.11	19.21
Tapin	20.62	16.7	17.15	17.48
Kotabaru	17.99	15.55	16.77	16.76
Balangan	20.35	14.15	14.79	15.74
Tanah Bumbu	15.38	12.26	12.9	13.47
Tabalong	14.9	11.36	12.08	12.32

Berdasarkan grafik diatas, Proporsi PMTB terhadap PDRB Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 sebesar 19,15% lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Tanah Bumbu dengan 13,47%. Akan tetapi, masih lebih rendah dibandingkan dengan Kota Banjarbaru dengan 37,87%.

Upaya peningkatan iklim investasi daerah di Kabupaten Tanah Laut secara langsung diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), realisasi investasi, serta penyerapan tenaga kerja sebagai indikator utama kinerja pembangunan ekonomi daerah. Keterkaitan antara kebijakan, pelaksanaan kegiatan, dan capaian indikator tersebut tercermin dari sinergi antara perbaikan layanan perizinan dan penguatan kesiapan sumber daya manusia.

Tabel 3.6.5

Realisasi Investasi per Triwulan Tahun 2025

Triwulan	PMA		PMDN	TOTAL
	US$ (Ribu)	Rp. (Juta)	Rp. (Juta)	Rp. (Juta)
I	8.959,41	143.350,62	185.146,49	328.497,11
II	5.182,19	82.915,05	1.498.799,18	1.581.714,22
III	5.944,93	95.118,64	460.560,11	555.678,75
IV	7.386,22	118.179,46	262.618,21	380.797,67

Triwulan	PMA		PMDN	TOTAL
	US$ (Ribu)	Rp. (Juta)	Rp. (Juta)	Rp. (Juta)
JUMLAH	27.472,75	439.563,76	2.407.123,99	2.846.687,75

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut

Optimalisasi pelayanan perizinan usaha yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berkontribusi langsung terhadap peningkatan realisasi investasi. Kemudahan, kecepatan, dan kepastian layanan perizinan menurunkan hambatan masuk (entry barrier) bagi pelaku usaha dan investor, sehingga mendorong bertambahnya investasi baru maupun perluasan investasi yang telah ada. Peningkatan aktivitas investasi tersebut tercermin dalam bertambahnya nilai realisasi penanaman modal, yang pada gilirannya meningkatkan komponen PMTB, khususnya dalam bentuk pembangunan bangunan usaha, pengadaan mesin dan peralatan, serta sarana produksi lainnya.

Dari sisi PMTB terhadap PDRB, investasi yang difasilitasi melalui perizinan usaha tidak hanya meningkatkan nilai output ekonomi, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi daerah melalui akumulasi aset tetap produktif. Semakin banyak investasi yang direalisasikan dalam bentuk aset tetap, semakin besar kontribusi PMTB dalam membentuk PDRB Kabupaten Tanah Laut. Dengan demikian, perbaikan iklim investasi melalui layanan perizinan yang efektif memiliki korelasi positif terhadap peningkatan proporsi PMTB terhadap PDRB.

Upaya peningkatan iklim investasi daerah di Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan melalui rangkaian kebijakan dan kegiatan yang saling terkait, dimulai dari pembenahan layanan publik hingga fasilitasi investasi strategis.

1. Pengoperasionalan Mall Pelayanan Publik (MPP)

   menjadi fondasi awal dalam menciptakan kemudahan berusaha, karena menyatukan berbagai layanan perizinan dan non-perizinan lintas instansi dalam satu sistem pelayanan terpadu. Keberadaan MPP secara langsung menurunkan biaya transaksi, mempercepat proses perizinan, dan meningkatkan kepastian layanan bagi pelaku usaha.

   Dampak strategis dari pengoperasionalan MPP terlihat pada meningkatnya kemudahan akses layanan bagi masyarakat dan pelaku

usaha, sekaligus memperkuat persepsi positif terhadap kualitas pelayanan publik dan iklim investasi daerah.

Mal Pelayanan Publik Tanah Laut (MPP) merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengintegrasikan berbagai jenis layanan dari instansi pemerintah, BUMN/BUMD, dan swasta dalam satu tempat.

MPP Tanah Laut berlokasi di Jl. H. Boejasin Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari dengan total terdapat 24 instansi pengisi gerai dengan 140 Layanan.

Tabel 3.6.6
Jumlah Layanan Mal Pelayanan Publik

No	OPD Kabupaten	Jumlah Layanan
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	24
2	Badan Pendapatan Daerah	1
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	41
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan	6
6	Dinas Kesehatan	1
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1
No	**BUMD Kabupaten**	**Jumlah Layanan**
1	PT Air Minum Berkah Banua	3
2	PT Bank Perekonomian Rakyat	2
3	Koperasi Pegawai Negeri Tuntung Pandang	3
No	**OPD Provinsi**	**Jumlah Layanan**
1	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah/ SAMSAT Pelaihari	2
No	**BUMD Provinsi**	**Jumlah Layanan**
1	Bank Kalsel Kantor Cabang Pelaihari	7
No	**Kementerian/Lembaga**	**Jumlah Layanan**
1	Pengadilan Negeri Pelaihari	22
2	Badan Narkotika Nasional	2
3	Kementerian Agama	2
4	Pengadilan Agama	2
5	Kepolisian Resor Tanah Laut	3
6	Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pelaihari	1
7	Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut	2

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut

2. Pembentukan Kebijakan Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha/Imlementasi Perda Penyelenggaraan Penanaman Modal

   Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memperkuat aspek kepastian hukum melalui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Penerapan perda ini memastikan bahwa kemudahan layanan yang diberikan melalui MPP didukung oleh landasan regulasi yang jelas dan konsisten. Dengan adanya kepastian hukum, investor memperoleh jaminan atas hak dan kewajibannya dalam menjalankan usaha, sehingga mendorong keputusan investasi yang bersifat jangka menengah dan panjang. Kepastian regulasi ini menjadi penghubung penting antara perbaikan layanan administratif dan peningkatan realisasi investasi yang berdampak pada pembentukan aset tetap produktif.

   Untuk mengoptimalkan implementasi perda tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menyusun Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2025 tentang pemberian insentif dan kemudahan berusaha. Kebijakan ini berfungsi sebagai instrumen operasional yang menjembatani norma hukum dengan praktik di lapangan. Insentif fiskal dan nonfiskal yang dirancang melalui Perbup diarahkan untuk meningkatkan daya tarik investasi, khususnya pada sektor prioritas dan strategis. Dengan adanya insentif dan kemudahan berusaha, kelayakan proyek investasi menjadi lebih kompetitif, sehingga mempercepat realisasi investasi dan meningkatkan kontribusinya terhadap PMTB serta penyerapan tenaga kerja.



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

3. Penyediaan tenaga ahli pendamping Online Single Submission (OSS)

   Seiring dengan penyediaan kemudahan kebijakan, pemerintah daerah juga menyadari bahwa hambatan teknis dalam sistem perizinan berbasis risiko masih dapat menjadi kendala bagi investor. Oleh karena itu, penyediaan tenaga ahli pendamping Online Single Submission (OSS) dilaksanakan sebagai langkah pendukung yang bersifat operasional. Pendampingan OSS membantu investor dalam memahami dan memenuhi persyaratan perizinan secara tepat dan cepat, sehingga memastikan bahwa kemudahan layanan, kepastian regulasi, dan insentif kebijakan dapat benar-benar dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha. Kegiatan ini berkontribusi langsung pada percepatan realisasi investasi dan mengurangi potensi keterlambatan pembangunan proyek.

   Berikut tugas yang dilaksanakan oleh pendamping OSS yang disediakan.

   a. Membantu dalam hal terkait kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Tanah Laut, Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha.
   b. Membantu melaksanakan Pengawasan Penanaman Modal kepada Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
   c. Membantu menyajikan rekapitulasi data realisasi Investasi Kabupaten Tanah Laut.

d. Membantu menyajikan rekapitulasi data realisasi Investasi Kabupaten Tanah Laut.
e. Membantu memberikan pendampingan dalam Pelaporan LKPM.
f. Membantu memudahkan Pelaku Usaha dalam Pembuatan NIB di Aplikasi Online Single Submission (OSS).

Jumlah Pembuatan NIB melalui aplikas OSS pada Tahun 2025 sebanyak dan jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun adalah sebanyak 1.180 izin yang diterbitkan.

4. Pelaksanaan promosi investasi

Pelaksanaan promosi investasi merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendukung peningkatan realisasi penanaman modal di daerah. Sepanjang periode pelaporan, promosi investasi telah dilaksanakan melalui berbagai media dan forum, baik secara langsung maupun digital, dengan menampilkan potensi unggulan daerah, kemudahan perizinan berusaha, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah terhadap investor. Upaya ini berkontribusi dalam meningkatkan visibilitas dan daya tarik daerah sebagai tujuan investasi, serta memperluas jangkauan informasi kepada calon investor potensial.

promosi investasi yang dilaksanakan selama tahun 2025 adalah meliputi keikutsertaan (pendukung) pada APKASI Otonomi Expo 2025 di Tangerang, Banten, serta Tanah Laut Expo 2025.

Promosi Investasi juga dilaksanakan melalui pemberian spanduk dan baliho kepada pelaku usaha khususnya UMK sejumlah total 84 meter, serta banner 1 buah.







5. Peningkatan kualitas tenaga kerja

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerind) melalui pelatihan kerja di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta, Balai Latihan Kerja (BLK) komunitas pesantren, serta program pemagangan di perusahaan. Kegiatan ini berkontribusi langsung terhadap indikator penyerapan tenaga kerja, karena tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pengalaman kerja lebih mudah diserap oleh dunia usaha dan industri. Ketersediaan tenaga kerja lokal yang siap kerja juga meningkatkan kepercayaan investor untuk merealisasikan investasinya di Kabupaten Tanah Laut, baik dalam bentuk pendirian usaha baru maupun ekspansi kapasitas produksi.

Secara simultan, peningkatan penyerapan tenaga kerja memberikan dampak lanjutan terhadap iklim investasi dan PMTB. Tenaga kerja yang terserap menciptakan stabilitas operasional bagi pelaku usaha, meningkatkan produktivitas, serta mendorong keberlanjutan investasi. Kondisi ini memperkuat siklus investasi daerah, di mana realisasi investasi mendorong pembentukan aset tetap (PMTB), PMTB meningkatkan kapasitas produksi daerah, dan kapasitas produksi yang meningkat menciptakan lapangan kerja baru.

6. Pembinaan Pelaku Usaha dalam penyusunan Pelaporan LKPM

   Pembinaan pelaku usaha dalam penyusunan pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan, ketepatan waktu, dan kualitas pelaporan investasi. Kegiatan pembinaan dilaksanakan melalui pendampingan teknis, konsultasi langsung, serta pemberian informasi terkait ketentuan dan tata cara pelaporan LKPM melalui sistem OSS. Pembinaan ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha memahami kewajiban pelaporan secara benar sekaligus meminimalkan kesalahan pengisian data yang dapat mempengaruhi akurasi informasi penanaman modal daerah.

   Pembinaan dilaksanakan dengan pemantauan baik secara Online melalui OSS maupun perjalanan ke lokasi sasaran. Pembinaan khususnya dilaksanakan kepada 25 target sasaran/ perusahaan,

serta sosilaisasi terhadap pelaku usaha mikro dan kecil tentang pentingnya perizinan berusaha.



Pelaksanaan pembinaan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman pelaku usaha dalam menyusun dan menyampaikan laporan LKPM. Namun masih terdapat tantangan berupa perbedaan kapasitas dan literasi pelaku usaha, khususnya usaha skala kecil dan menengah, dalam menyusun pelaporan secara mandiri. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan yang berkelanjutan dan lebih terstruktur, peningkatan intensitas pendampingan, serta penyediaan media panduan yang mudah dipahami dan diakses. Dengan demikian, pembinaan pelaku usaha dalam penyusunan pelaporan LKPM dapat mendorong peningkatan kualitas data investasi, mendukung pengendalian penanaman modal, serta menjadi dasar yang kuat dalam perumusan kebijakan investasi daerah.

7. Pengawasan Penanaman Modal

   Pengawasan penanaman modal merupakan fungsi penting pemerintah daerah dalam memastikan pelaksanaan kegiatan usaha berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perizinan berusaha, serta komitmen investasi yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui pemantauan realisasi penanaman modal, verifikasi kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban perizinan dan pelaporan LKPM, serta koordinasi dengan perangkat daerah terkait. Kegiatan pengawasan ini bertujuan untuk menjaga kepastian berusaha, mencegah pelanggaran, dan mendorong iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.

Pelaksanaan pengawasan penanaman modal memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepatuhan pelaku usaha dan kualitas data investasi daerah. Dalam pelaksanaannya masih dijumpai tantangan berupa keterbatasan sumber daya, kompleksitas kegiatan usaha, serta variasi tingkat kepatuhan pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan yang terintegrasi dan berbasis risiko, peningkatan kapasitas aparatur pengawas, serta optimalisasi pemanfaatan sistem digital seperti OSS dan data LKPM. Dengan pengawasan yang efektif dan berkelanjutan, penanaman modal diharapkan dapat memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengawasan dilaksanakan dalam rangka pencapaian target realisasi Penanaman Modal dengan memastikan ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku terkait perizinan dan pelaksanaan penanaman modal, menciptakan iklim investasi yang kondusif, mendorong investasi yang berkelanjutan serta memastikan penyebarakan investasi yang merata.

Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal merupakan kegiatan tersedianya data perkembangan realisasi Penanaman Modal dan informasi permasalahan yang dihadapi oleh Penanam Modal. Selain itu juga terlaksananya fasilitas penyelesaian permasalahan dalam Penanaman Modal dan terciptanya koordinasi yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta Perusahaan Penanaman Modal.

Tabel 3.6.7

Daftar Pengawasan yang dilaksanakan Tahun 2025

No	Perusahaan	Tanggal Perlaksanaan	Lokasi
1	PT. Ciomas Adisatwa	17 Maret 2025	Desa Ujung Baru
2	PT. Emida	25 Maret 2025	Desa Jorong
3	PT. Tirta Sukses Perkasa	24 Apr 2025	Desa Ujung Baru
4	PT. Maju Perkasa Indonesia	28 Apr 2025	Desa Bentok Kampung
5	PT. Sinar Nusantara Industries	30 Apr 2025	Desa Liang Anggang

No	Perusahaan	Tanggal Perlaksanaan	Lokasi
6	PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology, tbk (PT.SMART)	5 Mei 2025	Desa Bukit Mulia
7	PT. Sukses Wijaya Adimakmur	14 Mei 2025	Desa Nusa Indah
8	PT. Panen Embun Kemakmuran	20 Mei 2025	Desa Nusa Indah
9	CV. Baruna Sinar Abadi	1 Juni 2025	Desa Pulau Sari
10	PT. Karimata Timur	3 Juni 2025	Desa Nusa Indah
11	PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk	4 Juni 2025	Desa Nusa Indah
12	PT. Hokkan Deltapack Industri	19 Juni 2025	Desa Bentok Kampung

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut



Secara keseluruhan, kegiatan peningkatan iklim investasi yang dilaksanakan di Kabupaten Tanah Laut telah menunjukkan keterkaitan yang jelas dengan peningkatan realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja, serta memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan PMTB sebagai salah satu komponen utama PDRB. Dengan penguatan integrasi data dan evaluasi kinerja, kebijakan dan kegiatan ini berpotensi memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan daya saing investasi dalam jangka menengah dan panjang.

Faktor Penghambat

Berikut beberapa faktor penghambat yang menyebabkan indikator kinerja “Proporsi PMTB terhadap PDRB” tidak tercapai sesuai target, diantaranya :

- Minat dan realisasi investasi swasta yang belum optimal akibat keterbatasan kepastian usaha, perizinan, dan iklim investasi daerah.

- Keterbatasan infrastruktur pendukung investasi yang memengaruhi daya tarik penanaman modal dan skala PMTB.
- Akses pembiayaan dan permodalan yang masih terbatas, khususnya bagi pelaku usaha lokal, sehingga menahan ekspansi investasi aset tetap.
- Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan dan investasi yang belum optimal berdampak pada rendahnya efektivitas pembentukan modal.

Rencana Aksi

- Peningkatan iklim investasi daerah melalui penyederhanaan perizinan, pemberian kepastian usaha, dan fasilitasi penanaman modal untuk mendorong peningkatan PMTB.
- Penguatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung investasi guna meningkatkan daya tarik dan keberlanjutan investasi.
- Fasilitasi akses pembiayaan dan permodalan bagi pelaku usaha melalui kemitraan dengan lembaga keuangan dan dukungan kebijakan daerah.
- Penguatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, investasi, dan penganggaran agar pembentukan modal tetap dapat meningkat dan berkontribusi optimal terhadap PDRB.

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya kontribusi investasi terhadap perekonomian di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 28 ASN pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan di dukung oleh 8 Program dengan Pagu Rp. 3.191.380.448,97 dan terealisasi Rp. 3.124.397.827,00 atau sebesar 97,90%.

Tabel 3.6.8
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Pelayanan Penanaman Modal	86.250.815,16	**75.434.745,00**
2	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.902.990.013,14	**2.862.906.532,00**
3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	10.408.980,00	**10.268.980,00**
4	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	18.359.637,90	**16.242.825,00**
5	Program Promosi Penanaman Modal	40.628.526,53	**39.722.345,00**

No	Program	Pagu	Realisasi
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	132.742.476,24	**119.822.400,00**
Jumlah		**3.191.380.448,97**	**3.124.397.827,00**

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Efisiensi kinerja diukur menggunakan rumus berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

$$\text{Efisiensi} = \frac{(3.191.380.448,97 \times 99,22\%) - 3.124.397.827,00}{(3.191.380.448,97 \times 99,22\%)} \times 100\%$$

Efisiensi = 11,08%

Tabel 3.6.9
Efisiensi Sasaran Strategis 6

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
99,22%	97,90 %	1,33%

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 7
Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran

Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran diukur mealui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.7.1
Capaian Kinerja Terhadap Target 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			TAHUN 2025		
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,17	3,58	3,45	3,25	3,30	98,48%
2	Angka Kemiskinan	%	3,86	3,73	3,74	3	3	100%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2025								99,24%

Tabel 3.7.2
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2025 THD TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,25	3,30	98,48%	3,04	92,12%
2	Angka Kemiskinan	%	3	3	100%	2,36	78,67%

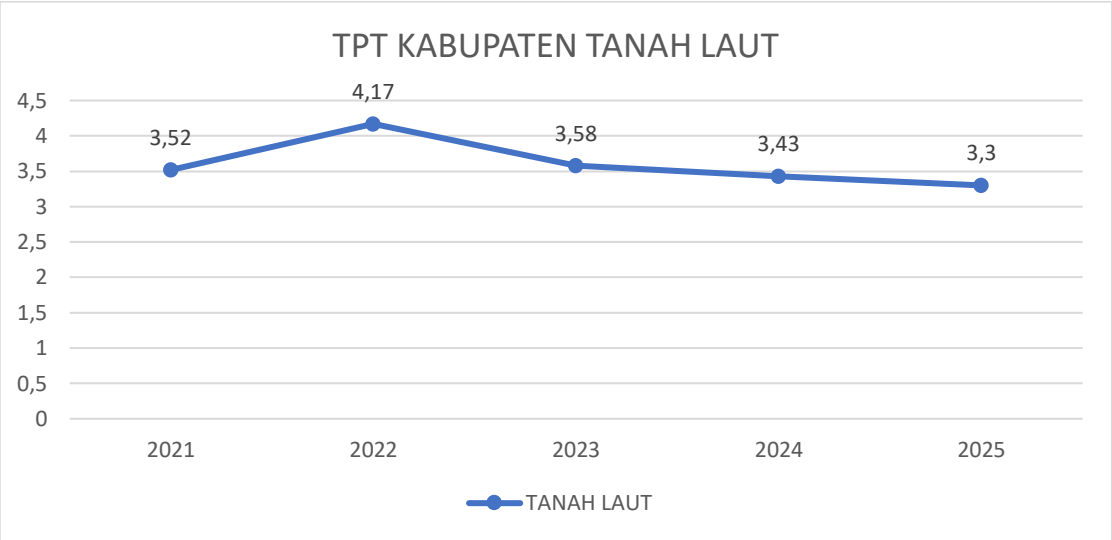
a. Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan tabel di atas, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 adalah sebesar 3,30 mengalami penurunan sebesar 0,15 poin dibandingkan tahun 2024 yaitu sebesar 3,45.

Tren perkembangan TPT di Kabupaten Tanah Laut selama kurun waktu 2021-2025 adalah sedikit berfluktuatif, seperti tergambar pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.7.1

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tanah Laut per Agustus Tahun 2021-2025

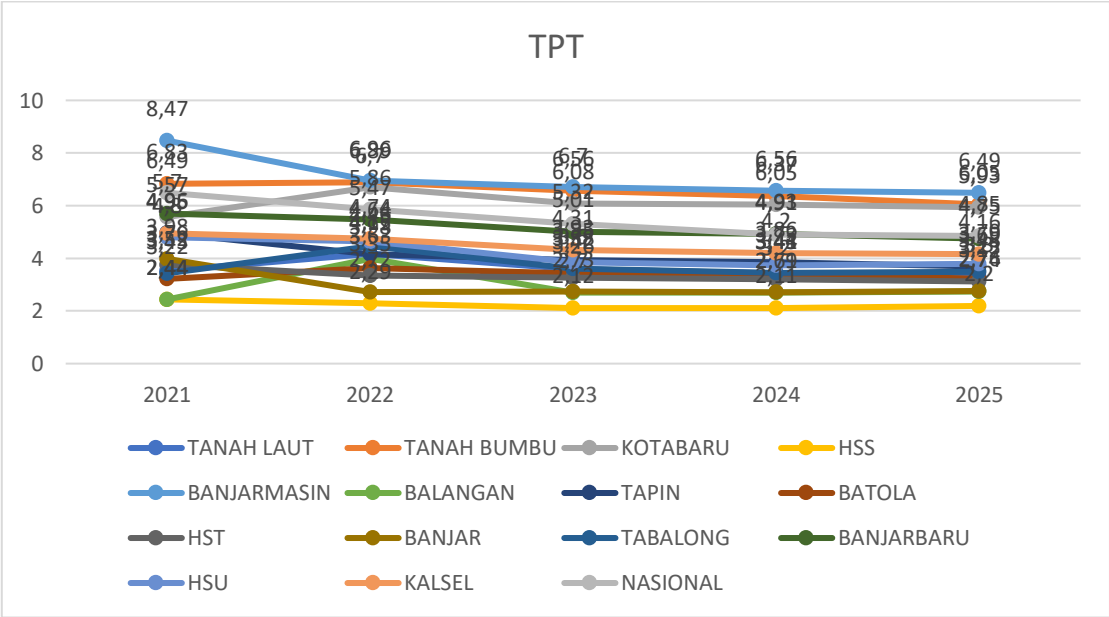


Sumber: BPS Kabupaten Tanah Laut

Berikut dibawah ini adalah grafik perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2021-2025 Kabupaten/Kota se-Regional Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Selatan.

Grafik 3.7.2

Tingkat pengangguran terbuka Kab/Kota di Kalimantan Selatan, Provinsi Tahun 2021-2025



Sumber data BPS Kalimantan Selatan

Tabel 3.7.3

Tingkat pengangguran terbuka Kab/Kota di Kalimantan Selatan, Provinsi

Tahun 2021-2025

Kab/Kota	Tahun			
	2022	2023	2024	2025
HSS	2,44	2,29	2,12	2,11
Balangan	2,44	3,98	2,7	2,69
Banjar	3,98	2,72	2,73	2,71
HST	3,76	3,35	3,26	3,2
Batola	3,22	3,63	3,42	3,41
Tanah Laut	3,52	4,17	3,58	3,43
Tabalong	3,43	4,46	3,6	3,44
HSU	4,8	4,64	3,85	3,73
Tapin	4,96	4,15	3,93	3,86
Kalsel	4,95	4,74	4,31	4,2
Nasional	6,49	5,86	5,32	4,91
Banjarbaru	5,7	5,47	5,01	4,93
Kotabaru	5,57	6,7	6,08	6,05
Tanah Bumbu	6,83	6,89	6,56	6,37
Banjarmasin	8,47	6,96	6,7	6,56

Dari grafik dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 untuk lingkup provinsi Kalimantan Selatan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ***Kabupaten Tanah Laut lebih rendah*** dibanding Kabupaten Tanah Bumbu dengan angka 6,05 dan Kabupaten Kotabaru dengan angka 5,93.

Untuk lingkup nasional dan provinsi Kalimantan Selatan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 yaitu 3,30, ***lebih rendah 0,86 poin*** jika dibandingkan ***dengan Provinsi Kalimantan Selatan*** dengan angka 4,16 dan ***lebih rendah 1,55*** jika di bandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka ***Indonesia*** dengan angka 4,85.

Rumus Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah rasio jumlah pengganggur terbuka (PP) terhadap jumlah angkatan kerja (PAK).

$$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$$

Keterangan :

TPT : Tingkat pengangguran terbuka (%)

PP : Jumlah pengangguran (orang)

PAK : Jumlah angkatan kerja (orang)

(Sumber data oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut)

Pengangguran Terbuka (PT) dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Mereka yang mencari pekerjaan
2. Mereka yang mempersiapkan usaha
3. Mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin dapat pekerjaan
4. Mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja

Tabel 3.7.4
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kab. Tanah Laut Tahun 2020 s/d Tahun 2025

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ANGKATAN KERJA (Orang)	181.817	185.049	184.133	185.267	198.160	197.620
BEKERJA (Orang)	175.337	178.543	176.458	178.635	191.362	191.093
PENGANGGURAN (Orang)	6.490	6.506	7.675	6.632	6.798	6.527
TPAK (%)	72,03	72,27	70,92	69,61	73,03	71,98
TPT (%)	3,57	3,52	4,17	3,58	3.43	3,30
PENDUDUK USIA 15th ke atas (orang)	252.428	256.054	259.629	266.148	271.330	274.533
TINGKAT KESEMPATAN KERJA (%)	96,44	96,48	95,83	96,42	96,57	96,70

Sumber data : BPS Tanah Laut

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT pada tahun 2025 sebesar 3,30 %. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 3 orang penganggur.

Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 tidak terlepas dari meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor utama perekonomian daerah. Sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan masih menjadi tulang punggung ekonomi Tanah Laut dan berperan besar dalam menyerap tenaga kerja, terutama di wilayah perdesaan.

Aktivitas produksi yang relatif stabil serta meningkatnya kebutuhan tenaga kerja musiman turut membantu mengurangi jumlah penduduk yang menganggur.

Selain sektor primer, perkembangan sektor jasa dan perdagangan juga berkontribusi terhadap penurunan TPT. Meningkatnya aktivitas UMKM, usaha perdagangan lokal, serta jasa transportasi dan jasa lainnya membuka peluang kerja baru, khususnya bagi penduduk usia muda dan lulusan pendidikan menengah. Fleksibilitas sektor informal memungkinkan tenaga kerja yang sebelumnya menganggur dapat segera terserap, meskipun dengan karakteristik pekerjaan yang belum sepenuhnya formal.

Faktor lain yang berpengaruh adalah pelaksanaan berbagai program pemerintah daerah di bidang ketenagakerjaan. Program pelatihan kerja, peningkatan keterampilan, serta pembinaan kewirausahaan mendorong pencari kerja untuk memiliki kompetensi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Upaya ini membantu memperpendek masa tunggu kerja dan meningkatkan peluang masyarakat untuk memperoleh pekerjaan atau menciptakan usaha mandiri.

Penurunan TPT juga dipengaruhi oleh membaiknya kondisi perekonomian secara umum, baik di tingkat daerah maupun provinsi. Pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga pelaku usaha lebih berani melakukan ekspansi dan merekrut tenaga kerja baru. Kondisi ini berdampak positif terhadap berkurangnya jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Tanah Laut.

Secara keseluruhan, penurunan TPT Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 merupakan hasil dari kombinasi antara peningkatan aktivitas ekonomi, peran sektor-sektor penyerap tenaga kerja, serta dukungan kebijakan dan program pemerintah daerah. Jika upaya ini terus dilanjutkan dan diiringi dengan peningkatan kualitas tenaga kerja, maka tren penurunan pengangguran di Kabupaten Tanah Laut berpotensi berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.

Memperhatikan amanat UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2013 pasal 4 maka **tujuan pembangunan sektor ketenagakerjaan di Kabupaten Tanah Laut dalam rangka menurunkan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** secara lebih spesifik dapat dirumuskan sebagai berikut :

1) **Meningkatkan pertumbuhan, persebaran, dan perluasan kesempatan kerja di berbagai sektor lapangan usaha** yang diampu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis lainnya, yang terdiri atas 17 sektor yaitu:
   a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
   b. Pertambangan dan Penggalian;
   c. Industri Pengolahan;
   d. Pengadaan Listrik dan Gas;
   e. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang;
   f. Konstruksi;
   g. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
   h. Transportasi dan Pergudangan;
   i. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
   j. Informasi dan Komunikasi;
   k. Jasa Keuangan dan Asuransi;
   l. Real Estate;
   m. Jasa Perusahaan;
   n. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;
   o. Jasa Pendidikan;
   p. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial;
   q. Jasa Lainnya.

   Sehingga terjadi peningkatan pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja dan menurunkan tingkat pengangguran. Pengangguran terjadi akibat dari ketidakseimbangan antara tersedianya lapangan pekerjaan dengan kebutuhan masyarakat akan pekerjaan.
2) Meningkatkan kualitas penyerapan tenaga kerja dan kompetensi tenaga kerja sehingga mampu menghasilkan nilai tambah lebih tinggi serta menyandang status dan jenis ketenagakerjaan lebih baik. Rendahnya kualitas angkatan kerja baik dari segi pendidikan formal maupun keterampilan (kompetensi) menjadi permasalahan bagi tenaga kerja.
3) Meningkatkan fleksibilitas pasar kerja dengan cara memberi kesempatan lebih luas bagi dunia usaha maupun masyarakat untuk berperan dalam pembangunan tenaga kerja. Pemecahan permasalahan ketenagakerjaan

merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.

4) Meningkatkan perlindungan keamanan, keselamatan dan kesejahteraan pekerja. Perlindungan tenaga kerja mencakup jaminan pemenuhan hak dasar pekerja, penyediaan jaminan sosial (BPJS) bagi pekerja formal dan informal, pencegahan pekerja anak, dan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja.

Untuk mencapai tujuan pembangunan ketenagakerjaan diperlukan kebijakan umum yang menitikberatkan pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan, yaitu :

1. *Kebijakan umum di bidang ketenagakerjaan* terutama dari sisi penguatan kebutuhan (*demand*) mencakup:
   1) Mempersiapkan tenaga kerja memasuki pasar tenaga kerja;
   2) Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan;
   3) Meningkatkan kerja kepada sumber daya produktif;
   4) Mendorong pengembangan ekonomi perdesaan;
   5) Memfungsikan pasar tenaga kerja:
2. *Kebijakan umum pengendalian penduduk*, mencakup pembangunan di bidang kesehatan penduduk/masyarakat untuk mendorong terciptanya tenaga kerja berkualitas dan berdaya saing, dan kebijakan pengendalian tambahan angkatan kerja, termasuk upaya menahan anak untuk tetap bersekolah ketika mereka merupakan Angkatan kerja di usia sekolah. Dengan pendekatan menanamkan pentingnya nilai pendidikan bagi masa depan anak-anak dalam keluarga.
3. *Kebijakan umum Investasi*. Kebijakan penanaman modal akan dapat memberi arah bagi upaya pengembangan dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Tanah Laut yang pada akhirnya akan membuka lapangan usaha dan menyerap tenaga kerja baru.

Pelaksanaan Kebijakan Umum di atas harus di dukung dengan **Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)**. Kebijakan pendidikan bertujuan untuk peningkatan kualitas tenaga kerja. Tersedianya penduduk usia kerja yang terdidik dan terampil merupakan dasar perencanaan tenaga kerja, karena dengan demikian pada umumnya akan tebuka ketersediaan perluasan dan peluang pasar

kerja yang lebih besar dan berkualitas. Tenaga kerja yang berkualitas otomatis akan dicari oleh berbagai pelaku usaha didalam maupun luar negeri. Pendidikan tidak terbatas pada pendidikan formal namun juga kegiatan-kegiatan pendidikan informal termasuk pendidikan keluarga, pendidikan agama serta kegiatan yang terkait yang dapat menumbuhkan minat belajar.

Pelaksanaan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 3.7.5

Rekapitulasi Data Peningkatan Kualitas Produktivitas Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

No	Lembaga Penyelenggara	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta (Org)			Jumlah Kelulusan (Org)		Sumber Dana	Keterangan
			L	P	Jumlah	Pelatihan / Pemagangan	Uji Kompetensi		
1	BBPLK Kementerian Ketenagakerjaan RI	PBK Institutional Boarding	0	0	0	0	0	APBN	Tidak ada pengiriman peserta
2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut	PBK Boarding – Pelatihan Alat Angkat Angkut	14	0	14	14	10	APBD	Pelatihan Operator Alat Berat (LPK PT. Alkon Best Mandiri)
3	BLK Pelaihari	PBK Institutional non Boarding (APBN)	0	0	0	0	0	APBN	Tidak ada paket kegiatan
		PBK Institutional non Boarding (APBD)	229	267	496	0	273	APBD	30 Paket
JUMLAH Pelatihan oleh BLK Pelaihari			**229**	**267**	**496**	**0**	**273**		
4	BLK Komunitas	PBK Institutional non Boarding	0	0	0	0	0	Mandiri	Tidak ada paket kegiatan
5	LPK Swasta	PBK Institutional Boarding	128	166	294	238	0	Mandiri dan Kerjasama	Selain kegiatan mandiri juga ada beberapa LPK yang melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta
6	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Prov. Kal-Sel	Pemagangan Dalam Negeri	0	0	0	0	0	APBN	Tidak ada paket kegiatan

No	Lembaga Penyelenggara	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta (Org)			Jumlah Kelulusan (Org)		Sumber Dana	Keterangan
			L	P	Jumlah	Pelatihan / Pemagangan	Uji Kompetensi		
7	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut	Pemagangan Dalam Negeri	11	1	12	12	0	APBD	Pelaksanaanaya di PT. PLN Indonesia Power UBP Asam-asm, PT. Panen Embun Kemakmuran,PT. Wahyu Putra Ramadhan dan Yayasn Ubudiyah Muhammad Kasi
TOTAL			**368**	**434**	**802**	**250**	**283**		

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, 2025

Adapun kebijakan terkait dengan pembangunan bidang ketenagakerjaan di bidang pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut:

1. Mendorong tersedianya lembaga-lembaga pelatihan yang pelatihannya berorientasi pada duna kerja. Dengan demikian, angkatan kerja tidak langsung masuk pasar kerja, akan tetapi terserap lebih dahulu ke lembaga pelatihan, sehingga menciptakan keluaran berupa tenaga kerja yang lebih siap pakai.
2. Revitalisasi Pelatihan Kerja (Balai Latihan Kerja) melalui perbaikan infrastruktur dan sarana prasarana pelatihan yang ada, serta mendorong UPTD Balai Latihan Kerja untuk semakin mudah diakses oleh berbagai kalangan, termasuk pula melaksanakan pelatihan ke desa dengan akses dana desa, berdasarkan hasil musrembang.
3. Mendorong peningkatan pelatihan keterampilan kerja para santri pondok pesantren, termasuk bantuan sarana, agar dapat melakukan usaha produktif melalui BLK Komunitas;
4. Mendorong peningkatan pelatihan keterampilan kerja para pencari kerja, melalui bantuan sarana prasarana LPK Swasta.
5. Penciptaan kemudahan akses informasi pelatihan melaui IT, sertifikasi dan penempatan (kios 3 in 1) bagi calon tenaga kerja;

6. Peningkatan jumlah dan kualitas instruktur secara bertahap melalui up grading, uji on the job training instruktur;
7. Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi secara konsisten, didukung pengembangan TUK (Tempat Uji Kompentensi);
8. Mengarahkan Pelatihan Berbasis Masyarakat untuk mendorong terciptanya lapangan kerja usaha baru dan mendorong keberanian untuk memulai usaha baru (penumbuhan wirausaha baru) bagi pencari kerja muda, baik sarjana baru maupun non sarjana. Termasuk pengembangan pelatihan alih kerja (PAKER) atau alih profesi pekerja ter-PHK;
9. Peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi penyandang disabilitas melaui pelatihan kerja di berbagai bidang keahlian, melalui Lembaga pelatihan kerja dengan memperhatikan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
10. Sertifikasi kompentensi di akhir pelatihan dan pelaksanaan Uji Kompetensi bagi lulusan BLK Pemerintah, BLK Komunitas, LPK Swasta oleh lembaga Sertifikasi Profesi;
11. Membangun jejaring diantara pemangku kepentingan (stakeholders) bidang pelaithan kerja yang meliputi antara lain: dunia pendidikan (pendidikan umum kejuruan, maupun perguruan tinggi), dunia usaha dan dunia industri melalui Bursa Kerja Khusus (BKK);
12. Pengembangan program dan peningkatan kualitas kelembagaan yang setara dengan standar kebutuhan pasar kerja yang bertaraf nasional maupun interasional.
13. Mengoptimalkan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan;

Semakin meningkatnya realisasi kebijakan di atas diharapkan akan memperbesar kebutuhan tenaga kerja di Kabupaten Tanah Laut. Pada bidang ketenagakerjaan perlu suatu kebijakan yang tidak hanya memperbesar akses dalam informasi pasar kerja melainkan juga terhadap kesiapan tenaga kerja dalam daerah. Salah satu bentuk kesiapan adalah perlunya pemetaan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja yang memenuhi standar nasional maupun internasional. Dengan melakukan pemetaan kompetensi dan sertifikasi keahlian diharapkan dapat memperbesar daya saing tenaga kerja dalam daerah terhadap tenaga kerja yang berasal dari luar kabupaten/kota atau luar provinsi bahkan tenaga kerja asing.

Upaya yang telah dilakukan :

- Pelatihan dengan pola pemagangan berbasis pengguna

  Pemerintah daerah melaksanakan pelatihan dengan pola pemagangan berbasis pengguna kepada sebanyak 12 orang peserta. Pelatihan ini dirancang agar peserta memperoleh pengalaman langsung di tempat kerja sesuai kebutuhan dunia usaha atau industri, sehingga keterampilan yang diperoleh dapat langsung diterapkan untuk meningkatkan produktivitas dan peluang kerja.



- Pelatihan kewirausahaan melalui program perluasan kesempatan kerja

  Pemerintah Daerah melaksanakan pelatihan kewirausahaan melalui program perluasan kesempatan kerja kepada sebanyak 30 orang peserta. Pelatihan ini difokuskan bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) atau istri korban PHK di perusahaan PT. Indofood CBP Banjarmasin, dengan tujuan memberikan keterampilan baru yang dapat langsung dimanfaatkan untuk membuka usaha mandiri.

  Peserta pelatihan diberikan materi praktis sesuai potensi lokal dan kebutuhan pasar, antara lain pelatihan pembuatan cake dan dekor yang dilaksanakan di Kecamatan Bati-Bati, serta pengolahan ikan dalam kemasan yang dilaksanakan di Desa Salaman, Kecamatan Kintap. Pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan teknis, pengelolaan produk, dan pemasaran, sehingga mereka mampu mengembangkan usaha mikro yang produktif dan bernilai ekonomis.



- Pelatihan siap kerja setiap tahun

  Pemerintah daerah melaksanakan pelatihan siap kerja setiap tahun dengan jumlah peserta sebanyak 496 orang. Pelatihan diselenggarakan baik di Balai Latihan Kerja (BLK) Pelaihari maupun secara lokal di desa, sehingga memudahkan akses masyarakat yang tersebar di berbagai wilayah.

  Pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan teknis, kompetensi kerja, dan pengetahuan praktis yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal maupun regional. Dengan keterampilan yang diperoleh, peserta diharapkan dapat lebih mudah memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas, atau membuka usaha mandiri.

Hambatan :

Berikut beberapa faktor penghambat yang menyebabkan indikator kinerja “Tingkat Pengangguran Terbuka” tidak tercapai sesuai target, diantaranya :

1. Kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan pasar kerja, sehingga lulusan pendidikan dan pelatihan belum sepenuhnya sesuai dengan permintaan dunia usaha dan industri.

2. Terbatasnya penciptaan lapangan kerja baru, khususnya pada sektor formal, akibat dinamika ekonomi dan keterbatasan investasi di daerah.

3. Rendahnya keterampilan dan pengalaman kerja pencari kerja, terutama pada kelompok usia muda dan lulusan baru.

4. Akses informasi pasar kerja yang belum optimal, sehingga peluang kerja yang tersedia belum sepenuhnya diketahui oleh pencari kerja.
5. Minat berwirausaha yang masih terbatas, serta keterbatasan akses permodalan dan pendampingan usaha bagi calon wirausaha baru.
6. Dampak fluktuasi ekonomi dan perkembangan teknologi, yang menyebabkan perubahan kebutuhan tenaga kerja dan berpotensi menimbulkan pengangguran struktural.

Rencana Aksi :

1. Meningkatkan kesesuaian kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja (link and match) serta penguatan peran BLK dan lembaga pelatihan kerja.
2. Mendorong penciptaan lapangan kerja baru melalui fasilitasi investasi, pengembangan sektor unggulan daerah, dan dukungan terhadap UMKM.
3. Meningkatkan kualitas dan daya saing pencari kerja, khususnya lulusan baru, melalui program magang, pelatihan siap kerja, dan sertifikasi kompetensi.
4. Memperkuat layanan informasi pasar kerja, seperti bursa kerja, job fair, dan pemanfaatan platform digital ketenagakerjaan.
5. Mendorong kewirausahaan dan usaha mandiri, melalui pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, serta fasilitasi akses permodalan.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program penurunan TPT untuk memastikan efektivitas pelaksanaan serta penyesuaian kebijakan sesuai perkembangan kondisi ketenagakerjaan.

b. Angka Kemiskinan

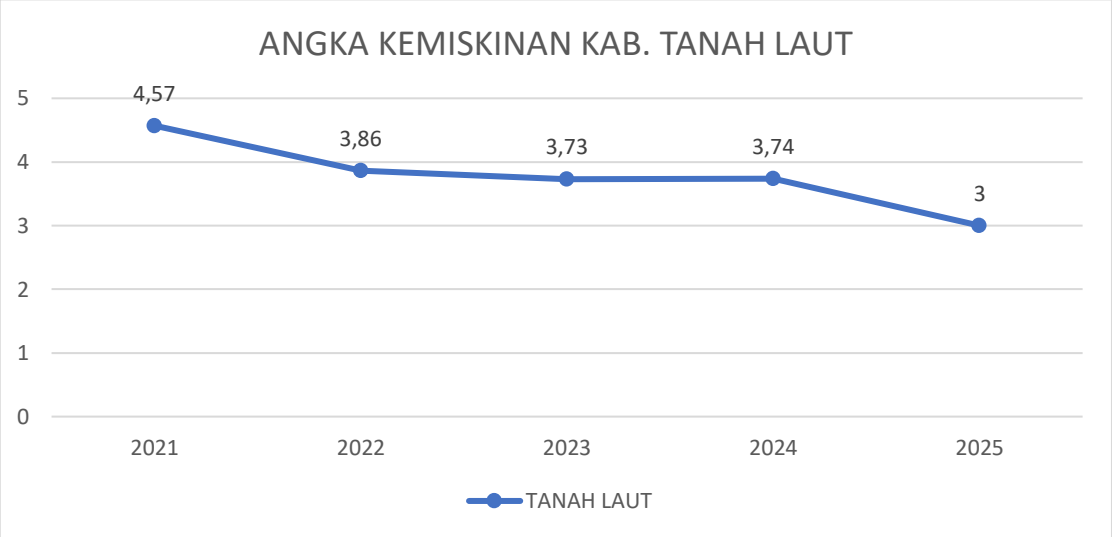
Angka kemiskinan Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 adalah sebesar 3,00 mengalami peningkatan sebesar 0,452 dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar

3,74. Lebih rendah 0,84 point dibandingkan dengan Angka Kemiskinan Provinsi Kalimantan Sealatan yaitu pada angka 3,84.

Angka Kemiskinan (Poverty Rate) adalah persentase penduduk yang memiliki pengeluaran atau pendapatan per kapita di bawah garis kemiskinan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum untuk hidup layak, termasuk kebutuhan pangan dan non-pangan. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan menjadi acuan dalam perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan. Pada 2025, Angka Kemiskinan Tanah Laut sebesar 3,00 yang berarti terdapat 3,00 persen penduduk miskin dari total seluruh penduduk di Kabupaten Tanah Laut.

Grafik 3.7.3

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Kabupaten Tanah Laut

Salah satu indikator sosial ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah perkembangan jumlah penduduk miskin. Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi tidak hanya di Kabupaten Tanah laut, namun menjadi permasalahan dunia. Perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Tanah Laut sangat fluktuatif.

Pada tahun 2021-2025 Angka Kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut menunjukan tren yang cenderung fluktuatif. Pada tahun 2021 terjadi penurunan angka kemiskinan yang signifikan dari 4,57 menjadi 3,86 pada tahun 2022, di tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 3,73 kemudian mengalami kenaikan

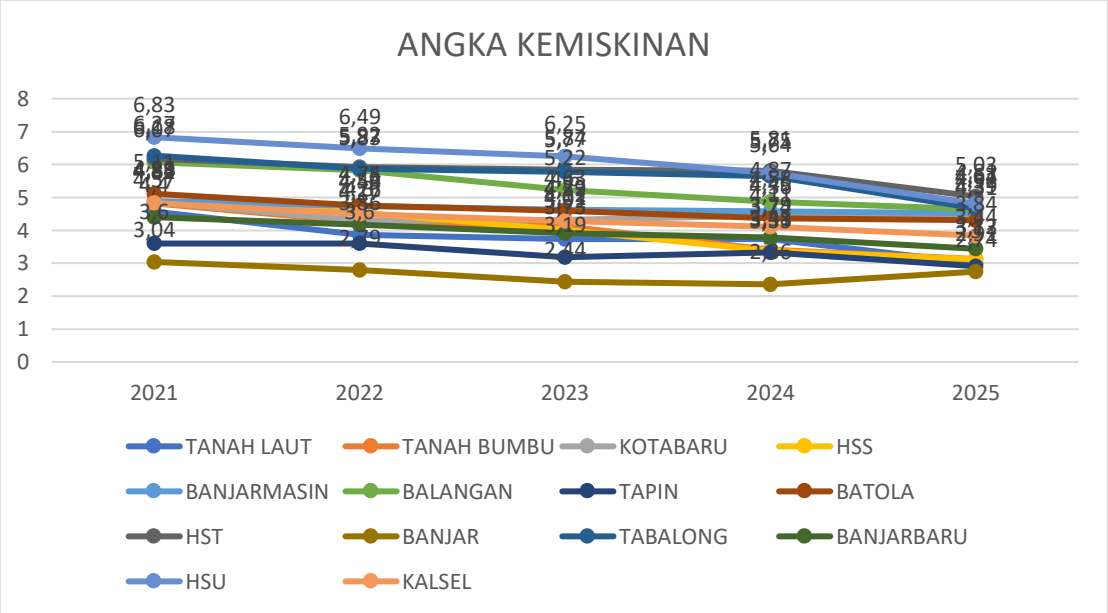
pada tahun 2024 menjadi 3,74. Hingga pada tahun 2025 mengalami penurunan signifikan Kembali menjadi 3,00. Hal ini menandakan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin jauh pada garis kemiskinan.

Berikut dibawah ini adalah grafik perbandingan Angka Kemiskinan tahun 2021-2025 Kabupaten/Kota se-Regional Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Selatan.

Grafik 3.7.4

Angka Kemiskinan Kab/Kota di Kalimantan Selatan, Provinsi

Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Kabupaten Tanah Laut

Tabel 3.7.6

Angka Kemiskinan Kab/Kota di Kalimantan Selatan, Provinsi

Tahun 2021-2025

Kab/Kota	Tahun			
	2022	2023	2024	2025
Banjar	3.04	2.79	2.44	2.36
Tapin	3.6	3.6	3.19	3.33
HSS	4.84	4.54	4.01	3.38
Tanah Bumbu	4.82	4.26	4.12	3.41
Tanah Laut	4.57	3.86	3.73	3.74
Banjarbaru	4.4	4.17	3.92	3.79
Kalsel	4.83	4.49	4.29	4.11

Kab/Kota	Tahun			
	2022	2023	2024	2025
Batola	5.11	4.75	4.6	4.36
Kotabaru	4.86	4.3	4.32	4.45
Banjarmasin	4.89	4.74	4.63	4.58
Balangan	6.07	5.83	5.22	4.87
Tabalong	6.27	5.87	5.77	5.64
HSU	6.83	6.49	6.25	5.75
HST	6.18	5.92	5.84	5.81

Dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menerapkan strategi penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan, melalui tiga pendekatan utama, yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan.

1. Mengurangi Beban Pengeluaran

Strategi ini bertujuan menurunkan pengeluaran dasar rumah tangga miskin agar kebutuhan pokok tetap terpenuhi meskipun pendapatan terbatas. Upaya yang dilakukan antara lain melalui penyediaan layanan dasar dan bantuan sosial yang tepat sasaran. Bentuk implementasinya meliputi:

a. Pemberian bantuan sosial dan perlindungan sosial (bantuan tunai, bantuan pangan, subsidi).

Penyaluran bantuan sosial daerah dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial kepada kelompok masyarakat rentan. Bantuan sosial diberikan secara terencana dan tepat sasaran berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data penerima manfaat.

Penyaluran bantuan sosial daerah kepada masyarakat desil 1 diberikan kepada sebanyak 25 orang, yaitu kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah. Bantuan ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin ekstrem serta memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar penerima manfaat.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melaksanakan penganggaran dan penyaluran bantuan sosial terencana dalam bentuk beras kepada kelompok rentan, yaitu penyandang disabilitas dan anak terlantar

sebanyak 530 orang, serta kepada lanjut usia (lansia) sebanyak 1.790 orang. Pemberian bantuan pangan ini dimaksudkan untuk menjaga ketahanan pangan penerima manfaat sekaligus meningkatkan perlindungan sosial bagi kelompok yang memiliki keterbatasan fisik, sosial, maupun ekonomi.

Di samping bantuan sosial, upaya penanggulangan masalah kesejahteraan sosial juga didukung melalui peningkatan layanan Rumah Singgah yang melayani Penyandang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Peningkatan layanan ini dilakukan dengan memperbaiki kualitas pelayanan, fasilitas, serta pendampingan sosial, sehingga Rumah Singgah dapat berfungsi secara optimal sebagai tempat perlindungan sementara, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial bagi PPKS.

Melalui pelaksanaan berbagai program bantuan sosial dan peningkatan layanan tersebut, Pemerintah Daerah berupaya memperkuat jaring pengaman sosial, mengurangi kerentanan kelompok sasaran

b. Penyediaan layanan pendidikan gratis

Pelaksanaan layanan pendidikan gratis di Kabupaten Tanah Laut telah dilaksanakan secara menyeluruh pada satuan pendidikan negeri mulai dari PAUD, SD hingga SMP. Kebijakan ini didukung melalui penganggaran dan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) kepada seluruh satuan pendidikan, sehingga biaya operasional sekolah tidak dibebankan kepada peserta didik maupun orang tua. Kondisi ini secara langsung berkontribusi dalam mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.

Selain pembiayaan operasional sekolah, Pemerintah Daerah juga memberikan perhatian khusus kepada siswa kurang mampu melalui bantuan langsung yang bersifat afirmatif. Bantuan dalam bentuk uang tunai disalurkan kepada 1.410 peserta didik SD dan 268 peserta didik SMP, yang bertujuan membantu pemenuhan kebutuhan pendidikan pribadi siswa. Selanjutnya, bantuan perlengkapan sekolah diberikan kepada 2.044 peserta didik SD dan 116 peserta didik SMP, guna memastikan seluruh siswa memiliki sarana belajar yang memadai dan mencegah terjadinya putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi.

Untuk mendukung ketersediaan bahan ajar, bantuan buku teks dan nonteks juga disalurkan kepada peserta didik, masing-masing sebanyak 12.870 buku untuk siswa SD dan 4.104 buku untuk siswa SMP. Penyediaan buku ini berperan penting dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran serta mengurangi pengeluaran orang tua untuk pengadaan buku pelajaran.

Di samping pendidikan formal, dukungan juga diberikan kepada pendidikan kesetaraan melalui pemberian beasiswa bagi 40 warga belajar, serta penyaluran Bantuan Operasional Pendidikan kepada 12 satuan pendidikan kesetaraan dan 296 satuan PAUD. Langkah ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam menjamin akses pendidikan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak usia dini dan warga belajar yang belum terlayani pendidikan formal.

Secara keseluruhan, rangkaian program dan bantuan pendidikan tersebut telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan, menurunkan potensi angka putus sekolah, serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dari sisi penanggulangan kemiskinan, kebijakan pendidikan gratis dan bantuan afirmatif ini efektif dalam mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin dan hampir miskin, sehingga mendukung upaya penurunan angka kemiskinan secara berkelanjutan di Kabupaten Tanah Laut.

c. Penyediaan layanan kesehatan gratis

Pelaksanaan program Universal Coverage Health (UHC) di Kabupaten Tanah Laut menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian kepesertaan sebesar 98,96% dari total penduduk. Capaian ini mengindikasikan bahwa hampir seluruh masyarakat telah memiliki akses terhadap jaminan kesehatan, sehingga risiko pembiayaan kesehatan yang dapat memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga, khususnya masyarakat miskin dan rentan, dapat ditekan secara signifikan.

Pemberian bantuan iuran dan subsidi iuran kepada sebanyak 222.399 jiwa merupakan bentuk intervensi pemerintah daerah dalam mengurangi beban pengeluaran masyarakat terhadap layanan kesehatan. Kebijakan ini berkontribusi langsung pada peningkatan akses layanan kesehatan yang adil dan merata, sekaligus menjadi instrumen penting dalam strategi

penanggulangan kemiskinan melalui pengurangan pengeluaran rumah tangga miskin dan rentan miskin.

Meskipun capaian UHC telah mendekati 100%, masih terdapat sebagian kecil masyarakat yang belum tercover. Hal ini menjadi tantangan yang perlu ditindaklanjuti melalui optimalisasi pendataan kepesertaan, pemutakhiran data kependudukan, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Secara keseluruhan, implementasi UHC di Kabupaten Tanah Laut telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan mendukung upaya penurunan angka kemiskinan secara berkelanjutan

Cakupan UHC secara rinci sebagai berikut:

Tabel 3.7.7
Terkait Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk menurut Jenis Jaminan Kabupaten/ Kota Tahun 2025

No	Jenis Kepesertaan	Peserta Jaminan Kesehatan	
		Jumlah	Persentasi
1	**PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)**		
	PBI APBN	72,504	19.46
	PBI APBD	149,895	40.23
	Sub Jumlah PBI	**222,399**	**59.69**
2	**NON PBI**		
	Pekerja Penerima Upah (PPU)	103,829	27.87
	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/Mandiri	37,791	10.14
	Bukan Pekerja (BP)	4,704	1.26
	Sub Jumlah NON PBI	146,324	39.27
	Jumlah (Kab / Kota)	368,723	98.96
	Jlh Penduduk 1 Desember Tahun 2025	**372,583**	

Untuk pelayanan kesehatan dasar pada Fasilitas Pelayanan Dasar diberikan layanan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat Tanah Laut dengan syarat memiliki KTP dengan domisili di Kabupaten Tanah Laut.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut meraih penghargaan UHC Awards Kategori Madya.



c. Pengendalian harga kebutuhan pokok melalui stabilisasi pasokan dan distribusi.

Pelaksanaan Pasar Murah di tingkat desa dan kecamatan sebanyak 45 kegiatan merupakan upaya konkret pemerintah daerah dalam menjaga keterjangkauan harga Bahan Pokok Penting (Bapokting), khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kegiatan ini berperan efektif dalam menekan lonjakan harga pada periode tertentu, meningkatkan daya beli masyarakat, serta memberikan akses langsung terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang lebih stabil dan terjangkau.

Selanjutnya, pemantauan harga Bapokting secara real-time menjadi instrumen penting dalam mendeteksi secara dini potensi gejolak harga di pasar. Sistem pemantauan ini memungkinkan pemerintah daerah memperoleh data harga yang akurat dan terkini sebagai dasar pengambilan kebijakan yang cepat dan tepat, termasuk penentuan lokasi dan waktu pelaksanaan pasar murah maupun intervensi lainnya.

Selain itu, pemantauan ketersediaan Bapokting yang dilaksanakan setiap minggu mendukung terjaganya kontinuitas pasokan di tingkat distributor dan pasar. Kegiatan ini membantu mengidentifikasi potensi kelangkaan sejak dini, sehingga langkah antisipatif dapat segera dilakukan melalui koordinasi dengan pelaku usaha, distributor, dan instansi terkait. Dengan terjaminnya pasokan dan stabilitas harga, risiko inflasi daerah dapat ditekan dan stabilitas ekonomi masyarakat tetap terjaga.

2. Meningkatkan Pendapatan

Strategi peningkatan pendapatan masyarakat miskin bertujuan untuk memperkuat kemampuan ekonomi rumah tangga agar dapat memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri dan berkelanjutan. Upaya ini dilakukan melalui pengembangan sumber penghasilan, peningkatan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Pelaksanaan strategi ini meliputi beberapa intervensi, antara lain:

a. Pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja, sehingga masyarakat memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan dapat meningkatkan produktivitasnya

- Pelatihan dengan pola pemagangan berbasis pengguna

  Pemerintah Daerah melaksanakan pelatihan dengan pola pemagangan berbasis pengguna kepada sebanyak 12 orang peserta. Pelatihan ini dirancang agar peserta memperoleh pengalaman langsung di tempat kerja sesuai kebutuhan dunia usaha atau industri, sehingga keterampilan yang diperoleh dapat langsung diterapkan untuk meningkatkan produktivitas dan peluang kerja.



- Pelatihan kewirausahaan melalui program perluasan kesempatan kerja

  Pemerintah Daerah melaksanakan pelatihan kewirausahaan melalui program perluasan kesempatan kerja kepada sebanyak 30 orang peserta. Pelatihan ini difokuskan bagi korban

pemutusan hubungan kerja (PHK) atau istri korban PHK di perusahaan PT. Indofood CBP Banjarmasin, dengan tujuan memberikan keterampilan baru yang dapat langsung dimanfaatkan untuk membuka usaha mandiri.

Peserta pelatihan diberikan materi praktis sesuai potensi lokal dan kebutuhan pasar, antara lain pelatihan pembuatan cake dan dekor yang dilaksanakan di Kecamatan Bati-Bati, serta pengolahan ikan dalam kemasan yang dilaksanakan di Desa Salaman, Kecamatan Kintap. Pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan teknis, pengelolaan produk, dan pemasaran, sehingga mereka mampu mengembangkan usaha mikro yang produktif dan bernilai ekonomis.



- Pelatihan siap kerja setiap tahun

  Pemerintah Daerah melaksanakan pelatihan siap kerja setiap tahun dengan jumlah peserta sebanyak 496 orang. Pelatihan diselenggarakan baik di Balai Latihan Kerja (BLK) Pelaihari maupun secara lokal di desa, sehingga memudahkan akses masyarakat yang tersebar di berbagai wilayah.

  Pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan teknis, kompetensi kerja, dan pengetahuan praktis yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal maupun regional. Dengan keterampilan yang diperoleh, peserta diharapkan dapat lebih mudah memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas, atau membuka usaha mandiri.

b. Pemanfaatan potensi lokal melalui pengembangan ekonomi berbasis pertanian, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang relevan dengan karakteristik wilayah.

- Pelatihan pengolahan produk kerajinan

  Pemerintah Daerah melaksanakan pelatihan pengolahan produk kerajinan bagi masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro. Pelatihan ini difokuskan pada pengembangan ecoprint dan desain serta motif sasirangan kepada 54 orang sebanyak masing-masing 1 kali. Dalam pelatihan ecoprint, peserta dibekali keterampilan membuat produk kerajinan berbasis teknik pencetakan motif alami pada kain, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pencelupan, hingga pengemasan produk sehingga siap dipasarkan. Sedangkan pelatihan desain dan motif sasirangan menekankan peningkatan kemampuan peserta dalam membuat motif kain tradisional khas daerah, termasuk teknik pewarnaan, desain kreatif, dan pengembangan produk yang memiliki nilai estetika dan ekonomi.

- Pelatihan pengolahan olahan pangan hasil perikanan

  Pemerintah Daerah melaksanakan pelatihan pengolahan olahan pangan hasil perikanan bagi masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro, dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang. Pelatihan ini mencakup berbagai teknik pengolahan produk perikanan seperti pembuatan nugget ikan, amplang, dan olahan lainnya, mulai dari pengolahan bahan baku hingga pengemasan produk siap jual.

- Pelatihan pengolahan pangan lokal

  Pemerintah Daerah melaksanakan pelatihan pengolahan pangan lokal kepada masyarakat, khususnya ibu-ibu. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan peserta dalam mengolah sumber pangan lokal alternatif, seperti bahan pangan non-beras, sehingga citra pangan lokal meningkat dan produk olahan dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Kegiatan ini juga berfungsi sebagai media promosi, mempercepat pemahaman ibu-ibu

tentang pentingnya mengkonsumsi pangan lokal yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA), sekaligus mendorong diversifikasi pangan dan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.

c. Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui akses permodalan, pelatihan manajemen usaha, dan pendampingan pemasaran produk.

- Fasilitasi pemasaran produk UMKM

  Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi pemasaran produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan UMKM dalam berbagai program promosi, baik di dalam daerah maupun di luar daerah, sehingga produk lokal dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat dan pasar yang lebih besar.

  Selain itu, UMKM juga difasilitasi untuk berpartisipasi dalam event lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, seperti pameran, bazar, dan festival ekonomi kreatif. Melalui keterlibatan ini, pelaku UMKM memiliki kesempatan untuk memamerkan produk, memperluas jejaring pemasaran, meningkatkan nilai jual, dan memperkuat keberlanjutan usaha.

- Fasilitasi akses permodalan UMKM

  Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi akses permodalan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan perbankan dalam rangka pembinaan dan pendampingan kepada pelaku UMKM, sehingga memudahkan mereka memperoleh modal usaha yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha.

  Melalui pendekatan ini, pelaku UMKM tidak hanya memperoleh akses permodalan, tetapi juga mendapatkan pendampingan terkait manajemen keuangan, pengelolaan usaha, dan strategi pengembangan bisnis. Program ini diharapkan dapat

meningkatkan kapasitas UMKM dalam mengelola usaha secara profesional, memperluas pasar, dan meningkatkan produktivitas.

- Fasilitasi legalitas usaha mikro (Halal, NIB, P-IRT)

  Fasilitasi legalitas usaha mikro melalui pemenuhan sertifikasi Halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) telah diberikan kepada 86 UMKM. Kegiatan ini merupakan upaya strategis dalam mendukung penguatan kelembagaan dan peningkatan daya saing usaha mikro agar dapat beroperasi secara legal dan berkelanjutan.

  Melalui fasilitasi legalitas usaha tersebut, UMKM memperoleh kepastian hukum serta kemudahan dalam mengakses pasar yang lebih luas, program pembinaan pemerintah, dan sumber pembiayaan. Selain itu, kepemilikan sertifikasi Halal dan P-IRT mendorong peningkatan standar mutu dan keamanan produk, sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen dan berkontribusi pada pengembangan UMKM serta peningkatan perekonomian daerah.

3. Mengurangi kantong-kantong kemiskinan

Upaya mengurangi kantong-kantong kemiskinan telah dilaksanakan melalui pendekatan terpadu yang menyasar langsung pada peningkatan kualitas hunian, lingkungan permukiman, serta pengelolaan kebersihan lingkungan masyarakat miskin. Pelaksanaan Program Bedah Rumah sebanyak 540 unit memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas tempat tinggal masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga mampu meningkatkan standar hidup layak, kesehatan, dan rasa aman bagi penerima manfaat. Program ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga berkontribusi pada penguatan aspek sosial dan kesejahteraan keluarga miskin.

Selain itu, kegiatan perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) di sekitar permukiman kumuh dan masyarakat miskin sebanyak 175 paket berperan penting dalam memperbaiki kualitas lingkungan permukiman. Peningkatan akses jalan lingkungan, drainase, sanitasi, serta fasilitas pendukung lainnya mendorong terciptanya lingkungan yang lebih sehat, aman,

dan produktif, sekaligus menekan risiko munculnya kawasan kumuh baru yang berpotensi menjadi kantong kemiskinan.

Dari sisi kebersihan dan kesehatan lingkungan, pelaksanaan pengangkutan sampah ke TPA dengan jangkauan 11 kecamatan menunjukkan perluasan layanan persampahan yang cukup merata. Layanan ini berkontribusi langsung pada pengurangan penumpukan sampah di lingkungan permukiman, khususnya di wilayah padat penduduk dan masyarakat miskin, sehingga mendukung pencegahan penyakit berbasis lingkungan.

Selanjutnya, kegiatan pembinaan pengelolaan sampah kepada masyarakat yang berhasil mengurangi sampah hingga 7.500 ton mencerminkan adanya perubahan perilaku masyarakat menuju pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Pembinaan ini tidak hanya berdampak pada pengurangan volume sampah, tetapi juga membuka peluang ekonomi melalui pemilahan dan pemanfaatan sampah, yang secara tidak langsung mendukung peningkatan pendapatan masyarakat.

Pelaksanaan pemasangan jaringan air bersih dan sambungan rumah (SR) sebanyak 200 SR merupakan langkah strategis dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih yang layak dan berkelanjutan. Ketersediaan air bersih berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, penurunan risiko penyakit berbasis lingkungan, serta mendukung aktivitas rumah tangga secara lebih produktif, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses air bersih.

Selanjutnya, kegiatan pembangunan bilik WC dan tangki septik individual sebanyak 435 KK mendukung peningkatan kualitas sanitasi dasar di tingkat rumah tangga. Penyediaan sarana sanitasi yang memenuhi standar kesehatan berperan penting dalam mencegah pencemaran lingkungan, menekan potensi penyebaran penyakit, serta mendorong perubahan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di masyarakat. Capaian ini sekaligus mendukung upaya pengurangan praktik buang air besar sembarangan (BABS) dan pencapaian target sanitasi layak.

Secara keseluruhan, rangkaian program tersebut menunjukkan adanya sinergi antara peningkatan kualitas hunian, lingkungan, dan pengelolaan

sampah dalam menekan dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Meskipun demikian, keberlanjutan program, pemerataan sasaran, serta penguatan peran masyarakat perlu terus ditingkatkan agar dampak pengurangan kemiskinan dapat lebih optimal dan berjangka panjang.

Selain pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan tersebut, upaya penurunan angka kemiskinan juga dilakukan melalui verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkala. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keakuratan dan keterkinian data masyarakat miskin sebagai dasar penetapan sasaran penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan.

Verifikasi dan validasi data kemiskinan dilakukan untuk menghindari kesalahan sasaran, baik berupa *inclusion error* (penerima tidak layak) maupun *exclusion error* (masyarakat miskin yang belum terlayani). Data yang telah diverifikasi dan divalidasi selanjutnya menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan berbagai program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta pelayanan dasar.

Dengan tersedianya data kemiskinan yang akurat dan terintegrasi, intervensi program dapat dilaksanakan secara lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien. Hal ini berdampak pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya pemerintah serta meningkatkan efektivitas program dalam menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan penyusunan data masyarakat miskin desil 1 dan desil 2 sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Kegiatan ini menghasilkan data sebanyak 68.308 jiwa/keluarga yang tergolong dalam kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah dan hampir miskin. Data tersebut digunakan sebagai basis dalam penentuan sasaran program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta pelayanan dasar agar intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran.

Selain itu, Pemerintah Daerah juga melakukan verifikasi dan validasi (verval) terhadap data masyarakat miskin desil 1 sebanyak 11.924 jiwa/keluarga. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keakuratan dan keterkinian data penerima manfaat melalui pengecekan langsung di lapangan serta pemadanan dengan data kependudukan dan sosial ekonomi. Dengan dilaksanakannya

verifikasi dan validasi, diharapkan kesalahan sasaran dapat diminimalkan sehingga program penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.

Hambatan :

1. Keterbatasan akses ekonomi masyarakat miskin, khususnya pada lapangan kerja produktif dan berkelanjutan, sehingga pendapatan rumah tangga masih rendah dan rentan terhadap guncangan ekonomi.
2. Kualitas sumber daya manusia yang belum merata, terutama tingkat pendidikan dan keterampilan kerja, yang berdampak pada rendahnya daya saing tenaga kerja miskin.
3. Akses terhadap layanan dasar yang belum optimal, seperti air bersih, sanitasi layak, dan perumahan, yang memengaruhi kualitas hidup masyarakat miskin.
4. Ketepatan sasaran program penanggulangan kemiskinan yang masih perlu ditingkatkan akibat keterbatasan pemutakhiran data terpadu dan dinamika kondisi sosial ekonomi masyarakat.
5. Koordinasi lintas sektor yang belum sepenuhnya optimal, sehingga intervensi penanggulangan kemiskinan belum terintegrasi secara menyeluruh.

Rencana Aksi :

1. Meningkatkan akses terhadap kesempatan kerja dan usaha produktif melalui pelatihan keterampilan, fasilitasi kewirausahaan, dan dukungan pengembangan UMKM bagi masyarakat miskin dan rentan.
2. Memperkuat kualitas sumber daya manusia dengan peningkatan akses pendidikan, pelatihan siap kerja, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar.
3. Memperluas pemenuhan layanan dasar melalui penyediaan air bersih, sanitasi layak, perumahan yang layak huni, serta peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan.
4. Meningkatkan akurasi dan pemutakhiran data kemiskinan sebagai dasar penetapan sasaran program, agar intervensi yang diberikan tepat sasaran dan efektif.

5. Memperkuat koordinasi dan sinergi lintas SKPD dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan, termasuk melalui pendekatan crosscutting program dan kegiatan.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian program penanggulangan kemiskinan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan dan melakukan penyesuaian kebijakan secara tepat waktu.

Dalam mencapai sasaran Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 35 ASN pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan 27 ASN pada Dinas Sosial, serta di dukung oleh 9 Program dengan Pagu Rp. 18.801.748.055,26 dan terealisasi Rp. 16.792.081.153,00 atau sebesar 89,31%.

Tabel 3.7.8
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	3.898.431.712,14	**3.455.207.008,00**
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	306.404.169,09	**221.042.486,00**
3	Program Perencanaan Tenaga Kerja	237.360.004,55	**207.728.420,00**
4	Program Pemberdayaan Sosial	219.968.424,96	**168.225.426,00**
5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	573.039.772,42	**482.303.290,00**
6	Program Penanganan Bencana	5.051.470.252,76	**4.081.842.680,00**
7	Program Rehabilitas Sosial	2.281.029.580,94	**2.162.610.317,00**
8	Program Hubungan Industrial	5.073.303.698,33	**4.952.584.900,00**
9	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.160.740.440,07	**1.060.536.626,00**
Jumlah		**18.801.748.055,26**	**16.792.081.153,00**

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Efisiensi kinerja diukur menggunakan rumus berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E	:	Efisiensi
PAKi	:	Pagu anggaran keluaran i
RAKi	:	Realisasi anggaran keluaran i
CKi	:	Capaian keluaran i

1. Tingkat Pengangguran Terbuka

$$\text{Efisiensi} = \frac{(18.801.748.055{,}26 \times 98{,}48) - 16.792.081.153{,}00}{(18.801.748.055{,}26 \times 98{,}48)} \text{ X } 100\%$$

Efisiensi = 9,31%

Tabel 3.7.9
Efisiensi Indikator 1

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
98,48%	89,31%	9,31%

2. Angka Kemiskinan

$$\text{Efisiensi} = \frac{(18.801.748.055{,}26 \times 100) - 16.792.081.153{,}00}{(18.801.748.055{,}26 \times 100)} \text{ X } 100\%$$

Efisiensi = 10,69%

Tabel 3.7.10
Efisiensi Indikator 2

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100%	89,31%	10,69%

TUJUAN III

Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan tujuan ke III yaitu Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan.

Untuk mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan suatu indikator yaitu Indeks Kepuasan Layanan Infrastuktur dan Penurunan intensitas emisi GRK.

Tabel 3.8.1
Target indikator tujuan Tahun 2025

No	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2025
1	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastuktur	Nilai	71,67
		Penurunan intensitas emisi GRK	%	2,05

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan 3 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya Pemerataan infrastuktur.
2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.
3. Menurunnya risiko bencana.

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 8

Meningkatkan Pemerataan infrastuktur

Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan diukur melalui 2 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.8.2
Capaian Kinerja Terhadap Target 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			TAHUN 2025		
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai	58,12	60,24	49,55	54,21	45,83	84,54%

2	Rasio Konektivitas	Nilai	0,45	0,56	0,71	0,71	0,71	100%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2025								92,27%

Tabel 3.8.3
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2025 THD TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai	54,21	45,83	84,54%	60	76,38
2	Rasio Konektivitas	Nilai	0,71	0,71	100%	0,89	81,60%

a. Indeks Infrastruktur Daerah

Indeks Pembangunan Infrastruktur merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi.

Indikator Indeks Pembangunan Infrastruktur tahun 2025 adalah 45,83 dengan tingkat capaian 84,54%.

Untuk mendapatkan indeks pembangunan infrastruktur digunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

(((Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani/jumlah keseluruhan rumah tidak layak hunix100)+ (Luas permukiman kumuh yang ditangani/luas keseluruhan pemukiman kumuh X100))/2 + (Jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap/Jumlah panjang jalan kabupaten)x 30% + (Jumlah panjang irigasi dalam kondisi baik/Jumlah panjang irigasi)x30% + (Jumlah rumah tangga berakses air minum aman/ Jumlah Rumah Tangga)x30% + (Jumlah Rumah Tangga berakses sanitasi aman / Jumlah rumah tangga)x5% + (jumlah panjang jalan kabupaten yang memiliki drainase/(jumlah panjang jalan kabupaten)x5%) / 2.

Dari rumus tersebut diperoleh hasil bahwa indeks infrastruktur daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 adalah sebesar 45,83.

Hasil perhitungan indeks infrastruktur daerah tersebut menggunakan perhitungan indikator rumah tangga berakses sanitasi aman dan rumah tangga berakses air minum aman. Sedangkan target dan baseline yang telah ditetapkan

masih menggunakan perhitungan indikator rumah tangga berakses sanitasi layak dan rumah tangga berakses air minum layak. Hal ini menjadi salah satu penyebab turunnya indeks infrastruktur daerah dari tahun 2025.

Indeks Infrastruktur Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan tidak dapat disajikan karena perbedaan perhitungan indikator yang digunakan pada masing-masing Kabupaten/Kota.

Data indikator perhitungan indeks pembangunan infrastruktur Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut :

Tabel 3.8.4
Capaian Indikator Indeks Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2025

Indikator	Satuan	2025
Indeks Infrastruktur	Skor	45,83
Indeks PU	Skor	50,04
Jumlah Panjang Jalan kondisi Mantap	km	605,53
Jumlah Panjang jalan	km	1058,91
Jumlah Panjang Irigasi dalam konisi Baik	km	551,21
Jumlah Panjang Irigasi	km	753,94
Jumlah Rumah Tangga Akses Air Minum Aman	RT	43874
Jumlah Rumah Tangga Akses Sanitasi Aman	RT	4061
Jumlah Rumah Tangga	RT	130.908
Jumlah Panjang jalan yang ber drainase	km	157,15
Indeks Perkim	Skor	41,61
jumlah RTLH yang ditangani	Unit	2.803
Jumlah RTLH	Unit	4.616
Luas Permukiman Kumuh Yang ditangani	Ha	278
Luas permukiman Kumuh	Ha	1235,31

Sumber Data : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut

a. Panjang Jalan Kondisi Mantap

Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap, Berdasarkan data jalan yang telah terverifikasi tahun 2025 kondisi jalan mantap sepanjang 605.53 Km atau sebesar 57,18% terhadap SK Jalan Kabupaten Tahun 2023 sepanjang 1058,91 km.

b. Panjang Jalan

Untuk jumlah panjang jalan keseluruhan sebagaimana SK Jalan pada tahun 2023 tidak terdapat perubahan pada SK Jalan berdasarkan SK Bupati Tanah Laut No. 188.45/992-KUM/2023 Tentang Penetapan Ruas Jalan Kabupaten Tanah Laut sepanjang 1058,91 Km, sehingga dapat dikatakan bahwa panjang jalan secara keseluruhan tetap dengan tahun sebelumnya 1058,91 Km.

c. Panjang Irigasi Dalam Kondisi Baik

Untuk indikator jumlah panjang irigasi dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2025 yaitu sepanjang 551,21 KM.

d. Panjang Irigasi

Untuk indikator jumlah panjang irigasi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 adalah sepanjang 753,940 KM.

e. Rumah Tangga Akses Air Minum Aman

Untuk indikator jumlah Rumah Tangga Berakses Air Minum Aman pada tahun 2025 sejumlah 43.874 KK.

f. Rumah Tangga Akses Sanitasi Aman

Untuk indikator jumlah Rumah Tangga berakses Sanitasi Aman pada tahun 2025 tercapai sejumlah 4.061 KK.

g. Rumah Tangga

Untuk indikator Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 berdasarkan data konsolidasi bersih (DKB) semester II sebanyak 130.908 KK.

h. Panjang Jalan Berdrainase

Untuk indikator panjang Jalan berdrainase di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 terbangun sepanjang 157,15 Kilo Meter.

j. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Tertangani

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani pada tahun 2025 dengan total sebanyak 2.803 buah.

k. Jumlah Keseluruhan Rumah Tidak Layak Huni

Jumlah keseluruhan rumah tidak layak huni di Kabupaten Tanah Laut sebanyak 4.616 buah.

l. Luas Permukiman Kumuh Yang Ditangani

Luar pemukiman kumuh yang tertangani pada tahun 2025 seluas 278 Ha. Dari total luas pemukiman yang ada pada tahun 2025 seluas 1235,31 Ha.

Upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, sebagai berikut.

1. Pelaksanaan rehabilitasi jalan dan jembatan.

Pelaksanaan rehabilitasi jalan dan jembatan di wilayah Kabupaten Tanah Laut merupakan upaya strategis pemerintah daerah dalam menjaga dan meningkatkan konektivitas antar wilayah serta mendukung kelancaran mobilitas masyarakat. Kegiatan ini difokuskan pada penanganan ruas jalan dan jembatan yang mengalami penurunan kondisi akibat faktor usia layanan, peningkatan beban lalu lintas, serta dampak bencana alam, sehingga memerlukan perbaikan agar tetap memenuhi standar teknis dan keselamatan.

Sepanjang tahun 2025, rehabilitasi jalan yang dilaksanakan sepanjang 10,163 Km dan rehabilitasi jembatan sebanyak 5 buah, yang dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan, fungsi strategis jaringan jalan, serta keterkaitannya dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan pelayanan publik. Pelaksanaan kegiatan ini berkontribusi terhadap peningkatan kondisi kemantapan jalan dan jembatan, memperlancar arus distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan dan kawasan dengan aktivitas ekonomi produktif.

Kegiatan rehabilitasi jalan selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1) Rehabilitasi Jalan Alur Damit



2) Rehabilitasi Jembatan Damar Lima-Damit



2. Pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan

Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Tanah Laut dipengaruhi oleh kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, didukung oleh ketersedian data teknis yang memadai. Pelaksanaan kegiatan berjalan efektif karena koordinasi antar pemangku kepentingan terlaksana dengan baik serta didukung oleh ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia sesuai kebutuhan. Hal tersebut berkontribusi terhadap tercapainya target kinerja kegiatan sesuai indikator dan waktu yang telah ditetapkan.

Infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan perdagangan. Akses yang lebih baik memudahkan petani dan pelaku usaha dalam memasarkan hasil produksi serta menekan biaya logistik. Keberhasilan pembangunan jalan dan jembatan juga tercermin dari meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan,

kesehatan, dan administrasi pemerintahan. Jalan dan jembatan yang layak mendukung mobilitas aparatur serta mempercepat respon layanan publik.

Sebagian besar pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan telah memenuhi standar teknis yang ditetapkan, baik dari segi struktur, bahan, maupun fungsi. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan teknis, meskipun tetap diperlukan pemeliharaan rutin agar umur layanan infrastruktur tetap optimal. juga, tantangan yang masih dihadapi pada saat ini, antara lain Kondisi alam dan cuaca yang mempengaruhi proses konstruksi, keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan berkala, kerusakan jalan akibat beban kendaraan yang melebihi kapasitas Kebutuhan peningkatan kualitas pengawasan pelaksanaan proyek.

kesimpulan secara umum, pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Tanah Laut dapat dikatakan berhasil dalam meningkatkan konektivitas wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik. Namun, untuk menjaga keberlanjutan manfaatnya, diperlukan perhatian lebih pada aspek pemeliharaan, pengawasan, dan perencanaan jangka panjang yang berkelanjutan.

Kegiatan Pembangunan Jalan selama Tahun 2025 adalah sepanjang 25,68 Km dan Jembatan sebanyak 19 buah, sebagai berikut:

1) Jalan Kurau - Sei Rasau Kec. Kurau





2) Pembangunan Jembatan Damar Lima - Damit Kec. Batu Ampar



3. Pembangunan drainase jalan

Pembangunan drainase jalan merupakan bagian penting dalam penyediaan infrastruktur dasar yang berfungsi untuk mengalirkan air permukaan secara optimal, sehingga dapat mencegah terjadinya genangan maupun kerusakan konstruksi jalan. Sistem drainase yang baik berperan besar dalam menjaga daya tahan jalan, meningkatkan keselamatan pengguna, serta mendukung kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Pemerintah daerah secara berkelanjutan melaksanakan pembangunan dan peningkatan saluran drainase pada ruas-ruas jalan strategis, khususnya pada kawasan dengan tingkat curah hujan tinggi dan potensi genangan. Pelaksanaan pembangunan drainase jalan disesuaikan dengan kondisi lingkungan, tata ruang wilayah, serta kebutuhan masyarakat setempat agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.

Hingga tahun 2025, total capaian pembangunan drainase telah mencapai sepanjang 157.149 meter. Angka ini mencerminkan komitmen berkelanjutan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur lingkungan guna mengurangi risiko genangan dan mendukung kenyamanan masyarakat.

Pada Tahun Anggaran (TA) 2025, terdapat 144 pekerjaan yang dilaksanakan sebagai bagian dari program pembangunan dan peningkatan drainase oleh Dinas Pekerjaan Umum melalui Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi. Jumlah pekerjaan tersebut menunjukkan intensitas dan fokus pembangunan yang signifikan dalam rangka memperluas jangkauan layanan serta meningkatkan fungsi sistem drainase di Kabupaten Tanah Laut.

1) Pembangunan Drainase Desa Kayu Abang - Kec. Tambang Ulang





4. Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa DIR Kandangan Baru



Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Daerah Irigasi Rawa (DIR) Kandangan Baru di Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan fungsi dan kinerja jaringan irigasi rawa agar mampu mengatur tata air secara optimal serta mendukung kegiatan pertanian masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi jaringan irigasi yang mengalami penurunan fungsi akibat sedimentasi, kerusakan bangunan irigasi, serta keterbatasan infrastruktur pendukung.

Ruang lingkup kegiatan peningkatan jaringan irigasi rawa ini meliputi beberapa item pekerjaan utama. Salah satunya adalah pembuatan pintu air sebanyak 4 (empat) buah yang berfungsi sebagai sarana pengatur dan pengendali muka air, baik untuk kebutuhan irigasi maupun pengendalian genangan dan intrusi air pasang. Pintu air ini direncanakan dan dibangun sesuai dengan kebutuhan tata air rawa agar distribusi air dapat diatur secara efektif dan efisien.

Selain itu, dilakukan pembuatan jembatan box sebanyak 1 (satu) buah sebagai bangunan pelengkap irigasi yang berfungsi untuk menjaga konektivitas antarwilayah serta mendukung akses masyarakat dan operasional pemeliharaan

jaringan irigasi. Jembatan box ini direncanakan dengan mempertimbangkan kapasitas aliran saluran agar tidak mengganggu fungsi hidraulis jaringan irigasi.

Kegiatan ini juga mencakup rehabilitasi jembatan ulin sebanyak 2 (dua) buah yang mengalami kerusakan dan penurunan fungsi. Rehabilitasi dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan akses serta mendukung kelancaran aktivitas masyarakat dan pengelolaan jaringan irigasi rawa.

Untuk meningkatkan kapasitas saluran dan kelancaran aliran air, dilakukan normalisasi saluran sepanjang ±8,005 km. Normalisasi meliputi pekerjaan penggalian sedimentasi, perbaikan penampang saluran, dan penataan alur agar aliran air dapat mengalir dengan lancar sesuai dengan desain dan kebutuhan tata air rawa.

Sebagai upaya penguatan dan perlindungan jaringan irigasi, dilakukan pula timbunan tanggul menggunakan material base course. Pekerjaan ini bertujuan untuk memperkuat tanggul saluran, meningkatkan stabilitas, serta mencegah limpasan dan kerusakan akibat aliran air maupun pengaruh pasang surut.

Melalui pelaksanaan kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa DIR Kandangan Baru ini, diharapkan jaringan irigasi rawa dapat berfungsi secara optimal, meningkatkan produktivitas pertanian, serta mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut secara berkelanjutan.

.

5. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Waduk Taksiung I

Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (D.I.) Waduk Taksiung I di Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan keandalan jaringan irigasi agar dapat berfungsi kembali secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Kondisi saluran irigasi eksisting pada lokasi kegiatan mengalami penurunan fungsi akibat kerusakan lapisan saluran, kebocoran, serta degradasi struktur yang berpotensi mengurangi efisiensi penyaluran air irigasi.

Ruang lingkup kegiatan rehabilitasi ini meliputi pelapisan saluran beton menggunakan bahan concrete canvas sepanjang ±300 meter. Pekerjaan pelapisan tersebut bertujuan untuk memperkuat struktur saluran, mengurangi

kehilangan air akibat rembesan, serta meningkatkan ketahanan saluran terhadap pengaruh erosi dan cuaca.

Penggunaan concrete canvas sebagai material pelapisan dipilih karena memiliki keunggulan dalam kemudahan pemasangan, waktu pengerjaan yang relatif singkat, serta daya tahan yang baik terhadap kerusakan. Material ini berfungsi sebagai lapisan beton fleksibel yang mampu melindungi saluran eksisting dan memperpanjang umur layanan jaringan irigasi.

Melalui pelaksanaan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ini, diharapkan saluran pada D.I. Waduk Taksiung I dapat kembali berfungsi secara optimal dalam menyalurkan air irigasi ke lahan pertanian secara efisien dan merata. Selain itu, kegiatan ini juga mendukung upaya peningkatan produktivitas pertanian serta keberlanjutan pengelolaan sumber daya air di Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut.



6. Rehabilitasi Embung Desa Kampung Baru - Kecamatan Pelaihari

Kegiatan Rehabilitasi Embung Desa Kampung Baru di Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dilaksanakan dalam rangka meningkatkan fungsi dan kapasitas embung sebagai salah satu infrastruktur sumber daya air yang mendukung ketersediaan air bagi masyarakat dan sektor pertanian. Kondisi embung eksisting mengalami penurunan fungsi akibat pendangkalan dan kerusakan pada bagian tertentu, sehingga diperlukan upaya rehabilitasi agar embung dapat kembali berfungsi secara optimal.

Ruang lingkup kegiatan rehabilitasi embung ini meliputi pekerjaan rehabilitasi pada area embung dengan ukuran panjang ±135 meter dan lebar ±41 meter. Kegiatan rehabilitasi dilakukan untuk memperbaiki kondisi fisik

embung, meningkatkan kapasitas tampungan, serta menjaga stabilitas dan keamanan embung dalam menampung air.

Melalui kegiatan rehabilitasi ini, diharapkan embung Desa Kampung Baru mampu meningkatkan efektivitas penyimpanan air, mengurangi kehilangan air, serta mendukung pemanfaatan air secara berkelanjutan, terutama pada musim kemarau. Selain itu, rehabilitasi embung juga berperan dalam meningkatkan ketahanan air, mendukung kegiatan pertanian, dan memenuhi kebutuhan air masyarakat sekitar.

Dengan dilaksanakannya Rehabilitasi Embung Desa Kampung Baru ini, diharapkan fungsi embung dapat kembali optimal, umur layanan infrastruktur dapat diperpanjang, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat di Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut.



7. Peningkatan kualitas layanan SPAM Rumah Tangga

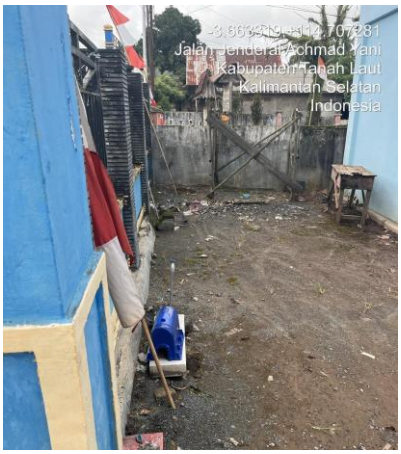
Penyusunan rencana kebijakan strategi dan teknis sistem penyediaan air minum, pembangunan spam perpipaan dan spam jaringan bukan perpipaan, perluasan spam jaringan perpipaan, optimalisasi spam jaringan bukan perpipaan

Peningkatan kualitas layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) rumah tangga merupakan upaya strategis pemerintah daerah Kab. Tanah Laut dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terhadap akses air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan. Ketersediaan air minum yang memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas menjadi faktor penting dalam mendukung kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup.

Upaya peningkatan kualitas layanan SPAM rumah tangga dilakukan melalui pengembangan dan rehabilitasi jaringan perpipaan, peningkatan kapasitas sarana dan prasarana air minum, serta penguatan pengelolaan dan pelayanan

kepada masyarakat. Selain itu, optimalisasi operasional dan pemeliharaan SPAM terus dilakukan guna menjamin distribusi air minum yang lebih merata dan andal.

1) Peningkatan SPAM Jl. A. Yani - Kecamatan Pelaihari





2) Peningkatan SPAM Jl. Menuju Puro - Kecamatan Pelaihari





Melalui komitmen pemerintah daerah, peningkatan jaringan perpipaan, pembangunan sarana dan prasarana SPAM, serta optimalisasi sistem yang sudah ada, akses air minum layak terus mengalami peningkatan secara bertahap. Upaya ini didukung oleh sinergi pendanaan serta perencanaan yang berkelanjutan guna memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat.

Hingga tahun 2025, capaian akses layanan SPAM telah mencapai 82,79% atau sekitar 72.021 Kepala Keluarga (KK). Pada Tahun Anggaran (TA) 2025 sendiri, terdapat 4 Paket pekerjaan pembangunan/peningkatan SPAM yang

dilaksanakan sebagai bagian dari upaya percepatan perluasan layanan dan peningkatan kualitas distribusi air minum. Capaian ini menjadi indikator positif dalam mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut.

8. Peningkatan kualitas pengelolaan limbah

Optimalisasi pelayanan sistem pengelolaan air limbah domestic terpusat skala permukiman

Peningkatan kualitas pengelolaan limbah merupakan bagian penting dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan limbah yang baik berperan dalam mengurangi pencemaran lingkungan, mencegah timbulnya penyakit, serta menciptakan lingkungan permukiman yang bersih dan layak huni.

Pemerintah daerah Kab. Tanah Laut melaksanakan berbagai upaya peningkatan pengelolaan limbah melalui pengembangan sarana dan prasarana pengolahan limbah, peningkatan layanan pengangkutan dan pengolahan, serta penguatan sistem pengelolaan yang ramah lingkungan. Selain itu, peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat juga terus didorong agar pengelolaan limbah dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.



Berbagai upaya telah dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan, meliputi pembangunan dan rehabilitasi jamban sehat, peningkatan sistem pengelolaan air limbah domestik, pengembangan sanitasi berbasis masyarakat, serta penguatan edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Sinergi antara

pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor utama dalam percepatan peningkatan akses sanitasi.

Hingga tahun 2025, capaian akses sanitasi layak di Kabupaten Tanah Laut telah mencapai 78,78% atau sekitar 72.485 Kepala Keluarga (KK). Pada Tahun Anggaran (TA) 2025, pemerintah daerah khususnya Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi melaksanakan 12 pekerjaan sanitasi yang mencakup pembangunan dan peningkatan sarana prasarana sanitasi sebagai bagian dari upaya memperluas cakupan layanan dan meningkatkan kualitas pengelolaan air limbah.

9. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) diarahkan untuk menjamin hak dasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian yang sehat dan aman, sesuai dengan standar keselamatan bangunan dan kecukupan luas minimum.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pada periode ini, capaian yang dihasilkan adalah telah dilakukan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 545 unit rumah dari target 546 unit rumah, dengan sebaran lokasi sebagai berikut :

NO	URAIAN	LOKASI		TARGET (Unit)	REALISASI (Unit)	ANGGARAN PER UNIT (RP)	PAGU (RP)
		KECAMATAN	DESA				
1	Bantuan Sosial Berupa Uang (Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni)	Pelaihari	Sumber Mulia	2	2	25.000.000	50.000.000
2			Sarang Halang	1	1	25.000.000	25.000.000
3			Karang Taruna	6	6	25.000.000	150.000.000
4			Sungai Riam	2	2	25.000.000	50.000.000
5			Panggung	2	2	25.000.000	50.000.000
6			Bumi Jaya	1	1	25.000.000	25.000.000
7			Guntung Besar	1	1	25.000.000	25.000.000
8			Angsau	1	1	25.000.000	25.000.000
9			Pelaihari	8	8	25.000.000	200.000.000
		Total		**24**	**24**		**600.000.000**
10		Batu Ampar	Bluru	5	5	25.000.000	125.000.000
11			Gunung Melati	1	1	25.000.000	25.000.000

NO	URAIAN	LOKASI		TARGET (Unit)	REALISASI (Unit)	ANGGARAN PER UNIT (RP)	PAGU (RP)
		KECAMATAN	DESA				
12			Jilatan	1	1	25.000.000	25.000.000
13			Jilatan Alur	9	9	25.000.000	225.000.000
14			Batu Ampar	10	10	25.000.000	250.000.000
		Total		**26**	**26**		**650.000.000**
15		Jorong	Batalang	25	25	25.000.000	625.000.000
16			Jorong	2	2	25.000.000	50.000.000
17			Karang Rejo	5	5	25.000.000	125.000.000
18			Simpang Empat Sungai Baru	4	4	25.000.000	100.000.000
		Total		**36**	**36**		**900.000.000**
19		Bati-Bati	Kait-kait	10	10	25.000.000	250.000.000
20			Padang	10	10	25.000.000	250.000.000
21			Ujung	20	20	25.000.000	500.000.000
22			Liang Anggang	15	15	25.000.000	375.000.000
23			Nusa Indah	10	10	25.000.000	250.000.000
		Total		**65**	**65**		**1.625.000.000**
24		Bajuin	Bajuin	5	5	25.000.000	125.000.000
25			Tebing Siring	1	1	25.000.000	25.000.000
26			Tirta Jaya	33	33	25.000.000	825.000.000
27			Tanjung	1	1	25.000.000	25.000.000
28			Sungai Bakar	14	14	25.000.000	350.000.000
29			Pemalongan	11	11	25.000.000	275.000.000
30			Kunyit	8	8	25.000.000	200.000.000
31			Ketapang	21	21	25.000.000	525.000.000
		Total		**94**	**94**		**2.350.000.000**
32		Kintap	Kintap	3	3	25.000.000	75.000.000
33			Salaman	13	13	25.000.000	325.000.000
34			Bukit Mulia	6	6	25.000.000	150.000.000
35			Sebamban Baru	13	13	25.000.000	325.000.000
36			Sumber Jaya	8	8	25.000.000	200.000.000
		Total		**43**	**43**		**1.075.000.000**

NO	URAIAN	LOKASI		TARGET (Unit)	REALISASI (Unit)	ANGGARAN PER UNIT (RP)	PAGU (RP)
		KECAMATAN	DESA				
37		Takisung	Ranggang	26	25	25.000.000	650.000.000
38			Kuala Tambangan	28	28	25.000.000	700.000.000
39			Batilai	19	19	25.000.000	475.000.000
40			Takisung	1	1	25.000.000	25.000.000
41			Gunung Makmur	2	2	25.000.000	50.000.000
42			Pagatan Besar	1	1	25.000.000	25.000.000
43			Benua Lawas	1	1	25.000.000	25.000.000
44			Tabanio	1	1	25.000.000	25.000.000
45			Benua Tengah	10	10	25.000.000	250.000.000
		Total		**89**	**88**		**2.225.000.000**
46		Kurau	Handil Negara	11	11	25.000.000	275.000.000
47			Padang Luas	1	1	25.000.000	25.000.000
48			Kali Besar	11	11	25.000.000	275.000.000
		Total		**23**	**23**		**575.000.000**
49		Bumi Makmur	Kurau Utara	15	15	25.000.000	375.000.000
50			Handil Labuan Amas	20	20	25.000.000	500.000.000
51			Bumi Harapan	5	5	25.000.000	125.000.000
52			Handil Babirik	1	1	25.000.000	25.000.000
53			Handil Birayang Atas	1	1	25.000.000	25.000.000
54			Handil Birayang Bawah	5	5	25.000.000	125.000.000
		Total		**47**	**47**		**1.175.000.000**
55		Panyipatan	Suka Ramah	11	11	25.000.000	275.000.000
56			Tanjung Dewa	5	5	25.000.000	125.000.000
57			Batakan	10	10	25.000.000	250.000.000
58			Kandangan Lama	11	11	25.000.000	275.000.000
59			Kandangan Baru	17	17	25.000.000	425.000.000
60			Batu Mulya	15	15	25.000.000	375.000.000
61			Bumi Asih	15	15	25.000.000	375.000.000
		Total		**84**	**84**		**2.100.000.000**

NO	URAIAN	LOKASI		TARGET (Unit)	REALISASI (Unit)	ANGGARAN PER UNIT (RP)	PAGU (RP)
		KECAMATAN	DESA				
62		Tambang Ulang	Pulau Sari	15	15	25.000.000	375.000.000
		Total		**15**	**15**		**375.000.000**
	TOTAL			**546**	**545**		**13.650.000.000**

Sumber Data : DPRKPLH

LOKASI	SEBELUM	SESUDAH
Ahmad Jali RT 012 Desa Jilatan Alur Kec. Batu Ampar		
SA'ADAH Jl. Desa Kali Besar RT.001		
Supiani RT. 005 Desa Kunyit Kec. Bajuin		
Rujali Rahman RT.002 Desa Kandangan Lama Kec.Panyipatan		

LOKASI	SEBELUM	SESUDAH
Samirah RT.002 Desa Sebamban Baru Kec.Kintap		

Sumber Data : DPRKPLH

10. Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Dan Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah

Dalam upaya mencapai sasaran strategis, DPRKPLH melaksanakan mandat penyediaan rumah layak huni bagi kelompok masyarakat rentan, khususnya korban bencana alam/sosial serta masyarakat yang terdampak relokasi program pembangunan pemerintah. Intervensi ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjamin kepastian tempat tinggal pasca-situasi darurat maupun dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur daerah. Termasuk juga untuk sebagai pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan amanat Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 13 Tahun 2023. Fokus utama pelayanan dasar ini diarahkan pada dua indikator kunci :

1. Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana.
2. Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah.

NO	URAIAN	LOKASI		UNIT	ANGGARAN PER UNIT (RP)	PAGU (RP)
		KECAMATAN	DESA/KEL			
1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Pelaihari	Panjaratan	20	22.500.000	450.000.000

2	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Panyipatan	Batu Tungku	23	35.000.000	805.000.000
	TOTAL			**43**		**1.255.000.000**

Sumber Data : DPRKPLH

Faktor Penghambat:

Berikut beberapa faktor penghambat yang menyebabkan indikator kinerja "Indeks Infrastruktur Daerah" tidak tercapai sesuai target, diantaranya :

- Kualitas dan kondisi infrastruktur PU serta sarana prasarana lingkungan hidup yang belum merata dan sebagian belum memenuhi standar layanan.
- Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan infrastruktur PU dan LH yang belum optimal sehingga menurunkan efektivitas layanan dan capaian indeks.
- Pengawasan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur PU dan LH yang belum konsisten berdampak pada kualitas dan keberfungsian prasarana.

Rencana Aksi:

- Peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur PU dan LH sesuai standar teknis dan indikator Indeks Infrastruktur.
- Penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan infrastruktur PU dan LH.
- Penguatan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi berkala serta tindak lanjut atas temuan pengawasan untuk memastikan infrastruktur berfungsi optimal dan berkelanjutan.

b. Rasio Konektivitas

Rasio konektivitas merupakan indikator penting yang menggambarkan tingkat keterhubungan antarwilayah, antar pusat kegiatan ekonomi, serta akses masyarakat terhadap layanan dasar dan aktivitas perekonomian. Capaian rasio konektivitas pada periode pelaporan menunjukkan adanya peningkatan kualitas jaringan infrastruktur, khususnya pada peningkatan kondisi jalan penghubung, akses transportasi, serta keterpaduan antarwilayah. Peningkatan ini berdampak positif terhadap kelancaran mobilitas barang dan jasa, efisiensi waktu tempuh, serta memperkuat integrasi wilayah perkotaan dan perdesaan.

Tantangan yang masih sering muncul dalam peningkatan rasio konektivitas tersebut, antara lain keterbatasan anggaran pemeliharaan infrastruktur, kondisi geografis wilayah tertentu yang sulit dijangkau, serta belum meratanya kualitas jaringan penghubung di seluruh wilayah. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan melalui perencanaan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, peningkatan kualitas jalan dan sarana transportasi, serta sinergi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Dengan peningkatan rasio konektivitas yang berkelanjutan, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas akses layanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota merupakan tingkat keterhubungan antar wilayah didalam kabupaten melalui jaringan transportasi yang terintegrasi secara menyeluruh baik dari sisi kebijakan antar moda, pembangunan sarana dan prasarana, manajemen operasional, sistem informasi tiket, hingga keterpaduan antara sistem transportasi dengan tata guna lahan serta sektor strategis lainnya seperti kesehatan dan pendidikan. Nilai rasio ini mencerminkan seberapa optimal transportasi publik dirancang dan dioperasikan dalam mendukung mobilitas masyarakat dan pemerataan akses pelayanan antar wilayah, sehingga berperan sebagai pondasi dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

Rasio konektivitas tersebut dihitung menggunakan rumus :

Rasio Konektivitas Kabupaten = (IK1 X bobot angkutan jalan) + (IK2 X bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan).

a. Perhitungan IK1 (angkutan jalan) adalah sebagai berikut:

$$IK1 = \frac{\text{Jumlah trayek yang dilayani pada kabupaten X bobot trayek}}{\text{Jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten}}$$

Hasil perhitungan IK1 = (6 X 1) / 8 = 0,75

b. Perhitungan IK2 (angkutan sungai dan penyeberangan) adalah sebagai berikut:

$$IK2 = \frac{\text{Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada kabupaten X bobot lintas}}{\text{Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten}}$$

Hasil perhitungan IK2 = (3 X 0,6) / 3 = 0,6

Di Kabupaten Tanah Laut Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30% (bobot angkutan jalan = 70%)

Jadi hasil perhitungan Rasio Konektivitas Kabupaten Tanah Laut adalah (IK1 0,75 X 0,7) + (IK2 0,6 X 0,3) = 0,525 + 0,18 = 0,71

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain se-Kalimantan Selatan, hanya terdapat 6 Kabupaten/Kota yang melaksanakan perhitungan Rasio Konektivitas dengan rincian sebagai berikut.

No	Kabupaten/Kota	Rasio Konektivitas
1.	Kota Banjarmasin	0,72
2.	Kota Banjarbaru	0,55
3.	Kabupaten Tanah Laut	0,77
4.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	0,67
5.	Kabupaten Kotabaru	0,61
6.	Kabupaten Tapin	0,416

Upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut.

1. Peningkatan prasarana penunjang jalan

Peningkatan prasarana penunjang jalan dilaksanakan melalui kegiatan perencanaan, pemeliharaan, dan pengadaan alat perlengkapan jalan secara terintegrasi. Pada tahap perencanaan, telah dilaksanakan

perencanaan kebutuhan alat perlengkapan jalan sebanyak 490 unit yang didasarkan pada hasil survei kondisi lapangan, tingkat kerawanan kecelakaan, volume lalu lintas, serta usulan dari masyarakat dan perangkat daerah terkait. Perencanaan ini mencakup identifikasi jenis, jumlah, dan lokasi pemasangan perlengkapan jalan agar penempatannya tepat sasaran dan efektif dalam mendukung keselamatan serta ketertiban lalu lintas.

Selanjutnya, untuk menjaga fungsi dan kualitas prasarana yang telah terpasang, dilaksanakan pemeliharaan alat perlengkapan jalan sebanyak 490 unit. Kegiatan pemeliharaan meliputi perbaikan, penggantian, dan pengecatan ulang perlengkapan jalan yang mengalami kerusakan atau penurunan kualitas akibat faktor cuaca dan intensitas penggunaan. Pemeliharaan dilakukan secara berkala guna memastikan seluruh perlengkapan jalan tetap dalam kondisi layak, terlihat jelas, dan dapat berfungsi secara optimal bagi pengguna jalan.

Selain itu, dilaksanakan pula pengadaan alat perlengkapan jalan sebanyak 490 unit sesuai standar teknis yang berlaku. Pengadaan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan jalan baru maupun menggantikan perlengkapan yang sudah tidak layak pakai. Dengan pengadaan alat perlengkapan jalan yang memenuhi standar, diharapkan kualitas prasarana penunjang jalan semakin meningkat serta mampu mendukung keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran lalu lintas bagi masyarakat.



Kegiatan Pemasangan tiang APJ (Alat Penerangan Jalan)

2. Penataan lalu lintas jaringan jalan

Dalam rangka mendukung kelancaran dan keselamatan transportasi, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut melaksanakan penataan lalu lintas pada jaringan jalan melalui evaluasi kebutuhan pengaturan, pemasangan dan penyesuaian rambu, marka, serta perangkat pengendali lalu lintas lainnya. Penataan dilakukan berdasarkan hasil identifikasi kondisi eksisting dan dinamika arus kendaraan pada ruas-ruas prioritas.

Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan lalu lintas dilaksanakan secara berkala melalui monitoring lapangan dan evaluasi dampak kebijakan terhadap tingkat pelayanan jalan. Selain itu, dilakukan survei manajemen dan rekayasa lalu lintas (MRLL) untuk memperoleh data volume, kecepatan, dan pola pergerakan kendaraan sebagai dasar perumusan rekomendasi teknis.

Sebagai upaya peningkatan keselamatan, Dinas Perhubungan juga melaksanakan audit keselamatan jalan guna mengidentifikasi potensi risiko kecelakaan serta memberikan rekomendasi perbaikan teknis dan operasional pada lokasi rawan kecelakaan (blackspot), sehingga tercipta sistem lalu lintas yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan.

3. Penataan parkir

Penataan parkir di Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas”. Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan ketertiban pemanfaatan ruang milik jalan serta mengurangi hambatan samping yang berpotensi menurunkan tingkat pelayanan jalan.

Pelaksanaan penataan parkir dilakukan melalui penetapan dan penegasan lokasi parkir pada kawasan pusat aktivitas masyarakat, pemasangan dan pemeliharaan rambu serta marka parkir, pembinaan dan pengawasan juru parkir, serta penertiban parkir tidak sesuai ketentuan. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara terkoordinasi dan dievaluasi secara

berkala guna memastikan efektivitas pengendalian parkir di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

Berdasarkan hasil evaluasi, penataan parkir memberikan kontribusi terhadap peningkatan ketertiban lalu lintas, pengurangan potensi kemacetan pada titik-titik rawan, serta optimalisasi penerimaan retribusi parkir sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ke depan, penataan parkir akan terus ditingkatkan melalui penguatan pengawasan dan penyesuaian kebijakan sesuai kebutuhan dan perkembangan kawasan.

4. Patroli parkir, pembinaan terhadap juru parkir atau pengelola parkir liar, penyediaan juru parkir pada lokasi parkir

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut melaksanakan patroli parkir secara rutin pada titik rawan pelanggaran guna menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Selain itu, dilakukan pembinaan persuasif kepada juru parkir dan pengelola parkir liar agar tertib administrasi, menggunakan atribut resmi, serta mematuhi ketentuan tarif dan retribusi daerah.

Penempatan juru parkir resmi pada lokasi yang telah ditetapkan juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, ketertiban parkir, dan optimalisasi PAD sektor perparkiran. Penetapan lokasi parkir ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 100.3.3.2/956-KUM/2025. Lokasi parkir di tepi jalan umum ada 15 lokasi sedangkan untuk pelayanan parkir ditempat khusus parkir ada 24 lokasi parkir.



Gambar 3.5 : Kegiatan Monitoring/pengawasan parkir

5. Peningkatan kualitas prasarana pengujian kendaraan bermotor

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin keandalan hasil uji kendaraan bermotor, pemeliharaan peralatan pengujian dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Pada Tahun 2025, kegiatan pemeliharaan peralatan dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2025, dan selanjutnya dilakukan kalibrasi oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) XV guna memastikan akurasi alat uji serta kesesuaian dengan standar teknis yang berlaku.

Kegiatan pemeliharaan meliputi :

- Pemastian fungsi kerja alat
- Pemerbaikan dan pemeliharaan
- Proses standarisasi alat uji (kalibrasi

Adapun peralatan uji yang telah dilakukan pemeliharaan/perawatan dan lulus kalibrasi ada 11 unit yaitu : Alat Emisi gas buang bensin, Alat Emisi gas buang solar, Alat uji lampu robotik, Timbangan digital portable, Alat uji kegelapan kaca, Alat uji suara / sound level meter, Alat uji kincup roda depan, Alat uji rem statis, Alat uji speedo meter, Axle play join detektor (alat bantu periksa Lorong uji) dan Alat emisi gas buang bensin.

6. Peningkatan standar uji kelayakan bermotor

Untuk meningkatkan keselamatan dan kepatuhan kendaraan bermotor terhadap persyaratan teknis dan laik jalan, Dinas Perhubungan melaksanakan peningkatan standar uji kelayakan melalui penerapan SOP pengujian sesuai ketentuan teknis nasional, kalibrasi dan verifikasi berkala seluruh alat uji, pemenuhan kompetensi serta sertifikasi petugas penguji, serta pengendalian mutu melalui monitoring dan evaluasi hasil uji.

Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pelayanan, hasil pengujian diterbitkan dalam bentuk Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) yang terintegrasi dengan sistem nasional sesuai kebijakan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Penerapan BLUE memastikan keabsahan data uji, meminimalisir potensi pemalsuan, serta mendukung tertib administrasi dan pengawasan kendaraan bermotor secara digital.

7. Peningkatan perluasan jaringan transportasi

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut melaksanakan peningkatan dan perluasan jaringan transportasi melalui penyediaan angkutan umum dan angkutan pelajar pada wilayah yang belum terlayani secara optimal. Kegiatan ini didukung melalui sosialisasi kepada masyarakat serta penataan jumlah trayek dan armada sesuai kebutuhan pelayanan.

Pada Tahun 2025, armada angkutan LAKATAN bertambah 1 (satu) unit. Dengan penambahan tersebut, total armada yang disiapkan Dinas Perhubungan berjumlah 9 (sembilan) unit, terdiri atas 6 (enam) unit angkutan LAKATAN dan 3 (tiga) unit angkutan LANGKAR, guna meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan transportasi kepada masyarakat.

Langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan, aksesibilitas masyarakat, dan pemerataan layanan transportasi secara efektif dan berkelanjutan.

Adapun rute layanan angkutan tanah laut (LAKATAN), angkutan perintis DAMRI, dan BTS Banjrbakula yaitu :

a. Rute Pelaihari - Tabanio Kec. Takisung (Angkutan Perintis DAMRI);
b. Rute Pelaihari – Batakan Kec. Panyipatan (Angkutan Perintis DAMRI);
c. Rute Pelaihari - Jorong Kec. Jorong (Angkutan Perintis DAMRI);
d. Rute Terminal HSPA-Pasar eks Bajuin Plaza (LAKATAN);
e. Rute Terminal HSPA-RSUD H. Boejasin (LAKATAN);
f. Rute Terminal HSPA-tTerminal Gambut Barakat (BTS Banjarbakula).

Sedangkan untuk lintasan angkutan sungai, danau dan peyeberangan yang beroperasi di Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

a. Lintasan Batakan-Pulau datu, jalur Batakan baru – Pulau datu (angkutan wisata religi);
b. Lintasan Pulau Kalimantan – Pulau Keramaian, jalur Kecamatan jorong – pulau keramaian (pelayaran lintas kabupaten);
c. Lintasan Pulau Kalimantan–Pulau Masalembo, jalur Kecamatan Jorong – pulau masalembo (pelayaran lintas kabupaten).



Gambar 3.11 : Penambahan Armada bus LAKATAN

8. Peningkatan kualitas sarana perhubungan
   a. Peningkatan kualitas terminal

      Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut melaksanakan peningkatan

sarana dan prasarana pada Terminal Tipe C Somarsono PA. Kegiatan ini difokuskan pada penataan area parkir dan ruang tunggu penumpang, perbaikan fasilitas pendukung, serta peningkatan kebersihan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan terminal. Pada tahun 2025 ini dilakukan penambahan fasilitas utama/pendukung terminal berupa pengadaan Musolla, WC Umum, dan Penataan Parkir diterminal.

Upaya peningkatan kualitas juga mencakup penataan operasional keberangkatan dan kedatangan angkutan umum, pengaturan sirkulasi kendaraan di dalam kawasan terminal, serta penguatan pengawasan terhadap aktivitas bongkar muat penumpang. Langkah tersebut bertujuan untuk mewujudkan terminal yang tertib, representatif, dan mampu mendukung kelancaran pelayanan transportasi bagi masyarakat di wilayah Pelaihari dan sekitarnya.

Melalui peningkatan ini, diharapkan fungsi terminal sebagai simpul transportasi darat dapat berjalan lebih optimal, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap angkutan umum, serta mendukung kelancaran mobilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.



Gambar 3.12 : Pembangunan Musolla dan WC umum di terminal

b. Rehabilitasi halte

Pada tahun 2025 ini ada 3 unit halte yang direhabilitasi yaitu : Halte di SMP Negeri 2 Pelaihari, SDN Angasu 4 dan Halte di Simpang Bumi Jaya.

Upaya yang telah dilaksanakan dalam peningkatan konektivitas di Kabupaten Tanah Laut, yaitu :

1. Penataan dan evaluasi trayek angkutan umum;
2. Pengembangan angkutan pengumpan (feeder) dan perintis baik darat maupun laut;
3. Koordinasi lintas sektor dengan OPD teknis;
4. Peningkatan keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
5. Pendataan dan pemetaan daerah terlayani transportasi umum;
6. Penyusunan dokumen perencanaan transportasi daerah.

Faktor Penghambat/Kegagalan

1. Keterbatasan armada dan dukungan anggaran menyebabkan perluasan layanan angkutan umum belum menjangkau seluruh wilayah.
2. Rendahnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum berdampak pada rendahnya tingkat pemanfaatan layanan.
3. Kondisi geografis serta sebaran permukiman yang tidak merata menyulitkan peningkatan persentase daerah terlayani
4. Keterbatasan sarana prasarana dan kondisi jaringan jalan yang belum seluruhnya memenuhi standar keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
5. Masih adanya perilaku pengguna jalan yang belum tertib, sehingga berpotensi menimbulkan gangguan keselamatan lalu lintas.
6. Keterbatasan sumber daya dan koordinasi lintas sektor pada kondisi tertentu, terutama dalam pengawasan dan penanganan lalu lintas di lapangan.

Rencana Aksi

1. Optimalisasi dan penataan rute angkutan umum pada wilayah prioritas serta pengusulan penambahan armada melalui dukungan anggaran dan program pemerintah pusat.

2. Peningkatan daya tarik layanan angkutan umum melalui perbaikan kualitas sarana, penyesuaian jadwal, dan integrasi layanan.
3. Optimalisasi penyediaan, peningkatan, dan pemeliharaan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan secara bertahap pada ruas dan lokasi rawan kecelakaan guna mendukung keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
4. Penguatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan, melalui peningkatan sosialisasi keselamatan berlalu lintas serta sinergi pelaksanaan pengawasan dan penegakan ketentuan bersama instansi terkait.
5. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya perhubungan, termasuk optimalisasi pemanfaatan teknologi dan penguatan koordinasi lintas sektor dalam mendukung manajemen lalu lintas yang efektif dan berkelanjutan.
6. Penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat, operator angkutan, dan pemangku kepentingan untuk memperluas cakupan pelayanan secara bertahap

Dalam mencapai sasaran Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 67 ASN pada DPUPRP, 44 ASN pada DISHUB, 66 ASN pada DPRKPLH di dukung oleh 12 Program dengan pagu Rp 554.499.926.168,22 dan realisasi sebesar Rp 536.732.973.265,00 atau sebesar 96,80%

Tabel 3.8.5
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Penyelenggaraan Jalan	209.655.870.218,70	**203.317.111.962,00**
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	85.886.420.934,71	**83.682.620.327,00**
3	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	34.526.680.831,04	**31.319.445.198,00**
4	Program Peningkatan Prasarana , Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	53.093.177.751,40	**51.394.345.456,00**
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	23.572.645.028,58	**23.195.615.000,00**
6	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	118.000.000,00	**110.984.930,00**

No	Program	Pagu	Realisasi
7	Program Pengelolaan Pelayaran	438.980.694,72	**430.170.250,00**
8	Program Penataan Bangunan Gedung	101.957.249.024,96	**99.262.605.286,00**
9	Program Pengembangan Perumahan	1.369.120.422,15	**1.314.123.000,00**
10	Program Kawasan Permukiman	9.585.270.000,00	**9.503.855.000,00**
11	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	29.319.031.261,96	**28.266.006.856,00**
12	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	4.977.480.000,00	**4.936.090.000,00**
Jumlah		**554.499.926.168,22**	**536.732.973.265,00**

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Efisiensi kinerja diukur menggunakan rumus berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

1. Indeks Infrastruktur Daerah

$$\text{Efisiensi} = \frac{(554.499.926.168,22 \times 84,54\%) - 536.732.973.265,00}{(554.499.926.168,22 \times 84,54\%)} \times 100\%$$

Efisiensi = -14,50%

Tabel 3.1.12
Efisiensi Indikator 1

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
84,54%	96,80%	-14,50%

Efisiensi indikator “Indeks Infrastruktur Daerah” mencapai -14,50% , hal ini dikarenakan perbedaan indikator dalam penetapan target dan perhitungan realisasi.

2. Rasio Konektivitas

$$\text{Efisiensi} = \frac{(554.499.926.168{,}22 \times 100\ \%) - 536.732.973.265{,}00}{(554.499.926.168{,}22 \times 100\%)} \text{ X } 100\%$$

Efisiensi = 3,20%

Tabel 3.8.6
Efisiensi Indikator 2

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100%	96,80%	3,20%

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 9

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.9.1
Capaian Kinerja Terhadap Target 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			TAHUN 2025		
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	67,78	68,65	68,57	70,16	76,35	108,82%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2025								108,82%

Tabel 3.9.2
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2025 THD TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	70,16	76,35	108,82%	70,53	108,25%

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 adalah 76,35 mengacu pada IKLH secara nasional termasuk dalam kategori sedang. Angka ini sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 70,16 dengan tingkat capaian 100%. Nilai ini mengalami peningkatan dari tahun 2024 yaitu 68,57. Akan tetapi perhitungan IKLH pada tahun 2025 mengalami perubahan menggunakan metode terintegrasi dari tiga komponen utama (Air, Udara, Lahan), dengan penyesuaian metode dan parameter yang mungkin diperbarui sesuai perkembangan, seperti penambahan parameter PM2.5 untuk udara dan metode perhitungan IKA-INA, dengan data pemantauan di lokasi strategis (transportasi, industri, pemukiman, perkantoran) dan diolah oleh pemerintah daerah/pusat berdasarkan regulasi baru (seperti SK 129 2024) untuk mencapai target kualitas lingkungan hidup yang lebih baik di tingkat Nasional dan Daerah.

Indeks kualitas lingkungan hidup selama tahun 2016 – 2025 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3.9.3
IKLH Kabupaten Tanah Laut tahun data 2016 – 2025

Tahun	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Tutupan Hutan	IKLH	Kategori
2016	88,63	45,56	41,14	56,71	Kurang
2017	95,81	50	40,40	59,90	Kurang
2018	90,88	51	39,78	58,48	Kurang
2019	90,68	50	39,65	58,06	Kurang
2020	91,29	66,67	45,83	69,82	Sedang
2021	91,85	58,42	43,54	68,70	Sedang
2022	92,10	55,38	44,08	67,78	Sedang
2023	95,84	53,57	44,27	68,65	Sedang
2024	98,72	50,00	44,67	68,57	Sedang
2025	84,42	74,02	65,43	76,35	Sedang

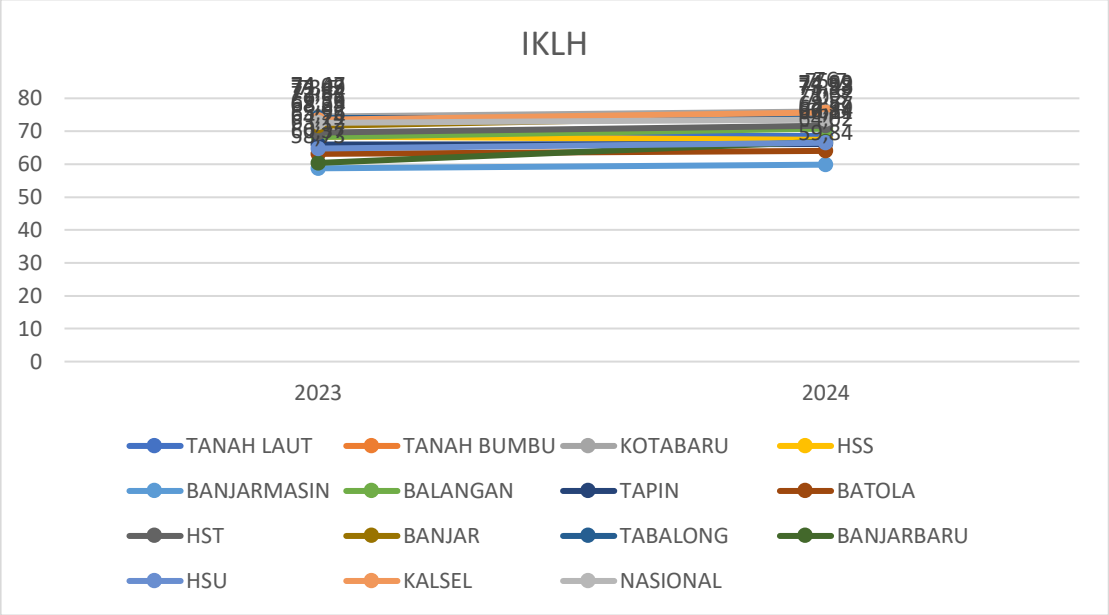
Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Berdasarkan Tabel tersebut menunjukan bahwa kondisi IKLH 3 tahun terakhir mengalami fluktuatif yakni pada tahun 2023 sebesar 68,65 kemudian pada tahun 2024 turun menjadi 68,57 sedangkan pada tahun 2025 naik menjadi 76,35. Pada 3 tahun terakhir, secara keseluruhan nilai IKLH termasuk dalam kategori sedang.

Perubahan tersebut pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh perhitungan IKLH baru tahun 2025 dari integrasi perhitungan nilai IKU, IKA dan IKL dengan penyesuaian metode dan parameter yang mungkin diperbarui sesuai perkembangan, seperti penambahan parameter PM2.5 untuk udara dan metode perhitungan IKA-INA. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan masih belum rilis secara resmi oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Grafik 3.9.1

IKLH Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2023-2024



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tabel 3.9.4

IKLH Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2023-2024

Kab/Kota	Tahun	
	2023	2024
Kotabaru	74.47	76
Kalsel	73.5	75.7
Banjar	71.62	74.59
Tabalong	74.03	73.98
Nasional	72.54	73.53
HST	69.59	71.67
Balangan	68.24	70.8
HSS	68.39	67.39
Banjarbaru	60.37	66.84
HSU	64.74	66.5
Tapin	65.96	66.11
Batola	63.12	64.02
Banjarmasin	58.73	59.84

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan alat ukur sederhana untuk mengetahui pencapaian dari upaya

pemulihan lingkungan serta sebagai pembanding atau target untuk setiap indikator dan standar yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indeks Kualitas Air

Air khususnya air sungai mempunyai peran yang sangat strategis dalam perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Air sungai bagi sebagian besar masyarakat merupakan sumber air minum rumah tangga. Selain itu air sungai menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lainnya seperti industri, pertanian dan pembangkit listrik. Di sisi lain sungai juga menjadi tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun. Karena peranannya tersebut, maka kualitas air sungai menjadi salah satu hal penting yang menjadi indikator kualitas lingkungan hidup. Pemantauan kualitas air permukaan periode I dan 2 dilakukan pada 18 titik sample air yang terdiri 6 buah Daerah Aliran Sungai (DAS) dimana aliran air permukaan tersebut merupakan titik – titik yang telah dianggap mewakili gambaran kualitas air permukaan di Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan hasil pengujian sampel yang dilakukan oleh Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Kalimantan Selatan dan UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Tanah Laut maka didapatkan data – data sebagai berikut :

Dari hasil analisa kualitas parameter air pada Daerah Aliran Sungai (DAS) dan berdasarkan baku mutu yang telah ditetapkan diketahui dominasi parameter yang tidak memenuhi baku mutu pada semua titik pantau adalah Total Coliform, Fecal Coliform dan COD

Dari hasil analisa penetapan status mutu air berdasarkan aplikasi sitala dengan metode IKA INA pada 18 (delapan belas) titik pantau Daerah Aliran Sungai (DAS) dikali 2 periode sehingga menjadi 36 titik pantau diketahui terdapat 6 (enam) dengan status memenuhi dan 29 (dua puluh sembilan) titik pantau dengan status ringan.

Tabel 3.9.5

Analisa kualitas parameter air Daerah Aliran Sungai (DAS) Periode I Tahun 2025
berdasarkan Baku Mutu yang telah ditetapkan

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu	HASIL UJI KUALITAS AIR PERIODE I																	
				Das Kintap			Das Asam-asam			Das Tabanio			Das Maluka			Das Sabuhur			Das Swarangan		
				Hulu	Tengah	Hilir	Hulu	Tengah	Hilir	Hulu	Tengah	Hilir	Hulu	Tengah	Hilir	Hulu	Tengah	Hilir	Hulu	Tengah	Hilir
1	Temperature	oC	Dev 3	29,2	30,2	30,1	28	29,9	29,2	29	24	30	29	29	27	29,3	29,2	28	28	28,9	30,1
2	pH	-	6-9	7,32	7,12	6,83	8,45	6,89	6,72	8,65	8,11	7,79	8,38	8,28	7,25	8,13	7,98	7,11	8,3	8,03	7,93
3	TSS (Total Padatan Tersuspensi)	mg/L	50	3	13,2	45,75	14	23,8	35,5	10,31	14	25	11,67	14,44	23,5	8,63	18,67	25	8,35	15	31,33
4	TDS (Total PadatanTerlarut)	mg/L	1000	54	66	84	60	78	92	56	84	82	66	72	92	54	64	72	56	62	74
5	DHL (Daya Hantar Listrik)	ms/cm	-	2,7	175,1	3,6	139,4	154,1	166,6	221,3	95,4	123,3	80,8	52	157,8	95	7,3	7,2	8,9	6,9	46,1
6	DO (OksigenTerlarut)	mg/L	4	7,474	7,595	8,04	8,807	8,161	7,959	8,524	8,201	8,484	7,474	8,12	8,565	8,161	8,242	7,999	8,12	7,514	7,636
7	BOD (Biological Oxygen Demand)	mg/L	3	1,62	1,37	2,02	3,15	2,26	1,37	2,43	1,62	1,86	3,07	1,78	2,83	2,18	1,37	2,43	2,02	3,15	2,99
8	COD (Cemichal Oxygen Demand)	mg/L	25	16,17	22,92	24,46	41,22	16,38	20,19	31,74	14,09	18,22	50,5	12,05	31,46	13,99	6,25	15,53	10,25	77,83	83,76

9	Fe (Besi) Terlarut	mg/L	-	<0,040	<0,040	0,165	0,286	0,173	0,169	<0,040	0,462	0,734	1,409	0,498	<0,40	0,454	0,89	0,813	1,199	0,622	<0,040
10	Cd (Kadmium) Terlarut*	mg/L	0,01	<0,013	<0,013	<0,013	<0,013	<0,013	<0,013	<0,013	0,028	<0,013	<0,013	<0,013	<0,013	<0,013	<0,013	<0,013	<0,013	<0,013	<0,013
11	Hg (Raksa) Terlarut*	mg/L	0,002	0,000276	0,000286	0,000371	0,000266	0,00034	0,000326	0,000255	0,000306	0,000361	0,000418	0,000362	0,000301	<0,000239	0,000393	0,000377	<0,000239	0,000403	0,000456
12	Total Fosfat sebagai P	mg/L	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	<1,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
13	Debit	-	-	1,392	4,12	3,78	1,5	2,923	1,853	0,56	1,25	2,03	2,65	3,5	-	0,25	1,15	0,25	1,35	1,25	4,25
13	Nitrat (NO3-N)	mg/L	10	0,002	0,0603	0,3161	5,132	0,2582	0,1352	0,002	0,4798	0,3223	0,4008	0,5464	0,0834	0,2645	0,2649	0,2496	0,1986	0,1099	0,2413
14	Nitrit (NO2-N)	mg/L	0,06	0,004	0,012	0,0108	0,004	0,0145	0,0124	0,004	0,0387	0,0392	0,0444	0,075	0,004	0,0488	0,0237	0,0135	0,0181	0,0117	0,004
15	Amoniak (NH3-N)	mg/L	0,02	0,1777	0,6624	1,045	0,8432	0,9734	0,7946	0,4263	0,1071	0,0747	1,124	0,7754	0,4821	0,5461	0,8318	0,5637	0,023	0,0392	0,019
16	Fecal Coliform	MPN/100 ml	1000	$2,3x10^2$ (230)	$2,4x10^2$ (240)	$3,5x10^3$ (3500)	$5,4x10^3$ (5400)	$1,3x10^3$ (1.300)	$5,4x10^3$ (5400)	2200	1700	5400	2400	5400	460	1300	790	460	460	220	20
17	Total Coliform	MPN/100 ml	5000	$1,1x10^3$ (1100)	$3,5x10^3$ (3500)	$3,5x10^3$ (3500)	$5,4,0x10^3$ (5400)	$5,4x10^3$ (5.400)	$1,6x10^4$ (16000)	9200	3500	16000	3500	16000	3500	1700	3500	2200	2200	1300	330

Tabel 3.9.6
Analisa Kualitas Parameter Air Daerah Aliran Sungai (DAS) Periode II Tahun 2025
berdasarkan Baku Mutu yang telah ditetapkan

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu	HASIL UJI KUALITAS AIR PERIODE II																	
				Das Kintap			Das Asam-asam			Das Tabanio			Das Maluka			Das Sabuhur			Das Swarangan		
				Hulu	Tengah	Hilir	Hulu	Tengah	Hilir	Hulu	Tengah	Hilir	Hulu	Tengah	Hilir	Hulu	Tengah	Hilir	Hulu	Tengah	Hilir
1	Temperature	oC	Dev 3	28,9	28,5	29,2	26	29,2	30,6	26	29,2	26,4	27,9	27,7	27,7	28,6	32.2	31,6	29,4	27,3	28
2	pH	-	6-9	7,52	7,21	6,83	7,14	6,92	6,76	8,65	6,92	6,65	7,85	6,59	6,68	8,33	8,81	8,7	8,67	8,74	7,22
3	TSS (Total Padatan Tersuspensi)	mg/L	50	5,25	14,5	19,5	12,17	18,2	23	6	18,2	20,86	17,14	23,17	27,67	12,67	16	18,67	15,63	20,71	19,17
4	TDS (Total PadatanTerlarut)	mg/L	1000	56	80	108	74	92	118	60	92	110	74	90	102	76	96	106	82	112	124
5	DHL (Daya Hantar Listrik)	ms/cm	-	107,3	139,4	122,3	125,7	92,6	94,6	206,1	92,6	81,6	79,4	73	124,9	218,2	67	52,5	91,4	95,2	42,4
6	DO (OksigenTerlarut)	mg/L	4	8,04	8,08	7,716	7,474	7,878	7,161	7,393	7,878	7,232	7,272	6.828	7,03	7,514	7,716	7,959	7,797	7,757	7,474
7	BOD (Biological Oxygen Demand)	mg/L	3	1,94	1,78	1,62	1,46	1,54	1,29	1,21	1,54	1,37	1,54	1,29	1,21	1,54	1,46	1,37	1,62	1,21	2,26
8	COD (Cemichal Oxygen Demand)	mg/L	25	26,32	12,94	14,67	48,13	10,89	8,86	7,5	10,89	37,04	47,16	14,47	15,3	40,8	47,05	38,66	30,16	24,61	72,89
9	Fe (Besi) Terlarut	mg/L	-	<0,040	<0,040		<0,040	<0,040	<0,040	<0,040	<0,041	<0,040	<0,040	<0,040	<0,40	<0,040	<0,040	<0,040	<0,040	<0,040	<0,040

10	**Cd (Kadmium) Terlarut***	**mg/L**	**0,01**	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
11	**Hg (Raksa) Terlarut***	**mg/L**	**0,002**	<0,000 239	<0,000 239	<0,000 239	<0,000 239	<0,000 239	<0,000 239	<0,000 239	<0,000 239	<0,000 239	«0 000239	<0,000 239	<0,000 239	239	<0,000 239	<0,000 239	<0,000 239	<0,000 239	<0,000 239
12	**Total Fosfat sebagai P**	**mg/L**	**0,2**	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
13	**Debit**	-	-	0,32	0,54	0,23	0,3	0,39	0,25	0,1	0,39	0,1	0,45	0,58	0,12	0,36	0,3	0,17	0,41	0,59	0,21
13	**Nitrat (NO3-N)**	**mg/L**	**10**	<0,002 0	<0,002 0	<0.002 0	<0,002 0	<0,002 0	<0,002 0	<0,002 0	<0,002 0	<0,002 0	<0,002 0	<0,002 0	<0.002 0	<0,002 0	<0,002 0	<0.002 0	<0,002 0	<0,002 0	<0,002 0
14	**Nitrit (NO2-N)**	**mg/L**	**0,06**	<0,004 0	0,0052	0,0053	<0.004 0	0,0077	0,0114	<0,004 0	0,0077	0,083	0,034	0,0281	0.0040	0,0147	0,0245	0,0173	0,0119	0.0050	0,0044
15	**Amoniak (NH3-N)**	**mg/L**	**0,02**	0.8141	0,7531	0.5900	0,9222	0,5747	0,5426	1,366	0,5747	0,6614	1,239	1,25	0,909	0,9458	0,9016	1,345	1.093	1,046	1,479
16	**Fecal Coliform**	**MPN/100 ml**	**1000**	680	2.200	3.300	330	7.000	1.100	2.300	7000	3.300	7.900	2.600	1.700	790	790	200	3.300	350	110
17	**Total Coliform**	**MPN/100 ml**	**5000**	17.000	7.900	13.000	2.400	9.400	13.000	3.300	9.400	160.00 0	7.900	94.000	1.700	2.400	2.400	3.300	4.900	920	110

Pemantauan kualitas air permukaan dilakukan pada 18 titik sampel air yang terdiri 6 buah Daerah Aliran Sungai (DAS) dimana aliran air permukaan tersebut merupakan titik – titik yang telah dianggap mewakili gambaran kualitas air permukaan di Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan hasil pengujian sampel yang dilakukan oleh Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan dan UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Tanah Laut maka didapatkan data – data sebagai berikut :

Dari hasil pemantauan pada 18 (delapan belas) titik pantau air permukaan dan analisa berdasarkan baku mutu air sungai kelas II sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Lampiran VI Baku Mutu Air Nasional untuk Sungai Kelas II pada periode 1 (satu) diketahui bahwa jumlah parameter yang diperiksa sebanyak 324 parameter dan jumlah parameter yang tidak melebihi baku mutu sebanyak 284 dan yang melebihi baku mutu sebanyak 40 parameter, sehingga didapatkan persentase parameter yang memenuhi baku mutu adalah sebesar dengan 87,65 % dari total paramater sebanyak 324 parameter. Sedangkan pada periode 2 (dua) diketahui bahwa jumlah parameter yang diperiksa sebanyak 324 parameter dan jumlah parameter yang tidak melebihi baku mutu sebanyak 277 parameter dan yang melebihi baku mutu sebanyak 47 parameter, sehingga didapatkan persentase parameter yang memenuhi baku mutu adalah sebesar dengan 85,49 % dari total paramater sebanyak 324 parameter.

Dari hasil analisa pada setiap titik pantau diketahui bahwa pada periode I & II dengan total 648 parameter terdapat 4 jenis parameter yang tidak memenuhi baku mutu yang terdiri dari COD pada 15 titik pantau, Amoniak pada 36 titik pantau, Fecal Coliform pada 21 titik pantau dan Total Coliform pada 15 titik pantau.

Dari hasil perhitungan pada aplikasi IKLH nilai Indeks Kualitas Air (IKA) pada Tahap I dan Tahap II untuk 18 (delapan belas) titik pantau dengan kategori sungai kelas II Tahun 2025 didapatkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Tanah Laut sebesar 74,02

Dari hasil evaluasi Indeks Kualitas Air (IKA) untuk kategori sungai kelas II

diketahui bahwa nilai IKA pada Tahun 2025 mengalami peningkatan dari IKA tahun 2024 yaitu 50 dimana hal ini dipengaruhi dari perubahan perhitungan IKLH yang menggunakan metode terintegrasi dari tiga komponen utama (Air, Udara, Lahan), dengan penyesuaian metode dan parameter yang mungkin diperbarui sesuai perkembangan, seperti penambahan parameter PM2.5 untuk udara dan metode perhitungan IKA-INA.

Indeks Kualitas Udara

Berdasarkan deskripsi, analisis data hasil perhitungan dan pemantauan kualitas udara ambien di Kabupaten Tanah Laut masih memenuhi Baku Mutu yang ditetapkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Status Mutu udara ambien berdasarkan 2 metode perhitungan analisa yaitu metode Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) dan metode Passive Sampler yang digunakan sebagai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Tanah Laut.

A. Metode Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) dan kebisingan dilaksanakan pada 4 kawasan Titik pengambilan sampel di Kabupaten Tanah Laut yaitu :
   1. Kawasan Padat Transportasi
      Jl. A. Yani KM. 123 Desa Simpang Empat Asam Asam
   2. Kawasan Pemukiman
      Depan Mesjid Al-Ikhlas Jl. Komplek Kijang Mas
   3. Kawasan Perkantoran
      Depan Kantor Bupati Tanah Laut
   4. Kawasan Industri
      Depan PT. Indofood Tbk

Status Mutu udara ambien berdasarkan metode perhitungan analisa Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di Kabupaten Tanah Laut semua memenuhi baku mutu. Pada tingkat kebisingan, pengukuran pada periode I dan periode II terdapat sampel yang melebihi Baku Mutu Tingkat kebisingan yaitu pada Kawasan Pemukiman dan Kawasan Perkantoran.

Tingginya nilai tingkat kebisingan dapat berdampak terhadap masyarakat yaitu pada gangguan psikologis tahap ringan yaitu terhadap gangguan tidur.

Tabel 3.9.7
Hasil Uji Kualitas Udara Ambien (ISPU) Periode I Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Padat Transportasi Jl. A. Yani KM. 123 Simpang Empat Asam – asam	Permukiman depan masjid Al- Ikhlash Jl. Komplek Kijang Mas	Perkantoran depan kantor bupati tanah laut	Perindustrian Depan PT. Indofood	Metode
Kualitas Udara Ambien								
1	Nitrogen Dioksida (NO2)	µg/m^3	200	**6,25**	**6,45**	**7,48**	**5,73**	Impinger
2	Sulfur Dioksida (SO2)	µg/m^3	150	**1,78**	**1,57**	**1,47**	**1,58**	Impinger
3	Karbon Monoksida (CO)	µg/m^3	10.000	**<115**	**<115**	**<115**	**<115**	CO meter
4	Ozon (O2)	µg/m^3	150	**6,39**	**7,76**	**3,48**	**4,96**	Impinger
Kualitas Udara Partikulat (TSP) (24 Jam)								
5	TSP / Debu	µg/m^3	230	**26,02**	**8,65**	**6,73**	**12,54**	HVAS
6	PM2,5	µg/m^3	55	**8,4**	**6,5**	**2,68**	**4,61**	HVAS
Tingkat Kebisingan (24 Jam)								
7	Kebisingan	db(A)	70	**64,9**	**56,7**	**56,8**	**61,2**	Sound Level Meter
Pengukuran Metrologi								
8	Arah Angin	-	-	**T-B**	**T-B**	**T-B**	**T-B**	Weather Station
9	Kecepatan Angin	m/s	-	**0,55875**	**0,41124**	**0,36654**	**0,45594**	Weather Station
10	Suhu	°C	-	**33**	**30**	**30**	**35**	Weather Station
11	Kelembapan	%RH	-	**78**	**78**	**78**	**70**	Weather Station

Tabel 3.9.8
Hasil Uji Kualitas Udara Ambien (ISPU) Periode II Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Padat Transportasi Jl. A. Yani KM. 123 Simpang Empat Asam – asam	Permukiman depan masjid Al- Ikhlash Jl. Komplek Kijang Mas	Perkantoran depan kantor bupati tanah laut	Perindustrian Depan PT. Indofood	Metode
Kualitas Udara Ambien								
1	Nitrogen Dioksida (NO2)	µg/m^3	200	6,7	8,78	6,21	13,91	Impinger
2	Sulfur Dioksida (SO2)	µg/m^3	150	1,86	2,34	1,38	3,33	Impinger
3	Karbon Monoksida (CO)	µg/m^3	10.000	<115	<115	<115	<115	CO meter

4	Ozon (O2)	µg/m³	150	17,73	14,9	13,52	7,76	Impinger
Kualitas Udara Partikulat (TSP) (24 Jam)								
5	TSP / Debu	µg/m³	230	23,86	4,70	3,61	23,04	HVAS
6	PM2,5	µg/m³	55	2,11	0,75	0,17	0,8	HVAS
Tingkat Kebisingan (24 Jam)								
7	Kebisingan	db(A)	70	69,30	63,7	63,1	63,9	Sound Level Meter
Pengukuran Metrologi								
8	Arah Angin	-	-	B-T	B-T	B-T	S-U	Weather Station
9	Kecepatan Angin	m/s	-	3,3525	0,0447	0,1341	0,46935	Weather Station
10	Suhu	°C	-	30	32,6	32,2	34	Weather Station
11	Kelembapan	%RH	-	59	63	63	68	Weather Station

B. Metode Passive Sampler dilaksanakan 2 periode pada 8 kawasan Titik pengambilan sampel di Kabupaten Tanah Laut yaitu :

1. Kawasan Padat Transportasi
    a. Jl. A. Syairani Komp.Perkantoran Gagas Pelaihari, depan Kantor Dishub
    b. Jl. H. Boejasin Kel.Angsau Kec.Pelaihari, depan Kantor PUPR
2. Kawasan Pemukiman,
    a. Komp. Puri Anggoro, Jl. A.Yani H.Busra, Kec. Pelaihari
    b. Komp.Perumahan Cahaya Angsau Residence, Kel. Angsau Kec. Pelaihari
3. Kawasan Perkantoran,
    a. DPRKPLH Jl.A.Syukri Komp.Gagas Permai Kel.Angsau Kec.Pelaihari
    b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Komp Perkantoran Gagas Jl.Datu Insyad Kel.Angsau Kec.Pelaihari
4. Kawasan Industri,
    a. PT Indofood Tbk, Jl.A.Yani KM 3,3 Kec. Bati Bati
    b. PT Japfa Comfeed Indonesia Feed, Jl.A.Yani KM 7 Ds Nusa Indah, Kec.Bati Bati

Tabel 3.9.9
Hasil Uji Kualitas Udara Ambien (Passive Sampler) Periode I dan II
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

PERHITUNGAN INDEKS										
NO	KABUPATEN	RATAAN PER PARAMETER			Indeks Dibagi Baku Mutu			Rataan	Capaian	Target
		NO_2 (µg/m3) Nitrogen Dioksida	SO_2 (µg/m3) Sulfur Dioksida	PM 2,5 (µg/m3) Partikulat	NO_2 (µg/m3) Nitrogen Dioksida	SO_2 (µg/m3) Sulfur Dioksida	PM 2,5 (µg/m3) Partikulat	INDEKS	IKU	IKU
1	**Tanah Laut**	**3,47**	**3,42**	**12,15**	**0,07**	**0,08**	**0,81**	**0,32**	**84,42**	**71,82**

Status Mutu udara ambien berdasarkan metode perhitungan Passive Sampler semua memenuhi baku mutu dan Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2025 untuk Kabupaten Tanah Laut adalah 84,42 nilai ini sudah memenuhi target IKU tahun 2025 yaitu 71,82 . Perhitungan IKU pada tahun 2025 mengalami perubahan yaitu sebelumnya pada tahun 2024 hanya menghitung parameter gas SO2 dan NO2 sedangkan tahun 2025 ada pertambahan parameter PM 2,5.

Indeks Kualitas Udara yang sudah memenuhi baku mutu udara ambien ini dapat dipengaruhi dari kegiatan penanaman pohon, bertambahnya RTH, Adanya angkutan umum gratis bagi masyarakat untuk mengurangi tingkat emisi kendaraan dan pengawasan lingkungan hidup terhadap pelaku usaha yang memiliki emisi pada kegiatan usahanya.

Indeks Kualitas Lahan

Hutan merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi masalah pengendalian daur air, erosi dan longsor lahan. Harapan ini perlu didukung bersama untuk diwujudkan, karena banyak kelebihan ekosistem hutan untuk mewujudkan harapan tersebut. Nilai peran hutan ditentukan oleh luas, jenis, watak pertumbuhan, keadaan pertumbuhan dan struktur hutannya. Ekosistem hutan juga dipengaruhi oleh keadaan iklim, geologi, watak tanah dan geomorfologi, sehingga di dalam

membangun hutan harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi dan masalah kependudukannya.

Angka kualitas lahan mengalami peningkatan yang semula 44,67 menjadi 65,17. Luas Tutupan Lahan tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9.10
Perbandingan hasil perhitungan indeks kualitas lahan di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dan tahun 2025

Tutupan	Tahun 2024	Tahun 2025
	Luas (Ha)	
Luas Tutupan Hutan	63854,28	63854,28
Luas Belukar dalam Kawasan Hutan	29438,16	29438,16
Luas Belukar pada Kawasan berfungsi Lindung	2620,24	2620,24
Luas RTH	9949,00	9949,00
Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan	6726,63	6726,63
IKL	44,67	65,17

Sumber: KLHK, 2025

Tabel 3.9.11
Daftar pelaksanaan pengawasan kepada pelaku usaha Tahun 2025

No	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil Pengawasan
1	Ds. Bingkulu Kec. Tambang Ulang	2025	PT. Sentosa Sukses Utama	30 Januari 2025	Tidak Taat
2	Ds. Liang Anggang Kec. Bati-Bati	2025	PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Unit 22	6 Februari 2025	Tidak Taat
3	Ds. Pulau sari Kec. Tambang Ulang	2025	PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Unit 30	6 Februari 2025	Tidak Taat
4	Ds. Pulau sari Kec. Tambang Ulang	2025	PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Unit 38	6 Februari 2025	Tidak Taat
5	Ds. Kintap Kec. Kintap	2025	RSUD KH. Mansyur	6 Februari 2025	Taat
6	Ds. Kintap Kec. Kintap	2025	Endik Medical Clinic	6 Februari 2025	Tidak Taat
7	Ds. Jorong Kec. Jorong	2025	PT. Sarana Subur Agrindotama	11 Februari 2025	Tidak Taat
8	Ds. Simpang Empat Baru Kec. Jorong	2025	PT. Mandiri Perkasa Plant	11 Februari 2025	Tidak Taat
9	Kel. Sarang Halang Kec. Pelaihari	2025	RSUD H. Boejasin	12 Februari 2025	Tidak Taat
10	Ds. Tajau Mulya Kec. Batu Ampar	2025	Koperasi Sawit Makmur (PT. BGMPA)	18 Februari 2025	Taat
11	Kec. Kintap	2025	PT. Smart, Tbk	18 Februari 2025	Taat
12	Ds. Nusa Indah Kec. Bati-Bati	2025	PT. Karimata Timur	20 Februari 2025	Taat
13	Ds. Nusa Indah Kec. Bati-Bati	2025	PT. Bintang Jasa Abadi	20 Februari 2025	Tidak Taat
14	Ds. Ujung Baru Kec. Bati-Bati	2025	PT. Ciomas Adisatwa (RPA)	27 Februari 2025	Tidak Taat
15	Ds. Banyu Irang Kec. Bati-Bati	2025	PT. Dutasatrya Adhipersada	27 Februari 2025	Tidak Taat

No	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil Pengawasan
16	Kec. Pelaihari	2025	Yayasan Izdihar Ibunda	12 Maret 2025	Taat
17	Kec. Pelaihari	2025	Azka Medical Centre	12 Maret 2025	Tidak Taat
18	Kec. Pelaihari	2025	Rumah Sakit Ammariz	13 Maret 2025	Taat
19	Kec. Pelaihari	2025	PT. Mitra Sehat Borneo (RSBCM)	13 Maret 2025	Tidak Taat
20	Kec. Pelaihari	2025	Hotel Tuntung Pandang	18 Maret 2025	Tidak Taat
21	Kec. Pelaihari	2025	Hotel Sinar	18 Maret 2025	Tidak Taat
22	Kec. Pelaihari	2025	Rumah Potong Hewan	19 Maret 2025	Tidak Taat
23	Kec. Pelaihari	2025	CV. Trio Motor Pelaihari	19 Maret 2025	Tidak Taat
24	Kec. Tambang Ulang	2025	PT. Sarana Doa Bersama	25 Maret 2025	Tidak Taat
25	Kec. Bati-Bati	2025	PT. Air Telaga Surya	10 April 2025	Tidak Taat
26	Kec. Tambang Ulang Ds. Pulau Sari	2025	PT. Patriot Intan Abadi	22 April 2025	Tidak Taat
27	Kec. Bati-Bati Ds. Kait-Kait	2025	PT. Patriot Intan Abadi	22 April 2025	Tidak Taat
28	Kec. Bati-Bati Ds. Bentok Kampung	2025	PT. Patriot Intan Abadi	22 April 2025	Tidak Taat
29	Kec. Bati-Bati Ds. Liang Anggang	2025	PT. Patriot Intan Abadi	22 April 2025	Tidak Taat
30	Kec. Tambang Ulang Ds. Bingkulu	2025	PT. Charoen Pokphand Jaya Farm	23 April 2025	Tidak Taat
31	Kec. Bati-Bati Ds. Nusa Indah	2025	PT. Charoen Pokphand Jaya Farm	23 April 2025	Tidak Taat
32	Kec. Bati-Bati Ds. Sambangan	2025	PT. Charoen Pokphand Jaya Farm	23 April 2025	Tidak Taat
33	Kec. Pelaihari Ds. Sungai Riam	2025	PT. Buana Manira Prakarsa	30 April 2025	Tidak Taat
34	Kec. Bati-Bati	2025	PT. Ciomas Adisatwa Farm 1	15 Mei 2025	Tidak Taat
35	Kec. Bati-Bati	2025	PT. Ciomas Adisatwa Farm 2	15 Mei 2025	Tidak Taat
36	Kec. Bati-Bati	2025	PT. Ciomas Adisatwa Farm Bentok 1	15 Mei 2025	Tidak Taat
37	Kec. Bati-Bati	2025	PT. Ciomas Adisatwa Farm Bentok 2	15 Mei 2025	Tidak Taat
38	Kec. Bati-Bati	2025	PT. Hepi Bornio	21 Mei 2025	Tidak Taat
39	Kec. Bati-Bati	2025	UD. Kandang Biru	21 Mei 2025	Tidak Taat
40	Kec. Bati-Bati	2025	Arvin Rismawan	21 Mei 2025	Tidak Taat
41	Kec. Bati-Bati	2025	CV. Bintang Banua Abadi	21 Mei 2025	Tidak Taat
42	Kec. Bati-Bati	2025	PT. Rukun Abadi Sejahtera	22 Mei 2025	Tidak Taat
43	Kec. Bati-Bati	2025	Lihin Rustafa	22 Mei 2025	Tidak Taat
44	Kec. Panyipatan Ds. Kandangan Lama & Ds. Batu Tungku	2025	PT. Sarana Subur Agrindotama	2 Juni 2025	Tidak Taat
	Kec. Panyipatan Ds. Bumi Asih & Ds. Kuringkit		PT. Sarana Subur Agrindotama	2 Juni 2025	

No	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil Pengawasan
45		2025			Tidak Taat
46	Kec. Tambang Ulang Ds. Pulau Sari	2025	PT. Sariguna Primatirta, Tbk	3 Juni 2025	Tidak Taat
47	Kec. Bati-Bati Ds. Nusa Indah	2025	PT. Sukses Wijaya Adimakmur	3 Juni 2025	Tidak Taat
48	Kec. Bati-Bati Ds. Banyu Irang	2025	CV. Saprotan Utama	18 Juni 2025	Tidak Taat
49	Kec. Bati-Bati Ds. Banyu Irang	2025	PT. Kelana Multi Kontruksi	18 Juni 2025	Tidak Taat
50	Kec. Bati-Bati Ds. Banyu Irang	2025	PT. Pugung Raya Blok A1	18 Juni 2025	Tidak Taat
51	Kec. Bati-Bati Ds. Banyu Irang	2025	PT. Pugung Raya Blok A2	18 Juni 2025	Tidak Taat
52	Kec. Bati-Bati Ds. Banyu Irang	2025	PT. Pugung Raya Blok A3	18 Juni 2025	Tidak Taat
53	Kec. Tambang Ulang	2025	H. Hasanudin	19 Juni 2025	Tidak Taat
54	Kec. Tambang Ulang	2025	PT. Putra Kanca	19 Juni 2025	Tidak Taat
55	Kec. Tambang Ulang	2025	PT. Bimo Laksana Group	19 Juni 2025	Tidak Taat
56	Kec. Tambang Ulang	2025	CV. HU Berkah Bersaudara	19 Juni 2025	Tidak Taat
57	Kec. Pelaihari	2025	Labkesda	16 Juli 2025	Tidak Taat
58	Kec. Kintap Desa Salaman	2025	PT. Citra Putra Kebun Asri	28 Juli 2025	Tidak Taat
59	Kec. Kintap Desa Riam Adungan I	2025	PT. Citra Putra Kebun Asri	28 Juli 2025	Tidak Taat
60	Kec. Kintap Desa Riam Adungan II	2025	PT. Citra Putra Kebun Asri	28 Juli 2025	Tidak Taat
61	Kec. Tambang Ulang Desa Bingkulu	2025	PT. Cahaya Mata Telur	30 Juli 2025	Tidak Taat
62	Kec. Bati-Bati Desa Nusa Indah	2025	PT. Mitra Citra Gemilang	30 Juli 2025	Tidak Taat
63	Kec. Pelaihari Desa Pemuda	2025	PT. Citra Putra Kebun Asri	31 Juli 2025	Tidak Taat
64	Kec. Batu Ampar Desa Jilatan	2025	PT. Citra Putra Kebun Asri	31 Juli 2025	Tidak Taat
65	Kec. Jorong Desa Swarangan	2025	PT. Citra Putra Kebun Asri	31 Juli 2025	Tidak Taat
66	Kec. Jorong Desa Jorong	2025	PT. Citra Putra Kebun Asri	31 Juli 2025	Tidak Taat
67	Kec. Jorong	2025	PT. Wahyu Putra Ramadhan	03 September 2025	Tidak Taat
68	Kec. Bati-Bati	2025	Felix Sutanto	04 September 2025	Taat

Sumber: DPRKPLH Kab. Tanah Laut 2025

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, sebagai berikut.

a. Peningkatan Wilayah yang Memenuhi Baku Mutu Lingkungan Hidup

1. Penyediaan hasil uji kualitas lingkungan hidup sesuai standar.

- Penyediaan hasil uji kualitas air sungai yang dilakukan oleh laboratorium terakreditasi, meliputi parameter fisika, kimia, dan biologi seperti pH, BOD, COD, TSS, DO, serta kandungan logam berat. Hasil pengujian disajikan dalam bentuk laporan resmi dan dibandingkan dengan baku mutu kualitas air sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Penyediaan hasil pemantauan kualitas udara ambien yang mencakup parameter $PM_{2.5}$, PM_{10}, SO_2, NO_2, CO, dan O_3. Pengujian dilakukan menggunakan metode standar nasional atau internasional, dan hasilnya dilaporkan sesuai baku mutu kualitas udara ambien yang ditetapkan pemerintah.

- Penyediaan hasil analisis kualitas tanah untuk mengetahui tingkat kesuburan dan potensi pencemaran, seperti kandungan logam berat (Pb, Hg, Cd), pH tanah, dan bahan organik. Pengujian dilakukan sesuai metode standar dan hasilnya digunakan sebagai dasar pengelolaan lahan.

  Penyediaan hasil uji kualitas lingkungan hidup dilengkapi dengan:

  - Sertifikat atau akreditasi laboratorium penguji
  - Metode pengujian yang digunakan
  - Tanggal dan lokasi pengambilan sampel
  - Interpretasi hasil uji terhadap baku mutu





2. Pelaksanaan rehabilitasi lingkungan hidup

a) Pelaksanaan penanaman bibit pohon

Kegiatan ini merupakan upaya untuk menanam bibit Pohon Kembali secara rutinitas di setiap tahun bersama pihak-pihak yang diikut sertakan seperti Dinas Lingkungan hidup, Dinas Kehutanan, Sekolah-Sekolah,Lembaga Lingkungan dan lain sebagainya . Hingga sekarang, tercatat sudah 7000 bibit Pohon yang sudah ditanam di kabupaten Tanah laut dan akan terus bertambah disetiap tahunnya.



3. **Peningkatan penyebarluasan informasi peringatan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup**

a) Pelaksanaan sosialisasi peringatan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran mereka dalam menjaga kualitas udara ambien melalui edaran Bupati yang disampaikan ke masyarakat dan pelaku usaha. Khusus untuk masyarakat edaran Bupati tersebut disampaikan ke kecamatan dan desa-desa.



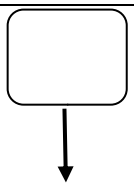
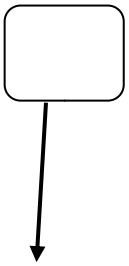
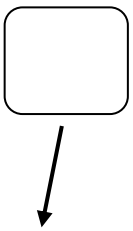
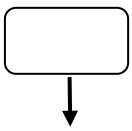
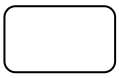


Memberikan informasi pengendalian pencemaran limbah domestik

4. **Peningkatan kualitas laboratorium pengujian**

a) Pelaksanaan layanan laboratorium lingkungan sesuai standar

SOP PENCATATAN DAN PENYIMPANAN DATA SAMPEL DI UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN KABUPATEN TANAH LAUT

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Website/ Administrator	Pejabat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pelanggan/Tim PPC menyerahkan sampel kepada *Administrator* Laboratorium	Mulai		Sampel			
2.	*Administrator* Laboratorium menerima dan mengidentifikasi sampel			Sampel	10 Menit		Identifikasi harus dilakukan dengan teliti dan benar
3.	*Administrator* Laboratorium mengisi data sampel melalui aplikasi secara daring			Sampel	30 Menit	Sampel - Data sampel tercatat dan tersimpan pada aplikasi - Kode sampel - Formulir permintaan pengujian sampel	Data sampel yang diinput harus secara detail dan lengkap
4.	*Administrator* Laboratorium mengisi data sampel melalui aplikasi secara daring *Administrator* Laboratorium memberi label pada sampel			- Kode sampel dari aplikasi - kertas label	5 Menit	- Kode sampel dari aplikasi - kertas label Sampel berlabel kode	
5.	*Administrator* Laboratorium mencetak formulir permintaan pengujian sampel			- Printer - Kertas Label 5 Menit	5 Menit	Formulir permintaan pengujian sampel	
6.	*Administrator* Laboratorium menyerahkan				5 Menit		

	formulir permintaan pengujian sampel						
7.	Pelanggan menerima formulir permintaan pengujian sampel						
8.	Selesai	Selesai					

b) Penyediaan alat laboratorium lingkungan sesuai standar

Penyediaan peralatan dan bahan yang ada di UPTD laboratorium Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sampai pada tahun 2025 telah memenuhi standar yaitu berupa alat kualitas air, kualitas udara, mikrobiologi dan alat lainnya. Kemudian diadakan bahan untuk kegiatan kantor lainnya seperti alat pendukung laboratorium, bahan kimia cair dan padat. Dan selalu melakukan Pemeliharaan peralatan laboratorium berupa Pemeliharaan kalibrasi yang dilakukan rutin karena merupakan kewajiban sebuah laboratorium. Pada bulan juni 2025, dilakukan kalibrasi terhadap parameter yang telah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) dilaksanakan oleh Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 17 Alat, pada bulan agustus 2025 oleh Gema Instrumen Analitikal sebanyak 1 Alat, pada bulan Juli 2025 oleh Wira Lab sebanyak 1 Alat.

c) Penyediaan SDM laboratorium lingkungan bersertifikat

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia laboratorium Personel laboratorium berjumlah 15 orang mendapatkan pelatihan alat- alat pengadaan baru, serta pelatihan lainnya.





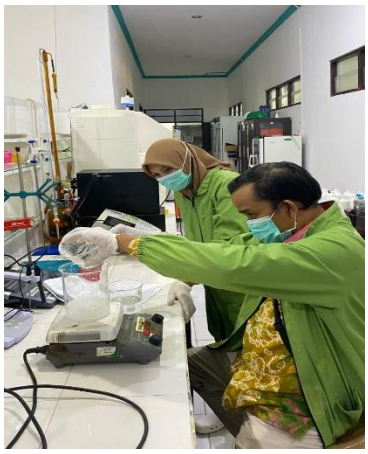






Foto-foto Kegiatan Pemeliharaan Kalibrasi Alat Laboratorium





Foto Pelatihan yang diikuti UPTD Laboratorium Lingkungan Kab. Tanah Laut

b. Peningkatan Ketaatan Pelaku Usaha terhadap PPLH

1. Peningkatan pelaku usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin PPLH

   a) Pelaksanaan persetujuan lingkungan terkait PPLH, penerbitan persetujuan teknis dan surat kelayakan operasi

   Pengelolaan lingkungan bertujuan untuk memberikan dampak yang postif secara ekonomi bagi pengusaha, pemerintah dan masyarakat tetapi tidak merugikan secara Lingkungan. Dampak negatif yang muncul dikelola sehingga tidak menimbulkan kerugian atau permasalahan lingkungan secara signifikan. Pada tahun 2025 terdapat 265 perusahaan yang penerbitan persetujuan Dokumen Lingkungan, izin lingkungan / persetujuan

lingkungan dan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan Emisi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut. Dasar dari dikeluarkannya izin lingkungan / persetujuan lingkungan adalah disetujuinya Dokumen lingkungan (Amdal, UKL/UPL) yang merupakan kesepakatan pengelolaan lingkungan dalam lingkup usaha dan/atau kegiatan. Didalamnya berisi langkah langkah pengelolaan yang mencakup Pengendalian Pencemaran air (PPA), Pengendalian Pencemaran Udara (PPU) dan Pengelolaan B3 dan Limbah B3.

2. Penyediaan pejabat pengawas lingkungan hidup yang kompeten

a) Pembentukan pejabat pengawas lingkungan hidup

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Di daerah, dikenal juga PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah). Pelatihan pejabat pengawas lingkungan hidup. Yang bertujuan untuk Menjamin kepatuhan pelaku usaha terhadap izin dan persetujuan lingkungan Mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan Memperkuat penegakan hukum lingkungan secara administrative.

b) Pelatihan pejabat pengawas lingkungan hidup

Pelatihan ini bertujuan untuk membekali PPLH dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam melakukan pengawasan terhadap ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Materi pelatihan meliputi peraturan lingkungan hidup, teknik pengawasan dan pemeriksaan lapangan, pengambilan dan pengujian sampel lingkungan, penyusunan laporan hasil pengawasan, serta penerapan sanksi administratif. Pelatihan diselenggarakan oleh instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup dan menjadi

syarat agar PPLH dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara efektif dan sesuai ketentuan hukum.

3. Peningkatan pelaku usaha yang menindaklanjuti hasil pengawasan

a) Pengawasan ketaatan pelaku usaha

Ada 5 (lima) obyek pengawasan yang menjadi indikator ketaatan lingkungan terhadap ketentuan

1. Kesesuaian dokumen dengan kondisi senyatanya di lokasi kegiatan, seperti luasan, kapasitas produksi, peralatan, proses produksi, dll.
2. Kewajiban Pelaporan sebagai sarana pengawasan tidak langsung (pengawasan pasif).
3. Pengendalian Pencemaran Air (air limbah produksi dan air limbah domestik) yaitu persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah dan SLO, fasilitas pengelolaannya (IPAL), dll.
4. Pengendalian Pencemaran Udara : persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi dan SLO, fasilitas pengelolaannya (alat pengendali emisi)
5. Pengelolaan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan Limbah B3 (Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun) : rincian teknis pengelolaan limbah B3, fasilitas pengelolaan limbah B3 (TPS Limbah B3), Fasilitas penyimpanan B3(Gudang B3), dll.

Dari hasil evaluasi pengawasan bahwa pelanggaran lingkungan pada tahun 2025 yang banyak terjadi adalah berkenaan dengan pengendalian pencemaran air khususnya untuk air limbah domestik dan pengendalian pencemaran udara terkait persetujuan teknis pembuangan emisi dan SLO, serta pelaporan.

b) Monitoring tindak lanjut pengawasan

Dengan cara Menyusun jadwal pengawasan yang memprioritaskan pelaku usaha dan/atau Pada tabel diatas di tahun 2025, dilakukan pengawasan terhadap 100 pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan, diantara 100 pelaku usaha dan/atau kegiatan tersebut sebanyak 19 pelaku usaha dan/atau kegiatan

yang mentaati ketentuan dalam dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan dan meningkatkan Presentase capaian ketaatan Perusahaan pada tahun 2026.



4. Peningkatan tindak lanjut pengaduan dampak lingkungan
   a) Fasilitasi pengaduan PPLH

DATA PENGADUAN TAHUN 2025

No	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Tgl pengaduan	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Warga Desa Nusa Indah	- Keluhan kebisingan dan debu dari kegiatan workshop/bengkel truk dan alat berat di Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati - Sumber workshop/bengkel truk di gang Sabrina Komplek Langgeng Citra Persada Blok A	08/01/2025	- Pada tanggal 08 Januari 2025 pengaduan disampaikan oleh salah satu warga di gang Sabrina Komplek Langgeng Citra Persada Blok A, keluhan dampak kegiatan workshop/bengkel truk dan alat berat yaitu : 1. Getaran rumah saat menurunkan mesin atau alat berat 2. Suara bising/ribut saat malam hari mengganggu waktu istirahat/tidur 3. Debu saat siang hari dari aktivitas las, dikhawatirkan ada partikel- partikel yang membahayakan lingkungan sekitar 4. Seringnya mengganggu akses jalan pada saat lalu lintas armada yang penurunan mesin/alat berat. - Dikoordinasikan dengan pihak Kecamatan Bati-Bati terkait keberadaan workshop/bengkel truk di area permukiman yang menimbulkan ganggunan terhadap lingkungan sekitar berupa keluhan suara bising dan debu - Pada tanggal 13 Januari 2025 Pihak kecamatan, Pol PP dan kepala desa Nusa Indah telah melakukan peninjauan ke lokasi dan melakukan komunikasi dengan penanggung jawab workshop/bengkel dan mereka bersedia untuk pindah lokasi kegiatan dan sudah mempersiapkan lokasi baru.
2	Warga Desa Kintap Kecil, Kecamatan Kintap	Dugaan pencemaran sungai akibat Over Burden (OB) tambang batubara ilegal Dusun Batu Anting	24/04/2025	- Pada tanggal 24 April 2025 dilakukan monitoring pengaduan ke Dusun Batu Anting dengan kegiatan sbb : - Koordinasi dengan Banit Tipidter Polres Tala, Danramil Kintap, Kanit Reskrim Polsek Kintap, Kasi Trantib Kecamatan Kintap, Kepala Desa Kintap Kecil, Kepala Dusun Kintap Kecil dan penanggung jawab tambang Dusun Batu Anting. - Melakukan peninjauan lokasi secara bersama-sama untuk melihat progress tindak lanjut perbaikan pengelolaan lingkungan yang sudah dilakukan sesuai dengan Surat Kepala DPRKPLH Nomor : 660/35-PPKLH/DPRKPLH/IX/2024, tanggal 24 September 2024 perihal : Surat Peringatan - Melakukan pengamatan terhadap lokasi kegiatan penambangan batubara, permukiman terdekat dan kondisi sungai Kintap Kecil. - Melakukan pengumpulan dokumentasi berupa foto/video dengan kamera dan drone area area kegiatan penambangan dan sekitarnya. Hasil monitoring lapangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : ➢ Pada saat dilakukan peninjauan ke lokasi terlihat adanya aktivitas pertambangan batubara di dusun

No	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Tgl pengaduan	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Batu Anting RT.01 Desa kintap Kecil. Terdapat beberapa alat berat di sekitar area kegiatan. ➢ Pada area tambang yang bersebelahan dengan sungai kintap terlihat tumpukan OB tambang yang mengalami longsor di sepanjang sepandan sungai hingga masuk ke aliran sungai. ➢ Pada area sisi sungai terdapat siring-siring dari batang pohon kelapa yang menurut informasi dilapangan, siring tersebut dibuat untuk menahan longsong OB tambang agar tidak masuk ke aliran sungai, upaya penyiringan masih dalam proses karena menunggu kondisi sungai surut. Saran Tindak Lanjut : 1. Agar segera dilakukan upaya pengerokan lumpur OB tambang yang masuk ke aliran sungai. 2. Agar dilakukan upaya pencegahan OB tambang kembali longsor dan tidak merusak sempadan sungai sejauh 100 meter dari sungai. Upaya penyelesaian saran tindak lanjut ini agar sesegera mungkin dan menyampaikan progress perkembangan tindak lanjut setiap hari kepada Camat Kintap.
3	Warga Desa Tampang Kecamatan Pelaihari	Pembakaran limbah medis RS	09/05/2025	➢ Pada tanggal 10 Mei 2025 dilakukan peninjaun ke lokasi untuk melihat langsung bukti adanya pembakaran limbah medis pada lokasi yang diadukan. Terlihat adanya sisa-sisa pembakaran limbah medis bercampur dengan limbah nonmedis. Kepada warga pelapor diminta untuk melakukan pemantauan pada lokasi apabila ada kegiatan pengangkutan dan pembakaran limbah medis lahi dan segera melaporkan ke DPRKPLH untuk segera ditindaklanjuti dan menemukan bukti langsung. ➢ Pada tanggal 19 Mei 2025 dilakukan verifikasi lapangan oleh TIM DPRKPLH Hasil verifikasi lapangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : ➢ Pada saat dilakukan peninjauan ke lokasi ditemukan adanya sisa-sisa pembakaran sampah medis dan sampah domestik pada bak semen berbentuk persegi, disekitar lokasi pembakaran terdapat limbah medis berserakan seperti spuit bekas, impus set bekas, botol infus bekas, ampul bekas obat injeksi dll. Kondisi limbah medis tersebut ada berupa medis limbah baru dan ada juga limbah medis yg sudah lama berada dilokasi dalam waktu lama. ➢ Dilakukan konfirmasi terhadap penanggung jawab pengelolaan LB3 RSBCM, dengan kegiatan sbb: ➢ Melakukan pemeriksaan teknis pengelolaan TPS LB3 khususnya limbah medis, dengan hasil sbb: 1) Pada TPS limbah medis terdapat tumpukan plastik berwarna kuning berisi limbah medis, kapasitas TPS limbah medis relatif kecil

No	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Tgl pengaduan	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				sehingga tumpukan plastik limbah medis hampir memenuhi ruangan dan terdapat limbah medis yang tercecer dilantai. 2) Menurut informasi penanggung jawab kesling RSBCM, jumlah limbah medis yang masuk ke TPS dicatat oleh petugas yang mengantar limbah medis pada papan logbook limbah medis, kadang-kadang tidak tercatat oleh petugas. 3) Jumlah limbah medis yang dihasilkan dari kegiatan RSBCM berkisar 5 – 30 kg/hari. 4) Melakukan pemeriksaan ruang incinerator 5) Menurut informasi petugas dilokasi, incinerator dalam kondisi rusak 6) Kondisi ruang incinerator terlihat kotor dan tidak tertata, terdapat limbah medis dibagian lantai ruang incinerator ➢ Pada saat peninjauan ke RSBCM, ditemukan adanya kegiatan pengangkutan limbah dari rumah sakit menuju area luar, hasil penelusuran menunjukkan bahwa limbah yang diangkut tersebut adalah limbah medis dan limbah domestik RSBCM yang di timbun dan dibakar dilokasi Jl, A. Yani Desa Tampang, pihak manajemen RSBCM membenarkan bahwa limbah tersebut memang berasal dari RSBCM. Saran Tindak Lanjut: 1. Agar segera dilakukan upaya pembersihan dan pemulihan area yang tercemar limbah medis 2. Agar semua limbah medis ditempatkan pada TPS LB3 dan segera dikelola untuk diserahkan pada pihak ketiga Pada tanggal 28 Mei 2025 dilakukan monitoring progress tindak lanjut 1. Pemeriksaan tindak lanjut perbaikan pengelolaan LB3. 2. Pemeriksaan tindak lanjut pembersihan dan pemulihan lahan tercemar limbah medis. 3. Melakukan pengumpulan dokumentasi berupa foto/video. Hasil monitoring telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : 1. Melakukan pemeriksaan teknis pengelolaan TPS LB3 hasil sbb: ➢ Fasilitas penyimpanan LB3 dengan kapasitas TPS LB3 tidak memadai dengan jumlah limbah medis yang dihasilkan. Memiliki Izin LB3 Nomor : 140/012-PLB3/DPM-PTSP/2018 tanggal 26 Juni 2018 (masa berlaku sudah habis). Menurut informasi pengelola LB3 pada saat ini sedang proses pengajuan Rincian Teknis TPS LB3 ke DPRKPLH Kab. Tala, dalam

No	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Tgl pengaduan	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				tahap perbaikan dokumen. Akan dilakukan penambahan TPS LB3 dan rencana pemasangan incinerator baru di area paling belakang RSBCM. ➢ Berdasarkan berita acara pengangkutan LB3 dari PT. Sarana Bumi Lestari, telah dilakukan pengangkutan limbah infeksius padat pada tanggal 22 Mei 2025 sebanyak 703 kg dan pada tanggal 26 Mei 2025 sebanyak 217 kg. ➢ Limbah medis yang ada disimpan pada TPS limbah medis dengan suhu ruang. Pada lokasi terdapat coldstorage/freezer yang menurut informasi pengelola LB3 rencana akan digunakan untuk menyimpan limbah medis sementara sebelum diangkut pihak ketiga, namun belum difungsikan. Pada TPS LB3 masih ada LB3 yang belum terangkut dan masa simpannya sudah melebihi ketentuan teknis (90 hari pada suhu > 0°C) yaitu abu incinerator, pada pengawasan tahun 2024 hingga saat ini belum pernah ada pengangkutan. ➢ Pencatatan Limbah medis masih belum sesuai ketentuan teknis. ➢ Ditemukan limbah medis yang ditempatkan diluar area TPS LB3, yaitu pada ruang belakang dekat rencana ruang incinerator yang baru berupa ampul bekas ampul obat ditampung dalam drum dan sebagian tercecer dilantai, dengan kondisi ada yang masih utuh dan ada yg berupa pecahan ampul obat. ➢ Tidak ada pencatatan jumlah limbah medis yang dikeluarkan dari masing-masing unit penghasil LB3. ➢ Pencatatan pada logbook masih belum sesuai ketentuan, tidak ada data jumlah LB3 yang diangkut dan sisa LB3 yang disimpan. ➢ Melakukan pemeriksaan ruang incinerator ➢ Menurut informasi petugas, sudah dilakukan perbaikan incinerator sejak tanggal 26 Mei 2025 hingga hari ini (28 Mei 2025), belum dilakukan uji coba apakah incinerator berfungsi dengan baik atau tidak. Belum ada kegiatan pembakaran limbah medis di incinerator sehingga limbah medis yang dihasilkan akan tetap diserahkan dan diangkut oleh pihak ketiga. ➢ Kondisi ruang incinerator sudah dibersihkan dan sudah tidak ada lagi limbah medis berada diruang tersebut. 2. Melakukan monitoring/peninjauan ke lokasi Desa Tampang pada lahan yang wajib dilakukan upaya

No	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Tgl pengaduan	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				pembersihan dan pemulihan dari pencemaran limbah medis, dengan hasil sbb : ➢ Pada area tersebut sudah dilakukan upaya pembersihan dari limbah-limbah medis, sudah dilakukan pengangkutan semua limbah medis dan sisa-sisa pembakaran limbah medis, sehingga tidak ditemukan lagi adanya limbah medis dilokasi tersebut. ➢ Pada area tersebut dilakukan upaya pemulihan dengan mengembalikan kondisi tanah agar bisa berfungsi seperti sediakala. **Saran Tindak Lanjut:** 1. Segera menyelesaikan proses penyusunan dokumen Rincian Teknis TPS LB3. 2. Segera melakukan perbaikan pencatatan jumlah LB3 dari masing-masing unit penghasil LB3 dan pencatatan pada logbook LB3 sesuai ketentuan teknis. 3. Segera menyerahkan limbah B3 yang masa simpannya sudah melebihi ketentuan teknis masa penyimpanan kepada pihak ketiga pengangkut LB3. 4. Menyampaikan laporan progress pelaksanaan saran tindak lanjut dalam berita acara ini kepada Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut. Tim DPRKPLH akan terus melakukan pemantauan terhadap progress perbaikan pengelolaan LB3 di RSBCM.
4	Warga Desa Kintapura Kecamatan Kintap	Dugaan pencemaran sungai akibat Over Burden (OB) tambang batubara ke area kebun warga	26/06/2025	➢ Pada tanggal 26 Juni 2025 diterima laporan salah satu warga Desa Kitapura terkait Dugaan pencemaran sungai akibat Over Burden (OB) tambang batubara ke area kebun warga ke DPRKPLH Tanah Laut yang juga ditembuskan ke DLH Prov. Kalsel ➢ Pada tanggal 9 Juli 2025 dilakukan pendampingan DLH Prov Kalsel kegiatan verifikasi pengaduan ke Desa Kintapura Kecamatan Kimtap bersama-sama dengan perwakilan kecamatan Kintap dan perwakilan PT. Arumin Indonesia Site Asam-Asam. ➢ Hasil Verifikasi lapangan sbb : ➢ Pada lokasi lahan yang diadukan berada pada area cekungan dan merupakan area titik terendah yang menjadi area aliran air pada saat terjadinya hujan. ➢ Pada lokasi tidak ditemukan adanya tanaman sawit yang mati ➢ Terlihat adanya tanaman sawit setinggi ± 50 cm, dengan perkiraan usia tanam < 1 thn ➢ Disekitar lahan terlihat ada tanggul baru yang dibuat oleh pihak PT. Arumin Indonesia Site Asam-Asam untuk mencegah masuknya aliran air dari area tambang ke lahan tersebut. ➢ Pihak PT. Arumin Indonesia Site Asam-Asam bersedia membantu pemulihan lahan yang terdampak tersebut, akan tetapi pemilik lahan tidak bersedia untuk dilakukan pemulihan,

No	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Tgl pengaduan	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				menuntut untuk dilakukan pembebasan lahan/ganti rugi saja. ➢ Terkait penyelesaian pembebasan lahan/ganti rugi ini sudah diluar ranah lingkungan hidup, maka agar diselesaikan antar kedua belah pihak.
5	Warga Desa Bingkulu, Kecamatan Tambang Ulang	Kerusakan lingkungan akibat kegiatan galian tanah urug	21/07/2025	➢ Warga membuat surat pernyataan dan tandatangan penolakan adanya kegiatan tambang galian C/tanah urug di wilayah desa Bingkulu yang ditujukan kepada pengelola tambang tanah urug dan ditembuskan kepada Camat Tambang Ulang, Kapolsek Tambang Ulang dan Danposransil Tambang Ulang. ➢ Kegiatan tambang galian C. tanah urug tersebut tidak memiliki izin dan menjadi ranah aparat penegak hukum untuk melakukan penertiban.
6	Warga Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari	Keluhan kebisingan dampak kegiatan pengelolaan sarang burung walet	24/07/2025	➢ Pada tanggal 12 Agustus 2025 dilakukan koordinasi ke kelurahan Karang Taruna, bertemu dengan Kasi Kemasyarakatan. ➢ Disampaikan perihal adanya keluhan perwakilah warga terkait dampak kegiatan pengelolaan sarang burung walet agar bisa diselesaikan ditingkat RT. ➢ Karena belum ada tindak lanjut penyelesaian di tingkat RT, maka dilakukan rapat mediasi di kelurahan Karang taruna sekaligus peninjauan lapangan pada tanggal 9 September 2025, rapat dihadiri oleh Tim DPRKPLH Tala, perwakilan Satpol PP, perwakilan DPMPTSP, perwakilan Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan, Lurah Karang Taruna, Ketua RW.4, Ketua RT. 9A, Pemilih Sarang burung walet dan beberapa perwakilan warga. ➢ KESEPAKATAN Mengingat kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sudah berjalan sebelum berkembangnya area permukiman sekitar, maka warga masih memberikan toleransi untuk tetap menjalankan kegiatan usahanya dengan ketentuan sebagai berikut : ➢ Tingkat tekanan suara/kebisingan pemanggil walet tidak melebihi ketentuan yang berlaku untuk

No	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Tgl pengaduan	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				tingkat kebisingan di area permukiman yaitu sebesar 55 desibel (dB). ➢ Waktu aktif pemanggil walet dari jam 06.00 WITA sampai dengan jam 18.00 WITA. ➢ Pemilik usaha agar melakukan pemantauan dan pemeliharaan secara berkala terhadap alat pemanggil suara sehingga berfungsi optimal dengan volume sesuai ketentuan. ➢ Apabila warga merasakan gangguan akibat terjadinya peningkatan volume pemanggil walet, maka segera melaporkan kepada pemilik usaha untuk segera dilakukan penyesuaian volume suara.
7	Warga Desa Martadah Baru Kecamatan Tambang Ulang	Keluhan bau menyengat dampak kegiatan peternakan bebek petelur	28/07/2025	➢ Pada tanggal 6 Agustus 2025 dilakukan koordinasi dengan kasi trantib kecamatan Tambang Ulang terkait pengaduan perwakilan warga Desa Martadah Baru Keluhan bau menyengat dampak kegiatan peternakan bebek petelur. ➢ Kemudian pada hari itu Bapak Camat bersama Tim melakukan peninjauan ke lokasi ternak bebek di desa Martadah Baru, diperoleh data bahwa awal izin kegiatan dilokasi tersebut adalah kandang sapi. Pemilik bukan warga desa Martadah Baru melainkan dari luar daerah. Merupakan usaha perorangan bukan perusahaan, tidak ada pengelolaan limbah kotoran bebek sehingga pada saat hujan kotoran akan larut terbawa aliran air masuk ke aliran anak sungai. Pihak desa sudah berupaya mengadakan pertemuan mediasi namun mengalami kendala karena pemilik usaha tidak berada di tempat. ➢ Pada tanggal 26 Agustus 2025 dilakukan musyawarah penyelesaian permasalahan aktivitas peternakan bebek petelur di Aula Desa Martadah Baru, dihadiri oleh perwakilan Satpol PP Tala, Kapolsek Tambang Ulang, Camat Tambang Ulang, perwakilan DPRKPLH Tala, Babinsa Martadah Baru, Babinkamtibmas Martadah Baru, Ketua BPD Martadah Baru, Ketua RT. 11, 12 dan 13 serta perwakilan warga terdampak. Hasil musyawarah : ➢ Warga RT.11, 12 dan 13 sepakat untuk penutupan permanen kegiatan peternakan bebek petelur di RT. 11 RW 03 ➢ Batas waktu eksekusi 1 (satu) bulan ➢ Pemerintah desa Martadah Baru memfasilitasi dan mengawal proses

No	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Tgl pengaduan	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				penutupan peternakan bebek tersebut sesuai prosedur. ➢ Pada Tanggal 15 September 2025 dilakukan peninjauan lapangan bersama-sama oleh tim Satpol PP, dan Damkar, Bagian Hukum Setda, DPM-PTSP, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, DPUPR, Kecamatan Tambang Ulang dan Aparat Desa Martadah Baru ke lokasi peternakan bebek petelur di Desa Martadah Baru RT. 11 RW. 03 Kecamatan Tambang Ulang, dengan hasil sbb: ➢ Usaha kegiatan belum memiliki perizinan berusaha, belum memiliki SPPL sesuai dengan ketentuan dalam perizinan berusaha yang berisi pernyataan kesanggupan dalam pengelolaan dampak yang ditimbulkan dari usaha/kegiatan yang dilakukan. SPPL ini terintegrasi dalam perizinan berusaha melalui OSS. ➢ Berdasarkan ketentuan pada PPRI Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup : pasal 4 bahwa setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki Amdal/ UKL-UPL/SPPL. Pasal 7 ayat (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: b. merupakan Usaha dan/atau Kegiatan Usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki dampak penting terhadap Lingkungan Hidup. ➢ Berdasarkan hasil pengamatan kondisi usaha/kegiatan peternakan bebek diperoleh fakta lapangan sbb : Pada saat peninjauan dilokasi, pada kegiatan peternakan bebek terdapat 3 kandang berbahan kayu dan bambu desain berbentuk bangunan panggung dengan kapasitas total ± 3.000 ekor. Pada bagian bawah kandang berupa lantai tanah/tidak kedap air dimana kotoran bebek pada kandang akan jatuh dan mengalami penumpukan. Pada bagian bawah kandang terlihat ada sekam yang disebar (kondisi masih baru) yang berfungsi agar bagian bawah kandang yang menampung kotoran bebek kondisi tetap kering. Kondisi lahan tempat kandang dibangun dengan tingkat kemiringan yang semakin rendah pada area bagian depan ke bagian area belakang, pada lahan di belakang area kandang terdapat area guntung/cekungan. Pada saat terjadi aliran air hujan, kotoran bebek dibagian bawah kandang berpotensi terbawa aliran masuk ke area guntung dan mengalir ke area-area yang lebih rendah hal ini dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.

No	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Tgl pengaduan	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				➢ Kondisi kandang relatif bersih dan ada perlakukan pelapisan sekam dibawah kandang serta penyemprotan EM4 dan kapur sehingga pada Area kandang saat verifikasi sudah ada penurunan kebauan. ➢ Pelaku usaha menyatakan bersedia dibina dan diberikan masukan untuk melaukan perbaikan perbaikan pengelolaan lingkungan. Saran tindak lanjut : 1. Agar pemilik usaha memenuhi kewajiban terhadap dokumen lingkungan (SPPL) 2. Agar pemilik usaha konsisten melakukan perbaikan pengelolaan limbah agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan 3. Membuka diri terhadap masukan dan saran dari masyarakat sekitar untuk tetap menjaga dan meangantisipasi dampak lingkungan. Selalu menjaga hubungan sosial kemasyarakat sehingga keberdaan kandang bisa bersinergi terhadap sosial masyarakat.
8	Warga Desa Kintapura Kecamatan Kintap	Banjir area kebun warga dampak dari kegiatan tambang batu baraPT. Arumin Indonesia Site Asam- Asam	18/08/2025	➢ Pada tanggal 17 September 2025 dilakukan rapat audiensi di Aula DPRKPLH terkait keluhan banjir area kebun warga di Desa Kintapura RT. 02 Kecamatan Kintap. Rapat dihadiri oleh perwakilan Polres Tanah Laut, Polsek Kintap, Danposranmil Kintap, Camat Kintap , perwakilan PT. Arutmin Indonesia Site Asam-Asam dan perwakilan warga terdampak. Hasil kesepakatan audiensi sbb : 1) Solusi yang harus segera dilakukan untuk mengatasi permasalahan banjir di RT. 2 Desa Kintapura, dengan melakukan normalisasi aliran air dengan membuat jalur air sehingga saat hujan tidak terjadi lagi genangan. 2) Membuka titik titik penyumbatan dan hambatan untuk melancarkan aliran air. 3) Upaya normalisasi aliran air dibantu pihak PT. Arutmin Indonesia Site Asam-Asam bersama-sama dengan masyarakat. 4) Pada hari Kamis tanggal 18 September 2025 PT. Arutmin Indonesia Site Asam-Asam bersama-sama masyarakat akan melakukan eksekusi awal dilapangan ➢ Pada tanggal 18 September 2025 pihak perusahaan bersama-sama dengan warga melakukan pembuatan saluran untuk mengalirkan air dari area kebun warga agar banjir tidak terjadi lagi pada saat turun hujan. Namun ada kendala dalam penyelesaian pembuatan saluran. Karena area tanahnya lembek sehingga tidak memungkinkan alat berat untuk beroperasi. Namun sudah ada progress penurunan debit air pada area kebun warga yang biasa mengalami banjir.

No	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Tgl pengaduan	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				➢ Pada tanggal 9 Oktober 2025 tim DPRKPLH melakukan monitoring progress ke lokasi didampingi warga, dengan hasil sbb: 1) Lokasi rumah Bapak Akhmad Rusyadi berada di Desa Kintapura RT. 02 (Koordinat X 0300247, Y 9571751, Elevasi 10 m) ➢ Pada saat peninjauan lokasi, kondisi tanah kering/tidak terjadi banjir. ➢ Pada lokasi terdapat 2 buah rumah, 1 buah pondok dan 1 buah bangunan tempat makan lesehan yang kondisinya sudah rusak. Bangunan-bangunan tersebut terbuat dari kayu. Menurut informasi Bapak A. Rusyadi, rumah tersebut biasanya dipergunakan untuk tamu beristirahat, ketika ada acara kunjungan. ➢ Pada dinding rumah bagian luar terlihat bekas ketinggian air ketika terjadi banjir di area tersebut. ➢ Menurut informasi beliau, area tersebut akan tergenang air/banjir pada saat terjadi hujan karena aliran air terganggu akibat adanya OB tambang. ➢ 2) Lokasi pembuatan saluran/jalur air (Koordinat X 0300083, Y 9571898, Elevasi 13 m) ➢ Pada saat peninjauan lokasi, telah dilakukan pembuatan paritan baru oleh PT. Arutmin Indonesia Site Asam-Asam ditembuskan ke paritan yang sudah ada, yang berada di sisi OB tambang dengan arah alirannya hingga ke sungai kintap sejauh ± 3 Km. ➢ Berdasarkan peta citra jarak lokasi rumah Bapak Akhmad Rusyadi ke paritan ± 220 meter. ➢ Berdasarkan hasil pengukuran elevasi menunjukkan bahwa area paritan cenderung relatif sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan area rumah Bapak Rusyadi, sedangkan paritan yang sudah ada sebelumnya kondisinya mengalami pendangkalan akibat sedimentasi, hal ini akan mempengaruhi lancarnya aliran air menuju paritan. ➢ Menurut informasi Bapak Akhmad Rusyadi kegiatan pembuatan paritan dihentikan sementara untuk melihat efektifitas paritan yang sudah dibuat terhadap penurunan debit air pada area yang tergenang. Setelah diamati, menurut beliau memang ada penurunan debit air yang tergenang pada saat terjadi hujan Saran tindak lanjut : 1. Agar upaya normalisasi aliran air dilanjutkan sesuai dengan kesepakatan rapat audiensi.

No	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Tgl pengaduan	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				2. Untuk melancarkan aliran air, agar dilakukan upaya normalisasi paritan yang mengalami pendangkalan.
9	Warga Desa Panggung Kecamatan Pelaihari	Area Nilai konservasi Tinggi (NKT) milik PTPN XIII yang berada di lahan milik warga	23/09/2025	➢ Salah satu warga desa Panggung mengadukan bahwa pada area lahan kebun miliknya telah di pasangi papan nama area NKT PTPN, lahan tsb merupakan lahan milik orang tuanya yang dikuasai selama bertahun- tahun. ➢ Disarankan untuk melakukan komunikasi dengan pihak perusahaan terkait hal tsb ➢ Disarankan untuk melakukan pengecekan legalitas tanah ke BPN
10	Warga Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari	Keluhan dampak bau menyengat dan suara bising Kegiatan peternakan unggas (ayam, bebek, angsa)	19/11/2025	- Pada tanggal 24 Nopember 2025 dilakukan koordinasi ke kelurahan sarang halang terkait pengaduan warga Warga Kelurahan Sarang Halang untuk bisa ditindaklanjuti di tingkat RT. - Ketua RT berupaya untuk melakukan komunikasi dengan pemilik usaha dan warga yang melaporkan, namun belum bisa komunikasi dengan pelapor. - Pada tanggal 17 Desember 2025 Lurah Sarang Halang berserta tim, tim DPRKPLH dan Ketua RT setempat melakukan peninjauan ke lokasi. Dengan fakta lapangan sbb: 1. Pada saat peninjauan ke lokasi rumah pelapor, bagian belakang yang bersebelahan dengan area kandang ternak unggas, ada tercium bau dari kotoran ternak. 2. Pada saat peninjauan ke lokasi rumah pemilik kandang ternak unggas, diperoleh hasil pengamatan sbb : ➢ Area kandang untuk budidaya unggas berada di area samping rumah pemilik. Pada sisi disebelah rumah pemilik dengan area budidaya dibatasi oleh kandang kayu dan jala/paranet, sedangkan area sisi yang berbatasan dengan rumah tetangga di batasi oleh tembok beton. ➢ Terdapat beberapa buah bangunan kandang ayam terbuat dari kayu yang menempel pada tembok yang berada pada 2 sisi area, salah satunya adalah tembok milik Ibu Almiatun. ➢ Terdapat kolam kecil tampungan air untuk minum dan mandi bebek

No	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Tgl pengaduan	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				➢ Pada area sekitar kandang terlihat ternak unggas berupa ayam, bebek dan angsa dengan total populasi > 30 ekor. ➢ Tidak ada pengelolaan terhadap kotoran unggas, kotoran hanya dibiarkan terurai alami di sekitar area kandang. ➢ Menurut informasi pemilik, kegiatan budidaya unggas tersebut hanya untuk menyalurkan hobby bukan untuk usaha perdagangan. 3. Akan dilakukan upaya mediasi antar kedua belah pihak untuk mencari solusi bersama
11	Pengaduan Warga Kintap Kecil Kecamatan Kintap via medsos	Keluhan air sungai Kintap keruh dan berlumpur, dugaan pencemaran OB tambang batubara	17/12/2025	- Pada tanggal 18 Desember 2025 dilakukan verifikasi lapangan bersama- sama dengan TIM DPRKPLH Tala, Tim Labling, Camat Kintap dan perwakilan PT. AI dan PT. DH. - Dilakukan peninjauan ke lokasi sungai kintap, dilakukan pengukuran parameter insitu dan pengambilan sampel air sungai untuk dilakukan pengujian di Labling DPRKPLH - Dilakukan penelusuran aliran sungai hingga kebagian hulu untuk mengetahui sumber lumpur yang menyebabkan air sungai kintap tercemar - Dialiran sungai bagian hulu pada area tambang PT. DH dilakukan pengukuran parameter insitu dan pengambilan sampel air untuk uji di Labling - Hasil penelusuran ditemukan fakta bahwa sumber pencemaran berupa lumpur yang dialirkan ke aliran sungai yang alirannya hingga ke sungai kintap berasal dari area kegiatan tambang PT. DH. Ditemukan adanya kegiatan pemompaan air void tambang dimasukkan ke aliran sungai sebanyak 2 titik

Sumber : DPRKPLH, 2025

c. Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau

1. Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana RTH

Di Kabupaten Tanah Laut ini memiliki 2 (dua) Ruang Terbuka Hijau yaitu Ruang terbuka hijau Kijang Mas permai dengan luasan sekitar 10,124 Ha dan Ruang Terbuka Hijau Hasan Basri dengan luasan sekitar 2,027 Ha.

a) Ruang Terbuka Hijau Kijang Mas Permai

Dengan Luasan area 10,124 Ha RTH. Kijang Mas Permai memiliki banyak beragam flora, sarana prasarana pendukung aktivitas seperti jogging track ,toilet,pendopo, tempat

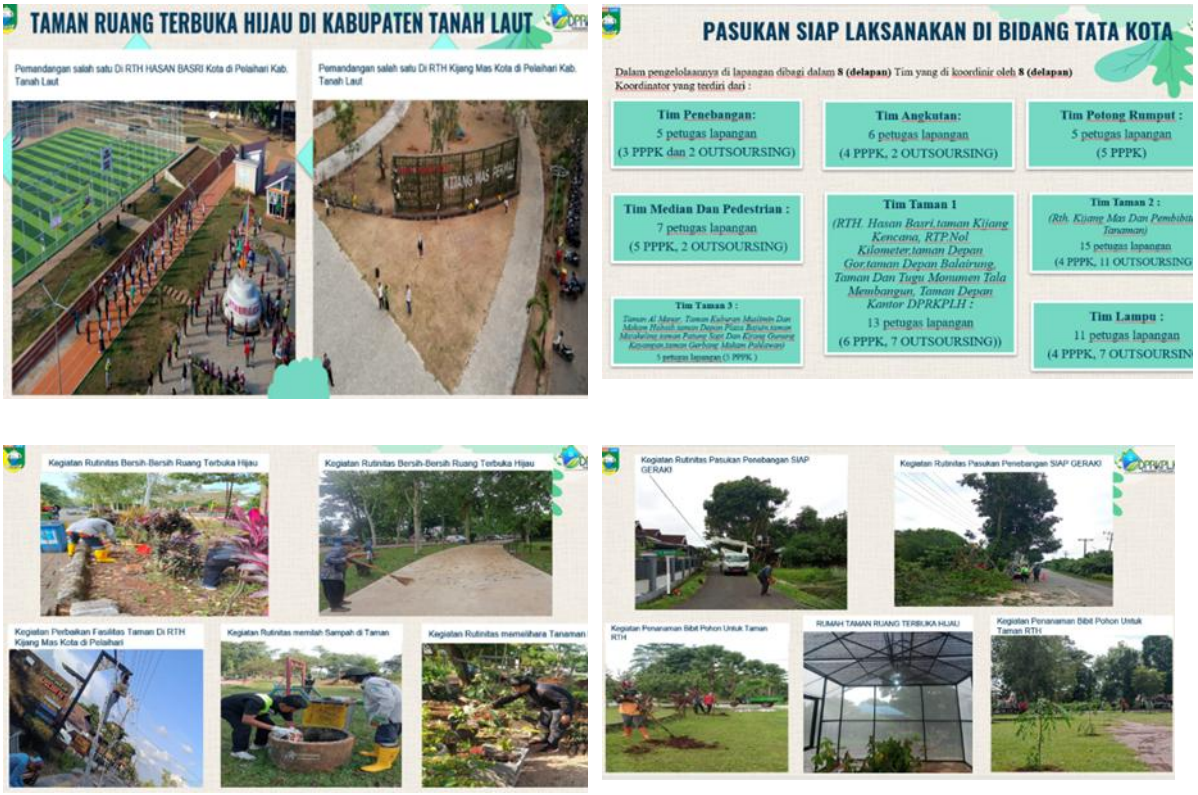
sampah,tempat santai, pos jaga, permainan anak, area fitness autdoor, tempat aktivitas olahraga maupun green house dan pembibitan tanaman, serta composting. Untuk pengelolaan sampahnya, beberapa sudah ada pemilahan, untuk sampah organic seperti daun kering hasil sapuan petugas,akan di tempatkan ke dalam area bak bak composting yang tersebar di beberapa titik untuk di lakukan proses pengomposan. Sedang sampah an-organik, akan di kumpulkan dan diangkut ke TPA. Bakunci Disamping pemilahan dan pengomposan sampah , di RTH. Kijang Mas juga baru selesai dibangun tempat pengomposan,tempat pembibitan dan green house dalam satu area tempat. Kedepannya diharapkan RTH.Kijang Mas dapat mengolah dan mengcover akan kebutuhan pupuk organic nya sendiri.

Dalam beberapa bulan terakhir, dilakukan penanaman pohon yang bibitnya berasal dari perbanyakan tanaman (angsana) oleh petugas kami, pembelian tanaman, bibit tanaman buah dari pihak ketiga seta pemberian bibit tanaman pelindung dari KPH pelaihari . dalam 3 bulan terakhir ini dilakukan penanaman pohon sebanyak 300 (tiga ratus) lebih di area yang masih kosong (tanaman angsana, trembesi, mahoni, tanjung, mangga, pinang, sirsak, tabebuya dan tanaman buah lainnya).

b) Ruang Terbuka Hijau Bridjen H. Hasan Basri

RTH. Bridjen H. Hasan Basri memiliki luas area 2.027 Ha ditanami beragam flora, sarana prasarana pendukung aktivitas seperti jogging track ,toilet, tempat sampah,tempat santai, pos jaga, mini soccer, skate board, lapangan basket, lapangan voli, area fitness outdoor, musholla dan beberapa titik tempat composting. Seperti halnya RTH. Kijang Mas Permai, RTH. Bridjen H. Hasan Basri dilakukan pemilahan sampah organic dan an-organik. untuk sampah organic seperti daun kering hasil sapuan petugas,akan di tempatkan ke dalam area bak bak composting yang tersebar di beberapa titik untuk di lakukan

proses pengomposan. Sedang sampah an-organik, akan di kumpulkan dan diangkut ke TPA. Bakunci).



d. Peningkatan Pemanfaatan Perencanaan dan Kebijakan Lingkungan Hidup

1. Penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup ini merupakan dasar dalam menentukan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut setiap tahunnya yang merupakan salah satu target yang harus dicapai dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut maupun secara nasional. Hal ini karena Dokumen Kajian Lingkungan Hidup ini merupakan dokumen wajib dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di kabupaten/kota sehingga sangat di upayakan untuk dipenuhi. Analisa program atau kegiatan yang dapat mendukung dan mempertajam analisa Dokumen Kajian Lingkungan Hidup ini adalah adanya program dan kegiatan pada SKPD teknis sesuai dengan bidang masing-masing untuk pemenuhan data dari Dokumen Kajian Lingkungan Hidup. Kajian terbaru adalah mengenai

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG). Didalam dokumen tersebut mengacu kepada KLHK, bahwa dikabupaten tanah laut dapat membuat dokumen terkait perlindungan hingga pengelolaan ekosistem gambut. Namun, dari hasil kajian tersebut, pada Kabupaten Tanah Laut tidak menemukan kriteria tanah gambut sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Foto Dokumen IKPLHD Tahun 2024

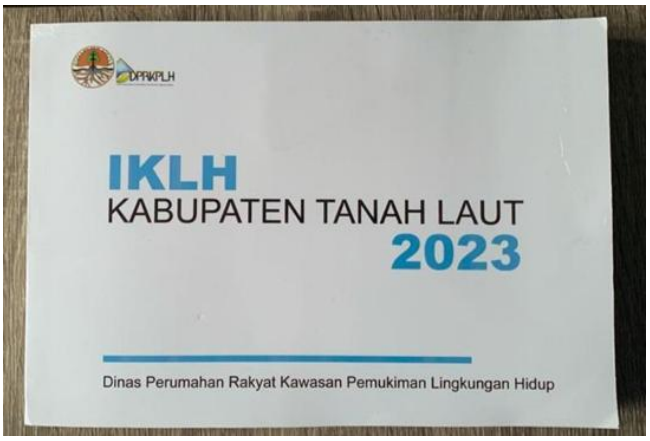


Foto Dokumen IKLH Tahun 2023

2. Reviu dokumen perencanaan lingkungan hidup

   Jenis Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang utama :

   - KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)
   - RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
   - Dokumen lingkungan terintegrasi dalam RTRW, RPJMD, dan kebijakan sectoral

   Yang terbagi lagi menjadi Kondisi dan isu lingkungan,Analisis daya dukung & daya tampung, Risiko lingkungan & bencana, Alternatif perencanaan, Rekomendasi kebijakan Integrasi & tindak lanjut.

e. Peningkatan Sekolah Sadar Lingkungan Hidup

1. Pelaksanaan sosialisasi sekolah sadar lingkungan hidup

   Pengertian Adiwiyata atau biasa disebut Green School adalah satu diantara berbagai program kementrian lingkungan hidup yang bertujuan untuk mendorong terciptanya pengetahuan akan kesadaran warga sekolah dalam melestarikan lingkungan hidup. Menurut

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 05 Tahun 2025 yaitu tentang Penyelenggaraan Program Adiwiyata menyatakan bahwa sekolah adiwiyata yaitu suatu program untuk dapat mewujudkan sekolah yang peduli serta berbudaya lingkungan. Dalam adiwiyata sendiri memiliki makna sebagai satu tempat yang baik dan ideal yang diperoleh sagala ilmu pengetahuan dan berbagai norma dan etika. Hal ini menjadi dasar manusia untuk menuju terciptanya kesejahteraan hidup dalam menuju pada cita pembangunan berkelanjutan.



Sosialisasi Bersama Guru di SMA 1 JORONG



Sosialisasi Bersama Guru&Murid di SDN 2 Bumi Jaya

2. Pembinaan sekolah peduli dan berbudidaya lingkungan hidup

Dalam upaya pembinaan sekolah peduli lingkungan dan demi memperoleh penghargaan adiwiyata , Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melaksanakan dan memandu kegiatan pembinaan sekolah peduli lingkungan yang ada di Kabupaten Tanah Laut.



Pembinaan Sekolah Peduli Lingkungan Bersama para Guru



Pembinaan Sekolah Peduli Lingkungan Bersama para Guru dan Instansi lainnya

3. Penyediaan sarana prasarana kebersihan di sekolah

Tentang Penyediaan sarana prasarana kebersihan di sekolah yang ada di Kabupaten Tanah Laut masih terbilang minim dikarenakan anggaran yang terbatas serta bantuan atau koordinasi dengan dinas setempat kadang kurang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Tanah Laut, sehingga dengan adanya Sosialisasi/Pembinaan Sekolah Peduli Lingkungan ini diharapkan bisa membantu Penyediaan sarana prasarana kebersihan di sekolah yang ada di Kabupaten Tanah Laut, bisa berupa: Sapu Lidi/Lantai, Bak Sampah 3 Warna, Mesin Pemotong Rumput,Sabun Cuci Tangan,Bibit Tanaman,Motor 3 Roda, Dsb.



Serah Terima Bak Sampah 3 Warna Untuk Sekolah Adiwiyata



Penanaman Bibit Pohon Bersama di Sekolah

f. Peningkatan Pengelolaan Sampah

1. Peningkatan kualitas sarana prasarana pengelola sampah

   a) Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana persampahan serta Melakukan pemenuhan sarpras kebersihan dengan indikator Jumlah SarPras kebersihan yang dipenuhi sesuai standar dengan target 9 Buah Pembelian Kontainer Penampung Sampah, 1 Set Belanja Timbangan TPST Kec. Kurau, 1 Unit Pembelian Alat Berat Excavator, 5 Unit Pembelian Kendaraan Bermotor Roda 6, 14 Unit Pembelian Kendaraan Bermotor Roda 3, 2 Buah Pembelian Mesin Gibrik Pemilah Pembubur Sampah , Pembuatan TPS3R, Pembuatan Parkir Alat Berat dan Pembuatan Landasan Tempat Sampah di Karang Taruna dengan capaian kinerja 100% juga Melakukan pemeliharaan sarpras kebersihan dengan indikator Jumlah Sarpras yang dipelihara dan dimanfaatkan dengan target 11 Unit Rehabilitasi TPS, 5 Unit Pemeliharaan Bak Sampah Kontainer, 1 Tahun Pemeliharaan Kolam Lindi , 1 Tahun Pemeliharaan TPA dan 1 Tahun Pemeliharaan Penerangan Lampu TPA .

Jumlah Sarana dan Prasarana Penanggulangan Sampah Di Kabupaten Tanah Laut

Sarana dan Prasarana	Sampai dgn th 2025
Truk Sampah	9
Truk Excavator	1
Truk Amrol	15
Loader	1
Dozer	1
Bak Kontainer	50
Truk Tinja	1
Tangki Air	1
Truk Dump Pick Up	1
Bak Sampah/TPS	35
TPA	1
Tosa Hercules	18
Traktor Mini	-
Tenaga Lapangan	131

No.	Target	Realisai	Belum Terealisasi
1	1 unit TPST Kurau	-	1 unit
2	2 unit Halte Sampah	2 unit	-
3	12 unit Tambahan kontainer sampah untuk kecamatan	8 unit	4 unit untuk 4 Kecamatan

2. Pengangkutan sampah yang masuk ke TPA

   Persentase sarana prasarana kebersihan sesuai standar dan Persentase SDM kebersihan lingkungan yang berkualitas dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Persampahan dengan kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan,

Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota .





3. Peningkatan pengelolaan sampah TPS3R

   Untuk mendukung terlaksananya Sasaran RPJMD Nomor 2 (Program Pengelolaan Persampahan) dengan indikator Kinerja Pelayanan Pengelolaan Limbah dan Sampah, dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :

   - Melakukan pengolahan sampah dan limbah rumah tangga yang dikelola sebanyak 21.986,02 Ton ;
   - Melakukan pengolahan sampah di TPA sebanyak 15.568,53 Ton ;
   - Melakukan sosialisasi pengurangan penggunaan kantong plastik kepada pelaku usaha pada 11 Kecamatan ;
   - Melaksanakan data pengolah sampah di masyarakat pada 11 Kecamatan ;
   - Melakukan aksi kebersihan lingkungan kota pada 11 kecamatan ;



Faktor Pendorong/Keberhasilan

- Peningkatan Kualitas SDM dan Sarana Prasarana: Fokus pada penyediaan SDM kebersihan lingkungan yang berkualitas serta pemenuhan sarana prasarana kebersihan yang sesuai standar merupakan indikator utama keberhasilan.
- Komitmen Pimpinan dan Manajemen: Adanya komitmen kuat dari pimpinan, termasuk evaluasi rutin terhadap capaian kinerja, supervisi, dan pemberian penghargaan/sanksi untuk mendorong tanggung jawab aparatur.

Faktor Penghambat/Kegagalan

- Rendahnya Kesadaran dan Budaya Buang Sampah Masyarakat: Masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan di lahan kosong atau pinggir jalan, meskipun telah dipasang tanda larangan. Perilaku membuang sampah sembarangan ini menyulitkan petugas karena lokasi pembuangan liar sering bermunculan kembali setelah dibersihkan.
- Keterbatasan Sarana dan Prasarana Kebersihan: Kurangnya jumlah armada pengangkut sampah (truk/kontainer) yang sesuai standar untuk menjangkau seluruh area, serta keterbatasan fasilitas daur ulang/pengelolaan sampah

Alternatif Solusi/Rencana Aksi yang Akan Dilakukan

- Peningkatan Sarana dan Prasarana: Menstandardisasi sarana prasarana kebersihan, termasuk optimalisasi armada pengangkutan sampah dan alat berat di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- Optimalisasi SDM: Peningkatan kualitas SDM kebersihan melalui pelatihan teknis, peningkatan disiplin, dan penyediaan APD (Alat Pelindung Diri) yang memadai.
- Penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle): Mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA dengan memperkuat pengelolaan sampah di tingkat hulu (TPS3R).

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 66 ASN pada DPRKPLH dan di dukung oleh 7 Program dengan Pagu Rp. 31.528.506.149,73 dan terealisasi Rp. 18.726.480.598,00 atau sebesar 59,40%.

Tabel 3.9.12
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	167.250.264,67	**136.255.886,00**
2	Program Penangan/Pengaduan Lingkungan	76.572.276,11	**54.457.000,00**
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	5.583.741.378,15	**4.267.226.770,00**
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	4.838.321.070,48	**4.101.225.706,00**
5	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	217.047.044,02	**207.864.680,00**
6	Program Pengelolaan Persampahan	20.589.351.545,46	**9.905.110.956,00**
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	56.222.570,84	**54.339.600,00**
Jumlah		**31.528.506.149,73**	**18.726.480.598,00**

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Efisiensi kinerja diukur menggunakan rumus berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi
PAKi : Pagu anggaran keluaran i
RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
CKi : Capaian keluaran i

$$\text{Efisiensi} = \frac{(31.528.506.149,73 \times 108,82\%) - 18.726.480.598,00}{(31.528.506.149,73 \times 108,82\%)} \times 100\%$$

Efisiensi = 45,42%

Tabel 3.9.13
Efisiensi Sasaran Strategis 9

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
108,82%	59,40%	45,42%

Efisiensi indikator “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup” mencapai 45,42% , hal ini dikarenakan realisasi keuangan secara keseluruhan hanya mencapai 59,40%, terutama pada Program Pengelolaan Persampahan dengan anggaran 20.589.351.545,46 hanya terealisasi 9.905.110.956,00, dikarenakan kegagalan pembangunan TPS3R pada tahun 2025.

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 10
Menurunnya Resiko Bencana

Menurunnya resiko bencana diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.10.1
Capaian Kinerja Terhadap Target 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			TAHUN 2025		
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Indeks Risiko Bencana	Nilai	156,33 (tinggi)	169,22 (tinggi)	145 (tinggi)	144	131,76	109,28 %
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2025								109,28 %

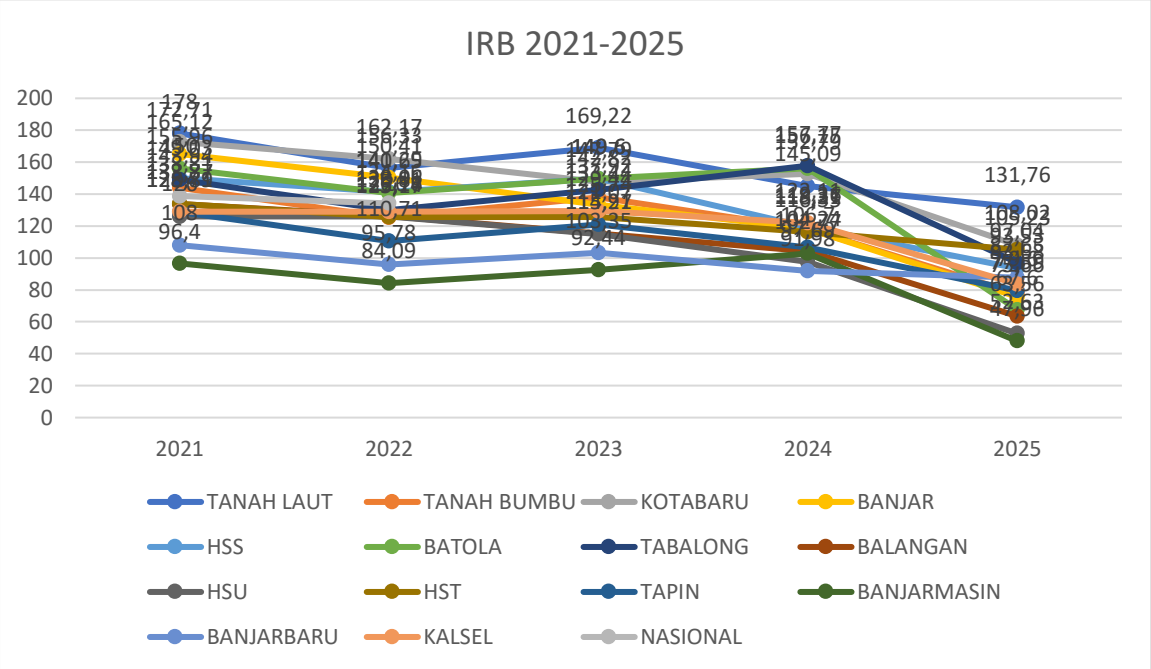
Tabel 3.10.2
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2025 THD TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Indeks Risiko Bencana	Nilai	144	131,76	109,28 %	125	105,40 %

Indeks Resiko Bencana (IRB) tahun 2025 adalah sebesar 131,76 (tinggi) mengalami peningkatan kinerja dengan penurunan sebesar 13,24 point dibandingkan tahun 2024 yaitu sebesar 145 (tinggi).

Grafik 3.10.1

Indeks Risiko Bencana Daerah Kab/Kota se Kalimantan Selatan



Sumber: IRBI Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Tabel 3.10.3

Indeks Risiko Bencana Daerah Kab/Kota se Kalimantan Selatan

Kab/Kota	Tahun			
	2022	2023	2024	2025
Banjarbaru	108	95,78	103,35	91,98
HSU	126	126	114,97	97,69
Banjarmasin	96,4	84,09	92,44	102,77
Balangan	133,77	126,16	115,21	104,24
Tapin	128,79	110,71	121,07	106,7
HST	133,87	125,74	125,74	116,35
Tanah Bumbu	143,94	125,17	137,92	118,27
Banjar	165,12	150,41	133,44	118,31
HSS	150	141,29	149,6	119,36
Kalsel	128,81	128,81	129,44	122,11
Tanah Laut	178	156,33	169,22	145,09
Kotabaru	172,71	162,17	147,79	152,79
Batola	155,96	140,65	149,6	156,15
Tabalong	149,03	130,06	142,82	157,77

IRB dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

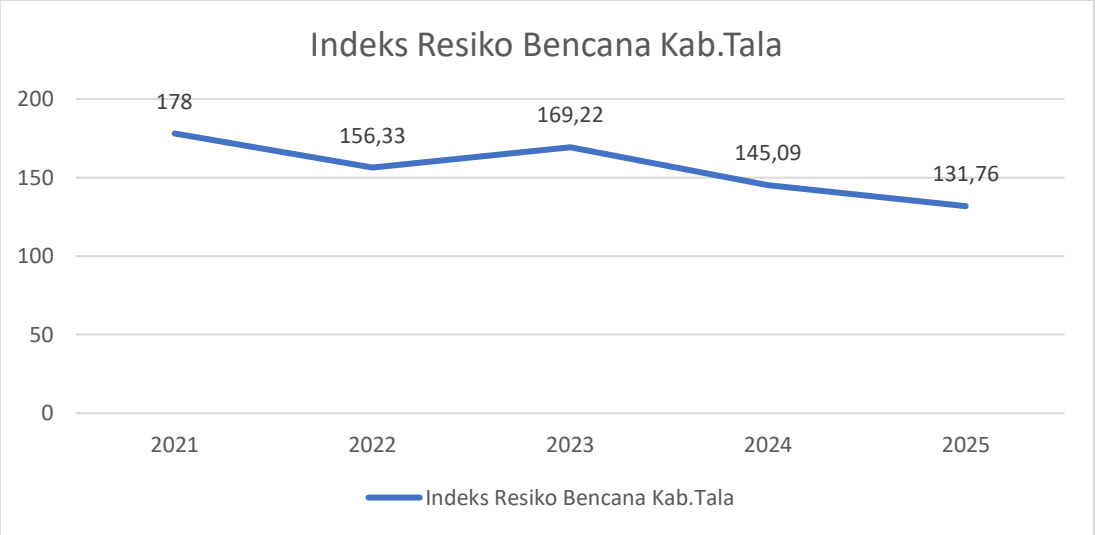
Risk = Hazard (bahaya) x Vulnerability (kerentanan)

Capacity (kapasitas)

IRB Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 mengalami peningkatan kinerja dengan penurunan sebesar 13,24 point dibandingkan tahun 2024 yaitu sebesar 145 (tinggi). Komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kebijakan dan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, logisitik, kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat dan kapasitas pemulihan.

Grafik 3.10.2

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tanah Laut 2021-2025



Sumber: IRBI Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2025, Kabupaten Tanah Laut merupakan nilai IRB tertinggi dari Kabupaten/Kota lain se Kalimantan Selatan.

Tabel 3.10.4

Nilai IRB Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan

No	Kabupaten/Kota	IRB 2025
1	Tanah Laut	131,76
2	Kotabaru	108,02
3	Banjar	75,66
4	Barito Kuala	67,60
5	Tapin	79,60

No	Kabupaten/Kota	IRB 2025
6	Hulu Sungai Selatan	93,53
7	Hulu Sungai Tengah	105,23
8	Hulu Sungai Utara	52,63
9	Tabalong	97,04
10	Tanah Bumbu	77,59
11	Balangan	63,56
12	Kota Banjarmasin	47,96
13	Kota Banjarbaru	87,65

Nilai IRB Kab. Tanah Laut di dapat berdasarkan pembobotan antara bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity). Tingkat bahaya dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi, dan kekuatan dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunung api, dan ancaman lainnya, komponen bahaya mengacu pada baseline IRBI 2013 yang diolah dari KRB skala provinsi tahun 2011. Komponen bahaya merupakan komponen yang sangat kecil kemungkinan untuk bisa diturunkan. Hal ini karena tren dari dampak bahaya yang cenderung meningkat tiap tahunnya.

Komponen kerentanan adalah komponen yang dihitung berdasarkan parameter kondisi fisik, sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan yang rentan terpapar bencana. Komponen kerentanan juga cenderung mengalami peningkatan dengan adanya penambahan penduduk, migrasi ke kawasan urban, peningkatan pembangunan, degradasi lingkungan dan perubahan iklim. Fenomena tersebut menyebabkan sulitnya menurunkan indeks risiko bencana.

Oleh karena itu, penurunan indeks risiko bencana dapat dicapai melalui strategi peningkatan komponen kapasitas (coping capacity) yang diukur berdasarkan kapasitas penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota. Komponen kapasitas dihitung berdasarkan kaapasitas pemerintah daerah berdasarkan perangkat Penilaian Indeks Ketahan Daerah yang terdiri dari 7 prioritas dan 71 Indikator.

Komponen kapasitas dihitung berdasarkan kaapasitas pemerintah daerah berdasarkan perangkat Penilaian Indeks Ketahan Daerah yang terdiri dari 7 prioritas dan 71 Indikator. Berdasarkan keterisian terhadap 71 indikator Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah mengisi sebanyak 46 indikator.

Pemenuhan 46 Indikator tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, antara lain :

a. Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana.

   Pelaksanaan kegaiatan pelayanan informasi rawan bencana pada tahun 2025 melalui sosialisasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) pada sekolah-sekolah yang berada di daerah rawan bencana. Sosialisasi SPAB bertujuan menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan berkelanjutan dengan meningkatkan kesiapsiagaan warga sekolah dalam menghadapi bencana, melindungi fasilitas pendidikan, serta memastikan keberlangsungan proses belajar-mengajar meskipun terjadi bencana, melalui implementasi tiga pilar: sarana prasarana aman, manajemen risiko bencana, dan pendidikan kebencanaan yang komprehensif.

   Sosialisasi SPAB dilaksanakan di 9 titik sekolah antara lain Pesantren An-Najah Cindai Alus Putra Desa Bingkulu Kecamatan Tambang Ulang, Pesantren Rubath Riyadhus Sholihin Kecamatan Tambang Ulang, UPTD SDN 1 Batakan Kecamatan Panyipatan, UPTD SDN 1 Kintap Kecamatan Kintap, UPTD SDN Kurau Kecamatan Kurau, UPTD SDN Padang Kecamatan Bati-bati, UPTD SDN Panjaratan Kecamatan Pelaihari, UPTD SMPN 2 Bumi Makmur Kecamatan Bumi Makmur, UPTD SDN Gunung Makmur Kecamatan Takisung, dengan jumlah peserta sebanyak 433 orang yang terdiri dari siswa sekolah, tenaga pendidik, perwakilan orang tua siswa, dan masyarakat sekitar lingkungan sekolah.



b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana adalah serangkaian upaya pra-bencana untuk mengurangi risiko dan mengantisipasi bencana melalui edukasi, sosialisasi, pelatihan (seperti simulasi), pengembangan sistem peringatan dini, pemetaan risiko, pembinaan masyarakat siaga bencana (DESTANA), serta koordinasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan aparatur dalam menghadapi ancaman bencana secara terpadu dan efektif sebelum bencana terjadi.

- Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana diawali dengan analisis risiko bencana yang mencakup identifikasi ancaman, tingkat kerentanan, dan kapasitas daerah. Berdasarkan hasil analisis risiko, ditetapkan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, Sinkronisasi dengan RPJMD dan dokumen sektoral menjadi kunci agar RPB dapat diimplementasikan secara efektif. Rencana aksi disusun untuk setiap tahapan bencana (pra, saat, dan pascabencana), termasuk penetapan program, kegiatan, dan indikator kinerja. RPB menetapkan peran dan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan, termasuk mekanisme koordinasi lintas sektor. Penyusunan RPB melibatkan perangkat daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat melalui forum konsultasi publik yang diselenggarakan secara daring.

- Pelaksanaan penyusunan Kajian Rencana Kontinjensi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan dilaksanakan sebagai upaya kesiapsiagaan menghadapi potensi kejadian darurat kebakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan dampak luas terhadap lingkungan, kesehatan, dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Penyusunan rencana kontinjensi ini bertujuan untuk memastikan kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi skenario terburuk bencana karhutla.
- Penyusunan kajian diawali dengan identifikasi dan analisis risiko kebakaran hutan dan lahan, meliputi pemetaan wilayah rawan, kondisi iklim dan cuaca, karakteristik lahan, serta riwayat kejadian karhutla. Analisis tersebut menjadi dasar dalam penentuan skenario kejadian darurat dan kebutuhan penanganan. Selanjutnya dilakukan penyusunan skenario kontinjensi, yang menggambarkan kemungkinan perkembangan kejadian kebakaran hutan dan lahan, dampak yang ditimbulkan, serta kebutuhan sumber daya pada kondisi darurat. Pada tahap ini ditetapkan asumsi kejadian, wilayah terdampak, jumlah penduduk berisiko, serta kebutuhan personel, peralatan, dan logistik. Dalam rangka mendukung efektivitas penanganan, kajian rencana kontinjensi juga memuat pembagian peran dan tanggung jawab lintas sektor, termasuk BPBD, perangkat daerah terkait, TNI/Polri, instansi vertikal, dunia usaha, serta unsur masyarakat. Mekanisme komando, koordinasi, dan komunikasi darurat dirumuskan secara jelas untuk menghindari tumpang tindih kewenangan saat tanggap darurat. Penyusunan kajian dilaksanakan melalui forum koordinasi dan konsultasi dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait guna memastikan keselarasan, keterpaduan, dan kesiapan pelaksanaan rencana. Masukan dari hasil koordinasi digunakan untuk penyempurnaan dokumen rencana kontinjensi. Sebagai tahap akhir, dokumen kajian rencana kontinjensi kebakaran hutan dan lahan difinalisasi dan ditetapkan sebagai acuan kesiapsiagaan dan penanganan darurat. Dokumen ini menjadi pedoman operasional dalam menghadapi bencana karhutla dan dapat ditindaklanjuti melalui sosialisasi, pelatihan, serta simulasi penanganan kebakaran hutan dan lahan.

- Pelaksanaan kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan dengan dibagi 2 sesi. Pada sesi pertama dengan tema Penyusunan Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana dan Pembentukan Forum Pengurangan Risiko. Pelaksanaa pada tanggal 25 Februari 2025 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Takisung dan pada tanggal 26 Februari 2025 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Tambang Ulang. Pada sesi kedua dengan tema Pembentukan Relawan PB, Pengkajian Risiko Bencana, Manajemen Risiko, Pengurangan Kerentanan. Pelaksanaa pada tanggal 22 April 2025 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Takisung dan pada tanggal 29 April 2025 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Tambang Ulang.
- Melaksanakan Apel Siap Siaga Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan sekaligus simulasi penangan bersama TNI, POLRI, TRC BPBD, Satpolpp dan Damkar, Manggala Akni, Rescuer Perusahaan Swasta, Relawan yang ada di seluruh Kab. Tanah Laut pada tanggal 13 Agustus 2025 dengan jumlah peserta sebanyak 447 orang.
- Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana (KATANA) dilaksanakan 2 sesi, sesi pertama denga tema Pengenalan Bencana yang Sering Terjadi di Rumah dan sesu kedua dengan tema Latihan Penyelamatan dan Penanganan Bencana Kebakaran Rumah. Katana dilaksanakan di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Kurau pada tanggal 8-9 Juli 2025, Kecamatan Takisung pada tanggal 10-11 Juli 2025, Kecamatan Jorong pada tanggal 16-17 Juli 2025 dengan peserta anggota PKK Kecamatan/Desa, ibu rumahtangga yang padat penduduk dengan total peserta sebanyak 48 orang.
- Pelatihan Mitigasi Bencana dalam rangka membangun sisitem peringatan dini bencana berbasis masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini pada 2 tempat yaitu kecamatan Jorong pada tanggal 24-25 November 2025 dan Kecamatan Tambang Ulang pada tanggal 26-27 November 2025 dengan total peserta sebanyak 59 orang.

c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Pada Tahun 2025 telah terjadi sebanyak 88 kejadian bencana berupa banjir, banjir bandang, cuaca extream, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan dan abrasi. Adapun rekap kejadian bencana sebagai berikut :

Jenis Kejadian	Kecamatan											
	Bajuin	Bati-Bati	Batu Ampar	Bumi Makmur	Jorong	Kintap	Kurau	Panyipatan	Pelaihari	Takisung	Tambang Ulang	Grand Total
Banjir	1	2	-	1	-	1	1	2	4	1	1	14
Cuaca Ekstrem	2	-	1	2	1	1	3	-	9	1	3	23
Kebakaran Gedung dan Pemukiman	-	5	-	-	1	5	1	-	7	4	-	23
Pencarian Dan Pertolongan	-	-	-	-	-	1	-	1	4	-	-	6
Kebakaran Hutan dan Lahan	1	8	-	1	1	3	-	3	1	1	1	20
Gelombang Pasang	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
Grand Total	**4**	**15**	**1**	**4**	**3**	**12**	**5**	**6**	**25**	**8**	**5**	**88**

Pemerintah Kab. Tanah Laut menetapkan 2 status siaga bencana selama tahun 2025 yaitu Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi dan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. Penetapan status siaga bencana hidrometeorologi basah berdasarkan kaji cepat di wilayah kecamatan Kurau, Bumi Makmur, Bati-Bati, Takisung, Panyipatan dan Tambang Ulang berdasarkan kejadian yang terjadi di akhir bulan desember 2024 dan status siaga darurat ditetapkan sampaidengan bulan maret 2025.

Penanganan bencana banjir di Kecamatan Kurau, Bumi Makmur, Bati-Bati, dan Tambang Ulang dengan melakukan pencarian, pertolongan dan evakuasi terhadap korban terdampak. Melalkukan aktivasi pos lapangan penanganan banjir di kecamatan kurau dan kecamatan bati-bati. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut juga melakukan penyaluran logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana serta membuka dapur umum.

Penetapan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan ini diawali dengan pelaksanaan respon cepat oleh Tim Reaksi Cepat BPBD Kab. Tanah Laut yang outputnya adalah Kaji Cepat Bencana. Laporan

Kaji Cepat Bencana kemudian di sampaikan pada Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Kepala SKPD terkait untuk memutuskan apakah akan ditetapkan status darurat. Setelah penetapan statsus siaga darurat maka dilakukan aktivasi komando penanganan bencana dengan mengaktivkan pos komando dan pos lapangan. Pos Komando (Posko) adalah pusat komando untuk perencanaan, koordinasi, pengendalian, dan evaluasi operasi penanganan bencana, sementara Pos Lapangan (Poskolap) adalah unit pelaksana teknis di lokasi bencana yang bertugas langsung melaksanakan tugas di lapangan seperti pencarian, penyelamatan, evakuasi, pemberian bantuan dasar, dan perbaikan infrastruktur vital, di bawah komando Posko.

BPBD Kab. Tanah Laut membentuk Tim Reaksi Cepat berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat yang beranggotakan 55 orang. Tim Reaksi Cepat tersebut bertugas melakukan monitoring terhadap daerah rawan bencana, melakukan kaji cepat bencana, melakukan pencarian, pertolongan dan evakuasi terhadap korban bencana. BPBD Kab. Tanah Laut melakukan pelatihan secara berkala kepada Anggota Tim Reaksi Cepat seperti water rescue, vertikal rescue dan jungle rescue.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut juga menetapkan Kebutuhan Logistik (Standart Minimal Logistik) sesuai dengan petunjuk teknis BNPB terkait standart minimal kebutuhan logistik dan peralatan. Penetapan standart minimal logistik tersebut telah di bahas dan disepakati oleh SKPD pemangku logistik dan peralatan kebencanaan dan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Laut.

d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana (PSDPB) adalah upaya sistematis untuk membangun kapasitas nasional dan daerah dalam mengelola risiko bencana melalui kerangka hukum kuat (UU No. 24/2007) dan tahapan manajemen bencana (prabencana, tanggap darurat, pascabencana), yang mencakup integrasi pencegahan, mitigasi,

kesiapsiagaan, respons, serta rehabilitasi dan rekonstruksi, melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil, demi mewujudkan Indonesia yang lebih tangguh terhadap bencana. Dalam rangka membangun kapasitas dengan melibatkan pemangku berbagai kepentingan BPBD kab. Tanah Laut melaksanakan kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana. Dalam kegiatan tersebut menghadirkan narasumber yang bersetifikat keahlian manajemen bencana untuk menjelaskan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penangan pasca bencana terkhusus terkait rehabilitasi dan rekonstruksi. Peserta yang hadir sebanyak 47 orang berasal dari perwakilan perusahaan swasta yang melaksanakan usahanya di daerah Kabupaten Tanah Laut. Selain dari perusahaan swasta peserta juga berasal dari tokoh masyarakat yang berada di daerah rawan bencana untuk bisa bekerja sama dalam melaksanakan penanganan bencana sehingga tercipta percepatan dalam penanganan bencana.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut juga melaksanakan sosialisasi terkait pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi bencana yang mana diharapkan nantinya melalui forum komunikasi yang dibentuk antara pemerintah dan masyarakat dapat bertukar informasi sehingga manajemen data, manajemen responsip, peringatan dini dan monitoring sampai dengan pengambilan keputusan dapat berjalan secara efektif, efesien, dan tepat sasaran. Sistem informasi kebencanaan tersebut di olah dan dikelola oleh Pusat Pengendalian Data dan Operasi BPBD Kab. Tanah Laut yang di pimpin oleh seorang Manager yang berasal dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut membentuk Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca bencana yang bertugas melakukan perhitungan kerusakan, kerugian dan kebutuhan yang timbul diakibatkan bencana sepanjang tahun 2025. Sesuai dengan dokumen Rencana Rehabilitiasi Rekonstruksi Pasca Bencana Kab. Tanah Laut 2025 tercatat kerusakan yang ditimbulkan sebesar Rp. 92.958.291.673, kerusakan sebesar Rp. 14.131.080.000, dan kebutuhan sebesar Rp.

122.515.251.673. Perhitungan besaran tersebut Berdasarkan dari analisa kerusakan dan kerugian serta dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat pasca bencana itu terjadi meliputi lima sektor yaitu sektor permukiman, insfratuktur, ekonomi produktif, Sektor Sosial dan Lintas Sektor. Perkiraan Kebutuhan Pendanaan untuk dilakukan Rehabilitasi dan rekontruksi Pasca bencana Hidrometeorologi pada tahun 2025 di kabupaten Tanah Laut. Adapun rincian lima sektor tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sektor/ Sub Sektor	Nilai Kerusakan (Rp)	Nilai Kerugian (Rp)	Kerusakan dan Kerugian (Rp)	Nilai kebutuhan (Rp)
1	Perumahan	21.058.255.750	14.107.020.000	35.165.275.750	50.565.275.750
2	Infrastruktur	64.969.397.185	15.900.000	65.011.177.185	65.011.177.185
3	Ekonomi Produktif	6.930.638.738	-	6.930.638.738	6.930.638.738
4	Sosial	-	6.720.000	6.720.000	6.720.000
5	Lintas Sektor	-	1.440.000	1.440.000	1.440.000
	Grand Total	92.958.291.673	14.131.080.000	107.089.371.673	122.515.251.673

Faktor Penghambat/Kegagalan :

Pelaksanan penanggulangan bencana di KabupatenTanah Laut pada saat masa darurat sudah dapat tertangani sepenuhnya sehingga tidak terdapat korban jiwa pada saat bencana terjadi, akan tetapi secara penilaian tingkat kemampuan suatu daerah dalam menghadapi, mengelola, dan pulih dari berbagai potensi ancaman, baik di bidang sosial, ekonomi, lingkungan, maupun tata kelola pemerintahan masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Dalam praktiknya masih dijumpai berbagai hambatan yang menyebabkan pencapaian IKD belum mencapai target yang diharapkan, hambatan tersebut bersifat multidimensional dan saling berkaitan, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, belum optimalnya koordinasi lintas sektor, hingga lemahnya integrasi kebijakan pembangunan dengan aspek ketahanan daerah. Selain itu, dinamika perubahan sosial, tekanan ekonomi, serta kerentanan terhadap bencana dan gangguan keamanan juga turut memperbesar tantangan dalam meningkatkan nilai IKD.

Berikut adalah 25 indikator dari 71 indikator penilaian indeks ketahanan daerah yang tidak tidak terpenuhi antara lain :

1. Belum disusunnya peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan.
2. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut belum membentuk Forum PRB
3. Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan yang belum sesuai dengan standart minimal kebutuhan.
4. Laporan pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik tidak diselenggarakan secara periodik.
5. Belum tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat
6. Belum tersedianya informasi penataan ruang yang mudah diakses publik.
7. Belum tersedianya laporan restorasi sungai.
8. Belum adanya kegiatan penguatan lereng.
9. Belum adanya penerapan bangunan tahan gempabumi.
10. Belum tersedianya laporan revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota.
11. Belum tersedianya Rencana Kontijensi Gempabumi
12. Belum tersedianya Rencana Kontijensi Tsunami
13. Belum tersedianya Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami
14. Belum tersedianya Rencana Evakuasi Bencana Tsunami
15. Belum tersedianya Rencana kontijensi tanah longsor
16. Belum tersedianya Sistem peringatan dini bencana tanah longsor
17. Belum tersedianya Sistem peringatan dini bencana karlahut
18. Belum tersedianya Rencana kontijensi erupsi gunungapi
19. Belum tersedianya Sistem peringatan dini bencana erupsi gunungapi
20. Belum tersedianya Infrastruktur evakuasi bencana erupsi gunungapi
21. Belum tersedianya Rencana kontijensi kekeringan
22. Belum tersedianya Sistem peringatan dini bencana kekeringan
23. Belum tersedianya Rencana kontijensi banjir bandang
24. Belum tersedianya Sistem peringatan dini bencana banjir bandang
25. Belum tersedianya Penghentian status Tanggap Darurat, hal tersebut dikarenakan pada tahun 2025 belum ada penetapan status tanggap darurat.

Rencana Aksi yang akan dilakukan :

1. Memperkuat pemutakhiran dan integrasi data kebencanaan, termasuk penyusunan dan pembaruan peta risiko bencana serta kajian risiko secara berkala sebagai dasar perencanaan.
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya penanggulangan bencana, melalui peningkatan kompetensi aparatur, penyediaan sarana dan prasarana, serta penguatan dukungan anggaran.
3. Meningkatkan upaya mitigasi struktural dan non-struktural, seperti pembangunan infrastruktur pengendali bencana, penataan ruang berbasis risiko, serta penguatan regulasi dan SOP kebencanaan.
4. Meningkatkan kesiapsiagaan dan partisipasi masyarakat, melalui edukasi, sosialisasi, dan simulasi kebencanaan secara berkelanjutan, khususnya di wilayah rawan bencana.
5. Memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas SKPD dan pemangku kepentingan, termasuk dengan instansi vertikal dan masyarakat, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengurangan risiko bencana.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program pengurangan risiko bencana untuk memastikan efektivitas dan pencapaian penurunan Indeks Risiko Bencana.

Dalam mencapai sasaran Menurunnya Resiko Bencana di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 28 ASN pada BPBD dan di dukung oleh 1 Program dengan Pagu Rp. 1.332.447.057,67 dan terealisasi Rp. 895.045.691,00 atau sebesar 67,17%.

Tabel 3.10.5
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Penanggulangan Bencana	1.332.447.057,67	895.045.691,00
JUMLAH		1.332.447.057,67	895.045.691,00

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Efisiensi kinerja diukur menggunakan rumus berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

$$\text{Efisiensi} = \frac{(1.332.447.057,67 \times 109,28\%) - 895.045.691,00}{(1.332.447.057,67 \times 109,28\%)} \times 100\%$$

Efisiensi = 38,53%

Tabel 3.10.6
Efisiensi Sasaran Strategis 10

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
109,28 %	67,17%	38,53%

Efisiensi indikator “Indeks Risiko Bencana” mencapai 38,53% , hal ini dikarenakan realisasi keuangan secara keseluruhan hanya mencapai 67,17%.

TUJUAN IV

Meningkatkan Pemerintahan Yang Adaftif Dan Melayani.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan tujuan ke IV yaitu Meningkatkan Pemerintahan Yang Adaftif Dan Melayani.

Untuk mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan suatu indikator yaitu Indeks Reformasi Birokrasi.

Tabel 3.11.1
Target indikator tujuan Tahun 2025

No	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2025
1	Meningkatkan Pemerintahan Yang Adaftif Dan Melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	81

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan 2 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya Pemerintahan Yang Bersih Dan Akuntabel.
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital.

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 11
Meningkatnya Pemerintahan Yang Bersih Dan Akuntabel

Meningkatnya Pemerintahan Yang Bersih Dan Akuntabel dan diukur melalui 3 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.11.2
Capaian Kinerja Terhadap Target 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			TAHUN 2025		
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Nilai AKIP Kabupaten	Nilai	B (67,28)	B (67,52)	70,16 (BB)	72 (BB)	72,60	100,83%
2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	-	80,83	79,64	79,7	89,104	111,80%
3	SPI	Nilai	79,68	78,96	78,97	79	80,87	102,36%

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2025	%

Tabel 3.11.3
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2025 THD TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Nilai AKIP Kabupaten	Nilai	72 (BB)	72,60	100,83%	80	90,75%
2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	79,7	89,104	111,80%	81,5	109,33%
3	SPI	Nilai	79	80,87	102,36%	79,02	102,34%

a. Nilai AKIP Kabupaten

Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas instansi pemerintah terhadap kinerjanya, setiap tahun dilaksanakan evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian PANRB. Komponen yang dinilai terdiri dari 4 komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal. Nilai SAKIP menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil *(outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil *(result oriented program).*

Pada tahun 2025 SAKIP Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memperoleh predikat BB dengan nilai 72,60, Jika dilihat dari target tahun 2025, capaian kinerjanya sebesar 100,83% dengan Kategori capaian kinerja sangat baik serta bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2029 Nilai SAKIP Tahun 2025 masih kurang 7,4 point atau tercapai sebesar 90,75%. Nilai SAKIP Kabupaten Tanah Laut Pada Tahun 2025 ini mengalami kenaikan jika dibanding dengan capaian tahun sebelumnya. Nilai ini mengalami peningkatan 1,44 *point* jika dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu BB (70,16).

Dilihat dari penilaian per komponen, dari ke 4 (empat) komponen penilaian SAKIP sesuai dengan PermenpanRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dapat dilihat pada tabel berikut :

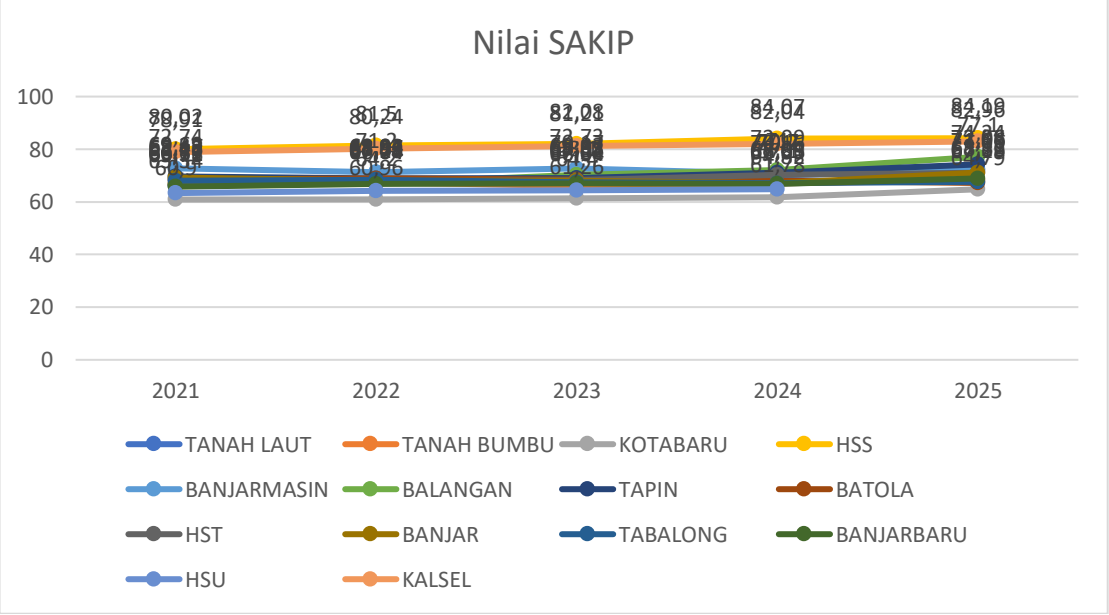
Tabel 3.11.4
Nilai Komponen SAKIP tahun 2022-2025

Komponen yang dinilai		Bobot	Nilai 2022	Nilai 2023	Nilai 2024	Nilai 2025
a.	Perencanaan Kinerja	30	22,59	22,59	23,46	**23,98**
b.	Pengukuran Kinerja	30	19,50	19,50	20,21	**20,71**
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,67	10,67	11,01	**11,50**
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,76	14,76	15,46	**15,87**
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	67,28	67,52	70,16	**70,06**
Tingkat akuntabilitas kinerja			**B**	**B**	**BB**	**BB**

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Jika dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Nilai SAKIP Kabupaten Tanah Laut masih jauh berada di bawah, dimana nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 adalah A (82,96).

Grafik 3.11.1
Nilai SAKIP Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan



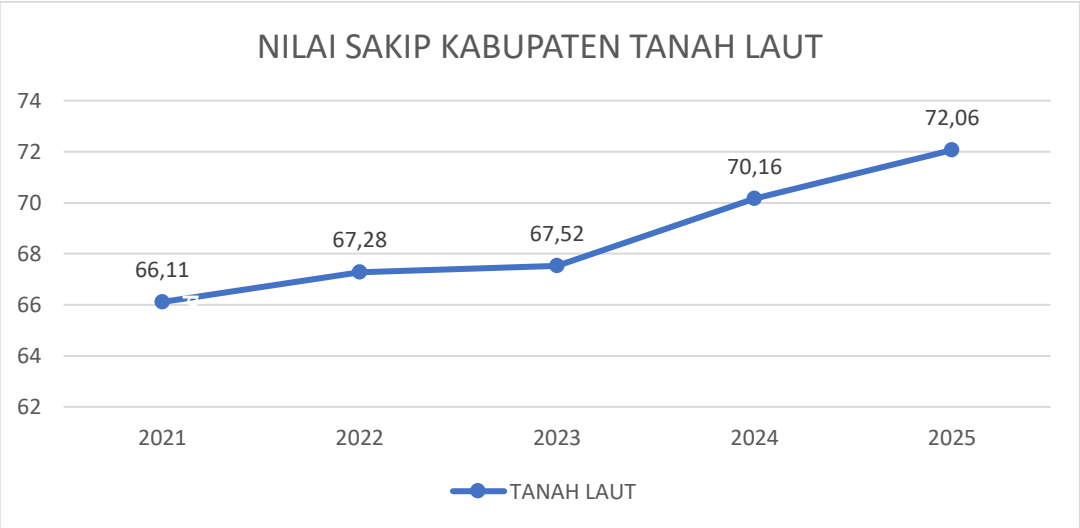
Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Tabel 3.11.5
Nilai SAKIP Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan

Kab/Kota	Tahun			
	2022	2023	2024	2025
HSS	80,02	81,5	82,08	84,07
Kalsel	78,91	80,24	81,21	82,04
Balangan	66,67	67,04	70,17	72,09
Tapin	69,69	68,93	69,02	71
Banjarmasin	72,74	71,2	72,73	70,7
HST	66,32	67,91	68,33	70,2
Tanah Laut	66,11	67,28	67,52	70,16
Batola	68,48	68,94	68,53	68,01
Tabalong	68,13	68,37	67,48	67,1
Tanah Bumbu	66,79	67,49	66,04	67,09
Banjar	69,33	68,03	68,1	67,06
Banjarbaru	65,76	66,74	67,02	66,83
HSU	63,34	64,2	64,4	64,82
Kotabaru	60,9	60,96	61,26	61,78

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dari tahun ke tahun mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 tetapi pada tahun 2024 mengalami kenaikan nilai yang signifikan, hingga pada tahun 2025 mendapat 72,06 sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.11.2
Nilai SAKIP tahun 2021– 2025



Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Meskipun telah mendapatkan nilai 72,06 dengan kategori BB namun masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan dalam rangka meningkatkan nilai SAKIP, karena dilihat dari nilai semua komponen masih terdapat kekurangan.

Beberapa hal yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam peningkatan SAKIP di tahun 2025 antara lain :

1. Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan

   Bapperida sebagai Leading Sector Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan upaya Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang efektif, terarah, dan berkelanjutan. Perencanaan yang disusun secara sistematis, partisipatif, dan berbasis data menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar selaras dengan dilakukan untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

   1. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan strategis daerah

      Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan strategis daerah dilakukan untuk memastikan arah, prioritas, dan sasaran pembangunan di Kabupaten Tanah Laut dapat tercapai secara terencana dan terukur. Dokumen yang disusun mencakup RPJPD 2025–2045, RPJMD 2025–2029, dan RKPD 2026, yang masing-masing berfungsi sebagai pedoman perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan.

      Penyusunan dokumen tersebut mencakup perumusan visi, misi, tujuan, strategi, serta program dan kegiatan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arahan kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi. Dengan tersusunnya dokumen perencanaan strategis ini secara komprehensif, pemerintah daerah dapat meningkatkan koordinasi antar SKPD, mengoptimalkan alokasi sumber daya, serta memastikan pencapaian target pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.
   2. Melakukan pendampingan dan perbaikan Logical Frame Work pada level Kabupaten dan SKPD sesuai dengan PermenpanRB Nomor 89 Tahun

2021 tentang penjenjangan Kinerja dimana pohon kinerja disusun dengan memperhatikan Critical Sucses Factor (CSF)

Melakukan pendampingan dan perbaikan Logical Framework (LogFrame) pada level Kabupaten maupun SKPD merupakan upaya strategis untuk memastikan perencanaan kinerja disusun secara sistematis dan terstruktur. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja dan didampingi langsung oleh Tim dari KemenPANRB, di mana pohon kinerja disusun dengan memperhatikan Critical Success Factor (CSF) sebagai dasar identifikasi faktor-faktor kunci yang menentukan keberhasilan pencapaian sasaran.

Pendampingan dan perbaikan LogFrame bertujuan agar setiap indikator, target, dan program kegiatan mencerminkan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan strategis. Dengan pendekatan ini, SKPD dapat menyusun rencana kinerja yang terukur, terintegrasi, dan selaras dengan kinerja Kabupaten secara keseluruhan. Hasil perbaikan LogFrame ini diharapkan meningkatkan kejelasan, akuntabilitas, dan efektivitas perencanaan kinerja, sekaligus menjadi dasar pengukuran capaian kinerja yang lebih akurat dan berbasis bukti.

3. Melakukan reviu atas penetapan target dalam dokumen perencanaan jangka menengah baik Kabupaten maupun SKPD

   Melakukan reviu atas penetapan target dalam dokumen perencanaan jangka menengah, baik pada tingkat Kabupaten maupun SKPD, merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa target yang ditetapkan realistis, terukur, dan selaras dengan visi, misi, serta prioritas pembangunan daerah. Reviu dilaksanakan dengan memastikan bahwa penetapan target sudah memperhatikan realisasi atau baseline tahun sebelumnya, juga dengan memastikan bahwa target yang ditetapkan merupakan angka absolut bukan range.

4. Memastikan crosscutting kinerja SKPD telah spesifik menjelaskan apa kinerja lintas SKPD tersebut dalam mendukung kinerja yang di crosscutting nya

Memastikan crosscutting kinerja SKPD dilakukan dengan menekankan agar setiap perangkat daerah secara spesifik menjelaskan kinerja lintas SKPD yang dilaksanakan dalam mendukung capaian kinerja utama yang bersifat crosscutting. Penyajian crosscutting kinerja SKPD telah tertuang pada aplikasi SIMPUN. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi keterkaitan dan kontribusi masing-masing SKPD terhadap sasaran strategis yang bersifat lintas sektor, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan dalam pelaksanaan program.

Dengan penjelasan yang spesifik mengenai peran dan kontribusi setiap SKPD, pengukuran kinerja menjadi lebih jelas dan terukur, serta memudahkan evaluasi terhadap efektivitas kolaborasi antar perangkat daerah. Hal ini mendukung optimalisasi pencapaian kinerja secara terpadu, memperkuat koordinasi lintas SKPD, dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi pelaksanaan program pembangunan daerah secara berkelanjutan.

2. Peningkatan kualitas pengukuran

Peningkatan kualitas pengukuran kinerja merupakan bagian penting dalam memastikan capaian kinerja dapat diukur secara tepat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengukuran kinerja yang didukung oleh indikator yang jelas, terukur, dan berbasis data yang valid menjadi dasar dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pengukuran terus dilakukan guna mendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang efektif dan berorientasi pada hasil.

1. Pengimplementasian pengukuran kinerja organisasi melalui aplikasi SIMPUN

Pengimplementasian pengukuran kinerja organisasi melalui aplikasi SIMPUN dilaksanakan secara per triwulan dan telah berjalan secara konsisten selama tahun 2025. Pengukuran kinerja juga dilengkapi dengan pengisian permasalahan dan tindak lanjut oleh masing-masing SKPD. Mekanisme ini memungkinkan setiap perangkat daerah untuk melakukan pemantauan capaian kinerja secara berkala, sehingga potensi deviasi

antara target dan realisasi dapat diidentifikasi lebih dini, serta merumuskan langkah perbaikan yang konkret dan terukur

Hasil pengukuran per triwulan menjadi dasar dalam penyusunan tindak lanjut dan perbaikan kinerja pada periode berikutnya, sehingga mendukung peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Dengan adanya pengisian permasalahan dan tindak lanjut, pengukuran kinerja tidak bersifat administratif semata, melainkan menjadi alat manajemen yang efektif untuk pengendalian dan peningkatan kinerja. Informasi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan dalam mengambil keputusan strategis, memperkuat koordinasi antar SKPD, serta memastikan bahwa setiap permasalahan yang muncul dapat ditangani secara sistematis guna mendukung peningkatan akuntabilitas dan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

2. **Memastikan pengukuran kinerja individu melalui aplikasi E-KITA**

   Memastikan pengukuran kinerja individu melalui aplikasi E-KITA yang dilaksanakan setiap bulan merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sistem penilaian kinerja aparatur yang objektif dan berkelanjutan. Pengukuran kinerja bulanan ini memungkinkan pemantauan capaian kinerja pegawai secara rutin sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

   Hasil pengukuran kinerja individu melalui E-KITA selanjutnya dijadikan sebagai dasar pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Mekanisme ini mendorong keterkaitan langsung antara kinerja dan penghargaan yang diterima pegawai, sehingga meningkatkan motivasi, disiplin, dan akuntabilitas kinerja aparatur. Dengan demikian, implementasi E-KITA tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai instrumen penguatan budaya kinerja dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah.

3. **Mengimplementasikan penilaian kinerja organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 95 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab Tanah Laut**

Penilaian kinerja organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 95 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pengelolaan kinerja yang terstandar dan terarah. Pelaksanaan penilaian kinerja dilaksanakan berdasarkan indikator sebagai berikut :

- Nilai SAKIP PD
- Persentase capaian IKU PD
- Persentase realisasi fisik, keuangan dan pendapatan PD
- IKM PD
- Nilai Pengawasan Kearsipan PD
- Nilai kematangan inovasi yang diciptakan dan diimplementasikan PD
- Persentase penyampaian LHKPN PD

Pada tahun 2025, didapatkan hasil 2 SKPD dengan nilai AA (Sangat Memuaskan), 20 SKPD dengan nilai A (Memuaskan), 17 SKPD dengan nilai BB (Sangat Baik), dan 1 SKPD dengan nilai B (Baik).



3. Peningkatan kualitas pelaporan

Peningkatan kualitas pelaporan kinerja merupakan salah satu upaya strategis dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan

pemerintahan. Pelaporan kinerja yang disusun secara sistematis, akurat, dan berbasis capaian kinerja tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada publik, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi untuk perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelaporan terus didorong agar selaras dengan prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Pendampingan penyusunan laporan kinerja Perangkat Daerah (Januari 2025)**

   Pendampingan penyusunan laporan kinerja yang dilaksanakan pada bulan Januari 2025 kepada seluruh Perangkat Daerah bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keseragaman dalam penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemeirntah. Kegiatan ini memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pelaporan kinerja, khususnya dalam memastikan keterkaitan antara perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja. Melalui pendampingan ini, Perangkat Daerah memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai penyusunan narasi analisis kinerja, penyajian capaian indikator, serta pemenuhan kelengkapan substansi laporan, sehingga laporan kinerja yang dihasilkan menjadi lebih akuntabel dan informatif.
2. **Asistensi penyusunan laporan kinerja Perangkat Daerah (Februari–Maret 2025)**

   Asistensi penyusunan laporan kinerja yang dilaksanakan pada bulan Februari hingga Maret 2025 kepada seluruh Perangkat Daerah berperan sebagai tahap penguatan dan penyempurnaan hasil penyusunan laporan kinerja. Kegiatan ini difokuskan pada penelaahan substansi laporan, konsistensi data kinerja, serta kesesuaian antara capaian kinerja dengan target yang telah ditetapkan. Melalui asistensi ini, Perangkat Daerah dapat melakukan perbaikan terhadap kelemahan yang masih ditemukan, sehingga kualitas analisis kinerja, kejelasan informasi, dan keselarasan antar dokumen perencanaan dan pelaporan dapat semakin ditingkatkan.



3. **Penyusunan sistematika Laporan Kinerja (Desember 2025)**

   Penyusunan sistematika Laporan Kinerja yang dilaksanakan pada bulan Desember 2025 merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas dan keseragaman pelaporan kinerja Perangkat Daerah. Sistematika ini disusun sebagai kerangka baku yang akan digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025, sehingga dapat meminimalisir perbedaan format dan substansi antar laporan. Dengan adanya sistematika yang jelas dan terstandar, diharapkan penyusunan laporan kinerja menjadi lebih terarah, konsisten, serta mampu menyajikan informasi kinerja secara sistematis dan sesuai dengan prinsip SAKIP.

4. **Memberikan punishment bagi SKPD yang tidak menyampaikan laporan kinerja tepat waktu**.

   DPRKPLH merupakan satu-satunya SKPD yang menyampaikan LKj tidak tepat waktu sesuai surat Sekretaris Daerah. Pemberian punishment berupa pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai bagi SKPD yang tidak menyampaikan laporan kinerja tepat waktu sesuai ketentuan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Tambahan Penghasilan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan disiplin, kepatuhan, dan akuntabilitas pelaporan kinerja. Kebijakan ini mendorong SKPD agar lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban penyampaian laporan kinerja sesuai jadwal dan standar yang telah ditetapkan. Penerapan punishment tersebut

terbukti menjadi instrumen pengendalian yang efektif dalam memperkuat komitmen pimpinan dan aparatur terhadap implementasi SAKIP, serta berkontribusi pada peningkatan kualitas dan ketepatan waktu pelaporan kinerja secara keseluruhan

4. Peningkatan kualitas evaluasi internal

Peningkatan kualitas evaluasi internal merupakan upaya untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan serta mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi internal yang dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan berperan sebagai instrumen pengendalian dan perbaikan kinerja, sekaligus sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas evaluasi internal terus didorong guna memperkuat akuntabilitas kinerja dan mendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara optimal.

1. **Melaksanakan evaluasi SAKIP SKPD dengan menggunakan teknologi informasi yaitu SIMPUN sesuai dengan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021**

   Pelaksanaan evaluasi SAKIP SKPD dengan menggunakan teknologi informasi melalui aplikasi SIMPUN, sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021, merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan objektivitas evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Pemanfaatan SIMPUN memungkinkan proses evaluasi dilakukan secara terintegrasi, sistematis, dan berbasis data, sehingga mendukung keseragaman serta konsistensi penilaian antar SKPD.

   Melalui evaluasi SAKIP berbasis teknologi informasi ini, seluruh tahapan penilaian, mulai dari pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan hasil evaluasi dapat dilakukan secara lebih efektif dan transparan. Hasil evaluasi menjadi dasar dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan SAKIP pada masing-masing SKPD, sekaligus sebagai acuan penyusunan rekomendasi perbaikan dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah secara berkelanjutan.

Selain sebagai sarana evaluasi, aplikasi SIMPUN juga digunakan untuk pelaksanaan dan pemantauan tindak lanjut SKPD atas hasil evaluasi internal. Setiap perangkat daerah diwajibkan menginput rencana aksi dan realisasi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi ke dalam aplikasi tersebut. Mekanisme ini memastikan bahwa hasil evaluasi tidak hanya berhenti pada penilaian, tetapi ditindaklanjuti secara terukur dan terdokumentasi, sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas penerapan SAKIP dan penguatan akuntabilitas kinerja SKPD secara berkelanjutan. Berikut tabel hasil pelaksanaan evaluasi SAKIP SKPD tahun 2025:

Tabel 3.11.6

Hasil Pelaksanaan Evaluasi SAKIP SKPD tahun 2025

JUMLAH SKPD	KATEGORI	PERSENTASE	INTERPRESTASI
27	A	67,5	Memuaskan
11	BB	27,5	Sangat Baik
2	B	5	Baik

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tanah Laut

Tabel 3.11.7

Hasil Pelaksanaan Evaluasi SAKIP SKPD tahun 2024

JUMLAH SKPD	KATEGORI	PERSENTASE	INTERPRESTASI
19	A	47,5	Memuaskan
19	BB	47,5	Sangat Baik
2	B	5	Baik

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tanah Laut

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2025 sebagian besar SKPD atau sebesar 67,5% telah mendapatkan nilai SAKIP minimal A atau dengan nilai di atas 70. Terjadi peningkatan dibandingkan Tahun 2024 dimana pada Tahun 2025 terdapat 27 SKPD atau sebesar 67,5% dengan nilai SAKIP A, 11 SKPD dengan nilai SAKIP BB, 2 SKPD

dengan nilai SAKIP B. Ringkasan evaluasi SAKIP Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.11.8
Rekapitulasi Nilasi SAKIP SKPD per komponen Tahun 2025 hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten

No.	Nama SKPD	Komponen				Nilai Hasil Evaluasi	Predikat
		Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi AKIP		
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	25,5	26,1	12,3	20	83,9	A
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	24,6	24	12,3	22,5	83,4	A
3	Sekretariat Daerah	25,5	24,6	12,75	20,5	83,35	A
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25,5	24,6	12,75	20,5	83,35	A
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	25,5	25,5	12,75	19,5	83,25	A
6	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	27	23,1	12,3	20,5	82,9	A
7	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	25,5	24,6	12,3	20,5	82,9	A
8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	25,5	24,6	12	20,5	82,6	A
9	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	24,6	24,6	12,75	20,5	82,45	A
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	25,5	24,6	12,3	20	82,4	A
11	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	25,5	24	12,3	20,5	82,3	A
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25,5	24	12,3	20,5	82,3	A
13	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	24,6	24,6	12,6	20,5	82,3	A
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	24,6	24,9	12,75	20	82,25	A
15	Dinas Pariwisata	24,6	24	12,3	21,25	82,15	A
16	Inspektorat Kabupaten	24,6	24,6	11,55	21,25	82	A
17	Badan Pendapatan Daerah	24,6	24,6	12,75	20	81,95	A

No.	Nama SKPD	Komponen				Nilai Hasil Evaluasi	Predikat
		Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi AKIP		
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	24,6	24,6	12,75	20	81,95	A
19	Dinas Kesehatan	24,6	24,6	12,75	20	81,95	A
20	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	25,5	24	12	20	81,5	A
21	Kecamatan Bumi Makmur	24,6	24,6	12,3	20	81,5	A
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	24,6	24,6	12	20	81,2	A
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	24,6	23,1	12,3	20,5	80,5	A
24	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	24,6	24	11,85	20	80,45	A
25	Kecamatan Pelaihari	24,6	24	11,85	20	80,45	A
26	Kecamatan Bati-Bati	24,6	24,6	12	19,25	80,45	A
27	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	24,6	24	12,3	19,25	80,15	A
28	Kecamatan Batu Ampar	25,5	24,6	11,85	18	79,95	BB
29	Kecamatan Panyipatan	24,6	23,1	12	20	79,7	BB
30	Kecamatan Bajuin	24,6	23,1	11,85	19,25	78,8	BB
31	Kecamatan Jorong	24,6	23,1	12,3	18,75	78,75	BB
32	Dinas Perhubungan	24,6	22,5	12,6	18	77,7	BB
33	Kecamatan Tambang Ulang	23,1	23,7	11,1	19,25	77,15	BB
34	Dinas Sosial	24,6	23,1	11,55	17,5	76,75	BB
35	Kecamatan Takisung	24,6	23,1	10,8	17,5	76	BB
36	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	24,6	21,6	11,25	18	75,45	BB
37	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	23,1	21,3	10,65	20	75,05	BB
38	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	22,5	21,6	9,6	19,75	73,45	BB
39	Kecamatan Kurau	23,1	22,2	11,85	9	66,15	B
40	Kecamatan Kintap	20,1	20,1	9,75	14,25	64,2	B

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tanah Laut

2. **Melaksanakan penajaman Laporan Hasil Evaluasi Internal AKIP SKPD secara lengkap menjelaskan kondisi SAKIP dari PD**

   Melaksanakan penajaman Laporan Hasil Evaluasi Internal AKIP SKPD dilakukan secara menyeluruh untuk memberikan gambaran yang lengkap dan objektif mengenai kondisi penerapan SAKIP pada masing-masing perangkat daerah. Penajaman laporan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap komponen SAKIP dijelaskan secara jelas, sistematis, dan berbasis data, sehingga mencerminkan tingkat akuntabilitas kinerja SKPD secara nyata.

   Melalui penajaman tersebut, laporan evaluasi tidak hanya memuat hasil penilaian, tetapi juga analisis atas capaian, permasalahan, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan SAKIP di perangkat daerah. Dengan demikian, Laporan Hasil Evaluasi Internal AKIP SKPD dapat menjadi dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan manajerial dan penyusunan langkah perbaikan guna meningkatkan kualitas penerapan SAKIP secara berkelanjutan.

Beberapa hal yang menjadi hambatan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam peningkatan SAKIP antara lain:

1. belum optimal pelaksanaan reviu pada target kinerja karena masih ditemukan beberapa target kinerja pada perencanaan tahun berjalan lebih rendah dibandingkan pencapaian kinerja tahun sebelumnya;
2. penjenjangan kinerja yang dimiliki beberapa SKPD, masih perlu disempurnakan. Hal ini disebabkan masih terdapat beberapa kinerja pada level taktikal sampai ke operasional belum sepenuhnya mengawal secara optimal kondisi kinerja diatasnya;
3. hasil pengidentifikasian crosscutting kinerja yang telah dilakukan tidak sepenuhnya tergambar pada kinerja langsung dari SKPD yang saling berkaitan.
4. Pengukuran kinerja individu belum sepenuhnya menggambarkan kinerja yang seharusnya dikawal sesuai dengan tugas dan fungsi sekaligus belum sepenuhnya menunjang pencapaian kinerja organisasi/SKPD;

5. Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi, aktivitas, penyesuaian antara kinerja dan anggaran jangka pendek, penyesuaian dalam rencana aksi SKPD, dan rencana hasil kerja yang dimiliki oleh setiap pegawai.
6. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah maupun laporan kinerja seluruh SKPD belum menginformasikan secara lengkap analisis keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran strategis masing-masing SKPD;
7. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan strategi perencanaan kinerja tahun berikutnya, baik pada capaian kinerja yang belum maupun telah tercapai sesuai target di tahun sebelumnya.
8. Temuan dan rekomendasi yang disampaikan oleh evaluator internal dalam laporan hasil evaluasi AKIP internal belum menginformasikan secara spesifik permasalahan maupun rekomendasi yang menjadi akar permasalahan dari implementasi SAKIP setiap SKPD.
9. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja pada level pusat, hal ini ditunjukkan dari masih terdapat beberapa kinerja yang capaiannya belum tercapai sesuai target yang diperjanjikan maupun nasional.

Solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala dalam rangka peningkatan nilai SAKIP adalah:

1. Melaksanakan reviu kembali terhadap target kinerja yang ditetapkan baik level kabupaten maupun SKPD.
2. Melaksanakan pendampingan dan perbaikan pada beberapa SKPD yang pohon kinerjanya belum sempurna untuk memastikan kinerja pada level taktikal dan operasional mengawal kinerja SKPD.
3. Melaksanakan pengukuran kinerja organisasi triwulanan berjalan dengan optimal dengan mendampingi SKPD dalam melaksanakan rencana aksi atas identifikasi permasalahan triwulanan pencapaian kinerja masing-masing SKPD;

4. Pengukuran kinerja individu (SKP) akan diintegrasikan dengan hasil pengukuran organisasi (PK) yaitu dengan menurunkan rencana aksi menjadi sasaran kinerja pegawai sehingga akan terlihat keterkaitan hasil pelaporan aktivitas dalam capaian kinerja;
5. Meningkatkan penyajian informasi pelaporan kinerja SKPD yang menggambarkan analisis keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran strategis masing-masing SKPD;
6. Meningkatkan kapasitas APIP dalam memberikan penyajian rekomendasi atas hasil evaluasi internal SAKIP secara spesifik dan jelas agar dapat dijadikan pedoman perbaikan mendatang bagi SKPD;
7. menciptakan pemahaman yang merata bagi APIP, serta mendorong secara khusus kepada SKPD pengampu bidang perencanaan dan para penanggung jawab program untuk terus meningkatkan kualitas evaluasi program untuk mewujudkan efektivitas pencapaian sasaran dan efisiensi penggunaan anggaran;

b. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sesuai Pasal 19 dan Pasal 20 Permendagri Nomor 19 tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Kementrian Dalam Negeri melakukan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) terhadap Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia dan menetapkan predikat terbaik secara nasional, dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang tertib, taat pada Peraturan Perundang-Undangan, efektif, transparan dan akuntabel, maka diperlukan pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah dengan menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia setiap tahunnya. Hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dikelompokkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah tinggi, sedang dan rendah.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah ukuran komposit yang menggambarkan kualitas dan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

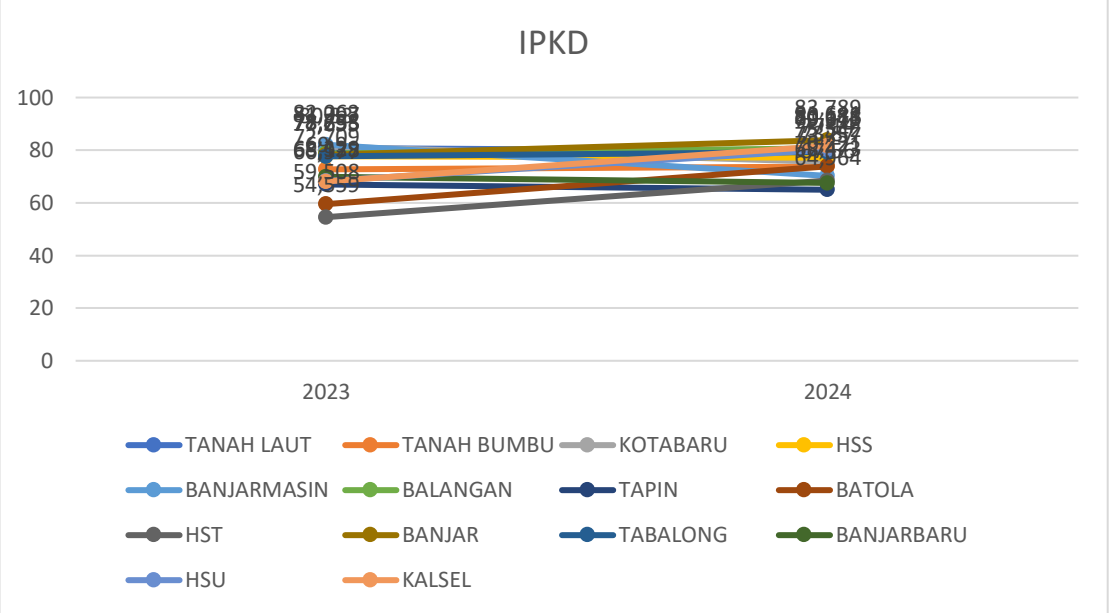
Pengukuran IPKD dilakukan berdasarkan sejumlah indikator utama, antara lain kualitas perencanaan dan penganggaran, kesesuaian realisasi anggaran dengan rencana, kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan, hasil pemeriksaan BPK, serta tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Nilai indeks yang semakin tinggi menunjukkan semakin baiknya tata kelola keuangan daerah dan semakin optimalnya pemanfaatan sumber daya keuangan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata dan standar deviasi dari nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam pengelompokan kemampuan Keuangan Daerah yang sama meliputi :

1. Peringkat Baik dengan Nilai A
2. Peringkat Perlu Perbaikan dengan nilai B
3. Peringkat Sangat Perlu Perbaikan dengan nilai C

Realisasi indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2025 adalah 89,104, telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 79,7 dengan tingkat capaian 111,80%. Nilai ini mengalami peningkatan signifikan sebanyak 9,459 *point* jika dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu 79,645. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan tahun 2025 masih belum rilis oleh Kemendagri RI.

Grafik 3.11.3
IPKD Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan Tahun 2023-2024



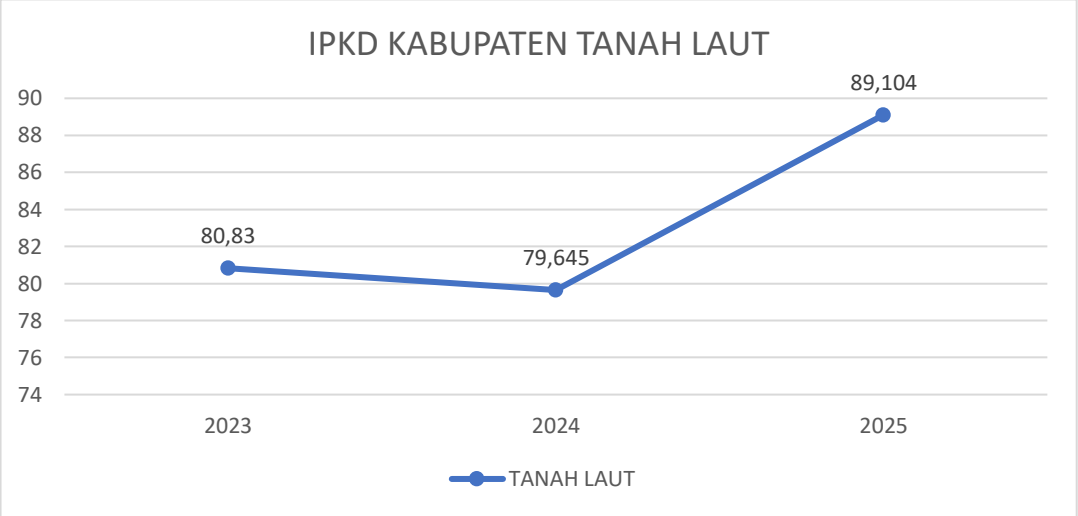
Sumber: Kementerian Dalam Negeri

Tabel 3.11.9
IPKD Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan Tahun 2023-2024

Kab/Kota	Tahun	
	2023	2024
Banjar	78,25	83,79
Kalsel	68,14	81,64
Balangan	78,74	80,69
HSU	68,33	80,18
Tanah Laut	80,83	79,65
Tabalong	77,66	79,32
HSS	77,70	77,14
Kotabaru	81,40	75,54
Batola	59,51	73,87
Tanah Bumbu	72,71	73,76
Banjarmasin	82,06	70,22
HST	54,56	68,47
Banjarbaru	69,90	67,56
Tapin	66,98	64,96

Grafik 3.11.4

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023-2025



Sumber: Kementerian Dalam Negeri

Pengukuran IPKD disemua dimensi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dimensi 1 Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, data yang harus dilengkapi serta SKPD penanggungjawab adalah :
   a. Kesesuaian program RPJMD & RKPD dipenuhi oleh Bappeda
   b. Kesesuaian program RKPD & KUA PPAS dipenuhi oleh Bappeda dan BPKAD
   c. Kesesuaian program KUA PPAS & APBD dipenuhi oleh BPKAD
   d. Kesesuaian Pagu RKPD & KUA PPAS dipenuhi oleh Bappeda dan BPKAD
   e. Kesesuaian Pagu KUA PPAS & APBD dipenuhi oleh BPKAD

2. Dimensi 2 Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD data yang harus dilengkapi serta SKPD penanggungjawab adalah :
   a. Alokasi jumlah belanja untuk fungsi pendidikan min 20% dari APBD
   b. Alokasi jumlah belanja untuk urusan kesehatan min 10% dari APBD, diluar gaji
   c. Alokasi jumlah belanja untuk infrastruktur yang langsung dalam alokasi Dana Transfer min 25% dari DTU
   d. Alokasi jumlah belanja untuk memenuhi SPM sesuai perUUan

3. Dimensi 3 Transparansi Keuangan Daerah data yang harus dilengkapi serta SKPD penanggungjawab adalah :
   - Ketepatan waktu dan keteraksesan dipenuhi oleh BPKAD dan Diskominfo
4. Dimensi 4 Penyerapan Anggaran data yang harus dilengkapi serta SKPD penanggungjawab adalah :
   - Belanja Transfer daerah, Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dipenuhi oleh BPKAD
5. Dimensi 5 Kondisi Keuangan Daerah data yang harus dilengkapi serta SKPD penanggungjawab adalah :
   a. Kemandirian keuangan, dipenuhi oleh BPKAD
   b. Solvabilitas jangka panjang dipenuhi oleh BPKAD
   c. Fleksibilitas keuangan dipenuhi oleh BPKAD
   d. Solvabilitas Layanan dipenuhi oleh BPKAD
   e. Solvabilitas Operasional dipenuhi oleh BPKAD
   f. Solvabilitas jangka pendek dipenuhi oleh BPKAD

Upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada Dimensi 5 adalah sbb :

a. Untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi pemerintah daerah, maka disahkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan PP 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Melalui PP tersebut, Pemerintah Daerah diberi wewenang yang lebih luas untuk mengumpulkan PAD melalui perluasan objek pajak daerah, retribusi daerah, dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif pajak. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dengan dilimpahkannya sebagian besar kewenangan keuangan kepada daerah, termasuk kewenangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah, maka setiap daerah didorong untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui berbagai kebijakan dan strategi yang dikembangkan secara transparan dan akuntabel.

Pemberian kewenangan dalam bidang perpajakan dan retribusi daerah diharapkan dapat mendorong kemandirian fiskal daerah yang diperlukan untuk membiayai pelayanan dan pembangunan daerah dan dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat strateginya antara lain;

1. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak / Retribusi
3. Memanfaatkan aset daerah untuk menghasilkan pemasukan
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak
5. Mengembangkan sektor pariwisata
6. Meningkatkan kemampuan aparatur sipil negara (ASN) sebagai pemungut pajak daerah/ Retda
7. Melakukan pemutakhiran/updating objek dan subjek Pajak baik melalui ekstensifikasi dan intensifikasi
8. Melakukan kerja sama dengan pihak swasta atau LSM
9. Menyelenggarakan sistem digitalisasi penerimaan daerah.

Pengoptimalan lain-lain PAD yang sah perlu dilakukan oleh daerah karena tidak mempengaruhi langsung/membebani kehidupan masyarakat. Peluang yang masih dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatannya berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup antara lain:

1. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
2. hasil kerja sama daerah
3. jasa giro;
4. hasil pengelolaan dana bergulir
5. pendapatan bunga;
6. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
7. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai

akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;

8. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
9. pendapatan denda pajak daerah;
10. pendapatan denda retribusi daerah
11. pendapatan dari pengembalian;
12. pendapatan dari BLUD; dan
13. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Kemudian terkait belanja pegawai kita telah berupaya menyusun perencanaan belanja yg memenuhi UU No 1 tahun 2022 dimana belanja pegawai harus 30% paling tinggi.
c. Terkait rendahnya solvabilitas layanan, kita terus berupaya memenuhi pendanaan utk pelayanan dasar seperti pendidikan kesehatan infrastruktur sesuai dengan UU No 1 tahun 2022.
d. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melakukan manajemen kas dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam rangka menekan kewajiban lancar.
e. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tidak memiliki kewajiban/hutang jangka panjang dikarenakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara financial mampu untuk membiayai belanja daerah.

6. Dimensi 6 Opini BPK atas LKPD data yang harus dilengkapi serta SKPD penanggungjawab adalah :
   - Pengukuran dilakukan terhadap hasil opini BPK terhadap LKPD selama 3 tahun berturut-turut, telah dipenuhi oleh BPKAD.

Target Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 didalam RPJMD tahun 2025-2029 adalah sebesar 79,7. Bahwa telah ditetapkan / disampaikan hasil penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tahun 2025 sesuai surat pengantar dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementrian Dalam

Negeri Nomor 900.1.15.3/6145/BSKDN tanggal 13 Desember 2024 perihal penyampaian Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil IPKD Tahun Anggaran 2025 tahun ukur 2024 dan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.3-372 Tahun 2024 tentang hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2025 mendapatkan Nilai Total **89,104** capaian realisasi sebesar **111,80%** atau dengan peringkat "**BAIK"** dan dengan Nilai "**A**" rangking ke 10 dari 105 Kabupaten/Kota di Indonesia untuk kategori Kemampuan Keuangan Daerah "Tinggi".

Tabel 3.11.10
Daftar Hasil Pengukuran IPKD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tahun 2023, 2024, dan 2025

Tahun	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total	Peringkat	Nilai
2023	13,771	19,138	15	15	2,921	15	**80,83**	**Baik**	**A**
2024	13,335	19,828	15	15	1,483	15	**79,645**	**Baik**	**A**
2025	13,632	18,472	15	20	12	10	**89,104**	**Baik**	**A**

Sumber Data : Keputusan Mendagri No 900.1.15.3-387 thn 2023 dan No 900.1.15.3-372 Thn 2024

Hasil penilaian Pengukuran Indeks Pengukuran Keuangan Daerah (IPKD) yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2023, 2024 dan 2025 rata-rata telah memperoleh Nilai BAIK (A), yaitu hasil Pengukuran Indeks Pengukuran Keuangan Daerah (IPKD) tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapat peringkat 4 untuk tahun 2022 tahun ukur 2023 dengan Nilai total 80,83 dengan Peringkat BAIK (A).

Sedangkan Hasil Pengukuran IPKD tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapat peringkat 10 untuk tahun 2023 tahun ukur 2024 dengan Nilai total 79,645 dengan Peringkat BAIK (A), Selanjutnya Hasil Pengukuran IPKD tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapat peringkat 10 untuk tahun 2024 tahun ukur 2025 dengan Nilai total 89,104 dengan Peringkat BAIK (A), dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efesien, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menempati

peringkat ke 2 di Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Kabupaten/Kota IPKD tertinggi.

Hasil Pengukuran IPKD terdapat penurunan nilai pada Dimensi 1 pada tahun ukur 2025 dikarenakan kurangnya konsistensi kesesuaian pagu pada KUA-PPAS dengan APBD.

Kemudian pada Dimensi 4 terdapat kurang maksimalnya serapan anggaran khususnya Belanja Tidak Terduga (BTT).

Kemudian pada Dimensi 5 terdapat peningkatan nilai yaitu sebagai berikut :

1. Tingginya Indeks kemandirian keuangan (strategi peningkatan PAD)
2. Tingginya fleksibiltas keuangan (strategi peningkatan PAD, mengurangi kewajiban lancar dan belanja pegawai)
3. Tingginya solvabilitas layanan
4. Tingginya solvabilitas jangka pendek (strategi peningkatan investasi jangka pendek dan menekan kewajiban lancer/jangka pendek)
5. Rendahnya solvabilitas jangka panjang (strategi peningkatan tidak mengandalkan hutang untuk menutupi belanja dan dalam pengajuan hutang menggunakan analisis yang matang agar tidak menjadi beban Pemda, solvabiltas bernilai NOL apabila asset tidak mengcover kewajiban jangka panjang).

Berdasarkan hasil penilaian serta catatan penyebab adanya penurunan nilai per Dimensi yang telah diuraikan diatas, maka BPKAD Kabupaten Tanah Laut akan melakukan evaluasi dan sangat perlu perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja pada masa ukur 2026 untuk IPKD penilaian tahun 2025.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tidak mengalami kendala dalam melaksanakan pemenuhan dan pengisian pada seluruh Dimensi. Maka sehubungan dengan hal tersebut diatas diharapkan pada tahun-tahun yang akan datang terdapat konsistensi dan transparansi ke Pemerintah Daerah tentang penilaian pengukuran IPKD, sehingga Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dapat melakukan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja.

Namun untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang diharapkan untuk SDM aparatur PIC yang ditugaskan menangani pengisian dan pemenuhan data pengukuran IPKD ini diperlukan peningkatan pengembangan

kapasitas dengan dibekali adanya Bimtek/Pelatihan Khusus dari Instansi terkait dan juga agar diperhatikan untuk diberikan reward apresiasi atas kinerjanya.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, diantaranya :

a. Peningkatan kualitas penatausahaan keuangan daerah

1) Sosialisasi Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2026

Sosialisasi Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh perangkat daerah terkait ketentuan, kebijakan, serta teknis penyusunan RKA-SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran agar selaras dengan dokumen perencanaan daerah, prioritas pembangunan, serta prinsip akuntabilitas kinerja.



2) Pembahasan Perubahan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2025 dan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2026

Pembahasan Perubahan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2025 dan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan sebagai bagian dari upaya

memastikan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program/kegiatan perangkat daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penyesuaian terhadap program, kegiatan, subkegiatan, serta alokasi anggaran agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah, prioritas nasional, serta kondisi dan kebutuhan aktual daerah. Melalui pembahasan ini, diharapkan RKA-SKPD yang disusun dapat lebih akuntabel, efektif, dan mendukung pencapaian target kinerja pemerintah daerah pada Tahun Anggaran 2025 dan 2026.



3) Melaksanakan pelayanan perbendaharaan keuangan daerah

- Pembayaran Gaji dan Tunjangan bagi ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan total ASN 6.118 orang yang terdiri dari PNS sejumlah 4.125 orang dan PPPK sejumlah 1.993 orang.
- Pelayanan SP2D baik GU/TU/LS telah menerbitkan sebanyak 9.727 dokumen SP2D.
- Penerbitan SKPP Pensiun untuk Tahun 2025 sebanyak 295 dokumen.
- Kabupaten Tanah Laut telah menjalin Kerjasama dengan pihak antara lain :
  - ✓ BPJS
  - ✓ BANK KALSEL CABANG PELAIHARI
  - ✓ TASPEN
- Penyaluran Anggaran Dana Desa ke Pemerintah Desa se-Kabupaten Tanah Laut sebanyak 130 Desa di lingkup Kabupaten Tanah Laut.

b. Peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah

1) Rekonsiliasi

Rekonsiliasi Belanja dan Beban dengan SKPD per Triwulan, Rekonsiliasi Belanja Modal, Rekonsiliasi Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Rekonsiliasi Pajak Pusat dilaksanakan secara berkala sebagai upaya untuk menjamin kesesuaian dan keakuratan data keuangan antara SKPD dan pengelola keuangan daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keselarasan pencatatan dan pelaporan belanja, beban, belanja modal, realisasi DAK, serta kewajiban perpajakan pusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui pelaksanaan rekonsiliasi ini, diharapkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih akurat, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mendukung penyusunan laporan keuangan yang andal dan tepat waktu.



2) Fasilitasi penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan

   Fasilitasi penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan dilaksanakan untuk mendukung perangkat daerah dalam menyusun laporan keuangan yang akurat, tertib administrasi, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparatur pengelola keuangan dalam proses pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan keuangan.

3) Pembinaan tentang mekanisme pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan

   Pembinaan tentang mekanisme pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan aparatur pengelola keuangan terhadap tata cara pertanggungjawaban

keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.

c. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang efektif

1) Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah

Pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) dilaksanakan sebagai upaya untuk memperoleh data aset daerah yang akurat, tertib, dan mutakhir. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara kondisi fisik, pencatatan, dan pengadministrasian BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



2) Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur pengelola aset daerah dalam melaksanakan pengelolaan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong tertib administrasi, ketepatan pencatatan, serta optimalisasi pemanfaatan dan pengamanan BMD.



3) Pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD

Pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) dilaksanakan sebagai upaya optimalisasi pengelolaan aset daerah agar memiliki nilai guna dan nilai tambah bagi pemerintah daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pemanfaatan BMD dilakukan secara efektif dan sesuai peruntukannya, serta pemindahtanganan BMD dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



4) Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMD

Pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) dilaksanakan sebagai bagian dari penataan dan penertiban pengelolaan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan ini bertujuan untuk menghapus BMD yang sudah tidak dapat dimanfaatkan, rusak berat, atau tidak bernilai ekonomis dari daftar inventaris secara sah dan tertib administrasi.



5) Pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah

Pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) dilaksanakan untuk menjaga keberadaan, kondisi, dan nilai aset daerah agar tetap berfungsi secara optimal serta terhindar dari kehilangan, penyalahgunaan, atau penurunan nilai. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan BMD dikelola dan dipelihara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara administratif, fisik, maupun hukum.



Hambatan :

1. Kualitas perencanaan dan penganggaran belum optimal, khususnya dalam keterkaitan antara program/kegiatan dengan indikator kinerja dan target pembangunan daerah.
2. Pemahaman aparatur pengelola keuangan yang belum merata, terutama terkait penerapan regulasi terbaru, standar akuntansi pemerintahan, dan sistem informasi pengelolaan keuangan.
3. Ketepatan dan konsistensi pelaporan keuangan masih perlu ditingkatkan, termasuk kesesuaian antara realisasi fisik dan keuangan.
4. Pengelolaan aset daerah belum sepenuhnya tertib, baik dari sisi pencatatan, pemanfaatan, maupun pengamanan Barang Milik Daerah.
5. Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah belum optimal, sehingga berdampak pada keterlambatan dan akurasi data pendukung penilaian IPKD.

Rencana Aksi :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, melalui pembinaan dan asistensi penyusunan RKA-SKPD yang berbasis kinerja dan selaras dengan dokumen perencanaan daerah.
2. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan, melalui bimbingan teknis, sosialisasi regulasi, dan pendampingan teknis secara berkelanjutan.
3. Memperkuat pengendalian internal dan rekonsiliasi data keuangan, termasuk rekonsiliasi belanja, beban, aset, dan kewajiban secara berkala dengan seluruh SKPD.
4. Menertibkan pengelolaan Barang Milik Daerah, melalui inventarisasi, pengamanan, pemanfaatan, serta penghapusan BMD sesuai ketentuan.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, dengan memastikan kepatuhan input data, peningkatan kualitas data, serta integrasi antar modul pengelolaan keuangan.

d. Survei Penilaian Integritas (SPI)

Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah survei nasional yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengukur tingkat integritas lembaga publik berdasarkan pengalaman dan persepsi para pemangku kepentingan. SPI memotret kualitas integritas dan tata kelola instansi sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penilaian SPI dilakukan melalui beberapa dimensi utama, meliputi:

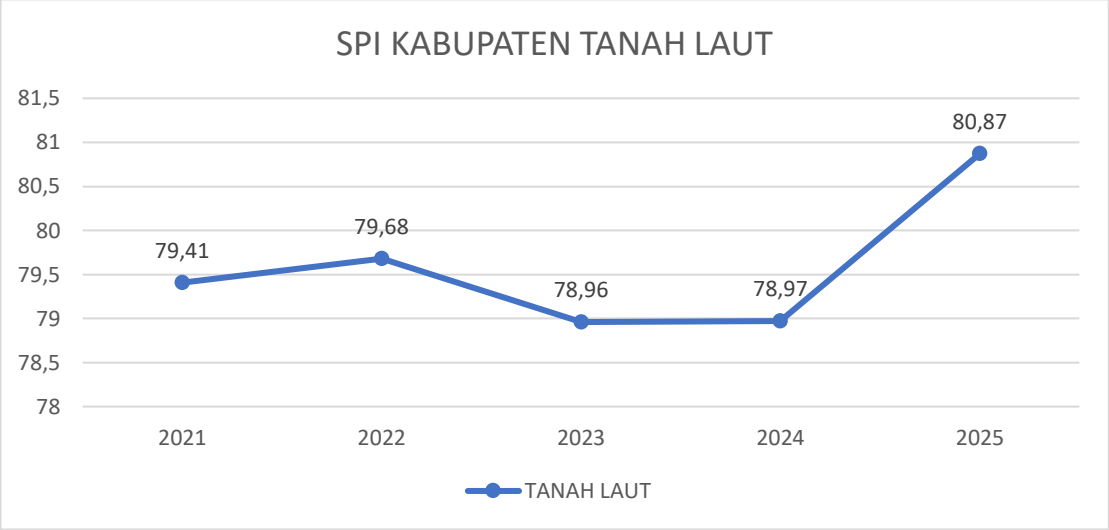
1. Integritas dalam Pelayanan Publik, yang menilai praktik pelayanan, potensi gratifikasi, pungutan liar, dan perlakuan tidak adil dalam pemberian layanan kepada masyarakat.
2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia, yang mengukur transparansi, objektivitas, dan integritas dalam proses rekrutmen, promosi, mutasi, serta penilaian kinerja pegawai.
3. Pengelolaan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa, yang menilai kepatuhan terhadap ketentuan, transparansi, dan potensi penyimpangan dalam perencanaan serta pelaksanaan anggaran dan pengadaan.
4. Sistem Pencegahan dan Pengendalian Korupsi, yang mengukur efektivitas kebijakan, pengendalian internal, pengelolaan pengaduan masyarakat, serta komitmen pimpinan dalam membangun integritas organisasi.
5. Budaya Organisasi dan Etika, yang menilai nilai, sikap, dan perilaku antikorupsi yang diterapkan dan dipraktikkan dalam lingkungan kerja instansi.

Responden SPI terdiri dari tiga kelompok utama, yaitu:

1. Masyarakat/Pengguna Layanan, yang memberikan penilaian berdasarkan pengalaman langsung dalam menerima pelayanan publik.
2. Pegawai Internal, yang menilai integritas, tata kelola, dan budaya organisasi dari perspektif internal instansi.
3. Pihak Eksternal/Ekspert, yang memberikan penilaian profesional berdasarkan pengamatan, keahlian, dan pemahaman terhadap tata kelola instansi.

Grafik 3.11.5

SPI Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021-2025

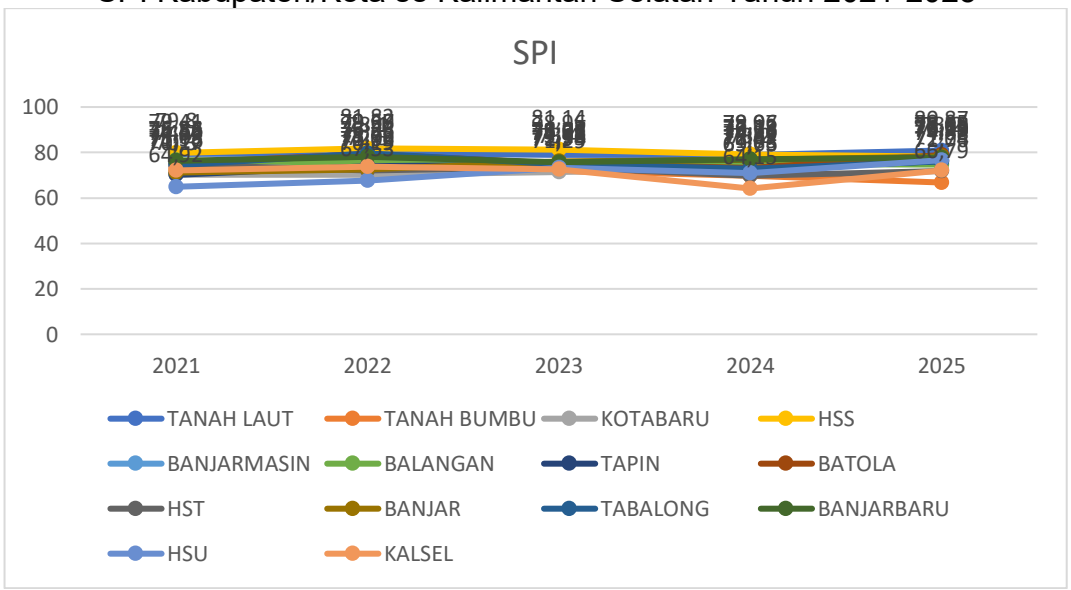


Sumber: KPK

Pada tahun 2021-2025 Survei Penilaian Integritas di Kabupaten Tanah Laut menunjukan tren yang cenderung fluktuatif. Pada tahun 2021 Survei Penilaian Integritas sebesar 79,41. Kemudian mengalami peningkatan menjadi 79,68 pada tahun 2022, di tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 78,96 kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2024 menjadi 78,97. Hingga pada tahun 2025 mengalami peningkatan signifikan kembali menjadi 80,87.

Grafik 3.11.6

SPI Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan Tahun 2021-2025



Sumber: KPK

Tabel 3.11.11
SPI Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan Tahun 2021-2025

Kab/Kota	Tahun			
	2022	2023	2024	2025
HSS	79,8	81,82	81,14	79,06
Tanah Laut	79,41	79,68	78,96	78,97
Banjarbaru	76,35	78,1	75,71	77,13
Banjar	71,16	72,5	76,07	76,72
Banjarmasin	75,86	76,23	75,08	76,28
Balangan	76,52	75,36	74,81	74,96
Kotabaru	70,3	70,19	71,29	74,21
Batola	75,46	79,29	75,22	73,2
Tabalong	74,52	79,57	74,81	72,87
Tapin	70,17	73,92	74,79	72,47
HSU	64,92	67,53	73,18	71,03
HST	74,7	72,02	73,4	69,76
Tanah Bumbu	73,03	71,95	71,94	69,63
Kalsel	71,98	73,76	72,55	64,15

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain se-Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapat penghargaan atas Survei Penilaian Integritas tertinggi se-Kalimantan Selatan pada tahun 2025 dengan nilai 80,87.



Sumber: KPK

Beberapa hal yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam peningkatan SPI di tahun 2025 antara lain :

1. Melaksanakan Pendataan populasi internal, eksternal dan eksper

Pemerintah daerah melaksanakan pendataan populasi internal, eksternal, dan eksper bagi seluruh SKPD. Pendataan populasi internal mencakup aparatur di lingkungan SKPD, populasi eksternal meliputi pengguna layanan dan pemangku kepentingan, sedangkan populasi eksper mencakup pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan keahlian tertentu yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan.

Pendataan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan data responden yang lengkap, akurat, dan representatif dalam pelaksanaan SPI. Dengan tersusunnya data populasi internal, eksternal, dan eksper secara komprehensif, pelaksanaan survei dapat berjalan lebih objektif dan kredibel, sehingga hasil SPI yang diperoleh mampu menggambarkan tingkat integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara lebih akurat serta menjadi dasar perumusan kebijakan peningkatan integritas dan pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

2. Melaksanakan Sosialisasi Survey Penilaian Integritas

   Melaksanakan sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan langkah penting dalam mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan survei serta pencapaian sasaran strategis peningkatan integritas. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada aparatur dan pemangku kepentingan terkait mengenai tujuan, mekanisme, serta manfaat SPI dalam upaya pencegahan korupsi dan penguatan tata kelola pemerintahan. Melalui sosialisasi SPI, diharapkan seluruh pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing, serta pentingnya partisipasi yang objektif dan jujur dalam pengisian survei. Dengan meningkatnya pemahaman dan partisipasi responden, pelaksanaan SPI dapat berjalan secara optimal dan hasil survei yang diperoleh dapat mencerminkan kondisi integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara akurat dan kredibel.



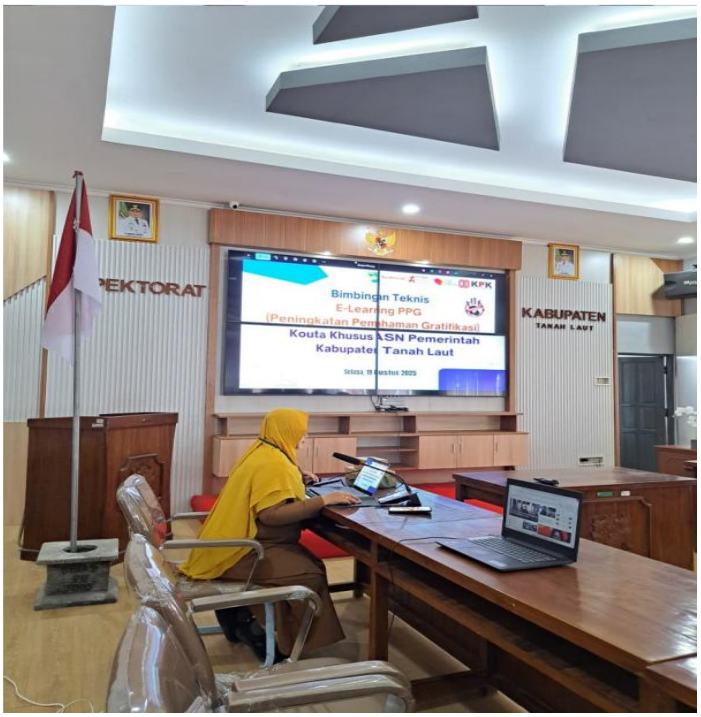


3. Melaksanakan pelatihan penyuluh antikorupsi bagi APIP dan SKPD

   Melaksanakan pelatihan penyuluh antikorupsi bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan SKPD merupakan upaya strategis dalam memperkuat peran pengawasan internal dan pembangunan budaya integritas di lingkungan pemerintah daerah. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kompetensi, serta keterampilan APIP dalam melakukan edukasi dan penyuluhan antikorupsi secara sistematis dan berkelanjutan.

   Melalui pelatihan tersebut, APIP dibekali pengetahuan mengenai nilai-nilai integritas, pencegahan korupsi, serta teknik komunikasi dan penyuluhan yang efektif. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas APIP sebagai agen

perubahan (agent of change) dalam menanamkan budaya antikorupsi, mendukung pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI), serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Tanah Laut.



4. Melaksanakan Sosialisasi antikorupsi secara rutin untuk memperkuat implementasi SOP di seluruh instansi.

   Melaksanakan sosialisasi antikorupsi secara rutin merupakan upaya berkelanjutan untuk memperkuat implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) di seluruh instansi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur terhadap nilai-nilai integritas, kepatuhan terhadap ketentuan, serta pentingnya penerapan SOP sebagai instrumen pengendalian dalam mencegah terjadinya penyimpangan dan praktik korupsi.

   Melalui sosialisasi antikorupsi yang dilaksanakan secara berkala, diharapkan seluruh aparatur memiliki kesadaran dan komitmen yang sama dalam menjalankan tugas sesuai prosedur yang berlaku. Hal ini mendukung terbentuknya budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional di seluruh instansi.



Hambatan :

1. Pemahaman responden terhadap tujuan dan mekanisme SPI yang belum merata, sehingga berpotensi memengaruhi kualitas dan objektivitas pengisian survei.
2. Partisipasi responden internal dan eksternal yang belum optimal, baik karena keterbatasan waktu, akses informasi, maupun tingkat kesadaran terhadap pentingnya SPI.
3. Ketersediaan dan akurasi data populasi responden (internal, eksternal, dan eksper) yang masih perlu ditingkatkan untuk memastikan keterwakilan dalam survei.
4. Budaya integritas yang belum sepenuhnya terinternalisasi di seluruh unit kerja, sehingga implementasi nilai-nilai antikorupsi dan kepatuhan terhadap SOP belum berjalan optimal.
5. Tindak lanjut hasil SPI yang belum sepenuhnya sistematis, sehingga rekomendasi perbaikan belum seluruhnya terimplementasi secara konsisten.

Rencana Aksi :

1. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi SPI secara berkelanjutan kepada aparatur dan pemangku kepentingan eksternal agar memahami tujuan, manfaat, dan mekanisme survei.

2. Memperkuat pendataan dan pemutakhiran populasi responden internal, eksternal, dan eksper pada seluruh SKPD untuk memastikan keterwakilan dan validitas hasil survei.
3. Mendorong peningkatan partisipasi responden melalui koordinasi intensif antar SKPD dan pendampingan teknis selama pelaksanaan SPI.
4. Memperkuat internalisasi nilai-nilai integritas dan antikorupsi, antara lain melalui sosialisasi rutin, pelatihan penyuluh antikorupsi, serta penguatan implementasi SOP di seluruh instansi.
5. Menindaklanjuti hasil SPI secara terstruktur dan berkelanjutan, dengan menyusun rencana aksi perbaikan yang jelas, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, serta melibatkan APIP dalam pengawasan dan evaluasi tindak lanjut.

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya Pemerintahan Yang Bersih Dan Akuntabel di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 52 ASN pada BPKAD, 60 ASN pada Inspektorat, 46 ASN pada BAPENDA, 27 ASN pada DISPUSIP, 7 ASN pada Bagian Organisasi, 40 ASN pada BAPPERIDA dan di dukung oleh 14 Program dengan Pagu Rp. 410.832.019.593,77 dan terealisasi Rp. 368.361.812.840,00 atau sebesar 89,66%.

Tabel 3.11.12
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.170.418.671,59	**788.947.727,00**
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	363.052.874,00	**312.142.448,00**
3	Program Penyelengaraan Pengawasan	4.328.619.165,61	**3.364.883.430,00**
4	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	4.102.899.512,30	**3.413.044.810,00**
5	Program Pengelolaan Arsip	117.576.959,68	**104.782.500,00**
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	391.682.427,12	**362.074.549,00**
7	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.548.698.016,50	**1.418.388.200,00**
8	Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	55.564.039.692,43	**50.475.100.452,00**
9	Program kepegawaian Daerah	5.347.739.759,85	**3.956.999.796,00**

No	Program	Pagu	Realisasi
10	Program Perekonomian dan Pembangunan	2.539.607.457,04	**2.312.877.486,00**
11	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	319.091.935.329,16	**288.367.843.210,00**
12	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.839.922.885,30	**2.806.732.993,00**
13	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	60.243.895,00	**31.133.200,00**
14	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	12.365.582.948,19	**10.646.862.039,00**
Jumlah		**410.832.019.593,77**	**368.361.812.840,00**

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Efisiensi kinerja diukur menggunakan rumus berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

1. Nilai AKIP Kabupaten

$$\text{Efisiensi} = \frac{(410.832.019.593,77 \times 100,83\%) - 368.361.812.840,00}{(410.832.019.593,77 \times 100,83\%)} \times 100\%$$

Efisiensi = 11,08%

Tabel 3.11.13
Efisiensi Indikator 1

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100,83%	89,66%	11,08%

2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

$$\text{Efisiensi} = \frac{(410.832.019.593,77 \times 111,80\%) - 368.361.812.840,00}{(410.832.019.593,77 \times 111,80\%)} \times 100\%$$

Efisiensi = 19,37%

Tabel 3.11.14
Efisiensi Indikator 2

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
111,80%	89,66%	19,37%

3. Survei Penilaian Integritas (SPI)

$$\text{Efisiensi} = \frac{(410.832.019.593,77 \times 102,36\%) - 368.361.812.840,00}{(410.832.019.593,77 \times 102,36\%)} \times 100\%$$

Efisiensi = 12,40%

Tabel 3.11.15
Efisiensi Indikator 3

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
102,36%	89,66%	12,40%

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 12

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital diukur melalui 3 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.12.1
Capaian Kinerja Terhadap Target 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			TAHUN 2025		
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,53/A	4,10/A-	4,23/A-	4,4	3,71/B	84,31%
2	IKM	Nilai	-	88,9	88,41	88,6	89,31	100,80%
3	Indeks SPBE	Nilai	3,11	3,12	3,12	3,12	3,12	100 %
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2025								95,03%

Tabel 3.12.2
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2025 THD TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,4	3,71	84,31%	4,6	80,65%
2	IKM	Nilai	88,6	89,31	100,80%	90,3	98,90%
3	Indeks SPBE	Nilai	3,12	3,12	100	2	156%

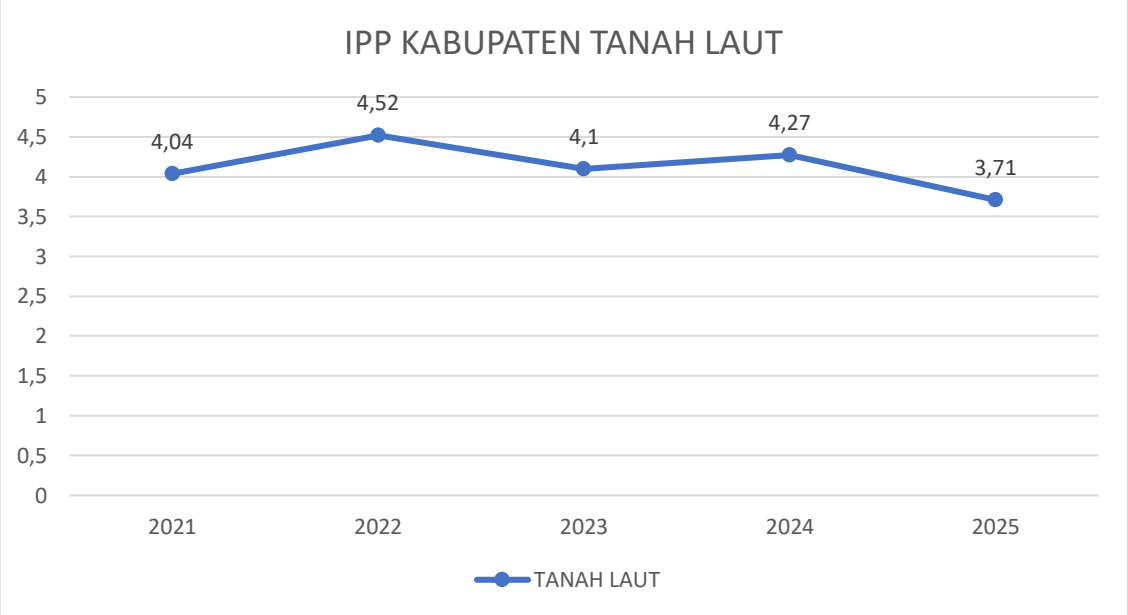
a. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan salah satu indikator strategis yang digunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat. IPP mencerminkan tingkat kepatuhan perangkat daerah terhadap standar pelayanan, kualitas pelayanan yang diberikan, serta komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 sebesar 3,71(B), mengalami penurunan 0,52 point dengan capaian 84,31% dari target 4,4. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu 4,6 maka mencapai 80,65%.

Grafik 3.12.1

Indeks Pelayanan Publik Tahun 2021-2025



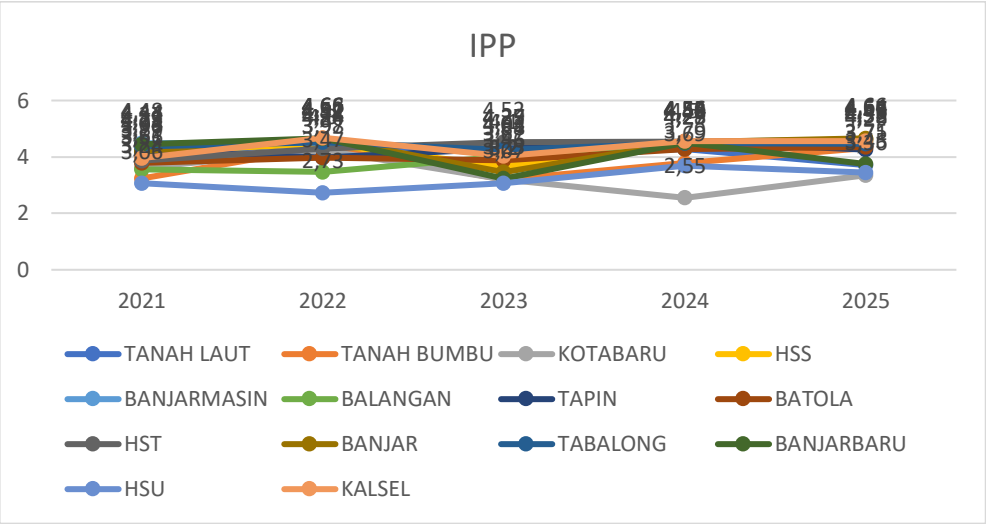
Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nilai Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Tanah Laut menunjukkan kecenderungan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini mencerminkan adanya upaya berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyederhanaan prosedur, peningkatan kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan pengawasan dan pengaduan masyarakat.

Grafik 3.12.2

Indeks Pelayanan Publik Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan

Tahun 2021-2025



Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Tabel 3.12.3

Indeks Pelayanan Publik Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan

Tahun 2021-2025

Kab/Kota	Tahun			
	2022	2023	2024	2025
Kalsel	3,96	4,68	4,03	4,56
HST	3,87	4,3	4,52	4,55
Banjarmasin	4,48	4,51	4,27	4,54
Tapin	4,23	3,98	4,29	4,54
Banjar	4,21	4,66	3,46	4,52
Banjarbaru	4,44	4,66	3,23	4,5
Tabalong	4,37	4,52	4,25	4,49
HSS	4,19	4,47	3,67	4,46
Balangan	3,56	3,47	4,01	4,29
Batola	3,79	3,97	3,88	4,28
Tanah Laut	4,04	4,52	4,1	4,27
Tanah Bumbu	3,24	4,34	3,2	3,79
HSU	3,06	2,73	3,07	3,69
Kotabaru	3,61	4,24	3,2	2,55

Indeks Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat IPP adalah hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP). PEKPPP dilaksanakan untuk:

1. Memperoleh bahan penyusunan rekomendasi dalam perbaikan pelayanan.
2. Mendapatkan nilai IPP.
3. Melakukan pemeringkatan kinerja penyelenggaraan Pelayanan Publik secara berkala, dan
4. Memberikan penghargaan kepada Pembina, Penyelenggara dan/atau Unit Lokus yang berprestasi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 659 Tahun 2024 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2024, Kabupaten Tanah Laut memperoleh IPP 4,23 dengan kategori A- (Sangat Baik).

Untuk Tahun 2024 ini unit pelayanan yang dijadikan lokus penilaian adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, RSUD Hadji Boejasin dengan perolehan nilai sebagai berikut:

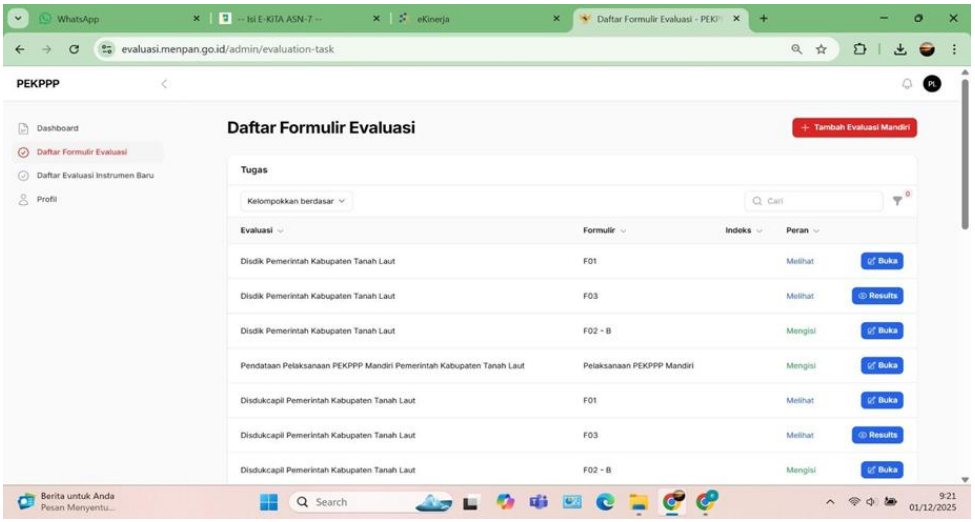
1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil IPP : 4,64 dengan predikat A
2. Dinas Sosial IPP : 3,62 dengan predikat B
3. RSUD H. Boejasin IPP : 4,43 dengan predikat A-

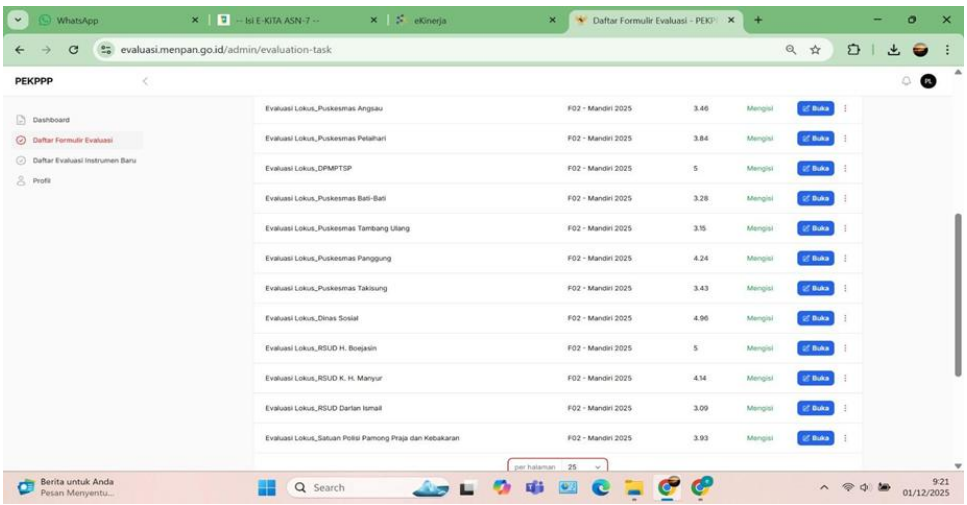
Pada tahun 2025 unit pelayanan yang dijadikan lokus penilaian nasional adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk nilai tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan nilai 3,71 (B), mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2024 dengan nilai 4,23 (A-).

Pada tahun 2025 ini juga Kementerian PANRB mengeluarkan aturan baru bahwa Kabupaten/Kota diwajibkan melakukan penilaian mandiri, dimana lokus penilaian diserahkan kepada masing-masing Kabupaten/Kota. Adapun unit lokus yang telah dipilih untuk dilakukan penilaian mandiri adalah:

1. DPMPTSP
2. Dinsos
3. Satpol PP & Damkar
4. RSUD H. Boejasin
5. RSUD K.H. Mansyur
6. RSUD Darlan Ismail

7. Puskesmas Pelaihari
8. Puskesmas Angsau
9. Puskesmas Bati-Bati
10. Puskesmas Tambang Ulang
11. Puskesmas Panggung
12. Puskesmas Takisung





b. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan instrumen penting yang digunakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat daerah. Pelaksanaan survei IKM dilakukan secara periodik sebagai bentuk

komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Survei IKM mencakup berbagai unsur pelayanan, antara lain persyaratan pelayanan, prosedur dan mekanisme layanan, waktu penyelesaian, biaya atau tarif, produk layanan, kompetensi dan perilaku petugas, kualitas sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan, saran, dan masukan. Hasil pengukuran IKM memberikan gambaran objektif mengenai persepsi masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap kinerja penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Secara umum, hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tanah Laut berada pada kategori **baik**, yang mencerminkan adanya peningkatan kinerja pelayanan serta keseriusan perangkat daerah dalam memberikan pelayanan yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Capaian ini tidak terlepas dari berbagai upaya perbaikan yang dilakukan, seperti penyederhanaan prosedur pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, serta perbaikan sarana dan prasarana pelayanan.

Meskipun demikian, hasil survei IKM juga menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi aspek-aspek pelayanan yang masih perlu ditingkatkan. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara berkelanjutan mendorong seluruh perangkat daerah untuk menindaklanjuti hasil survei IKM melalui penyusunan rencana perbaikan layanan, peningkatan inovasi pelayanan publik, serta penguatan budaya kerja yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan dengan menjadikan Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan peningkatan kinerja pelayanan. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada pelayanan.

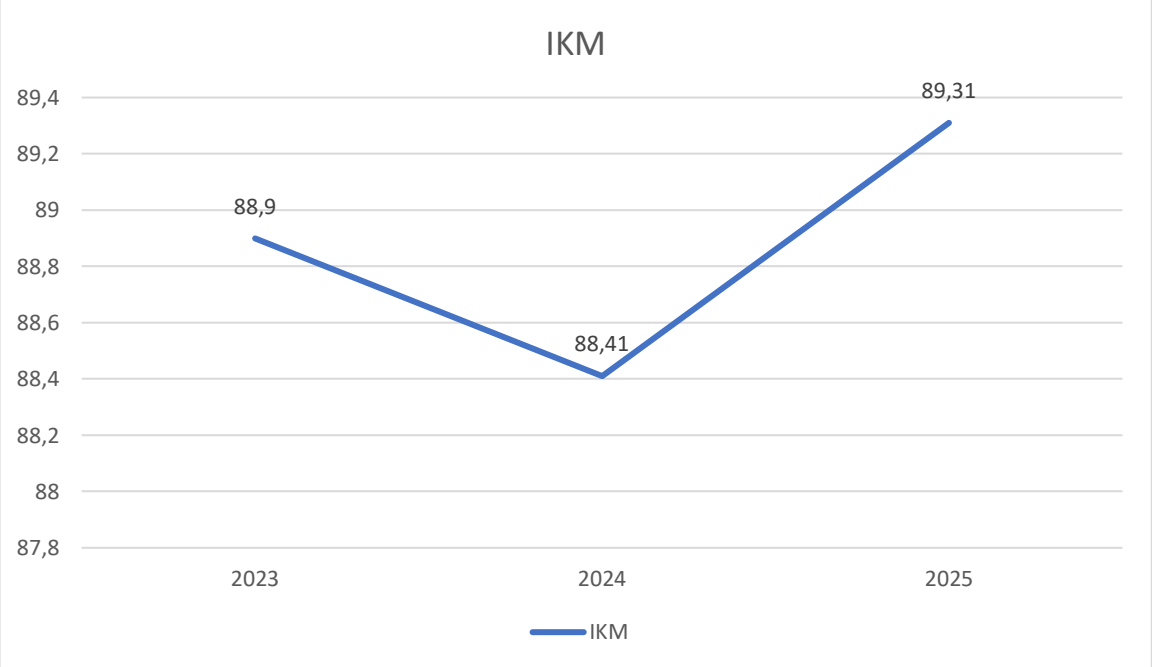
Secara umum, Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tanah Laut berada pada kategori **Sangat Baik**,

yang mencerminkan adanya peningkatan kinerja pelayanan serta keseriusan perangkat daerah dalam memberikan pelayanan yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Capaian ini tidak terlepas dari berbagai upaya perbaikan yang dilakukan, seperti penyederhanaan prosedur pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, serta perbaikan sarana dan prasarana pelayanan.

Indeks kepuasan masyarakat hasil verifikasi oleh KemenpanRB tahun 2025 adalah 89,31. Terjadi kenaikan sebesar 0,9 point jika dibandingkan tahun 2024 yaitu 88,41. Dari tahun 2023 indeks kepuasan masyarakat sudah berkategori Baik, peningkatan indeks kepuasan masyarakat dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.12.3

Indeks Kepuasan Masyarakat Kab.Tanah Laut tahun 2023-2025



Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat mandiri kepada seluruh perangkat daerah setiap triwulannya. Berikut hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat mandiri yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah beserta rencana tindak lanjutnya.

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
1.	Sekretariat Daerah	Triwulan 1 (Januari-Maret)	3,68	3,99	3,57	3,81	3,59	3,61	3,64	3,53	3.81	**92,26**	**A (sangat baik)**	150	SKM Online	Unsur Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	Melakukan Sosialisasi dan Monitoring
		Triwulan 2 (April - Juni)	3,69	3,75	3,67	3,92	3,89	3,75	3,72	3,66	3,84	**94,05**	**A (sangat baik)**	150	SKM Online	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Melakukan Sosialisasi WBBM
		Triwulan 3 (Juli - September)	3,93	3,85	3,91	3,95	3,95	3,93	3,93	3,93	3,96	**98,09**	**A (sangat baik)**	150	SKM Online	Waktu Penyelesaian	Diadakan rapat internal terkait penerapan standar pelayanan, baik itu ketepatan, penyelesaian serta memastikan kualitas pelayanan
		Triwulan 4 (Oktober – Desember)	3,87	3,94	3,94	4,00	3,97	4,00	3,98	3,98	4,00	**99,01**	**A (sangat baik)**	150	SKM Online	Persyaratan	Monitoring dan Evaluasi

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
		Rerata Tahunan	3,793	3,883	3,773	3,920	3,850	3,823	3,818	3,775	3,903	**95,85**	**A (sangat baik)**	600			
2.	Sekretariat DPRD	Triwulan 1 (Januari-Maret)	3,33	3,30	3,32	3,74	3,33	3,30	3,39	3,22	3,57	**84,64**	**B (Baik)**	168	SKM Manual	Sarana Prasarana Pelayanan	Perbaikan Sarana dan prasarana
		Triwulan 2 (April - Juni)	3,65	3,65	3,48	3,26	3,70	3,63	3,61	3,45	3,74	**92,04**	**A (sangat baik)**	179	SKM Manual	Sarana dan prasarana	melakukan pemenuhan sarana dan prasarana yang masih kurang
		Triwulan 3 (Juli - September)	3,27	3,40	3,26	4,26	3,34	3,26	3,35	3,36	3,84	**87,00**	**B (Baik)**	180	SKM Manual	Unsur Waktu Pelayanan	Waktu Pelayanan yang lebih menyesuaikan
		Triwulan 4 (Oktober – Desember)	3,5	3,55	3,36	4,26	3,47	3,46	3,47	3,44	3,72	**89,44**	**A (sangat baik)**	180	SKM Manual	Waktu Penyelesaian	Memaksimalkan manajemen waktu
		Rerata Tahunan	3,438	3,475	3,355	3,880	3,460	3,413	3,455	3,368	3,718	**88,28**	**B (Baik)**	707			
3.	Inspektorat	Triwulan 1 (Januari-Maret)	3,384	3,365	3,414	3,793	3,502	3,463	3,552	3,542	3,557	**87,61**	**B (Baik)**	203	SKM Online	Prosedur Pelayanan	Membuat SOP terkait Prosedur Pelayanan dan

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
																	mengadakan Pelatihan Layanan Prima
		Triwulan 2 (April - Juni)	3,395	3,395	3,388	3,974	3,599	3,421	3,414	3,553	3,447	**87,65**	**B (Baik)**	152	SKM Online	Kecepatan Pelayanan	dengan diadakan rapat internal secara rutin dengan agenda pembahasan kinerja dari Inspektorat
		Triwulan 3 (Juli - September)	3.119	2.969	2.87	3.788	3.332	3.104	3.15	3.301	3.212	**80.04**	**B (Baik)**	193	SKM Online	Waktu Penyelesaian	Diadakan rapat internal terkait penerapan standar pelayanan, baik itu ketepatan, penyelesaian serta memastikan kualitas pelayanan
		Triwulan 4 (Oktober – Desember)	3,329	3,288	3,218	3,941	3,606	3,394	3,394	3,476	3,406	**86.17**	**B (Baik)**	170	SKM Online	Kecepatan Pelayanan	rencana selanjutnya akan dibuatkan sistem aplikasi seperti pembuatan rekomendasi bebas

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
																	temuan, menugaskan petugas yang lebih kompeten dibidang pelayanan.
		Rerata Tahunan	3,307	3,254	3,223	3,874	3,510	3,346	3,378	3,468	3,406	**85,37**	**B (Baik)**	718			
4.	BAPPERIDA	Triwulan 1 (Januari-Maret)	3,47	3,55	3,38	4,00	3,71	3,65	3,67	3,73	3,95	**91,04**	**A (sangat baik)**	150	SKM Manual	Sarana dan Prasarana	Peningkatan sarana dan prasarana
		Triwulan 2 (April - Juni)	3,47	3,55	3,38	4,00	3,71	3,65	3,67	3,76	3,97	**91,15**	**A (sangat baik)**	150	SKM Manual	Sarana dan Prasarana	Peningkatan sarana dan prasarana
		Triwulan 3 (Juli - September)	3,51	3,57	3,51	4,00	3,71	3,59	3,80	3,73	3,95	**91,76**	**A (sangat baik)**	150	SKM Manual	Persyaratan & Pelayanan	Mempermudah persyaratan dan akan meningkatkan pelayanan
		Triwulan 4 (Oktober – Desember)	3,77	3,78	3,79	3,83	3,84	3,83	3,84	3,84	3,89	**94,60**	**A (sangat baik)**	150	SKM Manual	Persyaratan	Mempermudah persyaratan
		Rerata Tahunan	3,555	3,613	3,515	3,958	3,743	3,680	3,745	3,765	3,940	**92,14**	**A (sangat**	600			

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
													baik)				
5.	BKPSDM	Triwulan 1 (Januari-Maret)	3,873	3,887	3,893	3,947	3,880	3,873	3,893	3,887	3,933	**96,75**	**A (sangat baik)**	150	SKM Online	Persyaratan Pelayanan	Mengadakan Sosialisasi
		Triwulan 2 (April - Juni)	3,987	3,967	3,993	4,000	3,980	3,987	3.980	3,987	4,000	**99,00**	**A (sangat baik)**	150	SKM Online	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Meninjau prosedur yang sudah dijalankan dan menyesuaikan dengan keperluan pelayanan Melaksanakan Forum Konsultasi Publik yang dapat menampung saran dan masukan pengguna layanan
		Triwulan 3 (Juli - September)	3,980	3,987	3,967	4,000	3,980	3,987	3,987	3,973	4,000	**99,00**	**A (sangat baik)**	150	SKM Online	unsur Waktu Penyelesaian	Mengevaluasi standar waktu dalam memberikan pelayanan, Menambah tenaga Front Office agar waktu penyelesaian bisa lebih

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
																	ditingkatkan (mempercepat proses pelaksanaan pelayanan)
		Triwulan 4 (Oktober – Desember)	3,96	3,967	3,947	3,973	3,993	3,993	3,993	3,987	4,000	**98,75**	**A (sangat baik)**	150	SKM Online	Mengevaluasi standar waktu dalam memberikan pelayanan, Menambah tenaga Front Office agar waktu penyelesaian bisa lebih ditingkatkan (mempercepat proses pelaksanaan pelayanan)	Memperbaharui persyaratan layanan yang mengalami perubahan persyaratan dan mensosialisasikannya
		Rerata Tahunan	3,950	3,952	3,950	3,980	3,958	3,960	3,963	3,959	3,982	**98,38**	**A (sangat baik)**	600			
6.	BPKAD	Triwulan 1 (Januari-Maret)	3,81	3,74	3,86	4,00	3,85	3,85	3,83	3,65	3,63	**95,06**	**A (sangat baik)**	150	SKM Manual	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Menyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana
		Triwulan 2 (April - Juni)	3,70	3,72	3,67	3,97	3,69	3,69	3,77	3,71	3,97	**94,13**	**A (sangat baik)**	150	SKM Manual	Waktu Penyelesaian Pelayanan	Melakukan evaluasi prosedur dan alur pelayanan serta

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
																	Penerapan standar pelayanan yang lebih ketat dan terukur
		Triwulan 3 (Juli - September)	3,84	3,76	3,77	4,00	3,82	3,77	3,81	3,84	3,97	**96,07**	**A (sangat baik)**	150	SKM Manual	Waktu Penyelesaian Pelayanan	perbaikan sistem, mekanisme serta prosedur pelayanan dengan melakukan review, penyederhanaan SOP dan mengoptimalkan pelayanan berbasis digital
		Triwulan 4 (Oktober – Desember)	3,88	3,83	3,89	4,00	3,88	3,85	3,87	3,88	3,95	**97,33**	**A (sangat baik)**	150	SKM Manual	Prosedur Pelayanan	Memperbaiki prosedur pelayanan
		Rerata Tahunan	3,808	3,763	3,798	3,993	3,810	3,790	3,820	3,770	3,880	**95,65**	**A (sangat baik)**	600			
7.	Badan Pendapatan	Triwulan 1 (Januari-	3,27	3,34	3,33	4,00	3,31	3,36	335	3,10	3,68	**85,42**	**B (Baik)**	105	SKM Manual	Unsur yang perlu di prioritaskan	Dilihat dari unsur Kualitas

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
	Daerah	Maret)														untuk perbaikan adalah unsur kualitas sarana dan prasarana	Sarana dan Prasarana, maka perlu diupayakan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta perilaku pelaksana layanan dalam memberikan layanan kepada publik, sehingga masyarakat yang mendapatkan layanan dapat merasa lebih nyaman
		Triwulan 2 (April - Juni)	3,27	3.35	3,34	4,00	3,32	3,38	3,36	3,21	3,68	**85,83**	**B (Baik)**	107	SKM Manual	petugas layanan dapat memberikan informasi yang cukup dan dapat dipahami oleh masyarakat, sehingga masyarakat sebagai penerima layanan bisa	Untuk meningkatkan kualitas pelayanannya untuk bisa mencapai nilai maksimal dan kepercayaan publik semakin meningkat.

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
																memahami bahwa semua layanan sudah sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.	
		Triwulan 3 (Juli - September)	3,27	3,35	3,34	4,00	3,32	3,37	3,36	3,41	3,69	**86,47**	**B (Baik)**	102	SKM Manual	Kompetensi Pelaksana Layanan	perlu diupayakan agar petugas pelayanan selaku pelaksana layanan berupaya untuk memberikan pelayanan lebih kompeten lagi
		Triwulan 4 (Oktober – Desember)	3,28	3,36	3,35	4,00	3,32	3,37	3,37	3,39	3,69	**86,48**	**B (Baik)**	105	SKM Manual	Unsur Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan.	Perlu diupayakan agar setiap pengaduan, saran & masukan yang masuk ke Kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Tanah Laut menjadi perhatian

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
																	khusus oleh petugas pelayanan.
		Rerata Tahunan	3,273	3,350	3,340	4,000	3,318	3,370	3,360	3,278	3,685	**86,05**	**B (Baik)**	419			
8.	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Triwulan 1 (Januari-Maret)	3,48	3,40	3,36	4,00	3,39	3,39	3,47	3,83	3,37	**87,16**	**B (Baik)**	150	SKM Manual	Waktu Pelayanan	Dilakukan Perbaikan Pelayanan
		Triwulan 2 (April - Juni)	3,47	3,40	3,33	4,00	3,37	3,38	3,44	3,82	3,36	**86,85**	**B (Baik)**	150	SKM Manual	mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah ada, dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama mempertahankan kejelasan dan kepastian petugas pelayanan serta kenyamanan lingkungan	Perlu pemberian penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi dan terus memotivasi untuk mendapatkan prestasi di masa yang akan datang serta mempertimbangkan kesejahteraan petugas pelayanan dalam bentuk insentif khusus

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
		Triwulan 3 (Juli - September)	3,47	3,41	3,35	4,00	3,38	3,40	3,47	3,83	3,43	**87,34**	**B (Baik)**	150	SKM Manual	Secara keseluruhan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sangat baik, namun demikian untuk kedepan tetap tetap dilakukan perbaikan pada setiap pelayanan yang diberikan kepada mayarakat, sehingga dapat memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, aman, dan mudah	Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas melalui pemberian pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja atau motivasi petugas dan menetapkan standardisasi internal mengenai sikap layanan serta disiplin kerja
		Triwulan 4 (Oktober – Desemb	3,48	3,43	3,36	4,00	3,43	3,43	3,52	3,84	3,46	**87,94**	**B (Baik)**	150	SKM Manual	perbaikan dikecepatan waktu melakukan penyelesaian	memperbaiki kecepatan responden

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
		er)															
		Rerata Tahunan	3,475	3,410	3,350	4,000	3,393	3,400	3,475	3,830	3,405	**87,32**	**B (Baik)**	600			
9.	BPBD	Triwulan 1 (Januari-Maret)	3,320	3,307	3,593	4,000	3,327	3,640	3,453	3,447	3,340	**86,42**	**B (Baik)**	150	SKM Online	Prosedur pelayanan	Peningkatan prosedur Pelayanan
		Triwulan 2 (April - Juni)	3,32	3,44	3,63	4,00	3,51	3,64	3,45	3,45	3,54	**87,95**	**B (Baik)**	150	SKM Online	Persyaratan Pelayanan. Prosedur Pelayanan. Kualitas Sarana dan Prasana Pelayanan.	Meningkatkan unsur tersebut
		Triwulan 3 (Juli - September)	3,35	3,45	3,63	4,00	3,51	3,64	3,45	3,45	3,54	**88,04**	**B (Baik)**	150	SKM Online	U8, U2, U1	-
		Triwulan 4 (Oktober – Desember)	3,38	3,45	3,59	4,00	3,51	3,63	3,47	3,48	3,54	**88,17**	**B (Baik)**	150	SKM Online	Persyaratan Pelayanan, Prosedur Pelayanan, dan Sikap Keramahan Petugas Pelayanan	Merevisi standar operasional prosedur (SOP) terkait persyaratan layanan dan menghapus persyaratan ganda atau tidak perlu. Mempublikasikan daftar

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
																	persyaratan yang sudah diperbarui secara jelas di berbagai media (papan informasi, website resmi unit, dan media sosial) agar mudah diakses masyarakat. Membuat alur pelayanan yang lebih ringkas dan memangkas tahapan yang tidak memberikan nilai tambah. Mensosialisasikan alur pelayanan yang baru kepada masyarakat secara masif, termasuk melalui media cetak dan online unit layanan. Memastikan setiap

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
																	petugas pelayanan mematuhi SOP alur yang telah ditetapkan. Mengadakan pelatihan (soft skills) secara berkala bagi petugas pelayanan mengenai etika pelayanan publik, komunikasi efektif, dan manajemen komplain. Menerapkan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja petugas secara rutin terkait aspek keramahan. Memberikan apresiasi atau reward kepada petugas dengan kinerja terbaik dan teguran bagi yang kurang

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
																	optimal. Memastikan penanganan keluhan dilakukan secara intensif, komunikatif, dan responsif.
		Rerata Tahunan	3,343	3,412	3,611	4,000	3,464	3,638	3,456	3,457	3.490	**87,65**	**B (Baik)**	600			
10.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Triwulan 1 (Januari-Maret)	3,45	3,46	3,33	3,94	3,34	3,37	3,40	3,31	3,87	**87,41**	**B (Baik)**	150	SKM Manual	Waktu penyelesaian pelayanan	Promosi dan edukasi menggunakan flowchart alur di media mading
		Triwulan 2 (April - Juni)	3,29	3,38	3,21	3,94	3,40	3,31	3,38	3,24	3,85	**86,11**	**B (Baik)**	84	SKM Manual	Waktu Penyelesaian Pelayanan	Sosialisasi standar pelayanan kepada petugas (penekanan pada penyelesaian tiap tahap sesuai standar waktu)
		Triwulan 3 (Juli - September)	3,29	3,38	3,21	3,94	3,40	3,31	3,38	3,24	3,85	**86,11**	**B (Baik)**	84	SKM Manual	Waktu Penyelesaian Pelayanan	Mengevaluasi Tindak lanjut / standar

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
																	waktu proses pelayanan
		Triwulan 4 (Oktober – Desember)	3,33	3,31	3,24	3,89	3,29	3,34	3,38	3,25	3,94	**86,01**	**B (Baik)**	140	SKM Manual	Waktu Pemyelesaian Pelayanan	Meningkatkan Efiensi Standar Pelayanan
		Rerata Tahunan	3,370	3,393	3,273	3,925	3,360	3,355	3,405	3,293	3,915	**86,91**	**B (Baik)**	488			
11.	Dinas Kesehatan	Triwulan 1 (Januari-Maret)	3,436	3,494	3,911	3546	3,577	3,549	3,549	3,460	3,831	**88,97**	**A (sangat baik)**	350	SKM Online	Persyaratan	Peningkatan respon pengaduan pelayanaan, Melaksanakan prosedur yang semudah mungkin untuk meningkatkan pelayanan,Meningkatkan kemudahan dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
		Triwulan 2 (April - Juni)	3,559	3,408	4,000	3,630	3,640	3,555	3,526	3,640	3,725	**89,90**	**A (sangat baik)**	211	SKM Online	Pengaduan pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat. Dikarenakan prosedur persyaratan yang banyak	Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut : Prosedur dan persyaratan pelayanan yang masih sangat banyak Pengaduan masih sangat lambat ditindak lanjut

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
		Triwulan 3 (Juli - September)	3,555	3,404	3,995	3,628	3,647	3,564	3,560	3,628	3,729	**89,96**	**A (sangat baik)**	218	SKM Online	Pengaduan pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat. Dikarenakan prosedur persyaratan yang terlalu ribet	Peningkatan respon pengaduan pelayanaan, Melaksanakan prosedur yang semudah mungkin untuk meningkatkan pelayanan
		Triwulan 4 (Oktober – Desember)	3,550	3,418	3,991	3,623	3,645	3,568	3,559	3,632	3,732	**89,98**	**A (sangat baik)**	220	SKM Online	Prosedur dan persyaratan pelayanan yang masih sangat banyak	Meningkatkan kemudahan dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif
		Rerata Tahunan	3,525	3,431	3,974	3,607	3,627	3,559	3,549	3,590	3,754	**89,70**	**A (sangat baik)**	999			
12.	DPUPRP	Triwulan 1 (Januari-Maret)	3,44	3,59	3,40	3,52	3,51	3,42	3,42	3,41	3,50	**86,67**	**B (Baik)**	150	SKM Manual	Waktu Pelayanan, Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan, Kompetensi Pelaksana	Proses pelayanan dipercepat, input data bisa dengan menggunakan pelayanan internet, Pelayanan

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
																	lumayan lama dan harus bolak balik, Pelayanan ditingkatkan, melayani dengan senyum dan ramah
		Triwulan 2 (April - Juni)	3,47	3,57	3,49	3,57	3,53	3,53	3,58	3,54	3,58	**88,47**	**A (sangat baik)**	150	SKM Manual	Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu persyaratan, waktu penyelesaian pelayanan, produksi layanan serta kompetensi pelaksana	Proses pelayanan dipercepat, input data bisa dengan menggunakan pelayanan internet, Pelayanan lumayan lama dan harus bolak balik, Pelayanan ditingkatkan, melayani dengan senyum dan ramah.
		Triwulan 3 (Juli - September)	3,56	3,66	3,56	3,64	3,53	3,60	3,58	3,56	3,66	**89,89**	**A (sangat baik)**	150	SKM Manual	Produksi layanan, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Persyaratan dan Waktu Pelayanan.	1.Evaluasi terhadap standar pelayanan (SOP, alur kerja, kinerja petugas), monitoring

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
																	kualitas layanan secara berkala, pengembangan kapasitas SDM agar layanan tetap optimal, penggunaan teknologi informasi untuk efisiensi layanan, audit mutu layanan (internal/eksternal). 2. Mencatat dan mengklasifikasikan pengaduan, menentukan pihak yang bertanggung jawab dalam penanganan, memberikan respon tepat waktu dan

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
																	solusi atas pengaduan, evaluasi penyebab utama dari pengaduan untuk mencegah pengulangan, sosialisasi saluran pengaduan (email, hotline, kotak saran) 3.Menyediakan saluran resmi untuk menerima saran (survey, form digital, forum pengguna), menghimpun dan menganalisis masukan secara berkala,

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
																	menyusun rekomendasi perbaikan berdasarkan saran, menerapkan perubahan yang relevan dan mengomunikasikannya kepada public, memberikan umpan balik bahwa saran telah ditindaklanjuti. 4. Menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai persyaratan dan waktu pelayanan, melakuka

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
																	n evaluasi dan penyesuaian terhadap waktu pelayanan bila terjadi keterlambatan, menyederhanakan persyaratan yang dianggap rumit atau tidak relevan., memberikan pelatihan kepada petugas agar pelayanan lebih cepat dan tepat.
		Triwulan 4 (Oktober – Desember)	3,49	3,66	3,56	3,62	3,58	3,64	3,62	3,62	3,60	**89,91**	**A (sangat baik)**	150	SKM Manual	Persyaratan, waktu pelayanan dan produksi layanan	Melakukan peninjauan ulang daftar persyaratan setiap jenis layanan untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
																	terbaru, menyederhanakan persyaratan yang dianggap terlalu banyak atau tidak relevan oleh masyarakat, menghapus persyaratan yang bersifat redundant atau berulang, menyediakan checklist persyaratan yang lebih jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Menyesuaikan standar waktu pelayanan agar realistis namun tetap cepat, memastikan seluruh petugas memahami dan mematuhi standar waktu yang

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
																	telah ditetapkan, menampilkan standar waktu pelayanan pada ruang pelayanan, melakukan pengukuran waktu pelayanan secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan standar. Melakukan mapping proses untuk mengetahui bagian mana yang belum efisien, mengidentifikasi hambatan yang menyebabkan layanan tidak konsisten atau kualitasnya berfluktuasi, melakukan perbaikan prosedur

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
																	agar proses lebih sederhana, cepat, dan jelas.
		Rerata Tahunan	3,490	3,620	3,503	3,588	3,538	3,548	3,550	3.533	3.585	**88,74**	**A (sangat baik)**	600			
13.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman & LH	Triwulan 1 (Januari-Maret)	3,491	3,302	3,518	3,959	3,680	3,545	3,586	3,369	3,982	**90,00**	**A (sangat baik)**	223	SKM Manual	Kemampuan Kompetensi petugas	mengikuti beberapa kajian kajian
		Triwulan 2 (April - Juni)	3,722	3,639	3,643	4,000	3,661	3,722	3,705	3,599	3,934	**93,31**	**A (sangat baik)**	228	SKM Manual	Sarana dan prasarana	Usulan untuk rehab gedung
		Triwulan 3 (Juli - September)	3,822	3,631	3,449	4,000	3,707	3,853	3,556	3,391	4,000	**92,71**	**A (sangat baik)**	226	SKM Manual	sarana dan prasarana	Pembekalan yang lebih lagi untuk pemanfaatan Sarana dan Prasarana
		Triwulan 4 (Oktober – Desember)	3,787	3,698	3,538	3,933	3,893	3,782	3,738	3,640	3,902	**94,10**	**A (sangat baik)**	226	SKM Manual	Sarana dan Prasarana	mengusulkan Anggaran penambahan dan peremajaan

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
		Rerata Tahunan	3,706	3,568	3,537	3,973	3,735	3,726	3,646	3,500	3,955	**92,53**	**A (sangat baik)**	903			
14.	Dinas Sosial	Triwulan 1 (Januari-Maret)	3,62	3,62	3,61	3,95	3,60	3,62	3,63	3,57	3,93	**91,97**	**A (sangat baik)**	150	SKM Online	Sarana dan Prasarana	Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya
		Triwulan 2 (April - Juni)	3,25	3,27	3,19	3,96	3,25	3,25	3,26	3,22	3,92	**84,81**	**B (Baik)**	150	SKM Online	Waktu Penyelesaian	Peningkatan waktu Penyelesaian
		Triwulan 3 (Juli - September)	3,30	3,46	3,30	3,99	3,29	3,29	3,32	3,26	3,95	**86,42**	**B (Baik)**	150	SKM Online	Sarana dan prasarana	Melakukan Perbaikan sarana dan prasarana
		Triwulan 4 (Oktober – Desember)	3,36	3,38	3,33	3,95	3,32	3,35	3,34	3,32	3,91	**86,71**	**B (Baik)**	150	SKM Online	Sarana dan prasarana	Melakukan Perbaikan sarana dan prasarana dengan rehap gedung
		Rerata Tahunan	3,383	3,433	3,358	3,963	3,365	3,378	3,388	3,343	3,928	**87,48**	**B (Baik)**	600			

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
15.	Dinas Kepemudaan & Olah Raga	Triwulan 1 (Januari-Maret)	3,77	3,64	3,31	3,36	3,77	3,77	3,62	3,69	3,46	**89,81**	**A (sangat baik)**	150	SKM Manual	Waktu Penyelesaian	Memperbaiki lagi dalam Waktu penyelesaian yang akan dilaksanakan
		Triwulan 2 (April - Juni)	3,76	3,65	3,74	3,38	3,79	3,75	3,63	3,28	3,42	**89,90**	**A (sangat baik)**	150	SKM Manual	Sarana dan Prasarana	terus meningkatkan Kualitas Pelayanan, terus berupaya melakukan perbaikan dalam Persyaratan Pelayanan dan terus kooperatif membantu mengidentifikasi masalah dan penyebabnya
		Triwulan 3 (Juli - September)	3,75	3,69	3,70	3,42	3,74	3,73	3,60	3,30	3,46	**89,94**	**A (sangat baik)**	150	SKM Manual	Sarana dan Prasarana	Diharapkan kedepan dapat membantu mengindentifikasi masalah dan penyebabnya, sehingga diharapkan kedepan dapat memberikan

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
																	inovasi dalam pelayana di Lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut.
		Triwulan 4 (Oktober – Desember)	3,77	3,66	3,68	3,44	3,74	3,78	3,69	3,27	3,47	**90,23**	**A (sangat baik)**	150	SKM Manual	Sarana dan Prasarana	perlunya langkah peningkatan kualitas sarana prasarana untuk mendukung pelayanan yang cepat, nyaman, aman, dan mudah diakses dan Menyempurnakan SOP agar lebih mudah diterapkan oleh petugas, Melakukan sosialisasi ulang SOP kepada semua pelaksana layanan di Lingkup

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
																	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut.
		Rerata Tahunan	3,763	3,660	3,608	3,400	3,760	3,758	3,635	3,385	3,453	**89.97**	**A (sangat baik)**	600			
16.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Triwulan 1 (Januari-Maret)	3,75	3,63	3,72	3,86	3,68	3,78	3,43	3,65	3,83	**92,53**	**A (sangat baik)**	150	SKM Online	dilihat dari nilai unsur pelayanan paling rendah	Melakukan Koordinasi dengan Pejabat terkait untuk meningkatkan kualitas pelayanan
		Triwulan 2 (April - Juni)	3,75	3,63	3,72	3,86	3,68	3,78	3,45	3,65	3,83	**92,75**	**A (sangat baik)**	150	SKM Online	Dilihat dari nilai unsur yang paling rendah	Kooperatif identifikasi masalah
		Triwulan 3 (Juli - September)	3,75	3,63	3,72	3,87	3,70	3,78	3,45	3,65	3,86	**93,00**	**A (sangat baik)**	150	SKM Online	dilihat dari nilai unsur pelayanan yang paling rendah	meningkatkan Kualitas Pelayanan
		Triwulan 4 (Oktober – Desember)	3,75	3,63	3,72	3,87	3,70	3,78	3,45	3,65	3,86	**93,00**	**A (sangat baik)**	150	SKM Online	dilihat dari nilai unsur pelayanan yang paling rendah	terus berupaya melakukan perbaikan dalam Perilaku Pelayanan dan terus

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
																	kooperatif membantu mengidentifikasi masalah dan penyebabnya, sehingga diharapkan kedepan dapat memberikan inovasi dalam pelayanan
		Rerata Tahunan	3,750	3,630	3,720	3,865	3,690	3,780	3,445	3,650	3,845	**92,82**	**A (sangat baik)**	600			
17.	Dinas Komunikasi ,Informatika Statistik & Persandian	Triwulan 1 (Januari-Maret)	3,36	3,45	3,33	3,88	3,52	3,51	3,31	3,49	3,75	**87,70**	**B (Baik)**	67	SKM Manual	Perilaku pelaksana	Peningkatan kapasitas pemberi layanan
		Triwulan 2 (April - Juni)	3,49	3,46	3,42	3,83	3,70	3,70	3,69	3,40	3,80	**90,20**	**A (sangat baik)**	80	SKM Manual	unsur sarana dan prasarana, unsur waktu penyelesaian, dan unsur sistem, mekanisme, dan prosedur	menyediakan fasilitas kamera tambahan untuk komputer verifikasi data, mengoptimalkan

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
																	pelayanan melalui whatsapp, dan penugasan kepada PPPK untuk memberikan pelayanan
		Triwulan 3 (Juli - September)	3,52	3,47	3,37	3,82	3,73	3,72	3,48	3,40	3,80	**89,60**	**A (sangat baik)**	59	SKM Manual	unsur waktu penyelesaian	mengoptimalkan pelayanan secara daring
		Triwulan 4 (Oktober – Desember)	3,46	3,57	3,47	3,84	3,70	3,71	3,51	3,51	3,87	**90,60**	**A (sangat baik)**	76	SKM Manual	persyaratan, waktu penyelesaian, sarana dan prasarana	memberikan informasi persyaratan pelayanan dengan media cetak
		Rerata Tahunan	3,458	3,488	3,398	3,843	3,663	3,660	3,498	3,450	3,805	**89,53**	**A (sangat baik)**	282			
18.	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	Triwulan 1 (Januari-Maret)	3,80	3,80	3,90	4,00	3,90	3,60	3,60	3,60	3,60	**93,68**	**A (sangat baik)**	150	SKM Manual	Sarana dan Prasarana	Meningkatkan teknologi pelayanan agar lebih afektif efisien
		Triwulan 2 (April - Juni)	3,05	3,06	3,04	4,00	3,07	3,08	3,18	3,20	3,64	**80,68**	**B (Baik)**	150	SKM Manual	unsur waktu penyelesaian	Peningkatan kapasitas SDM untuk mempercepa

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
																	t proses layanan dengan SDM yang kompetern
		Triwulan 3 (Juli - September)	3,369	3,327	3.357	3,726	3.405	3.357	3,375	3,357	3,506	**85.50**	**B (Baik)**	168	SKM Manual	Prosedur Pelayanan	Perbaikan Prosedur Pelayanan
		Triwulan 4 (Oktober – Desember)	2,845	2,845	2,833	3,375	2,976	2,851	3,077	2,923	3,345	**75,20**	**C (Kurang Baik)**	**202**	SKM Manual	Kecepatan Pelayanan	Memperbaiki pelayanan
		Rerata Tahunan	3,266	3,258	3,283	3,775	3,338	3,222	3,308	3,270	3,523	**83,77**	**B (Baik)**	670			
19.	Dinas Pariwisata	Triwulan 1 (Januari-Maret)	3,25	3,31	3,22	3,13	3,27	3,30	3,35	3,24	3,57	**82,31**	**B (Baik)**	150	SKM Manual	Fasilitas Umum	Dilakukan perbaikan Dimasukkan dalam Anggaran Perubahan maupun Murni pada tahun berikutnya
		Triwulan 2 (April - Juni)	3,12	3,23	3,23	3,41	3,22	3,20	3,23	3,24	3,76	**82,31**	**B (Baik)**	130	SKM Manual	Kualitas Sarana dan Prasarana serta Kompetensi Pelaksana	Melakukan Perbaikan Sarana dan Prasarana serta Mengemban

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
																	gkan Kompetensi Pelaksana
		Triwulan 3 (Juli - September)	3,32	3,34	3,32	3,14	3,46	3,34	3,34	3,34	3,82	**84,50**	**B (Baik)**	145	SKM Manual	Mengoptimalkan Biaya dan Tarif yang memiliki NRR Rendah	Memperbaiki dan Mengoptimalkan Kualitas Pelayanan dan Hal Penunjang Lainnya
		Triwulan 4 (Oktober – Desember)	3,29	3,35	3,36	3,10	3,51	3,39	3,41	3,33	3,81	**84,89**	**B (Baik)**	150	SKM Manual	Persyaratan dan Pelayanan serta Kewajaran Tarif	Monitoring dan Melakukan Evaluasi di Semua Aspek
		Rerata Tahunan	3,245	3,308	3,283	3,195	3,365	3,308	3,333	3,288	3,740	**83,50**	**B (Baik)**	575			
20.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	Triwulan 1 (Januari-Maret)	3,840	3,547	3,307	4,000	3,473	3,913	3,753	3,240	3,540	**89,69**	**A (sangat baik)**	150	SKM Manual	Kualitas Sarana dan Prasarana	Untuk memperbaiki kualitas sarpras dilakukan Pindah Gedung Kantor Baru
		Triwulan 2 (April - Juni)	3,40	3,48	3,51	3,92	3,68	3,44	3,48	3,20	3,66	**87,41**	**B (Baik)**	147	SKM Manual	Sarana dan Prasarana	Pindah Gedung Kantor Baru

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
		Triwulan 3 (Juli - September)	3,21	3,24	3,11	3,94	3,18	3,19	3,19	2,98	3,72	**81,85**	**B (Baik)**	528	SKM Manual	Sarana Prasarana	Perlu adanya upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah ada, dengan melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten dan berkelanjutan terutama pada sarana prasarana penunjang layanan misalnya penyediaan kursi/sofa sebagai ruang tunggu.
		Triwulan 4 (Oktober – Desember)	3,84	3,93	3,93	4,00	3,77	3,73	3,23	2,80	3,00	**88,63**	**A (sangat baik)**	703	SKM Manual	Sarana dan Prasarana	Gedung Baru
		Rerata Tahunan	3,573	3,549	3,464	3,965	3,526	3,568	3,413	3,055	3,480	**86.90**	**B (Baik)**	1528			

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
21.	DPMPTSP	Triwulan 1 (Januari-Maret)	3,66	3,71	3,45	3,99	3,61	3,68	3,66	3,63	3,53	**91,35**	**A (sangat baik)**	150	SKM Online	Waktu Penyelesaian	1. Memberi penjelasan kepada pemohon terkait gangguan website yang terjadi dikarenakan pembaharuan atau pemeliharaan. 2. Memberikan penjelasan kepada pemohon bahwa diperlukan jaringan yang cukup untuk mengakses Website OSS
		Triwulan 2 (April - Juni)	3,50	3,55	3,60	3,97	3,73	3,56	3,55	3,71	3,79	**91,43**	**A (sangat baik)**	150	SKM Online	Kesesuaian persyaratan pelayanan	Pihak DPMPTSP penjelasan secara langsung kepada pemohon terkait persyaratan.

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
		Triwulan 3 (Juli - September)	3,59	3,53	3,63	3,97	3,57	3,63	3,63	3,79	3,61	**91,48**	**A (sangat baik)**	150	SKM Online	Prosedur pelayanan	Memberi penjelasan kepada pemohon bahwa DPMPTSP menyediakan Layanan berbantuan OSS dengan tenaga pendamping bagi pelaku usaha dalam pembuatan NIB, salah satunya melalui inovasi yang tetuang dalam Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/490-KUM/2023 tentang Evektifitas Layanan Berbantuan Online Single Submission Dengan Kunjungan (ES DEGAN) Dinas Penanaman Modal Dan

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
																	Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut selain dengan menyediakan gerai/tempat khusus untuk pendampingan pembuatan NIB yang bertempat di MPP Tanah Laut.
		Triwulan 4 (Oktober – Desember)	3,44	3,63	3,61	3,92	3,66	3,55	3,61	3,75	3,74	**91,29**	**A (sangat baik)**	150	SKM Online	Peryaratan pelayanan	Memberi penjelasan kepada pemohon bahwa terdapat pembaharuan pada sistem OSS yang mencakup persyaratan Izin, Sehingga pemohon harus melengkapi dokumen sesuai dengan

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
																	persyaratan yang baru di perbaharui oleh sistem OSS
		Rerata Tahunan	3,548	3,605	3,573	3,963	3,643	3,605	3,613	3,720	3,668	**91,39**	**A (sangat baik)**	600			
22.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	Triwulan 1 (Januari-Maret)	3.160	3,113	3,113	3,793	3,107	3,160	3,187	3,100	3,667	**81,67**	**B (Baik)**	150	SKM Online	Masih ada pelayanag dengan kategori biaya pelayanan murah padahal gratis	Melakukan koordinasi dengan Penyuluh Keluarga Berencan (PKB) untuk perbaikan pelayanan
		Triwulan 2 (April - Juni)	3,160	3,113	3,113	3,793	3,107	3,160	3,187	3,100	3,667	**81,67**	**B (Baik)**	150	SKM Online	Waktu penyelesaian disesuaikan SOP	1. Meningkatkan Sosialisasi yang dapat dijangkau masyarakat luas melalui sosial media

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
																	elektronik dan non elektronik 2. Sosial media telah digunakan baik melalaui Facebook, Isntagram, Tiktok, Siaran Radio dan direncanakan membuat Fodcast, siaran langsung di sosial media 3. Pelatihan CTU kepada petugas medis secara bertahap
		Triwulan 3 (Juli - September)	3,267	3,160	3,093	3,687	3,180	3,260	3,293	3,247	3.740	**83,13**	**B (Baik)**	150	SKM Online	Waktu Penyelesaian Pelayanan	Melakukan perbaikan sistem pada pelayanan tersebut
		Triwulan 4 (Oktober –	3,147	3,133	3,127	3,807	3,140	3,153	3,207	3,207	3,627	**82,07**	**B (Baik)**	150	SKM Online	Kecepatan pelayanan	Perlu manajemen waktu serta meningkatan

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
		Desember)															kompetensi petugas pelayanan dengan tetap memperhatikan SOP yang berlaku
		Rerata Tahunan	3,184	3,130	3,112	3,770	3,134	3,183	3,219	3,164	3,675	**82,14**	**B (Baik)**	600			
23.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Triwulan 1 (Januari-Maret)	3,276	3,312	3,322	3,663	3,382	3,312	3,317	3,337	3,688	**84,94**	**B (Baik)**	200	SKM Manual	Persyaratan Pelayanan	Mempermudah Persyaratan Pelayanan
		Triwulan 2 (April - Juni)	3,291	3,312	3,362	3,643	3,397	3,312	3,332	3,357	3,678	**85,15**	**B (Baik)**	200	SKM Manual	Meningkatkan sikap dan perilaku petugas dalam melayani masyarakat	Meningkatkan kecepatan dan efisiensi waktu dalam menyelesaikan suatu layanan.
		Triwulan 3 (Juli - September)	3,307	3,322	3,367	3,688	3,447	3,347	3,382	3,407	3,709	**85,96**	**B (Baik)**	200	SKM Manual	sistem mekanisme dan prosedur	meningkatkan sistem mekanisme dan prosedur
		Triwulan 4 (Oktober	3,307	3,322	3,377	3,688	3,447	3,347	3,382	3,417	3,709	**86,01**	**B (Baik)**	200	SKM Manual	Waktu penyelesaian	lebih meningkatkan kualitas

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
		– Desember)															layanan
		Rerata Tahunan	3,295	3,317	3,357	3,671	3,418	3,330	3,353	3,380	3,696	**85,52**	**B (Baik)**	800			
24.	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub	Triwulan 1 (Januari-Maret)	3,28	3,34	3,30	3,46	3,37	3,36	3,39	3,29	3,22	**83,37**	**B (Baik)**	150	SKM Manual	Kualitas Sarana dan Prasarana	Perlunya peningkatan / perbaikan pada kualitas sarana dan prasarana di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
		Triwulan 2 (April - Juni)	3,30	3,32	3,34	3,49	3,36	3,37	3,36	3,23	3,25	**83,27**	**B (Baik)**	150	SKM Manual	Sarana dan Prasarana	DIrencanakan Perbaikan Sarana Pengujian Kendaraan Bermotor, Khususnya Ruang Tunggu Pelayanan dan Lantai Ruang Pengujian
		Triwulan 3 (Juli - September)	3,29	3,29	3,07	4,00	3,37	3,27	3,37	2,85	3,27	**82,62**	**B (Baik)**	150	SKM Manual	Sarana dan prasarana	Peningkatan Kenyamanan pada ruang tunggu,

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
																	Toilet dan Lantai Uji Berkala
		Triwulan 4 (Oktober – Desember)	3,30	3,40	3,22	4,00	3,25	3,30	3,33	3,13	3,33	**84,06**	**B (Baik)**	150	SKM Manual	Sarana dan Prasarana	Penganggaran perbaikan Fasilitas Pelayanan, Ruang Tunggu dan WC
		Rerata Tahunan	3,293	3,338	3,233	3,738	3,338	3,325	3,363	3,125	3,268	**83,33**	**B (Baik)**	600			
25.	UPT Pelabuhan & Penyeberangan Dishub	Triwulan 1 (Januari-Maret)	3,25	3,29	3,10	3,04	3,16	3,31	3,35	3,07	3,29	**80,07**	**B (Baik)**	150	SKM Manual	kualitas sarana dan prasarana	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana UPT Pelabuhan dan Penyeberangan
		Triwulan 2 (April - Juni)	3,25	3,29	3,10	3,04	3,16	3,31	3,35	3,07	3,29	**80,07**	**B (Baik)**	150	SKM Manual	Kualitas sarana dan prasrana (NRR 3.07) dan Kewajaran dan kepastian biaya pelayanan (NRR 3.04)	Pembangunan sarpras Dermaga di 2026

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
		Triwulan 3 (Juli - September)	3,24	3,29	3,11	3,05	3,18	3,31	3,32	3,07	3,29	**80,07**	**B (Baik)**	150	SKM Manual	Kewajaran biaya tarif dan Kualitas Sarana dan Prasarana	Pembangunan Sarana dan Prasarana agar dapat memonitoring berlangsungnya transaksi
		Triwulan 4 (Oktober – Desember)	3,25	3,23	3,13	3,09	3,22	3,28	3,33	3,05	3,27	**80,08**	**B (Baik)**	150	SKM Manual	Kualitas Sarana dan Prasarana	Pembangunan Dermaga Batakan Baru Tahun 2027
		Rerata Tahunan	3,248	3,275	3,110	3,055	3,180	3,303	3,338	3,065	3,285	**80,07**	**B (Baik)**	600			
26.	UPT Terminal & Perparkiran Dishub	Triwulan 1 (Januari-Maret)	3,29	3,27	3,03	2,93	3,42	2,95	2,71	3,43	3,37	**79,07**	**B (Baik)**	150	SKM Manual	Kecepatan Pelayanan	Melakukan Evalusai Kinerja
		Triwulan 2 (April - Juni)	3,24	3,46	3,04	3,07	3,53	3,01	3,00	3,35	3,33	**80,18**	**B (Baik)**	150	SKM Manual	Kualitas Pelayanan	Perbaikan Kualitas Pelayanan
		Triwulan 3 (Juli - September)	3,25	3,46	3,08	3,09	3,54	3,07	3,11	3,35	3,33	**81,27**	**B (Baik)**	150	SKM Manual	meningkatkan kemampuan petugas dalam memberika	memperbaiki yang masih kurang dan mempertahan kan yang

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
																pelayanan	sudah bagus,kalo bisa di tingkatkan lagi
		Triwulan 4 (Oktober – Desember)	3,29	3,41	3,15	3,13	3,57	3,09	3,19	3,33	3,29	**81,71**	**B (Baik)**	150	SKM Manual	perbaikan terhadap pelayanan	memperbaiki yang nilainya kurang dan mempertahan kan yang sudah bagus
		Rerata Tahunan	3,268	3,400	3,075	3,055	3,515	3,030	3,003	3,365	3,330	**80.56**	**B (Baik)**	600			
27.	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	Triwulan 1 (Januari-Maret)	3,51	3,53	3,50	4,18	3,44	3,51	3,54	3,49	4,01	**89,96**	**A (sangat baik)**	103	SKM Online	Produk Layanan dan Sarana Prasarana	Melakukan analisis, perencanaan dan penganggaran
		Triwulan 2 (April - Juni)	3,70	3,71	3,68	4,45	3,63	3,71	3,72	3,66	4,31	**95,10**	**A (sangat baik)**	250	SKM Online	Produk Layanan	Meningkatkan produk layanan
		Triwulan 3 (Juli - September)	3,49	3,42	3,44	4,00	3,32	3,40	3,45	3,38	3,88	**87,36**	**B (Baik)**	248	SKM Online	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Membuat Program Baru dan Jenis Bahan Pustaka yang barudan Inovatif

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
		Triwulan 4 (Oktober – Desember)	3,60	3,52	3,46	3,99	3,39	3,47	3,49	3,45	3,92	**88,84**	**A (sangat baik)**	164	SKM Online	sarana dan prasara	memenbuhi sarana prasara melalui penganggaran
		Rerata Tahunan	3,575	3,545	3,520	4,155	3,445	3,523	3,550	3,495	4,030	**90,32**	**A (sangat baik)**	765			
28.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan	Triwulan 1 (Januari-Maret)	3,377	3,420	3,274	3,884	3,362	3,391	3,406	3,145	3,754	**85,29**	**B (Baik)**	69	SKM Online	kecepatan waktu dalam memberikann Pelayanan	Peningkatan di aspek kecepatan waktu dalam memberikan n Pelayanan
		Triwulan 2 (April - Juni)	3,913	4,029	3,826	4,522	3,884	3,942	3,957	3,826	4,435	**99,92**	**A (sangat baik)**	80	SKM Online	Waktu Penyelesaian	Diperbaiki Dalam Waktu Penyelesaian Pekerjaan
		Triwulan 3 (Juli - September)	3,928	3,899	3,812	4,493	3,768	3,841	3,942	3,768	4,464	**98,76**	**A (sangat baik)**	81	SKM Online	Sarana dan Prasarana, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Melakukan evaluasi dalam pelayanan, sarana prasarana
		Triwulan 4 (Oktober – Desemb	3,870	3,899	3,739	4,420	3,884	3,884	3,913	3,797	4,507	**98,76**	**A (sangat baik)**	81	SKM Online	Waktu Penyelesaian Pelayanan	Melakukan Evaluasi pada waktu penyelesaian pelayanan

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
		er)															
		Rerata Tahunan	3,772	3,812	3,663	4,330	3,725	3,765	3,805	3,634	4,290	**95,68**	**A (sangat baik)**	311			
29.	Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan	Triwulan 1 (Januari-Maret)	3,172	3,233	3,200	3,389	3,194	3,172	3,178	3,044	3,122	**78,94**	**B (Baik)**	180	SKM Manual	Sarana dan Prasarana	Akan dikaji ulang kendala nya
		Triwulan 2 (April - Juni)	3,211	3,194	3,217	3,417	3,322	3,339	3,317	3,078	2,939	**79,84**	**B (Baik)**	180	SKM Manual	Penanganan Pengaduan	Perbaikan Penanganan Pengaduan
		Triwulan 3 (Juli - September)	3,400	3,406	3,350	3,356	3,400	3,450	3,428	3,189	3,150	**82,85**	**B (Baik)**	180	SKM Manual	Penanganan Pengaduan saran dan masukan	Dilakukan Perbaikan
		Triwulan 4 (Oktober – Desember)	3,628	3,617	3,539	3,633	3,589	3,650	3,611	3,500	3,700	**89,28**	**A (sangat baik)**	180	SKM Manual	Penanganan Pengaduan saran dan masukan	Dilakukan Perbaikan
		Rerata Tahunan	3,353	3,363	3,327	3,449	3,376	3,403	3,384	3,203	3,228	**82.73**	**B (Baik)**	720			
30.	Dinas Tenaga Kerja &	Triwulan 1 (Januari-	3,640	3,600	3,567	3,713	3,600	3,600	3,640	3,587	3,693	**90,58**	**A (sangat**	150	SKM Online	Waktu Penyelesaian Pelayanan	Perbaikan unsur yang paling

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
	Perindustrian	Maret)											**baik)**				rendah hasilnya dan menindak lanjuti beberapa saran/kritik yang didapatkan
		Triwulan 2 (April - Juni)	3,573	3,547	3,527	3,740	3,567	3,580	3,687	3,547	3,833	**90,47**	**A (sangat baik)**	150	SKM Online	Waktu Penyelesaian	Menindak lanjuti saran/kritik yang di sampaikan oleh responden
		Triwulan 3 (Juli - September)	3,640	3,620	3,567	3,773	3,593	3,653	3,707	3,680	3,900	**91,95**	**A (sangat baik)**	150	SKM Online	Waktu Penyelesaian	Perbaikan waktu penyelesaian dan peningkatan pelayanan
		Triwulan 4 (Oktober – Desember)	3,667	3,687	3,660	3,707	3,653	3,667	3,693	3,680	3,727	**91,96**	**A (sangat baik)**	150	SKM Online	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya yaitu Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
		Rerata Tahunan	3,630	3,614	3,580	3,733	3,603	3,625	3,682	3,624	3,788	**91.24**	**A (sangat baik)**	600			
31.	Satpol PP & Damkar	Triwulan 1 (Januari-Maret)	3,413	3,465	3,390	3,965	3,436	3,471	3,506	3,326	3,837	**88,36**	**A (sangat baik)**	172	SKM Manual	Penanganan Pengaduan	Mengevaluasi tahapan kegiatan dan Perbaikan secara bertahap
		Triwulan 2 (April - Juni)	3,459	3,483	3,413	3,942	3,436	3,453	3,448	3,442	3,826	**88,61**	**A (sangat baik)**	175	SKM Manual	Kecepatan pelayanan	Memberikan bimbingan kepada anggota
		Triwulan 3 (Juli - September)	3,488	3,488	3,463	3,959	3,438	3,512	3,562	3,388	3,942	**89,55**	**A (sangat baik)**	121	SKM Manual	Unsur yang menjadi prioritas perbaikan adalah Prosedur Pelayanan dengan nilai 3,37, karena masyarakat menilai proses pelayanan masih perlu disederhanakan agar lebih mudah, cepat, dan jelas.	Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan meliputi penyederhanaan dan standarisasi prosedur pelayanan, penyusunan diagram alur layanan yang informatif, serta peningkatan kompetensi petugas dalam memberikan penjelasan kepada

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
																	masyarakat.
		Triwulan 4 (Oktober – Desember)	3,485	3,485	3,415	3,962	3,423	3,515	3,546	3,377	3,938	**89,29**	**A (sangat baik)**	130	SKM Manual	Pengaduan Pengguna Layanan Petugas	1. Melakukan evaluasi terhadap mekanisme penanganan pengaduan yang sudah ada untuk memastikan tindak lanjut pengaduan lebih cepat dan responsif. 2. Membentuk tim pengelola pengaduan internal yang terkoordinasi dengan bidang-bidang terkait di Satpol PP dan Damkar. 3. Menyedia

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
																	kan saluran pengaduan digital melalui WhatsApp dan media sosial resmi untuk memudahkan masyarakat menyampaikan aspirasi. 4. Melakukan pelatihan petugas front office mengenai etika pelayanan dan respon cepat terhadap keluhan masyarakat.
		Rerata Tahunan	3,461	3,480	3,420	3,957	3,433	3,488	3,516	3,383	3,886	**88,95**	**A (sangat baik)**	598			

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
32.	Kecamatan Pelaihari	Triwulan 1 (Januari-Maret)	3,907	3,873	3,867	3,980	3,893	3,880	3,887	3,880	3,960	**97,48**	**A (sangat baik)**	150	SKM Online	sudah memenuhi standar, sehingga tidak ada sudah memenuhi standar, sehingga tidak ada perbaikan	sudah memenuhi standar, sehingga tidak ada perbaikan
		Triwulan 2 (April - Juni)	3,887	3,880	3,833	3,960	3,840	3,833	3,873	3,880	4,000	**97,09**	**A (sangat baik)**	150	SKM Online	Waktu Pelayanan	Perbaikan Efektivitas pelayanan
		Triwulan 3 (Juli - September)	3,847	3,840	3,820	3,960	3,813	3,840	3,887	3,873	3,973	**96,72**	**A (sangat baik)**	150	SKM Online	Pelayanan	Akan dilaksanakan FKP
		Triwulan 4 (Oktober – Desember)	3,771	3,521	3,625	3,688	3,667	3,354	3,458	3,896	3,771	**90,88**	**A (sangat baik)**	48	SKM Online	Kompetensi pelaksana	Melaksankan FKP
		Rerata Tahunan	3,853	3,779	3,786	3,897	3,803	3,727	3,776	3,882	3,926	**95,54**	**A (sangat baik)**	498			
33.	Kecamatan Bati-Bati	Triwulan 1 (Januari-Maret)	3,640	3,593	3,433	4,000	3,613	3,720	3,720	3,620	3,933	**92,33**	**A (sangat baik)**	150	SKM Manual	waktu penyelesaian, sistem mekanisme dan prosedur pelayanan	menyebar luaskan informasi pelayanan di kecamatan bati-bati

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
																,sarana dan prasarana pelayanan	dengan media sosial,memberikan sosialisasi kepada desa-desa tentang persyaratan yang dibutuhkan pada setiap jenis pelayanan di kecamatan
		Triwulan 2 (April - Juni)	3,733	3,500	3,433	4,000	3,607	3,713	3,693	3,547	3,827	**91,72**	**A (sangat baik)**	150	SKM Manual	1.waktu penyelesaian 2. sistem,mekanisme dan prosedur pelayanan 3.sarana dan prasarana pelayanan	menyebarluaskan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat ,memutahirkan SOP ,melaksanakan evaluasi terhadap produk spesifikasi dalam pemberian pelayanan
		Triwulan 3 (Juli - September)	3,807	3,680	3,527	4,000	3,733	3,853	3,800	3,633	3,913	**94,20**	**A (sangat baik)**	150	SKM Manual	Waktu Penyelesaian	Memutakhirkan Standar Opersional Prosedur (SOP) Pelayanan

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
																	sesuai dengan SK Standar Pelayanan guna meningkatkan efektifitas dan optimalisasi pemberian layanan kepada masyarakat
		Triwulan 4 (Oktober – Desember)	3,833	3,693	3,507	4,000	3,727	3,860	3,767	3,640	3,880	**94,09**	**A (sangat baik)**	150	SKM Manual	Waktu Penyelesaian	Memutakhirkan Standar Opersional Prosedur (SOP) Pelayanan sesuai dengan SK Standar Pelayanan guna meningkatkan efektifitas dan optimalisasi pemberian layanan kepada masyarakat
		Rerata Tahunan	3,753	3,617	3,475	4,000	3,670	3,787	3,745	3,610	3,888	**93,09**	**A (sangat baik)**	600			

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
34.	Kecamatan Takisung	Triwulan 1 (Januari-Maret)	3,947	3,900	3,873	4,000	3,820	3,907	3,933	3,887	3,880	**87,00**	**B (Baik)**	150	SKM Manual	Produk Spesifikasi jenis pelayanan	Melaksanakan pembinaan langsung ke desa untuk administrasi pelayanan didesa agar lebih maksimal dalam kelengkapan administrasi pelayanan di desa se kecamatan Takisung
		Triwulan 2 (April - Juni)	3,980	3,947	3,933	4,000	3,913	3,947	3,967	3,940	3,913	**88,00**	**B (Baik)**	150	SKM Manual	sarana prasarana	Mengusulkan penambahana sarana dan prasarana di ruang pelayanan untuk kenyamanan pelayanan terhadap masyarakat
		Triwulan 3 (Juli - September)	3,987	3,967	3,947	4,000	3,947	3,967	3,980	3,973	3,973	**88,50**	**A (sangat baik)**	150	SKM Manual	Penanganan pengaduan dan masukan dan Kesopananan dan keramahan petugas	Mengadakan Pembinaan yang intens kepada petugas pelayanan baik pelayanan

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
																	umum dan khusus serta sosialisasi terkait penanganan aduan terhadap masyarakat
		Triwulan 4 (Oktober – Desember)	3,993	4,000	3,987	4,000	3,993	3,993	3,993	3,993	3,987	**89,00**	**A (sangat baik)**	150	SKM Manual	sarana dan prasarana	Membuat rencana anggaran untuk perbaikan sarana dan prasarana untuk diusulkan pada anggaran Kecamatan tahun berikutnya
		Rerata Tahunan	3,977	3,950	3,935	4,000	3,918	3,954	3,968	3,948	3,938	**88,13**	**B (Baik)**	600			
35.	Kecamatan Batu Ampar	Triwulan 1 (Januari-Maret)	3,38	3,48	3,48	4,00	3,38	3,48	3,54	4,00	3,36	**88,28**	**B (Baik)**	50	SKM Manual	Pelayanan masih dirasa belum maksimal pada unsur Sarana dan prasarana dengan nilai 3,360 selanjutnya Persyaratan	Dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan publik akan ditindaklanjuti dengan perbaikan dan peningkatan

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
																pelayanan yang mendapatkan nilai 3,380 serta Produk spesifikasi jenis pelayanan juga mendapatkan nilai 3,360	kualitas pada prioritas dari unsur yang paling terendah nilainya yaitu unsur Sarana dan prasarana, Persyaratan pelayanan dan pruduk spesifikasi jenis pelayanan, hal tersebut antara lain ditindaklanjuti dengan meningkatkan inovasi pelayanan berupa fasilitas tontonan dan bacaan saat menunggu pelayanan, menginformasikan kembali berkenaan persyaratan pelayanan kepada warga/perangkat Desa untuk

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
																	pelayanan dengan syarat tertentu dan membuat daftar ceklis dari kelengkapan persyaratan tersebut, kemudian juga lebih meningkatkan waktu pelayanan dan prilaku petugas pelayanan agar lebih maksimal
		Triwulan 2 (April - Juni)	3,46	3,46	3,42	4,00	3,46	3,44	3,48	4,00	3,48	**88,55**	**A (sangat baik)**	50	SKM Manual	Unsur Waktu Pelayanan	Memaksimalkan waktu pelayanan dan meningkatkan fasilitas pelayanan
		Triwulan 3 (Juli - September)	3,56	3,54	3,34	4,00	3,56	3,48	3,38	3,32	3,74	**88,57**	**A (sangat baik)**	50	SKM Manual	Waktu penyelesaian	Melakukan evaluasi berkala agar tren kepuasan masyarakat dapat terus dipantau dan ditingkatkan

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
		Triwulan 4 (Oktober – Desember)	3,52	3,50	3,52	4,00	3,50	3,50	3,52	3,52	3,36	**88,63**	**A (sangat baik)**	50	SKM Manual	Sarana dan prasarana	Meninjau ulang dan berusaha melengkapi sarana dan prasarana
		Rerata Tahunan	3,480	3,495	3,440	4,000	3,475	3,475	3,480	3,710	3,485	**88.51**	**A (sangat baik)**	200			
36.	Kecamatan Jorong	Triwulan 1 (Januari-Maret)	3,586	3,586	3,457	4,000	3,471	3,529	3,457	3,229	3,286	**86,90**	**B (Baik)**	70	SKM Manual	Penanganan Pengaduan Pelayanan	Di perbaiki dan di tingkatkan
		Triwulan 2 (April - Juni)	3,486	3,471	3,471	4,000	3,271	3,514	3,514	3,371	3,500	**86,90**	**B (Baik)**	70	SKM Manual	Pelayanan	Perbaikan Pelayanan
		Triwulan 3 (Juli - September)	3,500	3,586	3,429	4,000	3,486	3,571	3,486	3,100	3,457	**86,94**	**B (Baik)**	70	SKM Manual	Akan merencanakan tindak lanjut dan perbaikan dengan fokus pada unsur-unsur yang buruk hasilnya	Meningkatkan kualitas pelayanan publik serta penyempurnaan sistem pelayanan
		Triwulan 4 (Oktober – Desember)	3,529	3,586	3,457	4,000	3,500	3,586	3,529	3,271	3,529	**87,96**	**B (Baik)**	70	SKM Manual	Akan merencanakan tindak lanjut dan perbaikan dengan fokus pada unsur-unsur yang buruk	Meningkatkan kualitas pelayanan publik serta penyempurnaan sistem pelayanan

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
																hasilnya	
		Rerata Tahunan	3,525	3,557	3,454	4,000	3,432	3,550	3,497	3,243	3,443	**87,18**	**B (Baik)**	280			
37.	Kecamatan Bajuin	Triwulan 1 (Januari-Maret)	3,69	3,33	3,11	4,00	3,56	3,49	3,29	3,29	3,55	**86,86**	**B (Baik)**	80	SKM Manual	Waktu Pelayanan	Memperbaiki waktu Pelayanan agar lebih mudah dan cepat
		Triwulan 2 (April - Juni)	3,63	3,31	3,16	4,00	3,46	3,35	3,33	3,41	3,7	**87,00**	**B (Baik)**	80	SKM Manual	Waktu Pelayanan	Perbaikan unsur waktu pelayanan
		Triwulan 3 (Juli - September)	3,55	3,30	3,37	4,00	3,47	3,41	3,40	3,46	3,57	**87,51**	**B (Baik)**	148	SKM Manual	peningkatan jaringan jaringan	jaringan internet memadai
		Triwulan 4 (Oktober – Desember)	3,64	3,34	3,38	4,00	3,55	3,44	3,28	3,46	3,51	**87,68**	**B (Baik)**	87	SKM Manual	jaringan internet/blank spot	penguatan jaringan internet
		Rerata Tahunan	3,628	3,320	3,255	4,000	3,510	3,423	3,325	3,405	3,583	**87,26**	**B (Baik)**	395			
38.	Kecamatan Kintap	Triwulan 1 (Januari-	3,629	3,607	3,404	4,000	3,517	3,517	3,528	3,483	3,854	**89,48**	**A (sangat**	89	SKM Manual	Waktu Penyelesaian	Efektifitas waktu penyelesa

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
		Maret)											**baik)**				ian
		Triwulan 2 (April - Juni)	3,600	3,575	3,488	4,000	3,513	3,488	3,513	3,488	4,000	**89,82**	**A (sangat baik)**	80	SKM Manual	Penanganan Pengaduan	Perbaikan Penanganan Pengaduan
		Triwulan 3 (Juli - September)	3,578	3,563	3,519	3,993	3,548	3,556	3,563	3,570	3,830	**89,98**	**A (sangat baik)**	135	SKM Manual	Waktu Penyelesaian	Efektifitas waktu penyelesaian
		Triwulan 4 (Oktober – Desember)	3,65	3,65	3,62	3,99	3,66	3,58	3,56	3,60	3,84	**91,16**	**A (sangat baik)**	150	SKM Manual	Perilaku Pelaksana	Mengikuti diklat
		Rerata Tahunan	3,614	3,599	3,508	3,996	3,560	3,535	3,541	3,535	3,881	**90,11**	**A (sangat baik)**	454			
39.	Kecamatan Bumi Makmur	Triwulan 1 (Januari-Maret)	3,80	3,84	3,73	4,00	3,82	3,67	3,65	3,64	3,80	**93,34**	**A (sangat baik)**	137	SKM Manual	Sarana dan Prasarana	Inventarisasi kondisi sarana dan prasarana saat ini. Prioritaskan perbaikan/penambahan fasilitas yang paling dibutuhkan pengguna layanan

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
		Triwulan 2 (April - Juni)	3,77	3,78	3,87	4,00	3,64	3,71	3,62	3,62	3,75	**92,85**	**A (sangat baik)**	106	SKM Manual	Sarana dan Prasana	Dilakukan penambahan fasilitas
		Triwulan 3 (Juli - September)	3,77	3,81	3,70	4,00	3,72	3,76	3,76	3,60	3,73	**93,09**	**A (sangat baik)**	106	SKM Manual	Sarana dan Prasana	Dilakukan penambahan fasilitas
		Triwulan 4 (Oktober – Desember)	3,79	3,82	3,82	4,00	3,69	3,80	3,79	3,64	3,74	**93,73**	**A (sangat baik)**	84	SKM Manual	sarana prasana	Usulan perbaikan sarpras dari SKM masuk dalam rencana aksi pelayanan
		Rerata Tahunan	3,783	3,813	3,780	4,000	3,718	3,735	3,705	3,625	3,755	**93,25**	**A (sangat baik)**	433			
40.	Kecamatan Kurau	Triwulan 1 (Januari-Maret)	3,495	3,563	3,495	4,000	3,563	3,558	3,684	3,374	3,395	**89,15**	**A (sangat baik)**	190	SKM Manual	Sarana dan Prasarana	Perbaikan sarana dan prasarana
		Triwulan 2 (April - Juni)	3,500	3,563	3,495	4,000	3,563	3,568	3,689	3,468	3,532	**89,85**	**A (sangat baik)**	190	SKM Manual	Sarana dan Prasarana	Masih dikaji ulang kiranya Sarana Prasarana apa lagi yang di inginkan untuk masyarakat ketika per urusan

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
																	kekantor Kecamatan
		Triwulan 3 (Juli - September)	3,584	3,563	3,495	4,000	3,563	3,568	3,689	3,542	3,547	**90,33**	**A (sangat baik)**	190	SKM Manual	Kecepatan Waktu Pelayanan	Telah Diusahan untuk Pemenuhan Layanan Cepat, salah satunya seperti meminta Operator Layanan Kependudukan tambahan ke Kantor Catatan sipil sebagai Pengganti Operator yang lulus pppk 2024.
		Triwulan 4 (Oktober – Desember)	3,595	3,589	3,537	4,000	3,568	3,579	3,695	3,568	3,558	**90,71**	**A (sangat baik)**	190	SKM Manual	Kecepatan Waktu Pelayanan	Telah Diusahan untuk Pemenuhan Layanan lebih cepat
		Rerata Tahunan	3,544	3,570	3,506	4,000	3,564	3,568	3,689	3,488	3,508	**90,01**	**A (sangat baik)**	760			
41.	Kecamatan Tamba	Triwulan 1 (Januari-	3,444	3,378	3,533	3,467	3,356	3,533	3,444	3,333	3,311	**85,56**	**B (Baik)**	45	SKM Manual	Penanganan pengaduan	Membuat formulir pengaduan

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
	ng Ulang	Maret)															secara online
		Triwulan 2 (April - Juni)	3,30	3,30	3,20	3,80	3,20	3,20	3,20	3,10	3,90	**83,89**	**B (Baik)**	10	SKM Manual	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	akan kami tindaklanjuti apabila ada aduan dari masyarakat dengan ceapt
		Triwulan 3 (Juli - September)	3,313	3,188	3,125	4,000	3,188	3,250	3,250	3,000	3,563	**82,99**	**B (Baik)**	16	SKM Manual	Sarana & Prasarana	Meningkatkan Sarpras Pelayanan
		Triwulan 4 (Oktober – Desember)	3,333	3,467	3,333	3,933	3,333	3,400	3,533	3,333	3,667	**87,04**	**B (Baik)**	15	SKM Manual	Pelayanan	Kecepatan Pelayanan tergantung Ada tidaknya Pejabat yg menandatangai
		Rerata Tahunan	3,348	3,333	3,298	3,800	3,269	3,346	3,357	3,192	3,610	**84,87**	**B (Baik)**	86			
42.	Kecamatan Panyipatan	Triwulan 1 (Januari-Maret)	3,57	3,79	3,61	4,00	3,47	3,83	3,68	3,24	3,56	**90,04**	**A (sangat baik)**	150	SKM Online	Penanganan pengaduan layanan	akan mengadakan forum konsultasi publik di akhir tahun
		Triwulan 2 (April -	3,63	3,64	3,61	4,00	3,59	3,65	3,67	3,24	3,73	**90,09**	**A (sangat baik)**	150	SKM Online	Penanganan Pengaduan Pengguna	mengadakan FKP

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
		Juni)														Layanan	
		Triwulan 3 (Juli - September)	3,79	3,61	3,70	4,00	3,52	3,74	3,72	3,15	3,54	**90,12**	**A (sangat baik)**	150	SKM Online	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	mengadakan FKP
		Triwulan 4 (Oktober – Desember)	3,78	3,59	3,61	4,00	3,53	3,76	3,75	3,25	3,51	**90,14**	**A (sangat baik)**	150	SKM Online	kualitas sarana dan prasarana	mengadakan FKP
		Rerata Tahunan	3,693	3,658	3,633	4,000	3,528	3,745	3,705	3,220	3,585	**90,10**	**A (sangat baik)**	600			
Rata-Rata SKM Mandiri Kabupaten 88,77 A (sangat baik)																	

Upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, sebagai berikut :

a) Peningkatan Standar Pelayanan Publik

Peningkatan standar pelayanan publik dapat diukur dari meningkatnya Perangkat Daerah di Kabupaten Tanah Laut yang memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di atas 80, hal ini menggambarkan tingkat keberhasilan perangkat daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik sesuai standar yang ditetapkan. Nilai IKM > 80 mengindikasikan kategori pelayanan “Baik” hingga “Sangat Baik” dan mencerminkan terpenuhinya aspek kualitas layanan yang meliputi kejelasan standar pelayanan, kepastian waktu dan biaya, kompetensi pelaksana, serta efektivitas mekanisme pengaduan.

Intervensi atas keberhasillan tersebut didukung oleh pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) pelayanan publik yang dilakukan secara terstruktur dan periodik. Monev pelayanan publik difokuskan pada pengukuran kepatuhan terhadap Standar Pelayanan (SP), konsistensi penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta tindak lanjut atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan pengaduan masyarakat. Hasil monev digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi perbaikan layanan, penguatan pengendalian internal, serta peningkatan kinerja unit pelayanan pada masing-masing perangkat daerah.

Dalam rangka menjamin keseragaman dan kualitas penyelenggaraan layanan, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara berkelanjutan melakukan penyusunan, reviu, dan penyempurnaan SP dan SOP pelayanan publik. SP disusun sebagai instrumen penetapan komitmen mutu layanan kepada masyarakat, sedangkan SOP berfungsi sebagai pedoman operasional untuk memastikan proses pelayanan berjalan efektif, efisien, terukur, dan dapat diaudit. Penyelarasan SP dan SOP dengan proses bisnis, regulasi teknis, serta kebutuhan pengguna layanan menjadi bagian dari upaya peningkatan kinerja pelayanan publik berbasis tata kelola.

Secara keseluruhan, meningkatnya kualitas pelayanan publik pada perangkat daerah mencerminkan efektivitas siklus manajemen kinerja

pelayanan publik yang meliputi perencanaan standar layanan, implementasi SOP, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut perbaikan berkelanjutan. Capaian ini menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada hasil (*outcome*), akuntabilitas kinerja, dan kepuasan Masyarakat.

Kegiatan yang telah dilaksanakan, antara lain:

1. Peningkatan kualitas SDM pelayanan publik terutama front office

   Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan 22 s.d 23 juli 2025 dengan menghadirkan narasumber dari perwakilan Ombudsman Republik Indonesia dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini diikuti oleh 80 orang peserta yang terdiri dari perwakilan petugas front office serta Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

   Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensi aparatur pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan, prinsip pelayanan prima, serta pencegahan maladministrasi, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, penguatan budaya kerja berorientasi pelayanan, serta peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.





2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan

Salah satu aspek penting dalam peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik adalah dioperasionalkannya Mal Pelayanan Publik (MPP) yang diresmikan pada tanggal 11 Juni 2025. Mal Pelayanan Publik merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam menghadirkan pelayanan publik yang mudah diakses, cepat, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Mal Pelayanan Publik ini merupakan hasil kerja sama lintas sektor yang melibatkan instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, instansi vertikal, serta lembaga lainnya, antara lain kepolisian, kementerian/lembaga, BUMD, dan lembaga pendukung pelayanan publik. Kolaborasi lintas sektor tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terpadu dalam satu lokasi, sehingga masyarakat tidak perlu berpindah-pindah tempat untuk memperoleh berbagai jenis layanan.

Saat ini, Mal Pelayanan Publik menyediakan 25 (dua puluh lima) gerai layanan yang memberikan pelayanan secara terintegrasi, yaitu:

1) UPPD/Samsat
2) Pengadilan Negeri Pelaihari
3) Badan Narkotika Nasional (BNN)
4) Kementerian Agama
5) Pengadilan Agama Pelaihari
6) Polres Tanah Laut
7) Kejaksaan Negeri Tanah Laut
8) KP2KP Pelaihari
9) Kantor Pertanahan
10) BAZNAS
11) BPJS Ketenagakerjaan
12) BPJS Kesehatan
13) Kantor Urusan Agama (KUA)
14) Bank Kalsel
15) PT. Air Minum Berkah Banua

16) BPR Tanah Laut
17) Koperasi Tuntung Pandang
18) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
19) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
21) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
23) Badan Pendapatan Daerah
24) Dinas Kesehatan
25) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin*

Khusus untuk Kantor Imigrasi I TPI Banjarmasin, layanan masih dalam tahap proses pelaksanaan dan persiapan operasional.

Diharapkan dengan keberadaan Mal Pelayanan Publik ini dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik, memberikan kemudahan akses layanan bagi masyarakat, mempercepat proses pelayanan, serta mendorong peningkatan kepuasan masyarakat dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pelayanan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Selain mall pelayanan publik, pemenuhan sarana prasana pada setiap unit kerja pelayanan juga terus ditingkatkan dengan pembangunan pembangunan infrastruktur dan perlengkapan pelayanan terus ditingkatkan pada seluruh perangkat daerah. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan aksesibilitas pelayanan publik bagi seluruh pengguna layanan. Kegiatan ini bertujuan menciptakan lingkungan pelayanan yang representatif, ramah, dan inklusif sehingga mampu mendukung kelancaran penyelenggaraan pelayanan pada unit pelayanan.

Penyediaan sarana dan prasarana tersebut meliputi:

1. Penyediaan tempat parkir kendaraan bermotor yang memadai bagi pengguna layanan, guna memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat selama mengakses layanan.

2. Pelengkapan fasilitas pada ruang tunggu unit pelayanan, antara lain kursi tunggu, informasi layanan, dan fasilitas pendukung lainnya, sehingga pengguna layanan dapat menunggu dengan nyaman.
3. Pelengkapan fasilitas pada toilet pengguna layanan, guna memenuhi standar kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan bagi masyarakat.
4. Penyediaan dan pelengkapan sarana prasarana bagi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak, sebagai wujud komitmen pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan.
5. Penyediaan fasilitas pendukung lainnya, seperti papan informasi layanan, jalur evakuasi, dan fasilitas keselamatan, untuk menunjang kualitas pelayanan secara menyeluruh.















Melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik, memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, serta mendukung peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah.




3. Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan responsivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Kegiatan ini bertujuan memastikan setiap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dapat diterima,

ditindaklanjuti, dan diselesaikan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Pengelolaan pengaduan dilakukan melalui pemanfaatan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N–LAPOR!) sebagai kanal resmi pengaduan nasional. Melalui sistem ini, perangkat daerah dapat memantau pengaduan secara terintegrasi, memastikan adanya kejelasan penanggung jawab, serta meningkatkan koordinasi antar unit kerja dalam penyelesaian pengaduan masyarakat.

Selain itu, perangkat daerah juga menyediakan kanal pengaduan internal, baik secara langsung maupun melalui media elektronik, sebagai sarana alternatif bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, saran, dan masukan terkait pelayanan. Penyediaan kanal pengaduan internal ini bertujuan memperluas akses masyarakat serta mempercepat penanganan pengaduan pada tingkat unit pelayanan.

Selanjutnya, dilakukan tindak lanjut dan monitoring pengaduan secara berkala untuk memastikan setiap pengaduan ditangani sesuai standar pelayanan dan batas waktu yang ditetapkan. Monitoring ini juga dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi guna mengidentifikasi permasalahan layanan yang berulang serta merumuskan langkah perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

4. Peningkatan Kinerja dan Inovasi Berkelanjutan

Peningkatan inovasi berkelanjutan merupakan upaya pemerintah daerah dalam mendorong terciptanya pembaharuan layanan secara terus-menerus guna meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi pelayanan publik. Inovasi dikembangkan sebagai respon terhadap perubahan kebutuhan masyarakat, dinamika regulasi, serta tuntutan peningkatan kinerja organisasi.

Pelaksanaan peningkatan inovasi berkelanjutan dilakukan melalui identifikasi permasalahan pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, penyederhanaan proses bisnis, serta pengembangan

metode pelayanan yang lebih adaptif dan responsif. Inovasi yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan nilai tambah (*value added*) bagi masyarakat, baik dalam bentuk kemudahan akses layanan, percepatan waktu pelayanan, maupun peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

Melalui penerapan inovasi secara berkelanjutan, pemerintah daerah berupaya membangun budaya kerja yang kreatif dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan, sekaligus mendukung peningkatan kepuasan masyarakat dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun inovasi terkait pelayanan publik yang telah diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut:

NO	NAMA INOVASI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	*2*	*3*
1	LAKATAN (Layanan Angkutan Tanah Laut)	Dinas Perhubungan
2	LANGKAR (Layanan Angkutan Pelajar)	
3	PELATARAN (Pelayanan Alat Penerangan Jalan)	
4	Rumah Singgah “AYANGJUKI”	Dinas Sosial
5	Sistem Informasi Data Pemerlu Kesejahteraan Sosial (SITUNTAS)	
6	TRC (Tim Reaksi Cepat) Tim Yang Bergerak Secara Cepat Dan Tepat Untuk Memberikan Pelayanan Bantuan Kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	
7	Two In One (2 in 1), Three In one (3 in 1) dan Four In One (4 in 1).	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8	LASUNG (Layanan Sehari Tuntung)	
9	LANJUNG (Layanan Kunjungan)	
10	LAKSA (Layanan Administrasi Kependudukan Setiap Ahad)	
11	SIKIJANG MAS (Sistem Pelayanan KIA melalui Jaringan Media Sosial)	
12	DETAK (Desa Tertib Administrasi Kependudukan)	

NO	NAMA INOVASI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	*2*	*3*
13	SIKECE (Sistem Informasi Pengarsipan Dokumen Kependudukan Secara Elektronik)	
14	SILAKAS (Sistem Informasi Layanan Administrasi Kependudukan Via Smartphone)	
15	SIMPEL (Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan)	
16	PELANGI PAGI (Pelayanan Terintegrasi dengan Pengadilan Negeri)	
17	SI CAPUNG (Sistem Informasi Cerai di Pengadilan Agama, Dokumen Kependudukan Berubah Langsung)	
18	PELANGI (Pelayanan Terintegrasi)	
19	MANYASAH (Mambari Layanan ke Sekolah)	
20	BATATAI (Banikahan Tercapai, Administrasi Kependudukan Selesai)	
21	SILARIS (Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terintegrasi dengan Desa)	
22	PILANDUK LANGKAR (Program Inovasi Sidang Diluar Gedung Pengadilan Dalam Rangka Layanan Kependudukan Kolaborasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dan Pengadilan Negeri Pelaihari)	
23	Sapa, Salam, Senyum dan Layani (SALAMI)	
24	Layanan Bina Marga On Call (BOC)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
25	RAZA LAKAS 112	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
26	BISA (Boejasin Information System and Applications)	RSUD Hadji Boejasin
27	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Di Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut (SI PELANCONG)	Kecamatan Takisung
28	SITAJAM (Silaturahmi Satu Jam) Untuk Masyarakat Desa)	Kecamatan Jorong

5. Penyusunan dan Penyempurnaan Standar Pelayanan

Penyusunan dan penyempurnaan standar pelayanan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian, kualitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik. Kegiatan ini bertujuan memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan kepada

masyarakat memiliki acuan yang jelas dan terukur, baik dari aspek persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya, maupun produk layanan.

Kegiatan yang dilakukan meliputi penyusunan dan peninjauan Standar Pelayanan (SP) pada unit pelayanan di lingkungan perangkat daerah. Peninjauan dilakukan untuk menyesuaikan standar pelayanan dengan perkembangan regulasi, kebutuhan masyarakat, serta hasil evaluasi kinerja pelayanan, sehingga standar yang ditetapkan tetap relevan dan aplikatif.

Selain itu, dilakukan penetapan Maklumat Pelayanan sebagai bentuk komitmen penyelenggara pelayanan dalam memberikan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Maklumat pelayanan menjadi sarana transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, sekaligus penguatan budaya kerja aparatur yang berorientasi pada pelayanan prima.

Untuk mendukung implementasi standar pelayanan secara efektif, perangkat daerah juga melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan berbasis proses bisnis. SOP disusun untuk menggambarkan alur pelayanan secara jelas, sederhana, dan terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan konsistensi pelaksanaan pelayanan, mempercepat waktu layanan, serta meminimalkan potensi kesalahan dan maladministrasi.

6. Monitoring Evaluasi pelaksanaan pelayanan pada perangkat daerah

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pada perangkat daerah dilaksanakan sebagai upaya untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berjalan sesuai dengan standar pelayanan, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta komitmen pelayanan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai tingkat kepatuhan unit pelayanan serta mengidentifikasi permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan pelayanan.

Monitoring dilakukan secara berkala melalui pemantauan langsung terhadap unit pelayanan, penelaahan dokumen standar

pelayanan dan SOP, serta penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan di lapangan. Aspek yang dimonitor meliputi kepatuhan terhadap prosedur pelayanan, ketepatan waktu penyelesaian layanan, kualitas sarana prasarana, serta sikap dan perilaku aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Evaluasi pelaksanaan pelayanan dilakukan berdasarkan hasil monitoring, data pengelolaan pengaduan masyarakat, serta hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk perumusan rekomendasi perbaikan, penyempurnaan standar pelayanan, serta peningkatan kompetensi aparatur pelayanan.

Melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, perangkat daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan konsistensi pelayanan publik, mendorong perbaikan berkelanjutan, serta memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.





Berikut beberapa faktor penghambat yang menyebabkan indikator kinerja “Indeks Pelayanan Publik” tidak tercapai sesuai target, diantaranya :

1. Belum meratanya kualitas penerapan standar pelayanan pada seluruh unit pelayanan publik, baik dari aspek kelengkapan dokumen standar pelayanan maupun konsistensi implementasinya.
2. Keterbatasan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pelayanan, khususnya dalam pemahaman pelayanan prima, pengelolaan pengaduan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan.

3. Pemanfaatan pelayanan berbasis elektronik yang belum optimal, baik dari sisi integrasi sistem, keandalan infrastruktur pendukung, maupun tingkat literasi digital aparatur dan masyarakat.
4. Monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik yang belum dilakukan secara konsisten dan terukur pada seluruh perangkat daerah, sehingga tindak lanjut hasil evaluasi belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kualitas layanan.
5. Pengelolaan pengaduan masyarakat yang belum optimal, baik dari sisi kecepatan tindak lanjut, kualitas penyelesaian pengaduan, maupun pemanfaatan data pengaduan sebagai bahan perbaikan pelayanan.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan/kendala yang dihadapi dalam peningkatan nilai pelayanan publik adalah:

1. Penguatan penerapan standar pelayanan pada seluruh unit pelayanan publik melalui pembinaan, pendampingan, dan evaluasi berkala, guna memastikan kesesuaian standar pelayanan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan masyarakat..
2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur pelayanan melalui pelatihan pelayanan prima, pengelolaan pengaduan masyarakat, serta peningkatan kemampuan aparatur dalam pemanfaatan teknologi informasi dan pelayanan berbasis elektronik..
3. Optimalisasi implementasi pelayanan publik berbasis elektronik (digitalisasi layanan) melalui peningkatan integrasi sistem pelayanan, penguatan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan literasi digital aparatur dan masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan SPBE.
4. Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik dengan menetapkan indikator kinerja yang terukur, melaksanakan evaluasi secara periodik, serta menindaklanjuti hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan layanan.
5. Optimalisasi pengelolaan pengaduan masyarakat melalui peningkatan responsivitas, percepatan tindak lanjut pengaduan, serta pemanfaatan data pengaduan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Rencana Aksi yang akan dilakukan:

1. Melakukan pembinaan dan pendampingan penerapan standar pelayanan pada seluruh unit pelayanan publik secara bertahap dan berkelanjutan, guna memastikan keseragaman kualitas pelayanan serta kepatuhan terhadap standar pelayanan yang telah ditetapkan.
2. Menyelenggarakan peningkatan kapasitas aparatur pelayanan publik, melalui pelatihan pelayanan prima, pengelolaan pengaduan masyarakat, serta penguatan kompetensi teknis pelayanan berbasis elektronik.
3. Mengembangkan dan mengoptimalkan pelayanan publik berbasis digital, termasuk integrasi sistem layanan, peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi, serta perluasan akses layanan elektronik kepada masyarakat.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik secara periodik, dengan fokus pada pencapaian Indeks Pelayanan Publik sebagai Indikator Kinerja Utama, serta menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.
5. Mengoptimalkan pengelolaan pengaduan masyarakat, melalui peningkatan kecepatan dan kualitas tindak lanjut pengaduan serta pemanfaatan data pengaduan sebagai bahan evaluasi kinerja pelayanan publik.

Faktor pendorong/keberhasilan dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, antara lain:

4. Tersedianya regulasi dan pedoman teknis yang jelas (PermenPANRB tentang SKM) menjadi acuan baku dalam penyusunan instrumen, pelaksanaan survei, hingga pengolahan dan pelaporan hasil SKM.
5. Ketersediaan sarana pendukung, seperti aplikasi survei, perangkat digital, jaringan internet, serta media informasi di unit pelayanan, mempermudah pelaksanaan SKM dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
6. Koordinasi yang baik antara unit pelayanan, perangkat daerah pengampu, dan bagian yang menangani organisasi/tata laksana mendorong keseragaman pelaksanaan serta kualitas data SKM.
7. Hasil SKM yang ditindaklanjuti melalui penyusunan rencana perbaikan layanan (RTL) menjadi motivasi bagi unit pelayanan untuk melaksanakan SKM secara

sungguh-sungguh dan berkelanjutan.

8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap proses dan hasil SKM membantu menjaga kualitas pelaksanaan serta memastikan kesesuaian dengan standar yang ditetapkan.

Faktor penghambat/kegagalan dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, antara lain:

1. Belum seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang memadai terkait metodologi SKM, khususnya dalam penentuan jumlah dan karakteristik responden, teknik pengisian kuesioner, serta pengolahan dan analisis data sesuai ketentuan PermenPANRB, sehingga berpotensi menurunkan validitas hasil survei.
2. Jumlah responden SKM pada beberapa unit pelayanan belum memenuhi ketentuan minimal, serta belum sepenuhnya merepresentasikan pengguna layanan, yang disebabkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan waktu pelayanan.
3. Pada sebagian perangkat daerah, pelaksanaan SKM masih dipandang sebagai kewajiban administratif, sehingga belum sepenuhnya dilaksanakan secara mendalam dan objektif sebagai instrumen evaluasi kualitas pelayanan publik.
4. Hasil SKM belum sepenuhnya ditindaklanjuti dalam bentuk rencana aksi atau perbaikan standar pelayanan dan SOP, sehingga dampak survei terhadap peningkatan kualitas pelayanan masih terbatas.
5. Pelaksanaan SKM belum sepenuhnya konsisten dan tepat waktu sesuai periode yang ditetapkan, sehingga menyulitkan analisis tren capaian IKM dari tahun ke tahun.

Rencana Aksi:

1. Melaksanakan bimbingan teknis dan pendampingan teknis kepada perangkat daerah terkait metodologi SKM, penyusunan instrumen, teknik pengambilan responden, pengolahan data, serta penyusunan laporan dan rencana tindak lanjut.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan SKM di seluruh perangkat daerah, termasuk pengendalian kualitas data, verifikasi

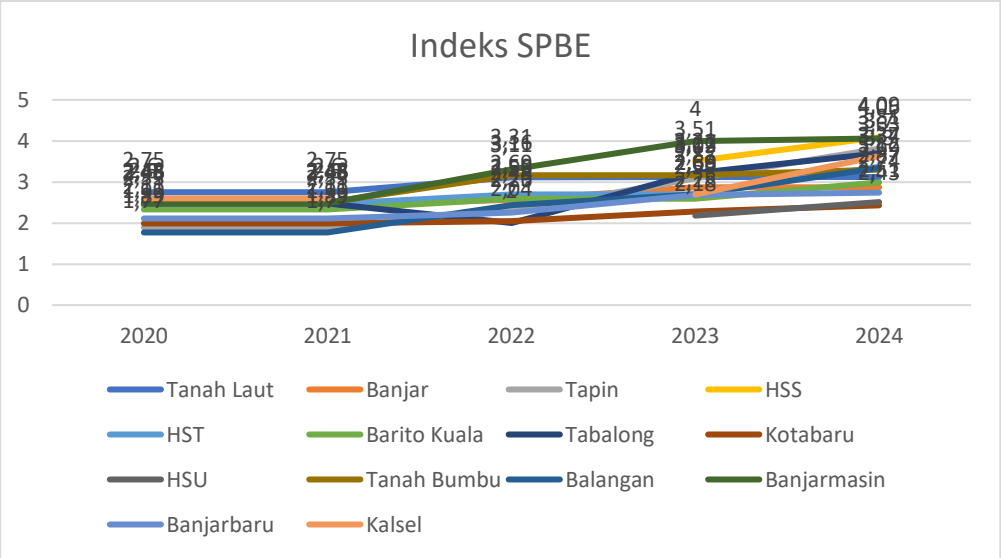
hasil survei, dan pelaporan capaian IKM secara terintegrasi.

3. Menyelaraskan pelaksanaan dan tindak lanjut SKM dengan penilaian kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman RI serta indikator Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan nilai kepuasan dan kepatuhan pelayanan publik Kabupaten Tanah Laut.
4. Mengembangkan dan/atau memanfaatkan aplikasi survei berbasis digital yang mudah diakses masyarakat, didukung dengan penyediaan sarana TIK dan peningkatan kualitas jaringan internet pada unit pelayanan. Dimana untuk tahun 2026 Kementerian PANRB mewajibkan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk memanfaatkan aplikasi SKM Online (skm.go.id), dimana bulan Januari ini sebagai tahap awal semua diminta untu membuat SK Tim Pengelola SKM Online untuk mendapatkan username dan password untuk bisa masuk ke aplikasi tersebut.

c. Indeks SPBE

Penilaian Indeks SPBE tahun 2025 untuk Pemerintah Kabupaten Tanah Laut masih mengacu pada hasil penilaian/evaluasi tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, diperoleh nilai SPBE Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan indeks 3,12 (kategori Baik). Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tanah Laut masih memperoleh predikat baik. Perolehan nilai tersebut jika dibandingan dengan seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berada di urutan kesembilan dari seluruh pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan. Meskipun Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berada pada urutan kesembilan, namun masih mampu mempertahankan perolehan indeks SPBE pada tahun 2024 yakni sebesar 3,12 dengan kategori baik.

Grafik 3.12.6
Indeks SPBE Kab/Kota se-Kalimantan Selatan dan Provinsi Tahun 2020-2024



Tabel 3.12.4
Indeks SPBE Kab/Kota se-Kalimantan Selatan dan Provinsi Tahun 2020-2024

Kab/Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tanah Laut	2,75	2,75	3,11	3,12	3,12
Banjar	2,43	2,43	2,56	2,87	2,87
Tapin	1,89	1,89	2,29	3,09	3,81
HSS	0	0	0	3,51	4,09
HST	2,46	2,46	2,69	2,69	3,37
Barito Kuala	2,33	2,33	2,59	2,59	2,99
Tabalong	2,48	2,48	2	3,21	3,7
Kotabaru	1,99	1,99	2,04	2,28	2,43
HSU	0	0	0	2,18	2,51
Tanah Bumbu	2,5	2,5	3,16	3,17	3,3
Balangan	1,77	1,77	2,44	2,69	3,34
Banjarmasin	2,48	2,48	3,31	4	4,06
Banjarbaru	2,11	2,11	2,26	2,68	2,74
Kalsel	2,6	2,6	0	2,69	3,63

Dasar hukum SPBE adalah Peraturan Presiden RI Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik (SPBE). SPBE merupakan suatu sistem untuk

mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan yang berkualitas dan terpercaya. SPBE memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Penilaian Indeks SPBE di tahun 2025 ini merupakan masa transisi penyesuaian Indeks Pemerintah Digital sesuai dengan surat dari Kemenpan & RB nomor: B/66/PD.02/2025 tanggal 21 April 2025 perihal pembinaan kepada Instansi Pemerintah pada Tahun 2025 dalam Rangka Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital sebagai Penguatan Kebijakan SPBE di mana pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 belum masuk lokus dalam penilaian Indeks Pemerintah Digital (Pemdi).

Pelaksanaan SPBE di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dikoordinatori oleh Bidang Penyelenggaraan E-*Government,* yang pelaksanaannya dianggarkan melalui Program Pengelolaan Aplikasi Informatika; kegiatan Pengelolaan E-*Government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; sub kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota; dan Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah. Seluruh SKPD dan stakeholder terkait dilibatkan dalam upaya peningkatan capaian nilai SPBE di tahun 2025.

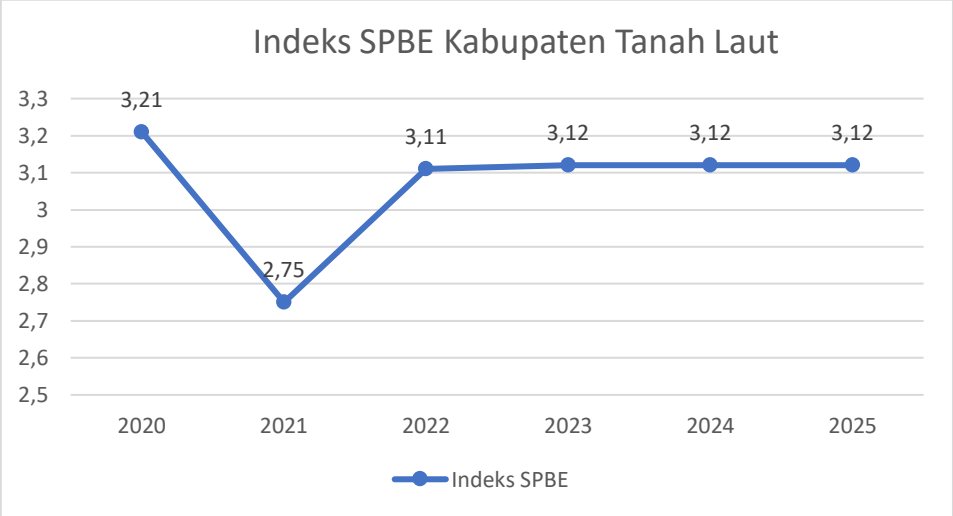
Perolehan nilai SPBE Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 adalah sebesar 3,12 merupakan nilai yang diambil dari hasil penilaian/evaluasi di tahun 2024 yang berarti capaian ini sesuai dengan nilai target yang ditetapkan yakni sebesar 3,12, dengan persentase realisasi 100%. Nilai indeks 3,12 masuk dalam predikat baik (2,6–3,5). Tabel berikut memperlihatkan kategori nilai SPBE.

Tabel 3.12.5
Kategori SPBE

NO	Rentang Indeks SPBE	PREDIKAT
1	1 s.d. <1,8	Kurang
2	1,8 s.d. < 2,6	Cukup
3	2,6 s.d. <3,5	Baik

NO	Rentang Indeks SPBE	PREDIKAT
4	3,5 s.d. <4,2	Sangat Baik
5	4,2 s.d. 5	Memuaskan

Grafik 3.12.7
Indeks SPBE Kab. Tanah Laut 2020-2025



Indeks SPBE tahun 2025 adalah 3,12, merupakan hasil yang diambil dari evaluasi SPBE di tahun 2024 dengan Indeks SPBE 3,12 dan hasil yang sama dengan evaluasi tahun 2023 yakni 3,12, sedang di tahun 2022 dengan nilai 3,11, tahun 2021 dengan nilai 2,75, pada tahun 2020 adalah 3,21 dan tahun 2019 adalah 2,76 sedangkan pada awal penilaian tahun 2018 adalah 1,42, artinya indeks SPBE telah mengalami peningkatan atau semakin baik per tahunnya. Peningkatan tersebut cukup signifikan dari tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2022 nilai SPBE kembali naik dari tahun sebelumnya (tahun 2021) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengalami penurunan nilai namun masih dalam kategori baik, penurunan nilai disebabkan bertambahnya indikator penilaian SPBE dari 35 indikator menjadi 47 indikator penilaian. Nilai SPBE yang diperoleh pada tahun 2025 sebesar 3,12 ini jika dibandingkan dengan target akhir yang ditetapkan pada Tujuan strategis Kabupaten Tanah Laut yakni sebesar 2,00 maka nilai yang diperoleh tersebut terlihat lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Hal ini dsebabkan karena tahun 2025 merupakan tahun transisi peralihan

penilaian/evaluasi indeks SPBE menjadi indeks Pemerintah Digital (Pemdi) di mana banyak indikator domain yang mengalami penyesuaian.

Hasil perolehan indeks SPBE Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 sebesar 3,12 jika dibandingkan dengan capaian indeks SPBE nasional tahun 2024 yakni sebesar 3,12, maka capaian Indeks SPBE Kabupaten Tanah Laut telah tercapai sama dengan capaian nasional.

Dari evaluasi penilaian SPBE ini, seluruh pimpinan dan penyelenggara sistem pemerintahan berbasis elektronik diinstruksikan agar meningkatkan kualitas penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Indeks SPBE Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sama dengan nilai tahun sebelumnya tahun 2024 dengan nilai 3,12 bila dibandingkan dengan Indeks SPBE Tahun 2023 dengan Nilai 3,12 masih memperoleh nilai yang sama atau belum ada kenaikan. Meskipun belum ada kenaikan nilai, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah mengupayakan untuk mempertahankan nilai SPBE yang diperoleh tahun sebelumnya dan menambah pemenuhan beberapa indikator penilaian, namun demikian meskipun dengan perolehan nilai 3,12, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut masih memperoleh predikat baik yang merupakan hasil dari kerja sama dan koordinasi seluruh unit-unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam penyelenggaan SPBE. Berbagai upaya yang dilakukan dengan membentuk Tim Evaluasi Internal Penilaian Mandiri SPBE di Kabupaten Tanah Laut, menyusun aktualisasi pelaksanaan SPBE, menentukan target indikator untuk dipenuhi, menyusun rencana aksi dan tindak lanjut sosialisasi, melakukan kegiatan teknis penunjang SPBE seperti integrasi berbagai aplikasi, penyediaan/fasilitasi sarana/prasarana komunikasi dan informasi, peningkatan layanan publik, peningkatan SDM aparatur, serta pemantapan dalam pelaksanaan Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE di Kabupaten Tanah Laut.

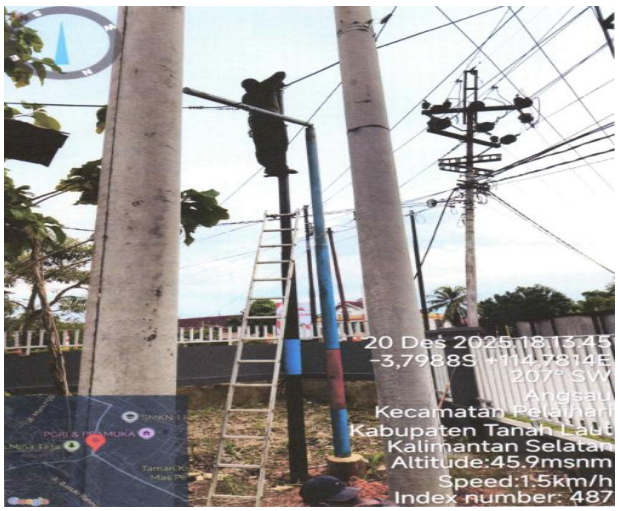
Hal yang paling penting dalam upaya pencapaian target dan peningkatan SPBE adalah komitmen pimpinan/kepala daerah yang sangat tinggi, sehingga memacu SKPD lain untuk lebih serius dan aktif mengimplementasikan SPBE. Akhirnya koordinasi dan kerja sama dapat terjalin dengan baik antar SKPD.

Berbagai Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, sebagai berikut :

1. Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah

   Pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah sebanyak 1 (satu) jaringan sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Penyediaan jaringan ini bertujuan untuk memperkuat konektivitas antarperangkat daerah, meningkatkan keandalan pertukaran data dan informasi, serta mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

   Keberadaan jaringan intra pemerintah tersebut menjadi infrastruktur pendukung penting dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), khususnya dalam menunjang kelancaran operasional aplikasi pemerintahan, integrasi data, serta peningkatan efisiensi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.



2. Pemeliharaan pusat data berupa Perangkat dan Software pusat data SPBE Kabupaten Tanah Laut

   Pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan Pemeliharaan Pusat Data SPBE berupa perangkat dan perangkat lunak (software) sebanyak 2 (dua) unit. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga keandalan, keamanan, dan keberlangsungan operasional pusat data sebagai infrastruktur utama dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Tanah Laut.

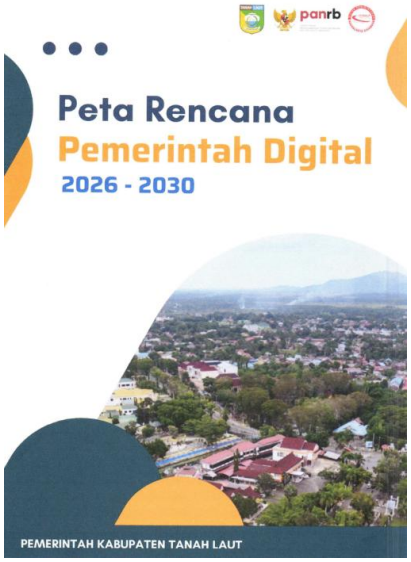
   Pemeliharaan perangkat dan software pusat data tersebut mendukung stabilitas layanan aplikasi pemerintahan, memastikan ketersediaan data secara berkelanjutan, serta meminimalkan risiko gangguan sistem. Dengan terpeliharanya pusat data SPBE secara optimal, pelaksanaan layanan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital di Kabupaten Tanah Laut dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

3. Menyusun Dokumen peta rencana pemerintahan digital (SPBE) 2025-2030

   Pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menyusun Dokumen Peta Rencana Pemerintahan Digital (SPBE) Tahun 2025–2030 sebanyak 1 (satu) dokumen, yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Penyusunan dokumen ini bertujuan sebagai panduan perencanaan pengembangan pemerintahan digital yang terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan di Kabupaten Tanah Laut.

   Melalui kerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan tata kelola SPBE, dokumen peta rencana SPBE 2025–2030 disusun secara lebih komprehensif dan berbasis kebutuhan daerah. Dokumen ini memuat tahapan pengembangan, prioritas program dan kegiatan, serta target capaian penyelenggaraan SPBE, meliputi penguatan tata kelola, layanan digital, infrastruktur TIK, manajemen data, dan keamanan informasi. Dengan tersusunnya dokumen tersebut, diharapkan implementasi SPBE di Kabupaten Tanah

Laut dapat berjalan secara sistematis, efektif, dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital.



4. Melaksanakan pendampingan peningkatan kompetensi SDM Tim Koordinasi SPBE

   Pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan pendampingan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Tim Koordinasi SPBE sebanyak 1 (satu) kali. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2025 yang diikuti oleh Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Tanah Laut dengan KemenpanRB. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas, dan kompetensi Tim Koordinasi SPBE dalam pengelolaan dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Tanah Laut.

   Pendampingan tersebut difokuskan pada penguatan pengetahuan terkait kebijakan SPBE, tata kelola pemerintahan digital, integrasi sistem, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung peningkatan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan Tim Koordinasi SPBE mampu menjalankan peran koordinatif dan teknis secara lebih efektif, sehingga implementasi SPBE di Kabupaten Tanah Laut dapat berjalan secara optimal, terintegrasi, dan berkelanjutan.

5. Pengembangan layanan berbasis teknologi

   Pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melaksanakan pengembangan layanan berbasis teknologi melalui pembaharuan aplikasi berbasis website sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyesuaikan layanan digital dengan kebutuhan pengguna, meningkatkan kemudahan akses informasi, serta memperbaiki kinerja dan keamanan aplikasi.

   Pembaharuan aplikasi berbasis website tersebut dilakukan dengan penyempurnaan fitur, tampilan, dan fungsionalitas sistem agar lebih responsif, terintegrasi, dan andal.

6. Menyusun Dokumen manajemen pemerintahan digital (SPBE) 2025-2030

   Pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menyusun Dokumen Manajemen Pemerintahan Digital (SPBE) Tahun 2025–2030 sebagai pedoman strategis dalam pengelolaan dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Penyusunan dokumen ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan SPBE berjalan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

   Dokumen Manajemen SPBE 2025–2030 memuat arah kebijakan, strategi, serta rencana aksi penguatan tata kelola pemerintahan digital, termasuk pengembangan layanan digital, integrasi aplikasi, pengelolaan data dan informasi, penguatan infrastruktur TIK, serta keamanan informasi.

7. Penyusunan Proses Bisnis Daerah dan SKPD

   Pemerintah Daerah telah melaksanakan pendampingan penyusunan Peta Proses Bisnis Kabupaten dan Perangkat Daerah yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan. Pelaksanaan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, komitmen, serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan tentang pentingnya Peta Proses Bisnis. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah:

a. Koordinasi awal dengan pihak ketiga, dalam hal ini narasumber dari Tim SMART ID melalui zoom meeting. Dalam pertemuan ini membahas tentang rencana pendampingan penyusunan peta proses bisnis perangkat daerah sekaligus penyusunan awal peta proses bisnis daerah.
b. Membuat Draft Surat Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Tim Penyusunan Peta Proses Bisnis Kabupaten dan Perangkat Daerah.
c. Melaksanakan kegiatan pendampingan penyusunan peta proses bisnis perangkat daerah, yang dilaksanakan di Novotel Banjarbaru pada tanggal 20 November 2025.
d. Melaksanakan kegiatan pendampingan hasil penyusunan peta proses bisnis (desk) sebagai tindaklanjut dari pendampingan penyusunan peta proses bisnis sebelumnya yang dilaksanakan mulai tanggal 2 s.d 9 Desember 2025.

Hasil dari pelaksanaan pendampingan menunjukkan beberapa capaian yang signifikan, antara lain:

a. Sebagian besar perangkat daerah telah memahami konsep peta proses bisnis, manfaat, serta hubungannya dengan Reformasi Birokrasi.
b. Terbentuknya Draft SK tentang Tim Penyusunan Peta Proses Bisnis Draft regulasi mulai diproses di Bagian Hukum.
c. Pengumpulan Data Proses dari Perangkat Daerah.
d. Sebagian besar perangkat daerah telah mengidentifikasi proses inti, pendukung, dan aktivitas utama.
e. Peningkatan Keterlibatan Perangkat Daerah dalam Kegiatan Pendampingan Penyusunan Peta Proses Bisnis.
   Tingkat partisipasi OPD mencapai >80%, menunjukkan antusiasme dan dukungan kuat.

Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Penyusunan Peta Proses Bisnis

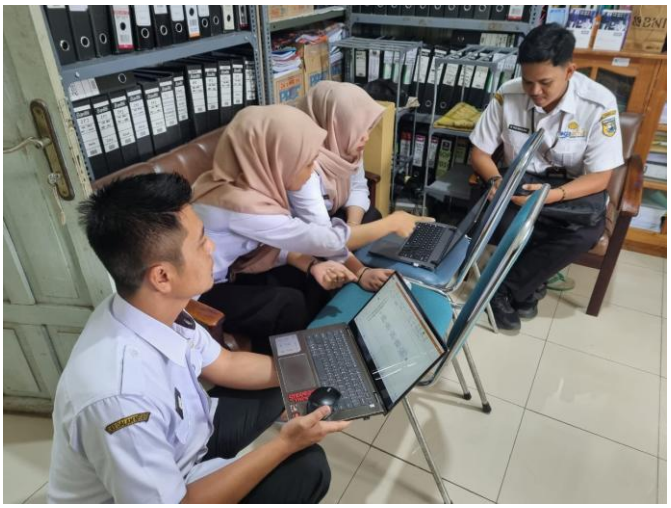






Dokumentasi Kegiatan Desk Penyusunan Peta Proses Bisnis







Selanjutnya untuk dapat lebih meningkatkan SPBE/Pemdi di tahun mendatang, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu menyusun rencana tindak lanjut yang harus dilakukan berdasarkan hasil evaluasi implementasi SPBE di Kabupaten Tanah Laut, yaitu :

- Pada aspek kebijakan SPBE, Pemkab Tanah Laut perlu menyusun kebijakan internal yang komprehensif terkait arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, manajemen data, sistem penghubung layanan, dan Tim Koordinasi SPBE.
- Pada aspek perencanaan strategis SPBE, Pemkab Tanah Laut perlu melengkapi dan memenuhi ketentuan nasional beberapa dokumen yang berkaitan dengan perencanaan strategis SPBE meliputi dokumen arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, rencana dan anggaran SPBE, inovasi proses bisnis.
- Pada aspek penyelenggara SPBE, Tim Koordinasi SPBE perlu menyusun program kerja dan melaksanakannya sesuai program kerja tersebut. Tim Kolaborasi SPBE yang dibentuk perlu melibatkan seluruh Perangkat Daerah.
- Pada aspek manajemen SPBE, Pemkab Tanah Laut perlu menyusun peta rencana dan pedoman pelaksanaan manajemen termasuk melaksanakan manajemen SPBE yang terdiri dari manajemen risiko SPBE, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen asset TIK, manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, manajemen layanan.
- Peningkatan kompetensi SDM TIK perlu dilaksanakan dengan mengacu pada kompetensi dalam bidang arsitektur proses bisnis, arsitektur data dan informasi, arsitektur aplikasi, arsitektur infrastruktur, arsitektur keamanan dancarsitektur layanan.
- Pada kegiatan manajemen pengetahuan sudah diterapkan akan tetapi rencana kerja belum dicantumkan dalam bentuk peta rencana yang lengkap.
- Pada aspek audit TIK, Pemkab Tanah Laut perlu menyusun peta reta rencana, pedoman dan melaksanakan audit TIK yang terdiri dari audit infrastruktur, audit aplikasi dan audit keamanan.

Diharapkan dengan melaksanakan seluruh evaluasi diatas, pada pelaksanaan evaluasi SPBE selanjutnya sudah dapat memenuhi indikator dan kriteria penilaian sesuai target

Faktor Penghambat :

- Pada aspek kebijakan SPBE, Pemkab Tanah Laut belum menyusun kebijakan internal yang komprehensif terkait arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, manajemen data, sistem penghubung layanan, dan Tim Koordinasi SPBE.
- Pada aspek perencanaan strategis SPBE, Pemkab Tanah Laut belum melengkapi dan memenuhi ketentuan nasional beberapa dokumen yang berkaitan dengan perencanaan strategis SPBE meliputi dokumen arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, rencana dan anggaran SPBE, inovasi proses bisnis.
- Pada aspek penyelenggara SPBE, Tim Koordinasi SPBE belum menyusun program kerja dan melaksanakannya sesuai program kerja tersebut. Tim Kolaborasi SPBE yang dibentuk belum melibatkan seluruh Perangkat Daerah.
- Pada aspek manajemen SPBE, Pemkab Tanah Laut belum menyusun peta rencana dan pedoman pelaksanaan manajemen termasuk melaksanakan manajemen SPBE yang terdiri dari manajemen risiko SPBE, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen asset TIK, manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, manajemen layanan.
- Peningkatan kompetensi SDM TIK belum mengacu pada kompetensi dalam bidang arsitektur proses bisnis, arsitektur data dan informasi, arsitektur aplikasi, arsitektur infrastruktur, arsitektur keamanan dan arsitektur layanan.
- Pada kegiatan manajemen pengetahuan sudah diterapkan akan tetapi rencana kerja belum dicantumkan dalam bentuk peta rencana yang lengkap.
- Pada aspek audit TIK, Pemkab Tanah Laut belum menyusun peta reta rencana, pedoman dan melaksanakan audit TIK yang terdiri dari audit infrastruktur, audit aplikasi dan audit keamanan.

Rencana Aksi :

- Pada aspek kebijakan SPBE, Pemkab Tanah Laut akan menyusun kebijakan internal yang komprehensif terkait arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, manajemen data, sistem penghubung layanan, dan Tim Koordinasi SPBE.
- Pada aspek perencanaan strategis SPBE, Pemkab Tanah Laut akan melengkapi dan memenuhi ketentuan nasional beberapa dokumen yang berkaitan dengan perencanaan strategis SPBE meliputi dokumen arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, rencana dan anggaran SPBE, inovasi proses bisnis sesuai dengan Rencana kerja pemerintah daerah.
- Pada aspek penyelenggara SPBE, Tim Koordinasi SPBE akan menyusun program kerja dan melaksanakannya sesuai program kerja tersebut. Tim Kolaborasi SPBE yang dibentuk akan melibatkan seluruh Perangkat Daerah.
- Pada aspek manajemen SPBE, Pemkab Tanah Laut akan mengupayakan penyusunan peta rencana dan pedoman pelaksanaan manajemen termasuk melaksanakan manajemen SPBE yang terdiri dari manajemen risiko SPBE, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen asset TIK, manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, manajemen layanan.
- Peningkatan kompetensi SDM TIK akan dilaksanakan dengan mengacu pada kompetensi dalam bidang arsitektur proses bisnis, arsitektur data dan informasi, arsitektur aplikasi, arsitektur infrastruktur, arsitektur keamanan dan arsitektur layanan.
- Pada kegiatan manajemen pengetahuan sudah diterapkan sesuai rencana kerja dan dicantumkan dalam bentuk peta rencana yang lengkap.
- Pada aspek audit TIK, Pemkab Tanah Laut akan menyusun peta reta rencana, pedoman dan melaksanakan audit TIK yang terdiri dari audit infrastruktur, audit aplikasi dan audit keamanan.

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya akses dan pelayanan masyarakat lainnya di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 35 ASN pada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 28 ASN pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 23 ASN pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, dan 5 ASN pada Bagian Organisasi serta di dukung oleh 19 Program dengan Pagu Rp 66.944.622.784,30 dan terealisasi Rp. 61.247.462.757,91 atau sebesar 91,49%.

Tabel 3.12.6
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	255.201.753,31	**214.868.885,00**
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	8.047.439.788,07	**7.526.068.029,00**
3	Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik	68.417.888,00	**57.024.292,00**
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	13.274.158.000,17	**12.394.004.735,00**
5	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	33.916.461,88	**33.314.118,00**
6	Program Penyelenggaran Statistik Sektoral	149.520.853,19	**130.491.355,00**
7	Program Pendaftaran Penduduk	257.900.346,00	**241.530.112,00**
8	Program Pencatatan Sipil	62.356.910,00	**54.698.000,00**
9	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	22.401.562.445,59	**19.685.533.485,00**
10	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.933.021.221,80	**1.760.705.426,00**
11	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	5.186.717.896,53	**4.698.623.177,00**
12	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	7.553.054.941,75	**7.294.391.585,00**
13	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.218.005.624,00	**899.871.494,00**
14	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	6.323.003.541,46	**6.096.737.164,91**
15	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	180.345.112,55	**159.600.900**
Jumlah		**66.944.622.784,30**	**61.247.462.757,91**

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Efisiensi kinerja diukur menggunakan rumus berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

1. Indeks Pelayanan Publik

$$\text{Efisiensi} = \frac{(66.944.622.784{,}30 \times 84{,}31\%) - 61.247.462.757{,}91}{(66.944.622.784{,}30 \times 84{,}31\%)} \times 100\%$$

Efisiensi = -8,52%

Tabel 3.12.7
Efisiensi Indikator 1

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
84,31%	91,49%	-8,52%

Efisiensi indikator “Indeks Pelayanan Publik” mencapai -8,52% , hal ini dikarenakan terdapat penurunan realisasi tahun 2025 dari tahun 2024 yang cukup signifikan, yaitu dari 4,23 menjadi 3,71.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

$$\text{Efisiensi} = \frac{(66.944.622.784{,}30 \times 100{,}80\%) - 61.247.462.757{,}91}{(66.944.622.784{,}30 \times 100{,}80\%)} \times 100\%$$

Efisiensi = 9,24%

Tabel 3.12.8
Efisiensi Indikator 2

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100,80%	91,49%	9,24%

3. Indeks SPBE

$$\text{Efisiensi} = \frac{(66.944.622.784{,}30 \times 100\%) - 61.247.462.757{,}91}{(66.944.622.784{,}30 \times 100\%)} \times 100\%$$

Efisiensi = 8,51%

Tabel 3.12.9
Efisiensi Indikator 3

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100%	91,49%	8,51%

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 (setelah Perubahan APBD) ditetapkan dengan jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp.2.164.551.035.668,00 dan anggaran belanja sebesar Rp.2.862.912.928.226,68 sehingga dianggarkan terjadi defisit anggaran sebesar minus Rp. 698.361.892.558,68.

Defisit anggaran tersebut ditutupi dengan penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 815.725.660.105,52. Penerimaan pembiayaan juga dipergunakan untuk mendanai pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 50.000.000.000,00.

Realisasi APBD Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun Anggaran 2025 terdiri dari realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp. 2.567.490.246.052,50. dan belanja sebesar Rp. 2.596.595.526.474,33 sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp. 29.105.280.421,83.

Realisasi Pembiayaan untuk Tahun Anggaran 2025 terdiri dari Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 815.725.328.516,97 dikurangi Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 50.000.000.000,00 maka sisa Pembiayaan Netto sebesar Rp. 765.725.328.516,97.

Sehingga posisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 (SILPA) adalah jumlah defisit sebesar Rp. 29.105.280.421,83 ditambah sisa atas Pembiayaan Netto sebesar Rp. 765.725.328.516,97. maka jumlah akumulasi SILPA Tahun Anggaran 2025 posisi per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 736.620.048.095,14.

TUJUAN I

Tabel 3.7

Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Program			
						Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
							Rp	Rp	%
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,98	8,09	Program Pengelolaan Pendidikan	181,412,792,193.82	156,531,205,658.50	86.28
		2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,45	12,70	Program Pengembangan Kurikulum	235,880,331.60	201,319,700.00	85.35
		3	Nilai Raport Pendidikan (nilai)	74,46	74,88	Program Pembinaan Perpustakaan	2,743,181,812.56	416,080,434.00	15.17
							184,391,854,337.98	157,148,605,792.50	85.23
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Usia Harapan Hidup (Tahun)	75	74,88	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	140,113,262,203.80	122,599,511,047.46	87.50
						Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	561,038,000.00	476,715,450.00	84.97

						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	8,940,052,335.00	6,209,204,362.00	69.45
							149,614,352,538.80	129,285,430,859.46	86.41
3	Meningkatan Kesetaraan Gender	1	Indeks Ketimpangan Gender (nilai)	0,47	0,411	Program Perlindungan Perempuan	202,153,906.00	86,526,040.00	42.80
						Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1,133,001,532.57	909,952,534.00	80.31
							1,335,155,438.57	996,478,574.00	74.63
4	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda	1	Indeks Pembangunan Pemuda (nilai)	55	Tidak dilakukan penilaian	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	964,000,000.00	469,455,000.00	48.70
						Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	4,283,176,301.73	3,145,644,852.00	73.44
						Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	110,064,886,145.83	102,873,828,265.00	93.47
							115,312,062,447.56	106,488,928,117.00	92.35

TUJUAN II

Tabel 3.8
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Program			
						Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
							Rp	Rp	%
1	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah	1	Rasio PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan (%)	16,47	16,53	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1,849,515,354.94	1,572,258,050.00	85.01
		2	Rasio PDRB Sektor Industri Olahan (%)	10,97	11,46	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	22,003,062.00	20,987,500.00	95.38
		3	Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum (Pariwisata) (%)	1,5	1,64	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	127,932,758.15	127,855,750.00	99.94
		4	Rasio PDRB Sektor Perdagangan (%)	10,75	11,21	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	92,010,423.77	87,204,000.00	94.78
						Program Pengawasaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	651,477,816.52	337,072,984.00	51.74
						Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1,678,388,396.39	1,498,311,083.00	89.27

					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1,149,514,272.95	1,096,207,396.00	95.36
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	752,108,076.00	199,378,015.00	26.51
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	10,608,500,470.95	9,328,668,337.00	87.94
					Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	11,204,873.00	5,123,000.00	45.72
					Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	33,968,616.00	32,898,000.00	96.85
					Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	638,848,255.14	516,986,700.00	80.92
					Pogram Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	601,267,718.00	577,098,000.00	95.98
					Program Penyuluhan Pertanian	1,739,122,228.48	1,595,945,600.00	91.77
					Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1,235,788,693.76	661,392,374.00	53.52
					Program Pengawasan Keamanan Pangan	163,746,936.49	126,945,733.00	77.53

					Program Pemasaran Pariwisata	4,651,547,803.07	4,039,167,882.00	86.83
					Program Perizinan Usaha Pertanian	2,851,596,949.30	2,336,279,150.00	81.93
					Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	5,498,667,708.11	4,979,758,020.00	90.56
					Program Pengunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	467,581,814.48	455,051,247.00	97.32
					Program Pengembangan Ekspor	144,370,676.00	95,349,000.00	66.04
					Program Pengelolaan Pemasaran Hasil Perikanan	108,012,198.32	98,006,100.00	90.74
					Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	22,821,443,973.91	21,908,164,000.00	96.00
					Program Pengendalian dan Penanggulang Bencana Pertanian	848,372,553.54	716,829,440.00	84.49
					Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	2,005,330,817.38	1,360,406,118.00	67.84
					Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	585,169,813.00	180,140,300.00	30.78

						Program Standarilisasi dan Perlindungan Konsumen	89,353,796.45	76,444,650.00	85.55
						Program Penanganan Kerawanan Pangan	26,300,588.56	19,756,000.00	75.12
						Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	784,453,945.73	684,044,246.00	87.20
						Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2,280,524,892.84	2,101,769,478.00	92.16
							64,518,125,483.23	56,835,498,153.00	88.09
2	Meningkatkan Kontribusi Investasi Terhadap Perkonomian Daerah	1	Proporsi PMTB terhadap PDRB (%)	19,3	19,15	Program Pelayanan Penanaman Modal	86,250,815.16	75,434,745.00	87.46
						Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2,902,990,013.14	2,862,906,532.00	98.62
						Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	10,408,980.00	10,268,980.00	98.66
						Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	18,359,637.90	16,242,825.00	88.47
						Program Promosi Penanaman Modal	40,628,526.53	39,722,345.00	97.77

						Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	132,742,476.24	119,822,400.00	90.27
							3,191,380,448.97	3,124,397,827.00	97.90
3	Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,25	3,30	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	3,898,431,712.14	3,455,207,008.00	88.63
		2	Angka Kemiskinan (%)	3	3	Program Penempatan Tenaga Kerja	306,404,169.09	221,042,486.00	72.14
						Program Perencanaan Tenaga Kerja	237,360,004.55	207,728,420.00	87.52
						Program Pemberdayaan Sosial	219,968,424.96	168,225,426.00	76.48
						Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	573,039,772.42	482,303,290.00	84.17
						Program Penanganan Bencana	5,051,470,252.76	4,081,842,680.00	80.81
						Program Rehabilitas Sosial	2,281,029,580.94	2,162,610,317.00	94.81
						Program Hubungan Industrial	5,073,303,698.33	4,952,584,900.00	97.62

						Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1,160,740,440.07	1,060,536,626.00	91.37
							18,801,748,055.26	16,792,081,153.00	89.31

TUJUAN III

Tabel 3.9
Meningkatnya Tata kelola pemerintahan yang baik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Program			
						Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
							Rp	Rp	%
1	Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur	1	Indeks Infrastruktur Daerah (Nilai)	54,21	45,83	Program Penyelenggaraan Jalan	209,655,870,218.70	203,317,111,962.00	96.98
		2	Rasio Konektivitas (Nilai)	0,71	0,71	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	85,886,420,934.71	83,682,620,327.00	97.43
						Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	34,526,680,831.04	31,319,445,198.00	90.71
						Program Peningkatan Prasarana , Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	53,093,177,751.40	51,394,345,456.00	96.80

						Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	23,572,645,028.58	23,195,615,000.00	98.40
						Program Pengembangan Jasa Konstruksi	118,000,000.00	110,984,930.00	94.06
						Program Pengelolaan Pelayaran	438,980,694.72	430,170,250.00	97.99
						Program Penataan Bangunan Gedung	101,957,249,024.96	99,262,605,286.00	97.36
						Program Pengembangan Perumahan	1,369,120,422.15	1,314,123,000.00	95.98
						Program Kawasan Permukiman	9,585,270,000.00	9,503,855,000.00	99.15
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	29,319,031,261.96	28,266,006,856.00	96.41
						Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	4,977,480,000.00	4,936,090,000.00	99.17
							554,499,926,168.22	536,732,973,265.00	96.80
2	Meningkatnya Kualitas	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Nilai)	70,16	76,35	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin	167,250,264.67	136,255,886.00	81.47

	Lingkungan Hidup					Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)			
						Program Penangan/Pengaduan Lingkungan	76,572,276.11	54,457,000.00	71.12
						Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	5,583,741,378.15	4,267,226,770.00	76.42
						Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	4,838,321,070.48	4,101,225,706.00	84.77
						Program Perencanaan Lingkungan Hidup	217,047,044.02	207,864,680.00	95.77
						Program Pengelolaan Persampahan	20,589,351,545.46	9,905,110,956.00	48.11
						Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	56,222,570.84	54,339,600.00	96.65
							31,528,506,149.73	18,726,480,598.00	59.40
3	Menurunnya risiko bencana	1	Indeks Risiko Bencana (Nilai)	144	131,76	Program Penanggulangan Bencana	1,332,447,057.67	895,045,691.00	67.17
							1,332,447,057.67	895,045,691.00	67.17

TUJUAN IV

Tabel 3.10
Meningkatkan Pemerintahan yang adaftif dan melayani

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Program			
						Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
							Rp	Rp	%
1	Meningkatkan Pemerintah yang bersih dan akuntabel	1	AKIP Kabupaten (Nilai)	72	72,06	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,170,418,671.59	788,947,727.00	67.41
		2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Nilai)	79,7	89,104	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	363,052,874.00	312,142,448.00	85.98
		3	SPI (Nilai)	79	80,87	Program Penyelengaraan Pengawasan	4,328,619,165.61	3,364,883,430.00	77.74
						Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	4,102,899,512.30	3,413,044,810.00	83.19
						Program Pengelolaan Arsip	117,576,959.68	104,782,500.00	89.12
						Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	391.682.427,12	362.074.549,00	92.44

						Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1,548,698,016.50	1,418,388,200.00	91.59
						Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	55,564,039,692.43	50,475,100,452.00	90.84
						Program kepegawaian Daerah	5,347,739,759.85	3,956,999,796.00	73.99
						Program Perekonomian dan Pembangunan	2,539,607,457.04	2,312,877,486.00	91.07
						Program Pengelolaan Keuangan Daerah	319,091,935,329.16	288,367,843,210.00	90.37
						Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3,839,922,885.30	2,806,732,993.00	73.09
						Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	60,243,895.00	31,133,200.00	51.68
						Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	12,365,582,948.19	10,646,862,039.00	86.10
							410,832,019,593.77	368,361,812,840.00	89.66
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan	1	Indeks Pelayanan Publik (Nilai)	4,4	3,71	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	255,201,753.31	214,868,885.00	84.20

	Publik Berbasis Digital	2	IKM (Nilai)	88,6	89,31	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	8,047,439,788.07	7,526,068,029.00	93.52
		3	Indeks SPBE (Nilai)	3,12	3,12	Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik	68,417,888.00	57,024,292.00	83.35
						Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	13,274,158,000.17	12,394,004,735.00	93.37
						Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	33,916,461.88	33,314,118.00	98.22
						Program Penyelenggaran Statistik Sektoral	149,520,853.19	130,491,355.00	87.27
						Program Pendaftaran Penduduk	257,900,346.00	241,530,112.00	93.65
						Program Pencatatan Sipil	62,356,910.00	54,698,000.00	87.72
						Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	22,401,562,445.59	19,685,533,485.00	87.88
						Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1,933,021,221.80	1,760,705,426.00	91.09
						Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran	5,186,717,896.53	4,698,623,177.00	90.59

					dan Penyelamatan Non Kebakaran			
					Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	7,553,054,941.75	7,294,391,585.00	96.58
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1,218,005,624.00	899,871,494.00	73.88
					Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	6,323,003,541.46	6,096,737,164.91	96.42
					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	180,345,112.55	159,600,900.00	88.50
						66,944,622,784.30	61,247,462,757.91	91.49

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 101,67% dengan realisasi keuangan sebesar 84,86% menunjukkan adanya efisiensi dengan rincian sebagai berikut:

TUJUAN I

Tabel 3.11

Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Efisiensi
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	85,23%	101,76%	16,25%
		2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	85,23%	102,00%	16,45%
		3	Nilai Raport Pendidikan (nilai)	85,23%	100,13%	14,77%
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Usia Harapan Hidup (Tahun)	86,41%	99,84%	13,45%
3.	Meningkatan Kesetaraan Gender	1	Indeks Ketimpangan Gender (nilai)	74,63%	114,35%	34,73%
4.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda	1	Indeks Pembangunan Pemuda (nilai)	92,35%	Tidak dilakukan penilaian	-

TUJUAN II

Tabel 3.12

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Efisiensi
5.	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah	1	Rasio PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan (%)	88,09%	100,36%	12,22%
		2	Rasio PDRB Sektor Industri Olahan (%)	88,09%	104,46%	15,67%
		3	Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum (Pariwisata) (%)	88,09%	109,33%	19,43%
		4	Rasio PDRB Sektor Perdagangan (%)	88,09%	104,27%	15,52%
6.	Meningkatkan Kontribusi Investasi Terhadap Perkonomian Daerah	1	Proporsi PMTB terhadap PDRB (%)	97,90%	99,22%	1,33%

7.	Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	89,31%	98,48%	9,31%
		2	Angka Kemiskinan (%)	89,31%	100%	10.69%

TUJUAN III

Tabel 3.13

Meningkatnya Tata kelola pemerintahan yang baik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Efisiensi
8.	Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur	1	Indeks Infrastruktur Daerah (Nilai)	96,80%	84,54%	**-14,50%**
		2	Rasio Konektivitas (Nilai)	96,80%	100%	**3,20%**
9.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Nilai)	59,40%	108,82%	**45,42%**
10.	Menurunnya risiko bencana	1	Indeks Risiko Bencana (Nilai)	67,17%	109,28%	**38,53%**

TUJUAN III

Tabel 3.14

Meningkatkan Pemerintahan yang adaftif dan melayani

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Efisiensi
11.	Meningkatkan Pemerintah yang bersih dan akuntabel	1	AKIP Kabupaten (Nilai)	89,66%	100,83%	**10,40%**
		2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Nilai)	89,66%	111,80%	**19,37%**
		3	SPI (Nilai)	89,66%	102,36%	**12,40%**
12.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital	1	Indeks Pelayanan Publik (Nilai)	91,49%	84,31%	**-8,52%**
		2	IKM (Nilai)	91,49%	100,80%	**9,24%**
		3	Indeks SPBE (Nilai)	91,49%	100%	**8,51%**

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 merupakan laporan pertanggungjawaban tahun kesatu terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025–2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2025.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap 12 Sasaran 23 Indikator Kinerja Utama yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa 19 (sembilan belas) indikator telah berhasil memenuhi dan melampui target yang ditetapkan, 3 indikator belum memenuhi target, dan 1 (satu) indikator tidak dilaksanakan penilaian.

Berdasarkan penilaian Skala Nilai Predikat Kinerja diperoleh rata-rata nilai capaiannya adalah 101,67% dengan predikat sangat tinggi (capaian lebih dari 91%), yang terdiri atas 20 (sembilan belas) indikator dengan predikat Sangat Tinggi (capaian lebih dari 91%), 2 (dua) indikator dengan predikat “tinggi” (capaian 76% sampai dengan 90%).

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Upaya-upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka peningkatan kinerja sebagai berikut:

1. Menyusun perencanaan berbasis kinerja dengan menekankan keterkaitan antara permasalahan, tujuan, program, kegiatan, serta indikator kinerja untuk menjamin tercapainya outcome yang diharapkan;
2. Memperkuat komitmen pimpinan dalam menumbuhkan budaya kinerja yang berorientasi pada hasil, akuntabilitas, dan perbaikan berkelanjutan
3. Melaksanakan monev kinerja pertriwulan dengan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, rencana aksi dan tindak lanjut melalui Aplikasi SIMPUN;
4. Memastikan pengukuran kinerja dilakukan berbasis data yang valid, andal, dan mutakhir sebagai dasar penilaian pencapaian output dan outcome;

5. Melaksanakan workshop/pendampingan dengan orientasi yang lebih ditekankan pada peningkatan pemahaman terhadap SAKIP sebagai sistem manajemen kinerja;
6. Meningkatkan penyajian informasi pada LPPD dan pelaporan kinerja SKPD yang menggambarkan pencapaian kinerja, efektivitas program dan efisiensi anggaran, serta perbandingan berupa benchmarking kinerja terhadap indikator kinerja yang sama dan berlaku secara umum di wilayah kalsel maupun nasional;
7. Memberikan *reward* dan *punishment* kepada SKPD sesuai dengan kinerja organisasi;
8. Memperkuat peran APIP sebagai penjamin kualitas melalui fungsi sistem peringatan dini, fasilitator implementasi manajemen kinerja, evaluator internal yang objektif, serta pengawal efisiensi anggaran (value for money) guna meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan kinerja organisasi.

Pelaihari, Mei 2026

Bupati Tanah Laut,

H. RAHMAT TRIANTO

SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/1132-KUM/2025

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025-2029

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, maka perlu ditetapkan indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 80);

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 118);
12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2025 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama meliputi :
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten.

KETIGA : Susunan Indikator Kinerja Utama sebagaimana Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk:
a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
c. menyusun dokumen penetapan kinerja;
d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KELIMA : Inspektorat Kabupaten wajib:
a. melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan
b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

KEENAM : Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 01 Oktober 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 100.3.3.2/1132-KUM/2025
TANGGAL : 01 Oktober 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 – 2029

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (IKU)	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
Misi 1 : Membangun SDM yang Unggul dan Berdaya Saing Dengan Nilai-nilai Agama					
1	Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Hasil Perhitungan dari BPS	BPS	
1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Berdasarkan perhitungan dari BPS	Berdasarkan perhitungan dari BPS	
		Harapan Lama Sekolah	Berdasarkan perhitungan dari BPS	BPS	
		Nilai Raport Pendidikan	Berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	
1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Usia Harapan Hidup	Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS	BPS	
1.3	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Ketimpangan Gender	Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS	BPS	
1.4	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	Skor domain Pendidikan + Skor domain Kesehatan dan kesejahteraan + skor	Kemenpora / BPS	

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (IKU)	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			domain lapangan dan kesempatan kerja + skor domain partisipasi dan kepemimpinan + skor domain gender dan diskriminasi / 5		
Misi 2 : Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas					
2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Hasil Perhitungan dari BPS	BPS	
		Gini Ratio	Hasil Perhitungan dari BPS	BPS	
		PDRB Perkapita	PDRB/jumlah penduduk	BPS	
2.1	Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah	Rasio PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	Berdasarkan Hasil Penilaian dari BPS	BPS	
		Rasio PDRB Sektor Industri Olahan	Berdasarkan Hasil Penilaian dari BPS	BPS	
		Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum (Pariwisata)	Berdasarkan Hasil Perhitungan dari BPS	BPS	
		Rasio PDRB Sektor Perdagangan	Berdasarkan hasil dari Perhitungan BPS	BPS	
2.2	Meningkatnya kontribusi investasi terhadap perekonomian daerah	proporsi PMTB terhadap PDRB	berdasarkan hasil perhitungan dari BPS	BPS	
2.3	Menurunnya Kemiskinan dan pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS	BPS	

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (IKU)	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		Angka Kemiskinan	Berdasarkan Hasil Perhitungan dari	BPS	
3	Meningkatkan kualitas infrastruktur berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastuktur	Berdasarkan hasil survey ke masyarakat	Bapperida Kabupaten Tanah Laut	
		Penurunan intensitas emisi GRK	Berdasarkan hasil perhitungan Kementerian Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup	
3.1	Meningkatnya Pemerataan infrastuktur	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks infrastruktur PU + Indeks infrastruktur Perkim + Indeks infrastruktur Perhubungan dibagi 3	Bapperida	
		Rasio Konektivitas	(IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan).	Dishub	
3.2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x I	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3.3	Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	Berdasarkan hasil perhitungan dari BNPB	BNPB	
Misi 3 : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis					
4	Meningkatkan Pemerintahan yang adaftif dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	Berdasarkan Hasil Penilaian dari Kemenpan	Kemenpan RB	

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (IKU)	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			RB		
4.1	Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Nilai AKIP Kabupaten	Berdasarkan Hasil Penilaian dari Kemenpan RB	Kemenpan RB	
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Berdasarkan hasil penilaian dari Kemendagri	Kemendagri	
		Nilai SPI	Berdasarkan Hasil Penilaian dari KPK	KPK	
4.2	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis digital	Indeks Pelayanan Publik	Berdasarkan Hasil Penilaian dari Kemenpan RB	Kemenpan RB	
		IKM	Berdasarkan Hasil Survey yang divalidasi oleh Kemenpan RB	Bagian Organisasi dan Kemenpan RB	
		Indeks SPBE	Berdasarkan Hasil Penilaian dari Kementerian Menpan RB	Kemenpan RB	
		Indeks Pemerintah Digital	Berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian Menpan RB	Kemenpan RB	

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO



PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2025

BUPATI TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. RAHMAT TRIANTO**
Jabatan : **Bupati Tanah Laut**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pelaihari, 21 Februari 2025

BUPATI TANAH LAUT,

H. RAHMAT TRIANTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran RPJMD)		Indikator Kinerja Utama	Target	SKPD Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7.98	Sumber Data Badan Pusat Statistik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12.45	Sumber Data Badan Pusat Statistik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan	1	Usia Harapan Hidup (Tahun)	75	Sumber Data Badan Pusat Statistik, Dinas Kesehatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah	1	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan (%)	16.47	Sumber Data badan Pusat Statistik Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahan Pangan dan Perikanan
		1	Kontribusi PDRB Sektor Industri Olahan (%)	10.97	Sumber Data badan Pusat Statistik Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		1	Kontribusi PDRB Akomadasi dan Makan Minum (pariwisata) (%)	1.5	Sumber Data badan Pusat Statistik Dinas Pariwisata
		1	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan (%)	10.75	Sumber Data badan Pusat Statistik Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
4	Meningkatnya Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan	2	TPT (%)	2,7 - 3,43	Sumber Data badan Pusat Statistik Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian
		1	Gini Ratio (Nilai)	0,171-0,255	Sumber Data badan Pusat Statistik Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	1	Indeks Infrastruktur Daerah (Nilai)	54.21	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Dinas Perhubungan
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Nilai)	70.16	Sumber Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Perumahan Rakyat, Kwasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		1	Indeks Resiko Bencana (Nilai)	144	Sumber Data BNPB Badan Penanggulangan Bencana daerah Dinas Sosial

7	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi Pada Layanan	1	SAKIP (Nilai)	72	Sumber Data KemenpanRB Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Inspektorat Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
		1	Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	81	Sumber Data KemenpanRB Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Inspektorat Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
		1	SPBE (Nilai)	3.15	Sumber Data KemenpanRB Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
		1	Indeks Pelayanan Publik (Nilai)	4.4	Sumber Data KemenpanRB Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
		1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Nilai)	79.7	Sumber Data Kemendagri Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Pendapatan Daerah

BUPATI TANAH LAUT



H. RAHMAT TRIANTO

No	Program	Anggaran
1	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	4,579,531,970.04
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	26,208,995,633.27
3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	5,210,181,249.48
4	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	9,616,000,000.00
5	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5,132,454,156.17
6	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	368,625,281.60
7	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	66,413,778.00
8	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	3,742,643,281.87
9	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	115,970,059.62
10	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	983,560,143.01
11	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	58,809,674.40
12	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1,549,382,307.52
13	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	618,468,073.76
14	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1,051,541,578.08
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1,223,916,490.04
16	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	139,297,000.00
17	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6,465,685,905.08
18	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	265,644,228.18
19	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1,709,891,453.00
20	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	346,263,557.00
21	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (P	263,017,089.85
22	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	401,994,011.28
23	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4,037,358,586.26
24	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	772,634,197.44
25	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	49,999,798.31
26	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	175,746,599.00
27	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	110,420,568,471.03
28	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	53,352,064,143.60
29	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1,144,903,257.00
30	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	47,534,928.65
31	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	106,819,489.73
32	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1,407,579,911.87
33	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	67,714,737,800.00
34	PROGRAM PENATAAN DESA	379,510,461.44
35	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	78,019,450.00
36	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	74,396,910.00
37	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	5,147,621,203.45
38	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	184,531,846.00
39	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	45,194,949.00
40	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1,366,972,836.00
41	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	612,619,437.27
42	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	583,575,724.26
43	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	79,939,724.00
44	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	251,561,067.13

45	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	608,777,912.52
46	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	5,883,235,270.50
47	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	129,166,038.25
48	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	8,810,565,478.36
49	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6,541,000,000.00
50	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	21,624,999,939.35
51	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	28,229,787,720.66
52	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	166,093,680.00
53	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1,514,240,768.15
54	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3,237,639,280.60
55	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	3,042,079,454.02
56	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	401,691,990,322.15
57	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1,153,624,809.00
58	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4,067,069,317.36
59	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	176,908,368,288.06
60	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	859,811,444.00
61	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1,759,416,086.39
62	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	18,031,780,735.29
63	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	147,439,823.00
64	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	81,605,144,816.98
65	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	623,121,798.00
66	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	360,870,924.45
67	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	190,171,048.00
68	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	149,991,352.00
69	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	18,379,625.00
70	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	273,000,000.00
71	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	63,745,025,695.21
72	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	5,490,202,801.84
73	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1,250,000,000.00
74	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	3,787,217,192.79
75	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	299,965,412.51
76	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	272,477,809.72
77	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1,397,440,000.00
78	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2,791,999,592.48
79	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1,252,303,163.50
80	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	875,277,657.00
81	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	36,869,163.00
82	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	959,099,380.46
83	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	18,388,976.00
84	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	6,008,426,319.23
85	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	219,981,011.25
86	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	444,819,269.00
87	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	43,946,214.43
88	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	153,136,228.44
89	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1,917,596,268.99

90	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	15,679,901.00
91	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2,650,762,024.64
92	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1,065,265,197.43
93	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	12,939,727,660.00
94	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	238,740,033.96
95	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3,394,991,187.11
96	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1,316,838,879.00
97	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERT	2,396,019,210.65
98	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	43,710,053,683.69
99	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	395,797,380.20
100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,202,671,866,579.13
101	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	19,464,620,728.00
102	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	6,281,555,259.03
103	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	194,004,570,089.78
104	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	32,924,019,256.95
105	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	84,331,059.04
106	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3,787,099,081.91
107	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4,528,141,797.40
108	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	108,456,992.33
109	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	152,112,038.15
110	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11,427,867,158.06
111	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	1,403,857,353.82
112	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1,509,840,939.00
113	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2,661,110,196.45
114	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1,988,755,616.77
115	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	175,120,152.98
116	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	197,673,270.22
117	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1,417,879,533.59
118	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	2,466,447,593.00
119	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	611,438,230.42
120	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	89,233,895.00
121	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	862,791,949.00
122	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	245,085,282.00
123	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	5,000,000,000.00
124	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	3,948,991,731.40
125	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	184,064,973.00
126	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2,414,565,212.00
127	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	67,720,000.00
128	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	501,863,477.48
129	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	86,088,979.00
	TOTAL	**2,746,135,159,383.22**

Pelaihari, 21 Februari 2025

BUPATI TANAH LAUT,

H. RAHMAT TRIANTO

BUPATI TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	H. RAHMAT TRIANTO
Jabatan	:	BUPATI TANAH LAUT

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pelaihari, 02 September 2025

BUPATI TANAH LAUT,

H. RAHMAT TRIANTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran RPJMD)	Indikator Kinerja Utama	Target	SKPD Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1 Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,98	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		2 Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,45	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		3 Nilai Raport Pendidikan (nilai)	74,46	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan	1 Usia Harapan Hidup (Tahun)	75	Dinas Kesehatan
3	Meningkatnya Kesetaraan Gender	1 Indeks Ketimpangan Gender (nilai)	0,47	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
4	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda	1 Indeks Pembangunan Pemuda (nilai)	55	Dinas Pemuda dan Olahraga
5	Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah	1 Rasio PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan (%)	16,47	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		2 Rasio PDRB Sektor Industri Olahan (%)	10,97	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		3 Rasioi PDRB Akomodasi dan Makan Minum (Pariwisata) (%)	1,5	Dinas Pariwisata
		4 Rasio PDRB Sektor Perdagangan (%)	10,75	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
6	Meningkatnya kontribusi investasi terhadap perekonomian daerah	1 proporsi PMTB terhadap PDRB (%)	19,3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7	Menurunnya Kemiskinan dan pengangguran	1 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,25	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		2 Angka Kemiskinan (%)	3	Dinas Sosial
8	Meningkatnya Pemerataan infrastuktur	1 Indeks Infrastruktur Daerah (Nilai)	54,21	Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang dan Pertanahan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		2 Rasio Konektivitas (Nilai)	0,71	Dinas Perhubungan
9	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Nilai)	70,16	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

No.	Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran RPJMD)	Indikator Kinerja Utama	Target	SKPD Penanggung Jawab
10	Menurunnya risiko bencana	1 Indeks Risiko Bencana (Nilai)	144	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11	Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	1 AKIP Kabupaten (Nilai)	72	Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		2 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Nilai)	79,7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		3 SPI (Nilai)	79	Inspektorat
12	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis digital	1 Indeks Pelayanan Publik (Nilai)	4,4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2 IKM (Nilai)	88,6	Seluruh Kecamatan, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		3 Indeks SPBE (Nilai)	3,12	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

BUPATI TANAH LAUT,

H. RAHMAT TRIANTO

No	Program	Anggaran
1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.347.739.759,85
2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.279.721.761,04
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.220.502.022.983,60
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	689.334.224,86
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	456.366.610,05
6	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.572.153.642,80
7	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.218.005.624,00
8	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	2.379.222.783,41
9	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.332.447.057,67
10	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.839.922.885,30
11	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	12.365.582.948,19
12	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	320.291.935.329,16
13	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	363.052.874,00
14	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.548.698.016,50
15	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.170.418.671,59
16	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	110.064.886.145,83
17	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	4.283.176.301,73
18	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	964.000.000,00
19	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	62.356.910,00
20	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	257.900.346,00
21	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.933.021.221,80
22	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	561.038.000,00
23	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	140.113.262.203,80
24	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	8.940.052.335,00
25	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	294.072.000,00
26	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	26.300.588,56
27	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	163.746.936,49
28	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	651.477.816,52
29	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	752.108.076,00
30	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.678.388.396,39
31	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	601.267.718,00
32	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	108.012.198,32
33	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.235.788.693,76
34	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	7.553.054.941,75
35	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	6.323.003.541,46

No	Program	Anggaran
36	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	156.701.085,48
37	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	149.520.853,19
38	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.005.330.817,38
39	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	33.968.616,00
40	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	638.848.255,14
41	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	144.370.676,00
42	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	467.581.814,48
43	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	11.204.873,00
44	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2.280.524.892,84
45	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	585.169.813,00
46	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	89.353.796,45
47	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	4.651.547.803,07
48	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	92.010.423,77
49	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.149.514.272,95
50	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	5.498.667.708,11
51	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	101.957.249.024,96
52	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	53.235.423,00
53	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6.041.000.000,00
54	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	23.572.645.028,58
55	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	29.319.031.261,96
56	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	85.886.420.934,71
57	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	118.000.000,00
58	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	209.655.870.218,70
59	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.902.990.013,14
60	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	1.034.090.419,09
61	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	4.052.238.164,26
62	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.160.740.440,07
63	PROGRAM PENATAAN DESA	423.143.982,08
64	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	77.598.736,45
65	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.744.520.034,40
66	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	5.377.385.327,53
67	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	152.806.322,45
68	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.133.001.532,57
69	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	360.825.043,50
70	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	605.714.517,44
71	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	202.153.906,00
72	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	86.250.815,16

No	Program	Anggaran
73	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	132.742.476,24
74	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	18.359.637,90
75	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	10.408.980,00
76	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	40.628.526,53
77	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	753.361.399,15
78	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	49.999.661,98
79	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	181.412.792.193,82
80	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	4.342.108.636,42
81	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	299.917.046,36
82	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	235.880.331,60
83	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	438.980.694,72
84	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	34.526.680.831,04
85	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	70.877.578,00
86	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.743.181.812,56
87	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	117.576.959,68
88	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	60.243.895,00
89	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	9.585.270.000,00
90	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	167.250.264,67
91	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	76.572.276,11
92	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	4.838.321.070,48
93	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	20.589.351.545,46
94	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.369.120.422,15
95	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	5.583.741.378,15
96	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	56.222.570,84
97	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	53.093.177.751,40
98	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	217.047.044,02
99	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	4.977.480.000,00
100	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	784.453.945,73
101	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	22.821.443.973,91
102	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	10.608.500.470,95
103	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.739.122.228,48
104	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	219.968.424,96
105	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	5.051.470.252,76
106	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	360.870.924,45
107	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	573.039.772,42
108	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.281.029.580,94
109	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	848.372.553,54
110	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	2.851.596.949,30
111	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	5.073.303.698,33
112	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	3.898.431.712,14
113	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	306.404.169,09

No	Program	Anggaran
114	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	127.932.758,15
115	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	22.003.062,00
116	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.849.515.354,94
117	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	237.360.004,55
118	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.328.619.165,61
119	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	4.102.899.512,30
120	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	33.916.461,88
121	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	8.047.439.788,07
122	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	255.201.753,31
123	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	68.417.888,00
124	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	13.274.158.000,17
125	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	5.186.717.896,53
126	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.853.466.954,49
127	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	55.564.039.692,43
128	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.539.607.457,04
129	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	22.401.562.445,59
Total		**2.862.912.928.226,68**

BUPATI TANAH LAUT,

H. RAHMAT TRIANTO

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
I N S P E K T O R A T
Jln. A. Syairani, Pelaihari, Komp. Perkantoran Gagas, Kab. Tanah Laut,
Kalimantan Selatan 70814 Telepon (0512) 22384
Laman http://inspektorat.tanahlautkab.go.id, Pos-el inspektorattala@gmail.com

LAPORAN HASIL REVIU (LHR)
ATAS
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2025

Nomor : 700.1.2.8/30-LHR-LKjIP/INSP/2026
Tanggal : 10 Maret 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
I N S P E K T O R A T
Jln. A.Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari
Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814 Telepon (0512) 22384
Laman https://inspektorat.tanahlautkab.go.id, Pos-el inspektorattala@gmail.com

Pelaihari, 10 Maret 2026

Nomor : 700.1.2.8/30-LHR-LKjIP/INSP/2026
Lampiran : -
H a l : Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

Kepada Yth.
Bupati Tanah Laut
di-
Pelaihari

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka memastikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) telah disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas, maka perlu dilakukan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

Reviu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan prinsip sebagai berikut :

1. Memastikan sistematika dan substansi dalam penyusunan dokumen-dokumen diatas telah sesuai dengan pedoman dan telah disahkan;
2. Memastikan kesesuaian Visi dan Misi antara LKjIP dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029;
3. Memastikan kesesuaian Tujuan dan sasaran dan target antara LKjIP dengan RPJMD;
4. Memastikan sasaran, indikator sasaran dan target dalam LKjIP telah sesuai dokumen IKU;
5. Memastikan sumber data yang disajikan dalam LKjIP telah andal dan sesuai dengan data Perangkat Daerah penanggungjawab;
6. Memastikan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah dibuat, diformalkan, ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sasaran, indikator dan target sesuai dengan program, kegiatan dan anggaran;
7. Memastikan penyajian parameter pengukuran keberhasilan/ kegagalan di setiap pencapan target kinerja;
8. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029;

9. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, provinsi atau standar lainnya yang relevan;
10. Memastikan penyajian analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
11. Memastikan adanya penyajian analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
12. Memastikan penyajian analisis efektivitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya.

Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat sebagaimana dalam audit, karena reviu tidak mencakup pengujian atas pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, pengujian atas dokumen sumber dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan dengan cara pemerolehan bahan bukti yang menguatkan melalui pengamatan, atau konfirmasi, dan prosedur tertentu lainnya yang biasa dilaksanakan dalam suatu audit. Reviu dilakukan berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah.

II. Simpulan Reviu

Berdasarkan hasil reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025, tidak terdapat hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan, sebagaimana telah kami tuangkan dalam lembar pernyataan telah direviu oleh APIP.

Substansi informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sepenuhnya menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Hal-hal yang bersifat perbaikan dan penyempurnaan atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanah Laut, kami tuangkan dalam saran dan rekomendasi.

III. Uraian Hasil Reviu.

1. Data Umum

a. Dasar Pelaksanaan Reviu.

1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
4) Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 000.8.6.3/119/SETDA tanggal 2 Maret 2026 tentang Permohonan Reviu

LKjIP Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;

5) Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 800.1.11.1/076/INSP/2026 tanggal 02 Maret 2026.

b. Waktu Pelaksanaan Reviu

Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dilaksanakan mulai tanggal 02 s/d 10 Maret 2026 (9 hari).

c. Tujuan Reviu

1) Membantu penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
2) Memberikan keyakinan terbatas dan saran mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja instansi pemerintah, sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanah Laut sehingga lebih berkualitas.

d. Ruang Lingkup Reviu.

1) Pengumpulan data/informasi yang akan digunakan untuk pengujian terhadap keandalan dan akurasi dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.
2) Penelaahan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) secara ringkas untuk menilai keselarasan antara perencanaan strategis terutama dalam hal keselarasan sasaran, indikator kinerja, dan program;

2. Catatan Hasil Reviu.

Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

a. Kesesuaian sistematika & substansi penyusunan LKjIP dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 :

- Secara umum struktur penulisan dan isi dokumen telah sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 54 Tahun 2014, khususnya terkait sistematika penyusunan laporan kinerja yang meliputi pendahuluan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, analisis capaian kinerja, penggunaan anggaran, serta simpulan dan langkah perbaikan.
- Pada dokumen tersebut telah disajikan gambaran umum organisasi, penetapan Perjanjian Kinerja, perbandingan antara target dan realisasi kinerja, analisis capaian indikator, serta keterkaitan antara pelaksanaan program dengan penggunaan anggaran.

b. Kesesuaian Visi dan Misi antara LKjIP dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 :

Uraian Visi dan Misi dalam LKjIP telah sesuai dengan RPJMD.

c. Kesesuaian Tujuan, sasaran, Indikator dan target antara LKjIP dengan RPJMD, sebagai berikut :

1) Secara umum Tujuan dan Indikator pada LKjIP telah sesuai dengan Tujuan dan Indikator pada RPJMD, namun terdapat beberapa penulisan satuan indikator yang belum sesuai sebagai berikut :

No	LKjIP			RPJMD			Reviu	
	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	CHR	Rekomendasi
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tabel 3.1.1 halaman 59	Kosong	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,8 (Nilai)	Belum sesuai	Sesuaikan
2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi (tabel 3.5.1 halaman 134	5,1 - 5,2 (Angka)	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,1 - 5,2 (%)	Belum sesuai	Sesuaikan
		Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio) Tabel 3.5.1 Halaman 134	0,24-0,249 (Rasio)		Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)	0,24-0,249 (Nilai)	Belum sesuai	Sesuaikan

2) Secara umum Sasaran dan Indikator dalam LKjIP telah sesuai dengan RPJMD, namun terdapat penyebutan satuan target yang yang belum sesuai sebagai berikut :

No	LKjIP			RPJMD			Reviu	
	Sasaran	**Indikator Sasaran**	**Target**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Target**	**CHR**	**Rekom**
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (tabel 3.9.1 halaman 330)	70,16 (Skor)	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,16 (Indeks)	Belum sesuai	sesuaikan
2	Menurunnya Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana (tabel 3.10.2 halaman 376)	144 (skor)	Menurunnya Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	144 (Nilai)	Belum sesuai	sesuaikan

d. Kesesuaian indikator sasaran dan target dalam LKjIP dengan RPJMD dan dokumen IKU :

Secara umum indikator sasaran dan target dalam LKjIP dengan RPJMD dan dokumen IKU telah sesuai.

e. Kesesuaian Formulasi perhitungan di LKjIP dengan IKU;

Formulasi perhitungan di LKjIP telah sesuai dengan IKU, Capaian target dalam LKjIP telah menyajikan fomulasi perhitungan, namun masih terdapat formula yang belum sesuai (Rumus di halaman 41 dengan 318) sebagai berikut :

Formulasi di LKjIP	Formulasi di IKU	Hasil / Catatan Reviu
$\frac{Indeks\ Infrastruktur\ DPUPRP + Indeks\ Infrastruktur\ DPRKPLH}{2}$	Indeks infrastruktur PU + Indeks infrastruktur Perkim + Indeks infrastruktur Perhubungan dibagi 3	Tidak sesuai, perbedaan pada rumus pembagi
$\frac{\sum(Jumlah\ Trayek\ Terlayani\ x\ Bobot)}{Total\ kebutuhan\ trayek}$	(IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan).	Tidak sesuai, perbedaan pada rumus pembagi

f. Keandalan sumber data yang disajikan dalam LKjIP dan kesesuaian dengan data Perangkat Daerah penanggungjawab, sebagai berikut :

Sumber data yang disajikan dalam LKjIP telah andal dan sesuai dengan data pada Perangkat Daerah penanggungjawab, namun terdapat beberapa sumber data yang perlu dicantumkan sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Tabel/Grafik	Catatan Reviu	Rekomendasi
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Nilai Raport Pendidikan	grafik 3.1.5 hal 65 sumber data Disdikbud Kab Tanah Laut	Pada IKU sumber data : Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Disesuaikan / disamakan
2	Meningkatnya kualitas pembangunan pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda (nilai)	Tabel 3.4.1 hal 119	Tidak ada data capaian dan sumber data	Diberikan penjelasan terkait dengan penilaian indikator ini jika nanti akan dilakukan di Tanah Laut
3	Meningkatnya kontribusi investasi terhadap perekonomian daerah	Proporsi PMTB terhadap PDRB (%)	Grafik 3.6.1 hal 256	Tidak disebutkan sumber data	Dicantumkan
4	Meningkatnya Pemerataan infrastuktur	Indeks Infrastruktur Daerah (Nilai) Rasio Konektivitas (Nilai)	tabel 3.8.3 hal 299 , hal 319	Tidak disebutkan sumber data	Dicantumkan
5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Nilai)	tabel 3.9.1 dan 3.9.2 hal 330	Tidak disebutkan sumber data	Dicantumkan
6	Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	AKIP Kabupaten (Nilai) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Nilai) SPI (Nilai)	tabel 3.11.2 hal 390	Tidak disebutkan sumber data	Dicantumkan
7	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis digital	Indeks Pelayanan Publik (Nilai) IKM (Nilai) Indeks SPBE (Nilai)	tabel 3.12.1 hal 432 tabel 3.12.3 hal 436	Tidak disebutkan sumber data	Dicantumkan

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Tabel/Grafik	Catatan Reviu	Rekomendasi
			tabel 3.12.6 hal 509		

g. Penerapan Perjanjian Kinerja (PK) kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku, sasaran, indikator dan target sesuai dengan program:
Perjanjian Kinerja (PK) telah dibuat, dan telah diformalkan, sasaran, indikator dan target sesuai dengan program.

h. Penyajian parameter pengukuran keberhasilan/kegagalan di setiap pencapaian target kinerja;

Dalam LKjIP telah menyajikan parameter untuk mengukur keberhasilan/ kegagalan di setiap pencapan target kinerja yaitu dengan adanya **pengukuran capaian kinerja**. Namun terdapat catatan reviu sebagai berikut :
Penggunaan Skala Nilai Peringkat Kinerja sebagaimana Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Direkomendasikan untuk tabel 3.1,3.2, 3.3 dan 3.4 pada halaman 54 sampai dengan 56 kolom **kategori diganti Predikat Capaian Kinerja** dan ditambahkan kolom **keterangan** sebagai berikut **:**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Predikat Capaian Kinerja	Keterangan
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,98	8,09	101,76%	Sangat Tinggi	Tercapai (melebihi target)
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,45	12,7	102,00%	Sangat Tinggi	Tercapai (melebihi target)
		Nilai Raport Pendidikan (nilai)	74,46	74,46	100,13%	Sangat Tinggi	Tercapai (melebihi target)
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Usia Harapan Hidup (Tahun)	75	74,88	99,84%	Sangat Tinggi	Belum tercapai (kurang dari target)
3	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Ketimpangan Gender (nilai)	0,47	Belum ada data	Belum bisa dinilai	-	Belum rilis oleh BPS RI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Predikat Capaian Kinerja	Keterangan
4	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda (nilai)	55	Belum ada data	Belum bisa dinilai	-	tidak dilakukan penilaian
5	Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah	Rasio PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan (%)	16,47	16,53	100,36%	Sangat Tinggi	Tercapai (melebihi target)
		Rasio PDRB Sektor Industri Olahan (%)	10,97	11,46	104,46%	Sangat Tinggi	Tercapai (melebihi target)
		Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum (Pariwisata) (%)	1,5	1,64	109,33%	Sangat Tinggi	Tercapai (melebihi target)
		Rasio PDRB Sektor Perdagangan (%)	10,75	11,21	104,27%	Sangat Tinggi	Tercapai (melebihi target)
6	Meningkatnya kontribusi investasi terhadap perekonomian daerah	proporsi PMTB terhadap PDRB (%)	19,3	19,15	99,22%	Sangat Tinggi	Belum tercapai (kurang dari target)
7	Menurunnya Kemiskinan dan pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,25	3,3	98,48%	Sangat Tinggi	Belum tercapai (kurang dari target)
		Angka Kemiskinan (%)	3	3	100,00%	Sangat Tinggi	Tercapai (sama dengan target)
8	Meningkatnya Pemerataan infrastuktur	Indeks Infrastruktur Daerah (Nilai)	54,21	45,89	84,65%	Tinggi	Belum tercapai (kurang dari target)
		Rasio Konektivitas (Nilai)	0,71	0,71	100,00%	Sangat Tinggi	Tercapai (sama dengan target)
9	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Nilai)	70,16	76,35	108,82%	Sangat Tinggi	Tercapai (melebihi target)
10	Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana (Nilai)	144	131,76	109,28%	Sangat Tinggi	Tercapai (melebihi target)
11	Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	AKIP Kabupaten (Nilai)	72	72,06	100,83%	Sangat Tinggi	Tercapai (melebihi target)
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Nilai)	79,7	89,104	111,80%	Sangat Tinggi	Tercapai (melebihi target)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Predikat Capaian Kinerja	Keterangan
		SPI (Nilai)	79	80,87	102,36%	Sangat Tinggi	Tercapai (melebihi target)
12	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis digital	Indeks Pelayanan Publik (Nilai)	4,4	3,71	84,31%	Tinggi	Belum tercapai (kurang dari target)
		IKM (Nilai)	88,6	89,31	100,80%	Sangat Tinggi	Tercapai (melebihi target)
		Indeks SPBE (Nilai)	3,12	3,12	100,00%	Sangat Tinggi	Tercapai (sama dengan target)
	Rata-Rata				101,07%	Sangat Tinggi	

i. Perbandingan target kinerja dan realisasi Tahun 2025 LKjIP dengan Target RPJMD dan IKU;

Secara umum target kinerja dan realisasi Tahun 2025 LKjIP dengan Target RPJMD dan IKU telah sesuai.

j. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan Standar Nasional, provinsi atau standar lainnya yang relevan sebagai berikut :

Telah terdapat perbandingan realisasi capaian kinerja dengan Standar Nasional, provinsi atau standar lainnya yang relevan.

Seluruh Capaian target Indikator Kinerja Utama yang bersifat Makro telah tersedia data pembanding pada level Nasional dengan membanding Realisasi Standar Nasional, yaitu :

No	LKjIP		NASIONAL / PROVINSI		Hasil Reviu
	Indikator	Capaian	Indikator	Target/Capaian	
1	Angka rata-rata lama sekolah (tahun) Harapan lama sekolah (tahun) Nilai Raport Pendidikan	8,09 12,70 74,46	Angka rata-rata lama sekolah (tahun) Harapan lama sekolah (tahun) Nilai Raport Pendidikan	8,62 (prov) / 8,85 (Nas) 13,12 (Prov) / 13,30 (Nas) 76,96 (Prov)	Nilai Capaian berada di bawah nilai capaian Provinsi dan Nasional
2	Usia Harapan Hidup	74.88	Usia Harapan Hidup	74,49 (Prov) / 74,47 (Nas)	Nilai Capaian berada di atas nilai capaian Provinsi dan Nasional

No	LKjIP		NASIONAL / PROVINSI		Hasil Reviu
	Indikator	Capaian	Indikator	Target/Capaian	
3	Tingkat Pengangguran Terbuka Angka Kemiskinan	3,30 3	Tingkat Pengangguran Terbuka Angka Kemiskinan	4,16 (Prov) / 4,85 (Nas) 3,84 (Prov)	di bawah nasional dan provinsi

k. Penyajian analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan :

1) Secara umum Analisa terkait keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja telah disajikan, namun masih terdapat beberapa catatan, sebagai berikut :

No.	Uraian Indikator Capaian	Capaian	Analisa Penyebab	Analisa alternatif solusi	Catatan	Rekomendasi
1	Usia Harapan Hidup (tahun) (Halaman 91-106)	99.84%	Ada	Ada	Belum ada secara spesifik menerangkan bagian mana yang menjadi faktor penyebab kegagalan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan	Agar menambahkan kalimat penghubung yang menerangkan faktor yang menjadi penyebab belum tercapainya target
2	Indeks Pembangunan Pemuda (nilai) (Halaman 119-133)	Tidak dilakukan penilaian	Ada namun tidak dapat diterima	Ada namun tidak dapat diterima	Tidak dilakukannya penilaian terhadap capaian kinerja berupa Indeks Pembangunan Pemuda mengakibatkan analisa mengenai kesesuaian penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja serta alternatif solusi pencapaian kinerja tidak dapat diterima secara objektif	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dengan penilaian indikator ini.
3	Proporsi PMTB terhadap PDRB (%) (Halaman 254-268)	99.22%	Tidak ada	Tidak ada	1 Belum ada analisa mengenai penyebab kegagalan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan	1 Agar menambahkan analisa penyebab kegagalan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan
					2 Belum ada rencana aksi untuk menyelesaikan potensi permasalahan/ hambatan dalam pencapaian kinerja sebagai alternatif solusi pencapaian kinerja	2 Agar menambahkan alternatif solusi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang ada

No.	Uraian Indikator Capaian	Capaian	Analisa Penyebab	Analisa alternatif solusi	Catatan	Rekomendasi
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) (Halam 269-281)	98.48%	ada	ada	Belum ada secara spesifik menerangkan bagian mana yang menjadi faktor penyebab kegagalan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan	Agar menambahkan kalimat penghubung yang menerangkan faktor yang menjadi penyebab belum tercapainya target
5	Indeks Infrastruktur Daerah (Nilai) (Halaman 298-317)	84.65%	ada	ada	Belum ada secara spesifik menerangkan bagian mana yang menjadi faktor penyebab kegagalan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan	Agar menambahkan kalimat penghubung yang menerangkan faktor yang menjadi penyebab belum tercapainya target
7	Indeks Pelayanan Publik (Nilai) (Halaman 431-435)	84.31%	ada	ada	Belum ada secara spesifik menerangkan bagian mana yang menjadi faktor penyebab kegagalan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan	Agar menambahkan kalimat penghubung yang menerangkan faktor yang menjadi penyebab belum tercapainya target

l. Analisa pelaksanaan Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target kinerja :

Telah terdapat uraian terkait dengan pelaksanaan program/kegiatan dalam mendukung capaian kinerja disertai dengan visualisasi pelaksanaan program/kegiatan.

m. Penyajian analisis efektivitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya.

Terdapat penyajian analisis efektivitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya. Dalam LKjIP telah disajikan perhitungan efektivitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya khususnya anggaran di setiap capaian kinerja. Rumus yang digunakan adalah :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}\left((PAKi \times CKi) - RAKi\right)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

Belum ada keterangan terkait dengan sumber atau dasar penggunaan rumus tersebut, dan interprestasi (tafsiran) terhadap nilai yang diperoleh dari capaian efisiensi tersebut.

- Pada Indeks Infrastruktur Daerah (Nilai) nilai efisiensinya -14,56 belum diberi keterangan atau penjelasan terkait kondisi tersebut
- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Nilai) nilai efisiensinya 45,42% (di atas 20%) belum

diberi keterangan atau penjelasan terkait kondisi tersebut

- Indeks Risiko Bencana (Nilai) nilai efisiensinya 38,54% (di atas 20%) belum diberi keterangan atau penjelasan terkait kondisi tersebut.

n. Lain-Lain :

1. Penulisan sasaran pada Halaman 298 tertulis Tujuan :

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 8

Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan

2. Adanya indikator sasaran yang belum memiliki target kinerja pada halaman 59 :

Tabel 3.1.1
Tujuan dan indikator tujuan I

No	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 202
1	Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing Dengan Nilai-Nilai Agama	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	

3. Kesalahan penginputan realisasi kinerja pada tabel 3.7 di halaman 526 :

3	Nilai Raport Pendidikan (nilai)	74.46	24.46

4. Masih ditemukan penulisan kata “resiko” pada halaman 44, 376, 377, 378, 388, agar hal ini disesuaikan dengan penulisan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Demikian juga dengan “Katagori” di tabel halaman 401 dan 402 yang seharusnya ditulis “Kategori.

5. Terdapat penyajian grafik yang kurang informatif karenanya angkanya tumpang tindih (kurang jelas), yaitu grafik 3.1.1 halaman 61, 3.1.3 halaman 63, 3.16 halaman 65.

6. Penggunaan titik sebagai koma belum sesuai dengan kaidah penulisan dalam bahan Indonesia (misalnya 100.80%, 84.31%);

7. Masih terdapat tabel yang menggantung yaitu kepala tabel tidak terdapat pada lanjutan tabel di halaman berikutnya.

8. Masih terdapat *Footer* atau catatan kaki yang terletak di margin bawah setiap halaman dokumen bertuliskan Tahun 2024, misal pada halaman 53 sampai dengan 58.

9. Sebelum menyajikan singkatan tertentu disarakan menuliskan kepanjangan singkatan secara lengkap sebanyak 1 kali pada penulisan pertama dalam dokumen (misalnya penulisan DKPP).

10. Terdapat kalimat yang dipandang kurang tepat (halaman 91-92) :

> Angka tersebut juga masih berada di atas angka Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar 74,49 atau terpaut 0,39 di bawah angka Kabupaten Tanah Laut dan dibawah angka Nasional yaitu 74,47 untuk UHH Indonesia.

Saran :

Angka tersebut juga masih berada di atas angka Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Dibandingkan dengan angka provinsi sebesar 74,49 terpaut 0,39 di bawah angka Kabupaten Tanah Laut, sedangkan dibandingkan dengan angka nasional sebesar 74,47 terpaut 0,41.

11. Pada Bagian kesimpulan :

> Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap **12 Sasaran 23 Indikator Kinerja Utama** yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja seluruh indikator adalah 101,07% dengan rincian 24 (dua puluh empat) sasaran strategis dan 27 indikator dengan rincian **19 (Sembilan belas)** indikator dengan tingkat capaian kinerja berkategori **Sangat Tinggi** dengan rentang capaian lebih dari 90%, **2 (dua)** indikator dengan tingkat capaian **Baik** dengan rentang capaian di atas 76% s.d 90%, **1 (satu)** indikator belum rilis oleh BPS RI, dan **1 (satu)** indikator tidak dilaksanakan penilaian.

Rekomendasi uraian kalimat menjadi :

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap 12 Sasaran 23 Indikator Kinerja Utama yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa 18 (delapan belas) indikator telah berhasil memenuhi dan melampui target yang ditetapkan, 3 indikator belum memenuhi target, 1 (satu) indikator belum rilis oleh BPS RI, dan 1 (satu) indikator tidak dilaksanakan penilaian.

Berdasarkan penilaian Skala Nilai Predikat Kinerja diperoleh rata-rata nilai capaiannya adalah 101,07% dengan predikat sangat tinggi (capaian lebih dari 91%), yang terdiri atas 19 (sembilan belas) indikator dengan predikat **Sangat Tinggi** (capaian lebih dari 91%), 2 (dua) indikator dengan predikat "**tinggi**" (capaian 76% sampai dengan 90%).

IV. Saran

Dari beberapa catatan hasil reviu disarankan kepada Tim penyusun Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanah Laut untuk segera menidaklanjuti :

1. Terhadap penyajian yang masih terdapat adanya kesalahan dalam penulisan dan lain sebagainya dapat diperbaiki sebagaimana catatan dan rekomendasi tersebut di atas.
2. Terhadap grafik-grafik yang kurang informatif dan angkanya tumpang tindih, diupayakan untuk diperjelas dan ditambahkan tabel yang menampilkan data tersebut berdasarkan peringkat nilai Kabupaten/kota se Kalimantan Selatan dengan urutan mengacu pada urutan peringkat di Tahun 2025.

3. Terhadap adanya catatan terkait dengan substansi dapat dilakukan perbaikan sebagaimana catatan dan rekomendasi tersebut di atas.

V. Status tindak lanjut hasil rekomendasi tahun sebelumnya

Dari beberapa rekomendasi hasil reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten (LKjIP) Tanah Laut tahun sebelumnya, Tim Penyusun laporan sebagian besar telah melakukan tindak lanjut atas hasil reviu dengan melakukan perbaikan sesuai hasil rekomendasi.

VI. Penutup

Demikian Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025, disampaikan untuk menjadi perhatian dan bahan perbaikan selanjutnya.

Inspektorat Kabupaten Tanah Laut menyampaikan ucapan terimakasih kepada Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025, sehingga reviu dapat terlaksana sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Inspektur,

Andi Mashabi, AP., M.M
Pembina Tingkat I / IV/b
NIP. 197606231995111001

DAFTAR PENGHARGAAN TAHUN 2025

1. Penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) atas Menyelesaikan proses pengadaan Calon Aparatur Sipil Negar (CASN) tahun anggaran 2024



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

SERTIFIKAT PENGHARGAAN

Nomor: 086/SR/K/IV/2025

Dengan Bangga Diberikan Kepada :

Pemerintah Kab. Tanah Laut

merupakan

Instansi di Wilayah Kerja Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin yang telah Menyelesaikan Proses Pengadaan CASN Tahun Anggaran 2024

JAKARTA, 16 APRIL 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, S.H., M.H

@BKNgoid @BKNgoidofficial www.bkn.go.id

2. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Tala) meraih penghargaan Tata Kelola Pemerintahan indeks berAKHLAK Terbaik II (kategori Sehat)



3. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Pemkab Tala) Provinsi Kalimantan Selatan Menerima Penghargaan Tingkat Keselarasan Tertinggi RPJPD Kabupaten Dalam Kategori Edukasi Dan Perilaku Hidup Sehat



4. Bupati Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), H. Rahmat Trianto Meraih Prestasi Nasional Sebagai Penerima Top Government Public Relations (GPR) Award 2025 Pada Ajang 5th Top GPR Award 2025 Diselenggarakan GPR Institute Di Jakarta



5. Penghargaan Top BUMD Award 2025 Anugerah Bintang 4 Se Indonesia



6. Penghargaan Pemimpin Daerah Award Tahun 2025 Kategori Pembangunan Ekonomi Daerah



7. Penghargaan Digital Innovation Awards (DIA) 2025 Kategori Apresiasi Digital Innovation Public Service



8. Penghargaan PGM Award 2025 kategori Pemerintah dari Persatuan Guru Madrasah (PGM) Indonesia



9. Penghargaan Terbaik I kategori Rumah Dataku Digital Apresiasi Rumah Dataku Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025



10. Penghargaan Kategori LPPL Paling Inovatif Pada Ajang Anugerah 5th Persada ID Award 2025



11. Penghargaan PENAIS AWARD 2025 Penyuluh Agama Islam



12. Penghargaan Alumni Kehormatan IPDN, Bupati Tanah Laut Rahmat Trianto



13. Piagam Penghargaan Museum Rekor-Dunia Indonesian Atas Rekor Penerbangan Layang-Layang Dandang Terbanyak



14. Penghargaan Dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel, Karena Ikut Berpartisipasi Dan Mendukung Pembangunan Gedung Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.



15. Penghargaan Dari Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia Atas Dukungan Dan Kerjasama Dalam Proses Pembangunan Markas Komando Binda Kalimantan Selatan



16. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hadji Boejasin Pelaihari Meraih Penghargaan Farmasi Award 2025



17. Penghargaan Kategori Pencapaian Cek Kesehatan Gratis (CKG) Terbaik Ketiga Se-Kalimantan Selatan (Kalsel)

